2025

Nomor : 08.13/RIS/III/2025

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Jumat, 14 Maret 2025

1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
   a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
   b. Penyelenggaraan Pemakaman.
2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
3. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang:
   a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);
   b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
   c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
   d. Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   e. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Rencana Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou, Republik Ceko.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Jumat, 14 Maret 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara :

1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
   a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
   b. Penyelenggaraan Pemakaman.
2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
3. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang:
   a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);
   b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
   c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
   d. Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   e. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Rencana Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou, Republik Ceko.

Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 13.40 WIB
Waktu Selesai Rapat : 15.20 WIB

Pimpinan Rapat :

1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. — Sakit
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. — Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro — Hadir

Peserta :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Wali Kota Yogyakarta dan Wakil Wali Kota Yogyakarta.
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wali Kota Yogyakarta dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Hadirin dimohon berdiri.

  ------- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -------
- Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.

------- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -------

Hadirin disilakan duduk kembali.

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
HARI JUMAT, TANGGAL 14, BULAN MARET, TAHUN 2025

DENGAN ACARA :

1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
   a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
   b. Penyelenggaraan Pemakaman.
2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
3. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang:
   a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);
   b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
   c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
   d. Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   e. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Rencana Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou, Republik Ceko.

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Protokol.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota Yogyakarta dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu dan hadirin sekalian dalam rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Plt. Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 28 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.

Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Jum'at, 14 Maret 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Mengawali Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta hari ini adalah:

1. Penyampaian penjelasan Wali Kota Yogyakarta atas 2 (dua) raperda, yaitu :
    a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
    b. Penyelenggaraan Pemakaman.
2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta disilahkan.

--- PENJELASAN & LAPORAN WALI KOTA YOGYAKARTA ---

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan penjelasan atas 2 (dua) raperda dimaksud serta penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.
Untuk menindaklanjuti atas 2 (dua) raperda serta penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 tersebut, maka DPRD Kota Yogyakarta akan membentuk 3 (tiga) panitia khusus yaitu;

1. Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
2. Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman.
3. Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

Namun untuk efisiensi waktu maka pembacaan dan penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta dimaksud akan dilaksanakan secara bersamaan dengan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta yang lain.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.
Agenda selanjutnya Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta hari ini adalah Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta.
Perlu kami sampaikan bahwa DPRD Kota Yogyakarta beberapa waktu yang lalu telah membentuk Panitia Khusus Penyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta.
Pokok-Pokok Pikiran DPRD tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu bahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, untuk mendukung dan meningkatkan kualitas perencanaan melalui proses perencanaan berbasis elektronik atau *e-Planning* dan akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
Untuk itu sebelumnya akan disampaikan Kesimpulan Pansus Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta, kepada Juru Bicara Pansus disilahkan.

----- PENYAMPAIAN KESIMPULAN PANSUS -----

----- (Fajar Kurniawan, S.I.P)-----

Terima kasih saya sampaikan kepada Juru Bicara Pansus yang telah menyampaikan Laporannya.
Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,
Berdasarkan kesimpulan tersebut, selanjutnya saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan, apakah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta dapat disetujui ?
Jawab : Setuju.

- **Ketok Palu 1 (satu) kali (X)**

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat layanan publik, terutama dalam bidang promosi wisata, budaya, UMKM, pendidikan, serta kepemudaan, Pemerintah Kota Yogyakarta resmi menjalin kerja sama kota bersaudara (*sister city*) dengan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou, Republik Ceko. Langkah awal kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) oleh Penjabat Wali Kota Yogyakarta dan Wali Kota Hluboka nad Vltavou pada tanggal 20 Mei 2024. Kerjasama meliputi berbagai bidang diantaranya promosi pariwisata, pertukaran dan pertunjukan budaya, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta pendidikan dan kepemudaan.

Selanjutnya Penjabat Wali Kota Yogyakarta telah mengirim surat kepada DPRD Kota Yogyakarta Nomor 100.3.7/409 perihal Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Sama Kota Bersaudara *(sister city)* antara Kota Yogyakarta, Republik Indonesia dan Kota Hluboka nad Vltavou, Republik Ceko tertanggal 4 Februari 2025.

Menindaklanjuti surat tersebut, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta telah mengadakan rapat dengan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta guna merancang implementasi konkret dari kesepakatan ini. Kerja sama ini merupakan salah satu strategi membangun jaringan internasional yaitu melalui konsep *sister city* dan diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Yogyakarta sebagai destinasi wisata global. Tujuan utama kerja sama *sister city* ini adalah memperkenalkan Kota Yogyakarta secara lebih luas melalui berbagai media internasional, sehingga Kota Yogyakarta semakin dikenal sebagai kota destinasi wisata unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan mancanegara serta memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata juga diharapkan mengalami kenaikan signifikan.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri bahwa salah satu tahapan perikatan kerja sama menggunakan Memorandum Saling Pengertian (MSP) atau *Memorandum of Understanding (MoU)* harus didahului dengan persetujuan DPRD Kota Yogyakarta.

Oleh karena itu agenda selanjutnya rapat paripurna hari ini adalah Penetapan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Rencana Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou, Republik Ceko.

Sebelumnya, akan dibacakan 5 (lima) Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang;

1. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
2. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Penyelenggaraan Pemakaman.

3. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.
4. Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
5. Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Rencana Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou, Republik Ceko.

Untuk itu Kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD, disilahkan membacakan 5 (lima) rancangan keputusan DPRD Kota Yogyakarta tersebut.

----- PEMBACAAN 5 (LIMA) RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD -----

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD yang telah membacakan 5 (lima) rancangan Keputusan DPRD tersebut.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan telah dibacakannya 5 (lima) Rancangan Keputusan DPRD tersebut, selanjutnya kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah 5 (lima) Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang:

1. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);
2. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Penyelenggaraan Pemakaman;
3. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
4. Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
5. Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Rencana Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou, Republik Ceko.

untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dapat disetujui?

Jawab : Setuju.

- **Ketok Palu 1 (Satu) kali. (X)**

Terima kasih.

Selanjutnya kami silahkan kepada Plt. Sekretaris DPRD, untuk memberikan nomor bagi Keputusan DPRD dimaksud !

Plt. Sekretaris DPRD

Jawab :

1. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).; diberi **Nomor 5/ KEP/DPRD/III/2025.**
2. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman, diberi **Nomor 6/ KEP/DPRD/ III/2025.**

3. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, diberi **Nomor 7/ KEP/DPRD/ III/2025.**
4. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025, diberi **Nomor 8/ KEP/DPRD/ III/2025.**
5. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Rencana Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou, Republik Ceko, diberi **Nomor 9/ KEP/DPRD/III/2025.**

Terimakasih.

Interupsi.

Sdr. Tri Waluko Widodo, A.Md.

Mohon izin pimpinan, Tri Waluko dari Fraksi PAN. Mohon penjelasan pimpinan khususnya untuk persetujuan DPRD dengan Pemerintah Ceko. Ini pada prinsip dan intinya kami menyetujui hanya saja mohon penjelasan dalam menjalin kerjasama ini memang merupakan domain dari Komisi B untuk DPRD kota Yogyakarta, hanya saja dalam lingkup materinya di sini disebutkan bahwasanya ruang lingkup promosi pariwisata, pertukaran dan pertunjukan budaya dan pengembangan usaha kecil dan menengah, dan selanjutnya pendidikan dan kepemudaan. Apakah dalam pembahasan kerja sama ini apakah sudah dilakukan dengan memanggil mitra OPD terkait? Kalau Komisi B mungkin bisa memanggil dari Dinas Pariwisata, dan UKM, hanya saja dalam hal pendidikan dan kebudayaan ini apakah dalam pembahasan kerja sama ini melibatkan Komisi D juga? Yang merupakan dinas dinas tersebut merupakan minta kerja dari Komisi D. Mungkin itu dulu pimpinan, mohon penjelasannya, terimakasih.

Sdr. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. (Pimpinan Sidang)

Terima kasih, saudara Tri Waluko, saya kira nanti setelah dilakukan persetujuan terkait dengan kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Republik Ceko, dipersilakan nanti di forum rapat gabungan antara Komisi B dan Komisi D untuk kemudian ditindaklanjuti, saya kira begitu. Bagaimana saudara Tri Waluko bisa diterima?

Sdr. Tri Waluko Widodo, A.Md.

Njih, jadi pada prinsipnya untuk selanjutnya dalam pembahasan dan juga nantinya penandatanganan kerjasama dengan khususnya pemerintah luar negeri juga atau yang lainnya luar daerah, ini dalam pembahasan lingkup materinya melibatkan rekan-rekan dari Komisi terkait. Saya kira seperti itu, jadi jangan hanya untuk kerjasamanya tapi juga kita perlu mengetahui dan juga membahas untuk materinya, karena bagaimanapun ini merupakan hal yang berkaitan dan berkonsekuensi anggaran untuk mitra OPD Komisi, terimakasih pimpinan.

Sdr. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. (Pimpinan Sidang)

Ya, terima kasih saudara Tri Waluko jadi intinya bahwa pada rapat paripurna ini, DPRD menyetujui terkait dengan rencana kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Republik Ceko, terkait dengan nanti hal-hal atau kemudian menjadi fokus dari kerja sama tadi sudah disampaikan ada beberapa bidang, ada pendidikan, ada UKM, ada pariwisata, nanti akan kita tindak lanjuti dalam forum rapat gabungan, antar Komisi yang membidangi terkait dengan beberapa materi kerja sama ini dalam forum rapat kerja dengan mengundang mintra kerja yang sesuai dengan bidang yang akan dikerja samakan. Saya kira begitu, terimakasih.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.
Acara berikutnya adalah penandatanganan 5 (lima) Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tersebut. Selanjutnya untuk ketertiban proses pelaksanaan penandatanganan, kami silahkan Pembawa Acara Sekretariat Dewan untuk memandu jalannya acara.

PEMBAWA ACARA :

Terimakasih.
Penandatanganan 5 (lima) Keputusan DPRD Kota Yogyakarta. Yang kami hormati Pimpinan DPRD dimohon untuk menempatkan diri, kepada hadirin mohon berkenan berdiri.

----- PENANDATANGANAN 5 (LIMA) KEPUTUSAN DPRD -----

Yang kami hormati Pimpinan DPRD dimohon untuk kembali ke tempat duduk masing-masing.
Rangkaian acara penandatanganan telah selesai, untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna selanjutnya kami haturkan kembali kepada Ketua Rapat Paripurna Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Perlu kami sampaikan bahwa setelah pembentukan pansus pada rapat paripurna hari ini, mohon kepada masing-masing Panitia Khusus untuk melaksanakan rapat internal guna menindaklanjuti jadwal kegiatan yang telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah serta menetapkan agenda dan tatakala pembahasan sehingga target penyelesaian pembahasan dapat tercapai tepat waktu.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Yogyakarta dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.
Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini. Akhirnya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok palu 3 (tiga) kali. (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

PEMBAWA ACARA :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,	Plt. SEKRETARIS,
RM. SINARBIYATNUJANAT,S.E.	ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.
	NIP. 197106301996031003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Jln. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

NOTULEN RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Jumat, 14 Maret 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara :

1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
   a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
   b. Penyelenggaraan Pemakaman.
2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
3. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang:
   a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);
   b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
   c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
   d. Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   e. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Rencana Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou, Republik Ceko.

Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 13.40 WIB
Waktu Selesai Rapat : 15.20 WIB

Pimpinan Rapat :

1.	FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.	Sakit
2.	RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.	Hadir
3.	Triyono Hari Kuncoro	Hadir

Peserta :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Wali Kota Yogyakarta dan Wakil Wali Kota Yogyakarta.
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Hasil Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 28 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Wali Kota Yogyakarta menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 serta Penjelasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang:
   a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);
   b. Penyelenggaraan Pemakaman.
3. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) diberi Nomor : 5/KEP/DPRD/III/2025.
4. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman, diberi Nomor : 6/KEP/DPRD/ III/2025.
5. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, diberi Nomor 7/ KEP/DPRD/ III/2025.
6. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025, diberi Nomor : 8/KEP/DPRD/ III/2025.
7. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Rencana Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou, Republik Ceko, diberi Nomor : 9/KEP/DPRD/III/2025.
8. Masing-masing Panitia Khusus untuk melaksanakan rapat internal guna menindaklanjuti jadwal kegiatan yang telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah serta menetapkan agenda dan tatakala pembahasan sehingga target penyelesaian pembahasan dapat tercapai tepat waktu

Wakil Ketua,

RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 13 Maret 2025

Nomor : 100.1.4.4 /357
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr.

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jum'at, 14 Maret 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara :
1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang;
   a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)
   b. Penyelenggaraan Pemakaman
2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
3. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang;
   a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)
   b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman
   c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024
   d. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta
   e. Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Rencana Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sister City Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou Republik Ceko

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA,

RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦫꦶꦠꦺꦴꦤ꦳ꦏꦺꦴꦛ꦳ꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦛ꦳ ꦥꦫ꦳ꦶ ꦥꦸꦂꦤ꦳ ꦢ꦳ꦺꦴꦤ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Maret 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara :
1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
   a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
   b. Penyelenggaraan Pemakaman.
2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
3. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang:
   a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);
   b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
   c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
   d. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta;
   e. Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Rencana Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sister City Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou Republik Ceko.

LEGISLATIF

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
1.	Sdr. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.	Ketua DPRD	1.	
2.	Sdr. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.	Wakil Ketua Satu DPRD	2.	
3.	Sdr. Triyono Hari Kuncoro	Wakil Ketua dua DPRD	3.	
4.	Sdr. H. Danang Rudiyatmoko	Anggota DPRD	4.	
5.	Sdr. Subagyo	Anggota DPRD	5.	
6.	Sdr. Ipung Purwandari, S.H.	Anggota DPRD	6.	
7.	Sdr. Endro Sulaksono	Anggota DPRD	7.	
8.	Sdr. Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota DPRD	8.	
9.	Sdr. Darini, S.IP.	Anggota DPRD	9.	
10.	Sdr. Sigit Nurcahyo, S.H.	Anggota DPRD	10.	
11.	Sdr. Novita Mawar Sharon	Anggota DPRD	11.	
12.	Sdr. Haryanto, S.E.	Anggota DPRD	12.	
13.	Sdr. Agus Riyanto	Anggota DPRD	13.	
14.	Sdr. Bambang Seno Baskoro, S.T	Anggota DPRD	14.	
15.	Sdr. Yogo Prasetyo Prihutomo	Anggota DPRD	15.	
16.	Sdr. Munazar, M.Psi.	Anggota DPRD	16.	
17.	Sdr. Muhammad Affan	Anggota DPRD	17.	
18.	Sdr. R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota DPRD	18.	
19.	Sdr. Dhian Novitasari, S.Pd.	Anggota DPRD	19.	
20.	Sdr. Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota DPRD	20.	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦯꦼꦏ꧀ꦫꦼꦠꦫꦶꦪꦠ꧀ ꦢꦥ꧀ꦫ ꦔꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Maret 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara :
1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
   a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
   b. Penyelenggaraan Pemakaman.
2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
3. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang:
   a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);
   b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
   c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
   d. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta;
   e. Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Rencana Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sister City Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou Republik Ceko.

LEGISLATIF

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
21.	Sdr. Marwoto Hadi, S.H.	Anggota DPRD	21.	
22.	Sdr. Krisnadi Setyawan	Anggota DPRD	22.	
23.	Sdr. Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota DPRD	23.	
24.	Sdr. Dwi Candra Putra, S.P.,M.I.P.	Anggota DPRD	24.	
25.	Sdr. Oleg Yohan	Anggota DPRD	25.	
26.	Sdr. Choliq Nugroho Adji	Anggota DPRD	26.	
27.	Sdr. Eko Djoko Widiyatno, S.H., M.H.	Anggota DPRD	27.	
28.	Sdr. Solihul Hadi, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	28.	
29.	Sdr. Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota DPRD	29.	
30.	Sdr. Nurcahyo Nugroho	Anggota DPRD	30.	
31.	Sdr. Mu'adz A.A., S.E., M.E.	Anggota DPRD	31.	
32.	Sdr. Fajar Kurniawan, S.IP.	Anggota DPRD	32.	
33.	Sdr. Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota DPRD	33.	
34.	Sdr. Affan Baskara Patria, S.IP.	Anggota DPRD	34.	
35.	Sdr. Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota DPRD	35.	
36.	Sdr. Mohammad Sofyan, S.T.	Anggota DPRD	36.	
37.	Sdr. H. Setyaji Hermawan	Anggota DPRD	37.	
38.	Sdr. Agus Trianto	Anggota DPRD	38.	
39.	Sdr. Taufiq Setiawan, S.Sn.	Anggota DPRD	39.	
40.	Sdr. I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.	Anggota DPRD	40.	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦫꦶꦤ꧀ꦠꦃꦏꦼꦠꦃꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Maret 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
   a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
   b. Penyelenggaraan Pemakaman.
2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
3. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang:
   a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);
   b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
   c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
   d. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta;
   e. Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Rencana Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sister City Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou Republik Ceko.

No	Nama		Tanda Tangan		Ket
1.	dr. H. HASTO WARDOYO, Sp.Og (K)	WALI KOTA YOGYAKARTA	1.		
2.	WAWAN HARMAWAN, S.E., M.M..	WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA		2.	
3.	Arif S	KODIM 0734	3.		
4.	CUKIYO AGNA ARI SEPTYAN S.I.K	POLRESTA		4.	
5.		PENGADILAN NEGERI	5.		
6.		KEJAKSAAN NEGERI		6.	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦼꦩꦶꦂꦶꦠꦃꦏꦺꦴꦛꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Maret 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara :
1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
   a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
   b. Penyelenggaraan Pemakaman.
2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
3. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang:
   a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);
   b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
   c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
   d. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta;
   e. Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Rencana Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sister City Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou Republik Ceko.

EKSEKKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Aman		Sekretariat daerah	1.	
2.			Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.	
3.	Kadi. R.		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	3.	
4.	Deni Sudrian		Asisten Administrasi Umum	4.	
5.	Heru Yul		Staf Ahli Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraa	5.	
6.	Hery		Staf Ahli Bid. Perekonomian dan Pembangunan	6.	
7.			Staf Ahli Bid. Administrasi Umum	7.	
8.			Sekretariat DPRD	8.	
9.	Sabarjiman		Bagian Tata Pemerintahan	9.	
10.	Rahmat		Bagian Hukum	10.	
11.	Ulin A		Bagian Kesejahteraan Rakyat	11.	
12.	Agung T		Bagian Administrasi Pembangunan	12.	
13.	Purbut		Bagian Perekonomian dan Kerjasama	13.	
14.	Endah Dwi		Bagian Umum dan Protokol	14.	
15.	Beta N		Bagian Organisasi	15.	
16.	Hertanto		Bagian Administrasi dan Keuangan	16.	
17.	Yoko		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	17.	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦫꦶꦤ꧀ꦠꦃꦏꦼꦠꦃꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Maret 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
   a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
   b. Penyelenggaraan Pemakaman.
2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
3. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang:
   a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);
   b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
   c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
   d. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta;
   e. Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Rencana Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sister City Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou Republik Ceko.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Fitri Paulina T.		Inspektorat	1.	
2.	Agus Tri H		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.	
3.	Anas		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.	
4.	Dedi Budiman		BKPSDM	4.	
5.	Wibisana		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.	
6.	Agus H		BPBD	6.	
7.	Rina		RSUD	7.	
8.	Mahya		PDAM Tirta Marta	8.	
9.	Cosim		PD BPK Bank Jogja	9.	
10.	Gunawan K.H.		BPD DIY Cab. Senopati	10.	
11.	Windy		PD Jogjatama Vishesha	11.	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦫꦶꦤ꧀ꦠꦃꦏꦺꦴꦛꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Maret 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
   a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
   b. Penyelenggaraan Pemakaman.
2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
3. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang:
   a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);
   b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
   c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
   d. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta;
   e. Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Rencana Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sister City Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou Republik Ceko.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.	
2.		IV	Dinas Kesehatan	2.	
3.	Uni A		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.	
4.	Lucia Dwiyo Krismawati		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4.	
5.			Satuan Polisi Pamong Praja	5.	
6.			Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.	
7.			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.	
8.	Septi S.R		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.	
9.			Dinas Perdagangan	9.	
10.	B. Fitriani		Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	10.	
11.	ISMAYANTI		Dinas Pertanian dan Pangan	11.	
12.			Dinas Lingkungan Hidup	12.	
13.			Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	13.	
14.	BAYU STP		Dinas Perhubungan	14.	
15.	Tedi		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.	
16.	TRI SOLYA		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	16.	
17.			Dinas Pariwisata Tipe A	17.	
18.			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.	
19.			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19.	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦫꦶꦤ꧀ꦠꦃꦏꦺꦴꦛꦠ꧀ꦗꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Maret 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
   a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
   b. Penyelenggaraan Pemakaman.
2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
3. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang:
   a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);
   b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
   c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
   d. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta;
   e. Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Rencana Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sister City Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Pemerintah Kota Hluboka nad Vltavou Republik Ceko.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.			Kemantren Danurejan	1.	
2.			Kemantren Gedongtengen	2.	
3.			Kemantren Gondokusuman	3.	
4.			Kemantren Gondomanan	4.	
5.			Kemantren Jetis	5.	
6.			Kemantren Kotagede	6.	
7.			Kemantren Kraton	7.	
8.			Kemantren Mantrijeron	8.	
9.			Kemantren Mergangsan	9.	
10.	~~AGUNG P~~		Kemantren Ngampilan	10.	
11.	AGUNG P		Kemantren Pakualaman	11.	
12.	S. Chandra Y		Kemantren Tegalrejo	12.	
13.	Erna K.		Kemantren Umbulharjo	13.	
14.			Kemantren Wirobrajan	14.	

WALI KOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦛ

PENJELASAN WALI KOTA YOGYAKARTA

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

1. PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.
2. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOGJA (PERSERODA).

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan, dan Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Saudara-saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan perkenan, rahmat, dan karunia-Nya kita sekalian dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta atas perkenan dan kesempatan yang diberikan kepada kami eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat ini mempunyai peraturan mengenai pemakaman yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, Peraturan Daerah tersebut saat ini sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan hukum serta masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang baru mengenai Penyelenggaraan Pemakaman.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman ini disusun sebagai respons atas dinamika sosial dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, di mana kebutuhan akan sistem penyelenggaraan pemakaman yang lebih tertib, efisien, dan humanis menjadi sangat mendesak. Melalui Rancangan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, terintegrasi, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan serta kearifan lokal.

Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur secara menyeluruh berkaitan dengan aspek penyelenggaraan pemakaman, mulai dari perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi terkait Tempat Pemakaman, Krematorium, Penyimpanan Abu Jenazah. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pengurusan jenazah, tata cara pelaksanaan pemakaman, pengelolaan kawasan pemakaman, sampai dengan penyediaan fasilitas penunjang bagi keluarga yang sedang berduka. Rancangan Peraturan Daerah ini juga memberikan pengaturan yang jelas mengenai standar operasional prosedur yang harus diikuti oleh setiap penyedia layanan pemakaman.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjaga estetika dan kesehatan lingkungan hidup, yang sejalan dengan upaya peningkatan kualitas ruang publik di Kota Yogyakarta.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini, partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan kami utamakan. Diskusi dan konsultasi telah dilakukan dengan tokoh agama, sesepuh masyarakat, praktisi di bidang kesehatan, serta pengelola pemakaman. Keterlibatan ini bertujuan agar setiap kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Lebih jauh lagi, Rancangan Peraturan Daerah ini mendorong adanya koordinasi lintas sektoral antara instansi pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk menjamin bahwa setiap tahapan penyelenggaraan pemakaman terlaksana dengan baik dan optimal. Selaras

dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap proses dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan ketertiban umum.

Kami berharap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman ini dapat diterima dan disetujui bersama oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan diterapkannya Rancangan Peraturan Daerah ini, diharapkan akan tercipta sistem penyelenggaraan pemakaman yang tidak hanya tertib dan efisien, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemanusiaan. Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOGJA (PERSERODA)

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perumda BPR Bank Jogja Menjadi PT BPR Bank Jogja (Perseroda).

Adanya Peraturan Daerah tersebut, telah ditindaklanjuti dengan pengurusan pengesahan pendirian Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0092871.AH.01.01.TAHUN 2024 pada tanggal 22 November 2024 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT BPR Bank Jogja.

Dengan adanya pengesahan PT BPR Bank Jogja, maka aturan mengenai Penyertaan Modal yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perumda BPR Bank Jogja harus dilakukan penyesuaian.

Rancangan Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian terhadap pelaksanaan kewajiban pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Jogja dengan tata kala baru sebagai bentuk pemenuhan penyertaan modal yang belum terealisasi tanpa merubah besar modal dasar yang telah ditetapkan.

Tata kala penyertaan modal yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini telah disusun berdasarkan analisis investasi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga diharapkan tidak akan memberatkan keuangan daerah dan memiliki manfaat maksimal untuk peningkatan pelayanan PT BPR Bank Jogja. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp.350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar) dengan sisa modal Pemerintah Daerah yang belum disetorkan sebesar Rp195.460.000.000 (seratus sembilan puluh lima miliar empat ratus enam puluh juta ribu rupiah) akan dipenuhi dalam tujuh tahapan.

Rancangan Peraturan Daerah ini juga tetap mempertahankan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap UMKM dengan mengamanatkan kredit modal kerja kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari total modal disetor.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikianlah penjelasan kami atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, dengan harapan kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta berkenan untuk membahas dan dapat menyetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan penjelasan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Yang Terhormat.

Atas perhatian Peserta Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami ucapkan terima kasih.

Sekian,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Jogja Istimewa, Untuk Indonesia, Jaya!

Yogyakarta, 14 Maret 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

NOTA PENGANTAR
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
KEPADA DPRD KOTA YOGYAKARTA

2024

TAHUN ANGGARAN 2024

NOTA PENGANTAR

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Segenap Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Seluruh Anggota DPRD Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Sekda, Asisten, Tenaga Ahli Wali Kota, dan Staf Ahli Wali Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Kepala OPD se- Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Kepala BUMD; dan

Hadirin yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan karunia, rahmat dan berkah-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta terkait penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

Peserta sidang paripurna DPRD yang kami hormati,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 69 ayat (1) "Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah". Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) berisi tentang informasi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disampaikan

sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Selanjutnya berdasarkan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peserta sidang paripurna DPRD yang kami hormati,

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual. Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah: “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan

adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama empat tahun mulai 2023 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Peserta sidang paripurna DPRD yang kami hormati,

Berikut kami sampaikan penjelasan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah ditargetkan Rp. 2.012.798.122.693,30 (dua triliun dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah tiga puluh sen). Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.081.580.284.914,30 (dua triliun delapan puluh satu milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh sen) atau 103, 42%, yang terdiri dari:

1. **Pendapatan Asli Daerah**

   Pendapatan asli Daerah ditargetkan Rp 781.054.844.583,30 (tujuh ratus delapan puluh satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh sen). Dari target tersebut terealisasi Rp 855.100.858.914,30 (delapan ratus lima puluh lima milyar seratus juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh sen) atau 109,48%.

2. **Pendapatan Transfer**

   Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer ditargetkan Rp. 1.229.983.278.110,00 (satu triliun dua ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah). Dari target tersebut terealisasi Rp.1.225.143.426.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh lima milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau 99,61%.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun anggaran 2024, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp.1.336.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) atau 75,91% dari target sebesar Rp.1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

B. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Pada tahun anggaran 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.223.246.284.420,81 (dua triliun dua ratus dua puluh tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu empar ratus dua puluh rupiah delapan puluh satu sen) dan terealisasi sebesar Rp. 2.091.367.191.908,80 (dua triliun sembilan puluh satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan ribu delapan puluh sen) atau sebesar 94,07% dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi ditargetkan Rp. 1.883.190.658.399,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh tiga milyar seratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.790.533.974.907,80 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh milyar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah delapan puluh sen) atau 95,08%.

2. Belanja Modal

Belanja modal ditargetkan Rp.320.045.037.616,00 (tiga ratus dua puluh milyar empat puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah). Dari anggaran belanja tersebut terealisasi sebesar Rp.296.224.425.411,00 (dua ratus sembilan puluh enam milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus sebelas rupiah) atau 92,56%.

3. **Belanja Tak Terduga**

   Belanja tak terduga ditargetkan sebesar Rp.17.946.858.815,81 (tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah delapan puluh satu sen). Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.545.062.000,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta enam puluh dua ribu rupiah) atau 19,75 %.

4. **Belanja Transfer**

   Belanja transfer ditargetkan Rp. 2.063.729.590,00 (dua milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.063.729.590,00 (satu milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) atau 51,54%.

C. Pembiayaan daerah

Pembiayaan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah.

1. Pada tahun anggaran 2024 ditargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 275.415.161.727,51 (dua ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus lima belas juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh satu sen) yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Dari target tersebut terealisasi Rp. 275.415.161.727,51 (dua ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus lima belas juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh satu sen) atau 100%.
2. Pada tahun anggaran 2024 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.64.967.000.000,00 (enam puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Kota Yogyakarta kepada PT. Bank BPD DIY sebesar Rp.64.967.000.000,0 (enam puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) Dari anggaran tersebut terealisasi Rp.64.967.000.000,00 (enam puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau 100%.

Peserta sidang paripurna DPRD yang kami hormati,

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah pada tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 terbagi menjadi menjadi 4 (empat) urusan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Fungsi Pendukung dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah. Dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar meliputi 6 (enam) urusan antara lain: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan urusan sosial. Untuk urusan wajib non pelayanan dasar meliputi 18 (delapan belas) urusan antara lain: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan persandian. Untuk urusan pilihan meliputi 6 (enam) urusan antara lain: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Sedangkan untuk fungsi pendukung urusan pemerintahan terdiri dari 2 (dua) urusan yaitu administrasi pemerintahan dan pengawasan. Sementara untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan terdiri dari 5 (lima) urusan yaitu: perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Secara umum penyelenggaraan urusan pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik sesuai dengan target yang diharapkan, meskipun pada beberapa aspek masih ada kegiatan yang harus diperbaiki pada tahun berikutnya. Adapun penjelasan realisasi program kegiatan masing–masing urusan secara terinci dan detail dapat dibaca dalam buku lampiran yang merupakan bagian dari Nota Pengantar Keterangan Pertanggungjawaban ini.

Peserta sidang paripurna DPRD yang kami hormati,

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan secara berkala secara triwulanan dan tahunan dengan sistem desk timbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui pembandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi.

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2024 yang diperbandingkan dengan target Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut ini :

1. Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah. Penetapan sasaran dan indikatornya tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 Angka rata-rata lama sekolah di kota Yogyakarta pada tahun 2024 adalah sebesar 12,11 tahun dari target 11,12 tahun dengan persentase capaian sebesar 100%.
2. Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pariwisata, dengan indikator Rata-Rata belanja wisatawan yang merupakan indikator kinerja baru yang menggantikan indikator kinerja sebelumnya yaitu Lama Tinggal Wisatawan (*Length of Stay*) sesuai rekomendasi BPKP yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor PE.09.03/LHP-27/PW12/3/2024. Rata-rata belanja wisatawan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 menurut kajian Dinas Pariwisata per periode Januari hingga Oktober 2024 mencapai Rp2.245.736. Nilai ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000, sehingga capaian kinerjanya mencapai 112,29%.
3. Sasaran 3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan daerah tercermin dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pada tahun 2024 pemerintah kota Yogyakarta menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,08% - 5,76% dan telah tercapai sebesar 5,05% dengan persentase capaian 99,41%.
4. Sasaran 4 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat, Sasaran ini menggunakan tolok ukur angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.. Angka kemiskinan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 sebesar 6,26% dari target yang telah ditetapkan sebesar 6,13% - 6,48% dengan persentase capain 100%.
5. Sasaran 5 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Pengukuran sasaran ini menggunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yakni persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Pengukuran persentase kesesuaian pemanfaatan pola ruang di Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara membandingkan luas rencana dalam dokumen RDTR

dengan luas eksisting pada tahun 2024, sehingga menghasilkan nilai sebesar 85,26% dari target sebesar 85,23% dengan persentase ketercapainnya pada tahun 2024 sebesar 100,04%.

6. Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dapat diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target nilai IKLH yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 55,19 dan tercapai sebesar 55,53 dengan persentase capaian 100,62%
7. Sasaran 7 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dengan indikator Indeks Keberdayaan Masyarakat. Pada tahun 2024 indeks keberdayaan masyarakat yang diperoleh adalah sebesar 81,85 dari target 78,00dengan persentase capaian 104,94%
8. Sasaran 8 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan, Untuk mengukur sasaran kedelapan ada 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan yakni nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun rata-rata capaian kedua indikator sasaran ini adalah 100% dengan kategori predikat sangat tinggi, yaitu nilai A untuk akuntabilitas kinerja pemerintah dan predikat WTP bagi Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.
9. Sasaran 9 Menurunnya Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat, sasaran ini diukur melalui indikator menurunnya angka kriminalitas dan menurunnya jumlah pelanggaran perda. Adapun realisasi terhadap indikator menurunnya angka kriminalitas yaitu terdapat 637 kasus kriminalitas sepanjang tahun 2024 dari target sebanyak 700 kasus kriminalitas, dengan persentase capaian 109%. Sedangkan untuk indikator menurunnya jumlah pelanggaran perda terdapat 2.506 pelanggaran dari target sebanyak 4.170 pelanggaran perda dengan presentase capaian 139,90%.
10. Sasaran 10 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Pada tahun 2024 nilai indeks pengembangan insfrasruktur wilayah terealisasi sebesar 88,72 dari target sebesar 92,13 dengan capaian 96,30%
11. Sasaran 11 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, sasaran ini diukur dengan indikator angka harapan hidup, pada tahun 2024 angka harapan hidup dikota Yogyakarta mencapai 75,73 tahun dari target yang telah ditetapkan yaitu 75,53 tahun, dengan demikian capaian saasaran ini mencapai 100,26%.

Peserta sidang paripurna DPRD yang kami hormati,

Pelaksanaan berbagai program kerja dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2024 ini mendapat apresiasi dengan diterimanya berbagai penghargaan baik dari Pemerintah maupun swasta.

Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2024 antara lain:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta meraih tiga penghargaan dalam Penganugerahan Baznas Award 2024 pada Kamis 29 Februari 2024 di Bidakara Hotel Jakarta, yaitu pada kategori Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik, BAZNAS dengan Publikasi Konten Kantor Digital Teraktif dan BAZNAS dengan Operator SiMBA Terbaik.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Jumat 8 Maret 2024 di Kantor BPK RI Perwakilan DIY.
3. Pemerintah Kota Yogyakarta meraih lima penghargaan dalam acara puncak penghargaan TOP BUMD Awards 2024 yang diinisiasi oleh Majalah *Top Business* di Jakarta, Rabu 20 Maret 2024.
4. Enam lurah di Kota Yogyakarta mendapatkan anugerah *Non Litigation Peacemaker* (NLP) atas peran aktifnya sebagai juru perdamaian di wilayah. Lurah Rejowinangun, Lurah Suryatmajan, Lurah Gunungketur, Lurah Notoprajan, Lurah Ngampilan, dan Lurah Panembahan. Kelurahan Rejowinangun dan Suryatmajan juga berhasil meraih penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) atas keberhasilannya dalam upaya kelayakan investasi, peningkatan sektor pariwisata dan pembukaan lapangan kerja. Anugerah *Non Litigation Peacemaker* dan Anubhawa Sasana Jagaddhita diberikan penghargaan *Paralegal Justice Award* 2024 pada hari Sabtu 1 Juni 2024 dalam acara Anugerah *Paralegal Justice Award* 2024 di Hotel Bidakara Jakarta.
5. Pemerintah Kota Yogyakarta menerima penghargaan atas Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Terbaik I dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Rabu 26 Juni 2024 di PO Hotel Semarang.
6. Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat 22 penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY tahun 2024 dari Komisi Informasi Daerah (KID) DIY.

7. Pemerintah Kota Yogyakarta menerima piagam penghargaan Government Techno Awards 2024 DIY oleh MarkPlus Corporate pada acara Indonesia Marketing Festival (IMF) 2024 di Royal Ambarukmo Hotelpada 1 Agustus 2024. Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai berhasil mengembangkan layanan publik berbasis digital dengan Super App Jogja Smart Service (JSS). Aplikasi ini merupakan sebuah layanan digital Pemerintah Kota Yogyakarta dengan konsep Single ID, Single Sign On, Single Window untuk layanan kepada pegawai maupun masyarakat.
8. Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh penghargaan Beli Lokal Awards dari PT Tokopedia dengan kategori pendorong Program Digitalisasi dan Pengembangan Kapasitas Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Produk Lokal yang diterima pada tanggal 25 Agustus 2024.
9. Pemerintah Kota Yogyakarta kembali meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2024 dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Sabtu 7 September 2024 di JI Expo Kemayoran.
10. Kota Yogyakarta menerima penghargaan Prastisha Pustaka pada ajang Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Award 2024 di Rattan Inn Banjarmasin pada tanggal 18 September 2024, Penghargaan Prastisha Pustaka diberikan kepada Kota Pusaka yang dianggap memberikan sumbangsih luar biasa terhadap pelestarian kotanya. Bagi Kota Yogyakarta, penghargaan ini diberikan atas komitmennya dalam mempertahankan identitas dan warisan budaya, termasuk Sumbu Filosofis yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO.
11. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia menetapkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Kreatif 2024 dengan sub sektor seni rupa pada 26 September 2024.
12. Pemerintah Kota Yogyakarta meraih penghargaan Gadjah Mada *Digital Transformation Governance Index* (GM-DGTI) Tahun 2024 sebagai pemerintah kabupaten/kota terbaik di DIY dan terbaik ke-4 nasional pada Jumat 11 Oktober 2024 di Auditorium MM UGM.
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Yogyakarta meraih penghargaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atas capaian implementasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Penghargaan tersebut diberikan pada puncak acara *Peer Learning Meeting* (PLM) atau Pertemuan Pembelajaran Sebaya Nasional yang berlangsung pada 6-8 November 2024. Di

ikuti 700 orang Mitra Program TPBIS dari Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota dan Perpustakaan Desa/Kelurahan di Indonesia.

14. Kemenkuham RI menetapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) milik Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pengelola JDIH Terbaik IV nasional tahun 2024 yang diterimakan pada tanggal 22 Agustus 2024.
15. Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil meraih penghargaan dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah (AKDP) tahun 2024 kategori Daya Saing Daerah untuk daerah dengan kapasitas fiskal sedang pada 13 Desember 2024.
16. Pemerintah Kota Yogyakarta meraih penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) 2024 dari Kementerian Kebudayaan kategori terbaik atau emas pada 18 Desember 2024 di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, dan hadirin sekalian

Sebagai penutup, perlu kami sampaikan bahwa dalam penyampaian LKPJ ini dimungkinkan terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf atas berbagai keterbatasan yang ada termasuk capaian kinerjanya. Dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan yang terhormat dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan sumbangsihnya bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Yogyakarta. Untuk itu, saran dan masukan dari pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.

Demikian Nota Pengantar LKPJ Tahun Anggaran 2024 ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya serta meridhoi setiap langkah kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Amin yaa Robbal a'lamiin.

Sekian dan terima kasih.
Salam Jogja Istimewa Untuk Indonesia Jaya
Wabillahitaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

2024

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
KEPADA DPRD KOTA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 memuat gambaran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diampu oleh perangkat daerah selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja tersebut berdasarkan tolok ukur realisasi keuangan dan indikator program. Selain memuat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, LKPJ Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 memuat kebijakan strategis yang diambil oleh kepala daerah dalam rangka mengatasi permasalahan strategis di masyarakat, tindaklanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Demikian LKPJ Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 kami sampaikan, semoga dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

WALI KOTA YOGYAKARTA

HASTO WARDOYO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

1.1. Dasar Hukum 1

1.2. Visi Misi Kepala Daerah 1

1.3. Data Umum Daerah 3

BAB II **9**

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **9**

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah 9

2.2. Belanja Daerah 15

2.3. Pembiayaan Daerah 18

BAB III **20**

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH **20**

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 20

3.1.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 20

3.1.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 95

3.1.3. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan 225

3.1.4. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 246

3.1.5. Capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Umum 309

3.1.6. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat diakses dalam sim monev melalui *website* simpelaporan.jogjakota.go.id. 313

3.1.7. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 314

3.2. Capaian akuntabilitas kinerja 746

3.3. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan 748

Dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan kebijakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 748

3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya 757

3.5. Penghargaan yang Diterima Tahun 2024 767

BAB IV 770

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 770

BAB V 771

PENUTUP 771

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2024 4
Tabel I. 2 Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta 4
Tabel I. 3 Realisasi Pendapatan Tahun 2024 Berdasar Jenis Pendapatan 6
Tabel I. 4 Realisasi Belanja Tahun 2024 Berdasar Jenis Belanja 7
Tabel I. 5 Realisasi Pembiayaan Tahun 2024 Berdasar Jenis Pembiayaan 8
Tabel II. 1 Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024 14
Tabel II. 2 Ringkasan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 17
Tabel II. 3 Ringkasan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 19
Tabel III. 1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 20
Tabel III. 2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .. 95
Tabel III. 3 Pelaksanaan Urusan Pilihan 225
Tabel III. 4 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 246
Tabel III. 5 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum 309
Tabel III. 6 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator setara Eselon II Tahun 2024 314
Tabel III. 7 Program dan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan 315
Tabel III. 8 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 315
Tabel III. 9 Rumusan Indiaktor dan Formulasi Perhitungan 321
Tabel III. 10 Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan 325
Tabel III.11 Pemeriksaan Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum 333
Tabel III. 12 Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 370
Tabel III. 13 Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2024 Urusan Penataan Ruang 375
Tabel III. 14 Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2024 Urusan Pertanahan 377
Tabel III. 15 Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 379
Tabel III. 16 Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Satpol PP Tahun 2024 384
Tabel III. 17 Perjanjian Kinerja Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2024 384
Tabel III. 18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 385
Tabel III. 19 Capaian Kinerja Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2024 385
Tabel III. 20 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 402
Tabel III. 21 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2024 402
Tabel III. 22 Capaian Kinerja Program Pencegahan Kebakaran Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Inspeksi Peralatan Proteksi bangunan Rendah 403
Tabel III. 23 Capaian Kinerja Program Pencegahan Kebakaran Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 405
Tabel III. 24 Capaian Kinerja Program Pencegahan Kebakaran Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 406

Tabel III. 25 Capaian Kinerja Program Pencegahan Kebakaran Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 407
Tabel III. 26 Capaian Kinerja Program Pencegahan Kebakaran Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 408
Tabel III. 27 Capaian Kinerja Program Pencegahan Kebakaran Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 409
Tabel III. 28 Sasaran program dan indikator kinerja program urusan Ketenagakerjaan..... 414
Tabel III. 29 Capaian Kinerja Tahun 2024 415
Tabel III. 30 Capaian Sasaran Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan..... 416
Tabel III. 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Pencapaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan..... 416
Tabel III. 32 Kelembagaan PUG kota Yogyakarta 417
Tabel III. 33 Capaian Sasaran Program Perlindungan Perempuan 418
Tabel III. 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Pencapaian Sasaran Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan 419
Tabel III. 35 Capaian Sasaran Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak..... 420
Tabel III. 36 Anggaran dan Realisasi Belanja Pencapaian Sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak 421
Tabel III. 37 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Eselon II Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 433
Tabel III. 38 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2024 434
Tabel III. 39 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2024 434
Tabel III. 40 Sub Kegiatan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 435
Tabel III. 41 Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 435
Tabel III. 42 Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 435
Tabel III. 43 Perjanjian Kinerja Eselon III 437
Tabel III. 44 Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 437
Tabel III. 45 Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya..... 437
Tabel III. 46 Perjanjian Kinerja Eselon III 438
Tabel III. 47 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH..... 439
Tabel III. 48 Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 440
Tabel III. 49 Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut..... 440
Tabel III. 50 Perjanjian Kinerja Eselon III 441
Tabel III. 51 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 441

Tabel III. 52 Perjanjian Kinerja Eselon III 442
Tabel III. 53 Capaian Kinerja Tahun 2024 446
Tabel III. 54 Data Pengukuran Kinerja Masing-Masing Program Tahun 2024..... 446
Tabel III. 55 Perhitungan Kinerja Berdasarkan Formulasi Indikator Capaian Tahun 2024..... 447
Tabel III. 56 Perubahan Perjanjian Kinerja Kemantren Ngampilan Tahun 2024..... 495
Tabel III. 57 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III 495
Tabel III. 58 Anggaran dan Realisasi Belanja Pencapaian Sasaran Terkendalinya Jumlah Penduduk 602
Tabel III. 59 Capaian Sasaran Program Pengendalian Penduduk..... 603
Tabel III. 60 Capaian Sasaran Program Keluarga Berencana..... 603
Tabel III. 61 mCPR Kota Yogyakarta per Kemantren Tahun 2024 604
Tabel III. 62 Klasifikasi Kampung KB di Yogyakarta Tahun 2024..... 605
Tabel III. 63 Unmetneed Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2024 606
Tabel III. 64 Capaian Sasaran Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)..... 606
Tabel III. 65 perubahan perjanjian kinerja eselon II tahun 2024 608
Tabel III. 66 perubahan perjanjian kinerja administrator setara eselon III tahun 2024..... 608
Tabel III. 67 Target dan Realisasi Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... 629
Tabel III. 68 Program dan Sub Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 630
Tabel III. 69 Program dan Sub Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal 631
Tabel III. 70 Program dan Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal .. 632
Tabel III. 71 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal..... 634
Tabel III. 72 Target dan Realisasi Indikator Tujuan 2 640
Tabel III. 73 Capaian Kinerja Sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024..... 642
Tabel III. 74 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024..... 642
Tabel III. 75 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program Tahun 2024 644
Tabel III. 76 Target kinerja program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta..... 650
Tabel III. 77 Realisasi Program Pembinaan Perpustakaan 651
Tabel III. 78 Realisasi Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 652
Tabel III. 79 Realisasi Program Pengelolaan Arsip..... 652
Tabel III. 80 Realisasi Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip..... 653
Tabel III. 81 Realisasi Program Perizinan Penggunaan Arsip..... 653
Tabel III. 82 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 655
Tabel III. 83 Perjanjian Kinerja Eselon 3 (Urusan Pertanian) 657
Tabel III. 84 Perjanjian Kinerja dan realisasi tahun 2024 Dinas Urusan Perdagangan..... 662
Tabel III. 85 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2024 682
Tabel III. 86 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2024 691
Tabel III. 87 Indikator Kinerja Utama pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama..... 692
Tabel III. 88 Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024..... 693
Tabel III. 89 Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2024..... 695

Tabel III. 90 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2024 697
Tabel III. 91 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2024 709
Tabel III. 92 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II tahun 2024 712
Tabel III. 93 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2024 712
Tabel III. 94 Perbandingan Kinerja Sasaran Dengan Target Akhir Renstra 718
Tabel III. 95 Target Kinerja Program BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2024 725
Tabel III. 96 Strategi, Program dan Kegiatan 726
Tabel III. 97 Tolak ukur pemenuhan penataan ASN Tahun 2024 729
Tabel III. 98 Jumlah Layanan Jabatan Fungsional ASN 730
Tabel III. 99 Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian 730
Tabel III.100 Jenis Layanan Kesejahteraan dan Penghargaan 733
Tabel III.101 Realisasi Per Indikator Sasaran Tahun 2024 736
Tabel III. 102 Sasaran strategis dan Indikator Kinerja 737
Tabel III. 103 Indikator dan Formulasi Program 738
Tabel III. 104 Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Anggaran Perubahan APBD TA. 2024 740
Tabel III. 105 Perjanjian Kinerja Eselon 3 dan Realisasi Tahun 2024 740
Tabel III. 106 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan 748
Tabel III. 107 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2023 757

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin 5
Gambar III. 1 Grafik Pelayanan Kegawatdaruratan Pra Rumah Sakit oleh PSC 119 YES dan Jejaringnya 354
Gambar III. 2 Grafik Capaian Pelayanan Kegawatdaruratan Pra Rumah Sakit 354
Gambar III. 3 Stratifikasi Kelurahan Siaga Tahun 2024 366

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1947 tentang Penetapan Kota Yogyakarta sebagai Kota Otonom;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2. Visi Misi Kepala Daerah

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual. Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah: “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan

5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan "Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan", memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama empat tahun mulai 2023 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

1.3. Data Umum Daerah

1. Data Geografis Wilayah

Kota Yogyakarta terletak di daerah dataran lereng Gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar 0-2% dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpl). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100–199 meter dpl. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Terdapat 3 (tiga) sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan, yaitu Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur Kota Yogyakarta, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta terletak antara $110^{0}24^{'}19^{''}$ - $110^{0}28^{'}53^{''}$ Bujur Timur dan antara $07^{0}49'26^{''}$ - $07^{0}15'24^{''}$ Lintang Selatan, secara administratif wilayah Kota Yogyakarta berbatasan dengan:

Sebelah utara : Kabupaten Sleman
Sebelah timur : Kabupaten Sleman dan Bantul
Sebelah selatan: Kabupaten Bantul
Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

Luas wilayah Kota Yogyakarta relatif kecil yaitu hanya 32,8 km^2 atau 1,03% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kemantren dan 45 kelurahan dengan 169 kampung eks Rukun Kampung (RK), 616 Rukun Warga (RW) dan 2.535 Rukun Tetangga (RT).

2. Jumlah Penduduk

Pada akhir tahun 2024 jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 415.605 orang. Dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 414.705 orang, jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sebanyak 900 orang atau 0,217%. Rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2024

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
TEGALREJO	18.377	19.109	37.486
JETIS	13.070	13.946	27.016
GONDOKUSUMAN	20.920	22.294	43.214
DANUREJAN	10.307	10.786	21.093
GEDONGTENGEN	9.380	9.761	19.141
NGAMPILAN	8.783	9.142	17.925
WIROBRAJAN	13.854	14.417	28.271
MANTRIJERON	17.181	18.217	35.398
KRATON	10.367	10.958	21.325
GONDOMANAN	7.096	7.494	14.590
PAKUALAMAN	5.060	5.532	10.592
MERGANGSAN	15.291	16.406	31.697
UMBULHARJO	35.275	36.928	72.203
KOTAGEDE	17.517	18.137	35.654
TOTAL	**202.478**	**213.127**	**415.605**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

3. Pertumbuhan Penduduk

Tabel I. 2 Pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta

KECAMATAN	TAHUN 2024			TAHUN 2023			PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)
	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
TEGALREJO	18.377	19.109	37.486	18.327	19.110	37.437	0,131
JETIS	13.070	13.946	27.016	13.111	13.977	27.088	-0,266
GONDOKUSUMAN	20.920	22.294	43.214	20.837	22.214	43.051	0,379
DANUREJAN	10.307	10.786	21.093	10.376	10.777	21.153	-0,284
GEDONGTENGEN	9.380	9.761	19.141	9.413	9.800	19.213	-0,375
NGAMPILAN	8.783	9.142	17.925	8.853	9.218	18.071	-0,808
WIROBRAJAN	13.854	14.417	28.271	13.772	14.334	28.106	0,587
MANTRIJERON	17.181	18.217	35.398	17.122	18.100	35.222	0,500
KRATON	10.367	10.958	21.325	10.417	11.043	21.460	-0,629

KECAMATAN	TAHUN 2024			TAHUN 2023			PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)
	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
GONDOMANAN	7.096	7.494	14.590	7.148	7.554	14.702	-0,762
PAKUALAMAN	5.060	5.532	10.592	5.061	5.561	10.622	-0,282
MERGANGSAN	15.291	16.406	31.697	15.310	16.355	31.665	0,101
UMBULHARJO	35.275	36.928	72.203	34.928	36.630	71.558	0,901
KOTAGEDE	17.517	18.137	35.654	17.387	17.970	35.357	0,840
TOTAL	**202.478**	**213.127**	**415.605**	**202.062**	**212.643**	**414.705**	**0,217**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

4. Jumlah PNS

Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Jumlah aparatur sipil negara Pemerintah Kota Yogyakarta per Desember 2024 adalah sebanyak 4.683 yang terdiri dari 1.744 laki-laki dan 2.939 perempuan.

Gambar I. 1 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

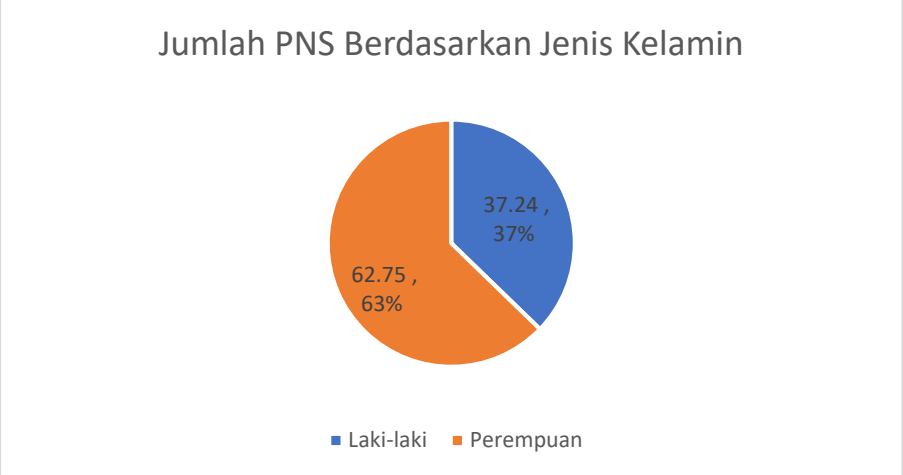

Sumber: BKPSDM Kota Yogyakarta

5. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan

Tabel I. 3 Realisasi Pendapatan Tahun 2024 Berdasar Jenis Pendapatan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Pajak Daerah	532.000.000.000,00	575.887.653.496,00	108,25
Retribusi Daerah	67.893.391.760,00	76.242.064.340,00	112,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.309.323.293,30	31.847.065.857,26	98,57
Lain-lain PAD yang Sah	148.852.129.530,00	171.124.075.221,04	114,96
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**781.054.844.583,30**	**855.100.858.914,30**	**109,48**
PENDAPATAN TRANSFER			
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT			
DANA PERIMBANGAN			
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	43.868.080.000,00	52.835.068.000,00	120,44
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	673.920.861.000,00	673.920.861.000,00	100,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	50.147.893.000,00	45.033.949.392,00	89,80
Dana Transfer Khusus-Dana lokasi Khusus (DAK) Non Fisik	169.454.968.000,00	163.113.946.285,00	96,26
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**937.391.802.000,00**	**934.903.824.677,00**	**99,73**
DANA INSENTIF DAERAH (DID)			
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah (DID)	**-**	**-**	**-**
INSENTIF FISKAL			
Insentif Fiskal	53.929.174.000,00	53.929.174.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Insentif Fiskal (DID)	**53.929.174.000,00**	**53.929.174.000,00**	**100,00**
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**991.320.976.000,00**	**988.832.998.677,00**	**99,75**

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH			
Pendapatan Bagi Hasil	152.411.420.730,00	150.610.796.469,00	98,82
Bantuan Keuangan	86.250.881.380,00	85.699.630.854,00	99,36
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	**238.662.302.110,00**	**236.310.427.323,00**	**99,01**
Total Pendapatan Transfer	**1.229.983.278.110,00**	**1.225.143.426.000,00**	**99,61**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
Pendapatan Hibah	1.760.000.000,00	1.336.000.000,00	75,91
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**1.760.000.000,00**	**1.336.000.000,00**	**75,91**
JUMLAH PENDAPATAN	**2.012.798.122.693,30**	**2.081.580.284.914,30**	**103,42**

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

1. Realisasi belanja menurut jenis belanja

Tabel I. 4 Realisasi Belanja Tahun 2024 Berdasar Jenis Belanja

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	837.600.827.520,00	785.769.268.630,00	93,81
Belanja Barang dan Jasa	916.193.565.685,00	877.250.892.536,80	95,75
Belanja Bunga			
Belanja Subsidi			
Belanja Hibah	104.366.015.194,00	102.778.648.641,00	98,48
Belanja Bantuan Sosial	25.030.250.000,00	24.735.165.100,00	98,82
Jumlah Belanja Operasi	**1.883.190.658.399,00**	**1.790.533.974.907,80**	**95,08**
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Tanah	2.546.302.600,00	2.201.626.190,00	86,46
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.110.091.549,00	107.853.441.626,00	94,52
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	121.080.962.669,00	108.885.066.704,00	89,93
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.590.003.986,00	71.714.876.776,00	94,87
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.532.736.812,00	5.386.845.115,00	82,46
Belanja Modal Aset Lainnya	184.940.000,00	182.569.000,00	98,72
Jumlah Belanja Modal	**320.045.037.616,00**	**296.224.425.411,00**	**92,56**

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
BELANJA TIDAK TERDUGA			
Belanja Tidak Terduga	17.946.858.815,81	3.545.062.000,00	19,75
Jumlah Belanja Tidak Terduga	**17.946.858.815,81**	**3.545.062.000,00**	**19,75**
BELANJA TRANSFER			
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1.344.897.000,00	344.897.000,00	25,64
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	718.832.590,00	718.832.590,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa			
Jumlah Belanja Transfer	**2.063.729.590,00**	**1.063.729.590,00**	**51,54**
JUMLAH BELANJA	**2.223.246.284.420,81**	**2.091.367.191.908,80**	**94,07**

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

2. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan

Tabel I. 5 Realisasi Pembiayaan Tahun 2024 Berdasar Jenis Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
PEMBIAYAAN DAERAH	**210.448.161.727,51**	**210.448.161.727,51**	**100,00**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**275.415.161.727,51**	**275.415.161.727,51**	**100,00**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	275.412.161.727,51	275.412.161.727,51	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**275.415.161.727,51**	**275.415.161.727,51**	**100,00**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Penyertaan **Modal** Daerah	64.967.000.000,00	64.967.000.000,00	100,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**64.967.000.000,00**	**64.967.000.000,00**	**100,00**
PEMBIAYAAN NETTO	**210.448.161.727,51**	**210.448.161.727,51**	**100,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**-**	**200.661.254.733,01**	

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan komponen APBD yang memiliki peranan penting karena sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan.

1. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sesuai dengan hakekat otonomi daerah, di samping untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, daerah secara bertahap dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi terbesar terhadap pendapatan daerah, sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani dunia usaha. Demikian pula dengan sumber-sumber pendapatan lainnya perlu terus

ditingkatkan, antara lain bagian laba badan usaha milik daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

Dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah, kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2024 serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan kebijakan umum pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
2. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.
3. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal.
4. Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah.
5. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak.

6. Peningkatan pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan reward and punishment.
7. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat.
8. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
9. Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan konfirmasi status wajib pajak.

2. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan

Pada tahun anggaran 2024 target pendapatan daerah sebesar Rp2.012.798.122.693,30 dan terealisasi Rp2.081.580.284.914,30 atau 103,42% naik 4,03% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.000.846.169.483,53.

Perincian lebih lanjut terhadap anggaran dan realisasi pendapatan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah ditargetkan Rp781.054.844.583,30 dan terealisasi Rp855.100.858.914,30 atau 109,48%, dengan perincian:

a) Pajak daerah

Pajak daerah ditargetkan Rp532.000.000.000,00 dan terealisasi Rp575.887.653.496,00 atau 108,25%.

b) Retribusi daerah

Retribusi daerah ditargetkan Rp67.893.391.760,00 dan terealisasi Rp76.242.064.340,00 atau 112,30%.

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp32.309.323.293,30 dan terealisasi Rp31.847.065.857,26 atau 98,57%.

d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan Rp148.852.129.530,00 dan terealisasi Rp171.124.075.221,04 atau sebesar 114,96%.

Realisasi PAD dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp805.346.115.792,53 maka realisasi pendapatan asli daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp49.754.743.121,77 atau 6,18%.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer ditargetkan Rp1.229.983.278.110,00 dan terealisasi Rp1.225.143.426.000,00 atau sebesar 99,61%, dengan perincian:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan ditargetkan Rp937.391.802.000,00 dan terealisasi Rp934.903.824.677,00 atau 99,73%, dengan perincian:

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) ditargetkan sebesar Rp43.868.080.000,00 dan terealisasi Rp52.835.068.000,00 atau 120,44%.

b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp673.920.861.000,00 dan terealisasi sebesar Rp673.920.861.000,00 atau 100%.

c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ditargetkan sebesar Rp50.147.893.000,00 dan terealisasi sebesar Rp45.033.949.392,00 atau 89,80%.

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik ditargetkan sebesar Rp169.454.968.000,00 dan terealisasi sebesar Rp163.113.946.285,00 atau 96,26%.

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp53.929.174.000,00 dan terealisasi sebesar Rp53.929.174.000,00 atau 100%.

c. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp236.310.427.323,00 atau 99,01% dari target sebesar Rp238.662.302.110,00 menurun sebesar 4,15% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp246.540.080.273,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tersebut berasal dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun anggaran 2024, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp1.336.000.000,00 atau 75,91% dari target sebesar Rp1.760.000.000,00.

Tabel II. 1 Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Pajak Daerah	532.000.000.000,00	575.887.653.496,00	108,25
Retribusi Daerah	67.893.391.760,00	76.242.064.340,00	112,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.309.323.293,30	31.847.065.857,26	98,57
Lain-lain PAD yang Sah	148.852.129.530,00	171.124.075.221,04	114,96
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**781.054.844.583,30**	**855.100.858.914,30**	**109,48**
PENDAPATAN TRANSFER			
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT			
DANA PERIMBANGAN			
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	43.868.080.000,00	52.835.068.000,00	120,44
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	673.920.861.000,00	673.920.861.000,00	100,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	50.147.893.000,00	45.033.949.392,00	89,80
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	169.454.968.000,00	163.113.946.285,00	96,26
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**937.391.802.000,00**	**934.903.824.677,00**	**99,73**
DANA INSENTIF DAERAH (DID)			
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah (DID)	**-**	**-**	**-**
INSENTIF FISKAL			
Insentif Fiskal	53.929.174.000,00	53.929.174.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Insentif Fiskal (DID)	**53.929.174.000,00**	**53.929.174.000,00**	**100,00**
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**991.320.976.000,00**	**988.832.998.677,00**	**99,75**
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH			
Pendapatan Bagi Hasil	152.411.420.730,00	150.610.796.469,00	98,82
Bantuan Keuangan	86.250.881.380,00	85.699.630.854,00	99,36
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	**238.662.302.110,00**	**236.310.427.323,00**	**99,01**

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Total Pendapatan Transfer	**1.229.983.278.110,00**	**1.225.143.426.000,00**	**99,61**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
Pendapatan Hibah	1.760.000.000,00	1.336.000.000,00	75,91
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**1.760.000.000,00**	**1.336.000.000,00**	**75,91**
JUMLAH PENDAPATAN	**2.012.798.122.693,30**	**2.081.580.284.914,30**	**103,42**

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Pada tahun anggaran 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp2.223.246.284.420,81 dan terealisasi sebesar Rp2.091.367.191.908,80 atau sebesar 94,07% dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

   Belanja operasi dianggarkan Rp1.883.190.658.399,00 dan terealisasi Rp1.790.533.974.907,80 atau 95,08%, dengan perincian:

   a. Belanja Pegawai dianggarkan Rp837.600.827.520,00 terealisasi sebesar Rp785.769.268.630,00 atau 93,81%.
   b. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan Rp916.193.565.685,00 terealisasi sebesar Rp877.250.892.536,80 atau 95,75%.
   c. Belanja Hibah dianggarkan Rp104.366.015.194,00 terealisasi sebesar Rp102.778.648.641,00 atau 98,48%.
   d. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan Rp25.030.250.000,00 terealisasi sebesar Rp24.735.165.100,00 atau 98,82%.

2. Belanja Modal

   Belanja modal dianggarkan Rp. 320.045.037.616,00 dan terealisasi Rp. 296.224.425.411,00 atau sebesar 92,56% dengan perincian:

   a. Belanja Modal Tanah dianggarkan Rp2.546.302.600,00 dan terealisasi sebesar Rp2.201.626.190,00 atau 86,46%.
   b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan Rp114.110.091.549,00 dan terealisasi sebesar Rp107.853.441.626,00 atau 94,52%.
   c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan Rp121.080.962.669,00 dan terealisasi sebesar Rp108.885.066.704,00 atau 89,93%.
   d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dianggarkan Rp75.590.003.986,00 dan terealisasi sebesar Rp71.714.876.776,00 atau 94,87%.
   e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan Rp6.532.736.812,00 dan terealisasi sebesar Rp5.386.845.115,00 atau 82,46%.
   f. Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan Rp184.940.000,00 dan terealisasi sebesar Rp182.569.000,00 atau 98,72%.

3. Belanja Tak Terduga

   Belanja tak terduga tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp17.946.858.815,81 dan terealisasi sebesar Rp3.545.062.000,00 atau 19,75%.

4. Belanja Transfer

   Belanja transfer dianggarkan Rp2.063.729.590,00 dan terealisasi sebesar Rp1.063.729.590,00 atau 51,54%, dengan perincian:

   a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp1.344.897.000,00 dan terealisasi Rp344.897.000,00 atau 25,64%; dan
   b. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi dianggarkan Rp718.832.590,00 dan terealisasi sebesar Rp718.832.590,00 atau 100%.

Tabel II. 2 Ringkasan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	837.600.827.520,00	785.769.268.630,00	93,81
Belanja Barang dan Jasa	916.193.565.685,00	877.250.892.536,80	95,75
Belanja Bunga			
Belanja Subsidi			
Belanja Hibah	104.366.015.194,00	102.778.648.641,00	98,48
Belanja Bantuan Sosial	25.030.250.000,00	24.735.165.100,00	98,82
Jumlah Belanja Operasi	**1.883.190.658.399,00**	**1.790.533.974.907,80**	**95,08**
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Tanah	2.546.302.600,00	2.201.626.190,00	86,46
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.110.091.549,00	107.853.441.626,00	94,52
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	121.080.962.669,00	108.885.066.704,00	89,93
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.590.003.986,00	71.714.876.776,00	94,87
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.532.736.812,00	5.386.845.115,00	82,46
Belanja Modal Aset Lainnya	184.940.000,00	182.569.000,00	98,72
Jumlah Belanja Modal	**320.045.037.616,00**	**296.224.425.411,00**	**92,56**
BELANJA TIDAK TERDUGA			
Belanja Tidak Terduga	17.946.858.815,81	3.545.062.000,00	19,75
Jumlah Belanja Tidak Terduga	**17.946.858.815,81**	**3.545.062.000,00**	**19,75**
BELANJA TRANSFER			
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1.344.897.000,00	344.897.000,00	25,64
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	718.832.590,00	718.832.590,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa			
Jumlah Belanja Transfer	**2.063.729.590,00**	**1.063.729.590,00**	**51,54**
JUMLAH BELANJA	**2.223.246.284.420,81**	**2.091.367.191.908,80**	**94,07**

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

Tidak terserapnya anggaran belanja sesuai dengan yang direncanakan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

a. Belanja Modal terealisasi 92,56%, antara lain karena terdapat dinamika dalam proses pengadaan sebagai berikut:
    a) Pengadaan barang sesuai dengan harga di portal e-katalog dan kesepakatan lelang
    b) terdapat proses negosiasi harga karena dilakukan konsolidasi pengadaan belanja modal
    c) adanya efisiensi harga pengadaan tanah berdasarkan kesepakatan harga dengan pemilik tanah pada RTHP Kelurahan Tegalrejo.
b. Belanja tidak terduga hanya terealisasi sebesar 19,75% yang digunakan untuk Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS), Bantuan Sosial Musibah Kebakaran, Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan bagi orang terlantar, Bantuan Hukum (LBH), dan Pengembalian BKK Dana Keistimewaan Kemantren Pakualaman.

2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah. Surplus anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar daripada Anggaran Belanja Daerah, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari pada Anggaran Belanja Daerah.

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada tahun anggaran 2024 ditargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 275.415.161.727,51 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Dari target tersebut terealisasi Rp. 275.415.161.727,51 atau 100,00%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesarRp. 301.465.479.935,93 maka penerimaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp. 26.050.318.208,42 atau 8,64%.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada tahun anggaran 2024 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp64.967.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Kota Yogyakarta kepada PT. Bank BPD DIY sebesar Rp64.967.000.000,0. Dari anggaran tersebut terealisasi Rp.64.967.000.000,00 atau 100%, sedangkan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 54.667.000.000,00.

Tabel II. 3 Ringkasan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
PEMBIAYAAN DAERAH	**210.448.161.727,51**	**210.448.161.727,51**	**100,00**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**275.415.161.727,51**	**275.415.161.727,51**	**100,00**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	275.412.161.727,51	275.412.161.727,51	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**275.415.161.727,51**	**275.415.161.727,51**	**100,00**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Penyertaan **Modal** Daerah	64.967.000.000,00	64.967.000.000,00	100,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**64.967.000.000,00**	**64.967.000.000,00**	**100,00**
PEMBIAYAAN NETTO	**210.448.161.727,51**	**210.448.161.727,51**	**100,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**-**	**200.661.254.733,01**	

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

Penjelasan lebih lanjut terhadap target dan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah disampaikan pada laporan keuangan tahun anggaran 2024, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disampaikan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel III. 1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan pembelajaran sekolah dasar (SD)	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 205.499.317.888,- Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar = 100% Persentase sekolah dasar yang	Rp 200.229.344.579,- 100% 100%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					terakreditasi = 100%				
					Angka Partisipasi Kasar SD = 105,24%	110,91%			
					Angka Partisipasi Murni SD = 100%	100%			
			2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi = 100%	100%			
					Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar = 100%	100%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Angka Partisipasi Kasar SMP = 112,41% Angka Partisipasi Murni SMP = 100%	123,74% 100%			
			3. Meningkatkan Pemberdayaan Pendidikan Masyarakat Berbasis Kampung		Persentase Kelulusan Warga Belajar = 100%	100%			
			4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B = 97,71%	98,16%	Untuk sekarang kita tidak bisa mengusulkan sekolah yang akan di akreditasi karena Badan Akreditasi Nasional (BAN) sudah menentukan kuota akreditasi untuk masing-masing daerah , jadi kita hanya	Pendampingan ke sekolah, melakukan sosialisasiterkait dengan pengisian intrumen akreditasi bagi sekolah-sekolah yang akan melukukan akreditasi	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							mengikuti kouta yang di tentukan, akreditasi di tahun 2024 mundur karena ada indikator baru, jadi yang menentukan jadwal akreditasi dari BAN		
			5. Meningkatkan Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan	2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.026.291.400 Persentase Guru Sesuai Kualifikasi = 100%	15.471.408.400 100%			
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	1. Mengelola penyediaan layanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, anak usia sekolah dasar, dan usia lanjut sesuai standar 2. Mengelola penyediaan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 102.558.092.359,- Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil = 100% Anggaran = Rp240.358.000,-	Rp 92.876.235.360,- 100% Keuangan = Rp240.358.000,-	• Implementasi pemantauan ibu hamil oleh tenaga 23embali23n di wilayah kerja puskesmas masih belum optimal oleh karena keterbatasan SDMK di puskesmas. • Jejaring dengan kader dan stakeholder di	• Mengefektifkan pemantauan ibu hamil dengan media sosial seperti WAG. • Meningkatkan jejaring layanan ANC dengan pembentukan jejaring layanan ANC. • Mengefektifkan pemanfaatan buku	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			layanan kesehatan gizi masyarakat secara optimal 3. Mengelola Penyediaan Layanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggara-an Kota Sehat secara Optimal 4. Mengelola penyediaan layanan promosi kesehatan di Kota Yogyakarta secara optimal. 5. Mengelola Penyediaan,				wilayah masih perlu dioptimalkan • Banyaknya kasus ibu hamil yang domisili tidak menetap di Kota YK yang sering menyebabkan pemantauan 24embali24n ibu hamil terputus / tidak optimal • Tingginya Unmet Need di Kota Yogyakarta berdampak pada meningkatnya kasus kehamilan yang tidak direncanakan/ tidak dikehendaki dan mempengaruhi perilaku /kepatuhan 24embali24n24 dalam akses pelayanan	KIA oleh keluarga, kader dan petugas Kesehatan.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			distribusi dan Pemeliharaan untuk Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Alat Kesehatan/Alat Penunjan Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara Optimal 6. Mengelola Penggunaan Obat Rasional di puskesmas secara Optimal 7. Menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan = 100%	100%	25embali25n selama hamil, pemenuhan kebutuhan gizi dll. • Pada kasus Kehamilan tidak diinginkan 25embali25n25 cenderung menyembunyikan kehamilan, tidak melakukan pemeriksaan kehamilan sehingga adanya penyulit dan komplikasi tidak dapat di deteksi dan intervensi dini dan tepat. • Masih adanya permasalahan pembiayaan persalinan untuk ibu hamil yang bukan penduduk	• Meningkatkan implementasi pemantauan ibu hamil di wilayah, meningkatkan promosi dan edukasi melalui	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya secara Optimal 8. Mengelola Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Usia Produktif, Penderita Hipertensi, Penderita Diabetes Mellitus, Orang dengan Gangguan Jiwa dan orang dengan Masalah Kejiwaan secara Optimal		Anggaran = Rp101.781.000,- Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan	Keuangan = Rp95.981.800,- 100%	dengan KTP Kota YK akan tetapi berdomisili di Kota YK, dan ibu hamil tersebut belum mempunyai BPJS, Kurangnya SDM dokter dan Bidan di Puskesmas PONED • Masih adanya kasus persalinan dirumah oleh karena belum adanya perencanaan persalinan, atau kasus kehamilan yang disembunyikan, tingginya kasus kehamilan yang tidak diinginkan pada Lokasi-lokasi tertentu. • Pemantauan bayi baru lahir diwilayah kerja puskesmas	media sosial baik di puskesmas maupun Dinas kesehatan Kota Yogyakarta • Meningkatkan fungsi puskesmas PONED untuk 7 sinyal fungsi penanganan kegawatan ibu • Peningkatan jejaring pelayanan bayi baru lahir dengan kader,	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			9. Mengelola Penyediaan Layanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis, Orang Terduga HIV dan penyakit Menular /Tidak Menular Secara Optimal 10. Mengelola Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan Secara Optimal		Pelayanan Kesehatan = 99,3 % Anggaran = Rp101.717.500,-	Keuangan = Rp101.629.360,-	belum optimal karena keterbatasan SDMK di puskesmas • Masih diperlukan peningkatan kapasitas tenaga 27embali27n dalam melakukan skrining bayi baru lahir, terutama skrining Penyakit Jantung Bawaan Kritis pada bayi Baru Lahir, skrining SHK. • Masih perlu dilakukan 27emba secara terus menerus dan berkala untuk meningkatkan keterampilan petugas di puskesmas, Klinik, RS dalam penatalaksanaan	stakeholder di wilayah dan meningkatkan promosi edukasi tentang tanda bahaya bayi baru lahir melalui berbagai media sosial. • Meningkatkan kapasitas kader dalam pemantauan tanda bahaya bayi baru lahir menggunakan buku KIA • Melakukan upaya memenuhi Standarisasi Puskesmas PONED agar mampu melaksanakan 5 sinyal fungsi untuk pelayanan kegawatan bayi baru lahir	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			11. Mengelola Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Secara Optimal 12. Melaksana-kan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 13. Melaksana-kan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kota Yogyakarta Secara Optimal 14. Melaksana-kan Akreditasi		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 83%	100%	bayi baru lahir dengan asfiksia, BBLR • Masih perlu ditingkatkan peran / kepedulian 28embali28n28 terkait 28emba 28embali28n bayi baru lahir melalui kegiatan pemantauan Tanda Bahaya bayi baru lahir menggunakan buku KIA, 28emba peningkatan gizi ibu hamil untuk mencegah BBLR. • Balita tidak datang ke posyandu karena karena balita sakit, sekolah atau dititipkan di daycare, tidur, tidak ada yang	• Pemantauan pertumbuhan mandiri dan melaporkan ke kader posyandu, Pencatatan dan pelaporan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Sesuai Regulasi yang Ditetapkan 15. Menyediakan Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah sakit Sesuai Standar 16. Menyediakan Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM		Anggaran = Rp271.498.649	Keuangan = Rp245.959.100	mengantar, sering atau terbiasa tidak datang ke posyandu; • Pelaksanaan SDIDTK belum sesuai jadwal, orang tua balita tidak melaporkan hasil pengukuran antropometri di luar posyandu, balita pindah domisili, sweeping belum berjalan 100%	menggunakan link untuk orang tua yang melakukan penimbangan mandiri atau di faskes lain ketika tidak bisa menimbangkan anaknya di posyandu dan difollow up, mengedukasi ibu balita untuk melakukan SDIDTK (skrining perkembangan) mandiri melalui buku KIA dan melaporkan di posyandu, cleaning data sasaran balita yang benar-benar berdomisili di wilayah, warning/alarm system untuk balita	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			agar Sesuai Standar 17. Melaksana-kan Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga 18. Mengelola Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan Secara Optimal 19. Mengelola Operasional		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 100%	100%	• Adanya perubahan 30embali30n Gizi dan KIA pada capaian kinerja anak usia sekolah dan remaja yang awalnya menggunakan tahun	usia 7 bulan, 19 bulan, 31 bulan, 43 bulan, 55 bulan harus sudah timbang minimal 5 kali sebelum berulang tahun, melaksanakan posyandu satelit (di tingkat RT) khususnya untuk balita-balita yang belum ditimbang, koordinasi dan kerjasama lintas program dan sectoral • Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait (Dindik, Kemenag, Balai dikmen) • Penjadwalan skrining kesehatan untuk siswa lama dapat dimulai pada semester 1	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Pelayanan PSC 119 YES yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Secara Optimal		Anggaran = Rp533.506.000,- Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 82,3% Anggaran = Rp4.350.000,-	Keuangan = Rp531.669.900,- 100% Keuangan = Rp4.350.000,-	anggaran (bulan Januari-Desember), menjadi periode tahun ajaran (Juli – Juni), sehingga untuk capaian tahun 2024 merupakan capaian skrining Kesehatan dari bulan Juli 2023 s.d Juni 2024 • Masih terdapat posyandu yang belum buka pelayanan secara rutin, sehingga jadwal skrining yang telah dijadwalkan di reschedule • Lansia tidak hadir saat pelaksanaan skrining sehingga petugas harus	• Meningkatkan sosialisasi tentang pengisian mobscreen penjarkes • Penyebarluasan Media informasi terkait penjaringan Kesehatan • Menjadwal ulang posyandu lansia untuk kegiatan screening yang kemarin tertunda	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Rerata persentase rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan	91,5%	menjadwalkan kunjungan ulang • Adanya 32embal baru skrining yang dilaksanakan menggunakan SKILAS yang dilaksanakan kader • Diperlukan pelatihan kader secara 32embal untuk melaksanakan SKILAS Capaian sasaran sarana yg telah diIKL dan memenuhi ketentuan 32embali32n telah melebihi target namun terdapat bbrp masalah yg ditemukan, yaitu : 1. Pokmair dengan pengguna lebih dari 20 KK,	• Meningkatkan capaian pokmair yang memliki SK kepengurusan yg disahkan Lurah (draft sudah disiapkan), sehingga pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara berkala dg lebih optimal	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					memenuhi syarat kesehatan lingkungan = 90% Anggaran = Rp1.115.012.100,-	Keuangan = Rp1.064.777.205,-	belum semuanya memiliki SK kepengurusan yg disahkan Lurah 2. Beberapa sampel uji pada Parameter kimia Nitrat, Besi, Mangan tidak memenuhi SBMKL (Syarat Baku Mutu Kesehatan Lingkungan) 3. Belum semua Tempat Pengolahan Pangan (TPP) memiliki SLHS, karena terkendala pembiayaan beberapa uji laboratorium yang menjadi syarat wajib pengajuan SLHS. Khusus	• Menempatkan alat Sanitarian Kit sesuai kelompok Puskesmas Pelaksana SKAM RT (18 puskesmas) beserta BMHPnya lebih awal, dengan harapan pelaksanaan Survei dapat dimulai lebih awal jg, sesuai Juknis dari Kemenkes • Melaksanakan desinfo TPP termasuk DAM, secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan keamanan pangan sesuai prinsip higiene sanitasi • Mengoptimalkan komunikasi & koordinasi dengan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Persentase kemantren yang melaksanakan Germas = 100%	100%	untuk Depot Air minum (DAM) sudah dilakukan pembinaan pengurusan NIB dan SLHS dengan menggandeng Asdam; 4. Cakupan sampel uji belum dapat dilakukan optimal karena menyesuaian dengan tarif retribusi uji laboratorium sesuai Perda terbaru • Tidak Ada	Perumda PDAM Tirtamarta selaku penyelenggara air minum kota Yogyakarta. -	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Anggaran = Rp791.691.000,- Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan = 98% Anggaran = Rp10.207.675.636,- Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas = 95% Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan	Anggaran = Rp790.138.250,- 100% Anggaran = Rp10.146.870.646,- 100% 100%	• Tidak Ada - • Tidak Ada	• Proses perencanaan kebutuhan dan pengadaan obat vaksin berjalan sesuai target yang diharapkan, adanya Tim Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin, dilakukannya monev ketersediaan obat dan vaksin secara rutin tiap bulan - • Optimalisasi kinerja tim pembinaan dan pengawasan ditingkat Dinas Kesehatan dan berkolaborasi	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Kesehatan Sesuai Standar = 90% Anggaran = Rp28.705.000,- Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan = 77% Anggaran = Rp41.566.000,-	Keuangan = Rp26.696.330,- 100% Keuangan = Rp41.566.000,-	• Jumlah penduduk di sekitar benteng kraton berkurang 36embali karena adanya relokasi penduduk; Laporan jejaring belum optimal	dengan OPD yang membidangi perizinan • Penghitungan kembali dan rasionalisasi jumlah sasaran; Pelaksanaan skrining di sekolah dan tempat kerja; Integrasi program dengan skrining AUS dan kegiatan ACF TB; Monev jejaring Puskesmas; Koordinasi lintas program untuk mengoptimalkan capaian SPM 6 sesuai PMK No. 6 Tahun 2024 • Meningkatkan Layanan pandu PTM di puskesmas;	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan = 90% Anggaran = Rp1.600.000,-	100% Keuangan = Rp1.600.000,-	• Pasien ada yang belum rutin kontrol; Tingkat kepatuhan minum obat pasien belum optimal; Laporan jejaring belum optimal	Mendorong pasien untuk kontrol rutin dan minum obat; Monev jejaring FKTP; Updating sistem informasi pelaporan Hipertensi sesuai dengan protokol terbaru • Meningkatkan Layanan pandu PTM di puskesmas; Mendorong pasien untuk kontrol rutin dan minum obat; Monev jejaring FKTP	
					Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan = 90% Anggaran = Rp247.723.800,-	100% Anggaran = Rp 247.598.800,-	• Pasien ada yang belum rutin kontrol; Tingkat kepatuhan minum obat pasien belum optimal; Laporan jejaring belum optimal	• Meningkatkan sosialisasi, advokasi, dan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan = 90% Anggaran = Rp2.904.300,-	100% Rp2.904.300,-	• Tingkat kepatuhan minum obat dan 38embali rutin belum optimal; stigma di 38embali38n38 terhadap ODGJ masih ada sehingga mempengaruhi penerimaan terhadap ODGJ; Kurangnya perhatian dan peran serta keluarga dalam proses rehabilitasi ODGJ	koordinasi dengan lintas sektor, sektor formal, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait dengan kesehatan jiwa; meningkatkan pelayanan keswa terpadu di FKTP (dokter, perawat, psikolog klinis); koordinasi lintas program untuk meningkatkan upaya keswa; meningkatkan koordinasi dengan FKTL terkait rujuk balik layanan keswa, meningkatkan upaya promotif & preventif kesehatan jiwa	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 100% Anggaran = Rp2.388.538.400,- Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan = 100%	100% Rp2.364.782.400,- 100%	• Keterbatasan kesempatan ACF dengan mobile Xray yang diberikan oleh Tim ZTB Yogyakarta di wilayah Kota Yogyakata • Penggalian 39embal resiko klien yang test HIV lebih mendalam agar 39embal resiko dari klien dapat diketahui dengan tepat. Klien masih tidak terbuka terkait 39embal resikonya kepada nakes saat konseling HIV.	• Penemuan aktif terduga TB di wilayah dengan menggunakan metode lain (Investigasi kontak, rujukan pemeriksaan Xray dada ke RS Pratama) • Meningkatkan sosialisasi atau update knowledge secara masif terkait HIV tidak hanya di lingkungan rumah tetapi juga di seluruh instansi pemerintah, sekolah, perguruan tinggi dan tempat-tempat kerja lainnya. VCT mobile secara berkala di hotspot-	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Anggaran = Rp159.546.000,- Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD = 100%	Rp156.176.000,- 100%	Data per 3 Januari 2025 • Gerakan 1 Rumah 1 jumantik dengan Implementasi Gerakan Pemberantasan	hotspot tempat berkumpulnya populasi beresiko. Koordinasi dengan LSM Penjangkau untuk melakukan VCT statis dan mobile serta kegiatan tes HIV lainnya agar populasi beresiko dapat melakukan tes HIV setiap 3 bulan sekali.Update knowledge bagi Petugas tentang konseling HIV. • Tim Gerak Cepat Penyelidikan Epidemiologi dan Pengendalian Demam Berdarah di Tingkat Kecamatan di lakukan secara aktif	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Anggaran: Rp174.800.000,-	Rp101.422.250,-	sarang nyamuk (PSN) dengan 3 M Plus belum dilakasanakan oleh 41embali41n41 secara maksimal. KDRS dari Rumah Sakit sering terlambat (pasien sudah Pulang Rumah Sakit baru dikirimkan)	(Surveilans Aktif). Pengaktifan Pelaporan SKDR EBS untuk kasus DBD. Melakukan Monev terkait penanggulangan kasus DBD kepada Puskesmas dan Rumah Sakit • Monev pelaksanaan SKDR di Puskesmas, update pelaksanaan SKDR untuk petugas surveilans Puskesmas dan Rumah Sakit. • Melakukan Bimtek ke pengelola SKDR (petugas survelains puskesmas) pada puskesmas yang belum optimal dalam penemuan kasus potensial	
					Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam = 100% Anggaran = Rp1.013.502.300,-	100% Rp980.417.300,-	• Penjaringan kasus potensial KLB di Puskesmas belum optimal karena rata-rata kemunculan alert masih timpang di beberapa puskesmas • Kelengkapan dan ketepatan laporan Sistem Kewaspadaann Dini		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							dan Respon (SKDR) sudah tercapai 100%, namun perlu dioptimalkan terkait kualitas respon terhadap potensi KLB yang muncul • Kasus KLB: keracunan makanan (8 kasus), HFMD Klinis (1 kasus), Pertusis (5 kasus), Mumps Klinis (25 kasus), leptospirosis (1 kasus), diare/gastroenteritis akut (2 kasus), varicella (5 kasus) • update apliksasi monitoring pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan tetapi jika di akhir minggu	KLB di wilayahnya -Mengaktifkan pelaporan EBS SKDR di Puskesmas dan RS • monev pelaksanaan SKDR di Puskesmas, update pelaksanaan SKDR untuk petugas surveilans Puskesmas dan Rumah Sakit. • Melakukan Bimtek ke pengelola SKDR (petugas survelains	
					Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan = 100%	100%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							dan hari libur menunggu hari kerja, perbedaan antara 5 hari kerja di pusat dan 6 hari kerja di puskesmas membuat update di aplikasi yang berhubungan dengan aplikasi monitoring pemeriksaan kesehatan (pelunasan ongkos haji) tidak langsung terkoneksi, sehingga beberapa jamaah beberapa kali menanyakan status pelunasannya • Terdapat koordinasi yang baik antara Dinkes Kota dan Dinkes DIY dan juga lintas sektor	puskesmas) pada puskesmas yang belum optimal dalam penemuan kasus potensial KLB di wilayahnya -Mengaktifkan pelaporan EBS SKDR di Puskesmas dan RS	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							dengan Kementrian Agama Kota Yk • Melaksanakan koordinasi konsultasi dengan tingkat yang lebih tinggi dalam penyelenggaraaan pemeriksaan kesehatan haji. • Keterbatasan personil jika ada beberapa panggilan kegawatdaruratan pada waktu yang bersamaan • Capaian UHC menurun seiring adanya penonaktifan PBI	• Pengusulan penambahan personal • Jika ada masyarakat Kota Yk yang belum memiliki JKN dan bersedia memenuhi ketentuan PBI pemda maka akan didaftarkan menjadi	
					Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan = 100% Anggaran = Rp85.520.000,- Persentase penduduk yang mempunyai JKN = 100%	100% Rp62.602.500,- 100%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Anggaran = Rp42.271.553.161,- Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi = 87% Anggaran = Rp338.325.000,- Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas = 0,42	Rp36.658.846.593,- 100% Rp331.500.000,- 44,7	APBN sesuai data DTKS Dinas Sosial • Jumlah kepesertaan PBI APBD PDPD meningkat - • Aplikasi PIS PK mengalami keterlambatan update (tidak dapat dipastikan kapan terjadi perubahan), sehingga	Peserta JKN PBI PEMDA • Pendampingan Faskes oleh Tim Dinas Kesehatan dalamn upaya peningkatan Mutu Fasyankes • Pendampingan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) hasil rekomendasi survei akreditasi • Melakukan pelaporan pada Dinas Kesehatan DIY • Puskesmas melakukan update data IKS setiap bulan pada tgl 10	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Anggaran = Rp66.288.000,-	Rp66.288.000,-	mempersulit penilaian	• Puskesmas diminta melakukan download data IKS setiap bulan pada tgl 10	
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama = 80,5	86,82	• Secara keseluruhan, survei masyarakat terhadap RS Pratama sudah dalam kategori "Baik". Namun ada tiga unsur penilaian yang perlu perhatian lebih yaitu waktu pelayanan, produk spesifikasi pelayanan, dan sarana dan prasarana. Masih dalam proses evaluasi dan koordinasi untuk	• Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta terus berkomitmen untuk menjamin kemudahan prosedur pelayanan, salah satunya dengan mengembangkan sistem Elektronik Rekam Medis. Dengan penerapan ERM diharapkan waktu tunggu pelayanan bisa lebih efektif dan efisien serta perlunya komitmen bersama dalam	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							meningkatkan mutu layanan di RS Pratama	memberikan layanan kesehatan secara prima kepada pasien	
							• Tidak Ada	• Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk tercapainya pelayanan publik yang optimal	
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas = 80,5	84,33			
							• Aplikasi ASPAK tidak otomatis berubah ketika puskesmas melakukan update alkes yg dilanjut validasi Dinkes, sehingga sering terjadi perbedaan hasil persentase ASPAK.	• Melakukan pelaporan pada Dinas Kesehatan DIY tentang permasalahan • Melakukan pengecekan alkes langsung bersama tim Dinkes ke setiap puskesmas 1 kali/tahun • Melakukan monev 2 kali per tahun	
					Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas = 62	75,62			
					Nilai pemenuhan kelengkapan	79,57%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan = 46%			untuk validasi alkes puskesmas	
			1. Mengelola Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta Secara Optimal 2. Mengelola Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia	2. Program Peningkat-an Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tenaga kesehatan melaksanakan Praktik sesuai standar = 100% Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan = 5,00	100% 5,00	Tidak Ada	Komitmen dari tenaga kesehataan untuk selalu update data di aplikasi SISDMK dan Satu Sehat SDMK	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kota Yogyakarta Sesuai Regulasi Yang Berlaku 3. Mengelola Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kota Yogyakarta Secara Optimal 1. Mengelola Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko	3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan	Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat	100%	Tidak Ada		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Secara Optimal 2. Mengelola Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Secara Optimal 3. Mengelola Pengendalian dan Pengawasan	Makanan Minuman	Tradisional (UMOT) = 90% Anggaran = Rp13.868.000,- Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen = 85% Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen = 80% Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM)	Anggaran = Rp13.388.000,- 96,65% 90,8% 92%	Terdapat beberapa usaha yang didaftarkan tidak memenuhi syarat PIRT Masih ditemukan pelaku usaha yang belum melakukan cek air. Kecepatan masing-masing pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan berbeda-beda	Sosialisasi tentang kriteria dan persyaratan PIRT Koordinasi intensif dengan puskesmas dan pelaku usaha, serta berkolaborasi dengan Puskesmas untuk uji air dan tindaklanjutnya. Optimalisasi kinerja tim pembinaan dan pengawasan ditingkat Dinas Kesehatan dan berkolaborasi dengan OPD yang membidangi perizinan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Secara Optimal 4. Mengelola Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman		yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi = 90%				

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Secara Optimal 1. Mengelola Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Secara Optimal	4. Program Pemberda-yaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif target: 86.67% Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat = A	86,67% A	Stratifikasi kelurahan siaga dilaksanakan mulai TW 3 atau mulai bulan ke 9	Melakukan pendampingan kelurahan siaga melalui puskesmas sebagai pembina teknis di wilayah dan untuk verifikasi data	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kabupaten/ Kota					
		RSUD	1. Menyediakan Obat-obatan untuk Rumah Sakit 2. Menyediakan Pengadaan Bahan Habis Pakai	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp45.875.008.710,- 1. Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal = 80,5%	Rp43.177.972.607,- 80,93%	1. Indikator Program Persentase Sarana, Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medis Dan Non Medis Yang Terpelihara Dan Dapat Dioperasionalkan Secara Optimal telah tercapai melebihi target. Kegiatan pemeliharaan alat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak penyedia, kegiatan ini terkendala pada saat penyedia adalah penyedia tunggal sehingga bila ada masalah harus antri	1. Melakukan perencanaan pemeliharaan alat kesehatan dengan cermat agar alat kesehatan selalu dalam kondisi baik dan siap untuk mendukung pelayanan kepada pasien, Upaya pemeliharaan alat dilakukan dengan 3 skenario : a. Melakukan kontrak servis dengan pihak ketiga untuk menjaga alat agar tetap berfungsi dengan prima b. Adanya fasilitas peminjaman	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							untuk penanganannya	suku cadang dari pihak ketiga, jika pada saat dilakukan servis ternyata membutuhkan penggantian suku cadang sedangkan suku cadang harus indent atau harus dikirim dari luar negeri sehingga membutuhkan waktu lama c. Dilakukan rujuk parsial ke RS sekitar jika kedua hal diatas belum berhasil	
			1. Melaksanakan Pemeliharaan Alat		2. Persentase tercapainya indikator SPM	87,03%	2. Tahapan pengembangan	2. Menyusun rencana pemenuhan sarana prasarana dan alat	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar		layanan medis Rumah Sakit = 83%		SDM memerlukan alokasi biaya dan waktu, sementara pelayanan terus berjalan. Tidak jarang hal ini menjadi faktor penghambat terhadap layanan eksisting yang ada, sebagai contoh ketika personel tenaga kesehatan menjalani pendidikan lanjutan atau pelatihan yang memerlukan waktu yang lama, maka tenaga kesehatan yang eksisting bekerja menjadi berkurang. Disatu sisi itu merupakan bagian dari konsekuensi pengembangan	kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga dilakukan inovasi pelayanan dan upaya penguatan komitmen dan kemampuan SDM dengan orientasi pelayanan prima	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Menyediakan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit		3. Persentase instrument mutu asuhan keperawatan = 84%	94,93%	SDM RS. Berkurangnya tenaga eksisting Nakes yang bekerja membuat rasio tenaga kesehatan dan pasien yang dilayani menjadi semakin tidak ideal 3. Sarana prasarana yang mendukung layanan asuhan keperawatan belum merata, jumlah SDM Keperawatan yang semakin berkurang karena purna tugas dan resign sedangkan pelayanan terus bertambah.	3. Dilakukan penyusunan perencanaan untuk pembaharuan sistem dan kelengkapan sarana prasarana untuk mendukung asuhan keperawatan agar lebih merata, dan juga dilakukan peningkatan kompetensi pelayanan keperawatan melalui berbagai pendidikan dan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Menyediakan Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		4. Presentase pendapatan BLUD Rumah Sakit = 100%	116,26%	4. Syarat pengajuan klaim yang terkadang belum lengkap sehingga menyebabkan klaim menjadi tertunda atau tertolak dalam proses verifikasi oleh BPJS Kesehatan	pelatihan serta adanya rencana pemenuhan kebutuhan SDM keperawatan melalui rekrutmen pegawai BLUD pada tahun anggaran 2025. 4. Pengajuan klaim jaminan kesehatan tepat waktu dengan memenuhi persyaratan klaim sesuai ketentuan, pengajuan klaim jaminan kesehatan yang lebih mudah karena sudah difasilitasi dengan aplikasi pengajuan klaim dari BPJS Kesehatan berupa aplikasi P-CARE	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Meyediakan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan 2. Menyediakan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan 3. Menyelenggarakan Operasional Pelayanan Rumah Sakit 4. Menyediakan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			5. Mengelola BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan						
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPKP	1. Melaksanakan Pemeliharaan Berkala Jalan 2. Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jembatan 3. Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jalan	Program Penyeleng-garaan Jalan	Rp32.082.589.900,- Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan = 92,25	Rp29.880.447.165,- (93.13%) 93,36%	1. Keterbatasan lahan rumija untuk bangunan pelengkap jalan dan fasilitasnya yang sesuai dengan standart (trotoar sempit) di semua ruas jalan. 2. Alih fungsi trotoar menjadi PKL dan tempat parkir 3. Terdapat pekerjaan yang kurang sinkron dengan agenda pekerjaan instansi pemerintah maupun badan usaha.	1. Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk penataan utilitas di atas trotoar 2. Berkoordinasi dengan wilayah dan Satpol PP untuk mengembalikan fungsi trotoar 3. Sinkronisasi agenda pekerjaan tiap instansi, baik antar instansi pemerintah maupun badan usaha daerah diselesaikan dengan melakukan koordinasi intensif pembahasan	
			1. Melaksanakan pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Rp402.720.000,- Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan = 100%	Rp402.670.000,- (99,98%) 100%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							4. Cuaca yang kurang mendukung sehingga pekerjaan hampar aspal dan pekerjaan fisik lapangan terhambat tapi dapat terselesaikan sesuai dengan kontrak 5. Banyaknya kerusakan pada pedestrian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti ballard rusak, street furniture mengalami vandalisme.	tatakala grand design pekerjaan masing-masing instansi 4. Melakukan koordinasi internal agar pekerjaan fisik dapat terselesaikan sesuai dengan tata kala 5. Koordinasi dengan Satpol PP untuk pengendalian risiko tingkat kerusakan pada pedestrian	
			1. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing Sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp6.290.324.295,- Persentase kualitas talud dan saluran irigiasi kondisi baik = 92,63%	Rp5.941.549.413,- (94,45%) 92,63%	1. Adanya infrastruktur bawah tanah seperti jaringan telekomunikasi, saluran limbah,	1. Koordinasi dan pendampingan di saat pekerjaan konstruksi oleh pemilik infrastruktur bawah tanah	1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi di DPUESDM DIY pada 13 Oktober 2024

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			2. Melaksanakan rehabilitasi tanggul Sungai 3. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan				jaringan air bersih, dan irigasi 2. Proses konstruksi mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas warga di sekitar lokasi pekerjaan SAH	2. Koordinasi dengan satlantas terkait proses konstruksi yang dimungkinkan mengganggu lalu lintas dan aktivitas warga serta dilakukan juga penyesuaian waktu (dikerjakan malam hari) pengerjaan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.	2. PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta telah melaksanakan kerja sama dengan beberapa hotel yang ada di Kota Yogyakarta dalam penyediaan air bersih untuk kebutuhan operasional hotel. 3. Dinas PUPKP Kota Yogyakarta melaksanakan workshop dan mendorong kelompok masyarakat pemanfaat/penggguna sumur komunal untuk menggunakan/memanfaatkan air bersih dari PDAM Tirtamarta

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Melaksanakan pembangunan saluran drainase perkotaan 2. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem drainase	Program Pengelolaan Dan Pengemba-ngan Sistem Drainase	Rp16.706.180.364,- Persentase pemenuhan drainase kondisi baik = 88,44%	Rp16.174.514.750,- (96,82%) 88,44%	1. Adanya insfrastruktur bawah tanah seperti jaringan telekomunikasi, Saluran limbah, jaringan air bersih, irigasi 2. Proses konstruksi mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas warga di sekitar lokasi pekerjaan SAH	1. Koordinasi dan pendampingan di saat pekerjaan konstruksi oleh pemilik infrastruktur bawah tanah 2. Koordinasi dengan satlantas terkait proses konstruksi yang dimungkinkan mengganggu lalu lintas dan aktivitas warga serta dilakukan juga penyesuaian waktu (dikerjakan malam hari) pengerjaan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat	
			1. Melaksanakan Pengubahsuai-an Bangunan	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp32.073.314.930,-	Rp30.623.548.057,- (95,48%) 91,92%	1. Pekerjaan mundur melebihi tatakala yang sudah tertuang pada kontrak	1. Koordinasi secara intensif di internal dan eksternal terkait	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota 2. Melaksanakan Pembanguna, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota 3. Melaksanakan penerbitan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),		Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik = 91,79% Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF = 100%	100%	pekerjaan. Karena kurang kompetennya pihak penyedia jasa konstruksi, terdapat beberapa masalah dalam proses pembangunan seperti ketersediaan sumber daya penyedia yang kurang, manajemen penyedia yang tidak baik 2. Banyaknya antrian proses verifikasi pengajuan PBG di TPA (Tim Profesi Ahli) dan TPT (Tim Penilai Teknis).	pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat terselesaikan. 2. Untuk mengatasi permasalahan banyaknya antrian proses verifikasi PBG maka telah diupayakan Penambahan Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis di tahun 2024 dan tenaga administrasi internal untuk mempercepat kinerja proses penerbitan rekomendasi PBG dan SLF. Diampu oleh Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 1. Melaksanakan Pengelolaan Taman Budaya	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp27.513.086.000,- Persentase dukungan penyelenggaraan	Rp27.344.475.180,- (99,38%) 100%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					keistimewaan urusan kebudayaan = 100%				
			1. Melaksanakan penyelenggara-an pelatihan tenaga terampil konstruksi 2. Melaksanakan penyelenggara-an sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	Pengembang-an Jasa Konstruksi	Rp546.842.900,-	Rp500.876.145,- (91,59%)	1. Kurangnya masyarakat di kota Yogyakarta yang berprofesi sebagai tenaga kerja konstruksi	1. Pada tahun 2024 ini pelatihan dan uji sertifikasi difokuskan ke jabatan kerja jenjang 5, sehingga dapat memaksimalkan peserta pelatihan dan uji sertifikasi yang berasal dari lulusan baru perguruan tinggi di kota Yogyakarta dan sekitarnya	
			1. Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Penyelenggara-an Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp34.833.139.930,- Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah	Rp33.480.806.466,- (96,11%) 81,53%	1. Proses pengadaan di BPBJ mengalami kemunduran secara tatakala 2. Terdapat pekerjaan yang selesai tidak	1. Menyesuaikan waktu pekerjaan agar dapat selesai tepat waktu	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					lingkungan = 81,45%		tepat waktu sesuai kontrak 3. Penataan Penerangan Jalan Kota - kawasan Kotabaru mengalami addendum terkait perubahan titik lokasi pekerjaan.	2. Melakukan koordinasi intensif dengan penyedia 3. Berkoordinasi dengan pihak eksternal (perencana dan penyedia) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut	
		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)	1. Menyusun dokumen Raperda dan Raperwal penetapan kebijakan penataan ruang selain RTRW dan RDTR Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas	Program Penyeleng-garaan Penataan Ruang	Rp1.979.062.000,- Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang = 83,89% Persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang = 91,91%	Rp1.961.650.367,- 85.79% 92,37%	1. Alur penyusunan dan penetapan Raperwal kebijakan penataan ruang turunan RTRW dan RDTR membutuhkan waktu dari sisi legal drafting pembahasan hukum	1. Koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam percepatan pembahasan dan penyepakatan subtansi antar OPD	Paska penetapan Pergub DIY No 2 Tahun 2024, Kota Yogyakarta telah: 1. Menetapkan Perwal No 60 Tahun 2024 ttg Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Dunia sumbu Filosofis Yogyakarta 2. Menetapkan Perwal No. 49 Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			operasional peraturan tata ruang 2. Melaksanakan layanan pemanfaatan ruang dan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang berkualitas 3. Menyusun dokumen RTRW, RDTR, RTBL dan RRTR lainnya di Kota Yogyakarta yang tertib dan berkelanjutan						tentang RTBL Kawasan Malioboro 3. Melaksanakan Evaluasi bersama Biro Hukum DIY tentang Raperwal Pedoman Teknis Pengelolaan Sumbu Filosofis 4. Melaksanakan Penyiapan Raperwal RTBL Kawasan Mangkubumi dan RTBL Kawasan Kraton

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			4. Menyusun kajian dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat dalam bidang penataan ruang yang berkualitas 5. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan data dan informasi dalam rangka pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta melalui sistem informasi tata ruang yang akurat						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			6. Menyediakan data rinci kesesuaian existing pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang daerah dan Memenuhi kebutuhan informasi 7. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta						
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permuki-man	Dinas PUPKP	1. Melaksanakan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh 2. Melaksanakan Perbaikan	Program Kawasan Permukiman	Rp14.125.992.189,- Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun = 34,68%	Rp14.071.729.492,- (99,61%) 50,71%	1. Kesiapan masyarakat dalam hal waktu pelaksanaan untuk ditata rumah/lingkungan-nya	1. Melakukan sosialisasi dan pendekatan bagi masyarakat yang akan ditata rumah/ lingkungannya	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Rumah Tidak Layak Huni 1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1. Melaksanakan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 2. Melaksanakan Pembangunan	Program Pengelolaan Dan Pengembang-an Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembang-an Sistem Air Limbah	Rp10.110.000,- Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan = 100% Rp13.800.430.041,- Persentase pelayanan SPALD-S akses layak = 58,80% Persentase pelayanan SPALD-S akses aman = 21,05%	Rp10.094.000,- 100% Rp13.648.320.129,- (98,89%) 55,24% 23,80%	1. Adanya calon penerima manfaat yang mengundurkan diri (tidak jadi dipasang Sambungan Rumah (SR)	1. Penyesuaian kembali perhitungan kebutuhan volume material (penyesuaian anggaran) dan perhitungan target Sambungan Rumah yang terbangun	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 3. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Pengelolaan Air Limbah 1. Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 2. Melaksanakan Pendataan	Program Pengembang-an Perumahan	Persentase pelayanan SPALD-T akses aman = 19,52% Rp1.749.388.260,- Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun = 80,00% Persentase penanganan rumah	19,87% Rp1.724.338.036,- (98,56%) 92,27% 100%	1. Adanya piutang penghuni yang sudah tidak terlacak datanya 2. Tidak adanya lahan serta adanya resistensi dari masyarakat untuk dilakukan relokasi.	1. Mencari alamat penghuni yang masih memiliki piutang, serta berkoordinasi dengan BPKAD untuk penghapusan piutang.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota 1. Melaksanakan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan-nya	korban bencana dan relokasi program = 100% Rp6.344.072.925,- Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik = 94,98%	Rp6.276.635.858,- (98,93%) 96,17%	1. Keterbatasan lahan dalam memenuhi fasilitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Hunian yang layak.	2. Melakukan intervensi teknologi misalnya seperti pembangunan talud/tanggul untuk lokasi yang rawan bencana namun tidak dapat dilakukan relokasi. 1. Melaksanakan penataan melalui pola peremajaan dengan konsep Konsolidasi Lahan.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			2. Melaksanakan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota 1. Melaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Program Penyeleng-garaan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp585.000.000,- Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan = 100%	Rp585.000.000,- 100%			
5	Ketentera-man, Ketertiban Umum dan Perlindu-ngan Masyarakat	1) Satpol PP	1. Melaksanakan pengendalian potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	1. Program Peningka-tan Ketentera-man dan Ketertiban Umum	Rp28.556.465.100,- Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan	Rp27.297.674.274,- (95,59%) 100%	1. Kegiatan yang sifatnya kondisional dan insidentil terkadang mempengaruhi serapan anggaran tidak optimal meskipun realisasi	1. Identifikasi dan reviu kegiatan yang kurang optimal dalam mendukung pencapaian sasaran termasuk anggarannya sehingga dapat	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			melalui kegiatan diantaranya melaksanakan patroli pencegahan gangguan tibumtranmas, pengamanan kegiatan dan event Pemkot Yogyakarta serta tempat penting/obyek vital milik Pemkot Yogyakarta; pengawalan pejabat dan orang penting; Melaksanakan operasi pengawasan dan pengamanan tertutup serta		ketentraman masyarakat = 100%		fisik telah tercapai, misal program penunjang/pemeliharaan (peralatan dan kendaraan), dukungan kegiatan korps musik menyesuaikan jadwal yang dinamis, Peraturan ganti kerugian terhadap WN sebagai dampak pelanggaran perda (SPM) serta kegiatan pembongkaran reklame yang menyesuaikan kebijakan Tim Pemkot 2. Keadaan yang dinamis di lapangan yang dapat mempengaruhi terjadinya potensi	dioptimalkan pelaksanaannya pada tahun perencanaan berikutnya dengan prioritas memperhatikan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara berkala setiap bulan sehingga apabila terdapat kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal dapat disesuaikan pada tahapan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			deteksi cegah dini terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta				konflik yang lebih besar (kondisi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat)Keadaan yang dinamis di lapangan yang dapat mempengaruhi terjadinya potensi konflik yang lebih besar (kondisi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat) 3. Terbatasnya jumlah petugas operasi tertutup yang sudah mengikuti diklat intelijen 4. Keterbatasan sarpras khususnya kendaraan operasional kegiatan patroli dan	penyusunan APBD Perubahan; 3. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan dan instansi vertikal melalui Forkompimda dalam meminimalisasi terjadinya gangguan tibumtranmas yang berpotensi menimbulkan konflik di Masyarakat; 4. Redistribusi dan optimalisasi personil intelijen/pengamanan tertutup; 5. Intensifikasi koordinasi	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							mobilisasi pasukan pengamanan	pengusulan dan pengiriman diklat teknis intelijen; 6. Laporan kegiatan dan kejadian disampaikan setiap saat/ real time melalui media komunikasi digital dan dirangkum setiap hari serta disampaikan kepada pimpinan dan seluruh Bidang untuk ditindaklanjuti 7. Memberikan edukasi, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat secara terus menerus ketika pelaksanaan patroli ketertiban umum.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Menyelesaikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Perkada secara non yustisi; 2. Menyelesaikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Perkada secara yustisi 3. Menyediakan Laporan Penyediaan Layanan dalam Rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada = 100%	100%	1. Masih perlunya optimalisasi koordinasi dengan OPD teknis, terkait jenis penegakan perda yang fungsi tindakan preventif yang diampu oleh OPD pembina dan pengawas 2. Banyaknya peraturan daerah yang perlu ditegakkan menjadi kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatan dalam kaitannya dengan jumlah SDM Satpol PP dan tatakala kegiatan 3. Masih banyaknya pelanggaran terhadap beberapa	1. Sosialisasi perda dan perkada dengan media sosial melalui pembuatan konten-konten edukasi kepada Masyarakat 2. Mempersiapkan petugas fungsional Pol PP untuk mengikuti diklat fungsional teknis sebagai upaya pengembangan kapasitas dan optimalisasi ketugasan penegakan perda dan perkada 3. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan dan instansi vertikal melalui	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							perda khususnya perda PKL dan KTR di kawasan Malioboro sebagai ekses dari meningkatnya kunjungan wisatawan di musim liburan 4. Proses pengurusan perizinan yang lama dan berbelit-belit yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran khususnya dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung. 5. Kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung penerapan penegakan perda, seperti kebijakan	Forkompimda dalam mengurangi pelanggaran perda dan perkada 4. Komitmen melaksanakan penegakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan analisa terhadap suatu pelanggaran secara baik. 5. Melakukan usulan, masukan guna perbaikan peraturan daerah maupun peraturan walikota berdasarkan kondisi dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							mengenai mekanisme perijinan bangunan gedung yang dianggap mempersulit masyarakat, perda miras yang sudah tidak relevan, regulasi perijinan PKL yang masih dalam pembahasan, di sisi lain ada kebijakan untuk tidak memberikan izin kepada PKL lagi sejak tahun 2017 6. kurangnya SDM Penyidik PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terutama di masing masing OPD pengampu perda	6. Sinergi, kolaborasi dan koordinasi dengan instansi terkait maupun pimpinan daerah jika terjadi permasalahan yang membutuhkan kebijakan 7. Melaksanakan sosialisasi pemahaman peraturan perundang-undangan bagi anggota Satpol PP 8. Meningkatkan kapasitas fisik dan mental pegawai Pol PP melalui kegiatan kesamaptaan pengiriman Diklat Teknis bagi anggota Satpol PP 9. Intensifikasi koordinasi	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							yang menyebabkan penegakan pelanggaran perda kurang optimal	pengusulan dan pengiriman Diklat PPNS bagi pegawai yang telah memenuhi syarat 10. Melaksanakan coaching clinic PPNS untuk meningkatkan kualitas PPNS	
			1. Melaksanakan peningkatan peran serta dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota Yogyakarta;		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat = 91,34%	91,81%	1. Koordinasi lintas OPD belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Panca Tertib 2. Regenerasi petugas linmas menjadi tantangan dalam optimalisasi ketugasan linmas di Kota Yogyakarta 3. Pelopor Ketertiban (Pekerti) dengan banyak tugas	1. Memasifkan kegiatan penumbuhan Gerakan Panca Tertib sehingga dapat meminimalisir dan mengoptimalkan indentifikasi pelanggaran perda yang terjadi di tingkat Kampung melalui pemetaan kampung rawan terjadinya	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			2. Melaksanakan fungsi tugas perbantuan petugas linmas dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				lainnya yang sejenis sebagai pengurus kampung berpengaruh terhadap optimalisasi kegiatan GKPT 4. Waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi masyarakat terkadang terkendala bersamaan dengan agenda kemasyarakatan yang lain 5. SDM yang belum tercukup secara ideal dalam pendampingan Forum Kampung Panca Tertib dan belum maksimalnya kerja sama antar OPD dalam	pelanggaran perda dan perkada 2. Memaksimalkan koordinasi dengan OPD terkait dan SDM pendamping GKPT serta sinkronisasi anggaran yang terbatas dengan kegiatan yang ada di wilayah 3. Konsistensi dalam fasilitasi dan pendampingan kegiatan Gerakan Panca Tertib untuk menjaga serta memelihara semangat, peran serta aktif dan komitmen masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman dan ketertiban serta	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							penyelesaian permasalahan.	perlindungan masyarakat di wilayah kampung 4. Peningkatan profesionalisme petugas linmas melalui sosialisasi, pelatihan, dan pengembangan kapasitas dalam rangka mendukung ketugasan linmas. 5. Masih tingginya animo masyarakat dalam kegiatan perlindungan Masyarakat	
			1. Melaksanakan pembinaan SDM dan bimbingan intelektual/kons		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP = 97%	98,61%	1. Masih terdapat beberapa kegiatan yang bersamaan jadwal pelaksanaannya	1. Reviu jadwal ketugasan petugas serta perubahan strategi terkait konsep dan bentuk kegiatan pengembangan kapasitas	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			eling SDM Pol PP dan Linmas 2. Melaksanakan Pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme Satpol PP dan Satlinmas; 3. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Penyidik PNS (PPNS)				dengan agenda kegiatan lain sehingga mempengaruhi jumlah keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kapasitas 2. Kedisiplinan dan pemahaman pegawai terkait kode etik Satpol PP masih belum optimal	2. Melaksanakan pembinaan pegawai secara berkala dengan mengoptimalkan Unit Petugas Tindak Internal (PTI) 3. Konsep kegiatan dilaksanakan lebih interaktif dan lebih dinamis sehingga motivasi pegawai dalam mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas SDM meningkat 4. Melaksanakan pengembangan kapasitas SDM pegawai secara fisik, mental dan spiritual serta penambahan wawasan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								pendukung ketugasan	
		2) BPBD	1. BPBD diperkuat sebagai koordinator, komando, dan pelaksana penanggulangan bencana di daerah melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulang-an Bencana (TRC-PB) 2. Kesiapsiagaan masyarakat dan dunia usaha ditingkatkan melalui: • Pembentuk-an Kampung Tangguh	Program Penanggulangan Bencana : 1. Kegiatan Pelayan-an Informasi Rawan Bencana Kab/Kota 2. Kegiatan Pelayan-an Pencegah-an dan Kesiap-siagaan Terhadap Bencana 3. Kegiatan Pelayan-an Penyelam-atan dan	Rp8.158.952.150,- Presentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana = 82,06% Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap = 100% Persentase penanganan rehabilitasi dan	Rp8.013.949.291,- (98,22%) 82,06% 100% 100%	Dokumen dan kegiatan : 1. Mekanisme bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana belum diatur secara resmi dalam Peraturan Walikota (Perwal) 2. Koordinasi antarlembaga/OPD terkait pelayanan penanggulangan bencana di luar jam kerja perlu ditingkatkan. Pelatihan dan Kapasitas : 1. Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) belum ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi resmi	1. Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) dilaksanakan melalui kerjasama antara BPBD dan PMI Kota Yogyakarta untuk menghasilkan sertifikasi Penanggulangan Bencana. 2. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah dilakukan untuk menentukan jadwal pelaksanaan Sekolah Penanggulangan Bencana (SPAB). Pengadaan dan Penghapusan Aset : 1. Dua unit mobil jenazah yang sudah melewati umur ekonomis dihapuskan dan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Bencana (KTB) • Pembentukan Satuan Pendidikan Aman bencana (SPAB) • Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) • Kerjasama penanggulangan bencana melalui program CSR • Pendidikan dan Pelatihan penanggulangan	Evakuasi Korban Bencana 4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	rekonstruksi pasca bencana = 100%		dari lembaga berwenang. Jadwal dan Koordinasi: 1. Jadwal pelaksanaan Sekolah Penanggulangan Bencana (SPAB) dengan sekolah perlu disinkronkan dan difinalisasi untuk menghindari perubahan Pengadaan dan Pemeliharaan: 1. Sejumlah mobil jenazah milik BPBD sudah melewati umur ekonomis dan memerlukan penggantian	digantikan dengan pengusulan pengadaan satu unit mobil jenazah baru pada tahun anggaran 2025	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			bencana bagi aparatur dan masyarakat. 3. Identifikasi dan penyusunan Kajian Risiko Bencana dilakukan untuk meminimalkan dampak bencana 4. Sistem peringatan dini yang handal dibangun untuk memberikan peringatan kepada masyarakat sebelum bencana terjadi 5. Pemulihan pasca-bencana dilakukan						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			dengan membangun kembali infrastruktur dan memberikan bantuan rehabilitasi serta rekonstruksi untuk rumah yang terdampak bencana.						
		3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran	Program Pencega-han, Penanggu-lngan, Penyelama-tan Kebakaran dan Penyelama-tan Non Kebakaran 1. Pencegah-an, Pengenda	Rp15.502.168.350,- Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran = 99,52%	Rp13.888.216.785,- 99,73%	1. Permasalahan : a. Pelaksanaan Pembangunan hidran kering kampung berdasarkan DED yang telah ada dikarenakan keterbatasan anggaran. b. Lalu lintas padat pada jam sibuk dan	1. Upaya : a. Pembangunan hidran kering kampung dilaksanakan berdasarkan prioritas dan anggaran yang tersedia. b. Dinas Perhubungan telah memberikan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				-lian, Pemadam-an, Penyelam-atan, dan Penangan-an Bahan Berbaha-ya dan Beracun Kebakar-an dalam Daerah Kab/Kota 2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakar-an 3. Investiga-si Kejadian Kebakar-an			liburan panjang, akses masuk lokasi yang sempit, Jalan lingkungan yang belum memenuhi standar untuk dilalui unit mobil pemadam kebakaran mempengaruhi pemenuhan respontime c. Baru memiliki 1 pos sektor, sedangkan idealnya 4 pos sektor d. Belum memiliki Personil khusus rescue/ penyelamatan untuk menangani penyelamatan	peralatan priority vehicle traffic system yang terpasang dikendaraaan pemadam kebakaran namun belum berfungsi secara maksimal c. Memaksimalkan Pos yang ada yaitu Pos Mako dan Pos Sektor .Serta pemberdayaan Redkar untuk membantu mengkondisikan penanganan awal pemadaman di wilayah sesuai dengan pelatihan yang	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				4. Pemberda-yaan Masyara-kat dalam Pencegah-an Kebakar-an			2. Inspeksi Alat Proteksi Kebakaran bagi Bangunan Gedung Perkantoran, Bangunan Gedung Pemerintahan, Bangunan Gedung Hotel, Bangunan Cagar Budaya, dan Gedung – gedung bangunan tinggi belum secara menyeluruh 3. Belum tersedianya layanan secara online untuk edukasi TK/PAUD, SD, dan SMP	diberikan oleh Damkar. d. Personil memiliki tugas ganda sebagai petugas Pemadam dan Rescue/ Penyelamatan 2. Inspeksi Alat Proteksi Kebakaran bagi Bangunan Gedung Perkantoran, Bangunan Gedung Pemerintahan, Bangunan Gedung Hotel, Bangunan Cagar Budaya, dan Gedung – gedung bangunan tinggi dilakukan secara bertahap 3. Permohonan masih secara manual	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
6	Sosial	Dinsosnaker-trans	1. Melaksanakan dukungan terhadap peningkatan kapasitas dan kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Rp641.461.100,- Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif = 91,99%	Rp640.461.100,- 91,99% (Capaian: 100%)	1. Kurangnya regenerasi kepengurusan 2. Beberapa pengurus memiliki pekerjaan lain sehingga kurang aktif berkegiatan	Optimalisasi monev PSKS bersama tim pendampingan PSKS.	
			1. Memenuhi layanan anak terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rp3.513.187.386,- Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 100%	Rp3.273.069.361,- 100% (Capaian: 100%)	Kurangnya partisipasi PPKS (Penyandang Disabilitas, Anak, Lansia, ABH, dan Tuna Sosial/ Gepeng) dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	Koordinasi dengan TKSK PSM, dan pihak terkait untuk dapat memberikan motivasi kepada PPKS dan Keluarganya agar mau mengikuti kegiatan pemberdayaan.	
			2. Memenuhi layanan penyandang disabilitas dengan		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi	100% (Capaian: 100%)	Keterbatasan layanan di camp assessment bagi PPKS	Koordinasi antara stakeholder dan tim pendamping dalam penanganan PPKS	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			advokasi dan rehabilitas sosial		kebutuhan dasarnya di luar panti = 100%				
			3. Memenuhi layanan lansia terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosial.		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 100%.	100% (Capaian: 100%)			
			4. Memenuhi layanan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dengan advokasi dan rehabilitasi sosial.		Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 100%.	100% (Capaian: 100%)			
			5. Melaksanakan pelayanan bagi Penyandang Masalah		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100% (Capaian : 100%).			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.		lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial: 100%.				
			6. Melaksanakan pendampingan masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam KUBE dan USEP.		Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri = 45,58%	46,11% (Capaian 100%).	Kinerja pendampingan oleh Tim Monitoring KUBE masih belum maksimal dalam mendorong KUBE menuju mandiri	Optimalisasi Pembinaan kepada Tim Monitoring KUBE dan pendampingan anggota KUBE	
			7. Melaksanakan Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial = 100%.	100% (Capaian 100%).	Kejadian yang ditangani bersifat adang-adang (tidak dapat diprediksi	Optimalisasi komunikasi antara stake holder terkait layanan kedaruratan sosial	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Melaksanakan pengelolaan dan penyusunan database Fakir Miskin (PPKS dan PSKS) 2. Memenuhi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp2.327.892.500,- Persentase akurasi data sasaran intervensi kemiskinan = 100% Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial = 92,83%.	Rp2.203.194.450,- 100% (Capaian 100%). 92,91% (Capaian 100,09%).	Proses untuk mendapatkan BNBA DTKS membutuhkan mekanisme yang lebih rumit dan waktu yang lebih lama Ketidakjelasan periode bansos APBN	Bimtek Verval yang diikuti 225 PSM sehingga hasil Verval bisa dipertanggungjawab-kan dan tersimpan secara digital Koordinasi intensif dengan stakeholder terkait.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Memenuhi orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial 2. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan organisasi sosial masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Program Penanganan Bencana	Rp.626.041.650,00. Target Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota: 100%.	Rp.432.295.350,00. 100% (Capaian 100%).	Kejadian yang ditangani bersifat tidak dapat diprediksi.	Koordinasi secara intensif dg stakeholder terkait penanganan bencana.	

3.1.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel III. 2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Tenaga Kerja	Dinsosnaker-trans	1. Menyusun Rencana Kerja Makro	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp195.341.250,- Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja = 69,47%	Rp194.131.150,- Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja: 62,98% (Capaian 100,80%)	Petugas pendataan penganggur merangkap jabatan dengan ketugasan yang lain sehingga kurang efektif dalam melakukan pendataan	1. Melakukan verifikasi data melalui system (Si Anggur) 2. Optimalisasi Koordinasi dengan pihak terkait	
			1. Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi. 2. Melaksanakan Pembinaan LPK Swasta. 3. Melaksanakan peningkatan Produktivitas pada Perusahaan.	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp2.024.357.560,- Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal = 92,01%.	Rp2.015.791.600,- Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal: 92,38% (Capaian 100,40%).	Terdapat satu peserta pelatihan Social Media Marketing DBHCHT Angkatan 3 yang tidak dapat mengikuti pelatihan karena resign dari Tarumartani	Optimalisasi Koordinasi dengan pihak terkait	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Melaksanakan penyuluhan bimbingan jabatan dan perluasan kesempatan kerja 2. Melaksanakan sinkronisasi unit layanan disabilitas ketenagakerja-an di daerah Kab/Kota. 3. Menyediakan informasi pasar kerja dan pencari kerja.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp1.191.937.000,- Persentase penempatan tenaga kerja = 53,11%	Rp1.188.621.150,- Persentase penempatan tenaga kerja: 53,13% (Capaian 100,04%)	1. Tidak sesuainya persyaratan pemberi kerja dengan kualifikasi pencari kerja 2. Pencari kerja yang mengikuti jobfair kualifikasinya dibawah standar perusahaan	Optimalisasi perluasan kesempatan kerja , penempatan dan pelatihan berbasis kompetensi.	
			1. Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan	Program Hubungan Industrial	Rp1.627.213.500,- Persentase perusahaan yang sudah mempunyai	Rp1.573.792.539,- Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan	Ada beberapa perusahaan yang mengabaikan pentingnya adanya sarana HI	Melakukan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dengan bekerja sama	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan 2. Melaksanakan peningkatan penerapan struktur skala upah oleh perusahaan. 3. Melaksanakan hubungan industrial yang kondusif di perusahaan. 4. Melaksanakan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.		sarana hubungan industrial = 42,31%	industrial: 43,42% (Capaian 102,64%)		dengan pengawas ketenagakerjaan DIY	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
2	Pemberda--yaan Perempuan dan Perlindu-ngan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Meningkatkan Pengarusutama an gender dan pemberdayaan Perempuan	1. Program Pengarus-utamaan Gender dan Pemberda-yaan Perempuan	Rp799.092.765,- Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif 93,41%	Rp795.211.750,- 93,41%	1. GAP GBS belum menjadi sebuah kebutuhan dan kebiasaan (rutinitas) di setiap perencanaan 2. Belum ada punishment bagi OPD yang tidak menyusun GAP GBS	1. Capaian kelembagaan PUG di dukung oleh koordinasi dan konfirmasi langsung saat Desk Renja 2025 yang dilakukan dengan seluruh OPD. Sehingga setelah koordinasi tersebut, banyak OPD yang melakukan update GAP GBS, serta SK Focal Point 2. Sudah ada penguatan dan pendampingan kelembagaan PUG yang aktif terkait penyusunan renja OPD bersama OPD Driver 3. Pelatihan untuk auditor inspektorat sebagai OPD	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								Driver pengawasan oleh DP3AP2 DIY 4. Indikator GAP GBS masuk dalam evaluasi kemantren sehingga dapat mendorong kemantren dan kelurahan untuk menyusun GAP GBS tersebut 5. Ada review GAP GBS dari Inspektorat	
			2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan	2. Program Perlindu-ngan Perempuan	Rp799.605.600,- Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani = 100%	Rp787.556.075,- 100%	1. Masih besarnya stigma masyarakat bahwa KDRT atau permasalahan dalam keluarga adalah aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, sehingga menyebabkan	1. DP3AP2KB akan terus meningkatkan kegiatan KIE di berbagai media yang bisa diakses 2. Mengadakan pelatihan manajemen kasus kepada petugas layanan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							orang-orang yang mengalami kekerasan tersebut tidak berani melapor kepada lembaga-lembaga layanan pengaduan tersebut. 2. Belum meratanya edukasi kepada masyarakat terkait kekerasan dan cara pelaporannya.		
			3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp1.661.460.500,- Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak = Utama	Rp1.660.996.635,- Utama	1. Ada kegiatan yang harus menyesuaikan dengan waktu dari mitra/lembaga lain. 2. Juknis untuk pengisian SIM KLA baru muncul belakangan atau dua minggu setelah SIM dibuka	1. Bersinergi yang baik antar OPD, Pemangku Wilayah, Lembaga Layanan Pemerintah/ Non Pemerintah, dan Masyarakat 2. Data-data yang diperlukan dalam pengisian SIM KLA dipersiapkan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							3. Perubahan indikator dan cara pengisian secara total.	sebelumnya melalui koordinasi dengan gugus tugas KLA dan melalui Buku Profil Anak yang diupdate setiap tahunnya 3. Melakukan pendampingan untuk mencapai standardisasi RBRA (Ruang Bermain Ramah Anak), Standardisasi TARA (Taman Asuh Ceria), Standardisasi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), Standardisasi LPKRA (Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak), serta SRA	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			4. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	4. Program Perlindung-an Khusus Anak	Rp1.034.798.695,- Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani = 100%	Rp1.023.327.333,- 100%	1. Semakin maraknya kekerasan terhadap anak yang terjadi terutama di sekolah, lingkungan keluarga dan jalanan 2. Belum optimalnya delapan fungsi keluarga berdasarkan hasil assesment laporan kasus yang masuk 3. Pengaruh konten negatif gadget.	(Sekolah Ramah Anak). 1. Sosialiasi pencegahan kekerasan terhadap anak di semua sektor (sekolah, wilayah, forum anak). 2. Adanya Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga 3. Edukasi melalui leaflet, IG Live, YK TV, terkait tema-tema perlindungan khusus, yaitu pencegahan kekerasan anak, jam malam anak, bullying, pencegahan perkawinan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								4. Penguatan Forum Anak melalui pemberian materi terkait dengan 2P (Pelopor dan Pelapor)	
3	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan		1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandiri-an Pangan 2. Peningkat-an Diversifi-kasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	a. Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari = 37,78% b. Angka Ketersediaan Energi= 2616,9 kkal/kapita/hari c. Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan	37,78% 2773,73 kkal/kapita/hari 54,21%	1. Terkait ketahanan pangan, dalam pengambilan sampel untuk menyusun data Angka Konsumsi Pangan Kota perbedaan bulan pengambilan sampel dapat berpengaruh pada konsumsi masyarakat yang diwawancarai, sehingga berpengaruh pada akurasi angka konsumsi pangan Kota.	1. Bulan yang dipilih untuk pengambilan sampel bukan saat bulan puasa ataumendekati HBKN. 2. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi terkait pentingnya keamanan pangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Pemerintah Daerah= 69,46% d. Wilayah rawan pangan prioritas 2 = 2 wilayah e. Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi = 35,40% Target Keuangan: Rp2.361.614.294,-	0 wilayah 35,40% Realisasi Keuangan: Rp1.694.831.580,- (71,76%)	2. Dalam hal pengawasan keamanan pangan, pasar subtituen belum mendukung dalam segi higien sanitasi untuk produk PAH dan perikanan.		
4	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)	1. Melaksanakan penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta sesuai tatakala	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp122.025.100,- Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP = 100 %	Rp116.478.500,- 100 %	1. Faktor eksternal yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan penanganan permasalahan pertanahan	1. Melakukan upaya koordinasi dan komunikasi efektif kepada semua stakeholder yang terlibat dan berpengaruh terhadap proses penanganan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								permasalahan pertanahan tersebut	
			2. Melaksanakan Proses Koordinasi dan Sinkronisasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp2.683.148.000,- Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah = 100 %	Rp2.330.952.550,- 100%	2. Tingginya kebutuhan tanah untuk Pemerintah Kota Yogyakarta dan fasilitas umum untuk warga sedangkan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta terbatas	2. Melaksanakan penentuan skala prioritas pengadaan tanah dengan mendasarkan kepada penilaian aspek yuridis, kondisi tanah dan tingkat urgensi kebutuhan tanah masyarakat dengan mempertimbangkan ketersediaan eksisting dan sebaran fasilitas umum yang ada di setiap kelurahan	
			3. Melaksanakan Inventarisasi Tanah Kosong di Kota	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp492.988.500,- Persentase Pendaftaran Pensertifikatan	Rp475.844.320,- 92,31%	3. Terdapat pemanfaatan tanah oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan fasilitas umum	3. Melaksanakan inventarisasi yang melibatkan stakeholder di wilayah dan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Yogyakarta yang akurat.		Tanah Aset Pemkot = 91,63%		milik masyarakat yang menggunakan tanah yang belum jelas status dan atau statusnya masih milik orang lain yang belum diketahui	melakukan identifikasi serta pelacakan data tanah sebagai dasar untuk melakukan upaya pendaftaran pensertifikatan tanah	
			4. Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan Tanah Negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai tatakala	Program Penatagunaan Tanah	Rp78.622.000,- Persentase rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP = 100%	Rp73.299.000,- 100%	4. Masih terdapat pemanfaatan tanah negara untuk akses keluar masuk (in gang) yang tidak sesuai dengan rekomendasi pemanfaatan tanah negara	4. Melaksanakan upaya monev terhadap pemanfaatan tanah negara untuk akses keluar masuk (in gang) agar sesuai dengan hasil rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	
			5. Melaksanakan Penatausahaan Tanah	Program Penyeleng-garaan	Rp955.703.700,-	Rp932.719.470,-	5. Penatausahaan tanah kasultanan dan kadipaten	5. Mengoptimalkan upaya inventarisasi dengan identifikasi	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Keistime-waan Yogyakarta urusan Pertanahan	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten = 86,74% Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten = 42,03%	86,72% 49,57%	belum bisa optimal dilaksanakan karena belum terdapat data dan sebaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.	tanah kasultanan dan tanah kadipaten dengan melibatkan unsur Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten dan stakeholder wilayah	
			6. Menyediakan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				6. Belum sepenuhnya masyarakat tertib dalam pendaftaran pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	6. Melaksanakan sosialisasi secara berkala di masing-masing kelurahan kelomp-ok sasaran masyarakat pengguna tanah kasultanan dan tanah kadipaten	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			7. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai tatakala 8. Menangani Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai tatakala				7. – 8. Basis data tanah kasultanan dan tanah kadipaten serta peta potensi permasalahannya belum tersedia	7. – 8. Identifikasi potensi permasalahan pertanahan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	
5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1. Melaksanakan penyusunan Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap	1. Program Pengenda-lian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp3.227.945.910,- Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup = 75,50%	Rp3.184.685.246,- 75,50%	Semua kegiatan berjalan dengan baik , untuk pekerjaan fisik sudah terlaksana dari TW II dan sebagian kecil ada di TW IV , pengkondisian pekerjaan agar selesai	Selalu koordinasi dengan PPKom, PPTK dan Penyedia Jasa	1. Melaksanakan sosialisasi baik secara formal maupun non formal pada saat pengawasan dilakukan atau di forum-forum

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2. Melaksanakan pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan 3. Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 4. Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan	2. Program Pembinaan dan Pengawa-san Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindu-ngan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU = 52,63% Rp357.301.300,- Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup = 33,17% Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan = 77,92%	53,51% Rp354.729.523,- 30,10% 78,17%	sesuai dengan tatakala memerlukan seringnya monitoring dan koordinasi dengan penyedia jasa agar pekerjaan fisik dan pemberkasan keuangan berjalan lancar sesuai dengan waktu dan kualitas yang ditargetkan		tertentu. Muatan materi yang disampaikan berupa amanat dari perwal 17/2021 tentang penyelenggaraan RTHP yang baik, termasuk pada tujuan utama RTHP untuk peningkatan kualitas tutupan vegetasi dan meminimalisir alih fungsi RTH menjadi non RTH 2. Akses jalan bagi masyarakat sudah diupayakan dan dipertimbangkan pada saat proses pembelian lahan 3. Penataan desain RTHP dengan membuat DED

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 5. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 6. Meningkatkan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, persetujuan Lingkungan, Surat	3. Program Peningka-tan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp2.556.256.400,- Persentase Kampung ProKlim = 62,13% Persentase Sekolah berwawasan lingkungan dan Sekolah Adiwiyata = 73,23% Persentase Bank Sampah Aktif = 60%	Rp2.429.905.100,- 65,09% 70% 73,92%			berdasarkan aturan yang ada dalam Perwal 17/21 sesuai dengan komposisinya, dan juga mempertimbangkan usulan warga sekitar yang disampaikan pada FGD/sosialisasi, sepanjang kepentingan-kepentingan tersebut masih sejalan dengan regulasi yang ada 4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan wilayah setempat untuk menyusun solusi bersama jika terdapat

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 7. Melaksanakan penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota 8. Meningkatkan Jumlah Lembaga kemasyarakatan /Kelompok Masyarakat/ Institusi Skala Kabupaten / Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten /Kota yang Ditingkatkan						permasalahan yang terjadi di RTHP 5. Sosialisasi dan edukasi dalam pengelolaan persampahan dilaksanakan pada Tahun 2024 melibatkan masyarakat, sekolah, dan pelaku/ pegiat pengelolaan sampah di wilayah seperti Forum Bank Sampah dan Fasilitator Kelurahan. Edukasi meliputi pengurangan, pemilahan, penyaluran, serta pengolahan sampah sejak dari

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kapasitas dan Kompetensi SDMnya 9. Melaksanakan pengelolaan RTHP lingkungan permukiman Kota Yogyakarta 10. Melaksa-nakan pengelolaan taman kota dan jalur hijau Kota Yogyakarta 11. Melaksa-nakan pengelolaan	4. Program Pengelolaan Keaneka-ragaman Hayati (Kehati) 5. Program Pengelolaan	Rp11.854.122.873,- Persentase Ruang Terbuka Hijau = 23,3430% Capaian pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan = 61.6646% Rp71.077.598.217,-	Rp 11.735.739.643,- 23,351% 51,4372% Rp65.845.950.621,-			sumber serta rencana pengelolaan sampah Kota Yogyakarta melalui Unit Pengolahan Sampah 6. DLH menjalin kerjasama dengan mitra swasta selama bulan April - Desember 2024 untuk melaksanakan pengelolaan sampah residu guna meningkatkan kinerja pengolahan sampah. Selain itu, DLH mengolah sampah menjadi material RDF

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengang-kutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta 12. Melaksa-nakan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan	Persampa-han	Persentase sampah yang terkurangi = 16,20% Persentase sampah yang tertangani = 83,40%	21,96% 60,42%			yang selanjutnya dimanfaatkan oleh offtaker sebagai bahan bakar alternatif salah satunya PT. Solusi Bangun Indonesia 7. Dokumen lingkungan berupa SPPL untuk UPS Kranon telah terbit pada 14 Mei 2024 serta SPPL untuk UPS Karangmiri telah terbit pada 14 Mei 2024 8. Kota Yogyakarta melaksanakan pengolahan sampah melalui pengembangan unit pengolahan sampah meliputi:

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pemanfaatan kembali						• UPS Nitikan dengan kapasitas 55 ton/hari • UPS Kranon dengan kapasitas 25 ton/hari • UPS Karangmiri dengan kapasitas 15 ton/hari • UPS Sitimulyo dengan kapasitas 20 ton/hari Untuk melengkapi proses pengolahan sampah, Pemkot Yogyakarta melakukan pengadaan

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
									Insinerator yang ditempatkan di UPS Giwangan dan UPS Sitimulyo
6	Administrasi Kependu-dukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dengan: a. Menyedia-kan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminis-trasi Kependudu kan, serta Pencatatan, Penatausah aan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa	1. Program pendaftaran penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administra-si Kependu-dukan	Rp1.341.273.250,- Target Indikator Program = 91,83% Rp650.754.000,- Target Indikator Program = 99.77% Rp1.055.297.400,- Target Indikator Program = 100%	Rp1.321.910.770,- (98,55%) 93,37% (sumber SKB Ditjen Dukcapil) Rp649.499.000,- (99,81%) 99,89% (sumber SKB Ditjen Dukcapil) Rp1.051.377.651,- (99,63%) 100%	Permasalahan dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi warga Kota Yogyakarta antara lain: 1. Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan 2. Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua	a. Peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang berlaku b. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi utamanya terkait pentingnya kepemilikan IKD dan manfaat serta keamanannya c. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan capaian kinerja d. Mengintensifkan kegiatan jemput	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kependudukan Pendaftaran Penduduk, serta Pelayanan Pendaftaran Penduduk b. Mensosialisasikan Pendaftaran Penduduk 2. Meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil, dengan: a. Melaksanakan Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan				masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Dindukcapil Kota Yogyakarta 3. Dinamika pindah datang penduduk dan perkembangan usia sehingga tetap perlu dilakukan sosialisasi akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan 4. Kurang Sumber Daya Manusia terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola 5. Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan	bola pelayanan atas dokumen adminduk e. Mengintensifkan kegiatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dengan pemerintah pusat (ditjen Dukcapil), Dukcapil daerah lain, maupun instansi-instansi terkait dalam peningkatan kualitas pelayanan maupun dalam pemanfaatan data kependudukan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Peristiwa Penting b. Meningkat-kan Pelayanan Pencatatan Sipil c. Mensosiali-sasikan Pencatatan Sipil 3. Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan, dengan: a. Melaksana-kan Kerjasama Peman-faatan Data Kependudu kan b. Memfasi-litasi Pengelola-an Informasi Adminis-trasi				teknis Aplikasi SIAK) 6. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat dan focus keamanan data serta dihapusnya data kependudukan lokal sejak 2022 di masing masing Dukcapil daerah masih menjadi kendala dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan dalam pemanfaatan data. Sehingga memperlambat		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kependudukan,serta Melaksana-kan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawab-kan c. Melaksanakan Penyelenggara-an Pemanfaatan Data Kependudukan, Sosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Melaksanak				proses pengelolaan data dalam menyusun laporan, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kota Yogyakarta maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon. Demikian juga Pengelolaan Informasi Adminduk yang bersifat spesifik harus dikirimkan secara tertulis ke Ditjen Dukcapil sehingga membutuhkan waktu lama		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			an Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyara ka-tan dan Perguruan Tinggi				Sedangkan Hambatan dalam pencapaian target IKD yaitu : 1. Adanya kendala dari warga yang keberatan untuk menginstal IKD dikarenakan kekhwatiran akan keamanan data, 2. masyarakat belum mempunyai gadget yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan IKD 3. Implementasi pemanfaatan IKD belum banyak dirasakan masyarakat		
7	Pemberda-yaan Masyarakat dan Desa	1) Kemantren Tegalrejo	1. Menyusun Jumlah Laporan Peningkatan	1. Program Pemberda-yaan Masyarakat	Rp.5.343.473.975,-	Rp.5.207.409.853,- (97,45%)			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2. Menyusun Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3. Menyusun Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4. Menyusun Jumlah Lembaga Kemasyara-	Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat = Rp2.406.134.643,- Nilai Evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo = 389	Rp2.591.762.000,- (107,71%) 389			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			katan yang Diselenggara-kan 5. Menyusun Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6. Menyusun Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 7. Menyusun Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 8. Menyusun Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			9. Menyusun Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						
			1. Menyusun Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2. Program Penyeleng-garaan Pemerinta-han dan Pelayanan Publik	Rp69.454.000,- Nilai survei kepuasan masyarakat = 83,50	Rp67.729.000,- (97.52%) 85,30 (102,15%)			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			2. Menyusun Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 3. Menyusun Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan						
			1. Menyusun Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	3. Program Koordinasi Ketentra-man dan Ketertiban Umum	Rp30.631.250,- Jumlah Pelanggaran Perda = 90	Rp24.220.000,- (79,07%) 87 (103,33%)			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1. Menyusun Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan LBimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2. Menyusun Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	4. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah an Umum	Rp83.719.625,- Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi = 100%	Rp83.719.625,- (100,00%) 100%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Pimpinan di Kecamatan						
		2) Kemantren Jetis	1. Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan 2. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate 3. Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan Perda 4. Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp4.209.978.647,- Angka Swadaya Murni = Rp935.773.000 Nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis = 404	Rp4.119.756.850,- (98,07%) Rp1.277.190.556,- (136,49%) 404 (100%)	Semua kegiatan berjalan dengan baik, untuk pekerjaan fisik yang menggunakan belanja hibah dilaksanakan pada triwulan II dan III, Sebagian kecil dilaksanakan di triwulan IV karena ada perubahan usulan hibah di Kelurahan Cokrodiningratan saat anggaran perubahan. Agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan tata kala dilakukan koordinasi dan monitoring dengan penyedia jasa secara intens sehingga saat penyerahan dokumen fisik dan keuangan	Selalu koordinasi dengan penyedia jasa, PPTK dan PPKom/KPA	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			5. Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu 6. Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan 7. Meningkatkan kapasitas UMKM 8. Meningkatkan kapasitas Gapoktan 9. Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau 10. Meningkatkan kapasitas				dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target waktu dan kualitas.		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Anggota Kelompok Pemberdayaan 11. Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat 12. Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam 13. Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara 14. Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			15. Meningkatkan Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah 16. Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	2. Program Penyeleng-garaan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Rp115.783.500,- Nilai survei kepuasan masyarakat = 88,2	Rp115.783.500,- (100%) 88,28 (100,03%)			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				3. Program Koordinasi Ketentra-man dan Ketertiban Umum 4. Program Penyeleng-garan Urusan Pemerintah-an Umum	Rp84.040.300,- Jumlah Pelanggaran Perda = 150 Rp81.471.500,- Presentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi = 100%	Rp84.040.300,- (100%) 56 (162,67%) Rp81.011.500,- (99,43%) 100%			
		3) Kemantren Gondokusu-man	1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate 2. Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang	1. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp6.352.603.856,- Angka Swadaya Murni = Rp2.728.767.000,- Nilai tingkat perkembangan	Rp6.259.645.750,- (98,54%) Rp2.765.833.000,- 399,4	Semua kegiatan berjalan dengan baik, untuk pekerjaan fisik sebagian besar adalah belanja hibah anggaran perubahan sehingga ploting semua ada di triwulan IV, pengkondisian pekerjaan segera	Selalu koordinasi dengan PPKom, PPTK dan Penyedia Jasa	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			sesuai dengan Ketentuan Permendagri 3. Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu 4. Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan 5. Meningkatkan kapasitas UMKM 6. Meningkatkan kapsitas Gapoktan 7. Meningkatkan kampung yang melaksanakan		pembangunan kemantren = 399		selesai dalam waktu yang singkat memerlukan seringnya monitoring dan koordinasi dengan penyedia jasa agar pekerjaan fisik dan pengajuan keuangan berjalan lancar sesuai dengan waktu dan kualitas yang ditargetkan		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Proklim dan kampung Hijau 8. Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan 9. Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat 10. Meningkat-kan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam 11. Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara 12. Meningkatkan kapasitas						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Lembaga pemberdaya-an kelurahan 1. Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan 1. Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda 2. Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	2. Program Penyeleng-garaan Pemerintah an dan Pelayanan Publik 3. Program Koordinasi Ketentra-man dan Ketertiban Umum	Rp37.240.000,- Nilai survei kepuasan masyarakat = 83 Rp199.496.500,- Jumlah Pelanggaran Perda = 255	Rp37.240.000,- (100%) 83,58 Rp195.034.500,- (97,76%) 121			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Meningkatkan Koordinasi Forkomim Kemantren untuk Penanganan Masalah di Wilayah	4. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah an Umum	Rp62.448.800 Prosentase Permasalahan Kemantren Gondokusuman terseleseikan	Rp61.904.000 (99,13%)			
		4) Kemantren Danurejan	1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate 2. Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri 3. Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun	1. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp3.884.519.323,- Angka Swadaya Masyarakat = Rp1.193.980.489,- Nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan = 409	Rp3.864.683.350,- Rp1.969.600.000,- (164,89%) 409	Semua kegiatan dilaksanakan dengan baik, penyampaian laporan angka swadaya masyarakat total perlu koordinasi dengan Kelurahan	Sudah dilaksanakan koordinasi dan evaluasi dengan Kelurahan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			secara tepat waktu 4. Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan 5. Meningkatkan kapasitas UMKM 6. Meningkatkan kapasitas Gapoktan 7. Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau 8. Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			9. Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan Masyarakat 10. Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penangan-an dan Mitigasi Bencana Alam 11. Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara 12. Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan 13. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraa n Pembangunan						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat 14. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 1. Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan 2. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat 1. Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk	2. Program Penyeleng-garaan Pemerintah dan Pelayanan Publik 3. Program Koordinasi Ketentram-an dan	Rp58.435.500,- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat = 83 Rp48.290.000,-	Rp58.435.500,- (100%) 83,45 (100,54%) Rp46.690.000,- (96,68%)			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pencegahan dan penegakan perda 2. Meningkatkan kualitas Penyelenggara-an Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 3. Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 4. Kooordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda = 48	27 (177,77%)			
			1. Meningkatkan Koordinasi Forkomim	4. Program Penyeleng-garaan	Rp53.299.000,-	Rp53.164.000,- (99,74%)			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = 100 %	100 %			
		5) Kemantren Gedongte-ngen	1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate 2. Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri 3. Menyusun Dokumen Musren-bang yang disusun secara tepat waktu	1. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp2.754.127.521,- Angka Swadaya Murni = Rp1.371.031.533,- Nilai tingkat perkembangan pembangunan kelurahan = 375	Rp2.739.611.850,- (99,47%) Rp1.346.890.000,- 389,5	Semua kegiatan berjalan dengan baik.		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			4. Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan 5. Meningkatkan kapasitas UMKM 6. Meningkatkan kapasitas Gapoktan 7. Meningkatkan kampung yang melaksana-kan Proklim dan kampung Hijau 8. Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberda-yaan 9. Melaksanakan fasilitasi lembaga						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pemberdayaan masyarakat 10. Meningkat-kan kapasitas keluarga terkait Penangan-an dan Mitigasi Bencana Alam 11. Meningkat-kan pemanfaat-an Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara 12. Meningkat-kan kapasitas Lembaga pemberda-yaan kelurahan						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	2. Program Penyeleng-garaan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Rp75.254.800,- Nilai survei kepuasan masyarakat = 85	Rp75.254.800,- (100%) 85,07			
			1. Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda 2. Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3. Program Koordinasi Ketentra-man dan Ketertiban Umum	Rp119.615.000,- Indikator Jumlah Pelanggaran Perda = 123	Rp119.615.000,- (100%) 98			
			1. Meningkatkan Koordinasi Forkomim	4. Program Penyelengg araan	Rp48.435.000,-	Rp48.435.000,-			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi = 100 %	100%			
		6) Kemantren Ngampilan	1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate 2. Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri 3. Menyusun Dokumen Musren-bang yang disusun secara tepat waktu	1. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp2.710.612.370,- Angka Swadaya Murni = Rp775.000.000,- Nilai tingkat perkembangan pembangunan kelurahan = 405	Rp2.680.505.115,- (98,89%) Rp780.670.000,- (100,73%) 405	1. Semua kegiatan berjalan dengan baik meskipun rencana kegiatan Bakpia day dan kegiatan pentas budaya di bulan oktober tetapi dilaksanakan di Bulan Desember karena ada kebijakan Pilkada. 2. Untuk kegiatan perubahan seperti pengadaan CCTV di kelurahan Notoprajan maupun di Kelurahan Ngampilan yang semula direncanakan di tahun 2025 ini	Selalu koordinasi dengan BPKAD agar pelaksanaan kegiatan di Bln Desember dapat berjalan lancar 1. Untuk pemasangan CCTV telah dilakukan koordinasi baik dengan kelurahan maupun pihak ketiga agar dapat terlaksana 2. Telah dilakukan upaya dengan menyebarkan informasi tentang adanya kegiatan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			4. Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan 5. Meningkatkan kapasitas UMKM 6. Meningkatkan kapasitas Gapoktan 7. Meningkatkan kampung yang melaksana-kan Proklim dan kampung Hijau 8. Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberda-yaan 9. Melaksanakan fasilitasi lembaga				dilaksanakan maju ke anggaran perubahan 2024 sehingga menambah kegiatn di anggaran perubahan dan ada sedikit permasalahan penataan tatakala sehingga untuk kelurahan Ngampilan baru dapat terlaksana di bulan Desember 3. Untuk kegiatan UMKM agak kesulitan saaat mengadakan acara gebyar UMKM ada yang kurang mendapat dukungan dari masyarakat sehingga dagangannya masih tersisa, dikarenakan adanya kesulitan dalam mendatangkan	gebyar UMKM di Kemanten Ngampilan baik melalui grup-grup wa di wilayah seperti grup wa Rt, RW, PKK dan lain-lain. Serta memasang brosur di tempat umum agar bisa diketahui oleh warga masyarakat luas.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pemberdayaan masyarakat 10. Meningkat-kan kapasitas keluarga terkait Penangan-an dan Mitigasi Bencana Alam 11. Meningkat-kan pemanfaat-an Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara 12. Meningkat-kan kapasitas Lembaga pemberda-yaan kelurahan				warga masyarakat untuk mengunjungi stand-stand yang ditampilkan di Kemantren Ngampilan		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	2. Program Penyeleng-garaan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Rp35.088.650,- Nilai survei kepuasan masyarakat = 84,60	Rp34.985.000,- 84,62 (100,02%)	Masih dijumpai warga masyarakat yang belum memanfaatkan program pelayanan kependudukan yang dapat dilaksanakan dari rumah melalui sim pelayanan, sehingga warga masyarakat masih mendatangi kemantren untuk mengurus administrasi kependudukan	Kemantren Ngampilan telah mengupayakan pendampingan kepada warga masyarakat yang membutuhkan pendampingan dalam mengurus administrasi kependudukan	
			1. Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda 2. Meningkatkan lembaga yang difasilitasi	3. Program Koordinasi Ketentra-man dan Ketertiban Umum	Rp152.859.000,- Jumlah Pelanggaran Perda = 66	Rp152.859.000,- (100%) 65 (101,54%)	Masih ditemui pelanggaran yang berulang seperti pemasangan reklame yang tidak berijin,dan adanya PKL yang berjualan di trotoar jalan	Kemantren Ngampilan secara berkala dan terus menerus mengadakan sosialisasi di kemantren dengan mengundang warga maupun pedagang kaki lima agar mematuhi peraturan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1. Meningkatkan Koordinasi Forkomim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	4. Program Penyeleng-garaan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Rp39.960.000,-	Rp39.930.000,- (99,92%)	yang ada. Dan melakukan operasi ke wilayah dan langsung memberikan edukasi saat menemukan adanya orang yang melakukan pelanggaran perda Acara koordinasi berjalan baik, Terlaksana secara rutin sehingga tidak ditemukan permasalahan berarti hanya di saat ada acara bersamaan sehingga ada yang tidak bisa menghadiri acara koordinasi tersebut	Upaya : menata kegiatan agar tidak bersamaan	
		7) Kemantren Wirobrajan	1. Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	1. Program Penyeleng-garaan Pemerintah an dan	Rp365.413.500,- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat = 83,47	Rp365.291.539,- 83,602	Belum semua warga masyarakat paham IT sehingga kesulitan dalam mengoperasionalkan	Pendampingan kepada warga terkait pelayanan secara online, melibatkan kader GISA utk	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			2. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate 1. Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri 2. Menyusun Dokumen Musren-bang yang disusun secara tepat waktu 3. Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam	Pelayanan Publik 2. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	 Rp4.261.917.416,- Angka Swadaya Murni Masyarakat = Rp1.035.955.000,-	 Rp4.190.411.633,- Rp1.035.955.000,-	layanan melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) 1. Kegiatan pemberdayaan masyarakat belum signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan karena faktor mindset warga dan kurangnya motivasi untuk keluar dari kemiskinan. 2. Hasil pemeliharaan sarpras yang dilaksanakan di wilayah kadang kurang	pelayanan adminduk secara online. 1. Menumbuhkan motivasi warga untuk bisa terus maju dan mengembangkan diri 2. Melakukan monev hasil pembangunan secara berkala dan mengecek hibah yang diserahkan ke warga Masyarakat 3. melakukan koordinasi dengan OPD untuk bersinergi membangun Masyarakat	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			proses pembangunan 4. Meningkatkan kapasitas UMKM 5. Meningkatkan kapasitas Gapoktan 6. Meningkatkan kampung yang melaksana-kan Proklim dan kampung Hijau 7. Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan 8. Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan Masyarakat 9. Meningkatkan kapasitas keluarga terkait				dimanfaatkan secara maksimal dan kurang terpelihara		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Penangan-an dan Mitigasi Bencana Alam 10. Meningkatkan pemanfaat-an Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara 11. Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberda-yaan kelurahan 1. Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda	3. Program Koordinasi Ketenteram an dan Ketertiban Umum (Jumlah Pelanggar-an Perda	Rp98.351.000,- Target Pelanggaran Perda = 42 Pelanggaran	Rp98.346.185,- 36 Pelanggaran	PKL Musiman yang datang bergantian bergantian dan berbeda orang yang berjualan sehingga kesulitan menyampaikan pembinaan	1. Diadakan monev rutin oleh BKO dan Jawatan Keamanan 2. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan terkait Pelanggaran Perda 3. Melakukan penindakan bersama satpol PP	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								Kota Yogyakarta apabila sudah tidak bisa dilakukan pembinaan	
			1. Meningkatkan Koordinasi Forkomim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah 2. Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	4. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah an Umum	Rp92.269.000,- Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = 100%	Rp91.988.954,- 100%	Kerawanan gangguan kemanan yang berpotensi terjadi di wilayah	1. Koordinasi dan evaluasi Forkompim rutin dilaksanakan 2. Memberikan edukasi dan menggandeng tokoh masyarakat untuk turut membantu menciptakan kondusifitas diwilayah	
		8) Kemantren Mantrijeron	1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	1. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp4.691.577.807,- Angka Swadaya Murni = Rp1.587.000.000,-	Rp4.659.202.270,- (99,31%) Rp2.063.860.549,- (130,05%)	Menurunnya inisiatif warga dalam melaporkan angka swadaya	1. Menyampaikan informasi swadaya saat pertemuan-pertemuan dengan masyarakat	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			2. Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri 3. Menyusun Dokumen Musren-bang yang disusun secara tepat waktu 4. Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan 5. Meningkatkan kapasitas UMKM 6. Meningkatkan kapasitas Gapoktan		Nilai tingkat perkembangan pembangunan kelurahan = 384,67	384,67		2. mengoptimalkan whatsapp group dengan masyarakat 3. Melakukan digitalisasi pelaporan swadaya	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			7. Meningkatkan kampung yang melaksana-kan Proklim dan kampung Hijau 8. Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan 9. Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan Masyarakat 10. Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penangan-an dan Mitigasi Bencana Alam 11. Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			dan / atau terpelihara 12. Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberda-yaan kelurahan 1. Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	2. Program Penyeleng-garaan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Rp262.845.000,- Nilai survei kepuasan masyarakat = 85,04	Rp254.192.000,- (96,71%) 85,09	1. Adanya masyarakat dengan pengetahuan literasi pelayanan digital yang masih rendah 2. Kurangnya kenyamanan karena kebocoran di beberapa ruangan Kelurahan 3. Genset tidak berfungsi sebagaimana mestinya	1. Meningkatkan kemampuan petugas kemantren dalam membantu masyarakat mengakses layanan JSS 2. Mengelola inovasi dengan optimal, mengedepankan keterbukaan informasi, pemanfaatan tekhnologi informasi dan kebutuhan masyarakat	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								3. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan (non jaringan internet) yang memadai untuk di Kantor Kemantren dan Kelurahan	
			1. Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda 2. Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3. Program Koordinasi Ketentram-an dan Ketertiban Umum	Rp79.270.000,- Jumlah Pelanggaran Perda = 20	Rp78.680.000,- (98,88%) Jumlah Pelanggaran Perda = 19	1. Kurangnya ketaatan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda tentang Penataan Pedagang Kaki Lima 2. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pengampu tingkat Kota terhadap peraturan-peraturan yg tidak mensyaratkan persetujuan	1. Kesiapsiagaan BKO Satpol PP Kemantren Mantrijeron dan sinergi penegakan Perda bersama aparat keamanan kelurahan (Babinkamtibmas & Babinsa) 2. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah tingkat Kemantren secara berkala kepada masyarakat	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							wilayah (RT, RW, Kelurahan) misalnya PBG sehingga terjadi permasalahan di lapangan		
			1. Meningkatkan Koordinasi Forkomim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	4. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah an Umum	Rp58.005.000,- Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi = 77%	Rp58.005.000,- 100%	1. Aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat khususnya warga dari luar wilayah Kemantren Mantrijeron yang berdampak pada konflik dimasyarakat dan sampah yang ditimbulkan serta arus lalu lintas macet 2. Adanya dinamika situasi dan kondisi politik di wilayah berkaitan dengan Pemilu Serentak	1. Adanya peran aktif Forkompin tingkat Kemantren Mantrijeron dan sinergitas dengan kelembagaan masyarakat (FKDM, FPK, dll) dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian masalah	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Tahun 2024 dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta		
		9) Keman-tren Kraton	1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate 2. Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri 3. Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu 4. Menignkatkan Lembaga (RT,	1. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp4.051.263.241,- Angka Swadaya Murni = Rp1.032.431.000 Nilai Evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton 391,55	Rp4.011.337.815,- (99,01%) Rp1.433.886.600,- (138,88%) 391,55 (100%)	Semua kegiatan berjalan dengan baik , untuk pekerjaan fisik hampir semua belanja hibah dan sudah terlaksana dari TW II dan sebagian kecil ada di TW IV , pengkondisian pekerjaan agar selesai sesuai dengan tatakala memerlukan seringnya monitoring dan koordinasi dengan penyedia jasa agar pekerjaan fisik dan pemberkasan keuangan berjalan lancar sesuai dengan waktu dan kualitas yang ditargetkan	Selalu koordinasi dengan PPKom, PPTK dan Penyedia Jasa	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan 5. Meningkatkan kapasitas UMKM 6. Meningkatkan kapsitas Gapoktan 7. Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau 8. Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan 9. Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			10. Meningkat-kan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam 11. Meningkat-kan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara 12. Meningkat-kan kapasitas Lembaga pemberdaya-an kelurahan						
			1. Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	2. Program Penyeleng-garaan Pemerinta-	Rp198.265.415,-	Rp198.265.415,- (100%)			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				han dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat = 85,75	86,66 (101,06%)			
			1. Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda 2. Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3. Program Koordinasi Ketentra-man dan Ketertiban Umum	Rp111.011.000,- Jumlah Pelanggaran Perda = 36	Rp111.011.000,- (100%) 32 (111,11%)			
			1. Meningkatkan Koordinasi Forkomim Kemantren untuk Penanganan	4. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah an Umum	Rp39.618.000,- Persentase Permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan	Rp39.618.000,- 100%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Masalah di Wilayah		sebagai hasil koordinasi = 100%				
		10) Keman-tren Gondo-manan	1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate 2. Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri 3. Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu 4. Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam	1. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp2.806.221.448,- Angka Swadaya Masyarakat = Rp1.044.024.000,- Nilai Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan = 369	Rp2.791.430.137,- (99,47%) Rp1.049.185.000,- 369,6	1. Secara umum semua kegiatan berjalan dengan baik, tetapi untuk pekerjaan fisik terkendala karena pergeseran belanja modal dan pemeliharaan ke belanja Hibah di Tribulan 4 sehingga waktu pelaksanaan cukup singkat	1. Selalu koordinasi dengan OPD terkait agar pekerjaan bisa segera diselesaikan dengan lancar (BPKAD, Bapeda, Bag Adminbang, Bag. Hukum) 2. Sinergi semua pegawai kelurahan dengan anggota masyarakat di masing-masing kelurahan terjalin dengan baik di tingkat RT, RW, Kerja Bakti di masing-masing RT dan RW 3. Menjaga semangat kekompakan dan Komitmen seluruh ASN Kemantren Gondomanan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			proses pembangunan 5. Meningkatkan kapasitas UMKM 6. Meningkatkan kapsitas Gapoktan 7. Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau 8. Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan 9. Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat 10. Meningkatkan kapasitas keluarga terkait					termasuk kelurahan dan peran partisipasi aktif seluruh stakeholder Kemantren Gondomanan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam 11. Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara 12. Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdaya-an kelurahan						
			1. Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	2. Program Penyeleng-garaan Pemerinta-han dan Pelayanan Publik	Rp29.003.000,- Nilai survei kepuasan masyarakat = 88,70	Rp33.645.650,- (100%) Nilai survei kepuasan masyarakat : 88,72 (100,023%)	Semua kegiatan berjalan dengan baik, namun seiring dengan perubahan regulasi serta tuntutan dan kebutuhan masyarakat maka membutuhan pelayanan yang senantiasa berkembang dan	1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan Pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan bisa lancar.Minta dukungan dan sinergi seluruh pegawai dalam	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							berinovasi untuk dapat memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat	melayani masyarakat Gondomanan dengan Petugas pelayanan yang baik, sopan dan ramah. 2. Survei kepuasan layanan dilaksanakan 2 kali dalam setahun (bulan Juni & September) untuk merespon cepat aspek layanan yang perlu segera diperbaiki dan sudah menggunakan e-form dan manual. 3. Melakukan evaluasi dan reviu SOP secara kontinyu untuk menyesuaikan layanan dengan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								perubahan dan kebutuhan serta menindaklanjuti hasil forum konsultasi publik dan sosialisasi 4. Menerapkan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan antara lain: pengembangan paket Komanan, sosialisasi layanan secara virtual, pendampingan layanan bagi warga yang terkendala online, dan pelaksanaan SKM dengan QR code serta sudah menggunakan e-form dan manual	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda 2. Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3. Program Koordinasi Ketentra-man dan Ketertiban Umum	Rp217.360.000,- Jumlah Pelanggaran Perda = 130	Rp217.360.000,- (100%) 127	1. Tingkat kunjungan wisata yang sangat tinggi di area Kemantren Gondomanan dan Pelanggaran yang paling banyak adalah PKL (PKL di sirip-sirip Malioboro) dan munculnya PKL baru sehingga berpotensi banyaknya terjadi pelanggaran perda. Selain itu banyak pedagang asongan secara mobile berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yg lain menjadi lebih sulit dipantau dinamika pergerakannya 2. Fenomena setiap libur akhir pekan	1. Melaksanakan patroli penertiban bersama dengan unsur BKO, linmas dan Forkompintren untuk penegakan Perda 2. Berkoordinasi dengan satpol PP Kota untuk dilakukan pengawasan di luar jam kerja. Tindaklanjutnya ada pendekatan persuasif kepada PKL 3. Melakukan teguran secara persuasif dan tegas untuk setiap pelanggaran yang ada 4. Bersinergi dengan satpol PP Kota Yogyakarta dan provinsi DIY,	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							banyak aktivitas wisatawan yg mendorong munculnya penyedia jasa layanan penunjang wisata non formal di sepanjang jalan Senopati selain sebagai potensi ekonomi juga menjadi potensi kerawanan sosial sehingga berpotensi menimbulkan banyaknya terjadi masalah pelanggaran perda 3. Adanya pelaksanaan pesta demokrasi pemilu nasional dan Pilkada di th 2024 yang berpotensi terjadi pelanggaran	Linmas dan Pam Budaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban Lingkungan di Wilayah Kemantren Gondomanan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							dan timbul permasalahan 4. Sampah Visual (rontek,spanduk) di dekat Prawirodirjan Jalan Ireda (sisi utara). dan di area jalan Brigjen Katamso		
			1) Meningkatkan Koordinasi Forkomim Kemantren untuk Penanganan Masalah di Wilayah	4. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah an Umum	Rp73.350.000,- Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = 100%	Rp73.350.000,- (100%) 100%	1. Sebagai kawasan strategis di Kemantren Gondomanan sangat menarik bagi banyak orang/masyarakat untuk beraktivitas di wilayah kemantren Gondomanan sehingga berpotensi timbulnya masalah sosial maupun pelanggaran ketertiban umum	1. Sinergitas komunikasi dan kerjasama unsur Forkompimtren dalam melaksanakan patroli penertiban bersama dengan unsur BKO dan forkompintren lainya untuk penegakan Perda 2. Sudah ada mitigasi untuk meminimalkan konflik di	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							2. Dalam masa tahun politik menjelang pemilu maka berpotensi terjadinya gesekan antar individu maupun kelompok dalam masyarakat 3. Sebagaimana wilayah kemantren lainnya, kemantren Gondomanan terdampak/mengha dapi masalah darurat sampah	masyarakat sepanjang pelaksanaan tahapan pemilu nasional dan pilkada 3. Sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk penanganan sampah	
		11) Keman-tren Pakuala-man	1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate 2. Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan	1. Program Pemberdaya an Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp2.765.311.032,- Angka Swadaya Masyarakat Total = Rp.705.000.000,-	Rp2.725.129.910,- (98,55%) Angka Swadaya Masyarakat Total = Rp.974.015.000,- (138,16%)	1. Adanya kesalahan plotting tata kala sehingga harus dilakukan pergeseran anggaran; 2. Keterbatasan sumber daya manusia (Analis PEP, Analis Pembangunan,	1. Adanya kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan yang selalu ditingkatkan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Ketentuan Permendagri 3. Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu 4. Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan 5. Meningkatkan kapasitas UMKM 6. Meningkatkan kapsitas Gapoktan 7. Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau				Penggerak Swadaya Masyarakat kosong); 3. Adanya kendala dalam pembelian belanja modal yang kesulitan mencari produk ber-TKDN; 4. Walaupun target angka swadaya masyarakat tercapai tapi belum semua masyarakat memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial terkait swadaya masyarakat; 5. Kenyamanan lingkungan berkaitan dengan parkir motor dan mobil merupakan angka yang paling	target yang ditetapkan; 2. Adanya rapat koordinasi mingguan struktural sebagai sarana monitoring, evaluasi dan mengatasi permasalahan pelaksanaan kegiatan; 3. Sudah tidak ada survey SKM secara manual sehingga memudahkan untuk proses survey. Terdapat 3 cara pembagaian kuisioner, yaitu kuisioner berbentuk QR Code yang terpasang di depan ruang pelayanan, kuisioner bentuk link yang tertera di	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			8. Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan 9. Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat 10. Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam 11. Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara 12. Meningkatkan kapasitas Lembaga				kecil meskipun sudah ada petugas linmas yang berjaga; 6. Pada proses PBG, masih banyak warga berargumentasi, kegiatan jalan sambil proses izinnya; 7. Proses PBG dirasakan sulit, gagap teknologi; bekerjsama dengan DPMPTSP dan keliling ke beberapa lokasi dan melakukan edukasi dan pedekatan persuasif dengan Jawatan Umum. Bersama dengan Bhabinkantibmas dan dilakukan secara intensif.	website Kemantren Pakualaman, kuisioner dibagikan kepada unsur tokoh masyarakat melalui link google form (link dibagikan melalui whatsapp group LPMK, Ketua Kampung, Ketua RW, Ketua RT, Ketua PKK Kemantren) 4. Semangat personil untuk penegakan perda; 5. Tersedianya tambahan personil BKO yang berkomitmen dan bersinergi dengan Kemantren Pakualaman; 6. Kolaborasi pengawasan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pemberdaya-an kelurahan					terpadu Forkompintren; 7. Penyiapan Pilkada berkoordinasi dengan linmas, BKO, Bhabinsa; 8. Sosialisasi dan pendampingan untuk mengurus PBG; 9. Pendekatan bersama berkomunikasi dengan PKL; 10. Pembinaan dengan keliling dan sambang pemantauan pondokan dan PKL.	
			1. Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp63.195.060,- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman = 83,00	Rp63.183.060,- (99,98%) 88,33 (106,42%)			
			1. Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda 2. Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan	3. Program Koordinasi Ketentram-an dan Ketertiban Umum	Rp103.227.000,- Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman = 79	Rp103.226.000,- (99,99%) 79 (100%)			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Ketertiban Masyarakat 1. Meningkatkan Koordinasi Forkomim Kemantren untuk Penanganan Masalah di Wilayah	1. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah an Umum	Rp94.276.000,- Persentase Permasalahan Wilayah Terselesaikan sebagai Hasil Koordinasi = 100%	Rp94.276.000,- (100%) 100%			
		12) Keman-tren Mergan-san	1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate 2. Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp5.352.253.649,- Angka swadaya Masyarakat = Rp1.593.231.000,- Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan = 402	Rp5.274.452.615,- (98,55%) Rp2.081.965.000,- (130,68%) 400 (99,50%)	Semua kegiatan berjalan dengan baik , untuk pekerjaan fisik sebagian besar adalah belanja hibah anggaran perubahan sehingga ploting semua ada di triwulan IV, pengkondisian pekerjaan segera selesai dalam waktu yang singkat memerlukan seringnya monitoring	Selalu koordinasi dengan PPKom, PPTK dan Penyedia Jasa	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			3. Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu 4. Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan 5. Meningkatkan kapasitas UMKM 6. Meningkatkan kapasitas Gapoktan 7. Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau 8. Meningkatkan kapasitas				dan koordinasi dengan penyedia jasa agar pekerjaan fisik dan pemberkasan keuangan berjalan lancar sesuai dengan waktu dan kualitas yang ditargetkan.		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Anggota Kelompok Pemberdayaan 9. Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat 10. Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam 11. Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara 12. Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdaya-an kelurahan						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	2. Program Penyeleng-garaan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Rp299.913.216,- Survey kepuasan masyarakat = 85,50	Rp299.748.721,- (99,85%) 86 (100,58%)			
			1. Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda 2. Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3. Program Koordinasi Ketentra-man dan Ketertiban Umum	Rp50.502.000,- Jumlah pelanggaran perda = 65	Rp50.502.000,- (100%) 67 (97,01%)			
			1. Meningkatkan Koordinasi Forkomim	4. Program Penyelengg araan	Rp103.306.700,-	Rp103.306.700,-			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah 1. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemantren Mergangsan	Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = 100% Rp7.554.805.180,- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan = A Nilai	100% Rp7.027.053.032,- (93,01%) A			
		13) Keman-tren Umbul-harjo	1. Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat 2. Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang	1. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp10.616.631.468,- Angka swadaya masyarakat = Rp3.851.825.200,- Nilai evaluasi perkembangan	Rp10.560.556.138,- (97,47%) Rp3.852.570.378,- (100.01%) 388,43 (100%)	Semua kegiatan berjalan dengan baik , untuk pekerjaan fisik sebagian besar adalah belanja hibah anggaran perubahan sehingga ploting semua ada di triwulan IV, pengkondisian	Selalu koordinasi dengan PPKom, PPTK dan Penyedia Jasa	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			sesuai dengan Ketentuan Permendagri 3. Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu 4. Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan 5. Meningkatkan kapasitas UMKM 6. Meningkatkan kapasitas Gapoktan 7. Meningkatkan kampung yang melaksanakan		pembangunan Kemantren Umbulharjo = 388,43		pekerjaan segera selesai dalam waktu yang singkat memerlukan seringnya monitoring dan koordinasi dengan penyedia jasa agar pekerjaan fisik dan pemberkasan keuangan berjalan lancar sesuai dengan waktu dan kualitas yang ditargetkan		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Proklim dan kampung Hijau 8. Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan 9. Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam 10. Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara 11. Meningkat-kan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan 2. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	2. Program Penyeleng-garaan Pemerinta-han dan Pelayanan Publik	Rp138.025.000,- Nilai survei kepuasan masyarakat = 86,02	Rp138.025.000,- (100%) 86.06 (100,05%)			
			1. Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda	3. Program Koordinasi Ketentra-man dan Ketertiban Umum	Rp244.249.200,- Jumlah pelanggaran Perda = 51 pelanggaran	Rp244.249.200,- (100%) 51 pelanggaran (100%)			
			1. Meningkatkan Koordinasi Forkomim Kemantren untuk Penanganan	4. Program Penyeleng-geraan urusan Pemerintah an Umum	Rp128.986.000,- Persentase Permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan	Rp128.986.000,- (100 %) 100%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Masalah di wilayah		sebagai hasil koordinasi = 100%				
		14) Keman-tren Kotagede	1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate 2. Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri 3. Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu 4. Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif	1. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp4.846.140.162,- Angka Swadaya Masyarakat = Rp3.261.358.000,-	Rp4.820.163.832,- (99,46%) Rp3.319.283.100,- (101,78%)	1. Realisasi keuangan tidak mencapai target 100% disebabkan karena adanya efisiensi anggaran (belanja disesuaikan kebutuhan ataupun adanya negosiasi dalam proses pengadaan langsung	1. Meningkatkan koordinasi internal antara PA, KPA, dan PPTK 2. Diadakan monev rutin oleh BKO, Linmas dan Trantib dan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan terkait Pelanggaran Perda	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			dalam proses pembangunan 5. Meningkatkan kapasitas UMKM 6. Meningkatkan kapasitas Gapoktan 7. Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau 8. Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan 9. Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat 10. Meningkatkan kapasitas keluarga terkait						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam 11. Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara 12. Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdaya-an kelurahan						
			1. Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	2. Program Penyeleng-garaan Pemerinta-han dan Pelayanan Publik	Rp70.582.500,- Nilai survei kepuasan masyarakat = 91,20	Rp69.582.500,- (98,58%) 91,20 (100%)			
			1. Operasi Ketertiban yang dilaksanakan	3. Program Koordinasi Ketentera-	Rp319.677.750,-	Rp319.677.700,- (100%)			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			untuk pencegahan dan penegakan perda 2. Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1. Meningkatkan Koordinasi Forkomim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	man dan Ketertiban Umum 4. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah an Umum	Jumlah Pelanggaran Perda = 36 Rp47.710.000,- Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi = 100%	28 (122,22%) Rp47.710.000,- (100%) 100%			
8	Pengendali-an Penduduk dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	1. Melaksanakan Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi	1. Program Pengenda-lian Penduduk	Rp431.955.645,- Capaian layanan fasilitasi advokasi,	Rp423.446.750,- 92,87%	1. Peran dari Fapsedu dan Kampung KB dalam peningkatan keluarga	1. Mempertahankan kesadaran masyarakat untuk berkeluarga	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Keluarga Berencana	Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender = 90,21%		berkualitas belum optimal 2. Keterbatasan jumlah dan kualitas kader	berencana dan kepesertaan masyarakat untuk mengikuti Baksos KB 2. Melaksanakan koordinasi dan peningkatan kapasitas lembaga layanan keluarga 3. Melaksanakan baksos pelayanan KB, kerjasama dengan fasyankes baik pemerintah maupun swasta 4. Mensinergikan keterpaduan antara BKB dengan PAUD, posyandu, dapur balita, dapur sehat (Dashat)	
			2. Meningkatkan Pemberdayaan	2. Program Pembinaan Keluarga	Rp3.785.916.000,-	Rp3.652.436.929,- 62,60%	1. Kecenderungan masyarakat dalam	1. Rutin melakukan pelayanan KB rutin setiap bulan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			keluarga sejahtera	Berencana (KB)	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) = 62,59%		memilih metode KB Tradisional 2. Kecenderungan PUS Ingin Anak Segera (IAS) karena hanya memiliki 1 anak 3. Belum semua calon akseptor Metode Operasi Wanita (MOW) bisa terlayani di Rumah Sakit (RS) yang ada di Kota Jogja, harus dirujuk ke RS Sardjito karena kondisi khusus, misalnya *overweight* sehingga memperpanjang proses 4. Adanya calon akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2. Mempermudah akses dalam memperoleh pelayanan KB (pendaftaran yang sudah terintegrasi melalui JSS) 3. Mempertahankan apresiasi MKJP berupa program Sarung Tomi (Satu Juta Rupiah Untuk Peserta Vasektomi dan Tubektomi) dan fasilitas operasional bagi akseptor IUD Implan (transport dan jamuan makan minum)	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							bukan pasangan usia subur lagi (faktor sosial keluarga atau faktor penyakit anemia)		
					Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan = 71,11%	75,56%	1. OPD dan wilayah belum memahami inti dari Inpres 3/2022 bahwa Kampung KB menjadi wadah bagi semua kegiatan yang saling terintegrasi 2. Penilaian secara online namun ada Kampung KB yang belum mengisi indikator penilaian. 3. DP3AP2KB tidak bisa mengintervensi penilaian secara langsung hanya memantau dan melihat hasil akhir	1. Mengintegrasikan kegiatan baik kegiatan Kampung KB maupun kegiatan kewilayahan lain dengan Kampung KB agar terarsip dengan baik dan diunggah ke website Kampung KB sebagai dasar penilaian dari BKKBN Pusat.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							dari penilaian BKKBN Pusat		
					Persentase pasangan usia subur ya ng ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) = 16,17%	12,55%	1. Kecenderungan masyarakat dalam memilih metode KB Tradisional 2. Kecenderungan PUS Ingin Anak Segera (IAS) karena hanya memiliki 1 anak 3. Kurangnya KIE yang mendalam dan pendampingan	1. Melaksanakan pelayanan Baksos baik yang terlaksana secara rutin dan event-event tertentu 2. Meningkatkan kemudahan akses dalam memperoleh pelayanan KB (pendaftaran yang sudah terintegrasi melalui JSS)	
			3. Meningkatkan Pemberdayaan keluarga sejahtera	3. Program Pemberda-yaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp3.086.045.200,- Persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna = 12,71%	Rp2.698.563.590,- 13,58%	1. Kader dalam masyarakat sebagai motor penggerak kelompok kegiatan BKS yang sudah terlatih dan memahami kegiatan jumlahnya masih terbatas	1. Melaksanakan pembinaan dan penyaluran materi yang semakin intensif dari lembaga pusat kepada DP3AP2KB walaupun hanya	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								melalui webinar. DP3AP2KB meneruskan materi kepada kader melalui pemberian KIE 2. Meningkatkan kesadaran kelompok akan pentingnya eksistensi dan pengelolaan kelompok yang lebih baik untuk mendukung terwujudnya cita-cita pembangunan bangsa 3. Melakukan integrasi antar kelompok kegiatan (BKB dengan Posyandu, BKL dengan Posyandu Lansia)	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
9	Perhubu-ngan	Dinas Perhubungan	1. Menyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota 2. Melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3. Menata Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota 4. Melaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	1. Program Penyeleng-garaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp25.282.532.605,- Indikator Sasaran = 25,002 Peresentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan = 91,52% Peresentase juru parkir yang tertib = 97,85% Persentase ketertiban lalu lintas : 83,07% Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik : 71,31% Persentase Layanan Pengendalian	Rp24.354.657.868,- Indikator Sasaran = 25,76 89,05% 97,97% 86,16% 71,31% 100%	1. Kurangnya Lahan Parkir di Kota Yogyakarta 2. Masih banyaknya masyarakat yang belum tertib berlalu lintas 3. Masih ada wajib uji kendaraan yang tidak mengujikan kendaraannya 4. Masih ada masyakarat yang kurang peduli dalam menjaga rambu-rambu lalu lintas dengan melakukan vandalisme	1. Mendorong pihak swasta untuk membuka lahan parkir dengan berkoordinasi bersama dishub 2. melakukan pembinaan pentingnya tertib berlalu lintas 3. melakukan operasi gabungan dengan instansi vertical 4. mengingatkan wajib uji untuk mengujikan kendaraannya sesuai jatuh tempo dan memberikan kemudahan kepada wajib uji dalam mendaftar untuk uji kendaraan bermotor 5. melakukan monitoring dan pemeliharaan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kabupaten/ Kota 5. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 6. Mengawasi Melaksanakan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggara-an Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota 7. Mengawasi dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan		Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar : 100% Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan : 2 Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik : 95,80%	2 97,69%		terhadap rambu yang mengalami kerusakan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			untuk Jalan Kabupaten/ Kota 8. Menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 9. Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 10. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kendaraan Bermotor 11. Menyediakan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 12. Mensosialisa-sikan Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 13. Memeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 14. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraa						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 15. Memfasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik 16. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Pelaksanaan Izin Penyelengga-raan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota						
10	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	1. Melaksanakan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas 2. Melaksanakan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komuni kasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kemitraan	1. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp3.823.342.500,- Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam = 97.50% Persentase Pemberitaan Positif/Informasi Pemerintah Kota Yogyakarta = 99,90%	Rp3.795.596.200,- (99,27%) 96,79% Jumlah aduan yang masuk = 3951 ditindaklanjuti = 3824 99,85% Jumlah pemberitaan positif dan netral terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta	1. Masih Ada sebagian kecil warga yang masih belum paham memanfaatkan aplikasi aduan JSS. 2. Masih ada OPD yang saling melempar aduan sehingga pelapor tidak segera medapatkan solusi. 3. Belum maksimal dalam memanfaat kan SP4N Lapor 4. SDM pengelola melaksanakan	1. Mengoptimalkan sosialisasi program pemerintah melalui berbagai media cetak dan online dan media sosial 2. Perlu komitmen pimpinan OPD untuk memberikan dukungan dalam pengelolaan pengaduan. 3. Koordinasi lebih intens dengan operator OPD agar respon aduan melalui JSS bisa	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			dengan Pemangku Kepentingan dan Tersedianya Layanan Hubungan Media 3. Menyediakan Pelayanan Informasi Publik dan meningkatnyak apasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV = 73,80%	(analisis media cetak) = 5.927 Jumlah keseluruhan pemberitaan media cetak terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta = 5.305 78,56% Jumlah Konten yang diproduksi = 1.799 Jumlah rencana produksi konten = 2.290	tugas sebagai tugas tambahan bukan tugas utama 5. Keterbatasan tempat sampah sehingga menyebabkan berita negatif persampahan tinggi	lebih cepat, dan melakukan koordinasi rutin dengan pengelola jss di masing-masing OPD/unit kerja 4. Optimalisasi media sosial untuk promosi publikasi kegiatan/program Pemerintahan Kota Yogyakarta 5. Sosialisasi lebih gencar dalam penanganan sampah untuk merubah perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.	
			1. Melaksanakan Penyelenggara-an Sistem	2. Program Aplikasi Informatika	Rp14.918.440.850,-	Rp13.936.872.409,- (93,42%)	1. Regulasi-regulasi yang belum selesai	1. Optimalisasi fungsi tenaga program-mer	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2. Melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 3. Mengelola Pusat Data Pemerintahan Daerah 4. Melaksanakan Penatalaksana-an dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggara-an Pemerintahan		Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan public = 87.50% Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun = 90,95% Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas = 71.42%	97,00% Jumlah ruang publik terpasang CCTV = 194 Jumlah ruang publik = 200 90,95% Jumlah aplikasi yang dibangun = 201 Jumlah rencana aplikasi = 221 73,06% Jumlah ruas jalan yang dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi = 358	(SPBE, Tindak Lanjut Perda TIK) 2. Kekurangan SDM dan alat kerja dalam pengembangan aplikasi. 3. Proses dan dokumentasi pengembangan sistem belum dilaksanakan secara optimal 4. Kesiapan OPD menyediakan materi untuk pengembangan sistem belum sesuai dengan yang diperlukan 5. Belum ada keseragaman teknologi yang digunakan dalam pengembangan system	2. Koordinasi dengan Biro Hukum DIY, Kemenkumham dan Kemendagri untuk harmonisasi produk hukum regulasi terkait SPBE dan tindak lanjut Perda TIK 3. Sinkronisasi data infrastruktur pasif telekomunikasi 4. Pengawasan dan pengendalian infratstruktur pasif telekomunikasi secara terus menerus untuk menekan jumlah pelanggaran dan pembinaan kepada para ISP	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Daerah Kabupaten/ Kota 5. Melaksanakan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik 6. Melaksanakan Penyelenggara-an Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 7. Melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas 8. Melaksanakan Penyelenggaran Sistem			Jumlah ruas jalan di kota Yogyakarta = 490	6. Penguasaan teknologi tidak merata 7. Kinerja SDM tidak optimal dengan kondisi multitasking 8. Layanan terhadap respon pengguna di playstore belum terkelola 9. Layanan konsultasi di hari libur belum terkelola, kecenderungan pengguna menanyakan layanan bukan di helpdesk penyelenggara layanan 10. Kegiatan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi belum		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Penghubung Layanan Pemerintah				dapat terlaksana secara optimal 11. Masih terjadi kondisi-kondisi yang menyebabkan kita tidak taat alur proses pengembangan 12. Data infrastruktur pasif telekomunikasi belum singkron dengan data yang ada di Dinas Kominfosan Kota YK 13. Adanya sebagian penyelenggara ISP yang tidak melaksanakan proses perizinan sebelum melaksanakan pembangunan sehingga tidak terawasi oleh Tim		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							pengawasan, penataan dan pengendalian infra pasif 14. Belum terlaksananya secara menyeluruh proses penataan Infrastruktur pasif telekomunikasi berupa ducting sebagai solusi utama penataan Infrastruktur pasif telekomunikasi		
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	1. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan koperasi 2. Melaksanakan penilaian dan penghargaan	1. Program Pengawa-san dan Pemeriksa-an Koperasi 2. Program Pemberda-yaan dan	Rp198.013.000,- Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik = 115 Rp474.788.500,-	Rp198.013.000,- 115 Rp474.788.500,-	Masih banyak pengurus koperasi yang memiliki kompetensi Masih sedikitnya koperasi sektor riil	Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelatihan bagi pengurus koperasi Mendorong perubahan menjadi koperasi modern	Dinas Perindustian, Koperasi dan UKM telah melaksanakan pendampingan bagi UKM

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	Perlindung-an Koperasi	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya = 27	27			
			3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp78.509.000,- Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat = 115	Rp78.509.000,- 115	Kurangnya partisipasi anggota koperasi sehingga kinerja keuangan belum bisa mencapai target	Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman peran anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa	
			4. Melaksanakan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi	4. Program Pendidikan dan Latihan Perkopera-sian	Rp457.887.400,- Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi = 690	Rp457.852.875,- 690	Sertifikasi koperasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit kalau dilakukan secara mandiri	Memfasilitasi biaya pelatihan dan uji kompetensi	
			5. Melaksanakan pegelolaan data informasi, pemberdayaan kelembagaan, pembinaan dan	5. Program Pemberday aan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha	Rp590.146.500,- Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan = 100	Rp589.684.500,- 115	Masih banyak pelaku UKM non Binaan yang belum sadar pentingnya legalitas usaha	Memperluas jangkauan sosialisasi legalitas usaha	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pendampingan usaha mikro 6. Melaksanakan kemitraan promosi dan pembiayaan UMKM	Mikro (UMKM) 6. Program Pengemba-ngan UMKM	Jumlah UKM ber-NIB = 400 Rp1.364.639.820,- Jumlah UKM Mandiri = 40	400 Rp1.356.834.650,- 40	1. Biaya sertifikasi dan uji kompentensi bagi pelaku UKM mahal 2. Kurangnya kesadaran pelaku UKM untuk mengikuti sertifikasi	Menghubungkan dengan lembaga mitra yang dapat memfasilitasi sertifikasi bagi pelaku UKM	
12	Penanaman Modal	DPMPTSP	1. Melaksanakan kajian pengembangan investasi 2. Melaksanakan Promosi Investasi	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp1.331.425.250,- Jumlah Investor Baru Tahun n = 6.633 investor baru	Rp1.314.472.750,- 11.350 investor baru	1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha dan Keputusan Wali Kota Yogyakarta tentang Tim Verifikasi dan Penilaian 2. Belum ada bahan promosi potensi	1. Pada tahun 2025 akan dilakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha dan Keputusan Wali Kota Yogyakarta tentang Tim Verifikasi dan Penilaian	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							investasi yang lebih menarik investor 3. Masih adanya aturan perizinan dan nonperizinan yang belum sesuai 4. Belum optimalnya sosialisasi potensi investasi yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta dengan baik 5. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Mal Pelayanan Publik Digital yang belum optimal.	2. Pada tahun 2025 akan melakukan penyusunan *Invesment Project Ready to Offer* (IPRO) yang lebih komprehensif 3. Pada tahun 2025 akan menyusun perubahan peraturan wali kota tentang perizinan dan nonperizinan yang mendukung kemudahan berusaha 4. Sosialisasi potensi investasi 5. Optimalisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan instansi dan lembaga terkait dan meningkatkan Mal	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan 2. Melaksanakan pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan	2. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp698.550.000,- Persentase (Jumlah perizinan dan nonperizinan sesuai prosedur dibagi Jumlah permohonan izin dan nonperizinan) x 100% = 87% (Pengaduan konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah konsultasi, informasi dan pengaduan yang masuk) x 100% = 100%	Rp698.550.000,- 99% 100%	1. Sistem perizinanonline yang perlu maintanance untuk mengakomodir jenis perizinan dan non perizinan yang akan didelegasikan 2. Dalam Permasalahan yang dialami pemohon sangat beragam karena setiap pemohon memiliki kesulitan yang berbeda dalam melakukan proses pendaftaran melalui perizinan online 3. Penerbitan Rekomendasi Teknis belum optimal	Pelayanan Publik Digital 1. Adanya sarana konsultasi,informasi dan pengaduan melalui surat lansgung ke OPD,email,WA,Kotak Pengaduan ,Aplikasi JSS dan Loket Pengaduan. 2. Adanya dukungan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang diproses melalui https://perizinanonline.jogjakota.go.id/ 3. Adanya Koordinasi internal DPMPTSP dengan OPD Teknis dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								4. Melakukan Adanya Pembagian kerja dalam Tim Verifikasi dan Back Office dalam pelayanan perizinan dan non perizinan. 5. Perbaikan aplikasi yang intens untuk memproses perizinan dan non perizinan secara online	
			1. Meningkatkan Jumlah Investor Wajib LKPM yang Telah Menyampaikan LKPM 2. Meningkatkan Pemahaman Terhadap Ketentuan Pelaksanaan	3. Program Pengenda-lian Pelaksana-an Penanaman Modal	Rp629.968.800,- (Investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM dibagi investor yang wajib mengalami penambahan modal usaha berdasarkan	Rp625.192.000,- 65,09%	1. Ketidaktahuan pelaku usaha terkait kewajiban dan tata cara penyampaian LKPM. 2. Kurangnya kesadaran perusahaan untuk tertib menyampaikan LKPM.	1. Identifikasi perusahaan yang wajib LKPM dan menyusun database tertib LKPM 2. Memberikan pendampingan pelaporan LKPM lebih intensif kepada Pelaku Usaha yang wajib LKPM (Usaha	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Penanaman Modal		LKPM) x 100% = 22,60%		3. Ketidaktahuan pelaku usaha terkait regulasi kewajiban penyampaian LKPM 4. Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha risiko menengah tinggi dan tinggi belum melakukan pemenuhan persyaratan sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) perizinan berusaha OSS RBA 5. Pelaku usaha kesulitan dan terkendala dalam proses perizinan berusaha dan Pelaporan LKPM 6. Penyerapan anggaran kurang	skala kecil, menengah dan besar) 3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyampaian LKPM kepada Pelaku Usaha yang wajib LKPM (Usaha skala kecil, menengah dan besar) dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Investasi (BKPM) 4. Pemantauan perizinan berusaha resiko menengah tinggi dan tinggi yang belum melakukan pemenuhan persyaratan 5. Melaksanakan pengawasan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							optimal karena adanya perbedaan standar harga narasumber dan penyesuaian harga BBM yang dilakukan sesuai standar harga yang ada	integrasi yang melibatkan OPD terkait 6. Pendampingan lebih intensif kepada Pelaku Usaha melalui media konsultasi tatap muka, konsultasi melalui Helpdesk WA OSS Kota Yogyakarta maupun Kunjungan ke Perusahaan 7. Untuk standar harga narasumber yang awalnya eselon 2 akan diubah menjadi eselon 3	
			1. Mengelola Arsip Perizinan dan Non Perizinan	4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Rp317.764.700,- Persentase Jumlah pemohon yang melakukan proses	Rp315.866.700,- 100%	1. Dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	1. Membuat sebuah aplikasi yang berisi izin-izin terbit dari system pusat seperti	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penanaman Modal	pemenuhan data dengan tepat dibagi jumlah seluruh pemohon pemenuhan data = 80%		Penanaman Modal Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan data adalah Penarikan data-data izin terbit dari aplikasi pusat seperti PBG dan MPPD belum dapat dilakukan	PBG dan MPPD yaitu SIDAT 2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan teknis input data kepada setiap petugas dari bidang terkait	
13	Kepemuda-an dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1. Memberikan edukasi kepada pemuda melalui Pemilihan Pemuda Pelopor, Kemah Bakti Pemuda Nusantara, dan Pemuda Jogja Mencari Bakat 2. Mengoptimal-kan Lembaga kepemudaan meningkatkan	1. Program Pengemba-ngan Kapasitas Daya Saing Kepemu-daan	Rp 2.457.421.625,- Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan = 67,11%	Rp 2.445.324.747,- 66,47%	1. Wirausaha penentuan target jumlah wirausaha muda adalah dari alumni kegiatan pelatihan yang melanjutkan sampai ke tahap perlombaan. Tidak semua peserta pelatihan berkomitmen sampai di tahap perlombaan.	1. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah lebih memperketat proses seleksi calon peserta pelatihan kewirausahaan sehingga dapat menjamin komitmen peserta untuk mengikuti kegiatan secara keseluruhan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			edukasi olahraga melalui kelas khusus olahraga 3. Meningkatkan pembinaan olahraga bagi masyarakat, termasuk kaum disabilitas 4. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, termasuk untuk kaum disabilitas 5. Mengoptimal-kan lembaga keolahragaan 6. Mengoptimal-kan pengelolaan aset olahraga	2. Program Pengemba-ngan Kapasitas Daya Saing Keolahra-gaan	Rp17.410.420.420,- Persentase Kapasitas Daya Saing Keolahragaan = 67,68%	Rp16.690.737.328,- 63,73%	2. Organisasi Kepemudaan penentuan target anggota Organisasi Kepemudaan adalah bertambahnya jumlah Organisasi Kepemudaan yang terdaftar dalam basis data Dindikpora. Target 2024 tidak tercapai karena hanya ada 1 Organisasi Kepemudaan yang mendaftarkan ke basis data Dindikpora	2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan pembaruan data Organisasi Kepemudaan sehingga dapat mempunyai data keanggotaan terbaru. Selain itu, informasi mengenai Organisasi Kepemudaan di Kota Yogyakarta dapat disampaikan kepada peserta kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta untuk dapat memicu	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								kaderisasi pemuda pada Organisasi Kepemudaan yang sesuai dengan minat pemuda.	
				3. Program Pengemba-ngan Kapasitas Kepramu-kaan	Rp300.000.000,- Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan = 100%	Rp292.887.700,- 100%	3. Kondisi atlet yang dinamis di setiap tahunnya	3. untuk mengatasi permasalahan tersebut kami akan meningkatkan pembinaan di atlet pelajar melalui kelas khusus olahraga dan SPOM sehingga pada tahun 2025 SPOM menjadi 12 cabang olahraga.	
14	Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp427.816.000,- Persentase penyebarluasan dataset = 56,52%	Rp415.994.240,- (97,23%) 100% Jumlah dataset yang dipublikasikan = 525	1. Ketersediaan dan akurasi data 2. Sinergitas antar OPD terkait peran 3. Regulasi-regulasi tidak mencapai target (Satu Data, dan Statistik)	1. Kerjasama yang lebih intensif dengan BPS 2. Pengembangan peta digital Geoportal dan peta.jogjakota.go.id	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral				4. Belum tersedianya regulasi terkait satu data Indonesia dan statistic 5. Belum terwujudnya Portal Satu Data 6. Stagnasi informasi aplikasi SIG dan OpenData 7. Penyusunan daftar data sektoral belum terwujud 8. Belum terwujudnya katalog data elektronik 9. Belum terwujudnya manajemen API (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah) 10. Teknik penyusunan data sektoral berikut metadatanya belum	3. Penerapan analisa statistik yg lebih mendalam untuk mendukung insight dari data yg ada. Sebagai acuan pengambilan kebijakan 4. Mewujudkan Portal Satu Data 5. Mulai menyusun Bigdata dg Database Terstruktur 6. App Data Katalog 7. Pembangunan Data statistic wilayah 8. Sosialisasi Peraturan Kepala BPS tentang pelaksanaan statistic sectoral 9. Sosialisasi Indeksi Pembangunan Statistik	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							dikuasai sampai di tingkat kelurahan 11. Belum terwujudnya daftar kebutuhan analisa data		
15	Persandian	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi 2. Meningkatkan Pengamanan Sinyal Frekuensi 3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	Rp334.820.088,- Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi = 57,14%	Rp332.569.450,- (99,32%) 105,71% Terlaksana = 111 pengujian keamanan informasi dari target = 105 pengujian	Tim Kerja Operasional Santel : 1. Banyaknya permintaan penambahan extension telepon lokal terutama pada gedung yang berlokasi di luar komplek Balaikota, sedangkan kapasitas PABX lokal masih terbatas. 2. Tidak dilibatkannya Tim OpsSantel dan/atau tidak adanya informasi terkait perencanaan pembangunan gedung	1. Pengadaan dan penggantian PABX dengan kapasitas lebih besar dilaksanakan secara bertahap dan sesuai priotitas, serta dengan mengoptimalkan penggunaan PABX Lokal untuk telepon antar ruangannya. 2. Mengoptimalkan anggaran yang ada dengan pemasangan jaringan telepon yang menempel	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							baru/renovasi yang berdampak pada ketersediaannya jaringan telepon pada gedung tersebut 3. Seiring dengan adanya beberapa aplikasi yang menggunakan tanda-tangan elektronik sehingga yang terjadi banyak Kepala OPD/Unit Kerja yang lupa terkait passphrase dari tanda-tangan elektroniknya 4. Penggunan tanda-tangan elektronik pada pelaksanaannya dilimpahkan kepada personil yang menangani aplikasi dan bukan	pada dinding bangunan gedung 3. Melaksanakan pemanduan untuk dilakukan reset passphrase baik dilaksanakan oleh verifikator maupun jika memungkinkan untuk dilaksanakan secara mandiri. 4. Terkait tanda-tangan elektronik yang dilimpahkan yang bisa dilaksanakan hanya sebatas memberikan pemahaman kepada personil yang diberi tanggung-jawab tersebut 5. Melaksanakan koordinasi lintas bidang (Bidang IT dan Bidang SIS)	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan langsung 5. Kadang masih ada kendala pada saat dilaksanakan proses tanda-tangan elektronik pada aplikasi yang ada saat ini dikarenakan permasalahan koneksi jaringan maupun permasalahan pada aplikasinya itu sendiri, baik itu yang ada di internal maupun yang di BSrE BSSN. Tim Kerja Paminfo : 1. Pengujian keamanan aplikasi (*pentest*) sudah dilakukan dengan	maupun dengan BSrE BSSN agar bisa segera diatasi terkait adanya kendala pada saat proses tanda-tangan elektronik tersebut. 1. Rapat koordinasi rutin dengan bidang lain maupun OPD terkait untuk	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							output berupa laporan hasil *pentest*, namun untuk tindak lanjut memerlukan koordinasi dengan bidang lain 2. Audit keamanan informasi yang terkadang bersamaan waktu pelaksanaannya sehingga cukup mengganggu pekerjaan lainnya 3. Kurangnya kompetensi SDM yang berkaitan dengan audit dan pengujian keamanan informasi 4. Tidak meratanya literasi digital bagi pegawai dan masyarakat	menindaklanjuti laporan hasil *pentest.* 2. Menyesuaikan jadwal audit dan mempersiapkan bahan yang diperlukan sedari awal 3. Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan skill dan kompetensi SDM terkait audit dan pengujian keamanan informasi 4. Menyebarkan informasi kegiatan literasi digital melalui media sosial, membuka pendaftaran seluas-luasnya bagi masyarakat kota, termasuk sekolah-	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							disebabkan kurangnya informasi mengenai kegiatan tersebut Tim Kerja Wasdal : 1. Penentuan titik lokasi baru untuk menara telekomunikasi yang berada di kawasan sumbu filosofi yang terkena dampak penyesuaian bentuk 2. Terdapat ketidaksesuaian antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan penyedia layanan (provider) dalam menentukan jumlah menara rooftop yang berada pada atap bangunan yang sama	sekolah di wilayah kota Yogyakarta 1. Koordinasi dengan OPD pengguna BMD dan provider menara telekomunikasi yang terdampak 2. Inventarisasi jumlah menara didasarkan pada jumlah pole menara telekomunikasi 3. Penataan fiber optik (FO) menggunakan ducting ini diselaraskan dengan pelaksanaan program DPUPKP, khususnya saat	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							3. Penataan jaringan fiber optik yang sudah ada melalui sistem ducting belum dapat dilakukan secara berkelanjutan akibat keterbatasan anggaran 4. Dalam rangka kegiatan/pekerjaan sterilisasi ruangan VVIP, Dinas Kominfosan tidak mempunyai peralatan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud	melakukan pekerjaan Saluran Air Hujan, dan pekerjaan penataan pedestrian/trotoar 4. Berkoordinasi dan meminjam peralatan sterilisasi Dinas Kominfo Provinsi DIY atau kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	
16	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	1. Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya Benda 2. Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan	1. Program Penyeleng-garaan Keistime-waan Yogyakarta Urusan	Rp73.273.648.991,- Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan = 79,55%	Rp68.874.543.569,- 82,27%	1. Perkembangan era globalisasi menyebabkan masyarakat, terutama generasi muda lebih tertarik dengan budaya popular	1. Membuat kegiatan inovatif agar masyarakat lebih tertarik dengan kegiatan pelestarian kebudayaan. Misalnya, Harmoni Embung Giwangan,	Telah dilaksanakan koordinasi dan evaluasi dengan DIY perihal hasil penataan fasad bangunan di Malioboro yang merupakan salah

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Warisan Budaya Tak Benda 3. Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Permuseuman 4. Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra 5. Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi 6. Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Lembaga Budaya 7. Meningkatkan Pelestarian dan	Kebuda-yaan 2. Program Penunjang Urusan Pemerintah-an Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra: 77,11% Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum: 77,11% Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni: 87% Persentase Dukungan Operasional Taman Budaya Embung Giwangan: 100%	82,77% 82,3% 95,56% 100%	2. Belum optimalnya publikasi terkait kegiatan pengembangan kebudayaan di Kota Yogyakarta	Kotabaru Heritage Film Festival, Jogja Historical Orchestra, Sastra Boga sebagai rangkaian Festival Sastra Yogyakarta, Kolaborasi Wayang, dan Jogja Cross Culture. 2. Optimalisasi media sosial serta publikasi kegiatan seni budaya secara lebih luas.	satu komponen sumbu filosofi. Dinas Kebudayaan dalam kesempatan tersebut juga memberikan masukan dan saran atas penataan tersebut.

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Pengembangan Seni 8. Terlaksananya Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya yang lebih Optimal 9. Terlaksananya Pemeliharaan Kawasan Cagar Budaya yang lebih Optimal		Indeks Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya: 82,5 Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya: 85 skala 0-100 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan): A	83,93 86,60 A			
17	Perpustaka-an	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Melaksanakan pengembanga perpustakaan	1. Program Pembinaan	Rp6.964.764.300,-	Rp6.669.230.445,-	1. Faktor kerusakan fisik buku dan kandungan	1. Dilakukan perbaikan pada buku yang rusak	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			sebagai perpustakaan rujukan kabupaten/kota sesuai kewenangannya 2. Melaksanakan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota sesuai tatakala 3. Melaksanakan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pembinaan Perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan,	Perpusta-kaan	Indek layanan perpustakaan 78,5 skala Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan = 37.747 judul Presentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP : 40,28%	83,47 skala 37.877 judul 40,28%	informasi yang sudah tidak relevan mengharuskan proses penghapusan buku 2. Adanya perbaikan data judul buku yang terinput dua kali dalam sistem, sehingga jumlah judul buku menjadi berkurang dan jumlah eksemplar menjadi bertambah 1. Masih ada perpustakaan sekolah (SD dan SMP) yang pengelolaannya belum sesuai SNP	jika isi buku masih relevan untuk saat ini, dan melakukan pembelian buku yang isinya masih sesuai dengan keadaan saat ini 2. Dilakukan pendataan buku rusak setiap bulan berjalan dan perbaikan dilaksanakan di bulan selanjutnya 3. Adanya juknis penginputan buku dalam sistem informasi perpustakaan 1. Pendampingan visitasi akreditasi perpustakaan pada bulan Desember 2024	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Penyusunan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota sesuai tatakala 4. Melaksanakan Pengembangan Bahan Perpustakaan Tercetak Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangan 5. Melaksanakan Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota sesuai Tatakala	2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp135.274.000,- Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat dan didaftarkan oleh masyarakat = 1 naskah	Rp133.267.125,- 1 naskah	dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki 1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyimpanan perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	2. Pembinaan dan pendampingan pengelolaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus 1. Mendorong masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno melalui kegiatan sosialisasi ke masyarakat 2. Sudah dilaksanakan workshop pada bulan Agustus 3. pendataan naskah kuno sudah mendapatkan 200 judul naskah dalam Katalog Gantari	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			6. Melaksanakan Kegiata Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai tatakala					4. sudah dilaksanakan seminar naskah kuno pada bulan Oktober	
18	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Mengelola memelihara, dan mengawasi arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota sesuai tatakala 2. Melaksanakan pengumpulan arsip terjaga dan pengelolaan arsip statis	1. Program Pengelolaan Arsip	Rp594.256.900,- Jumlah arsip statis terdigitalisasi = 1.200 arsip Presentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori "sangat baik" = 38%	Rp587.377.700,- 1.200 arsip 96%	1. Scanner kurang memadai (sudah over use, sehingga hasilnya tidak maksimal) 2. Pengelola Arsip OPD melaksanakan penataan arsip hanya sebagai tugas tambahan, bukan sebagai tugas pokok/utama	1. Mengurangi target digitisasi dalam rangka memperpanjang kualitas Scanner 2. Koordinasi dengan Bagian Organisasi dan BKPSDM untuk mengusulkan Anjab Arsiparis.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			daerah sesuai tatakala 3. Melaksanakan pemberdayaan kapasitas LKD secara tepat 4. Melaksanakan penilaian, penetapan, pemusnahan dan pemulihan arsip sesuai tatakala 5. Melaksanakan pendataan dalam rangka penyelamatan arsip sesuai tatakala 6. Melaksanakan penilaian dan penetapan arsip hasil alih media sesuai tatakala 7. Melaksanakan penetapan dan	2. Program Perlindung-an dan Penyelamat an Arsip 3. Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp154.604.500,- Jumlah arsip yang terlindungi dan Terselamatkan = 1.400 arsip Rp19.060.000,- Persentase arsip tertutup yang dilayankan = 100 %	Rp151.292.500,- 1.400 arsip Rp18.413.000,- 100%	1. Adanya Arsip potensi statis masih digunakan di Perangkat Daerah, sehingga belum bisa diserahkan ke LKD 1. Sarana dan Lamanya identifikasi dan penyusunan daftar arsip tertutup (terutama bagi arsip yang belum ditetapkan sebagai arsip tertutup)	1. Pendampingann dalam pendataan arsip potensi statis di perangkat daerah untuk diserahkan ke LKD 1. Menyusun Identifikasi Arsip tertutup 2. Menyusun Daftar Arsip Tertutup	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pengumuman daftar pencarian arsip sesuai tatakala menyediakan informasi arsip yang berkualitas 8. Melaksanakan penyusunan SOP dan tersedianya daftar arsip tertutup yang berkualitas						

3.1.3. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan

Tabel III. 3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Meningkatkan pembinaan budidaya peternakan dan perikanan 2. Meningkatkan penanganan penyakit zoonosa 3. Meningkatkan pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Poliklinik Hewan	1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 2. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp1.016.804.888,- Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin = 15,79% Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin = 52,38%	Rp1.014.253.723,- (99,75%) 15,79% 57,14%	1. Pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan waktu dan kegiatan pelaku utama perikanan maupun masyarakat sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah terploting.	1. Menjalin komunikasi yang baik antara Petugas (Dinas, Penyuluh, dan OPD terkait) dengan pelaku utama perikanan dan masyarakat sehingga memudahkan dalam koordinasi kegiatan	
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata	1. Melaksanakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Sesuai	1. Program Peningka-tan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima : 56,89%	75,86%	1. Tuntutan wisatawan akan hospitality dan pelayanan prima terus meningkat dan dinamis.	1. Pendampingan Daya Tarik Wisata sepanjang tahun. 2. Koordinasi Monitoring dan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			dengan Tahapan pengembangan standar layanan.				2. Untuk Persaingan dengan daerah lain yang semakin kompetitif 3. Perlunya mendorong ekosistem pariwisata yang bertanggung jawab	evaluasi pelayanan prima di DTW dan penetapan klasifikasi pada setiap DTW 3. Meningkatkan Mendorong pengelolaan pariwisata berwawasan lingkungan melalui pelatihan ecogreen dan kegawatdaruratan berkolaborasi dengan UGM.	
			2. Mengelola Destinasi Periwisata Kabupaten/ kota		Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata : 75,35 skala 0-100 Rp67.647.500,-	Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata : 75,59 skala 0-100 Rp66.425.500,-	Pengembangan prasarana di DTW/Kampung Wisata terkendala ketersediaan lahan dan legalitas status lahan.	Dalam pengembangan prasarana DTW/Kampung Wisata dilakukan penyesuaian-penyesuaian di lapangan dan pelibatan elemen masyarakat	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								dan pengampu kepentingan di wilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan.	
			1. Melaksanakan Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Berbagai Media, Kemitraan Kerjasama Dan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Maupun Luar Negeri	2. Program Pemasaran Pariwisata	Rp1.285.628.570,- Jumlah Kunjungan Wisatawan = 5.150.000 Orang Terdiri dari: Wisatawan Nusantara = 5.000.000 Orang; Wisatawan Mancanegara = 150.000 Orang	Rp1.267.570.126,- 10.583.877 Orang, 7.279.908 Orang 355.333 Orang	1. Kebijakan pembatasan anggaran perjalanan dinas dan keterbatasan pagu anggaran, kegiatan promosi pariwisata ke luar negeri masih sangat minim 2. Event unggulan Kota Yogyakarta yaitu Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) belum dapat membuat website official event. Hal tersebut cukup disayangkan	1. Atraksi wisata, optimalisasi destinasi wisata dan mewujudkan lingkungan destinasi yang tercermin sesuai Sapta Pesona 2. Melanjutkan promosi wisata secara masif, baik melalui media elektronik, media cetak, media online dan promosi melalui penyelenggaraan event serta meningkatkan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							mengingat WJNC sudah menjadi bagian dari Kharisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, dengan demikian event tersebut sudah menjadi salah satu event dengan skala Nasional. Sehingga akan lebih baik dari segi promosi dan branding (brand/event identity) akan lebih terlihat	kerjasama dengan Stakeholder pariwisata dalam meningkatkan kunjungan maupun lama tinggal wisatawan	
			2. Melaksanakan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi				1. Kurangnya kegiatan event yang diselenggarakan pada pada malam hari	1. Meningkatkan atraksi wisata, optimalisasi destinasi wisata dan mewujudkan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				2. Meningkatnya biaya akomodasi dan konsumsi, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk berwisata 3. Menurunnya kunjungan wisatawan pada waktu weekday, yaitu bulan Februari, Maret dan awal Ramadhan di bulan April	lingkungan destinasi yang tercermin sesuai Sapta Pesona 2. Melanjutkan promosi wisata secara masif, baik melalui media elektronik, media cetak, media online dan promosi melalui penyelenggaraan event 3. Meningkatkan kerjasama dengan Stakeholder pariwisata dalam meningkatkan kunjungan maupun lama tinggal wisatawan 4. Meningkatkan kerjasama dengan Stakeholder Pariwisata Kota	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan	
			1. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp2.250.003.200,- Persentase SDM Pariwisata yang Meningkat Kompetensinya : 50%	Rp2.232.344.029,- 50%	1. Sebagian besar Pokdarwis belum memiliki aktivitas kepariwisataan yang dijalankan secara rutin atau berkala 2. Sebagian Kampung Wisata belum memiliki paket wisata yang mudah dipasarkan 3. Sebagian Kampung Wisata belum memiliki kerapihan administrasi dan aktivitas yang memenuhi standar kompetisi kepariwisataan	1. Pendampingan untuk 45 Pokdarwis agar untuk dapat memetakan kegiatan yang dapat dilakukan dan mendorong kegiatan Bersama Kampung Wisata 2. Pendampingan Kampung Wisata dalam pembuatan dan pemasaran Paket Wisata serta dilakukan test tour terhadap beberapa paket wisata untuk mendapatkan masukan bagi	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							4. Sebagian kampung wisata memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengembangan Kampung Wisata 5. Sebagian besar kampung wisata belum memiliki kemasan atraksi wisata yang menarik sebagai pengisi event/ festival	pengembangan paket wisata 3. Dilaksanakan kegiatan Seleksi Kampung Wisata untuk ADWI Tingkat Kota agar kampung wisata termotivasi untuk melengkapi administrasi dan menguatkan potensi daya tarik yang dimiliki agar dapat masuk dalam kompetisi tingkat regional dan Nasional 4. Dilaksanakan Pemilihan Mas dan Mbak Kampung Wisata Kota Yogyakarta agar generasi muda dapat berkontribusi sebagai duta	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								Kampung Wisata yang mempromosikan dan terlibat langsung dalam kegiatan Kampung Wisata 5. Dilaksanakan Festival Kampung Wisata yang merupakan bentuk pembinaan agar Kampung Wisata mampu menyajikan atraksi yang menarik	
			2. Meningkatnya Kompetensi SDM Pariwisata Tingkat Dasar				1. Jenis pekerjaan/Profesi di bidang kepariwisataan yang cukup beragam menyebabkan Kebutuhan yang variatif terhadap	1. Koordinasi berkala dengan Usaha Pariwisata dan lembaga pariwisata berbasis wilayah dan untuk mengakomodasi kebutuhan peningkatan SDM	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							berbagai jenis pelatihan, workshop dan sertifikasi 2. Perlu pemantauan terhadap peserta pelatihan dan sertifikasi agar peserta semakin merata dan menerapkan hasil pelatihan dan sertifikasi	dan memetakan jenis peningkatan kompetensi yang dibutuhkan 2. Penyusunan data peserta pelatihan dan sertifikasi serta koordinasi dengan Ketua Kampung Wisata dan Pokdarwis untuk pemerataan peserta dan pemantauan implementasi pasca pelatihan/sertifikasi	
			1. Memfasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp1.557.026.000,- Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi: 57,11%	Rp1.513.861.000,- 57,11%	1. Jogja Kreatif: Konsep acara, teknis produksi, sajian dan atraksi yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan terkait karena diselenggarakan pada Kawasan	1. Jogja Kreatif: Terus berkoordinasi dengan team kreatif untuk menemukan konsep, teknis produksi, sajian program dan atraksi yang pas dan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Cagar Budaya, sehingga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan 2. Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata: Pendampingan pariwisata masih belum dapat mencakup seluruh usaha pariwisata di Kota Yogyakarta dikarenakan banyaknya usaha pariwisata di Kota Yogyakarta dan dengan adanya keterbatasan anggaran 3. Sertifikasi Usaha Pariwisata: Terkait kesiapan usaha pariwisata untuk dilakukan	melibatkan OPD Teknis Terkait. Memaksimalkan potensi-potensi yang ada serta menentukan target pasar yang akan dituju sehingga terbangun branding tersendiri untuk acara Kotabaru Ceria pada masyarakat luas 2. Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata: Dengan membangun komunikasi dengan berbagai Asosiasi Pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta melalui kegiatan FGD Asosisasi, Chat WA, dan koordinasi dengan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							sertifikasi karena adanya permasalahan teknis dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi serta standarisasi usaha pariwisata 4. Updating Data Usaha Industri Pariwisata: Periodesasi data industri pariwisata yang terus berkembang sehingga dibutuhkan waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi data 5. Pengawasan Usaha Pariwisata: Tidak semua usaha pariwisata siap untuk dilakukan	pentahelix pariwisata 3. Sertifikasi Usaha Pariwisata: Dengan melakukan bimbingan teknis mengenai persiapan sertifikasi usaha pariwisata serta pemilihan usaha yang akan disertifikasi merupakan usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pengawasan, baik pengawasan reguler maupun pengawasan OSS 4. Updating Data Usaha Industri Pariwisata: Verifikasi data dilakukan dengan melibatkan Tenaga	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							monitoring dan evaluasi, keterbatasan anggaran untuk melakukan pengawasan ke 1.331 usaha pariwisata di Kota Yogyakarta	Ahli Basis Data dan mahasiswa magang yang ada di Dinas Pariwisata khususnya sebagai upaya untuk mempercepat proses verifikasi data pada periode tertentu 5. Pengawasan Usaha Pariwisata: Dengan Melakukan Bimbingan Teknis terkait pemenuhan standarisasi usaha pariwisata, persyaratan perizinan usaha pariwisata, membangun komunikasi dengan pelaku usaha pariwisata melalui Blasting WhatsApp guna mengirimkan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								informasi dan regulasi terbaru baik dari pemerintah kota maupun pemerintah pusat	
3	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Meningkatkan jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan 2. Meningkatkan jumlah tanaman buah yang bersertifikat 3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengecer obat hewan	1. Program Penyediaan dan Pengemba-ngan Sarana Pertanian	Rp3.772.887.716,- Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan = 100% Persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat = 3,54% Persentase Pengecer Obat Hewan yang	Rp3.760.668.112,-(99,68%) 100% 3,54% 76,67%	1. Waktu untuk bertemu dengan pelaku usaha/kelompok tidak fleksibel dan harus menyesuaikan kegiatan pelaku usaha/kelompok, beberapa pelaku usaha tidak memiliki media komunikasi elektronik, sehingga ketika pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan pelaku usaha tidak	1. Menjalin komunikasi yang baik antara Petugas (Dinas, Penyuluh, dan OPD terkait) dengan pelaku utama perikanan dan masyarakat sehingga memudahkan dalam koordinasi kegiatan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			4. Meningkatkan jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara 5. Mengendali-kan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis 6. Meningkatkan jumlah pelayanan jasa medik veteriner 7. Melayani pemotongan hewan di Rumah Pemotong-an Hewan 8. Menyediakan laporan pengawasan dan pengujian	2. Program Penyediaan dan Pengemba-ngan Prasarana Pertanian 3. Pengendali-an Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Pengendali-an dan Penanggula	terbina dan terawasi = 75%% Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya = 23 unit Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi= 31,24% Persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi = 100% Persentase zoonosis prioritas yang terkendali = 100%	23 unit 31,24% 100% 100%	berada dilokasi dan tujuan kegiatan tidak tercapai secara maksimal. 2. Perubahan cuaca ekstrim menyebabkan daya tahan tubuh hewan menurun dan prasarana pertanian mudah rusak.	2. Komunikasi, Informasi dan edukasi terkait Kesehatan dan penyakit hewan kepada peternak dan Masyarakat, perawatan prasarana pertanian secara rutin	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pangan segar asal hewan dan perikanan 9. Pelaksanaan pencegahan dan KIE Bencana Non Alam yang bersifat Zoonosis 10. Meningkat-kan jumlah kelompok tani kelas Lanjut	ngan Bencana Pertanian 5. Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani = 24,31%	27,03%			
4	Perdaga-ngan	Dinas Perdagangan	1. Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala 2. Melaksanakan administrasi keuangan perangkat	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Rp14.808.599.157,- Kategori hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. A Nilai Indeks Kinerja Perdagangan = 51,54%	Rp13.534.323.306,- A Nilai 54,28%	1. Tidaklanjut bukti dukung hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada penilaian SAKIP	1. Mencermati dan meningkatkan kualitas SAKIP	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala 3. Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala						
			1. Melaksanakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	2. Program Penunjang Urusan Pemerinta-han Daerah Kabupaten/ Kota pada Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp7.244.161.414,- Pendapatan UPT Pusat Bisnis = Rp5.598.578.000,-	Rp5.896.637.011,- Rp5.933.182.845,-	1. Komitmen pengguna terhadap pemenuhan perjanjian sewa sesuai ketentuan pembayaran	1. Penegakan hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa dan optimalisasi pelaksanaan SOP	
			1. Melaksanakan Pembangunan	3. Program Peningka-	Rp23.420.404.610,-	Rp21.766.243.629,-	1. Kualitas dan ketersedian Sarana	1. Peningkatan kualitas dan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	tan Sarana Distribusi Perdaga-ngan	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat= 34,48%	34,48%	dan prasarana pasar rakyat	penyediaan Sarpras yang memadai sesuai standar pasar rakyat	
			2. Melaksanakan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Pendapatan retribusi pasar = Rp15.015.878.000,-	Rp17.946.182.379,-	2. Komitmen pengguna terhadap pemenuhan kewajiban retribusi sesuai ketentuan pembayaran	2. Penegakan hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa dan optimalisasi pelaksanaan SOP	
			3. Melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp1.079.282.250,- Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina = 8%	Rp1.053.104.200,- 13,92%	1. Fasilitasi pengembangan promosi dan pemsaran pada tingkat nasional tertabatas	1. Meningkatkan kapasitas dan intensitas pengembangan promosi dan pemasaran pada tingkat nasional	
			4. Melaksanakan Pengendalian	5. Program Perizinan	Rp155.722.000,-	Rp222.016.700,-	1. Keterlusuran distributor pada	1. Meningkatkan kerjasama, edukasi	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya = 25%	25%	penyalahgunakan penggunaan bahan berbahaya pada makanan dan pangan yang berasal dari luar daerah sulit dipantau	dan pembinaan terhadap pasokan produk yang bereedar di tingkat hilir terutama pedagang, komunitas dan pemerintah daerah lainya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara intens.	
			5. Melaksanakan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp1.258.641.000,- Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok = 90,20%	Rp1.258.637.900,- 98,04%	1. Intervensi pengendalian harga yang diselengarakan pemerintah pada komoditas kebutuhan pokok sesuai HET terutama di pasar rakyat	1. Mengoptimalkan kios segoro amarto, warung mrantasi, operasi pasar dan pasar murah serta mengedukasi pedagang untuk mengikuti program pemerintah dalam hal pengendalian harga (sosialisasi patuh HET)	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			6. Melaksanakan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota 7. Menyelenggarakan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	7. Program Standarisa-si dan Perlindu-ngan Konsumen	Rp391.049.350,- Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah = 100%	Rp391.018.840,- 100%	1. Penggunaan alat UTTP yang dimiliki pelaku usaha terdapat alat yang belum memiliki ijin edar dari direktorat metrologi legal sehingga tidak dapat dilakukan tera/tera ulang	1. Meningkatkan pengawasan dan penyuluhan pada alat UTTP diwilayah Yogyakarta melalui sidang dan pelayanan langsung ditempat dan mobile.	
5	Perindustri-an	Dinas Perindustrian	1. Melaksanakan pembinaan teknis,	1. Program Perencana-an dan	Rp7.615.978.050,-	Rp7.420.058.968,- 10,17	Fasilitasi Sertifikasi Halal dan TKDN IK tidak kontinyu karena	Menghubungkan dengan lembaga mitra yang dapat	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		Koperasi dan UKM	peningkatan kualitas SDM dan kerjasama dengan pihak lain yang berkaitan dengan industry	Pembangu-nan Industri	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi = 6,97 (Bidang Industri dan UPT Logam)	(Bidang Industri dan UPT Logam)	bersumber dari dana DAK Non Fisik	memfasilitasi sertifikasi Halal	
			2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan bidang industri	2. Program Pengendali-an Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Rp21.127.500,- Persentase IKM yang berizin industri = 1,87	Rp20.637.500,- 61,91			
			3. Melaksanakan diseminasi publikasi data informasi bidang perindustrian melalui SINAS	3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp53.076.500,- Persentase Data Informasi Industri yang terupdate = 100 %	Rp53.066.500,- 100%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				4. Program Penunjang Urusan Pemeritah-an Daerah Kabupaten/ Kota	Rp750.730.158,- Pendapatan UPT Logam = Rp512.723.000,-	Rp530.502.396,- Rp566.776.486,-	Dinamika di lapangan menghambat realisasi program/kegiatan (perkembangan harga barang/jasa yang diluar perkiraan)	Menyusun perencanaan dengan lebih cermat dan memperkirakan tren harga barang/jasa yang dibutuhkan	
6	Transmi-grasi	Dinsosnaker-trans	Melaksanakan Penataan Persebaran Penduduk	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp222.029.225,- Persentase Penempatan Transmigran = 15%	Rp221.289.800,- 16,22% (Capaian : 108,11%)	Ketidaksesuaian Lokasi trans yang ditetapkan oleh pusat dengan animo peminat transmigrasi	1. Sosialisasi dan sinkronisasi mekanisme usulan transmigrasi yang sesuai peminat calon transmigrasi 2. Pemberian motivasi (KIE)	

3.1.4. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel III. 4 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perencanaan	Bappeda	1. Melaksana-kan perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaa n, APBD DIY dan APBN Non Reguler sesuai tatakala 2. Melaksana-kan proses perencanaan yang lengkap dan sesuai	1. Program Perencana-an Pengendali-an dan Evaluasi Pembangun an Daerah	Rp1.097.349.494,- 92,6 Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah = 92,6% Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan = 100%	Rp1.094.927.590,- 99,78 99,69% 100%	1. Capaian kinerja tergantung dari realisasi capaian sasaran daerah yang diampu oleh mitra perangkat daerah 2. Perencanaan bersifat dinamis sehingga target sering tidak sesuai dengan kondisi saat ini	1. Pendampingan perencanaan dan Pengendalian serta monitoring dengan perangkat daerah melalui : 1. Desk Sasaran Daerah 2. Pengembangan Simoneva 3. Koordinasi Intensif dengan Perangkat Daerah 2. Pelaksanaan Desk Metadata	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			tatakala untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 3. Melaksana-kan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara lengkap dan sesuai tatakala 4. Menyusun data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah secara						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			lengkap dan mutakhir 5. Melaksana-kan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan secara lengkap dan sesuai tatakala 6. Melaksana-kan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor	2. Program Koordinasi dan Sinkroni-sasi Perenca-naan Pembangu-nan Daerah	Rp1.379.540.280,- Persentase kesesuaian capaian kinerja sector Pemerintahan dan Pembangunan Manusia = 92,6% Rp427.117.608,-	Rp1.377.958.625,- 99,47% Rp426.002.125,-	3. Dinamika perencanaan yang sangat dinamis dan data perencanaan harus selalu di update	3. Pelaksanaan Desk Pendampingan Renja, Desk Timbal Balik, Desk Metadata ,Koordinasi intensif dengan mitra perangkat daerah	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pembangunan manusia secara lengkap dan sesuai tatakala 7. Melaksana-kan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat secara lengkap dan sesuai tatakala 8. Melaksana-kan perencanaan, pengendalian, dan		Rp265.110.500,- Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor	Rp265.110.500,- 99,88%	4. Dinamika perencanaan yang sangat dinamis dan data perencanaan	4. Pelaksanaan Desk Pendampingan Renja, Desk Timbal Balik, Desk Metadata	1. Pelaksanaan Jogja Festival Forum Expo kerjasama dengan Komunitas Ekraf

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pengelolaan data pembangunan daerah sektor perekonomian secara lengkap dan sesuai tatakala 9. Melaksana-kan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pariwisata dan kebudayaan secara lengkap dan sesuai tatakala		perekonomian dan sumber daya alam 92,6%		harus selalu di update	,Koordinasi intensif dengan mitra perangkat daerah	(Jogja Festival, Pelaku Event Jogja, Jogja Creative Society), Kemenparekraf, Dinas Pariwisata DIY, British Council 2. Penetapan Kota Yogyakarta sebagai Kota Kreatif bidang Seni Rupa oleh Kemenparekraf 3. Pembentukan pra Komisi Ekonomi Kreatif (KEK) di bawah koordinasi Bagian Perekonomian dan Kerjasama 4. Beberapa kemantren dan kelurahan di kawasan sumbu filosofi telah

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			10. Melaksana-kan perencana-an, pengendali-an, dan pengelolaan data pembangun an daerah sektor pengemba-ngan dunia usaha secara lengkap dan sesuai tatakala						mengadakanpelat ihan kebudayaan dan fasilitasi pelestarian upacara dan adat dan tradisi, contoh : Kemantren Mantrijeron telah mengadakan pentas sepanjang tahun untuk menghidupkan tradisi dan pengembangan ekonomi Masyarakat. 5. Adanya penyelenggaraan upacara Apeman maupun nyadran di wilayah
			11. Melaksana-kan perencana-an, pengendali-an, dan pengelolaan		Kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan : 92,6% Rp687.312.172,-	99,53% Rp686.846.000,-			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			data pembangun an daerah sektor pekerjaan umum dan perhubung-an secara lengkap dan sesuai tatakala 12. Melaksana-kan perencana-an, pengendali-an, dan pengelolaan data pembangun an daerah sektor lingkungan hidup dan tata ruang secara						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			lengkap dan sesuai tatakala 13. Melaksana-kan perencana-an, pengendali-an, dan pengelolaan data pembangun an daerah sektor permukim-an dan pengemba-ngan wilayah secara lengkap dan sesuai tatakala						
2	Penelitian dan Pengemban gan	Bappeda	1. Melaksana-kan inventarisasi	1. Program Penelitian dan	Rp1.782.504.212,-	Rp1.778.446.900,-	1. Belum semua hasil penelitian menjadi pedoman untuk	1. Pembentukan Dewan Penelitian dan Pengembangan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			penelitian OPD dan kebijakan pembangunan berbasis penelitian 2. Melaksana-kan penelitian tematis pembangunan daerah 3. Melaksana-kan penelitian strategis pembangunan daerah 4. Melaksana-kan dukungan inovasi untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Pengemba-ngan Daerah	Presentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan = 92.00% Rp1.318.864.812,- Skor rata-rata inovasi perangkat daerah : 75.00 Rp361.942.000,-	93,75% Rp1.316.939.500,- 88,84 (Sangat Inovatif) Rp360.007.948,-	penyusunan perencanaan 2. Menumbuhkan Belum semua hasil penelitian menjadi pedoman untuk penyusunan perencanaan	untuk memberikan usulan ataupun rekomendasi dengan perangkat daerah 2. Melaksanakan soailisasi, diseminasi dan , Bimtek penumbuhan inovasi	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
3	Sekretariat Daerah	1) Bag. Tata Pemerintahan	1. Melaksana-kan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 2. Melaksana-kan Penataan Administrasi Pemerintahan 3. Melaksana-kan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1. Program Pemerinta-han dan Kesejahte-raan Rakyat	Rp1.525.084.572,- Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah = Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Rp1.440.986.772,- (95,01%) 100% Cepat Berkembang (393,91)	1. Kurangnya pemahaman perangkat kelurahan dalam pengisian aplikasi evaluasi perkembangan desa/ kelurahan (epdeskel)	1. Melakukan pendampingan dalam pengisian aplikasi epdeskel secara rutin	Telah terlaksana Evaluasi Perkembangan Kelurahan (Lomba Kelurahan) dan Evaluasi Kinerja Kemantren dengan memberikan penghargaan terhadap Kemantren dan Kelurahan terbaik.
		2) Bag. Kesejahteraan Rakyat	1. Melaksana-kan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2. Melaksana-kan Kebijakan Evaluasi, dan	1. Program Pemerinta-han dan Kesejahte-raan Masyarakat	Rp3.636.869.000,- Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis	Rp3.623.291.500,- (98,24%) 100%	Kurang lengkapnya data yang diperoleh dari masing masing OPD mitra dan di Metadata implementasi kebijakan, sehingga pada saat merumuskan amanat	Koordinasi yang berkelanjutan dengan OPD mitra mencakup Implementasi kebijakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 3. Melaksana-kan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		kesejahteraan rakyat = 89%		kebijakan kurang tepat sasaran.		
		3) Bag. Hukum	Meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Rp1.573.609.224,- Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum = 99,2%	Rp1.491.055.632,- 94,75%	Banyaknya pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi permintaan instansi vertikal yang menyita lebih banyak waktu dibandingkan dengan ketugasan yang menjadi core bussiness	Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan perangkat daerah pengusul dan instansi vertikal terkait	
		4) Bag. Perekono-	1. Melaksana-kan Fasilitasi	1. Program Perekono-	Rp2.252.238.720,-	Rp2.503.241.183,- 99,13%	1. Belum ada wadah bagi pelakku	1. Membentuk inisiasi komite ekonomi	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		mian dan Kerjasama	Kerjasama Daerah 2. Melaksana-kan Penyusunan Bahan Kebijakan Perekonomi-an 3. Melaksana-kan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	mian dan Pembangu-nan 2. Program Pemerinta-han dan Kesra	Indeks Perekonomian = 71,38% Indeks perekonomian targetnya 71% terdiri dari : 45% x Kinerja Kebijakan perekonomian + 35% x Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD + 20% x Kinerja Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani	Capaian 108%	ekonomi Kreatif untuk menciptakan ruang tumbuh dann kecakapan skill 2. Pelaksanaan kebijakan ekonomi belum berbasis data (data-driven economy policy) mengalami tantangan ditingkat daerah terutama disebabkan karena tidak tersedianya basis data dan kualitas data yang bisa diandalkan 3. Kompetensi ASN Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyiapkan rencana kerja sama daerah masih perlu ditingkatkan 4. Pelaksanaan tanggungjawab	kreatif yannnnng beranggotakan representasi dari pelaku ekonomi kreatif 2. Menyusun kajian rancangan sistem dan basis data UMKM Nglarisi Kota Yogyakarta 3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan 4. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan 5. Menyusun indikator aspek non keuangan kinerja BLUD	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							petugas penghubung kerja sama daerah dari perangkat daerah pelaksana kerja sama kurang optimum 5. Indikator kinerja aspek non kkeuangan pada BLUD non kesehatan belum di tetapkan		
		5) Bag. Administrasi Pembangunan	1. Melaksana-kan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 2. Melaksana-kan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 3. Melaksana-kan Pelaporan	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pelaksana-an Administrasi Pembangunan	Rp544.342.000,- Presentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan = 98,54% Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu	Rp528.407.400,-(97,07%) 100%	1. Ada pekerjaan terhambat karena faktor lapangan 2. Ada pekerjaan terhambat karena factor steakholder lain 3. Adanya peraturan perundangan baru/kebijakan baru 4. Penyusunan dan koordinasi penindaklanjutan	1. Adanya monev realisasi fisik tiap bulan 2. Ada Early Warning Report (berbentuk notifikasi pada JSS yang menginfokan sub kegiatan dengan deviasi yang cukup besar) yang memberi laporan realisasi fisik langsung ke	1. Mengembangkan mekanisme komunikasi yang lebih efektif, seperti integrasi data antar sistem informasi OPD guna mempercepat pengambilan Keputusan 2. Mengembangkan dan memperbarui

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			dan Evaluasi Pembangunan		strategis Pembangunan = 89%		isu strategis yang membutuhkan banyak waktu	kepala OPD, sehingga kepala OPD bisa melakukan monitoring 3. Adanya penyelia untuk mengawal pelaksanaan kegiatan masing-masing OPD 4. Adanya ROPK (Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan) sehingga perencanaan target menjadi lebih baik 5. Koordinasi intensif dengan OPD lain dalam penindaklanjutan isu strategis	**Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Pengendalian Pembangunan (SIMPEL)** agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelaporan dan pengawasan proyek Pembangunan 3. Melakukan pemetaan risiko dalam proses pengadaan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi hambatan sejak dini
		6) Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	1. Melaksana-kan pengelolaan pengadaan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp545.932.820,-	Rp542.359.842,- (99,35%) 100%	1. Kurangnya pemahaman para pelaku pengadaan barang/jasa	1. Melaksanakan pendampingan/ fasilitasi konsultansi dan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			barang dan jasa 2. Melaksana-kan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik 3. Melaksana-kan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar pelayanan = 95%		pemerintah, sehingga masih terdapat kekeliruan dalam entri data SIRUP yang mengakibatkan adanya perubahan data pada RUP. 2. Masih banyak OPD yang melakukan proses pelimpahan berkas pemilihan penyedia barang dan jasa ke BPBJ tidak sesuai dengan tatakala yang tercantum dalam perencanaan pada SIRUP selain itu apabila ada kesalahan dalam dokumen pemilihan tidak segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait sehingga	sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa termasuk dalam proses entry data SiRUP untuk meminimalisir kesalahan perubahan data RUP. 2. Melakukan koordinasi secara intens dengan OPD terkait waktu pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan melakukan pendampingan apabila diperlukan saat ada revisi/ kesalahan pada dokumen pemilihan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							membutuhkan perpanjangan waktu dalam proses pemilihan penyedia.		
		7) Bag. Umum dan Protokol	1. Melaksana-kan Fasilitasi Kerumahtang gaan Sekretariat Daerah 2. Melaksana-kan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Anggaran kegiatan non pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Keg.12) dan Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Keg.14), sebesar = Rp7.963.775.508,- IKM = 81,50 poin	Rp7.663.663.456,- 81,53 poin	1. Ketersediaan lahan parkir tidak sebanding dengan jumlah kendaraan pegawai dan tamu yang berkunjung ke Balaikota 2. Tidak semua calon tamu kunker mengisi SIM tamu, melainkan beberapa langsung datang di hari kunjungan dan masih terdapat beberapa OPD yang menerima kunkertamu tanpa melalui Bagian Umpro sesuia tupoksi dalam Perwal No.89 tahun	1. Menata ulang landscape dan taman di Balaikota secara bertahap agar membantu penyediaan lahan parkir yang cukup dan memadai 2. Sosialisasi melalui wa ke opd dan pemberitahuan langsung ke tamu, supaya selanjutmya mengisi SIM tamu sebelum berkunjung. 3. Sosialisasi oleh OPD terkait (Bagor), sesuai dengan Permendagri No.54	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							2021 tentang Pengelolaan Tamu Dinas. 3. Kurangnya pemahaman OPD terhadap tata naskah dinas dan kode klasifikasi arsip.	Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (dijabarkan ke Perwal No.144 Tahun 2020) dan Permendagri No.83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah (dijabarkan ke Kepwal No.248 Tahun 2023), sehingga seluruh OPD dapat lebih memahami tata naskah dinas dan kode klasifikasi arsip.	
		8) Bag. Organisasi	1. Melaksana-kan Pengelolaan	1. Program Penunjang Urusan	Rp956.416.212,-	Rp940.528.113,- (98,34%)	1. Perencanaan pada beberapa Perangkat Daerah masih	1. Menambahkan tugas dan fungsi	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kelembagaan dan Analisis Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Melaksana-kan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Melaksana-kan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang optimal	Pemerinta-han Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah (Sangat Tinggi)	100%	belum terlalu matang 2. Kebijakan Pemerintah Pusat yang dinamis 3. Pemahaman Perangkat Daerah terhadap mekanisme pengusulan dan pemanfaatan dana keistimewaan	terkait pemanfaatan dana keistimewaan. 2. Melakukan sosialisasi terkait implementasi tugas dan fungsi keistimewaan 3. Sinkronisasi aturan di Pemkot Yogyakarta dengan aturan Pemerintah Pusat	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			serta Penyusunan Laporan kinerja Perangkat Daerah yang koordinatif dan sesuai ketentuan. 1. Melaksana-kan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Melaksana-kan Implementasi Budaya Pemerintahan yang sesuai	2. Program Penyeleng-garaan Keistime-waan Yogyakarta Urusan Kelemba-gaan dan Ketatalak-sanaan	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan = 50%	56,10%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			nilai-nilai SATRIYA						
		9) Bag. Administrasi dan Keuangan	1. Melaksana-kan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala 2. Melaksana-kan administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	1. Program Penunjang Urusan Pemerinta-han Daerah Kabupaten/ Kota 2. Kegiatan Perencana-an, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp774.836.770,- Rp50.583.000,-	Rp705.299.536,- Rp50.502.000,-	1. Adanya indikator sasaran yang tidak tercapai karena kurang maksimalnya capaian kinerja indikator yang disampaikan oleh Perangkat Daerah teknis pengampu urusan pemerintahan sehingga mempengaruhi nilai SAKIP & RB Setda 2. Nilai evaluasi kearsipan tidak maksimal karena ada Bagian yang baru dibentuk tahun 2021 sehingga mempengaruhi nilai RB Setda	1. Berkoordinasi dengan Bagian yang mengampu indikator sasaran tersebut agar dapat memperbaiki capaian target 2. Berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menyosialisasikan tentang kearsipan.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			3. Melaksana-kan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	3. Kegiatan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp164.169.000,-	Rp164.121.000,-			
			4. Melaksana-kan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	4. Kegiatan Adminis-trasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp160.430.000,-	Rp160.420.900,-			
			5. Melaksana-kan	5. Hasil penilaian	A	A (84,47)			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah					
4	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	1. Menyusun produk hukum 2. Melaksana-kan penyebarluas an Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan 3. Menyelengga rakan Hubungan Masyarakat	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp35.159.923.500,-	Rp26.531.184.623,-	1. Sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas belum terpenuhi. 2. Adanya beberapa pelaksanaan kegiatan DPRD yang tidak sesuai dengan penjadwalan / tata kala kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah. 3. Munculnya peraturan-peraturan	1. Mengusulkan pelatihan peningkatan kapasitas pegawai Setwan melalui kegiatan Bimtek misal legal drafting 2. Berkoordinasi dengan pimpinan DPRD, Pimpinan Alkep dan pimpinan fraksi terkait penjadwalan / tatakala kegiatan DPRD. 3. Melakukan penyesuaian dengan peraturan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			4. Menyusun Rencana Kerja DPRD 5. Menyusun Bahan Komunikasi dan Publikasi 6. Melaksana-kan Koordinasi, Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD. 7. Melaksana-kan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah. 8. Melaksana-kan Fasilitasi Rapat Koordinasi				baru sehingga harus dilakukan penyesuaian 4. Sarana dan prasarana pendukung perlu diperbarui dan ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas sehingga mendukung optimalisasi kerja kedewanan	perundangan yang baru 4. Mengusulkan pembaruan sarpras sesuai dengan kebutuhan untuk optimalisasi kinerja Dewan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			dan Konsultasi DPRD. 9. Menyelengga rakan Pembahasan Penganggara 10. Melaksana-kan Pengawas-an Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, bidang infrastruk-tur, bidang kesejahteraan rakyat, dan bidang perekonomia n. 11. Melaksana-kan Pengawasan						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 12. Melaksana-kan Pengawasan Penggunaan Anggaran. 13. Melaksana-kan Pembahas-an Laporan Keterangan Pertanggu-ngjawaban Kepala Daerah. 14. Menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD.						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			15. Melaksana-kan Reses. 16. Menyusun Kode Etik dan Tata Beracara DPRD. 17. Melaksana-kan Pengawasan Kode Etik DPRD. 18. Melaksana-kan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah. 19. Menyusun Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD.						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			20. Melaksana-kan Pendalaman Tugas DPRD. 21. Menyediakan Kelompok Pakar dan Tim Ahli. 22. Menyediakan Tenaga Ahli Fraksi						
5	Inspektorat	Inspektorat	1. Menyeleng-garakan Pengawasan Internal di Bidang Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Pembangunan	1. Program Penyeleng-garaan Pengawa-san	Rp304.107.550,- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi = 95,2% Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di	Rp294.981.753,- 100% 100%	1. Adanya kegiatan pengawasan tambahan amanat pusat yang baru muncul di tahun berjalan sehingga mempengaruhi tatakala kegiatan pengawasan 2. Kurangnya Belum terpenuhinya formasi sesuai anjab pada jabatan Pelaksana Administrasi	1. Menata ulang jadwal dan pembagian beban kerja kepada pegawai untuk mengantisipasi ketugasan yang tidak terjadwal pada Program Kerja Pengawasan Tahunan 2. Berkoordinasi dengan BKPSDM untuk pemenuhan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Sarana dan Prasarana, dan Bidang Perekonomi-an & Kesejahteraan Rakyat sesuai tatakala dan ketentuan yang berlaku 2. Menyelengga rakan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Pembangunan		Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset = 95,2% Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana = 95,2% Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat = 95,2% Persentase Penyelesaian Tindaklanjut	100% 100% 100%	3. Lamanya penetapan status "SELESAI" atas tindak lanjut yang disampaikan	formasi Pelaksana Administrasi 3. Meningkatkan koordinasi dengan BPK terkait hasil temuan pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti namun dianggap belum cukup 4. Meningkatkan koordinasi dengan OPD auditi/klien	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Sarana dan Prasarana, dan Bidang Perekonomi-an & Kesejahteraan Rakyat sesuai tatakala dan ketentuan yang berlaku 3. Menyelengga rakan Pengawasan Internal Terkait Penyelesaian Tindak lanjut Eksternal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tatakala dan ketentuan yang berlaku		Pemeriksaan Eksternal = 94,74%				

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Melaksana-kan Pendamping-an dan Asistensi di Bidang Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan Bidang Perekonomi-an & Kesejahteraan Rakyat sesuai tatakala dan	2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampi-ngan dan Asistensi	Rp445.263.200,- Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi = 27,27% Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset = 50% Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan	Rp426.077.320,- 63,64% 70% 45,45%	1. Target kinerja tercapai namun dalam penilaian SPIP terkendala pengembangan sistem dari BPKP Pusat, sehingga proses penilaian SPIP di daerah terlambat	1. Pendampingan Inspektorat kepada OPD terkait dengan proses penilaian SPIP 2. Menggunakan kertas kerja manual untuk penilaian di Inspektorat	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			ketentuan yang berlaku 2. Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan pada Bidang Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan Bidang Perekonomi-an & Kesejahteraan Rakyat sesuai		Sarana dan Prasarana = 36,36% Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat = 50%	50%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			tatakala dan ketentuan yang berlaku						
6	Kepegawaian	BKPSDM	1. Melaksana-kan penyusunan, rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK secara lengkap dan sesuai tatakala 2. Terkelolanya Asessment Center 3. Melaksana-kan pengelolaanp engembangan promosi ASN	1. Program Kepegawa-ian Daerah	Rp3.557.548.000,- Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta = 88,38% Persentase JF yang terlayani = 86,65% Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian = 100% Persentase jumlah data ASN yang di Kelola = 91%	Rp3.253.703.269,- 118,50% 100% 100% 100%	1. Proses yang panjang untuk melaksanakan pelantikan dan penataan pegawai karena belum ada Walikota definitif. 2. Realisasi anggaran rekrutmen CASN yang tidak dapat tercapai secara maksimal pelaksanaan kegiatan ini tergantung kepada Pemerintah Pusat yaitu KEMENPAN RB RI dan BKN. 3. Dalam layanan administrasi kepegawaian, pemohon layanan tidak segera	1. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan Kementrian Dalam Negeri dan KASN untuk percepatan pelaksanaan kegiatan penataan 2. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam pelaksanaan rekrutmen CASN	Untuk memprioritaskan ASN yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta agar menempati posisi di wilayah mengalami kesulitan dan keterbatasan untuk dilakukan karena: 1. Regulasi UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN; PP 17 Tahun 2011 Jo PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS; dan Perka BKN nomor 26 Tahun 2019 menekankan

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			sesuai dengan tatakala 4. Melaksana-kan sosialisasi, pembinaan, peningkatan karir dan evaluasi jabatan fungsional ASN sesuai dengan tatakala 5. Melaksana-kan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentia n dan evaluasi ASN sesuai dengan tatakala 6. Melaksana-kan mutasi	2. Program Pengemban gan SDM	Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai = 92.40% Persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai = 92.20% Persentase ketepatan waktu menyelesaikan pendidikan = 84.62% Rp5.227.080.108,- Persentase Kelulusan ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan = 95,36%	100% 100% 100% Rp5.026.388.777,- 99,36%	melengkapi berkas administrasi usulan, sehingga proses usulan mundur dari tatakalanya. 4. Kendala sistem (gangguan jaringan dan koneksi internet, gangguan teknis aplikasi)	3. Melaksanakan koordinasi dengan pemohon layanan dengan baik serta melaksanakan evaluasi/survey kepuasan masyarakat secara berkala, untuk peningkatan mutu layanan 4. Koordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta jika terdapat kendala sistem dan jaringan	bahwa pengangkatan, penempatan, promosi, dan pengelolaan pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja 2. Untuk melaksanakan system merit, Pemerintah Kota Yogyakarta telah membangun system Manajemen Talenta sebagai instrumen pengembangan karier pegawai khususnya untuk menyiapkan talenta talenta terbaik

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			ASN antar daerah dan pengelolaan kenaikan pangkat ASN sesuai tatakala 7. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi kepegawaian, data Kepegawaian dan evaluasi data informasi dan sistem informasikepegawaian sesuai dengan tatakala 8. Melaksana-kan penyusunan kebijakan,						berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Sistem ini telah mendapatkan validasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara melalui surat Nomor B-1486/SM.01.02/04/2024 tanggal 26 April 2024 tentang Persetujuan Manajemen Talenta PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 3. Dengan memprioritaskan ASN yang bertempat tinggal di Kota

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pemberian penghargaan, tandajasa, dan evaluasi hasil pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi ASN sesuai tatakala 9. Melaksana-kan penilaian, evaluasi kinerja aparatur dan evaluasi hasil penilaian kinerja aparatur sesuai tatakala 10. Melaksana-kan peningkatan kapasitas ASN,						Yogyakarta untuk menempati posisi di wilayah maka tidak dapat menjamin kualitas kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai, hal ini tentu akan berdampak pula terhadap pelayanan di Masyarakat 4. Sebagian besar ASN Kota Yogyakarta bertempat tinggal di luar wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta 5. BKPSDM telah melakukan prioritas pemenuhan kebutuhan ASN

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pengelolaan administrasiKediklatan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sertifikasi 11. Menyusun kebijakan teknis, rencana pengembangan kompetensi, dan standar perangkat pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan						di wilayah yang didasarkan pada hasil analisis jabatan dan beban kerja melalui mekanisme pengadaan CPNS/PPPK, mutasi/Penataan ASN dan Promosi ASN dengan rincian sebagai berikut • Mutasi 3 PNS jabatan pelaksana dari Dinas ke Kemantren Mantrijeron, Umbulharjo, Wirobrajan • Jumlah PPPK Tahun 2024 yang ditempatkan di wilayah

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan tatakala 12. Melaksana-kan Penyelenggar aan Pengembanga n Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggar a Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat						berjumlah 3 orang • Jumlah Pelantikan pejabat struktural yang ditempatkan di wilayah berjumlah 21 PNS • Untuk pengembanga n dan peningkatan kompetensi ASN di Wilayah, BKPSDM telah melakukan pelbagai diklat, sosialisasi dan bimtek khusus untuk

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan tatakala 13. Melaksana-kan penyelenggaraan diklat keistimewaan kabupaten/kota sesuai dengan tatakala						pegawai Kemantren/kelurahan dan/atau melibatkan pegawai Kemantren/Kelurahan sebagai peserta
7	Keuangan	BPKAD	1. Menyusun dokumen rencana anggaran 2. Mengkoordi-nasikan dan menyusun perubahan KUA dan PPAS	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencanan	Rp132.701.174,- Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	Rp131.337.750,- 100%			1. Dilakukan inventarisasi lebih awal untuk barang barang yg memerlukan ijin impor dan barang barang ber TKDN sehingga

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			3. Mengkoordi-nasikan dan menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 4. Mengkoordi-nasikan, menyusun dan memverifi-kasi RKA-SKPD 5. Mengkoordi-nasikan, menyusun dan memverifi-kasi Perubahan RKA-SKPD 6. Mengkoordi-nasikan dan menyusun Peraturan	Anggaran Daerah					apabila barang tidak ditemukan di pasaran masih dimungkinkan dilakukan penyesuaian baik melalui pergeseran anggaran maupun melalui perubahan APBD. 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ke giatan secara lebih intensif 3. Untuk tatakala pengadaan pekerjaan konstruksi dilakukan lebih awal

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 7. Mengkoordi-nasikan dan menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 8. Menyusun dokumen						Terkait dengan penghitung an potensi hilangnya PAD akan disusun sebuah kajian yang dimaksudkan untuk menganalisis potensi risiko atau kehilangan penerimaan pajak daerah yang mungkin timbul akibat implementasi kebijakan tertentu, terutama dari sektor yang secara langsung terpengaruh oleh pengelolaan kawasan warisan dunia. Hal ini mencakup pajak dari sektor pariwisata,

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pengendalian anggaran 9. Mengkoordinasikan, menyusun dan memverifikasi DPA-SKPD 10. Mengkoordinasikan, menyusun dan memverifikasi Perubahan DPA-SKPD 11. Mengkoordinasikan dan menyusun Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						perhotelan, restoran, perdagangan, hiburan, parkir dan sektor lainnya

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			12. Melaksana-kan pengelolaan kas daerah 13. Melaksana-kan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 14. Mengelola Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelum-nya 15. Melaksana-kan Penyiapan, Pelaksana-an Pengendali-an dan	2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaha raan Daerah	Rp1.516.189.590,- Persentase penyerapan belanja daerah	Rp1.514.220.905,- 95,50%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 16. Melaksana-kan Penatausah aan Pembiayaan Daerah 17. Melaksana-kan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisas i, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbang-an dan Transfer Lainnya						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			18. Melaksana-kan Koordinasi Pelaksanaa n Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksana-an Analisis 19. Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisa-si Kas 20. Melaksana-kan Koordinasi, Pelaksanaa						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			n Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 21. Melaksana-kan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah 22. Melaksana-kan Koordinasi dan Penyusunan Laporan						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Realisasi Penerimaan dan Pengeluar-an Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksana-an Pemungut-an/Pemoton gan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 23. Merekonsili asi Data Penerimaan dan Pengeluar-an Kas serta Pemungut-						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			an dan Pemotong-an atas SP2D dengan Instansi Terkait 24. Menyusun Petunjuk Teknis Adminis-trasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluar-an Kas serta Penatausah aan dan Pertanggun gjawaban Sub Kegiatan						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			25. Melakukan pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota 26. Melaksana-kan pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluar-an Kas Daerah 27. Melaksana-kan Koordinasi Pelaksana-an Akuntansi Penerimaan dan	3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksana-an Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp230.234.000,- Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	Rp277.988.750,- 100%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Pengeluar-an Kas Daerah 28. Melaksana-kan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggun gjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota 29. Menyediak an Laporan Pertanggu-ngjawaban Pelaksana-an APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 30. Melaksana-kan						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Koordinasi, Sinkroni-sasi, dan Penyelesai-an Tuntutan Perbendaha raan dan Tuntutan Kerugian Daerah 31. Melaksana-kan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota 32. Menyediak an Laporan Pertanggun gjawaban Pelaksana-an APBD Bulanan, Triwulanan						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			dan Semesteran serta Terlaksana-nya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 33. Menyediak an Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggu-ngjawaban Pelaksana-an APBD Kabupaten/ Kota dan						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggun gjawaban Pelaksana-an APBD Kabupaten/ Kota 34. Melaksana-kan Koordinasi, Sinkronisa-si, dan Penyelesai-an Tuntutan Perbendaha raan dan Tuntutan Kerugian Daerah 35. Melaksana-kan						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota 36. Melaksana-kan pemanfaat-an Barang Milik Daerah 37. Melaksana-kan optimalisasi Penggunaan Pemanfaat-an Pemindahta nganan, pemusnah-an dan Penghapus-an Barang	4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan engelolaan Barang Milik Daerah	Rp11.258.976.450,- Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Rp10.554.212.953,- 100%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Milik Daerah 38. Melaksana-kan Penilaian Barang Milik Daerah 39. Melaksana-kan Pengawas-an dan pengendali-an Barang Milik Daerah 40. Melaksana-kan pembinaan pengelolaan barang milik daerah 41. Melaksana-kan Penatausah						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			aan Barang Milik Daerah 42. Melaksana-kan Pengawas-an dan pengendali-an pengelolaan Barang Milik Daerah 43. Melaksana-kan Inventarisa-si Barang Milik Daerah 44. Melaksana-kan Pengaman-an Barang Milik Daerah						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			45. Melaksana-kan pembinaan pengelolaan barang milik daerah 46. Melaksana-kan Penatausah aan Barang Milik Daerah 47. Melaksana-kan Rekonsilia-si dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 48. Menyusun Laporan Barang						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Milik Daerah 49. Menyediakan kebijakan perencana-an pengelolaan barang milik daerah 50. Menyedia-kan Standar Harga Barang 51. Menyedia-kan Standar Barang Milik Daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			52. Menyediakan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 53. Menyediakan Kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah 54. Menyediakan Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 55. Menyediakan Hasil Analis Pajak Daerah serta	5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp3.649.018.000,- Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian = 100%	Rp3.468.863.656,- 113,03%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Terlaksana-nya 56. Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 57. Melaksana-kan Pembinaan dan Pengawaan Pengelolaan Retribusi Daerah 58. Melaksana-kan Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai 59. Menyediakan Layanan		Rp3.649.018.000,-	Rp3.468.863.656,-			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			dan Konsultasi Pajak Daerah dalam rangka optimalisasi pajak daerah 60. Menyediakan Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 61. Menyediakan Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah yg mutakhir dan valid		Nilai pendapatan Pajak Daerah Rp481.723.900.000,-	Rp575.834.201.429,-			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			62. Menyediakan Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 63. Melaksana-kan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 64. Menyediakan Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 65. Memenuhi Jumlah Objek Pajak						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			yang Disesuaikan NJOP nya 66. Menyediakan Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 67. Melaksana-kan Pemeriksa-an serta Pengendali-an dan Pengawas-an Pajak Daerah 68. Melaksana-kan Penagihan Pajak Daerah 69. Melaksana-kan		Rp3.625.584.000,- Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar Rp16.000.000.000,-	Rp3.596.284.900,- Rp28.758.278.740,-			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 70. Melaksana-kan Penagihan Pajak Daerah 71. Melaksana-kan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 72. Melaksana-kan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Pajak Daerah 73. Melaksana-kan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						

3.1.5. Capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Umum

Tabel III. 5 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pemerinta-han Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Menyusun kebijakan teknis dan	1. Program Penguatan Ideologi	Rp3.060.364.912,- (100%)	Rp2.126.754.320,- (91,42%)	Kegiatan pembinaan Duta Pancasila kepada Purna	Sinergi dengan stakeholder dan OPD terkait penguatan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			melaksana-kan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan sesuai dengan tatakala	Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan = 82,00%	82,19%	Paskibraka belum terlaksana secara maksimal karena pada tahun 2024 merupakan pelaksanaannya yang pertama kali	Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			1. Menyusun Kebijakan Teknis dan Melaksana-kan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	2. Program Peningkat-an Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengemban gan Etika Serta	Rp3.712.181.570,- (100%) Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik = 67%	Rp3.602.199.285,- (97,03%) 74,34%	Masa jelang Pemilu 2024, potensi terjadinya konflik dan polarisasi masyarakat semakin tinggi	Melaksanakan lebih banyak pendidikan politik karena perhatian publik terhadap pendidikan politik meningkat akibat antusiasme masyarakat menjelang Pemilu dan Pilkada 2024	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sesuai dengan Tatakala	Budaya Politik					
			1. Menyusun Kebijakan Teknis dan Melaksana-kan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdaya-	3. Program Pemberda-yaan Dan Pengawas-an Organisasi Kemasya-rakatan	Rp429.090.400,- (100%) Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta = 60%	Rp379.491.300,- (88,44%) 71,05%	Masih banyak ormas yang belum proaktif dalam melengkapi administrasi, padahal persyaratan SKTO sudah jauh lebih mudah dan sederhana	Upaya jemput bola terhadap data ormas yang sudah ber-AHU namun belum melaporkan kepada pemerintah kota	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			an dan Pengawasan Organisasi Kemasyara-katan sesuai dengan tatakala						
			1. Menyusun Kebijakan Teknis dan Melaksana-kan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sesuai dengan tatakala	4. Program Pembinaan Dan Pengemban gan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp933.718.390,- Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya = 72%	Rp.914.466.300,- (97,93%) 84,03%	Masih kurangnya kewaspadaan dini dalam mendeteksi setiap potensi konflik/ konflik, serta penanganan konfliknya	Pengemban kapasitas ASN maupun masyarakat dalam deteksi dini terhadap potensi konflik sosial melalui bimtek ataupun FGD	
			1. Menyusun Kebijakan	5. Program Peningkaan	Rp1.428.606.720,- (100%)	Rp1.411.822.274,- (98,82%)	Isu aktifitas Aliansi Mahasiswa/	Meningkatkan pendekatan dan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Teknis dan Melaksana-kan Pelaksanaan Pemantapan Kewasapada-An Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Dengan Tatakala	Kewaspada an Nasional Dan Peningkat-an Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah = 77%	94,17%	masyarakat satu etnis/suku, masih menjadi salah satu penyumbang terbanyak konflik yang belum tertangani	Sinergi serta koordinasi antar OPD, Kemantren, Kelurahan, Instansi Vertikal juga masyarakat di wilayah	

3.1.6. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat diakses dalam sim monev melalui *website* simpelaporanV2.jogjakota.go.id.

3.1.7. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

3.1.7.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta merupakan salah satu unit kerja yang mengampu dua urusan wajib yaitu Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Indikator kinerja bagi masing-masing urusan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala OPD (Eselon II).

Tabel III.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator setara Eselon II Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya kualitas Pendidikan dasar	1. Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD 2. Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD 3. Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP 4. Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	77,28 Skor 57,77 Skor 88,2 Skor 83,39 Skor
2.	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	1. Persentase jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 2. Persentase jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 3. Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100% 88.85% 100%
3.	Meningkatnya indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	Persentase kapasitas pemuda, olahraga, dan kepramukaan yang aktif	90,25
4.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan indikator kinerja OPD, dilaksanakan beberapa program meliputi dua program berkaitan bidang pendidikan, tiga program berkaitan bidang kepemudaan dan olahraga. Secara rinci program yang dilaksanakan berikut indikator kinerja serta realisasi tertuang dalam tabel berikut:

Tabel III. 7 Program dan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

No	Urusan	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1.	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SD terakreditasi	99,39%	100%
			Persentase SMP terakreditasi	100%	100%
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%
			Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%
			Persentase Kelulusan warga belajar	100%	100%
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	97,71%	98,16%
			Angka Partisipasi Kasar SD	105,24%	110,91%
			Angka Partisipasi Murni SD	100%	100%
			Angka Partisipasi Kasar SMP	112,41%	123,74%
			Angka Partisipasi Murni SMP	100%	100%
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru sesuai kualifikasi	100%	100%
2.	Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan	67,11%	66,47%
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Kapasitas daya saing keolahragaan	67,68%	63,73%
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	100%	100%

Untuk dapat melaksanakan program - program tersebut, dilaksanakan sejumlah sub kegiatan.

Tabel III.8 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan	Program	Sasaran Program	Sub Kegiatan Yang Menunjang
1	**Pendidikan**	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** 1. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah

				3. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 5. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 6. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 7. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 8. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 9. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 10. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11. Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi 12. Fub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk Pendidikan 13. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 14. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** 1. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah 3. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 5. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 6. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 7. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

				8. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 9. Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 10. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 11. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 12. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Meningkatnya Aksesibilitas pendidikan	**Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** 1. Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2. Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** 1. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 4. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 5. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD 6. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP

				7. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 8. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 9. Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik danTenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 10. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 11. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 12. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 13. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan 2. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 4. Sub kegiatan peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		**Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya** 1. Sub Kegiatan Pembinaan Muatan Lokal

Program pada Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Program Pengelolaan Pendidikan memiliki tiga sasaran program yakni:

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan dasar, Indikator kinerja program ini adalah:
   a. Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD, ditargetkan sebesar 77,28 % dan terealisasi 76,43%.
   b. Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD, ditargetkan sebesar 57,77 % dan terealisasi 56,07%

c. Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP, ditargetkan sebesar 88,2% dan terealisasi 84,62%
d. Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP, ditargetkan sebesar 83,39% dan terealisasi 73,15%

2. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan

Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah di sekolah formal yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, ditargetkan 100% dan terealisasi 100%.

Capaian target atas indikator kinerja program tersebut ditunjang oleh pelaksanaan;

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar :

a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
c. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
e. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
f. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
g. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
h. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
i. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
j. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
k. Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi
l. Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
m. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
n. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama :

a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
c. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
e. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
f. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

g. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
h. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
i. Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
j. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
k. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
l. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

a. Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
b. Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
b. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
d. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
e. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD
f. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP
g. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
h. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
i. Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik danTenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
j. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
k. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
l. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
m. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan :

a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan
b) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
c) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
d) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan

Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya

a. Pembinaan Muatan Lokal

Urusan Kesehatan

1) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memiliki 2 sasaran strategis, yaitu sasaran strategis utama berupa Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan sasaran strategis pendukung berupa meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Kesehatan. Indikator dan formula perhitungan masing-masing sasaran adalah:

Tabel III. 9 Rumusan Indiaktor dan Formulasi Perhitungan

No	Program	Indikator Program	Formula Program
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun, dibagi sasaran ibu hamil di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100 % dengan catatan: Nominator yang dihitung adalah Ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan dan Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak dihitung sebagai nominator akan tetapi dihitung sebagai nominator dan denominator pada tahun berikutnya.
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dibagi sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dibagi

No	Program	Indikator Program	Formula Program
			sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama dikali 100%
		Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah usia lanjut (> atau = 60 tahun) yang mendapat skrining kesehatan 1 kali di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun dibagi sasaran usia lanjut di Kota Yogyakarta yang akan dipenuhi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama dikali 100%
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan	Rerata persentase rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum yang di inspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan lingkungan
			Persentase rumah yang di inspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan
			Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang di inspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan
			Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) yang di inspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan
			Persentase Kualitas Air Minum yang di inspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan
		Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah kemantren yang melaksanakan gerakan yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. dibagi jumlah kemantren seluruhnya
		Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	Jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap yang tersedia di Instalasi Farmasi Kota dibagi jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap yang wajib dilakukan monitoring dikali 100%

No	Program	Indikator Program	Formula Program
		Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	Rata-rata capaian indikator dari % penggunaan Antibiotik pada ISPA non pneumonia dan % penggunaan Antibiotik pada Diare non spesifik dari 18 Puskesmas di Kota Yogyakarta
		Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang memenuhi persyaratan standar usaha dibagi jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang ada di Kota Yogyakarta dikalikan 100%
		Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan deteksi dini penyakit tidak menular dibagi jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang akan dipenuhi dikalikan 100 %
		Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang menderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi dikalikan 100%
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang menderita Diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi dikalikan 100%
		Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi dikalikan 100%
		Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah orang terduga TB yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar dibagi jumlah orang terduga TB dikalikan 100%
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah orang berisiko tertular HIV yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Yogyakarta dibagi jumlah orang yang berisiko HIV yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dikalikan 100%
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD	Jumlah kasus DBD yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi dibagi jumlah kasus DBD yang dilaporkan melalui Kewaspadaan Dini Rumah Sakit (KDRS) dikali 100%
		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Cakupan KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam = (Jumlah KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dalam periode 1 tahun/Jumlah KLB yang terjadi pada periode 1 tahun yang sama) x 100%

No	Program	Indikator Program	Formula Program
		Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan	Jumlah Jemaah haji yang selesai diperiksa kesehatan di puskesmas dibagi Jumlah Jemaah haji Kota Yogyakarta yang datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
		Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah layanan penanganan kasus kegawatdaruratan pra Hospital dibagi jumlah permintaaan layanan yang memenuhi kriteria gawat darurat pra Hospital dikali 100 persen
		Persentase penduduk yang mempunyai JKN	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dibagi jumlah Penduduk sesuai Data Konsolidasi Bersih yang berlaku saat itu
		Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit terakreditasi Paripurna dan Utama ditambah jumlah Puskesmas yang sudah dilakukan survei akreditasi dibagi jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Yogyakarta dikalikan 100%
		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas	Jumlah pendataan keluarga sehat dibandingkan dengan jumlah pendataan seluruh keluarga di wilayah tertentu, yang besarannya berkisar antara 0 – 1
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	Nilai hasil pengukuran survei kepuasan layanan masyarakat di RS Pratama pada kurun waktu tertentu
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas se-Kota Yogyakarta pada kurun waktu tertentu
		Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Puskesmas
		Nilai pemenuhan kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tenaga kesehatan melaksanakan Praktik sesuai standar	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik dibagi jumlah tenaga kesehatan yang praktik di Kota Yogyakarta dikali 100%
		Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan	Penjumlahan dari indeks perencanaan SDMK, indeks kinerja SDMK, indeks kompetensi SDMK, dan indeks pengembangan SDMK ; dibagi 4 .
			Indeks Perencanaan SDMK = Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK dibagi Jumlah UPT dan Dinkes dikali 5
			Indeks Kinerja SDMK = Rerata SKP atau Angka Kredit dibagi jumlah target SKP atau Angka kredit dikali 5
			Indeks Kompetensi SDMK = Jumlah SIP dibagi jumlah Nakes dikali 5

No	Program	Indikator Program	Formula Program
			Indeks Pengembangan SDMK: Jumlah yang ikut pelatihan dibagi jumlah target Nakes yang dilatih dikali 5
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Dan Minuman	Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan standar usaha dibagi Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan di Kota Yogyakarta dikali 100%
		Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen	Jumlah PIRT yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen dibagi jumlah PIRT yang mengajukan di Kota Yogyakarta dikali 100%
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi	Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dibagi jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang mengajukan SLHS di Kota Yogyakarta dikali 100%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif	Terhitung dari jumlah Kelurahan Siaga yang memenuhi 8 kriteria indikator dibagi jumlah Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta dikalikan 100%

(Sumber: meta Data Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta)

Tabel III. 10 Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Utama: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Orang	8	2	175%
		Angka Kematian bayi	Persen	10.68	9.78	108.43%
		Prevalensi Balita gizi Buruk dan Kurang	Persen	7	4.99	128.71%
		Prevalensi Stunting	Persen	12	10.07	116.08%
2	Pendukung: Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Kesehatan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	55 poin		

Terkait kinerja program pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024, dalam rangka mencapai tujuan Dinas Kesehatan dan mencapai sasaran strategis OPD yaitu

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat; untuk mencapai sasaran strategis tersebut maka disusun 5 (tiga) Program yakni Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman; dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Adapun program dan target capaian masing-masing tertuang dalam perjanjian kinerja OPD setiap tahunnya. Sehubungan dengan data yang dijabarkan pada LKPJ 2024 adalah 4 (empat) Program teknis yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman; dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, maka penjabaran dan analisis sebatas 4 (empat) program urusan kesehatan, dan 34 indikator kinerja:

1. **Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar**

Pemerintah kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kota dalam satu tahun menggunakan data riil yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Capaian ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar pada tahun 2024 adalah 2.139 orang, dengan target 2.139 orang (100%). Dinas Kesehatan selalu berupaya memaksimalkan kinerjanya untuk memastikan seluruh ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar. Hal ini terbukti dengan dari tahun ke tahun selalu mampu memberikan pelayanan untuk seluruh ibu hamil di wilayahnya (100%).

Adapun Faktor Pendorong yang dapat mendukung capaian adalah:

a. Ketersediaan sarana prasarana yang lengkap untuk pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas.
b. Semua Puskesmas sudah memiliki USG dan Dokter yang dilatih USG sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan skrining kesehatan ibu hamil pada K1 dan K5. Pada tahun 2024 telah dilakukan OJT pelayanan USG bagi seluruh Dokter Puskesmas untuk meningkatkan kompetensi pelayanan ANC.
c. Ketersediaan jaringan internet yang bagus sehingga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan promosi edukasi dan pemantauan ibu hamil misalnya melalui media sosial.

d. Kader dan petugas puskesmas selalu berupaya untuk dapat menjangkau seluruh wilayah, sehingga kehamilan yang tidak diinginkan maupun kehamilan yang disembunyikan dapat diketahui dan diarahkan untuk datang ke faskes.

Kendala yang dijumpai dalam mencapai target antara lain :

a. Jejaring dengan kader dan stakeholder di wilayah masih perlu dioptimalkan.
b. Banyaknya kasus ibu hamil yang domisili tidak menetap di Kota Yogyakarta yang sering menyebabkan pemantauan kesehatan ibu hamil terputus/tidak optimal
c. Tingginya Unmet need di Kota Yogyakarta berdampak pada meningkatnya kasus kehamilan yang tidak direncanakan/tidak dikehendaki dan mempengaruhi perilaku/kepatuhan masyarakat dalam akses pelayanan kesehatan selama hamil, pemenuhan kebutuhan gizi dll. Pada kasus kehamilan tidak diinginkan masyarakat cenderung menyembunyikan kehamilan, tidak melakukan pemeriksaan kehamilan sehingga adanya penyulit dan komplikasi tidak dapat di deteksi dan intervensi dini dan tepat.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mendukung capaian antara lain :

a. Mengefektifkan pemantauan ibu hamil dengan media sosial seperti WAG
b. Meningkatkan jejaring layanan ANC dengan pembentukan jejaring layanan ANC
c. Mengefektifkan pemanfaatan buku KIA oleh keluarga, kader dan petugas kesehatan

2. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kota dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah Kota dalam satu tahun menggunakan data riil akhir tahun. Capaian ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tahun 2024 adalah 2.139 berdasarkan target tahun 2024 yaitu 2.139 orang (100 %).

Adapun faktor pendorong yang dapat mendukung capaian adalah ketersediaan sarana/fasilitas untuk pertolongan persalinan yang mudah di akses di Kota Yogyakarta, serta terdapat dua puskesmas PONED yang telah dilakukan penguatan sehingga dapat memenuhi 12 sinyal fungsi Puskesmas PONED untuk memastikan pelayanan bisa optimal.Sinyal fungsi PONED merujuk pada indikator atau kriteria yang digunakan untuk

menilai kesiapan dan efektivitas pelayanan di Puskesmas PONED. Sinyal fungsi tersebut meliputi diantaranya : Ketersediaan pelayanan 7x24 jam, Update ketrampilan petugas sehingga tersedia tenaga kesehatan terlatih dalam menangani kegawatdaruratan ibu dan bayi, tersedianya alat kesehatan dan obat-obatan yang diperlukan untuk penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi, serta sistem rujukan ke RS yang berjalan secara efektif.

Kendala yang dijumpai dalam mencapai target antara lain masih adanya permasalahan pembiayaaan persalinan untuk ibu hamil yang bukan penduduk KTP Kota Yogyakarta akan tetapi berdomisili di Kota Yogyakarta, dan ibu hamil tersebut belum mempunyai BPJS.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mendukung capaian antara lain:

a. Meningkatkan implementasi pemantauan ibu hamil di wilayah, meningkatkan promosi dan mendorong kepesertaan BPJS sejak awal.
b. Edukasi melalui media sosial baik di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
c. Melakukan upaya pemenuhan Standarisasi Kesehatan Ibu Bersalin.

3. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah Kota dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran bayi baru lahir di kota dalam satu tahun menggunakan data data riil setiap akhir tahun. Capaian bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tahun 2024 adalah 2.137 bayi berdasarkan target tahun 2024 yaitu 2.137 bayi (100 %).

Adapun faktor pendorong yang dapat mendukung capaian adalah:

a. Ketersediaan sarana prasarana untuk pelayanan bayi baru lahir
b. Adanya sistem komunikasi yang efektif melalui WAG rujukan Gadar neonatal untuk mempercepat rujukan kasus kegawatdaruratan bayi baru lahir
c. Adanya dukungan pembiayaan dari Pusat Melalui DAK non Fisik untuk pelatihan skrining PJB dan SHK bagi petugas Puskesmas dan penyediaan Pulse oximeter neonatal untuk puskesmas

Kendala yang dijumpai dalam mencapai target antara lain:

a. Pemantauan bayi baru lahir diwilayah kerja puskesmas belum optimal karena laporan bayi baru lahir dari wilayah tidak *real time*

b. Masih perlu dilakukan upaya secara terus menerus dan berkala untuk meningkatkan keterampilan petugas di Puskesmas, Klinik, RS, dalam penatalaksanaan bayi baru lahir dengan asfiksia, BBLR (berat bayi lahir rendah)
c. Masih perlu ditingkatkan peran / kepedulian masyarakat terkait upaya kesehatan bayi baru lahir melalui kegiatan pemantauan Tanda Bahaya bayi baru lahir menggunakan buku KIA, upaya peningkatan gizi ibu hamil untuk mencegah BBLR

Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mendukung capaian SPM 3 antara lain:

a. Peningkatan jejaring pelayanan bayi baru lahir dengan kader, stakeholder di wilayah dan meningkatkan promosi edukasi tentang tanda bahaya bayi baru lahir melalui berbagai media sosial
b. Meningkatkan kapasitas kader dalam pemantauan tanda bahaya bayi baru lahir menggunakan buku KIA
c. Melakukan upaya pemenuhan Standarisasi Kesehatan Bayi Baru Lahir

4. Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (KESGA)

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kota dalam kurun waktu satu tahun. Capaian balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 adalah 10.804 balita berdasarkan target tahun 2024 yaitu 10.804 balita (100 %)

Adapun faktor pendorong yang dapat mendukung capaian adalah ketersediaan sarana prasarana di posyandu, semua posyandu sudah memiliki antropometri kit terstandar, pelaksanaan sweeping oleh petugas dan kader.

Kendala yang dijumpai dalam mencapai target antara lain:

a. Balita tidak datang ke posyandu karena balita sakit, sekolah atau dititipkan di daycare, tidur, tidak ada yang mengantar, sering atau terbiasa tidak datang ke posyandu;
b. Orang tua balita tidak melaporkan hasil pengukuran antropometri di luar posyandu
c. Balita pindah domisili
d. Sweeping belum berjalan 100%
e. Hasil cleaning data, sasaran balita tahun lalu banyak yang tidak berdomisili di wilayah

Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mendukung capaian antara lain:

a. Intervensi serentak penanganan stunting pada bulan Juni 2024 yang dilaksanakan lintas program dan lintas sektor.
b. Pemantauan pertumbuhan mandiri dan melaporkan ke kader posyandu, pencatatan dan pelaporan menggunakan link untuk orang tua yang melakukan penimbangan mandiri atau di faskes lain ketika tidak bisa menimbangkan anaknya di posyandu dan di follow up
c. Mengedukasi ibu balita untuk melakukan SDIDTK (skrining perkembangan) mandiri melalui buku KIA dan melaporkan di posyandu
d. Cleaning data sasaran balita yang benar-benar berdomisili di wilayah
e. Warning/alarm system untuk balita usia 7 bulan, 19 bulan, 31 bulan, 43 bulan, 55 bulan harus sudah timbang minimal 5 kali sebelum berulang tahun
f. Melaksanakan posyandu satelit (di tingkat RT) khususnya untuk balita-balita yang belum ditimbang, koordinasi dan kerjasama lintas program dan sektoral

5. Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Penetapan sasaran anak tingkat usia pendidikan dasar (kelas 1 – 6 pada SD da Kelas 7 – 9 pada SMP) di wilayah kota dalam satu tahun ajaran (Juli 2023 – Juni 2024) menggunakan data riil dari sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Capaian anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 adalah 61.600 anak berdasarkan target tahun 2024 yaitu 61.600 anak (100 %).

Adapun faktor pendorong yang dapat mendukung capaian adalah:

a. Ketersediaan sarana, prasarana dan tim pembina UKS.
b. Peran Guru dan Tim pelaksana UKS di sekolah.
c. Surat edaran pelaksanaan penjaringan kesehatan bagi siswa dan surat edaran tentang gerakan sekolah sehat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Kendala yang dijumpai dalam skrining kesehatan pada anak usia pendidikan dasar adalah :

a. Siswa tidak hadir pada saat skrining kesehatan sehingga perlu dilakukan sweeping.
b. Pelaksanaan skrining kesehatan perlu jauh - jauh hari melihat kegiatan akademik sekolah

Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mendukung capaian antara lain:

a. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait (Dindik, Kemenag, Balai dikmen)
b. Meningkatkan sosialisasi tentang pengisian mobscreen penjarkes
c. Penyebarluasan Media informasi terkait penjaringan kesehatan melalui berbagai media

6. Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar

Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun menggunakan data rill di wilayah.

Capaian warga usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 adalah 35.708 orang berdasarkan target tahun 2024 yaitu 35.708 orang (100 %).

Adapun faktor pendorong yang dapat mendukung capaian adalah

a. Ketersediaan tim pembina kesehatan lansia, form skrining lansia sederhana, sarana dan prasarana.
b. Posyandu aktif dan integrasi dengan program pencegahan penyakit tidak menular.

Kendala yang dijumpai dalam mencapai target antara lain:

a. Masih terdapat posyandu yang belum buka pelayanan secara rutin, sehingga jadwal skrining yang telah dijadwalkan di reschedule
b. Lansia tidak hadir saat pelaksanaan skrining sehingga petugas harus menjadwalkan kunjungan ulang
c. Adanya sistem baru skrining yang dilaksanakan menggunakan form SKILAS (skrining lansia sederhana) yang dilaksanakan kader

d. Diperlukan pelatihan kader secara masif untuk melaksanakan skrining dengan form SKILAS

Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mendukung capaian adalah menjadwal ulang posyandu lansia untuk kegiatan screening yang kemarin tertunda.

7. **Persentase rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum yang memenuhi syarat kesehatan**

Untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat terutama karena meningkatnya penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh Faktor Risiko Lingkungan, Pemerintah telah menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan terdepan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Salah satu upaya kesehatan masyarakat yang bersifat esensial adalah berupa Pelayanan Kesehatan Lingkungan. Upaya kesehatan masyarakat esensial tersebut harus diselenggarakan untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota bidang kesehatan. Pelayanan Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial guna mencegah penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan.

Kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang baik. Ketentuan mengenai penyelenggaraan kesehatan lingkungan selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, yang pengaturannya ditujukan dalam rangka terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat melalui upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko kesehatan lingkungan di permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi serta tempat dan fasilitas umum sehingga pengelolaan penyehatan lingkungan dapat meningkatkan derajat kesehatan lingkungan baik melalui pengawasan kualitas air, udara, tanah, makanan dan minuman.

Adapun capaian persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III.11 Pemeriksaan Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum

Jenis Sarana	Jumlah dilakukan IKL	Memenuhi Syarat	Tidak memenuhi Syarat	Prosentase Memenuhi Syarat	Prosentase Tidak memenuhi Syarat
Rumah	1574	1487	87	94.5%	5.5%
Pengawasan TFU oleh Sanitarian/TSL Dinas dan Puskesmas	251	233	18	92,8%	7,17%
Pengawasan TPP oleh Sanitarian/TSL Puskesmas	157	144	13	91,7%	8,2%
Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan PDAM	405	466	61	86,9%	13.1%

Sumber: Rekapitulasi Laporan Kesling Puskesmas sd Desember 2024

Rumah Sehat adalah rumah yang memenuhi minimal tiga komponen kriteria sehat meliputi; fisik rumah, sarana sanitasi dan perilaku. Sedangkan Tempat Pengolahan Pangan (TPP) dan tempat umum sehat adalah suatu tempat yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti jasa boga, hotel, terminal, pasar, Puskesmas, bioskop, tempat wisata, kolam renang, tempat ibadah, restoran, Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi baku mutu kesehatan lingkungan.

Rerata persentase rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum yang di inspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan lingkungan tahun 2024 adalah sebesar 91,5 % dari target 90 % , sehingga sudah mencapai 100 %.

8. Persentase Kemantren yang Melakukan Germas

Peningkatan upaya promotif dan preventif masih menjadi salah satu kebijakan Pembangunan Kesehatan Nasional. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan Kesehatan ibu, anak dan Kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit, pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan penguatan sistem Kesehatan.

Persentase Germas harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, lintas sektor baik Pemerintah Pusat dan Daerah, Swasta, Dunia Usaha, Ormas, serta masyarakat. Dukungan Lintas Sektor, salah satunya kemantren, sangat diperlukan dalam mewujudkan Germas di wilayah. Pada tahun 2024, seluruh kemantren di wilayah Kota Yogyakarta sudah melaksanakan Germas dengan persentase 100%.

Dalam pelaksanaan Germas di kemantren diantaranya melakukan kegiatan Aksi Bergizi, Jambore Kader, Kebugaran Jasmani, Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas, serta pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penerapan Perda No 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi salah satu perhatian Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Bersama Lintas Sektor dan Lintas Program terkait dikarenakan selain termasuk dalam salah satu indikator Germas, Kota Yogyakarta juga memiliki Perda No 2 Tahun 2027 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Wilayah yang wajib menerapkan Perda tersebut meliputi tujuh tatanan yaitu fasilitas pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam upaya GERMAS adalah RWBAR (Rukun Warga Bebas Asap Rokok). RWBAR adalah program pemberdayaan dimana masyarakat menggalang komitmen terkait aturan merokok pada tingkat rumah tangga atau RW. Isi dari komitmen berasal dari masyarakat itu sendiri, disepakati oleh masyarakat itu sendiri dan untuk meningkatkan kesehatan di wilayah masyarakat itu sendiri. Pada tahun 2023 jumlah RW yang sudah melakukan deklarasi sejumlah 255 RW dan pada tahun 2024 sejumlah 258 RW. Tiga RW yang melakukan deklarasi di 2024 adalah RW 2 dan 8 Kelurahan Giwangan serta RW 6 Kelurahan Tegalpanggung. Dinas Kesehatan melalui Petugas Promosi Kesehatan di Puskesmas terus melakukan

pembinaan ke wilayah agar RW yang sebelumnya telah melakukan deklarasi tetap berkomitmen sesuai dengan yang telah disepakati.

Selain KTR, pada tahun 2024 juga dilakukan Penggerakan Aksi Bergizi di Kota Yogyakarta. Kegiatan Aksi Bergizi adalah program gizi remaja multisektoral yang menyeluruh untuk mengatasi masalah gizi pada remaja di Indonesia melalui pencegahan anemia, promosi perilaku makan sehat dan aktivitas fisik. Target dari kegiatan Aksi Bergizi adalah SMP/sederajat, SMA/sederajat dan pesantren yang memiliki MTs/MA. Kegiatan utama dari Aksi Bergizi sesuai SKB 4 Menteri Tahun 2022 adalah senam bersama, sarapan bersama, minum tablet tambah darah bersama dan edukasi gizi. Kegiatan Aksi Bergizi sebenarnya telah dilakukan di tahun sebelumnya dengan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Puskesmas, serta lintas sektor terkait di wilayah kemantren lokasi sekolah.

Pada tahun 2024, sesuai dengan surat dari Kemenkes perihal Pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi Serentak, Dinas Kesehatan bersama dengan Dinas Pendidikan dan lintas sektor terkait melalui sekolah-sekolah melaksanakan Bulan Gerakan Aksi Bergizi mulai 12 Agustus – 12 September 2024. Jumlah sekolah yang telah melakukan Gerakan Aksi Bergizi di 2024 adalah SMP 60 sekolah, MTS 5 Sekolah, SMA/SMK 46 sekolah dan MA 4 sekolah. Dengan adanya Gerakan Aksi Bergizi, diharapkan remaja khususnya di Kota Yogyakarta dapat tumbuh dan melakukan pembiasaan diri untuk pola hidup lebih sehat.

Beberapa kendala Germas di masyarakat diantaranya adalah :

a. Sasaran GERMAS mencakup seluruh lapisan masyarakat yang sangat beragam,
b. Keterbatasan jangkauan petugas,
c. Peran lintas sektor yang masih perlu dikembangkan.

Sebagai tindak lanjut penyelesaian kendala tersebut, dilakukan beberapa upaya antara lain :

a. Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait masalah Kesehatan yang dikemas dalam berbagai kegiatan,
b. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program terkait,
c. Penyebaran informasi terkait Kesehatan melalui media sosial FB, Youtube, IG
d. Melakukan monev dan pembinaan secara berkala.

9. Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan

Obat dan perbekalan kesehatan merupakan unsur yang sangat penting dan tidak tergantikan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauannya dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana tercantum dalam amanat UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Upaya Penguatan Pengendalian Ketersediaan Obat & Strategi Pemenuhan Obat Esensial Nasional yang dilakukan oleh Dinkes Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Farmasi & Alkes Nomor : FY.05.02/E/1956/2024 Tentang Penguatan Pengendalian Ketersediaan Obat Nasional yang baru dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2024.

Salah satu Indikator Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan adalah persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%) dari status awal 86% di tahun 2018 menjadi 96% di tahun 2024.

Efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan kualitas produk merupakan fokus dari pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alat Kesehatan pada Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan 2020-2024.

Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman melalui Instalasi Farmasi (IF) menjamin pemenuhan ketersediaan obat dan vaksin untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas. Kebutuhan obat dan vaksin dipenuhi secara rutin melalui LPLP (Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan) yang diajukan Puskesmas setiap bulan. Pada kondisi ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas turun (menipis), Puskesmas dapat melakukan permintaan di luar permintaan rutin (non rutin) sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Sarana kefarmasian di luar Puskesmas seperti RS, Klinik di wilayah Kota Yogyakarta dapat mengakses obat program ke Dinas Kesehatan melalui mekanisme permintaan di luar permintaan rutin (non rutin).

Target ketersediaan obat dan vaksin Dinas Kesehatan tahun 2024 ditetapkan sebesar 98% diperoleh dari pemantauan persentase ketersediaan 40 obat esensial dan 5 vaksin imunisasi dasar lengkap di Instalasi Farmasi. Item obat dan vaksin yang dilakukan monitoring merujuk pada ketetapan Kementerian Kesehatan. Tahun 2024, capaian persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100% melebihi dari target sebesar 98% dengan capaian kinerja 102% dalam kategori Sangat Baik. Faktor pendukung dalam mencapai target indikator tersebut adalah proses perencanaan kebutuhan dan pengadaan

obat vaksin berjalan sesuai targetyang diharapkan, adanya Tim Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin serta dilakukannya monev ketersediaan obat dan vaksin secara rutin tiap bulan.

10. Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

Indikator Penggunaan Obat Rasional dapat digunakan untuk melihat mutu pelayanan pengobatan dan mutu keprofesian. Dengan pemantauan ini maka dapat dideteksi adanya kemungkinan penggunaan yang berlebih (over prescribing), kurang (under prescribing), boros (extravagant prescribing) maupun tidak tepat (incorrect prescribing).

Pada tahun 2024 pengukuran indikator penggunaan obat rasional (POR) dilakukan pada 2 indikator kinerja yaitu Penggunaan Antibiotik pada ISPA non pneumonia dan Penggunaan Antibiotik pada Diare non spesifik. Pengukuran indikator POR dilakukan setiap bulan di Puskesmas dan diteruskan ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan evaluasi. Tindak lanjut evaluasi terhadap laporan triwulan disusun rekomendasi dan ditindaklanjuti oleh Puskesmas untuk peningkatan capaian indikator POR pada periode berikutnya. Target yang ditetapkan pada indikator POR tahun 2024 sebesar 95%. Hasil perhitungan capaian indikator POR pada tahun 2024 tercantum pada berikut ini:

Tabel 3.8. Capaian Indikator POR Tahun 2024

No	Indikator	Tahun 2024				Rerata (%)
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Prosentase (%) Penggunaan Antibiotik pada ISPA non pneumonia	100	100	100	100	100
2	Prosentase (%) Penggunaan Antibiotik pada Diare non spesifik	99,92	99,76	100	100	99,92

Capaian persentase POR pada tahun 2024 sebesar 99,96% melebihi dari target sebesar 95% dengan capaian kinerja 105,2% dalam kategori Sangat Baik. Faktor pendukung untuk mencapai target indikator tersebut adalah adanya Tim Monitoring Peresepan Obat Rasional, dilakukannya monev Peresepan Obat Rasional secara rutin setiap triwulan serta Puskesmas melakukan MTP (Monitoring-Training-Planning) terhadap hasil monev POR.

11. Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan standar usaha memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kesehatan dan pelayanan medis. Pada tahun 2024, seluruhnya (100%) RS dan faskes telah memenuhi standar. Kepatuhan terhadap standar usaha tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan dapat dipercaya bagi pasien dan

masyarakat umum. Rumah Sakit merupakan kegiatan usaha dengan resiko tinggi, sehingga pelaku usaha harus memiliki NIB (nomor Induk Berusaha), sertifikat standar, dan izin.

Pada tahun 2024, sebanyak 165 Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan memenuhi persyaratan standar usaha. Hal tersebut menandakan capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada indikator Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar adalah 100 %. Kendala yang ditemui antara lain pengaruh dari perubahan dalam kebijakan kesehatan atau regulasi pemerintah mempengaruhi cara fasilitas kesehatan memenuhi standar.

12. Persentase Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana serta skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM. Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
b. Pengukuran tekanan darah.
c. Pemeriksaan gula darah.
d. Anamnesa perilaku berisiko

Hasil skrining tersebut selanjutnya digunakan untuk penentuan tindakan yang diberikan, apakah itu dilakukan rujukan atau cukup dengan memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan masalah kesehatan yang ditemukan.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan

skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun adalah 84.305 orang (100%).

Kendala yang dihadapi dalam upaya pelayanan kesehatan usia produktif antara lain:

a. Belum optimalnya dukungan dan koordinasi lintas sektor di wilayah, karena anggapan bahwa masalah kesehatan adalah kegiatan sektor kesehatan
b. Partisipasi masyarakat masih kurang, karena masyarakat merasa sehat sehingga enggan melakukan deteksi dini
c. Dicanangkannya kegiatan Sub PIN dan launching imunisasi serentak sehingga kegiatan skrining harus dijadwalka ulang.
d. Belum optimalnya laporan jejaring FKTP di lingkungan Puskesmas.
e. Belum optimalnya kerja sama dengan pengelola tempat – tempat kerja di wilayah.
f. Adanya relokasi penduduk yang tinggal di wilayah Kemantren Kraton sehingga capaian skrining mengalami penurunan di wilayah tersebut.
g. Sistem pelaporan melalui ASIK (Aplikasi Sehat Indonesia Ku) belum optimal dikarenakan entry data pasien yang di screening belum lengkap.

Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

a. Melaksanakan kegiatan skrining usia produktif di wilayah yang dilaksanakan oleh Puskesmas
b. Mengembangkan Posbindu di wilayah maupun institusi
c. Melakukan sosialisasi, advokasi dan koordinasi lintas Sektor dan lintas Program
d. Melakukan peningkatan kapasitas SDMK melalui kegiatan workshop, update knowledge, orientasi petugas dan pelatihan untuk mendukung kegiatan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular
e. Melakukan pelatihan kader kesehatan di wilayah
f. Kerjasama lintas program untuk mengintegrasikan kegiatan skrining usia produktif dengan skrining AUS (Anak usia sekolah) dan kegiatan ACF TB (Active Case Finding Tuberkulosis)
g. Melakukan inovasi untuk mendukung program
h. Melakukan validasi data program
i. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
j. Melakukan Monev pelaksanaan Perwal No. 90 Tahun 2019 tentang RAD Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

k. Melakukan perencanaan, pengadaan dan memastikan ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Puskesmas
l. Meningkatkan upaya pelaporan melalui penyediaan SDM yang kompeten

13. Presentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Sesuai Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada warga penderita hipertensi sesuai standar yang meliputi:

a. Pengukuran tekanan darah
b. Pelayanan edukasi non farmakologi
c. Pelayanan farmakologi
d. Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi

Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes; (2) Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi serta melakukan rujukan jika diperlukan.

Capaian kinerja pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun, adalah sebesar 34.753 orang (100%).

Kendala yang dihadapi dalam upaya pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi adalah:

a. Kurangnya kepatuhan penderita untuk melakukan kontrol rutin
b. Kerjasama jejaring FKTP belum optimal
c. Sistem rujuk balik yang belum banyak diakses oleh pasien

d. Sistem rujukan sebagai tindak lanjut dari skrining faktor risiko PTM belum berjalan dengan optimal.

Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

a. Melakukan sosialisasi, advokasi dan koordinasi lintas Sektor dan lintas Program.
b. Melakukan peningkatan kapasitas SDMK melalui kegiatan workshop, update knowledge, orientasi petugas dan pelatihan untuk mendukung kegiatan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular.
c. Melaksanakan pedoman terbaru tatalaksana Hipertensi.
d. Mengembangkan SIMPUS dalam rangka meningkatkan pencatatan dan pelaporan pelayanan Hipertensi.
e. Melakukan validasi data program.
f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
g. Meningkatkan upaya promotif untuk layanan hipertensi di Puskesmas.
h. Melakukan perencanaan, pengadaan, dan memastikan ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Puskesmas.
i. Melakukan edukasi tentang hipertensi ke masyarakat.
j. Mengimplementasikan program ILP (Integrasi Layanan Primer).

14. Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Sesuai Standar

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi pengukuran gula darah, edukasi, dan terapi farmakologi.

Mekanisme Pelayanan penderita Diabetes Mellitus (DM) meliputi:

a. Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
b. Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
   - Pemeriksaan klinis berupa pengukuran gula darah minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan

- Mendapatkan pemeriksaan penunjang minimal satu kali sebulan di fasyankes
- Terapi non farmakologi (edukasi perubahan gaya hidup sehat).
- Terapi farmakologi sesuai kondisi pasien apabila ditemukan gula darah sewaktu >200 mg/dL.
- Melakukan rujukan jika diperlukan.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun, adalah 17.251 orang (100%).

Kendala yang dihadapi dalam upaya pelayanan kesehatan penderita DM antara lain:

a. Belum optimalnya pelaksanaan Pandu PTM di Puskesmas
b. Kurangnya partisipasi masyarakat, karena masyarakat merasa sembuh setelah kunjungan pertama, setelah itu enggan melakukan kontrol rutin
c. Kurangnya tingkat kepatuhan pasien terdiagnosa Diabetes Mellitus dalam mengkonsumsi obat secara rutin
d. Belum optimalnya koordinasi lintas program, karena banyaknya kegiatan di bidang kesehatan yang memerlukan sumber daya manusia sehingga perlu kolaborasi dengan beberapa program terkait
e. Belum optimalnya laporan jejaring dengan fasilitas kesehatan (klinik,dokter praktik mandiri, dll) di wilayah.
f. Belum optimalnya kerja sama dengan pengelola tempat- tempat kerja di wilayah

Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

a. Melaksanakan kegiatan skrining usia produktif di wilayah yang dilaksanakan oleh Puskesmas
b. Mengembangkan Posbindu di wilayah maupun institusi
c. Melaksanakan sistem rujukan dari wilayah ke Puskesmas dan dari Puskesmas ke FKTL sesuai prosedur
d. Melakukan koordinasi lintas Sektor dan lintas Program
e. Melakukan peningkatan kapasitas SDMK melalui kegiatan workshop, update knowledge, orientasi petugas dan pelatihan untuk mendukung kegiatan Pelayanan Terpadu (Pandu) penyakit tidak menular
f. Melakukan penguatan jejaring FKTP di wilayah

g. Melakukan kunjungan rumah untuk memantau pasien DM
h. Melakukan inovasi untuk mendukung program
i. Melakukan validasi data program
j. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
k. Melakukan perencanaan, pemgadaan dan memastikan ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Puskesmas
l. Meningkatkan upaya promotif yang berkelanjutan

15. Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Sesuai Standar

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pengobatan penyakit dan pencegahan timbulnya dampak sekunder akibat gangguan jiwanya (contoh ; pemasungan) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia.

Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pelayanan kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dilakukan oleh:

a. Tenaga Medis;
b. Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih);
c. Tenaga profesional lainnya;
d. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.

Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan antara lain :

a. Skrining,
b. Pemeriksaan kesehatan jiwa :
   - Wawancara
   - Pemeriksaan status mental

- Diagnosis Klinis

c. Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluarga caregiver.
d. Melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi.
e. Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun, adalah sebesar 1096 orang (100%).

Kendala dalam Pelayanan kesehatan bagi ODGJ Berat antara lain :

a. Deteksi dini masalah kesehatan jiwa belum optimal.
b. Kepatuhan kontrol dan minum obat masih kurang.
c. Dukungan keluarga penderita gangguan jiwa belum optimal.
d. Keterampilan caregiver/ kader masih terbatas.
e. Masih adanya upaya percobaan bunuh diri (25 orang) sehingga perlu pemantauan oleh kader, Linsek dan masyarakat sekitar.
f. Masih perlunya peningkatan kapasitas untuk SDMK dalam tatalaksana terpadu kesehatan jiwa

Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

a. Menyusun kembali RAD Upaya Kesehatan Jiwa
b. Melakukan sosialisasi dan advokasi ke lintas sektor dan dan ke sektor pendidikan
c. Melaksanakan pertemuan TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat) Kota Yogyakarta
d. Mengembangkan upaya kesehatan jiwa di sekolah (orientasi Sekolah Sehat Jiwa & Monev)
e. Melakukan validasi data
f. Melakukan monitoring dan evaluasi
g. Meningkatkan pencatatan dan pelaporan deteksi dini dan pelayanan
h. Melaksanakan pelatihan kesehatan jiwa terpadu bagi tenaga kesehatan
i. Melaksanakan orientasi promotif preventif upaya kesehatan jiwa bagi petugas

16. Persentase Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan yang diberikan pada orang terduga TBC sesuai standar meliputi:

a. pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda;
b. pemeriksaan penunjang;
c. edukasi.

Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan kontak erat maupun kontak serumah dengan penderita TBC yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan target (perkiraan) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan data laporan SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis) tahun 2024 diketahui jumlah terduga TBC yang diperiksa di seluruh Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan Tempat praktik mandiri dokter yang memberikan layanan TB DOTS (Tuberkulosis Direct Observer Treatment Short) di wilayah Kota Yogyakarta sejumlah 10.839 orang dan apabila dipilah berdasar alamat domisili diketahui sebanyak 7.003 orang berdomisili di wilayah Kota Yogyakarta dan 3.836 berasal dari Luar wilayah Kota Yogyakarta. Sehingga apabila dibandingkan dengan target SPM yang sudah ditetapkan dapat disimpulkan SPM bidang kesehatan ke 11 sudah tercapai 100%.

Tercapainya target SPM ke 11 tersebut disebabkan karena berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kegiatan penanggulangan Tuberkulosis yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 7 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis, adanya dukungan dari lintas sektor, lintas program dan komunitas pemerhati program TBC seperti SSR PKBI (Sub-sub Recipient Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) dan Zero TB Yogyakarta.

Kendala yang masih ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan terduga TBC sesuai standar adalah kurangnya antusias masyarakat dalam kegiatan active case finding (ACF) dengan mobile Rontgen yang dilaksanakan di wilayah, hal ini terbukti dengan jumlah kunjungan peserta di lokasi ACF yang belum sesuai sasaran meskipun sudah dilakukan

upaya sosialisasi di wilayah penyelenggaraan kegiatan ACF. Selain itu, masih kuatnya stigma masyarakat terhadap orang yang tertular TB.

Upaya Tindak Lanjut

a. Melakukan edukasi berkesinambungan pada masyarakat tentang pentingnya deteksi dini pengobatan sampai tuntas dan pencegahan infeksi.
b. Kolaborasi lintas sektor untuk screening deteksi dini TB
c. Kolaborasi dengan LSM untuk mendukung upaya keberhasilan pengobatan melalui CSR.
d. Peningkatan kompetensi petugas.

17. Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan HIV AIDS dan IMS penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV diantaranya yaitu pasien TBC, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), pekerja seks, LSL, waria, penasun, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dan ibu hamil dan populasi lain yang belum diketahui faktor resikonya. Pada tahun 2024 jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 20.678 orang. Sehingga capaian orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 yaitu mencapai 100%.

Beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian indikator tersebut adalah adanya dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli HIV, Kelompok Pendukung Sebaya dan Warga Peduli AIDS (WPA). Selain itu, faktor pendorong yang mempengaruhi capaian indikator ini yaitu adanya Layanan Tes HIV diluar jam kerja maupun diluar gedung Puskesmas seperti ;

a. Layanan VCT (Voluntary and Counseling Test HIV) mobile yang dilaksanakan oleh 18 Puskesmas di Kota Yogyakarta di luar Puskesmas (kantor LSM, tempat hiburan, hotspot tempat berkumpulnya populasi kunci serta tempat-tempat lain)
b. Layanan tes HIV IMS dan pengobatan ARV melalui Puskesmas Extra Hour yaitu Puskesmas memberikan layanan tes HIV IMS dan pengobatan ARV di luar jam kerja yang dilaksanakan oleh Puskesmas Pakualaman dan Tegalrejo
c. Layanan PoC di DIC (Point of Care di Drop in Centre) yaitu Layanan Tes HIV IMS dan akses PrEP oleh Puskesmas Umbulharjo I, Gedongtengen, Mantrijeron, Tegalrejo yang dilaksanakan di Drop In Centre milik LSM Penggiat HIV.

Meskipun telah mencapai target yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan yang dialami diantaranya Notifikasi Pasangan pada ODHIV (Orang dengan HIV), penggalian faktor resiko klien dan kurang terbukanya klien terkait faktor resiko HIV nya. Selain itu kendala yang dihadapi adalah pencatatan dan pelaporan data pemeriksaan HIV AIDS yang terkadang tidak tepat waktu atau tidak real time. Kendala di masyarakat adalah masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV maupun populasi kunci di masyarakat baik di lingkungan rumah maupun tempat kerja.

Dalam mengatasi kendala dan hambatan tersebut, upaya yang mungkin dilakukan yaitu:

a. Adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome
b. Adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Yayasan Vesta Indonesia, Yayasan Victory Plus dan UPKM CD Bethesda YAKKUM
c. Penguatan Pencatatan dan Pelaporan dengan absensi tiap bulan agar tepat waktu
d. Penguatan koordinasi dengan LSM Penjangkau Populasi Kunci (Yayasan Vesta Indonesia) untuk penjangkauan populasi kunci
e. Edukasi berkesinambungan terkait HIV AIDS kepada masyarakat

18. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Yogyakarta merupakan penyakit yang masih perlu diwaspadai sepanjang tahun karena penyakit DBD masih terjadi, selalu ada kasus di tahun 2024, atau disebut sebagai penyakit endemis. Berdasarkan data kasus DBD tahun 2024 sebanyak 302 kasus dengan Insiden rate (IR) 76,66 per 100.000 penduduk dan tidak ada kematian karena DBD dengan Case Fatality Rate (CFR) 0%,

standar Nasional untuk IR sebesar 10 per 100.000 penduduk dan CFR kurang dari 1%. Sehingga mencapai indikator program DBD. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD untuk 2024 mencapai 100 % dalam kategori Sangat Baik. Pendukung upaya pencapaian indikator cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yaitu:

a. Pencegahan:

- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Dengan Program Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J)
- Pemantauan Jentik Berkala (Kader Jumantik)
- Community Deal DBD di Tingkat RW dan Kelurahan.
- Pelibatan Lintas Sektor
- Inovasi program nyamuk Ae.Aegypti Ber-Wolbachia bekerjasama dengan Word Mosquito Program (WMP) UGM Yogyakarta

b. Pengendalian:

- Surveilans Pasif Berbasis Rumah Sakit
- Respon Cepat oleh Surveilans Kelurahan Dan TGC Puskesmas untuk Menentukan Keberadaan Penularan Lokal
- Implementasi SOP Fogging Fokus (Penyuluhan, Psn, Larvasidasi, Community Deal DBD), Ikanisasi, Kranisasi dan Tanaman Pengusir Nyamuk
- Pelepasan Nyamuk Ae.Aegypti Ber-Wolbachia bekerjasama dengan Word Mosquito Program (WMP) UGM Yogyakarta

c. Deteksi Dini Dan Manajemen Kasus:

- Jejaring Surveilans Rumah Sakit Di Kota Yogyakarta
- Jejaring Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lain
- Penyediaan Rapid Test Dengue Duo di Puskesmas dan Rumah Sakit
- Refreshing Tatalaksana Dengue Anak dan Dewasa untuk Dokter Puskesmas
- Audit Kematian Kasus DBD

Tingginya kasus DBD di Kota Yogyakarta disebabkan oleh karena:

a. Musim hujan yang lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya menyebabkan populasi nyamuk meningkat.
b. Kesadaran masyarakat terkait PSN berkurang dan merasa cukup dengan adanya nyamuk ber-Wolbachia.
c. Deteksi dini pada pasien dengan gejala DBD di Fasyankes lebih baik sehingga kasus dapat ditemukan dan ditangani.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu:

a. Edukasi berkesinambungan masyarakat tentang PSN
b. Pemantauan Jentik Nyamuk secara berkala
c. Melakukan fogging selektif dengan Community Deal

19. Cakupan KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (Permenkes No. 1501 Tahun 2010). Penanggulangan KLB adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah dan masyarakat, meliputi kegiatan Penyelidikan Epidemiologi, penatalaksanaan penderita, yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat KLB/wabah, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1501/Menteri/Per/X/2010. Jenis Kejadian yang memenuhi kriteria Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di Wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2024 adalah Mumps/gondongan, keracunan makanan, Pertusis, Varicella Klinis, diare, HMFD (penyakit tangan, kaki dan mulut) klinis dan leptospirosis.

tabel. kejadian memenuhi kriteria KLB menurut Jenis Penyakitnya

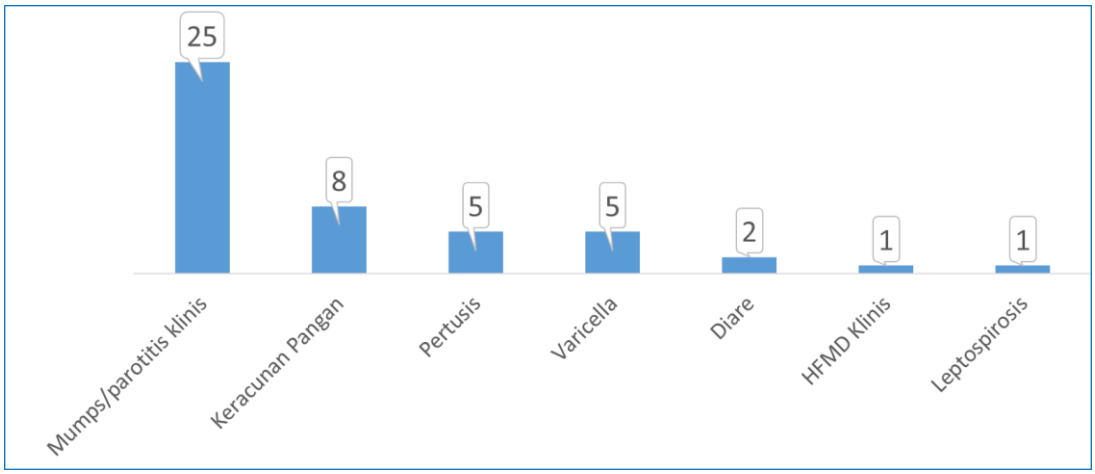

Tahun 2024 jumlah temuan kejadian yang memenuhi kriteria KLB secara epidemiologi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. terjadinya kenaikan kasus disebabkan oleh:

a. Implementasi surveilans berbasis kejadian atau Event Based Surveilans (EBS) di Rumah Sakit dan Puskesmas. Melalui surveilans berbasis kejadian atau Event Based Surveilans (EBS) dilakukan pemantauan secara terus menerus terhadap rumor ; informasi penyakit, berita, adanya faktor risiko penyakit, kejadian yang berkaitan dengan penyakit melalui Puskesmas dan Rumah Sakit. Rumor yang tertangkap dilakukan verifikasi, dan validasi

rumor untuk menetapkan potensi KLB. Pelaksanaan EBS meningkatkan temuan penyakit potensial KLB.

b. Munculnya kembali penyakit infeksi menular ;

- Mumps atau gondongan yang sebelumnya (2023) tidak ditemukan. Mumps atau gondongan terjadi pada beberapa sekolah di Kota Yogyakarta bersamaan dengan temuan di Kabupaten lain di DIY.
- Varicella (cacar air) ditemukan kembali pada tahun 2023 dan tahun 2024, sebelumnya selama 3 tahun (2020-2022) tidak ditemukan Varicella (cacar air) di Kota Yogyakarta.
- Mumps (gondongan) dan varicella (cacar air) penyakit yang sangat mudah menular melalui dengan interaksi langsung dan/atau melalui media.
- Mobilitas orang dari dan ke Kota Yogyakarta yang tinggi merupakan salah satu faktor risiko penularan penyakit menular termasuk Mumps dan Varicella. Kondisi demikian jika ada orang sakit infeksi dan interaksi maka akan terjadi potensi penularan
- Terjadinya keracunan pangan siap saji yang meningkat, faktor risiko penularan berada pada proses pengolahan.

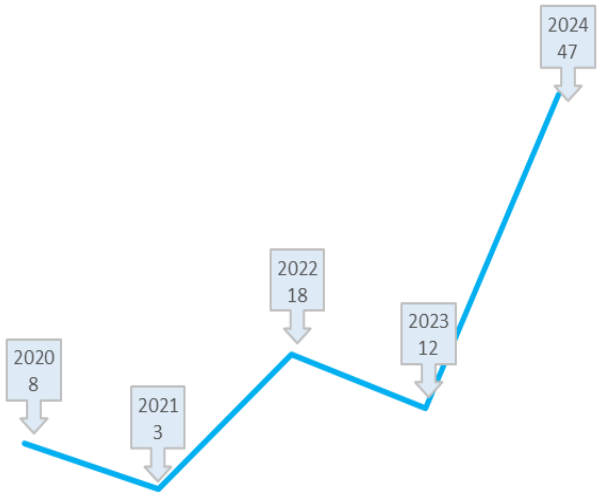

NO	Kemantren	Jumlah KLB	Keterangan
1	Gondokusuman	9	Keracunan makanan, Pertusis, Leptospirosis, Mumps, Varicella
2	Umbulharjo	9	Keracunan makanan, Mumps, Varicella
3	Jetis	6	Pertusis, Mumps

4	Kotagede	6	Pertusis, Mumps, Varicella
5	Danurejan	3	Keracunan makanan, HMFD
6	Mantrijeron	3	Mumps, Diare
7	Mergangsan	3	Pertusis, Mumps
8	Ngampilan	2	Mumps, Diare
9	Wirobrajan	2	Keracunan makanan, Mumps
10	Gedongtengen	2	Mumps
11	Gondomanan	1	Keracunan makanan
12	Kraton	1	Mumps
13	Tegalrejo	1	Pertusis
14	Pakualaman	0	-

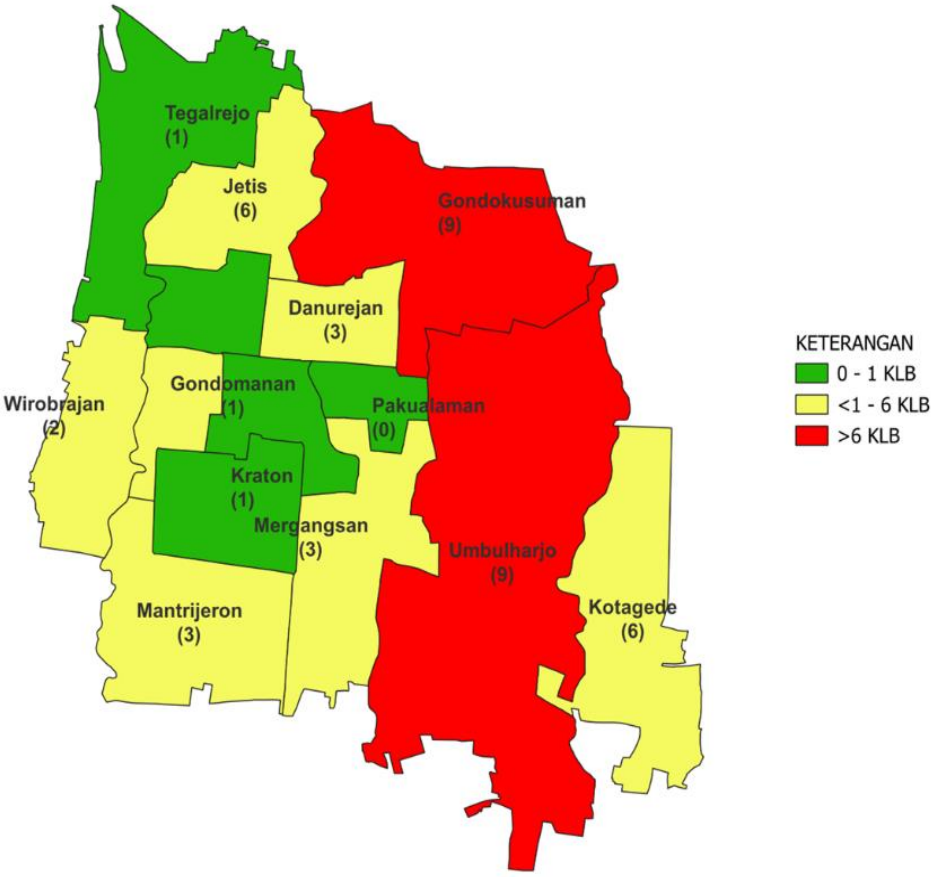

Kendala dalam melakukan Penyelidikan Epidemiologi Kasus Potensial KLB di Wilayah Kota Yogyakarta antara lain:

a. Adanya kesenjangan pemahaman tentang pentingnya Penyelidikan Epidemiologi (PE) antara Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan sebagai pelaksana PE dengan sasaran atau obyek PE, sehingga tidak diperoleh informasi yang benar dan tepat terkait kejadian luar biasa ; faktor risiko, sebaran kasus penyakit, populasi berisiko dan informasi lain yang diperlukan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan atau respons KLB.
b. Peran lintas program (terkait) belum optimal dalam penanggulangan kejadian luar biasa penyakit menular dan keracunan pangan.
c. Kendala dukungan dan koordinasi dengan lintas sektor di wilayah dalam pelaksanaan tindak lanjut pencegahan dan pengendalian penyakit (respons KLB) pada saat dan pasca terjadinya kejadian luar biasa
d. Kendala dalam penangkapan informasi munculnya penyakit potensi KLB/Wabah, faktor risiko penyakit, kejadian yang berhubungan dengan penyakit tertentu di tengah masyarakat.

20. Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan

Jemaah haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan adalah jumlah jemaah haji yang selesai diperiksa kesehatan/ jumlah jemaah haji Kota Yogyakarta yang datang ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Realisasi Persentase Jemaah Haji yang mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan untuk tahun 2024 sebesar 100% (tercapai dari target 100% yang ditetapkan), sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik. Capaian indikator pada tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Faktor pendorong dalam upaya pencapacian indikator Jemaah haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan adalah kepatuhan jemaah haji untuk mengikuti ketentuan alur pemeriksaan kesehatannya sebagai salah satu syarat pelunasan (istitha'ah), kesiapsiagaan Dinas Kesehatan, RS, dan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji, dimulai dari rangkaian pemeriksaan kesehatan, manasik haji tentang kesehatan, tes kebugaran jemaah haji, pengantaran jemaah haji ke embarkasi, penjemputan kepulangan jemaah haji di embarkasi dan terakhir pemantauan 2 minggu paska kepulangan jemaah haji. Mendapat dukungan penuh dari Bagian Kesra Kota Yogyakarta dan sektor lain seperti

Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah).

Permasalahan dalam pelayanan kesehatan jemaah haji di tahun 2024 adalah adanya sistem aplikasi Siskohatkes (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan) versi baru yang penerapannya bersamaan dengan pelaksanaan layanan haji 2024. Dikarenakan kurangnya waktu untuk sosialisasi, adaptasi, dan implementasi, menyebabkan banyaknya kasus kesalahan input yang mengakibatkan proses koreksinya berjenjang hingga PuskesHaji Kemenkes. Ini menyebabkan semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk input aplikasi yang baru.

21. Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Public Safety Center merupakan implementasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap pelayanan kegawatdaruratan pra fasilitas pelayanan kesehatan (pra Rumah Sakit).

Tujuan SPGDT adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan dengan mempercepat waktu penanganan (response time) korban atau pasien gawat darurat untuk meningkatkan keselamatan pasien, menurunkan angka kematian dan kecacatan/disabilitas. Dengan adanya SPGDT, diharapkan penanganan kegawatdaruratan dapat lebih efisien dan terkoordinasi

Pelayanan Kegawatdaruratan pra Rumah Sakit menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, sesuai dengan target indikator bahwa seluruh panggilan kegawatdaruratan dapat terlayani pada tahun 2024 pelayanan kegawatdaruratan pra rumah sakit yang diterima oleh operator PSC 119 Yogyakarta Emergency Service dapat terlayani seluruhnya (100%) oleh PSC 119 YES dan jejaring nya.

Gambar III.1 Grafik pelayanan kegawatdaruratan pra rumah sakit oleh PSC 119 YES dan jejaringnya

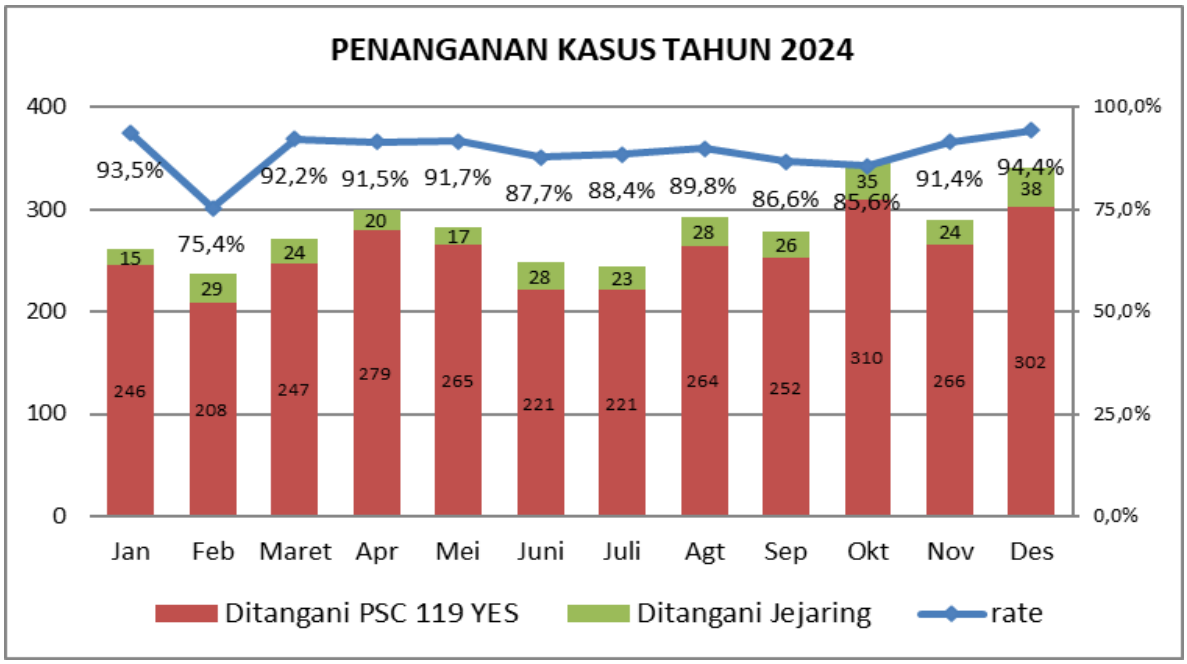

Gambar III.2 Grafik capaian pelayanan kegawatdaruratan pra rumah sakit

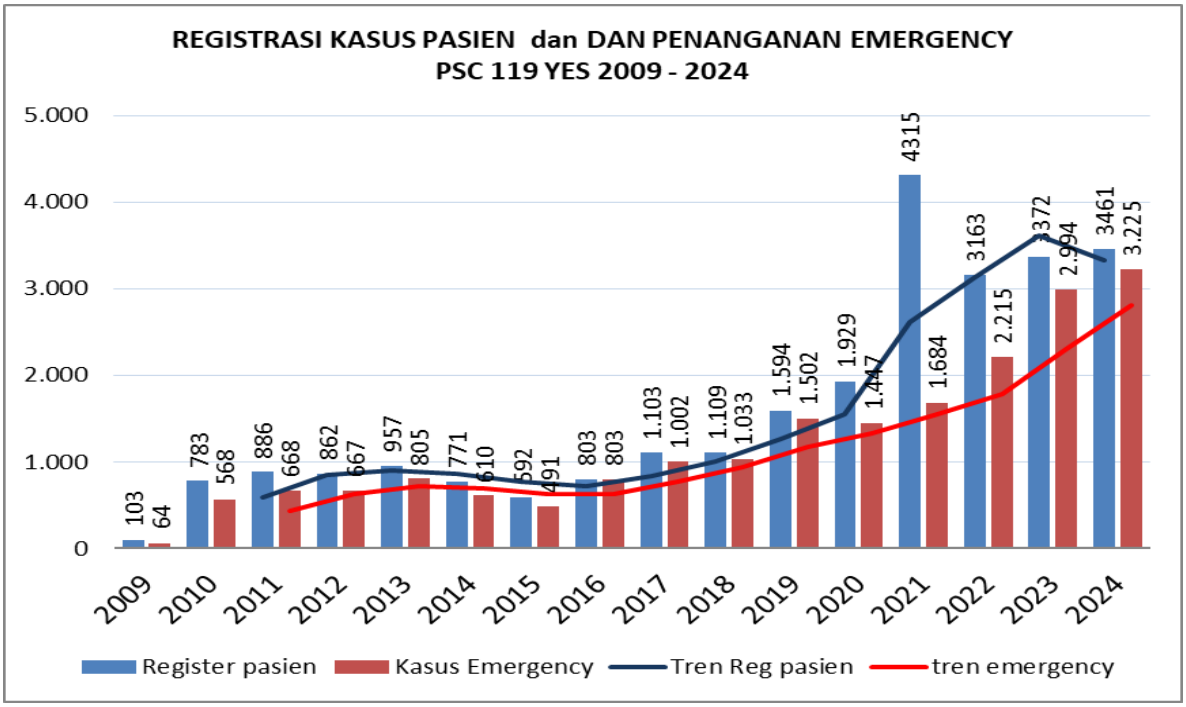

22. Persentase Penduduk yang Mempunyai JKN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya. Sesuai Peraturan perundangan yang berlaku kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, target kepesertaan Jaminan Kesehatan lebih dari 95% dari total penduduk (Universal Health Coverage). Realisasi persentase penduduk yang mempunyai JKN untuk tahun 2024 sebesar 100,01% dari target yang ditetapkan. Angka ini telah melampaui dari target kepesertaan yang ditetapkan RPJMN 2020-2024 dan sudah melebihi target Universal Health Coverage. Pada Tahun 2024 ini Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan Piagam Penghargaan Universal Health Coverage 2024 Kategori Utama oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebagai bentuk komitmen pemerintah kota Yogyakarta dalam memastikan seluruh warganya terdaftar peserta JKN. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator ini adalah dengan mendorong masyarakat untuk menjadi peserta JKN Mandiri atau menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran APBD melalui program PBI Pemda bagi penduduk yang ber-KTP Kota Yogyakarta dengan melalui layanan Jamkesda dan aplikasi Jogja Smart Service. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain adanya penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta JKN Pekerja Penerima Upah saat ini sudah tidak bekerja sehingga kepesertaan JKN menjadi dinonaktifkan serta adanya Pemberi Kerja belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN, dan penonaktifan peserta JKN PBI APBN yang mengakibatkan menurunnya persentase keaktifan peserta.

23. Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi

Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan setelah dilakukan penilaian bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut telah memenuhi standar akreditasi. Akreditasi Rumah Sakit dilakukan oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi (LIPA) yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan Akreditasi Puskesmas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi (LPA). Upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu cara yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan adalah dengan memfasilitasi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Realisasi indikator Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi untuk tahun 2024 sebesar 100 % sudah tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 100%, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100 % dalam kategori Sangat Baik. Capaian persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi tercapai 100% sejak tahun 2023. Hal ini disebabkan karena Rumah Sakit telah melakukan akreditasi sejak sebelum 2023.

Sedangkan re akreditasi pada 18 Puskesmas di Kota Yogyakarta dilakukan pada tahun 2023. Pada tahun 2024, upaya peningkatan mutu lebih terfokus pada pemenuhan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) atas rekomendasi hasil survei akreditasi.

Keberhasilan capaian realisasi indikator ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yang mendorong keberhasilan capaian realisasi indikator ini adalah Dinas Kesehatan selalu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Rumah Sakit dan Puskesmas dalam mewujudkan akreditasi.

Sedangkan faktor eksternal dalam keberhasilan capaian indikator ini antara lain Adanya regulasi tentang akreditasi, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan harus bersiap melakukan penilaian akreditasi meskipun belum dinilai akreditasinya sehingga Rumah Sakit dan Puskesmas selalu berkomitmen untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain belum optimalnya kesiapan dan pemenuhan sumber daya dalam proses mewujudkan akreditasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan baik FKTP maupun FKTL milik yayasan / swasta.

24. Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan kunci dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Puskesmas memiliki wewenang memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya dan spiritual. Pendekatan keluarga merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas yang mengintegrasikan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat secara berkesinambungan kepada keluarga baik di dalam puskesmas maupun dengan kunjungan rumah. Dengan melakukan kunjungan rumah secara terjadwal, Puskesmas dapat mengenali masalah kesehatan yang dihadapi oleh setiap keluarga secara menyeluruh. Selain itu, Program Indonesia Sehat (PIS) diselenggarakan melalui Pendekatan Keluarga (PK) bertujuan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kota Yogyakarta dan mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka mencapai Universal Health Coverage (UHC). Berdasarkan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga, puskesmas juga akan mendapatkan perencanaan kegiatan yang lebih tepat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerja

masing- masing. Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai.

Capaian IKS didapatkan dari Aplikasi Keluarga Sehat, yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Realisasi indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 adalah sebesar 44,30%, sementara realisasi pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 44,71% dengan target 42%, sehingga capaian IKS di wilayah kerja Puskesmas lebih dari 100%.

Beberapa kendala yang dialami pada pelaksanaan PIS-PK adalah aplikasi Keluarga Sehat yang merupakan aplikasi resmi untuk pendataan keluarga tidak dapat secara real time mencatat perubahan data yang diinput oleh pengelola program keluarga sehat di puskesmas sehingga menyebabkan tidak adanya perubahan nilai IKS, bahkan hingga beberapa bulan setelah input data dilakukan. Pada akhirnya terjadi perbedaan data di aplikasi dengan data yang diinput manual oleh puskesmas. Indikator penderita hipertensi yang berobat teratur, cut off hipertensi yang dapat diinputkan di aplikasi pada intervensi lanjutan adalah tekanan darah di bawah 140/90 mmHg, sementara bagi beberapa individu penderita hipertensi, tekanan darah tidak dengan mudah mengalami penurunan. Kendala lain pada aplikasi adalah ketika diinputkan salah satu anggota keluarga mengalami Gangguan Jiwa (ODGJ), aplikasi mengartikan bahwa semua anggota keluarga terhitung ODGJ. Perubahan data warga masyarakat yang telah meninggal, pindah tempat tinggal, atau tidak berada di rumah ketika dilakukan intervensi, juga menjadi kendala sehingga perlu dilakukan kunjungan ulang.

25. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama

Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta adalah rumah sakit yang dibangun dalam rangka meningkatkan akses pelayanan rujukan di Kota Yogyakarta. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta adalah melalui pengukuran indeks kepuasan layanan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara. Metode pengukuran menggunakan survei kepuasan masyarakat dengan teknik pemberian kuesioner melalui WhatsApp Blast ke nomor pasien yang pengguna/pengunjung di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta. Dalam perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat. Pelaporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta setiap 6 bulan sekali ke dinas kesehatan kota yogyakarta serta akan diinformasikan nilai SKM melalui sosial media Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta.

Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2024 telah mencapai 8,82. Nilai tersebut telah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu 80,5.

26. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas

Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu dari kebutuhan yang penting bagi masyarakat dan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang Dasar 1945. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan merupakan penanggung jawab penyelenggaraan upaya kesehatan untuk jenjang pertama di wilayah kerjanya dalam memberikan pelayanan prima bagi Masyarakat. Di Kota Yogyakarta memiliki 18 Puskesmas yang tersebar di 14 Kemantren.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Disamping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Realisasi indikator Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Puskesmas pada tahun 2024 mencapai 84.33 sudah tercapai dari target 80.5 yang ditetapkan. Keberhasilan ini dikarenakan terkait dengan beberapa hal seperti fasilitas kesehatan yang ada sudah mengarah sesuai dengan standar yang ditentukan dengan adanya penambahan fasilitas berupa peralatan dan perlengkapan administrasi kantor sebagai salah satu unsur penunjang untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu pada masyarakat, disamping itu juga ditunjang oleh sistem lewat pengembangan SIK dan adanya SDM yang bermutu. Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target indikator ini adalah dengan adanya akreditasi di seluruh Puskesmas Sebagai solusi agar terstandar dengan baik sehingga meningkatkan kepuasan layanan kesehatan yang dirasakan masyarakat.

27. Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan atau masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan/ atau masyarakat. Capaian persentase fasilitas kesehatan (Puskesmas) yang sesuai standar tahun 2023 adalah 100%, demikian juga pada tahun 2024 tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan milik Pemerintah konsisten memenuhi standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. Standar yang telah dipenuhi oleh Puskesmas Kota Yogyakarta diantaranya persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik. Semua Puskesmas di Kota Yogyakarta telah memenuhi standar kelengkapan (target) sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) yaitu 62%. Rata-rata kumulatif kelengkapan

SPA adalah 74,62%. Sehingga capaian rata-rata kumulatif SPA Tahun 2024 dibandingkan target telah mencapai lebih dari 100%. Data tersebut dapat diakses pada Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK). ASPAK merupakan suatu aplikasi berbasis web yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada fasyankes. Fasyankes melaksanakan input/ update data SPA kemudian Dinas Kesehatan kabupaten/kota bertanggung jawab untuk melaksanakan validasi.

Kendala yang dialami pada pengisian ASPAK adalah aplikasi tidak dapat secara otomatis berubah ketika puskesmas melakukan perubahan data sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas. Upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pengisian ASPAK Puskesmas secara berkala dan berkelanjutan, serta melakukan validasi data ASPAK Puskesmas dengan melakukan kunjungan oleh Dinas Kesehatan ke 18 Puskesmas di Kota Yogyakarta. Validasi data bertujuan untuk menjamin kesesuaian data sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang diisi oleh Puskesmas. Pada tahun 2024 diselenggarakannya peningkatan sarana gedung Puskesmas Pakualaman dan Kraton dengan dukungan dana DAK Fisik.

28. Nilai pemenuhan kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan

Pada Tahun 2024, terdapat 10 laboratorium kesehatan di Kota Yogyakarta, yaitu 2 laboratorium kesehatan milik Pemerintah dan 8 laboratorium kesehatan swasta. Kedua laboratorium kesehatan milik Pemerintah sudah memenuhi standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) yaitu kumulatif SPA di atas 61,91%. Rata – rata kumulatif SPA laboratorium kesehatan adalah 79,57%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai ASPAK meningkat. Laboratorium di Kota Yogyakarta selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas terus menerus dengan melengkapi sarana dan prasarananya.

29. Tenaga Kesehatan Melaksanakan Praktik Sesuai Standar

Upaya Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan salah satunya adalah dengan memastikan bahwa tenaga kesehatan yang berpraktik di wilayah Kota Yogyakarta memiliki Surat Izin Praktik sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sedangkan Surat Izin Praktik, yang selanjutnya disingkat SIP,

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.

Tahun 2024 seluruh tenaga kesehatan di Kota Yogyakarta (100%) melakukan praktik sesuai standar. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 102,89%. Pada tahun 2023 masih ditemukan tenaga kesehatan yang tidak melakukan updating data SISDMK, namun sekarang sudah ada sistem yang mengawal dan menertibkan SISDMK. Begitu SIP dikeluarkan atau dicabut, tenaga kesehatan harus melakukan updating data di SISDMK.

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa kendala seperti masih adanya beberapa tenaga kesehatan yang baru mengajukan SIP mendekati ataupun setelah masa berlaku SIP habis, sehingga SIP baru terbit setelah batas tanggal berlaku. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah dengan sosialisasi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan adanya penilaian tenaga kesehatan secara berkesinambungan, adanya Peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan praktik pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP, adanya aplikasi JSS dan MPPD sehingga pengajuan SIP bisa dilakukan secara online kapan saja dan dimana saja.

30. Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) adalah pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi: upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Indikator Program Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan Rerata dari indeks perencanaan SDMK, indeks kinerja SDMK, indeks kompetensi SDMK, dan indeks pengembangan SDMK yang merupakan Penjumlahan dari indeks perencanaan SDMK, indeks kinerja SDMK, indeks kompetensi SDMK, dan indeks pengembangan SDMK. Indeks Perencanaan SDMK adalah perhitungan dan analisis kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melalui aplikasi

Renbut milik Kementerian Kesehatan. Upaya penetapan jenis, jumlah, kualifikasi, dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Hasil perhitungan dari aplikasi Renbut tersebut diverifikasi oleh Seksi SDMK, Bagian Organisasi, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta yang kemudian akan disusun menjadi Dokumen Perencanaan SDMK. Adapun capaian penyusunan Dokumen Perencanaan SDMK tahun 2024 yaitu 100%.

Indeks Kinerja SDMK merupakan rerata dari nilai Satuan Kinerja Pegawai (SKP) atau Angka Kredit dibagi jumlah target SKP atau Angka kredit. Pada tahun 2024, penilaian angka kredit dinilai berdasarkan hasil penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Nilai dari hasil penilaian SKP tersebut dikonversi kedalam angka kredit yang disebut angka kredit konversi SKP. Adapun capaian Indeks Kinerja SDMK tahun 2024 yaitu 100%.

Indeks Kompetensi SDMK adalah Jumlah Surat Izin Praktek (SIP) dibagi jumlah Nakes di Kota Yogyakarta, penilaian kompetensi SDMK dilihat dari kepemilikan SIP yang menunjukan bahwa Nakes tersebut telah kompeten dilihat dari kepemilikan STR. Kepemilikan SIP dan STR tersebut di entry dalam aplikasi SISDMK. Adapun capaian Indeks Kompetensi SDMK tahun 2024 yaitu 100%, setiap nakes yang berpraktik sudah memiliki SIP.

Indeks Pengembangan SDMK yaitu Jumlah Nakes yang mengikuti pelatihan bersumber anggaran DAK Kemenkes 2024 dibagi jumlah target Nakes yang dilatih. Pengembangan kompetensi bagi tenaga kesehatan sangat penting agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat. Pengembangan kompetensi bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan Tenaga Kesehatan dalam memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan kesehatan. Hal ini seiring dengan upaya transformasi sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang menjadi salah satu dari enam pilar transformasi Kementerian Kesehatan. Pelatihan dengan sumber anggaran DAK Kemenkes tersebut Dinas Kesehatan mengirim Nakes untuk dilatih di Lembaga Pelatihan yang telah terakreditasi Kemenkes yaitu Bapelkes DIY. Akreditasi institusi yang sesuai dengan ketentuan, maka akan ada jaminan kepada masyarakat bahwa institusi telah memiliki standar mutu yang telah ditetapkan oleh Kemenkes sehingga pelatihan-pelatihan yang

dilaksanakan dapat dijamin mutunya dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun capaian indeks Pengembangan SDMK tahun 2024 yaitu 100%.

31. Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Verifikasi pemenuhan persyaratan standar usaha adalah proses penilaian dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa suatu usaha atau organisasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sebagai pelaku usaha dengan risiko menengah rendah dan menengah tinggi harus memiliki NIB dan sertifikat standar.

Pada tahun 2024, sebanyak 32 pengajuan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, UMOT berhasil diverifikasi seluruhnya, menjadikan capaian target tahun 2024 untuk indikator persentase usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah 100%.

Kendala yang ditemui ada pada proses verifikasi dokumen yang kurang lancar, terutama jika dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pelaku usaha tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, dalam beberapa kasus, pelaku usaha kesulitan untuk mengkondisikan fasilitas agar sesuai dengan standar yang diterapkan.

Solusi yang ditempuh untuk meminimalisir kendala adalah dengan melakukan komunikasi yang optimal dengan pelaku usaha agar proses verifikasi berjalan lancar. Selain itu, Dinas kesehatan juga melakukan sosialisasi/koordinasi mengenai persyaratan usaha, agar pelaku usaha dapat mempersiapkan lokasi usahanya dengan lebih baik.

32. Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang Telah Dilakukan Verifikasi

Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. IRTP memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan di masyarakat. Untuk menjamin keamanan, mutu dan kelayakan produk IRTP. Dinas Kesehatan melaksanakan verifikasi pemenuhan komitmen yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2024, sebanyak 956 Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) diajukan di sistem OSS. Dari total tersebut 924 PIRT telah dilakukan verifikasi di sistem OSS. Capaian pada

tahun 2024 sebesar 96,65%. Angka ini telah melebih target yang ditentukan, yaitu sebesar 85%. PIRT yang diajukan melalui sistem OSS dapat mengalami penolakan atau penangguhan pada proses verifikasi karena tidak memenuhi kriteria produk atau tidak memenuhi syarat label yang telah ditetapkan.

33. Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen

Pemenuhan komitmen pada Industri Rumah Tangga Pangan merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam mengajukan SPPIRT. Pemenuhan komitmen meliputi: mengikuti pelatihan keamanan pangan, memenuhi ketentuan label, dan memenuhi persyaratan CPPB-IRT (Cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga).

Seluruh hal tersebut wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.

Verifikasi pemenuhan komitmen IRTP merupakan langkah penting dalam menjamin keamanan pangan di masyarakat. Dinas Kesehatan berkomitmen untuk terus mendorong kepatuhan IRTP dan meningkatkan kualitas produk pangan lokal. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 89 IRTP telah divisitasi untuk melihat pemenuhan komitmennya dan sebanyak 90,8% nya telah melengkapi pemenuhan komitmen.

Kendala yang kerap ditemui dalam verifikasi pemenuhan komitmen IRTP yakni tidak sedikit IRTP yang sulit dihubungi untuk mengonfirmasi pengajuan SPP-IRT-nya dan penjadwalan kunjungan lapangan. Untuk pengusaha yang sulit dihubungi dan cenderung kurang kooperatif, maka verifikasi lapangan dilakukan langsung tanpa pemberitahuan. Selain itu, kendala yang sering ditemui adalah pelaku usaha belum melakukan pemeriksaan sumber air. Keamanan air merupakan salah satu komponen yang harus dipenuhi dalam CPPB-IRT. Kedepannya, dapat dilakukan kolaborasi dengan asosiasi industri atau kelompok yang mewakili industri rumah tangga pangan. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, diharapkan dapat mempermudah hubungan antara Dinas Kesehatan dan industri rumah tangga pangan, serta meningkatkan pemahaman dan pemenuhan komitmen kesehatan dan keamanan pangan.

34. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depo Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa sebuah tempat, seperti Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) atau Depot Air Minum (DAM), telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan setempat. Sertifikat ini menunjukkan bahwa tempat tersebut aman dan memenuhi persyaratan kesehatan untuk menyajikan atau memproses makanan atau menyediakan air minum.

Realisasi kinerja untuk indikator Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan di tahun 2024 adalah 92% dengan target akhir tahun yakni 90%. Verifikasi dokumen, seringkali memerlukan pemahaman yang mendalam tentang standar dan persyaratan. Ketidaksesuaian dokumen yang diserahkan oleh pemilik usaha dapat menghambat proses verifikasi. Kendala lain adalah Tempat-tempat usaha mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan fisik dan teknis yang ditetapkan untuk mendapatkan SLHS. Pemilik usaha perlu melakukan penyesuaian dan perbaikan yang mungkin memerlukan investasi. Selain itu, beberapa pemilik usaha mungkin kurang memahami atau kurang mendukung penerapan persyaratan SLHS. Pendidikan, penyuluhan, dan pembinaan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman.

35. Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Kelurahan Siaga (Kesi) merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan Kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Kelurahan Siaga merupakan wilayah yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah Kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan Kesehatan secara mandiri. Kelurahan Siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan di Tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.

Dari 45 kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta, sudah semua terbentuk Kelurahan Siaga. Kebijakan pemerintahan Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Peraturan Walikota No. 3 Tahun 206 tentang Kelurahan Siaga, Keputusan Walikota Yogyakarta No. 373 Tahun 2017 tentang Sistem Penguatan Kelurahan Siaga dalam Rangka Germas, adanya komitmen dari

pemerintah, puskesmas, pimpinan wilayah, pengurus Kelurahan Siaga dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dan peran dunia usaha (CSR) masih menjadi faktor pendukung keberhasilan cakupan Kelurahan Siaga aktif. Untuk mengetahui kondisi Kesi di wilayah, Dinas Kesehatan melakukan stratifikasi bersama Puskesmas setiap tahunnya.

Adapun tingkatan stratifikasi Kesi yaitu pratama, madya, purnama dan mandiri. Metode yang digunakan adalah dengan cara mengkolaborasikan hasil pendataan Kesi oleh petugas promosi kesehatan puskesmas, survey monitoring dan evaluasi mandiri melalui pengisian google form serta wawancara kepada pengurus Kelurahan Siaga.

Delapan kriteria indikator pentahapan Kelurahan Siaga meliputi forum Kelurahan Siaga, kader kesehatan, kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar, posyandu dan UKBM lainnya, dukungan dana atau walikota, pembinaan PHBS di rumah tangga. Pada tahun 2024 ini cakupan data Kesi aktif mandiri berjumlah 39 dari 45 kelurahan, atau sebesar 86,67%. Pada tahun 2023 Kesi aktif mandiri berjumlah 38 dari 45 kelurahan atau 84%. Cakupan tersebut termasuk dalam kategori baik karena sudah sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024. Permasalahan yang sering muncul dalam peningkatan stratifikasi Kesi dikarenakan beberapa Kesi yang melakukan pergantian pengurus, sehingga masih diperlukan adaptasi dan penyesuaian antar pengurus Kesi.

Gambar III.3 Stratifikasi Kelurahan Siaga Tahun 2024

Upaya Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya:

a. Melakukan pembinaan dan pendampingan serta melakukan update knowledge kepada pengurus Kesi baik melalui petugas promosi kesehatan di puskesmas atau dengan melakukan advokasi kepada pengurus Kesi.
b. Memfasilitasi Kelurahan Siaga dalam pertemuan dengan dewan dan lintas sektor wilayah melalui sosialisasi program kesehatan bersama DPRD.
c. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk mengikutsertakan Kelurahan Siaga agar dapat berperan aktif dalam pemecahan masalah khususnya terkait kesehatan di wilayah.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Pada periode RPD 2023-2026 ini RSUD Kota Yogyakarta mengampu 2 program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai 3 indikator program dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai 2 indikator program, target pencapaian indikator-indikator program tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja yang memuat Sasaran Program, Indikator Program, dan Target sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Program	Indikator Program	Target 2024	Realisasi 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal	80,50%	80,93%
		Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	83%	87.03%
		Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	84%	94.93%
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran	100%	116.26%

Realisasi indikator program tahun 2024 RSUD Kota Yogyakarta seluruhnya telah tercapai melampaui target yang ditetapkan. Indikator Program Persentase Sarana, Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medis Dan Non Medis Yang Terpelihara Dan Dapat Dioperasionalkan Secara Optimal dengan target 80,50% tercapai sebesar 80,93%, pencapaian indikator ini telah melampaui target karena terbantu dengan adanya mahasiswa PKL. Selain itu juga dilakukan upaya pemeliharaan alat dengan 3 skenario :

1. Melakukan kontrak servis dengan pihak ketiga untuk menjaga alat agar tetap berfungsi dengan prima
2. Adanya fasilitas peminjaman suku cadang dari pihak ketiga, jika pada saat dilakukan servis ternyata membutuhkan penggantian suku cadang sedangkan suku cadang harus indent atau harus dikirim dari luar negeri sehingga membutuhkan waktu lama.
3. Dilakukan rujuk parsial ke RS sekitar jika kedua hal diatas belum berhasil.

Indikator Program Persentase Tercapainya Indikator SPM Layanan Medis RS mempunyai target tahun 2024 sebesar 83% dan telah tercapai sebesar 87,03%. Telah dilakukan upaya-upaya untuk pencapaian target indikator ini, diantaranya adalah pemenuhan sarana prasarana RS yang telah berjalan sesuai rencana dan dilakukannya beberapa inovasi pelayanan. Inovasi yang dilakukan antara lain:

1. OTEWE Masjo (Obat Teko Dewe Rumah Sakit Jogja) yaitu layanan pengantaran obat yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, yang bertujuan untuk mengurangi antrian obat di Instalasi Farmasi.
2. RS JOGJA MOBILE adalah aplikasi android yang berbasis Personal Health Record yang memiliki fitur utama untuk mempermudah pengguna (pasien) dalam mengakses layanan RS Jogja. Fitur tersebut diantaranya: Reservasi klinik, Riwayat layanan kesehatan, Jadwal Dokter, Informasi Ketersediaan Ruang Perawatan dan Link Layanan Antar Obat (OTW Mas Jo)

Indikator Program Persentase Instrumen Mutu Asuhan Keperawatan dengan target sebesar 84% dan tercapai sebesar 94,93%. Indikator ini menghitung nilai rata-rata dari nilai kelengkapan dokumen keperawatan, skor persepsi pasien asuhan keperawatan, dan nilai pelaksanaan asuhan keperawatan. Meskipun tahun 2024 ini telah tercapai melebihi target namun masih terdapat kendala yaitu sarana prasarana yang mendukung layanan asuhan keperawatan belum merata. Untuk mengatasi masalah tersebut akan dilakukan penyusunan

perencanaan untuk pembaharuan sistem dan kelengkapan sarana prasarana untuk mendukung asuhan keperawatan agar lebih merata.

Indikator Program Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran mempunyai target 2024 sebesar 100%. Perhitungan indikator ini berasal dari perbandingan realisasi pendapatan dengan target pendapatan. Target pendapatan tahun 2024 sebesar Rp.103.014.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp.119.767.035.103,- atau sebesar 116.26%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah syarat pengajuan klaim yang terkadang dinilai belum lengkap sehingga menyebabkan klaim menjadi tertunda atau tertolak dalam proses verifikasi oleh BPJS Kesehatan, untuk mengantisipasi hal ini RSUD berupaya untuk mengajukan klaim jaminan kesehatan tepat waktu dengan memenuhi persyaratan klaim sesuai ketentuan. Sedangkan faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini adalah pengajuan klaim jaminan kesehatan yang lebih mudah karena sudah difasilitasi dengan aplikasi pengajuan klaim dari BPJS Kesehatan berupa aplikasi P-CARE.

2. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta mengampu dua urusan pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Bidang Perumahan. Dalam mendukung urusan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki tiga sasaran strategis yang terdiri dari Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah, Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman dan Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sasaran Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah didukung oleh 6 program yang terdiri atas Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, serta Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Penjabaran target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja berikut realisasinya pada tahun 2024 tertuang dalam tabel berikut:

Tabel III. 12 Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2024
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan	92,25%	93,36%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pemenuhan drainase kondisi baik	88,40%	88,44%
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik	92,63%	92,63%
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	91,79%	91,92%
			Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	100%	100%
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	70,83%	99,58%
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan	81,45%	81,53%
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Persentase dukungan penyelenggara an keistimewaan urusan tata ruang	100%	100%
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	100%	100%

Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Jalan dengan indikator persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 93,36% dari target 92,25% atau tercapai 101,2%. Dalam rangka mencapai target Program Penyelenggaraan Jalan didukung oleh 3 sasaran kegiatan yaitu:
   - Melaksanakan pemeliharaan jalan secara berkala, yang meliputi pekerjaan:
     - Pemeliharaan Berkala Jalan Gedongkuning (sisi selatan).
     - Pemeliharaan Berkala Jalan I Dewa Nyoman Oka Cs.
     - Pemeliharaan Berkala Jalan Bantul.
     - Pemeliharaan Berkala Jalan Komplek Balaikota.
     - Pemeliharaan Berkala Jalan Ngeksigondo.
     - Penyusunan leger jalan.
   - Melaksanakan pemeliharaan rutin jalan yang didukung oleh pekerjaan:
     - Pemeliharaan Jalan Insidentil di sepanjang jalan kawasan Kota Yogyakarta .
     - Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan pelengkap jalan secara swakelola.
   - Melaksanakan pemeliharaan rutin jembatan yang didukung oleh pekerjaan:
     - Pemeliharaan Jembatan Insidentil di kawasan Kota Yogyakarta.
     - Pekerjaan pemeliharaan jembatan secara swakelola.

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan memiliki pagu anggaran sebesar Rp.32.082.589.900,00 dengan realisasi sebesar Rp.29.880.447.165,00 dengan tingkat capaian keuangan sebesar 93,13%.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan indikator persentase pemenuhan drainase kondisi baik mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 88,44% dari target 88,40% atau tercapai 100,05%. Dalam rangka mencapai Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase didukung oleh 2 sasaran kegiatan yaitu:
   - Melaksanakan pembangunan saluran drainase perkotaan, yang meliputi pekerjaan:
     - Pembangunan SAH Jl. Abimanyu, Jl. Permadi, Jl. Sugriwo dan Jl. Sadewa
     - Pembangunan SAH Jl. Kyai Mojo
     - Pembangunan SAH Kampung Kranon Kel. Sorosutan
     - Pembangunan SAH Kel. Giwangan RW. 13
     - Pembangunan SAH Kel. Sorosutan (TMMD)
     - Pembangunan Gorong-gorong Tersebar

- Pembangunan SAH JL. Imogiri Timur Kel. Giwangan
- Pembangunan SAH Jl. Pembayun
- Pembangunan SAH Jl. Pugeran Timur
- Pembangunan SAH Jl. Widayati Sutarjo Kel. Baciro
- Pembangunan SAH Kel. Suryodiningratan
- Pembangunan SAH RW 5 Kel. Terban
- Pembangunan SAH RW 9, 10 Kel. Prenggan
- Pembangunan SAH Timur PIH

- Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan, yang meliputi pekerjaan:
  - Pemeliharaan Saluran Air Hujan Tersebar (Insidentil)
  - Pemeliharaan SAH Cokrodiningratan
  - Pemeliharaan SAH Panembahan

c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan indikator persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 92,63% dari target 92,63% atau tercapai 100%. Dalam rangka mencapai target Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung oleh 3 sasaran kegiatan yaitu:

- Melaksanakan operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai yang meliputi pekerjaan pemeliharaan talud tersebar (insidentil) di kawasan Kota Yogyakarta
- Melaksanakan rehabilitasi tanggul sungai yang meliputi pekerjaan:
  - Rehabilitasi Talud Sungai Code Kel. Terban
  - Rehabilitasi Talud sungai Gajah Wong Kel. Giwangan
  - Rehabilitasi Talud Sungai Gajah Wong Kel. Muja-muju RW 08
  - Pembangunan Jalan Inspeksi Sungai Tersebar
- Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan yang meliputi pekerjaan:
  - Pemeliharaan Bangunan Irigasi Tersebar (Insidentil) Pemeliharaan Saluran Gg Kamboja
  - Pemeliharaan Bangunan Irigasi Tersebar (Insidentil) Pemeliharaan Saluran Batikan
  - Pemeliharaan Bangunan Irigasi Tersebar (Insidentil) Pemeliharaan Saluran Kelurahan Rejowinangun

d. Program Penataan Bangunan Gedung dengan indikator persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 91,92% dari target 91,79% atau tercapai 100,14%. Dalam rangka mencapai Program Penataan Bangunan Gedung didukung oleh 2 sasaran kegiatan yaitu:

- Melaksanakan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, meliputi pekerjaan:
  - Pembangunan Kantor Kelurahan Bausasran
  - Pembangunan Kantor Kelurahan Klitren
  - Pembangunan Kantor Kelurahan Suryatmajan
  - Pembangunan Kantor Kelurahan Tahunan
  - Renovasi Bangunan Gedung Arpusda
  - Renovasi Gedung Eks Kantor UPT PPA
  - Renovasi Bangunan Gedung Eks Kantor Kemantren Gondomanan
  - Renovasi Bangunan Gedung Korpri
  - Renovasi Bangunan Gedung Satpol PP
  - Renovasi Instalasi Air Kotor Puskesmas Gondomanan
  - Pembangunan SMP Negeri 10
  - Renovasi SMP Negeri 14
  - Renovasi TK Negeri 6
  - Renovasi TK Negeri 11
  - Pembangunan SD Negeri Jetis 1
  - Pembangunan SD Negeri Widoro
  - Renovasi Mushola SD Negeri Pandeyan
  - Renovasi SD Negeri Suryodiningratan I
  - Rehabilitasi Atap Lapangan Tenis Rumah Dinas Walikota
  - Pembangunan Pasar Kluwih
  - Rehabilitasi Gedung Rusunawa Cokrodirjan
  - Renovasi Pagar Terminal Wisata Giwangan
- Melaksanakan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi pekerjaan:
  - Penyusunan DED Penyusunan DED Gedung Serbaguna Wirobrajan
  - Penyusunan DED Gedung Unit I Komplek Balaikota

- Penyusunan DED Pengembangan TK Negeri 4
- Penyusunan DED Balai RW 04 Prenggan
- Penyusunan DED Gudang Logistik dan Peralatan BPBD
- Penyusunan DED Renovasi Gedung Rekso Arcade
- Penyusunan Review DED Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Penyusunan Review DED Jembatan Penghubung dan Landscape
- Penyusunan Review Masterplan Komplek Balaikota
- Pemeriksaan Keandalan Bangunan Bidang Pemerintahan
- Pemeriksaan Keandalan Bangunan Bidang Pendidikan

e. Program Penataan Bangunan Gedung dengan indikator persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 100%. Dalam rangka mencapai Program Penataan Bangunan Gedung didukung oleh 1 sasaran kegiatan yaitu:

- Menyelenggarakan penerbitan rekomendasi penyelenggaraan bangunan Gedung yang didukung dengan belanja tenaga ahli terkait konstruksi diampu oleh Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan indikator persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 99,58% dari target 70,83% atau tercapai 140,59%. Dalam rangka mencapai target Program Pengembangan Jasa Konstruksi didukung oleh 2 sasaran kegiatan yaitu:

- Melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi, melaksanakan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi, dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi
- Melaksanakan pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi dan melaksanakan penyusunan data dan informasi profil pekerjaan konstruksi

g. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 81,53% dari target 81,45% atau tercapai 100,1%. Dalam rangka mencapai target Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) didukung oleh satu sasaran sub kegiatan yaitu:

- Pemeliharaan Insidentil PJU, Panel Jaringan, Panel Kwh dan Lampu hias
- Penataan Penerangan Jalan Kota - Jl. Letjen. S. Parman, Jl. Sugeng Jeroni
- Penataan Penerangan Jalan Kota - Jl. RE Martadinata, Jl. HOS Cokroaminoto

- Penataan Penerangan Jalan Kota - Kawasan Kotabaru
- Penataan Penerangan Jalan Kota - Kawasan Pasar Kotagede
- Penataan Penerangan Jalan Kota - Tegalturi Tegalgendu
- Penataan PJU Lingkungan
- Penataan PJU Lingkungan Kampung
- Penataan PJU Terminal Giwangan

h. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Ruang dengan indikator Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 100% dari target 100%. Dalam rangka mencapai target Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Ruang didukung oleh pekerjaan pedestrian insidentil Jl. Suroto.

i. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan kebudayaan dengan indikator Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 100% dari target 100%. Dalam rangka mencapai target Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan didukung oleh Pembangunan Taman Budaya Embung Giwangan tahap II.

2) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

Sebagai pengampu urusan penataan ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) berupaya mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkesinambungan dan kinerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang.

Tabel III. 13 Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2024
Urusan Penataan Ruang

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	83,89	85,79%
			Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	91,91%	92,37%

Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Indikator persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang terealisasi melebihi target yaitu sebesar 85,79% dari target 83,89% atau tercapai 102,27%. Kegiatan yang mendukung capaian tersebut yaitu Penyediaan dokumen perencanaan dan rancangan peraturan tata ruang .

   Dalam upaya pemenuhan aturan turunan RTRW dan RDTR yang telah ditetapkan sejak tahun 2021, pada tahun 2024 dilaksanakan penyusunan dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) serta penyusunan rancangan peraturan Wali Kota terkait RTBL dan mekanisme pemberian isentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta.

   - Penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang

     Penelitian dan pengembangan dalam bentuk kegiatan penyusunan kajian dilaksanakan dalam rangka penyiapan bahan kebijakan bidang tata ruang. Pada tahun 2024 dilaksanakan penyusunan kajian-kajian yang substansinya menjadi bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan PKL dan penyediaan sistem informasi reklame di Kota Yogyakarta.

   - Pembinaan tata ruang

     Pelaksanaan kegiatan pembinaan tata ruang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang di Kota Yogyakarta. Pembinaan tata ruang meliputi sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang bagi ASN dan masyarakat.

     Selain itu, dilaksanakan kegiatan penyediaan dan pengembangan sistem informasi tata ruang melalui aplikasi Gatra Matra yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh informasi aturan pemanfaatan ruang di kota Yogyakarta sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Yogyakarta.

2. Indikator persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang terealisasi sebesar 92,37% dari target 91,91% atau tercapai 100,50%. Kegiatan yang mendukung capaian tersebut yaitu:

   a. Pengawasan tata ruang meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan pengawasan tata ruang, pengawasan khusus, dan pengawasan teknis.
   b. Pengendalian tata ruang

Pengendalian tata ruang meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan audit tata ruang, pemberian insentif disinsentif bidang penataan ruang, dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dan pertanahan.

Dari hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang, didapatkan nilai persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta tahun 2024 sebesar 85,26%. Hasil tersebut merupakan capaian sasaran ke-5 Pemerintah kota Yogyakarta yaitu Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang.

c. Layanan pemanfaatan ruang

Layanan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan RTRW dan RDTR yang berlaku. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan layanan pemanfaatan ruang sebanyak 1926 layanan.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) juga mengampu urusan pertanahan yang dilaksanakan melalui 5 (lima) program.

Tabel III. 14 Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2024
Urusan Pertanahan

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot	91,63%	92,31%
2.		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah	100 %	100 %
3.		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sesuai SOP	100 %	100 %
4.		Program Penatagunaan Tanah	Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP	100 %	100 %
5.		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten	86,74%	86,74%

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
			Persentase pengawasan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten	42,03%	49,57%

a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dengan indikator persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah terealiasasi sesuai target yaitu sebesar 100% atau tercapai 100%.

   Capaian tersebut ditunjang oleh terlaksananya proses pengadaan tanah di tahun 2024 sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebanyak 2 lokasi yaitu 1 lokasi untuk pengadaan tanah untuk gedung serba guna kelurahan Panembahan (Kenekan) dan 1 lokasi untuk pengadaan tanah untuk RTHP Kelurahan Tegalrejo.

b. Program Pengelolaan Tanah Kosong dengan indikator persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot, terealisasi melebihi target yaitu sebesar 92,31% dari target sebesar 91,63% atau tercapai 100,73%.

   Capaian tersebut termasuk dalam kategori sangat baik yang didukung oleh terselesaikannya pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot di tahun 2024 sebanyak 26 bidang tanah. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2043 telah dilaksanakan pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot sebanyak 960 bidang dari 1040 bidang tanah aset pemkot yang direncanakan.

c. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sesuai SOP, terealisasi sesuai target sebesar 100%. Capaian tersebut didukung oleh terfasilitasinya permasalahan pertanahan di Kelurahan Giwangan.

d. Program Penatagunaan Tanah dengan indikator persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP, terealisasi sesuai target sebesar 100%. Capaian tersebut berupa terlaksananya layanan penerbitan 14 rekomendasi pemanfaatan tanah negara.

e. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan

   Indikator persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terealisasi sesuai target sebesar 86,74%. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya pendaftaran pensertifikatan tanah kasultanan/kadipaten sebanyak 50 bidang tanah di tahun 2024

sehingga total telah terlaksana pendaftaran pensertifikatan tanah kasultanan/kadipaten sebanyak 785 dari 905 bidang tanah yang direncanakan.

Indikator persentase pengawasan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terealisasi sebesar 49,57% dari target sebesar 42,03% atau tercapai 117,94%. Capaian tersebut diperoleh dari terlaksananya monitoring dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta sebanyak 111 lokasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan berbasis pada data yang terdapat pada aplikasi INTAN TARU yang dikembangkan oleh DIY.

3. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman didukung oleh 5 program yang terdiri atas Program Kawasan Permukiman, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Pengembangan Perumahan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum. Di samping itu, pada tahun 2024 juga terdapat tambahan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang ikut mendukung capaian sasaran Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman. Penjabaran target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja berikut realisasinya pada tahun 2024 tertuang dalam tabel berikut:

Tabel III. 15 Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2024
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	34,68%	50,71%
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	94,98%	96,17%
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	80,00%	92,27%

			Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	100%	100%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase pelayanan SPALD-S akses layak	58,80%	55,24%
			Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	21,05%	23,80%
			Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	19,52%	19,87%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	100%	100%
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	100%	100%

Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman sebagai berikut:

a. Program Kawasan Permukiman dengan indikator persentase permukiman kumuh yang tertangani mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 50,71% dari target 34,68% atau tercapai 144,7%. Dalam rangka mencapai target Program Kawasan Permukiman didukung oleh satu sasaran kegiatan yaitu Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, yang didukung pula oleh dua sasaran sub kegiatan, yaitu:
   - Melaksanakan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh, meliputi pekerjaan: Pemeliharaan Sarana Prasarana Insidentil, Pemeliharaan Talud Permukiman Insidentil, dan Land clearing (Pembersihan lahan).
   - Melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang meliputi pekerjaan:
     - Pembangunan Rumah Terdampak Konsolidasi Lahan Terban (DAK)
     - Pembangunan Rumah Terdampak Konsolidasi Lahan Terban

- Penataan Landscape dan Pembangunan Rumah Terdampak Konsolidasi Lahan Terban
- Rehab Rumah terdampak Konsolidasi Lahan Pringgokusuman
- Peningkatan Kualitas RTLH
- Peningkatan Kualitas RTLH TMMD
- Rehab Rumah terdampak

b. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan indikator persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 96,17% dari target 94,98% atau tercapai 101,25%. Dalam rangka mencapai targetnya, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya didukung oleh satu sasaran kegiatan yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung pula oleh dua sasaran sub kegiatan, yaitu:

- Melaksanakan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya, meliputi pekerjaan:
  - Penataan Permukiman Kumuh Kelurahan Terban RT.002 RW. 001 (DAK+APBD)
  - Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Lingkungan Permukiman Kumuh Kelurahan Prenggan RW. 001
  - Pembangunan Talud Permukiman Kelurahan Kricak RW. 01
- Melaksanakan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, meliputi pekerjaan:
  - Perencanaan Pembangunan Talud Permukiman tersebar
  - Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kel. Kotabaru
  - Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kel. Pringgokusuman RW.003
  - Perencanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kelurahan Bener RT.25 RW.04
  - Kajian Konsolidasi Lahan Kel. Prawirodirjan
  - Kajian Penggunaan Tanah-tanah Kasultanan untuk Perumahan Permukiman

c. Program Pengembangan Perumahan dengan indikator persentase tercapainya target retribusi sewa rusun mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 92,27% dari target 80% atau tercapai 115,34%. Program Pengembangan Perumahan didukung oleh beberapa pekerjaan meliputi:

- Melaksanakan penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum yang meliputi pekerjaan :
  - Pemeliharaan Bangunan Rusun Cokrodirjan;
  - Pemeliharaan Bangunan Rusun Grha Bina Harapan;
  - Pemeliharaan Bangunan Rusun MBR Bener Tower I dan Tower II;
  - Renovasi Kantor UPT. Pengelolaan Rusunawa; dan
  - Pembangunan Pos Jaga Rusun MBR Bener

d. Program Pengembangan Perumahan dengan indikator persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 100% dari target 100%. Program Pengembangan Perumahan didukung oleh pekerjaan pelaksanaan penyusunan dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota dengan melaksanakan Pendataan Rumah di Lokasi Rawan Bencana di Kawasan Sungai Gajah Wong.

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator Persentase pelayanan SPALD-S akses layak mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 55,24% dari target 58,8% atau tercapai 106,06%. Dalam rangka mencapai target Program Pengelolaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah didukung oleh sasaran kegiatan;

- Melaksanakan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan, yang meliputi pekerjaan:
  - Pembangunan IPAL Komunal Pringgokusuman;
  - Pembangunan IPAL Komunal Kranon Kel. Sorosutan;
  - Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Jl. Lembu Andini Kel. Pakuncen;
  - Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Tahunan;
  - Pembangunan Tangki Septik Komunal Kel. Terban RT 02 RW 01 (DAK + APBD)

f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator Persentase pelayanan SPALD-S akses aman mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 23,8% dari target 21,05% atau tercapai 113,07%. Dalam rangka mencapai target Program Pengelolaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah didukung oleh sasaran kegiatan;

- Melaksanakan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan, yang meliputi pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil.

g. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator Persentase pelayanan SPALD-T akses aman mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 19,87% dari target 19,52% atau tercapai 101,76%. Dalam rangka mencapai target Program Pengelolaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah didukung oleh sasaran kegiatan;

- Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang meliputi:
  - Pemeliharaan SAL Sektor I;
  - Pemeliharaan SAL Sektor II;
  - Pemeliharaan SAL Sektor III;
  - Perbaikan SAL Bumijo;
  - Perbaikan SAL Cokrodiningratan;
  - Perbaikan IPAL Komunal;
  - Pekerjaan Pemeliharaan SAL Insidentil yang tersebar di Kota Yogyakarta.

h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum dengan indikator persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 100% dari target 100%.

i. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 100% dari target 100%. Dalam rangka mencapai target Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan didukung oleh pekerjaan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta.

4. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Rencana Aksi, IKU, dan anggaran atau DPA. Satpol PP Kota Yogyakarta melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja

Kepala OPD setingkat Eselon II sebagai pengampu sasaran strategis OPD dan Kepala Bidang setingkat eselon III sebagai pengampu sasaran program. Di tahun 2024 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja pada Satpol PP Kota Yogyakarta. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena terdapat dinamisasi kebijakan dan kegiatan serta terdapat mutasi pejabat pengampu kegiatan pada Satpol PP sehingga perlu dilakukan perubahan baik dari segi target kinerja dan kebutuhan pagu anggaran.

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel III. 16 Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Satpol PP Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (%)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat	%	97,67 %

Tabel III. 17 Perjanjian Kinerja Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Perdan dan Perkada	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%
Meningkatnya Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparat Polisi Pamong Praja	Persentase peningkatan kapasitas SDM Pol PP	97%
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Berbasis Kampung	Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	91,34%

Satpol PP Kota Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh

tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Program Kegiatan. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

TABEL III.18 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat	%	97,67 %	97,88 %	100.22 %

Tabel. III 19 Capaian Kinerja Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Perdan dan Perkada	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	100%	100%	100%
Meningkatnya Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	100%	100%
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparat Polisi Pamong Praja	Persentase peningkatan kapasitas SDM Pol PP	97%	97,61%	100,63%
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Berbasis Kampung	Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	91,34%	91,81%	100,51%

Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Satpol PP Kota Yogyakarta	A Nilai	A Nilai	100%

Capaian kinerja untuk Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Indikator Program Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala daerah (Perkada)

Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan penegakan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta. Capaian indikator kinerja penegakan perda dan perkada tercapai sebesar 100% diperoleh dari target 100% yang terealisasi 100%. Realisasi sebesar 100% didapat dari perhitungan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan dibagi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilaporkan masyarakat dan hasil operasi secara yustisi dan non yustisi dikali 100%, dimana penegakan perda tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan}}{\text{Pelanggaran Pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi}} \times 100\%$$

$$\text{(\%) Penegakan Perda dan Perkada} : \frac{22.767}{22.767} \times 100\% = 100\ \%$$

b. Realisasi 100% didapat dari rasio jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan sejumlah 22.767 pelanggaran dari 22.767 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 22.767 pelanggaran didapat dari Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 22.715 pelanggaran dan secara yustisi sebesar 52 pelanggaran. Penegakan Perda secara Yustisi merupakan penyelesaian pelanggaran perda melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, dan pengajuan kasus pelanggaran perda melalui pengiriman berkas Berita Acara Penyidikan (BAP) ke pengadilan untuk dilakukan sidang tindak pidana ringan (Tipiring). Sedangkan penegakan perda dan perkada secara non yustisi merupakan penyelesaian pelanggaran perda dan perkada melalui pembinaan, pemberian teguran atau peringatan, baik lisan maupun

tertulis, serta eksekusi (penghentian fungsi usaha, pembongkaran bangunan) terhadap adanya suatu pelanggaran. Jumlah pelanggaran secara non yustisi dibagi menjadi 2 pelanggaran yakni pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sejumlah 3.983 pelanggaran dan pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota Yogyakarta, diantaranya Perwal Nomor 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam Anak sejumlah 12 pelanggaran, dan Perwal Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Penggerak Motor Listrik sejumlah 216 pelanggaran, serta Perwal Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan pelanggaran sejumlah 18.504 pelanggaran. Data Penegakan Perda dan Perwal Kota Yogyakarta Tahun 2024 terlampir.

c. Indikator Program Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari target 100% yang terealisasi 100%. Realisasi sebesar 100 % didapat dari perhitungan jumlah potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi jumlah potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Yogyakarta.

$$\text{Formula} = \frac{\sum \text{Potensi gangguan tibum tranmas yang dapat dikendalikan}}{\sum \text{Potensi gangguan tibum tranmas di Kota Yogyakarta}} \times 100\%$$

$$\text{(\%) pengendalian gangguan tibumtranmas} : \frac{205}{205} \times 100\% = 100\ \%$$

Data Potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Yogyakarta sejumlah 205 potensi gangguan diperoleh dari laporan kegiatan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Tibumtranmas), diantaranya laporan kegiatan patroli pencegahan gangguan tibumtranmas, pengamanan umum termasuk penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pengamanan event di Kota Yogyakarta, penjagaan objek vital, pengawalan pejabat/orang-orang penting, laporan dan aduan dari masyarakat terkait indikasi gangguan tibumtranmas, serta laporan kegiatan operasi patroli pengawasan tertutup deteksi dan cegah dini potensi gangguan tibumtranmas oleh personil intelijen Pol PP.

Penyelesaian terhadap laporan dari masyarakat terkait indikasi gangguan tibumtranmas ditindaklanjuti dengan melakukan upaya mediasi oleh petugas Satpol PP dengan tujuan untuk menghindari potensi terjadinya gangguan tibumtranmas dan konflik horisontal yang lebih meluas di masyarakat. Dari sejumlah potensi gangguan di Tahun 2024 tersebut dapat dikendalikan seluruhnya oleh petugas sehingga tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya.

d. Indikator Program Persentase peningkatan kapasitas Pol PP

Capaian indikator kinerja sebesar 100,63% diperoleh dari target 97% yang terealisasi 97,61%. Realisasi tersebut merupakan rata-rata realisasi indikator program dari kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM Satpol PP yang masing-masing mempunyai bobot komposit 50 %.

e. Kegiatan Pembinaan SDM Aparatur Satpol terdiri dari 2 indikator kegiatan diantaranya:

- Kinerja Kegiatan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan terealisasi sebesar 100% dari target yang ditentukan sebesar 100% dengan capaian 100 %. Rumusan pengukuran realiasasinya adalah jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perundang-undangan.

$$\text{(\%) pengkajian} : \frac{10}{10} \times 100\% = 100\ \%$$

$$\text{Formulasi} : \frac{\sum \text{hasil kajian peraturan PerUUan}}{\sum \text{Target pengkajian peraturan PerUUan}} \times 100\%$$

Di Tahun 2024, telah dilakukan pengkajian terhadap 10 peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas mendukung terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota. Bobot nilai komposit dari Kegiatan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan adalah 25% dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 25% dikali 100% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 25%.

- Kinerja kegiatan Bimbingan Konseling dan intelektual pegawai Satpol PP terealisasi sebesar 100% dari target yang ditentukan sebesar 100% dengan capaian 100 %. Rumusan pengukuran realisasinya adalah jumlah hasil realisasi pelaksanaan bimbingan konseling/intelektual pegawai dibagi jumlah pegawai yang mengajukan diri atau

ditentukan untuk melaksanakan bimbingan konseling/intelektual. Di Tahun 2024 terealisasi 12 orang pegawai yang melaksanakan assesment bimbingan konseling dengan fasilitasi dan inisiasi dari Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan peningkatan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Selain itu kegiatan tersebut juga untuk mengetahui potensi yang dimiliki pegawai, kondisi mental, permasalahan pegawai beserta solusi penyelesaiannya, sehingga dapat digunakan instansi dalam mempertimbangkan dan memetakan kompetensi pegawai sehingga dapat mendukung kinerja dinas yang lebih optimal. Berdasarkan hasil assessment, seluruh peserta kegiatan dinyatakan tidak diperlukan tindak lanjut, baik tindakan medis maupun tindakan terapi terkait dengan psikologi yang bersangkutan, terhadap permasalahan yang dikonsultasikan dengan narasumber. Bobot nilai komposit dari Pembinaan Konseling/ Intelektual pegawai adalah 25% dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 25% dikali 100% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 25%

f. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pol PP, terdiri dari 2 indikator kinerja yakni persentase pegawai yang lulus tes pemahaman peraturan perundang-undangan dan persentase pegawai yang lulus kesamaptaan

Rumusan penghitungannya adalah Peningkatan Kapasitas (50%) = jumlah komposit dari (25% x persentase realisasi target anggota yang memahami peraturan) + (25% x persentase realisasi target anggota yang lulus samapta).

- Rumusan penghitungan realisasi target anggota yang memahami peraturan didapat dari jumlah anggota Pol PP yang termasuk dalam kategori lulus dalam pelaksanaan tes pemahaman peraturan perundang-undangan yakni sejumlah 158 orang dibagi jumlah anggota yang mengikuti kegiatan pemahaman perda sebesar 164 orang dengan persentase realisasi sebesar 96,34%. Bobot nilai komposit dari realisasi target anggota yang memahami peraturan adalah 25 % dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 25% dikali 96,34% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 24,09%.
- Rumusan penghitungan realisasi target anggota yang lulus samapta didapat dari jumlah anggota Pol PP yang lulus tes kesamaptaan sejumlah 96 orang dibagi jumlah anggota yang mengikuti tes kesamaptaan sebesar 102 orang dengan persentase realisasi sebesar

94,12%. Bobot nilai komposit dari realisasi target anggota yg lulus samapta adalah 25% dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 25% dikali 94,12% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 23,53%.

Realisasi Indikator Program :

Dengan penjumlahan atas hasil komposit realisasi kegiatan yang mendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dapat diketahui realisasi program adalah sebesar 97,61% dari yang ditargetkan sebesar 97%.

2. Indikator Program Persentase Kampung Yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat

Capaian indikator kinerja sebesar 100,51% diperoleh dari target 91,34% yang terealisasi 91,81%. Realisasi sebesar 91,81% merupakan penjumlahan realisasi komposit dari:

a. jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 Kampung, 10 Petugas Linmas dibagi jumlah kampung di Kota Yogyakarta dikali 100% dengan bobot komposit 50%.

Terpenuhinya perlindungan masyarakat menggunakan indikator jumlah kampung yang sudah memiliki anggota linmas dengan kuota di dalam 1 Kampung terdapat minimal 10 orang petugas linmas. Menurut data SIM Linmas kondisi eksisting di Kota Yogyakarta terdapat petugas linmas yang berjumlah 4259 personil dari jumlah 169 kampung di Kota Yogyakarta. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 dengan angka 4234 petugas linmas di Kota Yogyakarta. Kenaikan jumlah petugas linmas di tahun 2024, walaupun tidak signifikan disbanding tahun 2023, di samping animo yang tinggi dari masyarakat untuk berperan aktif menjaga ketenteraman dan keamanan di wilayahnya masing-masing, juga diindikasi karena adanya event kegiatan rangkaian pemilihan presiden wakil presiden dan anggota legislatif serta pemilukada di tahun 2024 yang memerlukan dukungan fungsi dan ketugasan linmas. Dari data dan pemetaan berdasarkan SIM Linmas, rata-rata indikator kampung yang telah memiliki minimal 10 orang petugas linmas telah terpenuhi 100%.

Bobot nilai komposit dari terpenuhinya perlindungan masyarakat adalah 50 % dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 50 % dikali 100 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 50 %.

b. (jumlah kampung panca tertib yg terbentuk dibagi jumlah kampung di Kota Yk dikali 100% dengan bobot komposit 20 %) ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg dibentuk dibagi Target pembentukan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 5 %)

- Realisasi Pembentukan Kampung Panca Tertib sampai dengan tahun 2023 adalah 146 kampung dari total 169 jumlah kampung. Pada tahun 2024 telah terdapat 12 Kampung yang mendeklarasikan komitmen pelaksanaan Panca Tertib sehingga total pembentukan Kampung Panca Tertib sampai dengan tahun 2024 adalah 158 kampung. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang terbentuk adalah 93,49% yang merupakan hasil dari 158 kampung dibagi 169 kampung dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Pembentukan Kampung Panca Tertib adalah 20% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 20 % dikali 93,49% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 18,70%.
- Realisasi Pembentukan Sekolah Panca Tertib (Pantib for school) tahun 2023 sejumlah 15 Sekolah Panca Tertib. Di tahun 2024, Satpol PP telah menginisiasi pembentukan 5 Sekolah Panca Tertib (Pantib for School) di Kota Yogyakarta sesuai dengan target 5 sekolah yang telah ditentukan, sehingga sampai dengan tahun 2024 ini telah terbentuk 20 Sekolah Panca Tertib. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi Sekolah Panca Tertib yang terbentuk adalah 100% dari target pembentukan Pantib for School untuk 5 sekolah di Tahun 2024, dan sesuai target 66,67% sampai dengan Tahun 2024 yang merupakan hasil dari realisasi 20 sekolah dibagi target 30 sekolah (target akhir Renstra Tahun 2026) dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Pembentukan Sekolah Panca Tertib adalah 5% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 5% dikali realisasi 66,67% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 3,33%.

c. (jumlah kampung panca tertib yg ditumbuhkan dibagi jumlah kampung di Kota Yk dikali 100% dengan bobot komposit 20%) ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg ditumbuhkan dibagi Target penumbuhan sekolah panca tertib dikali 100% dengan bobot komposit 5%)

- Realisasi Penumbuhan Kampung Panca Tertib sampai dengan tahun 2024 adalah 146 kampung. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang

ditumbuhkan adalah 86,39% yang merupakan hasil dari 146 kampung dibagi 169 kampung dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Penumbuhan Kampung Panca Tertib adalah 20% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 20% dikali 86,39% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 17,28%.

- Realisasi Penumbuhan Sekolah Panca Tertib (Pantib for school) tahun 2024 sejumlah 15 Sekolah Panca Tertib dari target penumbuhan 15 Sekolah Panca Tertib. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi Sekolah Panca Tertib yang ditumbuhkan di tahun 2024 adalah 100% yang merupakan hasil dari 15 sekolah dibagi 15 sekolah dikali 100%, dan sesuai target 50% sampai dengan Tahun 2024 yang merupakan hasil dari realisasi 15 sekolah dibagi target 30 sekolah (target akhir Renstra Tahun 2026) dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Pembentukan Sekolah Panca Tertib adalah 5% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 5% dikali realisasi 50% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 2,5%.

Realisasi Indikator Program :

Dengan penjumlahan hasil komposit realisasi kegiatan yang mendukung indikator program perlindungan masyarakat dapat diketahui realisasi program adalah sebesar 91,81% dari yang ditargetkan 91,34%.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tahun 2024 sebesar 100,22% diperoleh dari realisasi 97,88% terhadap target 96,67%. Realisasi sebesar 97,88% didapat dari akumulasi realisasi program dari penjumlahan bobot komposit 30% realisasi Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 30% realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 20% realisasi peningkatan kapasitas Pol PP, dan 20% realisasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- Komposit Realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3) adalah 30% x 100% = 30%
- Komposit realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah 30% x 100% = 30 %
- Komposit realisasi peningkatan kapasitas SDM Pol PP adalah 20% x 97,61% = 19,52%

- Komposit realiasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat adalah 20% x 91,81% = 18,36%

Total realisasi sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satpol Pol PP Tahun 2024 adalah 97,88%.

Faktor keberhasilan :

a) Efektifitas koordinasi dengan stakeholder dan Forkompinda serta peran serta aktif masyarakat dalam turut mewujudkan trantibumlinmas melalui petugas linmas dan Rampung Panertib
b) Sinergitas antar bidang/seksi di internal Satpol PP serta Intensifikasi rapat koordinasi di tingkat low manager sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan
c) Tingginya animo masyarakat dan semangat petugas linmas untuk secara sukarela melaksanakan ketugasan perlindungan masyarakat
d) Capaian penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Yogyakarta relatif konsisten berada pada trend positif dilihat dari capaian kinerja yang pasti melebihi 100% dari target tahunan meskipun angka pelanggaran relatif masih tinggi.
e) Terdapat dukungan, peran serta dan sinergitas kerjasama dengan instansi vertikal, intitusi penegak peraturan perundang-undangan lainnya (TNI, Polri, Pengadilan, Kejaksaan) serta kemitraan dalam rangka penegakan Perda Kota Yogyakarta dan meminimalisasi terjadinya potensi gangguan konflik di dalam masyarakat.
f) Semakin bertambahnya peran aktif masyarakat Kota Yogyakarta untuk turut mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta, khususnya di dalam lingkup kampung yang telah mendeklarasikan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT) di wilayah dan Gerakan Sekolah Panca Tertib (Pantib for School).
g) Peningkatan profesionalisme petugas Pol PP dan petugas linmas melalui diklat teknis, pemahaman peraturan perundang-undangan, pelatihan kesamaptaan, sosialisasi, workshop Pol PP dan Linmas, Coaching clinic PPNS, dan kegiatan pengembangan kapasitas lain dalam rangka mendukung ketugasan Satpol PP dan Satlinmas.

Rencana dan Langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

a) Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan dan instansi vertikal melalui Forkompimda dalam mengurangi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran perda dan perkada
b) Intensifikasi koordinasi dengan OPD terkait melalui pembentukan tim teknis dalam upaya mengawal penegakan Perda dan Perwal Kota Yogyakarta
c) Peningkatan profesionalisme petugas dalam jabatan fungsional Pol PP melalui kegiatan pengembangan kapasitas SDM baik secara fisik maupun pengetahuan pendukung ketugasan penegakan perda dan perkada
d) Mengoptimalkan peran petugas Bawah Kendali Operasi (BKO) Pol PP di wilayah Kemantren
e) Optimalisasi strategi penegakan perda secara pre-emtif dan preventif melalui Gerakan Kampung Panca Tertib dan Pantib for School yang sejalan dengan strategi penegakan perda secara represif yustisi dan non yustisi sehingga tercapai pemantapan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam turut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang didukung sinergitas institusi penegak peraturan perundang-undangan dengan berbasis integrasi sistem informasi manajemen penegakan perda.
f) Melaksanakan koordinasi dengan OPD teknis terkait untuk mendapatkan dukungan dalam mewujudkan komitmen panca tertib.

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terkait bencana. Penyelenggaraan tusi ini kemudian dituangkan dalam target kinerja BPBD melalui Perjanjian Kinerja Eselon II dan III berikut ini:

No	Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	BB Nilai	Kepala Pelaksana
1.1	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A Nilai	Sekretaris Badan

No	Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1.1.a	Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPBD dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPBD	32 dokumen	Sekretaris Badan
1.1.b	Melaksanakan administrasi keuangan BPBD dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi keuangan BPBD	52 laporan	Sekretaris Badan
1.1.c	Melaksanakan administrasi umum BPBD dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi umum BPBD	6 laporan	Sekretaris Badan
1.1.d	Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	Sekretaris Badan
1.1.e	Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	60 unit	Sekretaris Badan
2	Meningkatnya kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	91,03 Skala 0-100	Kepala Pelaksana
2.1	Meningkatkan kesiapsiagaan atas bencana	Presentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana	82,06%	Kepala Bidang PK DIKK
2.1.a	Melaksanakan penguatan kapasitas kawasan tangguh bencana	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	23 kawasan	Kepala Bidang PK DIKK
2.1.b	Menyediakan informasi rawan bencana	Jumlah dokumen informasi rawan bencana	6 dokumen	Kepala Bidang PK DIKK
2.2	Meningkatkan penanganan kedaruratan dan pasca bencana	Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	100%	Kepala Bidang KL RR

No	Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100%	
2.2.a	Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial TRC tingkat kota dalam melaksanakan penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	150 orang	Kepala Bidang KL RR
2.2.b	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi	100 orang	Kepala Bidang KL RR
2.2.c	Melaksanakan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 orang	Kepala Bidang KL RR
2.2.d	Melaksanakan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	3 laporan	Kepala Bidang KL RR
2.2.e	Menyediakan informasi rawan bencana	Jumlah dokumen rencana kontinjensi yang dilegalisasi	1 dokumen	Kepala Bidang KL RR

Selama tahun 2024, Perjanjian Kinerja tersebut terealisasi sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	BB Nilai	A Nilai	100%	Kepala Pelaksana
1.1	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	100%	Sekretaris Badan
1.1.a	Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan	Jumlah dokumen perencanaan,	32 dokumen	32 dokumen	100%	Sekretaris Badan

No	Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Penanggung Jawab
	evaluasi kinerja BPBD dengan lengkap dan sesuai tatakala	penganggaran dan evaluasi kinerja BPBD				
1.1.b	Melaksanakan administrasi keuangan BPBD dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi keuangan BPBD	52 laporan	52 laporan	100%	Sekretaris Badan
1.1.c	Melaksanakan administrasi umum BPBD dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi umum BPBD	6 laporan	6 laporan	100%	Sekretaris Badan
1.1.d	Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	3 laporan	100%	Sekretaris Badan
1.1.e	Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	60 unit	60 unit	100%	Sekretaris Badan
2	Meningkatnya kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	91,03 Skala 0-100	91,03 Skala 0-100	100%	Kepala Pelaksana
2.1	Meningkatkan kesiapsiagaan atas bencana	Presentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana	82,06%	82,06%	100%	Kepala Bidang PK DIKK
2.1.a	Melaksanakan penguatan kapasitas kawasan tangguh bencana	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	23 kawasan	23 kawasan	100%	Kepala Bidang PK DIKK

No	Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Penanggung Jawab
2.1.b	Menyediakan informasi rawan bencana	Jumlah dokumen informasi rawan bencana	6 dokumen	6 dokumen	100%	Kepala Bidang PK DIKK
2.2	Meningkatkan penanganan kedaruratan dan pasca bencana	Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%	100%	Kepala Bidang KL RR
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100%	100%	100%	Kepala Bidang KL RR
2.2.a	Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial TRC tingkat kota dalam melaksanakan penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	150 orang	150 orang	100%	Kepala Bidang KL RR
2.2.b	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi	100 orang	100 orang	100%	Kepala Bidang KL RR
2.2.c	Melaksanakan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 orang	100 orang	100%	Kepala Bidang KL RR
2.2.d	Melaksanakan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	3 laporan	3 laporan	100%	Kepala Bidang KL RR

No	Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Penanggung Jawab
2.2.e	Menyediakan informasi rawan bencana	Jumlah dokumen rencana kontinjensi yang dilegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	100%	Kepala Bidang KL RR

Laporan Kinerja BPBD pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian 100% berkat realisasi kegiatan strategis pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Penanggulangan Bencana.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja pada Program Penanggulangan Bencana, yakni:

1. Presentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan target 82.06%.

   Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana dihitung dari rumus:

   (60% pembentukan KTB + 20% pembentukan SPAB + 20% dokumen data dan informasi bencana terpadu) x 100

   Sedangkan realisasi capaian masing-masing variable rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

   - 60% pembentukan KTB, tercapai melalui pembentukan 15 KTB Rintisan
   - 20% pembentukan SPAB, tercapai melalui pembentukan 8 SPAB
   - 20% dokumen data dan informasi bencana terpadu, tercapai melalui penyajian/penyusunan data kejadian/bencana, korban terdampak, assesment kejadian/bencana, penilaian kerusakan, logistik kedaruratan, logistik rehabilitasi dan rekonstruksi secara berkala/per bulan

2. Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap dengan target 100%

   Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap dihitung dari rumus:

   (Jumlah korban kejadian bencana yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap / Jumlah korban kejadian bencana) x 100%

   Pada tahun 2024, jumlah korban becana yang tercatat ada 165 jiwa dan 100% telah mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap, baik berupa evakuasi penyelamatan maupun pemberian bantuan logistik

3. Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan target 100%.

   Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dihitung dari rumus:

(Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang dapat diberikan bantuan rehabilitasi rekonstruksi berdasarkan hasil JITUPASNA) x 100%

Dalam dokumen data dan informasi bencana terpadu, tercatat ada 13 rumah yang terdampak bencana dan 100% telah mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan jumlah total pemberian bantuan adalah Rp 134.959.500,00 yang terdiri dari bantuan bahan material non permanen dan bantuan honorarium jasa tukang.

Pelaksanaan kegiatan Program Penanggulangan Bencana meskipun tercapai 100%, namun memiliki beberapa hambatan, antara lain:

a. Mekanisme bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana belum diatur secara resmi dalam Peraturan Walikota (Perwal).
b. Koordinasi antar lembaga/OPD terkait pelayanan penanggulangan bencana di luar jam kerja perlu ditingkatkan.
c. Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) belum ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi resmi dari lembaga berwenang.
d. Jadwal pelaksanaan Sekolah Penanggulangan Bencana (SPAB) dengan sekolah perlu disinkronkan dan difinalisasi untuk menghindari perubahan.
e. Sejumlah mobil jenazah milik BPBD sudah melewati umur ekonomis dan memerlukan penggantian.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

a. Draft Peraturan Walikota (Perwal) tentang Bantuan Rumah Rusak telah disusun dan akan diajukan dalam usulan Propemperkada 2025.
b. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) telah dibentuk dan dilengkapi dengan pelatihan (bimtek) tahunan.
c. Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Kota Yogyakarta telah terbentuk.
d. Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) dilaksanakan melalui kerjasama antara BPBD dan PMI Kota Yogyakarta untuk menghasilkan sertifikasi Penanggulangan Bencana.
e. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah dilakukan untuk menentukan jadwal pelaksanaan Sekolah Penanggulangan Bencana (SPAB).
f. Dua unit mobil jenazah yang sudah melewati umur ekonomis dihapuskan dan digantikan dengan pengusulan pengadaan satu unit mobil jenazah baru pada tahun anggaran 2025.

Sedangkan faktor pendorong dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana adalah:

a. Koordinasi lintas sektoral yang baik memfasilitasi pelaksanaan kegiatan strategis, meliputi: pembentukan KTB Rintisan dan SPAB, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, serta kegiatan evakuasi dan penyelamatan melalui pembentukan posko kesiapsiagaan.
b. Selain itu, kegiatan pendukung seperti pelatihan Tim Reaksi Cepat, pemeliharaan alat kesiapsiagaan dan evakuasi, penyiapan sistem peringatan dini, dan pemasangan rambu titik kumpul serta jalur evakuasi juga dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan salah satu unit kerja pendukung fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran.. Dalam mendukung urusan tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, terdiri dari:

    a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan 4 sub kegiatan :
        a) Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
        b) Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
        c) Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
        d) Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

    b. Kegiatan inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
        a) Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.
        b) Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

c. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran,

Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran.

d. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan

a) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

b) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Adapun program-program tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja yang memuat sasaran program, indikator program, dan target serta capaian Realisasi sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel III. 20 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Ketahanan daerah terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran	Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran	99,52%
2.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat	B Nilai

Tabel III. 21 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja (Program)	Target
1.	Meningkatkan Pencegahan Bencana Kebakaran	Persentase Rekomendasi Proteksi Kebakaran yang Diproses Tepat Waktu	100%
		Persentase Edukasi Penanggulangan Kebakaran	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja (Program)	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Prosentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota)	100%

		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	360 Laporan
		Jumlah dokumen investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	360 Laporan
		Jumlah dokumen investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	4 Dokumen

1. Indikator Program :

a. Persentase Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran dalam kondisi baik dan berfungsi.

Dalam mewujudkan tercapainya target pada program Persentase Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran dalam kondisi baik dan berfungsi, telah dilaksanakan inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran pada bangunan Gedung Sedang dan Rendah serta jaringan hidran kering yang berlokasi di wilayah Kota Yogyakarta sebanyak 70 bangunan gedung terdiri dari 30 Inspeksi Peralatan Proteksi bangunan Rendah, dan 40 Inspeksi Peralatan Proteksi bangunan Sedang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian realisasi dari indikator program Jumlah Presentase Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran tahun 2024 mencapai 100%, Capaian realisasi keuangan 89,4% untuk Program Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran dalam kondisi baik dan berfungsi. sebesar Rp. 192.584.701,- dari target keuangan sebesar Rp. 215.409.000,-

Tabel III. 22 Capaian Kinerja Program Pencegahan Kebakaran Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Inspeksi Peralatan Proteksi bangunan Rendah

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Jumlah Presentase Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan Rendah Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	6	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30

	Jumlah pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	6	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	% Capaian	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

Inspeksi Peralatan Proteksi Bangunan Sedang

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Jumlah Presentase Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan Sedang Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0	0	0	0	8	6	9	9	4	5	0	0	40
	Jumlah pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0	0	0	0	8	6	9	9	4	5	0	0	40
	% Capaian	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	0	0	100

tercapainya program Persentase Penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran berfungsi dalam kondisi baik dan berfungsi, telah dilaksanakan pelayanan permohonan rekomendasi kebakaran Tahun 2024 mencapai 100%, yaitu dari permohonan rekomendasi kebakaran sebanyak 166 terlayani sebanyak 166 rekomendasi kebakaran. Capaian realisasi keuangan 94,1% untuk Program Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran dalam kondisi baik dan berfungsi. sebesar Rp. 37.746.102,- dari target keuangan sebesar Rp. 40.095.000,-

Tabel III. 23 Capaian Kinerja Program Pencegahan Kebakaran Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

- Rekomendasi Proteksi Kebakaran yang Diproses Tepat Waktu

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase Rekomendasi Proteksi Kebakaran yang Diproses Tepat Waktu	Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu /	15	7	23	13	11	16	16	9	14	15	10	17	166
	Jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran sesuai persyaratan lengkap)	15	7	23	13	11	16	16	9	14	15	10	17	166
	% Capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

b. Persentase edukasi Penanggulangan Kebakaran

Dalam mewujudkan tercapainya target pada program Persentase edukasi penanggulangan kebakaran, telah dilaksanakan penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran yang berlokasi di Kota Yogyakarta.

Capaian realisasi dari indikator program Jumlah Persentase edukasi penanggulangan kebakaran tahun 2024 mencapai 100%, yaitu Penyuluhan Penanggulangan kebakaran di Titik Rawan Bencana Kebakaran sebanyak 18 kali, Edukasi Penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK sebanyak 36 kali dan , Edukasi Penanggulangan kebakaran bagi anak SD dan SMP sebanyak 14 kali telah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian realisasi keuangan 85,9 % untuk Program Persentase edukasi pencegahan kebakaran. sebesar Rp. 451.240.000,- dari target keuangan sebesar Rp. 525.306.438,-

Tabel III. 24 Capaian Kinerja Program Pencegahan Kebakaran Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

- Penyuluhan Penanggulangan kebakaran di Titik Rawan Bencana Kebakaran

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase Edukasi penanggulangan kebakaran	Jumlah pelaksanaan penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran	1	1	1	1	2	2	2	2	1	4	1	0	18
	Jumlah total penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran	1	1	1	1	2	2	2	2	1	4	1	0	18
	% capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

- Edukasi Penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK.

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase Edukasi penanggulangan kebakaran	Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK yang dilayani	0	4	0	1	7	5	1	3	6	5	4	0	36
	Total permohonan edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK	0	4	0	1	7	5	1	3	6	5	4	0	36
	% capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

- Edukasi Penanggulangan kebakaran bagi anak SD dan SMP (Goes To School)

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase Edukasi penanggulangan kebakaran	Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi SD dan SMP yang dilaksanakan	0	1	1	0	0	1	2	2	2	4	1	0	14

	Jumlah Total edukasi penanggulangan kebakaran bagi SD dan SMP yang rencanakan	1	1	1	1	2	2	2	2	1	4	1	0	18
	% capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

c. Dalam mewujudkan tercapainya target pada program Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit, telah dilaksanakan pelayanan penanganan kejadian kebakaran di titik rawan bencana kebakaran dalam wilayah Kota Yogyakarta.

Capaian realisasi dari indikator program Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) tahun 2024 mencapai 100%, yaitu sebanyak 71 kejadian Kebakaran.

Capaian realisasi keuangan 82,2% untuk Program Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) sebesar Rp.1.982.114.188,- dari target keuangan sebesar Rp. 2.409.849.600,-

Tabel III. 25 Capaian Kinerja Program Pencegahan Kebakaran Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota)	Jumlah kejadian yang ditangani dalam waktu tanggap dibagi	6	3	3	7	9	7	3	10	11	4	3	5	71
	jumlah kejadian keseluruhan	6	3	3	7	9	7	3	10	11	4	3	5	71
	% capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

d. Dalam mewujudkan tercapainya target pada program Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota, telah dilaksanakan pelayanan penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar Kota Yogyakarta.

Capaian realisasi dari indikator program Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota tahun 2024 mencapai 100%, yaitu sebanyak 42 kejadian pemadaman Kebakaran dan penyelamatan di luar kota Yogyakarta.

Capaian realisasi keuangan 82,2% untuk Program Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit. sebesar Rp. 1.982.114.188,- dari target keuangan sebesar Rp. 2.409.849.600,-

Tabel III. 26 Capaian Kinerja Program Pencegahan Kebakaran Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

- Penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota	(Jumlah permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang ditangani	3	2	0	2	4	3	5	7	4	6	3	3	42
	Jumlah total permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang masuk)	3	2	0	2	4	3	5	7	4	6	3	3	42
	% capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

e. Dalam mewujudkan tercapainya target pada program Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran), telah dilaksanakan pelayanan penanganan kejadian penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)

Capaian realisasi dari indikator program Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) tahun 2024 mencapai 100%, yaitu sebanyak 770 kejadian penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran).

Capaian realisasi keuangan 74,7% untuk Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran). sebesar Rp. 178.270.904,- dari target keuangan sebesar Rp. 238.356.300,-

Tabel III. 27 Capaian Kinerja Program Pencegahan Kebakaran Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
-penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	Jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi di luar kejadian kebakaran dalam kota dan luar kota (operasi darurat non kebakaran) yang ditangani	107	104	75	34	47	39	52	50	39	55	82	86	770
	Jumlah total permohonan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yang masuk)	107	104	75	34	47	39	52	50	39	55	82	86	770
	% capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

5. Urusan Sosial

Tahun 2024 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 5 (lima) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial. Sasaran ini dlakukan perbaikan kinerja menjadi meningkatkan kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka. Sasaran ini dilakukan perbaikan kinerja menjadi meningkatnya penyerapan tenaga kerja;
3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja;
4. Meningkatnya Kualitas Kerjasama Transmigrasi;
5. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sasaran tersebut telah tertuang pada tabel perjanjian kinerja eselon II sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan 2024
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	94,88%

2.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	67,97%
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang sudah Melaksanakan Struktur dan Skala Upah	6,81%
4.	Meningkatnya Kualitas Kerjasama Transmigrasi	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti dengan Pengiriman Transmigran	35,29%
5.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Nilai Reformasi Birokrasi	A

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, didukung oleh 10 (sepuluh) program, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
8. Program Penempatan Tenaga Kerja;
9. Program Hubungan Industrial;
10. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Program-program tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) urusan, yaitu:

i. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan sosial. Urusan sosial yang dilaksanakan terdiri dari:

2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana.

Sasaran program dan indikator kinerja program urusan sosial tertuang dalam tabel sebagai berikut:

No.	Sasaran Program	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan Keaktifan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	91,99	91,99
2.	Meningkatkan layanan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100
	Meningkatkan layanan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti		Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100
	Meningkatkan layanan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100
	Meningkatkan layanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100
	Meningkatkan KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri		Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri	45,58	46,11
	Meningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial	100	100

No.	Sasaran Program	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
	layanan di luar Panti Sosial				
	Meningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	100	100
3.	Meningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	92,83	92,91
	Meningkatnya akurasi data sasaran intervensi kemiskinan		Presentase akurasi data sasaran intervensi kemiskinan	100	100
4.	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Penanganan Bencana	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100

Indikator kinerja dari Program Pemberdayaan Sosial adalah persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dengan target sebesar 91,99% dan terealisasi sebesar 91,99% (Capaian 100%). Program ini melaksanakan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Program Rehabilitasi Sosial, indikator kinerja yang digunakan antara lain :

1. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% (Capaian 100%);

2. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% (Capaian 100%);
3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% (Capaian 100%);
4. Persentase penyandang disabilitas terlantaryang terpenuhi kebutuhan di luar panti dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% (Capaian 100%);
5. Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri mempunyai target 45,58% dan teralisasi sebesar 46,11% (Capaian 100%);
6. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial mempunyai target 100% dan terealisasi sebesar 100% (Capaian 100,00%);
7. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% (Capaian 100%).

Untuk mencapai target indikator program tersebut, dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial dan kegiatan Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.

Terdapat perbaikan target indikator kinerja pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan Keputusan Wali Kota Yogyakarta nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkugan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu :

1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dan ditargetkan sebesar 92,83% dan terealisasi sebesar 92,91% (Capaian 100,09%). Kegiatan pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Persentase akurasi data sasaran intervensi kemiskinan dan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% (Capaian 100%).

Untuk mencapai target indikator program tersebut, dilaksanakan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk Program Penanganan Bencana, indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase korban yang tertangani dan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% (Capaian 100%). Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota dan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.

ii. Pelaksanaan Urusan Wajib tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah urusan ketenagakerjaan, yang terdiri dari Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Kesejahteraan dan Hubungan Industrial.

Tabel III. 28 Sasaran program dan indikator kinerja program urusan ketenagakerjaan

No	Sasaran Program	Program dan Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja	62,47	62,98
2.	Meningkatnya Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan	92,01	92,38
3.	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja melalui IPK Online	53,11	53,13
4.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	42,31	43,42

Program Perencanaan Tenaga Kerja menggunakan indikator kinerja Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja, yang ditetapkan sebesar 62,47% dan terealisasi sebesar 62,98% (Capaian 100,80%). Untuk mencapai target indikator program tersebut, didukung oleh kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja. Sedangkan indikator kinerja dari Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal

dan Non formal setelah 6 bulan pasca pelatihan dengan target sebesar 92,01% dan terealisasi sebesar 92,38% (Capaian 100,40%). Untuk mencapai target tesebut dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.

Indikator kinerja dari Program Penempatan Tenaga Kerja adalah Persentase penempatan tenaga kerja melalui IPK Online dengan target sebesar 53,11% dan terealisasi sebesar 53,13% (Capaian 100,04%). Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

Program Hubungan Industrial menggunakan indikator kinerja persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial yang ditargetkan sebesar 42,31% dan terealisasi sebesar 43,42% (Capaian 102,64%) Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dan Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada tahun 2024, DP3AP2KB memiliki 5 sasaran strategis, dengan 1 di antaranya adalah sasaran strategis Meningkatnya Reformasi Birokrasi DP3AP2KB yang didukung oleh program internal di DP3AP2KB.

Untuk 4 rincian sasaran strategis dan capaiannya seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel III. 29 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Persentase keberdayaan perempuan	persen	19,95	21,70	108,77%
2	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan	angka	1,02 - 2	1,16	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian
3	Menurunnya kekerasan terhadap anak	Rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak	angka	0,82 - 2	1,01	100%
4	Terkendalinya jumlah penduduk	*CBR (Crude Birth Rate)*	*CBR*	5-8	5,17	100%

Sumber: DP3AP2KB, 2024.

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak didukung oleh 4 program, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak, dan Program Perlindungan Khusus Anak. Keempat program tersebut mendukung 3 sasaran pertama, dengan rincian sebagai berikut :

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mendukung sasaran strategis pertama, yaitu Meningkatnya Keberdayaan Perempuan. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan memiliki 1 indikator yaitu Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif, dengan capaian seperti pada tabel berikut:

Tabel III. 30 Capaian Sasaran Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

No	Indikator Program	2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	93,41%	93,41%	100

Sumber: DP3AP2KB, 2024.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel III. 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Pencapaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan

No	Sasaran	Program PD	Indikator Program PD	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan			**19,95%**	**20,05%**	**108,77%**	**799.092.765**	**795.211.750**	**99,51**
		Program Pengarus Utamaan Gender dan	Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	93,41%	93,41%	100%	799.092.765	795.211.750	99,51

		Pemberdayaan Perempuan	(PUG) yang Aktif						

Sumber: DP3AP2KB, 2024.

Pada Tabel 3 menunjukkan realisasi anggaran program pendukung sasaran meningkatnya Keberdayaan Perempuan, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan memiliki capaian kinerja yang sangat baik dengan nilai capaian 100% dan mampu melakukan efisiensi dengan capaian serapan anggaran 99,51%, dan kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Program ini merupakan satu-satunya program pendukung sasaran strategis pertama, dengan nilai capaian 100%. Formula indikator program ini adalah Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif = (Jumlah kelembagaan PUG yang aktif / kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta)*100%. Dengan jumlah kelembagaan PUG yang aktif pada tahun 2024 adalah 85 dan jumlah kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta adalah 91 sehingga realisasi yang dihasilkan sebesar 93,41%. Ke-85 kelembagaan PUG yang aktif tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III. 32 Kelembagaan PUG kota Yogyakarta

NO	KELEMBAGAAN PUG
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman
5	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
8	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
9	Dinas Pertanian Dan Pangan
10	Dinas Lingkungan Hidup
11	Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian
12	Dinas Perhubungan
13	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KELEMBAGAAN PUG
30	Kemantren Ngampilan
31	Kemantren Tegalrejo
32	Kemantren Umbulharjo
33	Kemantren Wirobrajan
34	Kemantren Gondokusuman
35	Kemantren Gondomanan
36	Kemantren Jetis
37	Kemantren Kotagede
38	Kemantren Mergangsan
39	Kemantren Pakualaman
40	Bagian Tata Pemerintahan
41	Bagian Administrasi Pembangunan
42	Bagian Administrasi Keuangan

NO	KELEMBAGAAN PUG
59	Kelurahan Prenggan
60	Kelurahan Purbayan
61	Kelurahan Kadipaten
62	Kelurahan Patehan
63	Kelurahan Panembahan
64	Kelurahan Mantrijeron
65	Kelurahan Suryodiningratan
66	Kelurahan Gedongkiwo
67	Kelurahan Wirogunan
68	Kelurahan Keparakan
69	Kelurahan Brontokusuman
70	Kelurahan Ngampilan
71	Kelurahan Gunungketur

NO	KELEMBAGAAN PUG
14	Dinas Pariwisata
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu
16	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
17	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
19	Badan Kepegawaian Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
24	Sekretariat DPRD
25	Inspektorat
26	Kemantren Danurejan
27	Kemantren Kraton
28	Kemantren Gedongtengen
29	Kemantren Mantrijeron

NO	KELEMBAGAAN PUG
43	Bagian Kesejahteraan Rakyat
44	Bagian Organisasi Sekretarian Daerah
45	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
46	Bagian Perekonomian Dan Kerjasama
47	Bagian Umum dan Protokol
48	Kelurahan Bausasran
49	Kelurahan Pringgokusuman
50	Kelurahan Sosromenduran
51	Kelurahan Baciro
52	Kelurahan Demangan
53	Kelurahan Kotabaru
54	Kelurahan Klitren
55	Kelurahan Prawirodirjan
56	Kelurahan Ngupasan
57	Kelurahan Gowongan
58	Kelurahan Rejowinangun

NO	KELEMBAGAAN PUG
72	Kelurahan Purwokinanti
73	Kelurahan Kricak
74	Kelurahan Tegalrejo
75	Kelurahan Bener
76	Kelurahan Semaki
77	Kelurahan Warungboto
78	Kelurahan Pandeyan
79	Kelurahan Sorosutan
80	Kelurahan Giwangan
81	Kelurahan Muja-Muju
82	Kelurahan Tahunan
83	Kelurahan Wirobrajan
84	Kelurahan Patangpuluhan
85	Kelurahan Pakuncen

Sumber: DP3AP2KB, 2024.

2) Program Perlindungan Perempuan, mendukung sasaran strategis ke-2 yaitu Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan. Program Perlindungan Perempuan memiliki 1 indikator yaitu Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Per Seribu Penduduk Perempuan dengan capaian seperti pada tabel berikut:

Tabel III. 33 Capaian Sasaran Program Perlindungan Perempuan

No	Indikator Program	2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan	1,02 - 2	1,16	100

Sumber: DP3AP2KB, 2024.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 6 berikut:

Tabel III. 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Pencapaian Sasaran Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan

No	Sasaran	Program PD	Indikator Program PD	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan			1,02 - 2	1,16	100%	799.605.600	787.556.075	98,49%
1		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani	100%	100%	100%	799.605.600	787.556.075	98,49%

Sumber: DP3AP2KB, 2024.

Pada Tabel 6 menunjukkan realisasi anggaran program pendukung sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan, yaitu Program Perlindungan Perempuan memiliki capaian kinerja yang sangat baik dengan nilai capaian 100% dan mampu melakukan efisiensi dengan capaian serapan anggaran 98,49%, dan kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Program ini merupakan satu-satunya program pendukung sasaran strategis kedua, dengan nilai capaian 100%. Formula indikator program ini adalah Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani = (Jumlah korban kekerasan perempuan yang tertangani/ Jumlah korban kekerasan perempuan) *100%. Dengan jumlah jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani adalah 247 dan Jumlah perempuan korban kekerasan yang melapor pada periode yang sama adalah 247 sehingga realisasi yang dihasilkan sebesar 100%.

3) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak, mendukung sasaran strategis ketiga, yaitu Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) memiliki 1 indikator yaitu Ketercapaian Nilai Indikator Kota Layak Anak, sedangkan Program Perlindungan Khusus Anak juga memiliki 1 indikator yaitu Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Tertangani dengan capaian seperti pada tabel berikut:

Tabel III. 35 Capaian Sasaran Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)dan Program Perlindungan Khusus Anak

No	Indikator Program	2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak	Utama	Utama	100
2	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani	100%	100%	100

Sumber: DP3AP2KB, 2024

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 8 berikut:

Tabel III. 36 Anggaran dan Realisasi Belanja Pencapaian Sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak

No	Sasaran	Program PD	Indikator Program PD	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak			**0,82 - 2**	**1,01**	**100**	**2.696.259.195**	**2.684.323.968**	**99,56%**
1		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak	Utama	Utama	100	1.661.460.500	1.660.996.635	99,97%
2		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani	100%	100%	100	1.034.798.695	1.023.327.333	98,89%

Sumber: DP3AP2KB, 2024.

Pada Tabel 8 menunjukkan realisasi anggaran program pendukung sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak, yaitu Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak memiliki capaian kinerja yang sangat baik dengan nilai capaian 100% dan mampu melakukan efisiensi dengan capaian serapan anggaran masing-masing 99,97% dan 98,49%, serta kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Kedua program ini merupakan program pendukung sasaran strategis ketiga, dengan nilai capaian 100%. Formula indikator masing-masing program ini adalah:

a. Program Pemenuhan Hak Anak dengan formula Hasil Penilaian KLA dari Kemen PPA dengan hasil penilaian Utama, telah memenuhi target pada tahun 2024 yaitu Utama, sehingga capaiannya 100%.

b. Program Perlindungan Khusus Anak dengan formula Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani = (Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani/Jumlah anak korban kekerasan yang melapor pada periode yang sama)*100%. Dengan Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani sebanyak 101 dan Jumlah anak korban kekerasan yang melapor pada periode yang sama sebanyak 101 maka capaiannya 100%.

3. Urusan Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan mengampu 1 urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pangan, dan 2 urusan Pilihan yaitu Urusan Perikanan dan Kelautan, serta Urusan Pertanian. Dalam melaksanakan ketugasan dalam 3 urusan tersebut terdapat 1 program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan 11 program teknis non Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sebelas program teknis tersebut terbagi menjadi Urusan Pangan mengampu 5 program, Urusan Perikanan dan Kelautan mengampu 2 program, dan Urusan Pertanian (termasuk Peternakan dan Kehewanan) mengampu 5 program yang seluruhnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon 3. Selain itu, Dinas Pertanian dan Pangan memiliki enam sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian kinerja eselon 2, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	91,2	92,12
2.	Meningkatnya Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	85,29%	85,35%
3.	Meningkatnya Angka konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan	35,92 Kg/Kapita/Tahun	36.00 Kg/Kapita/Tahun
4.	Meningkatnya Persentase penurunan jumlah kasus	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit	14,29%	100%

	penyakit hewan menular strategis	hewan menular strategis		
5.	Meningkatnya Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	5,9%	6,42%
6.	Meningkatnya Reformasi Rirokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	AA

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta memiliki sasaran strategis berupa Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan, dengan target Tahun 2024 sebesar 91,2. Target tersebut telah terpenuhi dengan nilai realisasi sebesar 92,12. Skor angka konsumsi pangan didapat dari hasil survei secara mandiri terhadap angka konsumsi 9 kelompok komoditas pangan dalam satuan kkal pada 45 kelurahan di Kota Yogyakarta. Keberhasilan pencapaian target didukung oleh kooperasi dari masyarakat dalam mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Dinas. Selain itu, terdapat peningkatan konsumsi pangan dari 9 kelompok pangan yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak/lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur/buah dan lain-lain (aneka bumbu dan bahan minuman). Adapun kendala yang dihadapi yaitu perbedaan bulan pengambilan sampel Angka Konsumsi Pangan dapat berpengaruh pada konsumsi masyarakat yang diwawancarai, yang diatasi dengan pemilihan bulan untuk pengambilan sampel bukan saat bulan puasa atau mendekati HBKN.

Sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan target 2024 sebesar 85,29%. Target terpenuhi dengan nilai 85,35%. Pencapaian ini didorong dengan adanya koordinasi dan kerja sama dalam pengawasan pangan secara rutin antara Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan, BPPMHKP, dan DPKP DIY. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Angka konsumsi ikan memiliki target sebesar 35,92 Kg/Kapita/Tahun pada tahun 2024. Target tersebut terpenuhi dengan nilai 36.00 Kg/Kapita/Tahun yang didukung beberapa faktor meliputi ketersediaan ikan yang cukup da mudah dijangkau oleh masyarakat, akses pasar yang mudah, dan pembinaan serta pendampingan usaha oleh Dinas.

Sasaran strategis yang ke 4 yaitu Meningkatnya Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dengan target tahun 2024 sebesar 14.29%. Target tersebut tercapai dengan nilai yang melampaui, yaitu sebesar 100%. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kesehatan hewan dan penyakit zoonosis, adanya pelayanan terpadu, surveilans kasus gigitan hewan penular rabies, serta sterilisasi kucing menjadi faktor pendorong tingginya realisasi target. Sasaran strategis ke 5 adalah Meningkatnya Persentase kenaikan kelas kelompok tani dengan target tahun 2024 sebesar 5,90%.

Realisasinya melampaui nilai target yaitu 6,42%. Pencapaian terget didukung oleh pelaksanaan pendampingan dan penyuluhan untuk pengembangan pertania di Kota Yogyakarta, serta peran aktif petani yang mempermudah penyuluh dalam pelaksanaan pendampingan.

Dalam mencapai target program-program diatas, didukung juga dengan kegiatan dan subkegiatan yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon 4.

1. Urusan Pangan

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja (Program)	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Sub Kegiatan yang Menunjang
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	37.78%	37.78%	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan memiliki satu indikator dan satu subkegiatan yang mendukung. Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya memiliki output berupa Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia dengan target 10 unit. Target tersebut tercapai 100% dengan didukung oleh kegiatan Bimtek Pengembangan Kampung Pangan Lestari, Bimtek

Pengembangan Kampug Sayur, dan Bimtek Optimalisasi Rumah Bibit yang terlaksana dengan baik dengan dukungan dari penyuluh pertanian, pihak kemantren, pihak kelurahan dan kelompok tani yang secara aktif berpartisipasi dalam program tersebut disertai dengan pendampingan terhadap kelompok tani. Realisasi keuangan dari subkegiatan ini sebesar Rp 507,072.000 dari target Rp. 507.817.000 (99.85%).

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja (Program)	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Sub Kegiatan yang Menunjang
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Ketersediaan Energi	Angka Ketersediaan Energi	2616,9 kkal/kapita/ hari	2773,73 kkal/kapita/hari	Subkegiatan Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
						Subkegiatan Pemantauan Stok Pangan
						Subkegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
						Subkegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
		Terpenuhinya cadangan pangan Kota Yogyakarta	Persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	69.46%	54,21%	Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
						Subkegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
						Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
						Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja (Program)	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Sub Kegiatan yang Menunjang
						Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat didukung oleh 2 indikator. Indikator yang pertama Angka Ketersediaan Energi didukung oleh 1 kegiatan dan 4 subkegiatan. Subkegiatan Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal memiliki output berupa Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal dengan target 2 laporan dan tercapai 100%. Realisasi keuangan untuk subkeg ini sebesar Rp 443.666.500 (99.99%). Subkegiatan ini berisi kegiatan Festival Pangan Lokal, Gerakan mengkonsumsi protein, diskusi ketahanan pangan, serta aneka lomba ktahanan pangan. Subkegiatan Pemantauan Stok Pangan memiliki output Informasi Stok Pangan dengan target 1 dokumen dan tercapai 100%. Realisasi keuangannya sebesar Rp 11.704.000 (99.91). Pencapaian target kinerja dan keuangan tersebut didorong oleh terlaksananya pemantauan stok pangan setiap minggu dengan baik. Subkegiatan yang ketiga yaitu Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan yang memiliki output berupa Informasi Harga dan Pasokan Pangan dengan target 1 dokumen dan tercapai 100%. Adapun realisasi keuangannya sebesar Rp 6.752.000 (99.85%). Subkegiatan yang keempat yaitu Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang memiliki output berupa Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) dengan target 1 dokumen dan tercapai 100%. Adapun realisasi keuangannya sebesar Rp 107.606.000 (99.99%). Subkegiatan ini berisi kegiatan FGD Ketersediaan Pangan dan penyusunan dokumen NBM.

Indikator program yang kedua yaitu Persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah didukung oleh 2 kegiatan yang masing-masing memiliki 2 subkegiatan. Subkegiatan yang pertama yaitu Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal dengan output berupa Rencana Kebutuhan Pangan Lokal, target 1 dokumen tercapai 100%. Realisasi keuangannya sebesar Rp 10.070.000 (82.88%). Subkegiatan ini terlaksana dengan baik didukung oleh koordinasi dan kerja sama antara instansi terkait dan mitra terkait cadangan pangan Kota. Subkegiatan

selanjutnya adalah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan output berupa Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan target sebesar 18,3 ton.

Tetapi di tahun 2024 ini Pemerintah Kota Yogyakarta menghendaki agar cadangan pangan Kota Yogyakarta dilengkapi sesuai dengan target yaitu sebesar 120 ton. Dinas Pertanian dan Pangan mendapat tambahan dana untuk merealisasikan hal tersebut, sehingga total dana pengadaan cadangan pangan tahun 2024 sebesar Rp 660.550.000. Dalam proses pelaksanaannya, terdapat kendala terkait pihak ketiga yang bertugas membantu pengadaan dan pengelolaan padangan pangan, dimana audit internal pada pihak ketiga membuat mereka tidak mampu melaksanakan pengadaan beras di tahun tersebut. Kendala lain yaitu adanya kenaikan harga beras medium di atas HET, menunggu DPKP Provinsi membuat Pergub tentang tata kelola dan penyaluran beras dan jumlah CBPD terbaru berdasarkan Peraturan Bapanas No 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras. Realisasi keuangan subkegiatan ini sebesar Rp 1.150.000 (0.17%).

Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun memiliki output Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun yang targetnya adalah 1 dokumen dan tercapai 100%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 62.870.330 (99.94%). Kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyusunan dokumen pola pangan harapan yang terlaksana dengan baik karena koordinasi dan kerja sama dengan mitra penyedia berjalan dengan baik, disertai dengan ketersediaan data yang mendukung. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal memiliki output berupa Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan target 1 laporan dan tercapai 100%. Realisasi keuangan sebesar Rp 130.082.000 (100%). Subkegiatan ini berisi kegiatan Sosialisasi Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), Lomba B2SA Tingkat Kota, Lomba Landscape Sayur, Lomba Sayur Kategori Buah, dan Lomba Stand Festival Pangan Lokal.

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja (Program)	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Sub Kegiatan yang Menunjang
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2	Wilayah rawan pangan prioritas 2	3 wilayah	0 wilayah	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan didukung oleh 1 indikator dan 1 kegiatan dan 1 subkegiatan. Subkegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan memiliki output berupa Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan dengan target 1 dokumen dan terlaksana 100%. Adapun realisasi keuangannya sebesar Rp 109.466.250 (99.96%) . Aktivitas yang dilaksanakan yaitu penyusunan dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) yang terlaksanak dengan baik karena koordinasi dan kerja sama dengan mitra penyedia, disertai dengan ketersediaan data yang mendukung.

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja (Program)	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Sub Kegiatan yang Menunjang
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan asal tumbuhan	Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi	35.40%	35.40%	Subkegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
						Subkegiatan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
						Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
						Subkegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

Program Pengawasan Keamanan Pangan didukung oleh 1 indikator, 1 kegiatan, dan 4 subkegiatan. Subkegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota memiliki output Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan terget 1 dokumen dan terlaksana 100%. Realisasi keuangannya sebesar Rp 6.791.600 (99.99%). Capaian target tersebut didukung oleh koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak Pelaku Usaha PSAT, Toko, dan Retail Modern di Kota Yogyakarta. Subkegiatan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan memiliki output Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan, dengan target 1 dokumen tercapai 100%. Subkegiatan ini berisi kegiatan Bimtek Pengemasan produk PSAT dan Sosialisasi Registrasi Keamanan PSAT, dengan realisasi keuangan Rp 33.651.700 (93.86%).

Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota berisi kegiatan pengujian mutu pangan segar asal tumbuhan dan pengolahan pangan lokal. Outputnya berupa Informasi Harga dan Pasokan Pangan dengan target 1 dokumen yang terealisasi 100%. Realisasi keuangan Rp 151.807.500 (98.73%). Adapun subkegiatan terakhir adalah Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. Outputnya berupa Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan dengan target 1 dokumen tercapai 100%. Aktivitas yang dilaksanakan berupa Bimtek Olahan Pangan Lokal, Kampanye Makan Buah Nusantara, Pembinaan kepatuhan mutu pangan segar asal tumbuhan, Sosialisasi Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian, Workshop Peningkatan Kapasitas Petugas Pengambil Sampel, dan Pengawasan Mutu PSAT (Pangan Segar asal Tumbuhan) terhadap Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern. Realisasi keuangannya Rp 112.141.700 (99.77%).

2. Urusan Pertanahan

Sebagai pengampu urusan penataan ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) berupaya mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkesinambungan dan kinerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang.

Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2024
Urusan Penataan Ruang

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	83,89	85,79%
			Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	91,91%	92,37%

Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Indikator persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang terealisasi melebihi target yaitu sebesar 85,79% dari target 83,89% atau tercapai 102,27%. Kegiatan yang mendukung capaian tersebut yaitu:
   a. Penyediaan dokumen perencanaan dan rancangan peraturan tata ruang

      Dalam upaya pemenuhan aturan turunan RTRW dan RDTR yang telah ditetapkan sejak tahun 2021, pada tahun 2024 dilaksanakan penyusunan dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) serta penyusunan rancangan peraturan Wali Kota terkait RTBL dan mekanisme pemberian isentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta.
   b. Penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang

      Penelitian dan pengembangan dalam bentuk kegiatan penyusunan kajian dilaksanakan dalam rangka penyiapan bahan kebijakan bidang tata ruang. Pada tahun 2024 dilaksanakan penyusunan kajian-kajian yang substansinya menjadi bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan PKL dan penyediaan sistem informasi reklame di Kota Yogyakarta.
   c. Pembinaan tata ruang

      Pelaksanaan kegiatan pembinaan tata ruang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang di Kota Yogyakarta. Pembinaan tata ruang meliputi sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang bagi ASN dan masyarakat.

Selain itu, dilaksanakan kegiatan penyediaan dan pengembangan sistem informasi tata ruang melalui aplikasi Gatra Matra yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh informasi aturan pemanfaatan ruang di kota Yogyakarta sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Yogyakarta.

2. Indikator persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang terealisasi sebesar 92,37% dari target 91,91% atau tercapai 100,50%. Kegiatan yang mendukung capaian tersebut yaitu:
   a. Pengawasan tata ruang meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan pengawasan tata ruang, pengawasan khusus, dan pengawasan teknis.
   b. Pengendalian tata ruang Pengendalian tata ruang meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan audit tata ruang, pemberian insentif disinsentif bidang penataan ruang, dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dan pertanahan. Dari hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang, didapatkan nilai persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta tahun 2024 sebesar 85,26%. Hasil tersebut merupakan capaian sasaran ke-5 Pemerintah kota Yogyakarta yaitu Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang.
   c. Layanan pemanfaatan ruang, Layanan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan RTRW dan RDTR yang berlaku. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan layanan pemanfaatan ruang sebanyak 1926 layanan.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) juga mengampu urusan pertanahan yang dilaksanakan melalui 5 (lima) program.

Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2024
Urusan Pertanahan

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot	91,63%	92,31%
2.		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah	100 %	100 %
3.		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase permasalahan	100 %	100 %

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
			pertanahan yang tertangani sesuai SOP		
4.		Program Penatagunaan Tanah	Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP	100 %	100 %
5.		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten	86,74%	86,74%
			Persentase pengawasan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten	42,03%	49,57%

- Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dengan indikator persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah terealiasasi sesuai target yaitu sebesar 100% atau tercapai 100%.

  Capaian tersebut ditunjang oleh terlaksananya proses pengadaan tanah di tahun 2024 sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebanyak 2 lokasi yaitu 1 lokasi untuk pengadaan tanah untuk gedung serba guna kelurahan Panembahan (Kenekan) dan 1 lokasi untuk pengadaan tanah untuk RTHP Kelurahan Tegalrejo.
- Program Pengelolaan Tanah Kosong dengan indikator persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot, terealisasi melebihi target yaitu sebesar 92,31% dari target sebesar 91,63% atau tercapai 100,73%.

  Capaian tersebut termasuk dalam kategori sangat baik yang didukung oleh terselesaikannya pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot di tahun 2024 sebanyak 26 bidang tanah. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2043 telah dilaksanakan pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot sebanyak 960 bidang dari 1040 bidang tanah aset pemkot yang direncanakan.
- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sesuai SOP, terealisasi sesuai target sebesar 100%. Capaian tersebut didukung oleh terfasilitasinya permasalahan pertanahan di Kelurahan Giwangan.

- Program Penatagunaan Tanah dengan indikator persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP, terealisasi sesuai target sebesar 100%. Capaian tersebut berupa terlaksananya layanan penerbitan 14 rekomendasi pemanfaatan tanah negara.
- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
  Indikator persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terealisasi sesuai target sebesar 86,74%. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya pendaftaran pensertifikatan tanah kasultanan/kadipaten sebanyak 50 bidang tanah di tahun 2024 sehingga total telah terlaksana pendaftaran pensertifikatan tanah kasultanan/kadipaten sebanyak 785 dari 905 bidang tanah yang direncanakan.

3. Indikator persentase pengawasan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terealisasi sebesar 49,57% dari target sebesar 42,03% atau tercapai 117,94%. Capaian tersebut diperoleh dari terlaksananya monitoring dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta sebanyak 111 lokasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan berbasis pada data yang terdapat pada aplikasi INTAN TARU yang dikembangkan oleh DIY.

2. Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu satuan kerja pendukung urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam mendukung urusan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tiga Sasaran Strategis terdiri dari Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan, dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup dan didukung oleh tujuh program yang terdiri dari Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Pengelolaan Persampahan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III. 37
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Eselon II
Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	30.93%	59,48%
2	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	Capaian pengelolaan persampahan	99.60%	82.38%
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	B	A

No	Program	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 471.065.000,00	Rp 453.914.800,00	APBD-P 2024
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 3.227.945.910,00	Rp 3.184.685.246,00	APBD-P 2024
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 11.854.122.873,00	Rp 11.735.739.643,00	APBD-P 2024
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 357.301.300,00	Rp 354.729.523,00	APBD-P 2024
5.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 2.556.256.400,00	Rp 2.429.905.100,00	APBD-P 2024
6.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 71.077.598.217,00	Rp 65.845.950.621,00	APBD-P 2024
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 26.196.964.351,00	Rp 24.372.911.939,00	APBD-P 2024
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Rp 9.130.100.000,00	Rp 8.315.700.735,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY PERUBAHAN
		Rp 124.871.354.051,00	**Rp 116.693.537.607,00**	

Untuk mencapai target OPD tersebut di atas, maka didukung oleh 8 program dan 47 subkegiatan teknis yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai berikut**:**

1) **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Tabel III. 38
Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	50%	75%

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp. 357.600.000	Rp. 355.988.800	APBD -P
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Rp. 353.000.000	Rp. 344.658.000	

2) **Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Tabel III. 39
Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	75.50%	75.50%
		Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU	52.63%	53.51%

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Rp 205.086.200	Rp 203.614.516	APBD -P

Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 562.638.970	Rp. 560.664.135	APBD -P
Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Rp. 2.243.277.640	Rp. 2.242.746.390	APBD -P
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	Rp 216.943.100	Rp 177.660.205	APBD -P

1. Perjanjian Kinerja Eselon IV : Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Tabel III. 40.
Sub Kegiatan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran
1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 dokumen	3 dokumen	Rp.259.727.200,00

2. Perjanjian Kinerja Eselon IV: Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar

Tabel III. 41
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran
1	Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	Rp.562.638.970

Tabel III. 42
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	5 kegiatan	5 kegiatan	Rp.2.460.220.740

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup didukung oleh 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut mendukung indicator program Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP yang merupakan persentase jumlah dari 20% dari hasil pemantauan kualitas air dan 80% dari hasil pemantauan kualitas udara. Output dari subkegiatan ini adalah terealisasi 2 dokumen, yang terdiri dari dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), Laporan Uji Kualitas Air, dan Laporan Uji Kualitas Udara.
2. Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota mendukung indikator program Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan dengan realiasasi sebesar 100%. Lima dokumen meliputi laporan pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan, panduan mutu, prosedur pelaksanaan dan instruksi kerja. Jumlah parameter standar terakreditasi sebanyak 45 parameter. Terdapat juga alat AQMS (Air Quality Monitoring System) untuk memantau kualitas udara ambien secara real time.

   Laboratorium pengujian kualitas lingkungan milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah memperoleh akreditasi untuk pengujian kualitas air dan meraih SNI ISO/IEC 17025:2017, dan pada bulan Desember 2022 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan hidup mendapatkan sertifikat dari Kementrian Lingkungan Hidup sebagai Laboratorium Lingkungan dengan Nomor Registrasi: 00212/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar mendukung Indikator Program Persentase Kebersihan Sungai yang Terpelihara yang merupakan perbandingan antara Panjang sungai yang kebersihannya terjaga dengan Panjang sungai di Kota Yogyakarta. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar dengan realisasi 4 dokumen yang merupakan Laporan Akhir

Kegiatan Pembersihan 4 Sungai yang terdiri dari Sungai Gajah Wong, Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Manunggal.

3) **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

Tabel III. 43
Perjanjian Kinerja Eselon III

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	23,343%	23,351%

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 4.097.989.935,00	Rp 4.070.516.604,00	APBD -P
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Rp 7.756.132.938,00	Rp 7.665.223.039,00	APBD -P

1. Perjanjian Kinerja Eselon IV: Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tabel III. 44
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

No	Sasaran kegiatan	target	realisasi	Anggaran
1	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,86 Ha	2,86 Ha	Rp.4.097.989.935,00

2. Perjanjian Kinerja Eselon IV: Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Tabel III. 45
Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

No	Sasaran kegiatan	target	realisasi	Anggaran
1	Terkelolanya Taman Keaneka Ragaman Hayati (KEHATI) Lainnya	2 unit	2 unit	Rp.7.756.132.938,00

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) didukung oleh 2 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendukung Indikator Program Persentase Ruang Terbuka Hijau, yang merupakan perbandingan Luas Ruang Terbuka Hijau dengan luas Kota Yogyakarta. Tingkat capaian sebesar 100,03% dengan Ruang Terbuka Hijau Privat seluas 5.017.419 m2 sedangkan Ruang Terbuka Hijau Publik seluas 2.646.178 m2 dengan luas kota Yogyakarta 32.819.062,5 m2. Target ini sudah bisa tercapai dengan adanya pembangungan RTHP dengan 4 lokasi baru, antara lain RTHP Jopraban (800 m2), RTHP Kricak RW 04 (Taman Jatimulyo) dengan luasan 200 m2, RTHP Bausasran (RW 09)

seluas 300 m2, RTHP Sorosutan (RW 04) seluas 332 m2, RTHP Sosromenduran (RW 14) seluas 452 m2, dan RTHP Kampung Mendungan RW 11 Giwangan. Luasannya 350 m2.

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya juga mendukung Indikator Program Persentase Ruang Terbuka Hijau, yang merupakan perbandingan Luas Ruang Terbuka Hijau dengan luas Kota Yogyakarta.

Penambahan luasan RTH Publik yang dikelola dinas selain berasal dari pembangunan RTHP Permukiman, juga berasal dari penanaman pohon perindang yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Namun pada jalur hijau yang terdiri dari taman dan perindang jalan baik di devider, di tepi jalan, maupun di pulau jalan masih memiliki luasan yang sama dikarenakan pengembangan luasan di area-area tersebut sudah sangat sulit dilakukan sehingga fokus kegiatannya adalah pemeliharaan rutin untuk meningkatkan kualitasnya.

4) **Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**

Tabel III. 46
Perjanjian Kinerja Eselon III

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan	77.92%	78.17%
2	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha, dan/atau Kegiatan yang lzin Lingkungan dan lzin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	156 dokumen	279 Dokumen
3	Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	- Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	50% 66,67%	75% 100%
4	Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/Kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 dokumen	2 dokumen
5	T erlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	2 dokumen	3 dokumen

6	Terselenggaranya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	75,50%	75,50%
7	Terselenggaranya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	a.Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota b.Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	320.400 M2 5 kegiatan	320.400 M2 5 kegiatan

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	302.660.300	300.959.000	APBD -P
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	54.641.000	53.770.523	APBD -P

1. Perjanjian Kinerja Eselon IV: Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Tabel III. 47.
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran
1	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	156 Dokumen	279 Dokumen	302,660,300

2. Perjanjian Kinerja Eselon IV: Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tabel III. 48
Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Sasaran kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran
1	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	32 Dokumen	34 Dokumen	54.641.000

3. Perjanjian Kinerja Eselon IV: Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut

Tabel III. 49
Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut

No	Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran
1	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 dokumen	3 dokumen	205.086.200

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) didukung oleh 3 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang mendukung dan berkontribusi terhadap Indikator Program Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan yang merupakan Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Rincian Teknis penyimpanan LB3, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan dikali 100%. Tingkat capaian kinerja sebesar 78,17% atau 5.520 usaha yang memiliki dokumen lingkungan dari total sebanyak 7.088 usaha di kota. Untuk tahun 2024 jumlah dokumen lingkungan yang diverifikasi sebanyak 279 dokumen, dengan capaian realisasi fisik 100,33%.

b) Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendukung Indikator Program Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan perbandingan antara Jumlah pelaporan swapantau dan pengawasan usaha dengan Jumlah total usaha yang memiliki izin lingkungan, dengan capaian 30,10% atau 348 jumlah perusahaan yang taat dari 1.158 jumlah perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pemantauan pengelolaan lingkungan perusahaan sebanyak 34

perusahaan. Capaian tersebut didukung oleh penambahan jumlah personil pengawas lingkungan hidup, dan juga terdapat aplikasi SILALING yang mempermudah pemantauan secara tidak langsung/swapantau.

5) **Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**

Tabel III. 50

Perjanjian Kinerja Eselon III

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	73.23%	70,00%
		Persentase Kampung ProKlim	62.13%	65,09%
		Persentase Bank sampah yang aktif	60.00%	73,92%

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	2.556.256.400	2.429.905.100	APBD -P

Perjanjian Kinerja Eselon IV: Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Tabel III. 51

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran
1	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	15 kelompok	15 kelompok	Rp. 1,919,529,900

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Program Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu:

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan mendukung tiga indikator program yaitu Persentase Kampung ProKlim, Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata, serta Persentase Bank Sampah yang Aktif. Persentase Kampung ProKlim memiliki nilai capaian

indikator 65,09%. Capaian ini berdasarkan realisasi tahun 2024, dimana Jumlah Kampung ProKlim bertambah 5 kampung dari tahun 2023 akumulatif kampung berwawasan lingkungan sebanyak 105 kampung, sehingga jumlah kampung ProKlim tahun 2024 sebanyak 110 kampung dan Jumlah kampung di Kota Yogyakarta berjumlah 169 kampung, jumlah tersebut tertuang di dalam Peraturan Walikota nomor 25 tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan Kampung. Indikator Tingkat penilaian realisasi kinerja pada indikator program Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata terealisasi sebesar 70,00% dari target jumlah sekolah berwawasan lingkungan dan sekolah adiwiyata dengan target 73,23% sehingga capaian yang diperoleh yaitu 95,59%. Seleksi Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata tahun 2024 diawali dengan penjaringan minat sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta. Proses seleksi dilakukan mulai tahap verifikasi administrasi hingga tahap verifikasi lapangan. Hasil yang didapatkan yakni sebanyak 1 sekolah dinilai layak ditetapkan sebagai Sekolah Berwawasan Lingkungan. Perkembangan jumlah Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata dari tahun 2018-2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan dan setiap tahunnya mampu mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 terdapat 1 sekolah yang mencapai Sekolah Berwawasan Lingkungan dikarenakan sudah terdapat banyak sekolah yang mengalami peningkatan status ke yang lebih tinggi seperti Adiwiyata Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri. Adapun pada tahun 2024 terdapat beberapa sekolah yang berhasil meraih Adiwiyata meliputi Adiwiyata Kota 10 sekolah, Adiwiyata Provinsi 8 sekolah, Adiwiyata Nasional 1 sekolah, dan Adiwiyata Mandiri 1 sekolah. Indikator ketiga adalah Persentase Bank Sampah yang Aktif dengan nilai capaian sebesar 73,92%. Capaian ini berdasarkan realisasi tahun 2024, dengan Jumlah bank sampah baru sebanyak 5, sedangkan total jumlah bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta sebanyak 694 Bank Sampah dengan berbagai Kategori. Adapun Kategori bank sampah di Kota Yogyakarta yakni Pembina, Inovatif, Reguler dan Pembinaan. Dengan jumlah rincian sebagai berikut : Bank Sampah Kategori Pembina 18, Bank Sampah Kategori Inovatif 32, Bank Sampah Kategori Reguler 458, Bank Sampah Kategori Pembinaan 181.

6) **Program Pengelolaan Persampahan**

Tabel III. 52

Perjanjian Kinerja Eselon III

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkurangi	16.20%	21.96%
		Persentase sampah yang tertangani	83.40%	60.42%

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp. 1.393.930.000	Rp. 1.262.522.811	APBD -P
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Rp. 16.838.891.654	Rp. 16.720.720.605	APBD -P
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Rp. 27.780.000	Rp. 20.655.000	APBD -P
Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Rp. 96.666.500	Rp. 87.407.800	APBD -P
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Rp. 2.967.886.725	Rp. 1.922.899.475	APBD -P
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp. 38.523.203.376	Rp. 35.441.839.520	APBD -P
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Rp. 13.590.750	Rp. 9.460.750	APBD -P
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional	Rp. 11.215.649.212	Rp. 10.380.444.660	

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pengelolaan Persampahan didukung oleh 8 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan mendukung Indikator Program Persentase Sampah yang Terkurangi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Target Pendapatan tahun 2024 sebesar Rp.3.907.005.600 dengan realisasi pendapatan Rp 2.962.776.500 sehingga capaiannya sebesar 75,83%. Kendala yang dihadapi adalah terjadinya pembatasan kuota pembuangan sampah ke TPA Piyungan sehingga warga enggan untuk membayar retribusi sampah, selain itu juga warga beralasan bahwa masyarakat merasa tidak dilayani oleh Dinas Lingkungan Hidup karena sudah berlangganan dengan penggerobak/swasta.

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan merupakan sub kegiatan yang mendukung Indikator Program Persentase Sampah yang Tertangani dengan indikator kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di

Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada. Adapun capaian realisasi kinerja 100% dengan jumlah dokumen yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Belanja Jasa Kebersihan Nitikan
2. Belanja jasa pembersihan transfer depo / landasan container /TPS
3. Belanja Jasa Supervisor Tenaga Kebersihan
4. Belanja Jasa Tenaga Pengangkutan Sampah Kawasan Sumbu FIlosofi
5. Belanja Jasa Tenaga Penyapuan Jalan
6. Belanja Jasa Tenaga Penyapuan Jalan Kawasan Gading, Kotabaru, Kotagede, dan Puro Pakualaman
7. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pembersih Sampah
8. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pengelolaan Sampah
9. Belanja Jasa Tenaga Teknis (tenaga) pengangkutan sampah depo
10. Belanja Jasa Tenaga Teknis (tenaga) pengangkutan sampah TPS
11. Belanja Tenaga Kerja (sopir) pengangkutan sampah
12. Belanja jasa tenaga pengangkutan sampah kawaan sumbu filosofi

c) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota merupakan sub kegiatan yang mendukung Indikator Program Persentase Sampah yang Terkurangi, dengan indikator kegiatan jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota. Diperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan sebanyak 1 dokumen. Telah dilaksanakan penyusunan laporan pengelolaan sampah sesuai SIPSN dan penyusunan draft Raperwal insentif disinsentif pengelolaan sampah.

d) Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota, merupakan sub kegiatan yang mendukung Indikator Program Persentase Sampah yang Terkurangi, dengan indikator kegiatan jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota dengan capaian kinerja tahun 2024 ini sebesar 100%.

e) Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah merupakan sub kegiatan yang mendukung Indikator Program Persentase Sampah yang Tertangani, yang dilakukan dengan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana

pengelolaan persampahan, mulai dari moda angkutan sampah, perbaikan TPS/depo/container maupun upaya peningkatan ke alat-alat pengelolaan sampah modern. Pada tahun 2024 ini Dinas Lingkungan Hidup Pengadaan sarana/Prasarana Pengelolaan berupa sampah amroll: 6 unit compactor 20 unit, dump truck 27 unit, road sweeper 2 unit, pick up angkutan 3 unit, pick up TPS3R 2 unit, Roda 3 penyapuan (DAK) 4 unit, dan Roda 3 penyapuan (stainless) 8 unit. Dengan indikator kegiatan Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik, dengan capaian realisasi kinerja 100%.

f) Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan merupakan sub kegiatan yang mendukung Indikator Program Persentase Sampah yang Tertangani dengan indikator kegiatan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. Dengan target 123.181 ton/hari, dan realiasasi 90,374 ton/hari sehingga capaian realisasi kinerjanya 73.37%. Data Realisasi diambil dari data sampah terkelola jakstrada 2024 semester 1. Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja dengan meningkatkan kapasitas Unit Pengolahan Sampah (UPS) melalui penggunaan mesin pengolahan sampah dan penambahan jumlah tenaga kerja dan jam kerja.

g) Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah merupakan sub kegiatan yang mendukung Indikator Program Persentase Sampah yang Terkurangi, dengan indikator kegiatan Jumlah sampah yang terdaur ulang. Capaian realisasi kinerja untuk sub kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 15.000 ton.

h) Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional mendukung Indikator Program Persentase Sampah yang Tertangani, jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional dengan capaian sebesar 50.35%. Capaian tersebut belum maksimal dikarenakan diberlakukannya pembatasan kuota pengangkutan sampah ke TPA Piyungan sehingga terjadi penumpukan sampah di TPS/Depo dan terbatasnya lahan di kota Yogyakarta yang dapat digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya target tersebut seperti meningkatkan kapasitas unit pengolahan sampah (UPS), melakukan kerjasama dengan mitra pengolahan sampah, dan melakukan pengolahan sampah dengan mesin incenerator.

3. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TABEL III. 53 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Capaian	
				Realisasi	%
2	3	4	5	6	7
Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan	95,80%	Rerata Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dikali 100	96,63%	100,86
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	AA (91,548)	101,72

Sumber data : Data Kinerja Triwulan IV Tahun 2024

Pada tahun 2024, indikator indeks tertib administrasi kependudukan mencapai 96,63 persen dari target sebesar 95,80 persen yang berarti kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebagai indikator tertib adminduk tercapai 96,63 persen dari warga Kota Yogyakarta atau tercapai 100,86 persen dari yang ditargetkan. Sesuai dengan skala peringkat kerja maka capaian atas tertib administrasi kependudukan tahun 2024 termasuk dalam kriteria sangat baik. Berdasarkan tabel 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.3 berikut.

TABEL III. 54 DATA PENGUKURAN KINERJA MASING-MASING PROGRAM TAHUN 2024

Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Capaian	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	91,83%	Rerata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP-El, KIA)	93,37%	101,68
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	99,77%	Rerata persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	99,89%	100,11

Sumber data : Data Kinerja Triwulan IV Tahun 2024

Adapun dari masing-masing formula indikator sasaran dibuat rumus pengukurannya. Rumus perhitungan dan hasil perhitungan masing formula indikator serta tingkat capaian terhadap target dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL III. 55 PERHITUNGAN KINERJA BERDASARKAN FORMULASI INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024

No	Nama Indikator dan Target 2024	Rumus Pengukuran	Perhitungan Capaian	Capaian	Tingkat capaian sasaran terhadap target 2024
1	Persentase Kepemilikan Dokumen KTP-El = 99,20%	$= \frac{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk Wajib KTP}} x\ 100\%$	321.145x 100% 322.703 **= 99,52%**	$\frac{99,52 + 87,23}{2}$ =93,37%	**(50 % x 93,37) + (50% x 99,89) =96,63%**
2	Persentase Kepemilikan Dokumen KIA = 84,46%	$= \frac{\text{Jumlah anak } 0-17 \text{ th kurang dari 1 hari sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia } 0-17 \text{ tahun}} x\ 100\%$	80.283x 100% 92.041 **= 87,23%**		
3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran = 99,10%	$= \frac{\sum \text{ anak } 0-18 \text{ th } kurang\ 1\ hari \text{ sudah memiliki akta kelaahiran}}{\text{Jumlah anak usia } 0-18 \text{ tahun kurang 1 hari}} x\ 1$	98.259x 100% 98.702 **= 99,55%**	$\frac{99,55+100+100+100}{4}$ =99,89	
4	Persentase akta kematian yang diterbitkan = 100%	$= \frac{\sum \text{ Kutipan Kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah } peristiwa \text{ Kematian yang dilaporkan}} x\ 100\%$	3.991 x 100% 3.991 **= 100%**		
	Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan = 100%	$= \frac{\sum \text{ akta perkawinan yang diterbitkan dari pasangan yang perkawinan}}{\text{Jumlah penduduk dengan status kawin yang dilaporkan}}$	273 x 100% 273 **= 100%**		
	Persentase akta perceraian yang diterbitkan = 100%	$= \frac{\sum \textbf{ Kutipan Perceraian yang diterbitkan}}{\textbf{Jumlah Perceraian yang dilaporkan}} \boldsymbol{x\ 100\%}$	68 x 100% 68 = 100%		

Sumber: PDAK Dindukcapil, tahun 2024

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa tertib administrasi kependudukan di Kota Yogyakarta mencapai 96,63% hal itu ditinjau dari rerata persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk yang terdiri dari kepemilikan KTP dan KIA penduduk kota Yogyakarta dengan

penerbitan dokumen pencatatan sipil yang terdiri dari kepemilikan dokumen dari permohonan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian. Bila capaian tersebut dibandingkan dengan target yang harus dicapai sebesar 95,80%, maka persentase capaian 100,86% atau lebih dari 100% artinya capaian tertib administrasi kependudukan telah berhasil. Berikut Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja per Program dengan membandingkan target keuangan maupun fisik dan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah :

Faktor Penghambat Atau Permasalahan Yang Dihadapi **:**

1) Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
2) Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Dindukcapil Kota Yogyakarta;
3) Dinamika pindah datang penduduk dan perkembangan usia sehingga tetap perlu dilakukan sosialisasi akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
4) Kurang Sumber Daya Manusia terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola
5) Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK).
6) Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat dan focus keamanan data serta dihapusnya data kependudukan lokal sejak 2022 di masing masing Dukcapil daerah masih menjadi kendala dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan dalam pemanfaatan data. Sehingga memperlambat proses pengelolaan data dalam menyusun laporan, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kota Yogyakarta maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon. Demikian juga Pengelolaan Informasi Adminduk yang bersifat spesifik harus dikirimkan secara tertulis ke Ditjen Dukcapil sehingga membutuhkan waktu lama
7) Hambatan dalam pencapaian target IKD yaitu :

a. Adanya masyarakat yang berkeberatan untuk install IKD karena akan membebani kapasitas HP
b. Adanya masyarakat yang tidak memiliki gadget (HP) yang sesuai spesifikasi kebutuhan IKD
c. Implementasi pemanfaatan IKD belum banyak dirasakan masyarakat
d. Adanya kekhawatiran masyarakat akan keamanan data pribadi
e. Banyaknya pelayanan IKD didominasi penduduk luar Kota Yogyakarta

Faktor Penunjang Keberhasilan :

Telah dilaksanakan upaya-upaya meningkatkan kemudahan akses layanan adminduk / peningkatan pelayanan publik melalui upaya:

1. Adanya perbaikan dalam sarana prasarana pelayanan dengan ruang layanan yang representatif;
2. Adanya penambahan armada jemput bola berupa mobil listrik dan seperangkat alat perekaman KTP-El khususnya untuk lokasi yang susah diakses karena jalan yang sempit;
3. Koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder telah berjalan baik;
4. Adanya komitmen SDM yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik;
5. Adanya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu;
6. adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Dindukcapil;
7. Adanya perwal pelimpahan kewenangan di kemantren sudah berjalan;
8. Tersedianya mesin ADM di 8 titik lokasi yg memudahkan masyarakat mencetak dokumen secara mandiri (Mall Pelayanan Publik, UPT Pasty, UPT Taman Budaya, Dinas Dukcapil, Kemantren Mergangsan, Kemantren Jetis, Kemantren Wirobrajan, Kemantren Danurejan);
9. Dilakukan inovasi berupa layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket yaitu :
    a. Layanan Pungkasi (Pisan Pengurusan Kantenan Statusipun) yaitu layanan terintegrasi peningkatan efektivitas pemberian dokumen administrasi kependudukan pasca perceraian, yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama.
    b. Layanan Mantul Tenan (Manten Anyar Entuk Telu Tuntas dalam Satu Layanan) yaitu layanan akta perkawinan, KK dan KTP El langsung diberikan oleh Petugas setelah permohonan melaksanakan pernikahan di Gereja.

c. Layanan Kado Ananda yaitu layanan 3 in 1 akta kelahiran, KK dan Kartu Identitas Anak setelah Ibu melahirkan di Rumah sakit. Tiga dokumen langsung diberikan di Rumah Sakit
d. Layanan 3 in 1 Kematian (SURAT LAYON) yaitu akta kematian, KK dan KTP El Janda/Duda yang diberikan petugas kepada ahli waris langsung pada saat Upacara Pemakaman
e. Layanan Mantap (Manten Anyar Tercatat Dapat Empat) yaitu layanan buku nikah, KK dan KTP El menjadi satu paket langsung diberikan oleh Petugas setelah permohonan melaksanakan pernikahan di KUA
f. Layanan Pakdul Pindat, yaitu paket dokumen lengkap untuk pelayanan pindah datang berupa KK, KTP dan KIA
g. Up date Data Perkawinan melalui WA dan JSS
h. Pendekatan pelayanan dengan cara jemput bola rekam KTP-El yaitu Yaitu layanan jemput bola rekam KTP el sehingga penduduk tidak perlu datang ke Dukcapil. Jemput bola dilaksanakan di berbagai tempat seperti sekolah, LAPAS, Panti-Panti, Sekolah Luar Biasa, lembaga pemasyarakatan yang terkena kasus hukum, dan dari rumah ke rumah melalui kegiatan mobile KTP elektronik khusus bagi lansia dan penyandang keterbatasan fisik yaitu difabel dan sakit, serta warga ODGJ keterbatasan mental.
i. Melaksanakan layanan drive thru yaitu layanan cetak KTP El karena hilang atau rusak, dimana pemohon tanpa turun dari kendaraan dilayani dengan cepat +- 5 menit.
j. Dalam pelayanan daring, seluruh dokumen kependudukan (KK, Akta-akta catatan sipil, surat pindah penduduk) disampaikan ke pemohon dalam bentuk file dokumen melalui e-mail. Adapun untuk KIA disampaikan ke pemohon melalui jasa pos oleh Mall Pelayanan Publik atau diambil langsung di Mall Pelayanan Publik.

4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Untuk Mewujudkan Kota Yogyakarta yang Good Governance, Clean Government, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum maka dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta perlu untuk dilakukan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta memiliki program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang terdapat pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel revisi perubahan perjanjian kinerja administrator setara eselon III tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategi kesejahteraan rakyat.	89%

Terhadap indikator Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategi kesejahteraan rakyat. Pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan target 89%, Maka Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta melaksanakan pengukuran monitoring dan evaluasi kebijakan terhadap OPD mitra dari total pekerjaan yang harus selesai sesuai target. Dan, Indikator ini digunakan untuk melihat apakah cakupan implementasi kebijakan sudah memenuhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bagian Kessejahteraan Rakyat.

Untuk menindaklanjuti target sasaran isu strategis pada Bagian Kesejahteraan Rakyat , yang sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Isu Strategis dan Permasalahan Strategis Di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Yakni adapun permasalahan tersebut adalah :

1. Belum optimalnya penanganan sunting di wilayah; dan
2. Perubahan peraturan dari pemerintah pusat terkait bentuk kelembagaan di kelurahan.

Dalam hal ini Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta, telah menyusun untuk mengatasi permasalahan isu strategis tersebut yaitu dengan :

1. Telah selesai menyusun Keputusan Walikota Nomor 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Fokus Penurunan Stunting Tahun 2025;
2. Telah selesai menyusun Peraturan Walikota tentang Pedagang Kaki Lima Tahun 2024; dan
3. Dalam proses penyusunan Draft Rancangan Peraturan Walikota tentang Posyandu.

Kemudian berdasarkan Peraturan Walikota No 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakian Rakyat Daerah pada Lampiran I , bahwa Tugas pokok dan fungsi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan monitoring evaluasi pada pelaksanaan kebijakan Daerah, serta pelaksanaan dalam pembinaan administrasi di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran isu strategis Bagian Kesejahteraan Rakyat dan indikator Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, juga didukung oleh 3 (tiga) Kelompok Tim kerja yakni :

a. Tim Kerja Bina Mental
b. Tim Kerja Kesejahteraan Sosial
c. Tim Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

1. Tim Kerja Bina Mental

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual adalah sebesar Rp. 3.114.578.000,00 dan sudah terealisasi sebanyak Rp 3.111.010.000,00 pada prosentase capaian sampai dengan 99,89%.

Adapun hambatan yang muncul pada Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual ,ditemukannya peraturan dari Pusat terkait kegiatan haji, disampaikan ke daerah terkadang lama. Sehingga harus menunggu lebih lanjut.

Maka dalam penyelesaian permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan yaitu dengan Berkoordinasi dengan Pusat terkait Informasi Peraturan lebih lanjut, dan tetap melaksanakannya dengan tepat waktu.

2. Tim Kerja Kesejahteraan Sosial

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja Tim Kerja (Output Tim Kerja)	Target Perubahan
•	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial adalah sebesar Rp. 220.480.000,00 dan sudah terealisasi sebanyak Rp 214.505.500,00 pada prosentase capaian sampai dengan 97,29%.

Adapun hambatan yang muncul pada Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial adalah :

1. Kurang optimalnya berkoordinasi dengan mitra OPD, dikarenakan keterbatasan waktu masing-masing pihak;
2. Tidak lengkapnya data yang diperoleh dan pada metadata implementasi kebijakan sehingga pada saat merumuskan amanat kebijakan kurang tepat sasaran.

Kemudian dalam penyelesaian permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan adalah :

1) Koordinasi yang berkelanjutan dengan OPD mitra terkait yang mencakup Implementasi Kebijakan pada Bagian Kesra.
2) Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, dan bekerjasama dengan SDM Subbag lain, serta Penyediaan Tenaga Teknis untuk membantu dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.

Dengan demikian, pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan dan berjalan secara maksimal.

3. Tim Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja Tim Kerja (*Output* Tim Kerja)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.	4 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat adalah sebesar Rp. 301.811.000,00 dan sudah terealisasi sebanyak Rp 298.579.718,00 pada prosentase capaian sampai dengan 98,93%.

Dalam Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat selama ini, sudah berjalan sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan secara optimal. Karena sudah sesuai dengan tata kala dan target per triwulan yang direncanakan.
Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksaan kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik dan optimal. Hal tersebut tidak lepas dari komitmen dan upaya-upaya perbaikan dalam mengatasi Sasaran Isu Strategis Bagian Kesejahteraan Rakyat dimana telah dilakukan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Isu Strategis dan Permasalahan Strategis Di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024, Dokumen Revisi Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Tugas Pokok dan Fungsi didalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakian Rakyat Daerah.

Diharapkan dari hasil yang telah dicapai tersebut Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, dapat memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dan sinergitas komitmen antara Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, dengan OPD mitra, dan Masyarakat.

2) Kemantren Tegalrejo

Kemantren Tegalrejo sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan Sasaran Strategis berupa tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo yang dituangkan ke dalam Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Kemantren Tegalrejo Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	389
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	B

Tercapainya sasaran strategis tersebut didukung oleh program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator setara eselon III sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Tegalrejo meningkat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	83,50
2	Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Tegalrejo	Angka Swadaya Masyarakat Total	Rp. 2.406.134.643
3	Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Tegalrejo	Jumlah Pelanggaran Perda	90
4	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Tegalrejo memiliki 4 (empat) sasaran program yaitu Kepuasan Layanan Masyarakat di Kemantren Tegalrejo Meningkat dengan indikator program Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dengan target 83,50 telah terealisasi 85,30. Selanjutnya sasaran program Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Tegalrejo dengan indikator program Angka Swadaya Masyarakat Total dengan target Rp. 2.406.134.643 telah terealisasi sebesar Rp. 2.591.762.000 (107,71%). Selanjutnya sasaran program Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Tegalrejo dengan indikator Jumlah Pelanggaran Perda dengan target 90 telah terealisasi 87 (103.33%), dan sasaran program Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi dengan target 100% telah terealisasi 100%

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, didukung oleh kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan adalah sebesar Rp 69.454.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 67.729.000,00 atau 97,52%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Sasaran sub kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat. Dalam pelaksanaan sub kegiatan tersebut Kemantren Tegalrejo dapat melaksanakan dengan lancer sesuai rencana target dan terkait dengan kendala mengenai Survei Kepuasan Masyarakat tidak memiliki kendala apapun. Adapun Upaya untuk meningkatkan hasil Nilai Survei Kepuasan Masyarakat perlu adanya update kebijakan dan disampaikan ke Masyarakat maupun pegawai internal Kemantren Tegalrejo.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, didukung oleh Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Anggaran perubahan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.343.473.975,- dan terealisasi Rp. 5.207.409.853,- atau 97,45%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3. Evaluasi Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.

Sasaran sub kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Angka Swadaya Masyarakat Total. Adapun kendala yaitu Adanya Masyarakat ataupun Lembaga yang belum melaporkan swadaya di kelurahan. Upaya Kemantren Tegalrejo dalam mengatasi permasalahan yaitu menyampaikan informasi swadaya saat pertemuan-pertemuan dengan Masyarakat.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung oleh kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Anggaran perubahan untuk pelaksanaan kegiatan adalah sebesar Rp. 30.631.250 dan terealisasi Rp 24.220.000 atau 79,07%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sasaran sub kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Jumlah Pelanggaran Perda. Dalam pelaksanaannya, Kemantren Tegalrejo mengalami kendala karena belum adanya sosialisasi regulasi baru mengenai PBG, keterbatasan personal yang ada di lapangan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi perijinan, kurangnya pemahaman penggunaan teknologi digital masyarakat dan masih terjadi pelanggaran IMB serta PKL di akhir tahun.

Upaya Kemantren Tegalrejo dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memfasilitasi berupa sosialisasi mengenai kebijakan PBG serta melakukan patroli ke wilayah secara berkala, melakukan koordinasi dengan dinas pengampu terkait temuan kasus untuk tindak lanjut.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Anggaran perubahan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 83.719.625,00 dan terealisasi Rp 83.719.625,00 atau 100,00%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sasaran sub kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi. Dalam pelaksanaannya, Kemantren Tegalrejo permasalahan dan potensi sudah di koordinasikan dalam Upaya penyelesaian ataupun pencegahan dengan melibatkan forkompimtren dan tokoh Masyarakat serta dapat bersinerhi dengan Lembaga kemasyarakatan yang ada.

3) Kemantren Jetis

Kemantren Jetis sebagai perangkat daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis yang dituangkan ke dalam tabel perubahan perjanjian kinerja Kemantren Jetis tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	404

Tercapainya sasaran strategis tersebut didukung oleh program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator setara eselon III sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Jetis meningkat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	88,2
2	Pelanggaran Perda di Kemantren Jetis menurun	Jumlah Pelanggaran Perda	150
3	Swadaya Masyarakat Kemantren Jetis meningkat	Angka Swadaya Murni	Rp 935.773.000

4	Presentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi	12 (100%)

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Jetis memiliki 4 (empat) sasaran program yaitu kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Jetis meningkat dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat dengan target 88,2 telah terealisasi 88,23 (100,03%), selanjutnya sasaran program pelanggaran Perda di Kemantren Jetis menurun dengan indikator jumlah pelanggaran Perda menurun dengan target 150 telah terealisasi 56 (162,67%), sasaran program swadaya masyarakat Kemantren Jetis meningkat dengan indikator program angka Swadaya Murni dengan target Rp 935.773.000,- telah terealisasi sebesar Rp 1.277.190.556,- (136,49%). Dan sasaran program persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi dengan indikator program jumlah permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi dengan target 12 telah terealisasi sebanyak 12 (100%).

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Jetis meningkat, didukung oleh kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi dengan perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha, Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan, Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertical yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Jetis	a. Perencanaan Monev Pembangunan Wilayah Terintegrasi	3 Kelurahan

2	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Operasional Pelayanan yang Terkait Dengan Perizinan Video inovasi Kemantren	12 bulan 2 Kali
3	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Operasional Pelayanan Administasi Terpadu Kemantren (Paten) Forum Konsultasi Publik Sosialisasi JSS Koordinasi Website OPD	12 Bulan 1 Kegiatan 3 Kali 4 Kali

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp 115.783.500,- dan terealisasi sebesar Rp 115.783.500,- atau (100 %). Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertical yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Jetis sebesar Rp 73.596.000,-
2. Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan non usaha sebesar Rp 13.444.500,-
3. Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan sebesar Rp 28.743.000,-

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sebagaimana disebutkan bahwa indikator program tersebut adalah nilai survey kepuasan masyarakat dengan target 88,2 dan realisasi 88,23 hal ini didukung koordinasi yang aktif dengan kader gisa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, adanya mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) online 24 jam dan inovasi PUMA untuk semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta melakukan pendampingan petugas kemantren dan kelurahan dalam pelayanan berbasis online.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program pelanggaran perda di Kemantren Jetis menurun, didukung oleh sub kegiatan Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-

undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Operasi Ketertiban Masyarakat Evaluasi Pelanggaran Perda Sosialisasi Kapasitas Linmas Frekuensi Pengamanan Masyarakat (PAM)	12 bulan 4 Kali 1 Kali 4 Kali

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp 84.040.300,- dan terealisasi Rp 84.040.300,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan Perda dan Perkada dst.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu jumlah pelanggaran perda dengan target 150 kasus dan terealisasi 56 kasus, hal ini didukung dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang sangat baik antara Jawatan Keamanan, BKO, TNI dan Polri serta Trantib kelurahan dan komunitas masyarakat serta adanya patroli rutin yang dilakukan setiap minggu bersama BKO dan linmas. Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program swadaya masyarakat Kemantren Jetis meningkat, didukung oleh sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pember dayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, sub kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan, kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Bumijo, Cokrodiningratan, Gowongan) dengan sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasrana Kelurahan (Bumijo, Cokrodiningratan, Gowongan), Pemberdayaan Kelurahan (Bumijo, Cokrodiningratan, Gowongan), Sub kegiatan Evaluasi Kelurahan, Sub kegiatan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan,

Sub kegiatan fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sub kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, Sub Kegiatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan

Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dan Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp 4.209.978.647,- dan terealisasi Rp 4.119.756.850,- atau 97,86%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Bumijo
2. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Cokrodiningratan
3. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Gowongan
4. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo
5. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan
6. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan
7. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemantren Jetis secara optimal
8. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kemantren Jetis secara optimal
9. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kemantren Jetis secara optimal
10. Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana yang optimal
11. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musrenbang di Kelurahan yang optimal
12. Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang optimal
13. Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang optimal
14. Terselenggaranya Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencaan kehidupan menuju keluarga berkualitas secara optimal
15. Terselenggaranya Peningkatan efektivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kemantren secara optimal

16. Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
17. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
18. Terlaksananya Penumnuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya
19. Terlaksananya Penumnuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu angka Swadaya Murni sebesar Rp 935.773.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.277.190.556,- (136,49%), hal itu didukung dengan adanya peran aktif masyarakat dalam pembangunan wilayah. Salah satu bentuk peran masyarakat dalam mendukung pembangunan wilayah adalah kemampuan berswadaya secara mandiri, kegiatan yang diselenggarakan di wilayah dapat dipenuhi dalam bentuk sumbangan baik materi maupun finansial, atas peran serta ini kelurahan melakukan pencatatan dan melaporkannya secara rutin serta menjadikan sebagai indicator pendukung program kemantren.

Untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Presentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi didukung oleh Sub Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp 81.471.500,- pada Sub Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional sebesar Rp 53.811.500,- dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebesar Rp 27.660.000,-

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi)	1. Sosialisasi Peningkatan KTB 2. Sosialisasi PKL	1 Kali 1 Kali 12 Bulan

	Wawasan Kebangsaan dan Ketahuan Nasional yang optimal	3. Monitoring dan Koordinasi TIBUM	
2.	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren	12 Bulan

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Presentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi yaitu Jumlah permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi sebanyak 12 permasalahan, terealisasi sebanyak 12 (100%) hal ini didukung dengan adanya kegiatan rapat koordinasi rutin setiap bulan Forum Komunikasi Kemantren Jetis yang terdiri dari Kemantren Jetis, Kepolisian RI (Polsek, TNI (Koramil), KUA dan Puskesmas dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi diantaranya persiapan untuk pengamanan NATARU (Natal dan Tahun Baru), PKL-PKL yang tidak punya ijin, persiapan kegiatan HUT RI, pengamen, pembuangan sampah liar, dll.

4) Kemantren Gondokusuman

Kemantren Gondokusuman sebagai perangkat daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman yang dituangkan ke dalam tabel perubahan perjanjian kinerja Kemantren Gondokusuman tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	399
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A

Berdasarkan target sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, realisasi yang diperoleh sebesar 399,4 atau 100,10%. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan dinamika

sosial kemasyarakatan di wilayah dan inovasi-inovasi masyarakat yang dibuat pada tahun sebelumnya dapat berlanjut dengan baik sampai dengan saat ini.

Sasaran strategis Kemantren Gondokusuman didukung oleh program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator setara eselon III sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondokusuman meningkat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	83
2	Pelanggaran Perda di Kemantren Gondokusuman menurun	Jumlah Pelanggaran Perda	225
3	Swadaya Masyarakat Kemantren Gondokusuman meningkat	Angka Swadaya Murni	Rp 2.728.767.000
4	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan meningkat	Prosentase Pemerintahan Kemantren Gondokusuman terseleseikan dengan hasil koordinasi	99.13

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Gondokusuman memiliki 4 (empat) sasaran program yaitu kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondokusuman meningkat dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat dengan target 83 telah terealisasi 83,58 atau 100,70%. Selanjutnya sasaran program pelanggaran Perda di Kemantren Gondokusuman menurun dengan indikator jumlah pelanggaran Perda menurun dengan target 225 telah terealisasi 121 atau 53,78%, dan sasaran program swadaya masyarakat Kemantren Gondokusuman dengan indikator program angka swadaya murni dengan target Rp 2.728.767.000 telah terealisasi sebesar Rp 2.765.833.000 atau 101,36%. Dan terakhir program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan indikator prosentase permasalah Gondokusuman terseleseikan sebagai hasil koordinasi dengan taget 100% terealisasi 99,13%.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondokusuman meningkat, didukung oleh kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan,

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan Peningkatan

Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Sub kegiatan	Indikator Kinerja Sub kegiatan (*Output* Sub kegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Peningkatan Efektvitas Kegiatan Pemerintahan	- Musrenbang Kelurahan - Musrenbang Kemantren - Evaluasi Kelurahan - Penyusunan Monografi Kelurahan - Penyusunan Profil Kelurahan - Fasilitasi Pengamanan box Pemilu - Fasilitasi Pengamanan box Pilkada - Forum Koordinasi Pimpinan - Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan	5 laporan 1 laporan 1 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 12 bulan 12 bulan
2.	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertical yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Gondokusuman	- Monev Pembangunan Wilayah - Pendampingan Kelompok Tani - Pelatihan Pengeringan dan Packaging Cabe Jawa - Pendampingan Paguyuban Bank Sampah - Pelatihan Pembuatan Pembalut Kain - Pendampingan Kelembagaan Forkom UMKM	4 dokumen 9 kali 70 orang 4 kali 40 orang 4 kali
3.	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	- Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren (Paten)	12 laporan
4.	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Fasilitasi PKK - Fasilitasi TPK - Monitoring Evaluasi Penangan Stunting - Sosialisasi Penanganan Stunting - Segoro Amarto - Pawai Budaya Kemantren - Rakor Pemberdayaan - Fasilitasi Lomba	12 bulan 1 lembaga 2 kali 40 orang 60 orang 1 kali 11 bulan 9 bulan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 27.240.000 dan terealisasi sebesar

Rp 27.240.000 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertical yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Gondokusuman
2. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan

Sasaran sub kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 83 dan terealisasi sebesar 83,58. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tata kala kegiatan, dilakukannya monitoring evaluasi kegiatan secara rutin, dijalankannya komunikasi dan koordinasi yang intens, komitmen, semangat dan rasa tanggung jawab para pelaksana kegiatan, serta pelaksaan pelayanan yang mudah dan responsif seperti selalu melakukan pendampingan bagi pengguna layanan yang belum memiliki ID JSS.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program pelanggaran perda di Kemantren Gondokusuman menurun, juga didukung oleh kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Sub kegiatan	Indikator Kinerja Sub kegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik indonesia	- Operasi ketertiban masyarakat - Fasilitasi Operasi Penertiban APK - Pengamanan Masyarakat - Fasilitasi Penertiban APK Pilkada - Pengadaan Jasa Orang Perseorangan	11 bulan 2 bulan 12 bulan 2 bulan 12 bulan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp 62.448.800 dan terealisasi Rp 61.904.000 atau 99,13%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terciptanya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
2. Terlaksananya koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan Perda dan Perkada dst.

Sasaran sub kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, yaitu menurunnya jumlah pelanggaran Perda dengan target 225 pelanggaran dan terealisasi sejumlah 121 pelanggaran atau 53,78%. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tata kala kegiatan, dilakukannya operasi ketertiban secara rutin dengan BKO Satpol PP, kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah serta Forkompintren dalam bentuk komunikasi dan koordinasi yang intens, serta pelaksanaan monitoring pengawasan wilayah yang rutin.

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp 6.352.603.856 dan terealisasi Rp 6.259.645.750 atau 98,54%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Demangan
2) Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Kotabaru
3) Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Klitren
4) Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Baciro
5) Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Terban
6) Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan
7) Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru
8) Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren
9) Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro
10) Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban

Sasaran sub kegiatan-kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yaitu angka swadaya murni masyarakat dengan target Rp 2.728.767.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.765.833.000. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tata kala kegiatan,

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan di wilayah dimana kondisi lingkungan sudah mulai kondusif dan normal pasca pandemi covid-19, dijalankannya komunikasi dan koordinasi yang intens dengan stakeholder di wilayah, komitmen, semangat dan rasa tanggung jawab para pelaksana kegiatan.

5) Kemantren Danurejan

Kesesuaian antara Kegiatan dengan target kinerja program Kemantren Danurejan telah melebihi target yang telah ditentukan. Target indikator kinerja sasaran strategis untuk sasaran tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan dengan target sebesar 409 Poin telah realisasi 409 Poin sehingga capaian kinerjanya 100 % sesuai dengan skala nilai peringkat kinerja dikategorikan sangat tinggi dan sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukan kategori sangat berhasil.

Selanjutnya indicator kinerja program untuk nilai survey kepuasan masyarakat target sebesar 83 poin terealisasi sebesar 83,45 poin sehingga capaian kinerjanya 100,54 % sesuai dengan skala nilai peringkat kinerja dikategorikan sangat tinggi dan sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukan kategori sangat berhasil. Untuk indicator kinerja program Angka Swadaya Masyarakat Total dengan target 1.193.980.489 rupiah terealisasi sebesar Rp. 1.969.600 000,00 capaiannya sebesar 164,89 % sesuai dengan skala nilai peringkat kinerja dikategorikan sangat tinggi dan sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukan kategori sangat berhasil. Untuk Indikator kinerja program jumlah pelanggaran PERDA dari target 48 pelanggaran hanya terealisasi 27 pelanggaran sehingga capaiannya sebesar 177,77 % sesuai dengan skala nilai peringkat kinerja dikategorikan sangat tinggi dan sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukan kategori sangat berhasil. Untuk indikator program Persentase Permasalahan Wilayah Terselesaikan Sebagai Hasil Koordinasi dengan target 100 % teralisasi 100 % sesuai dengan skala nilai peringkat kinerja dikategorikan sangat tinggi dan sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukkan kategori sangat berhasil

Sedangkan untuk capaian program maupun kegiatan dari masing-masing sub kegiatan terkait dengan anggaran. Bila dibandingkan dengan Rencana aksi penilaian kinerja dapat dilihat pada table, dimana sebagian besar anggaran sudah dapat terserap dengan baik sesuai dengan kebutuhan, dengan realisasi anggaran mencapai 96,78 %. Tidak terserapnya anggaran hingga 100% disebabkan karena efisiensi anggaran (belanja barang berdasarkan kebutuhan dan adanya negosiasi dengan penyedia barang dan jasa dan Belanja Gaji ASN sesuai dengan kebutuhan)

Data Capaian Program, Realisasi Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Sesuai Perjanjian Kinerja

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
	BELANJA		**4.344.543.823,00**	**4.321.183.650,00**	**99,46 %**	**Tercapai**
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA**	**3 dokumen**	**300.000.000,00**	**298.210.800,00**	**99,40 %**	**Tercapai**

	URUSAN TATA RUANG					
	Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Suryatmajan	1 dokumen	100.000.000,00	99.403.600,00	99,40 %	Tercapai
	Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Bausasran	1 dokumen	100.000.000,00	99.403.600,00	99,40 %	Tercapai
	Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Tegalpanggung	1 dokumen	100.000.000,00	99.403.600,00	99,40 %	Tercapai
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**1.Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan**	**83**	**83,45**	**100,54 %**	Tercapai
		2. Anggaran	**58.435.500,00**	**58.435.500,00**	**100 %**	Tercapai
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**21.800.000,00**	**21.800.000,00**	**100 %**	**Tercapai**
	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ instansi Vertikal yang terkait dengan pemeliharaan Sarana dan prasarana Pelayanan Umum.		21.800.000,00	21.800.000,00	100 %	Tercapai
	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		**36.635.500,00**	**36.635.500,00**	**100 %**	**Tercapai**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		4.809.000,00	4.809.000,00	100 %	Tercapai
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan		31.826.500,00	31.826.500,00	100 %	Tercapai
2.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1. Angka Swadaya Masyarakat Total**	**1.193.980.489 rupiah**	**1.969.600.000 rupiah**	**164,89**	**Melebihi Target**
		2.Anggraan	**3.884.519.323,00**	**3.864.683.350,00**	**99,48 %**	**Tercapai**
	Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Sarana dan Prasarana yang terbangun**	**3.600.858.323,00**	**3.586.389.350,00**	**99,59 %**	**Tercapai**
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perenc.Pemb. di Kel.		85.532.155,00	85.532.150,00	99,99 %	Tercapai

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta hibah		1.742.414.968,00	1.731.066.000,00	99,34 %	Tercapai
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.766.273.700,00	1.763.153.700,00	99,82 %	Tercapai
	Evaluasi Kelurahan		6.637.500,00	6.637.500,00	100 %	Tercapai
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Persentase Lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan**	**96.206.000,00**	**91.994.000,00**	**95,62 %**	Tercapai
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		20.672.000,00	16.490.000,00	79,76 %	Tercapai
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		75.534.000,00	75.504.000,00	99,96 %	Tercapai
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya**	**187.455.000,00**	**186.300.000,00**	**99,00 %**	**Tercapai**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		4.600.000,00	4.600.000,00	100 %	Tercapai
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		74.345.000,00	74.345.000,00	100 %	Tercapai
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		22.920.000,00	22.035.000,00	96,13 %	Tercapai
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		6.170.000,00	5.900.000,00	95,62 %	Tercapai
	Penumbuhan dan peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		79.420.000,00	79.420.000,00	100 %	Tercapai
3.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan**	**48**	**27**	**177,77 %**	Kondisi wilayah aman dan terkendali
		Anggaran Program	**48.290.000,00**	**46.690.000,00**	**96,68 %**	**Tercapai**
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan	**Jumlah operasi ketertiban**	**48.290.000,00**	**46.690.000,00**	**96,68 %**	**Tercapai**

	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		**48.290.000,00**	**46.690.000,00**	**96,68 %**	**Tercapai**
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**Tercapai**
		Anggaran Program	**53.299.000,00**	**53.164.000,00**	**99,74 %**	Tercapai
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah koordinasi Forkompim Kemantren untuk penanganan masalah di wilayah.**	**53.299.000,00**	**53.164.000,00**	**99,74 %**	**Tercapai**
	Fasilitasi/Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi/Konsultasi/Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)		8.855.000,00	8.720.000,00	98,47 %	Tercapai
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		44.444.000,00	44.444.000,00	100 %	Tercapai

a. Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis Kemantren Danurejan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk indikator kinerja menurut sasaran stategis “Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan” dengan indikator kinerja “Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan”. Tolok ukur capaian sasaran tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat diukur dengan 1 (satu) indicator yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR
Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan Tahun 2024

NO	NAMA KELURAHAN	TAHUN 2024
1	Suryatmajan	408
2	Tegalpanggung	412
3	Bausasran	407
	Jumlah	1.227
	Nilai	409

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa untuk tahun 2024 nilai tertinggi diperoleh Kelurahan Tegalpanggung dan nilai terendah diperoleh Kelurahan Bausasran. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 409 poin

1. Indikator Program Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Dari tabel diatas dapat di informasikan bahwa realisasi kinerja pada indikator Program Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dari tahun 2024 di Kemantren Danurejan Meningkat.

Realisasi Indikator Program Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83 poin
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Angka Swadaya Masyarakat Total	1.193.980.489 rupiah
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	48 pelanggaran
4	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan yang terselesaikan	100 %

Realisasi kinerja pada indikator Program Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 di Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dalam peringkat kinerja sangat tinggi karena sudah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2024 sebesar 83 poin dengan realisasi sebesar 83,45 poin sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,54 %.

Adapun pelayanan yang diberikan Kemantren Danurejan dalam kurun waktu Tahun 2024 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Rekapitulasi Pelayanan Publik di Kemantren Danurejan

Tahun 2024

NO	KEGIATAN	REALISASI TAHUN 2024
1.	Pelayanan Administrasi Kependudukan	46
2.	Pelayanan Perizinan	7
3.	Pelayanan Surat Keterangan/ Legalisasi Umum/ Pelayanan Umum	340
JUMLAH		**393**

Jumlah pelayanan Kemantren Danurejan Tahun 2024 sejumlah 393 sebagai berikut Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 46, Pelayanan Perizinan sebanyak 7, Pelayanan Surat Keterangan/ Legalisasi Umum/ Pelayanan Umum sebanyak 340. Adanya Regulasi baru yang mencabut kewenangan Kemantren dalam hal mencetakan dokumen Administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga dsb dan diperjelas pula di dalam Peraturan Walikota No 19 Tahun 2023 bahwa kewenangan Kemantren hanya sebatas memberikan pendampingan dalam proses pembuatan Dokumen kependudukan.

Disamping pencabutan kewenangan terkait Administrasi kependudukan, terbit Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menghapus perizinan berusaha seperti HO dan Izin yang sebelumnya menjadi kewenangan Kemantren.

2.Indikator Program Angka Swadaya Masyarakat Total

Untuk Angka Swadaya Masyarakat Total Tahun 2024 dengan target 1.193.980.489 rupiah sudah teralisasi sebesar 1.969.600.000 rupiah untuk Capaian sebesar 164,89 % Untuk melihat perkembangan Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Angka Swadaya Total

Tahun 2024

NO.	NAMA KELURAHAN	REALISASI TAHUN 2024
1.	Suryatmajan	584.031.000 rupiah
2.	Tegalpanggung	868.768.000 rupiah
3.	Bausasran	516.801.000 rupiah
	Jumlah	**1.969.600.000 rupiah**

Realisasi Angka Swadaya Masyarakat Total Kelurahan Suryatmajan Tahun 2024 sebesar 584.031.000 rupiah Kelurahan Tegalpanggung sebesar 868.768.000 rupiah dan Kelurahan Bausasran sebesar 516.801.000 rupiah untuk capaian paling tinggi angka Swadaya Masyarakat Total tahun 2024 yaitu di Kelurahan Tegalpanggung dan yang terendah di Kelurahan Bausasran.

a) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Realisasi kinerja Sasaran Strategis sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra sebagai berikut :

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama	Reali-sasi	TARGET RENSTRA/REVIEW RENSTRA			PROSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RENSTRA(%)		
			2024	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin	100%	-	-
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemnatren Danurejan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	-	-

Dari Tabel diatas terdapat 1 indikator sasaran strategis yang sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

Realisasi Kinerja dari tahun 2024 telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta dengan rincian realisasi tahun 2024 sebesar 409 poin dari target yang ditetapkan dalam Renstra

409 poin. Dengan demikian berdasarkan skala pengukuran ordinal, capaian tersebut menunjukan kategori sangat berhasil.

Sedangkan Realisasi kinerja Indikator program sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemantren Danurejan dapat dilihat pada table sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	REALISASI	TARGET RENSTRA/REVIEW RENSTRA			PROSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RENSTRA (%)		
			2024	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1.	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Survey Kepuaasan Masyarakat Kemantren Danurejan	83.45 poin	83 poin	83,50 poin	84 poin	100,54	-	-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total	1.969.600.000 rupiah	1.193.980.489 rupiah	1.253.679.513 rupiah	1.316.363.489 rupiah	164,89 %	-	-
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	27 pelanggaran	48 pelanggaran	47 pelanghgaran	46 pelanggaran	177,77 %	-	-
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	-	-

1. Indikator Kinerja Program Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

   Realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

   Realisasi Kinerja tahun 2024 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta dengan rincian realisasi tahun 2024 sebesar 83.45 poin dengan prosentase capaian 100,54 % dari target yang ditetapkan dalam Renstra 83 poin (100 %). Dengan demikian sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukan kategori sangat berhasil.

2. Indikator Kinerja Program Angka Swadaya Masyarakat Total

   Realisasi kinerja dari tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis maupun Review rencana strategis Kemantren Danurejan setiap tahun dalam kurun waktu selama 1 tahun, semua telah melebihi

target yang telah ditetapkan. Realisasi kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

Realisasi Kinerja dengan indikator Angka Swadaya Masyarakat Total tahun 2024 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta dengan rincian realisasi tahun 2024 sebesar 164,89 % % target yang ditetapkan dalam Renstra 100% kinerja Angka Swadaya Masyarakat Total. Dengan indikator yang berbeda, Kemantren Danurejan tetap dapat mencapai target yang telah ditentukan. Untuk tahun 2024 Angka Swadaya Masyarakat Total terealisasi sebesar 1.969.600.000 rupiah dari Target 1.193.980.489 rupiah. Dengan demikian sesuai dengan skala pengukuran ordinal capaian kinerja dengan indikator tingkat swadaya maupun angka swadaya total menunjukan kategori sangat berhasil.

3. Indikator Kinerja Program Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA)

   Realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

   Indikator kinerja pada sasaran Program Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) realisasi Tahun 2024 terdapat jumlah pelanggaran PERDA sebanyak 27 pelanggaran.

   Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada Program ini sangat berhasil karena capaian kinerja diatas 100 % yaitu di tahun 2024 sebesar 177,77 %.

   Dengan demikian sesuai skala pengukuran ordinal, capaian kinerja dengan indikator tingkat pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) menunjukan kategori sangat berhasil.

4. Indikator Kinerja Program Persentase Permasalahan Kemantren Danurejan Terselesaikan sebagai hasil koordinasi

   Realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

   Indikator kinerja pada sasaran Program Persentase Permasalahan Yang Terselesaikan sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat berhasil karena capaian kinerja sesuai dengan target 100 %. Dengan demikian sesuai skala pengukuran ordinal, capaian kinerja dengan indikator tingkat Persentase Permasalahan Yang Terselesaikan menunjukan kategori sangat berhasil.

INDIKATOR PROGRAM :

Indikator Program Kemantren Danurejan sebagai berikut, yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Angka Swadaya Masyarakat Total, dan Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan, Persentase Permasalahan Kemantren Danurejan Terselesaiakan sebagai hasil koordinasi.

Untuk realisasi kinerjanya dapat di lihat pada table-tabel di bawah ini :

1. **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Program

PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	PERSENTASE
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	83,45 poin	83 poin	100,54 %

2. **Angka Swadaya Masyarakat Total**

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Program

PROGAM	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	PERSENTASE
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total	1.969.600.000 rupiah	1.193.980.489 rupiah	164,89 %

3. **Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan**

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Program

PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	PERSENTASE
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	27 pelanggaran	48 pelanggaran	177,77 %

4. **Persentase Permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi**

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Program

PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	PERSENTASE
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan	100 %	100%	100%

	sebagai hasil koordinasi			

6) Kemantren Gedongtengen

Kemantren Gedongtengen sebagai perangkat daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen yang dituangkan ke dalam tabel perubahan perjanjian kinerja Kemantren Gedongtengen tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	375
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A

Tercapainya sasaran strategis tersebut didukung oleh program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator setara eselon III sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gedongtengen	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	85 poin
2	Meningkatnya Swadaya masyarakat Kemantren Gedongtengen	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.371.031.533 rupiah
3	Menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Gedongtengen	Jumlah Pelanggaran Perda	123 pelanggaran

4	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Gedongtengen memiliki 4 (empat) sasaran program yaitu meningkatnya kepuasan layanan masyarakat di Kemantren dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat dengan target 85 telah terealisasi 85,07 Selanjutnya sasaran program meningkatnya swadaya masyarakat Kemantren Gedongtengen dengan indikator angka swadaya masyarakat total dengan target Rp 1.371.031.533,00 telah terealisasi sebesar Rp.1.346.890.000,00. Sasaran program menurunnya pelanggaran perda di Kemantren Gedongtengen dengan indikator jumlah pelanggaran Perda menurun dengan target 123 telah terealisasi 98 dan sasaran program meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi dengan target 100 % dan terealisasi 100%.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gedongtengen meningkat, didukung oleh kegiatan dengan subkegiatan yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

(Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik: diambil dari Perkin eselon IV jawatan umum dan jawatan kemakmuran)

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum secara optimal	Monev Pembangunan Wilayah	1 dokumen
2.	Terlaksananya urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan Non Usaha secara optimal	Desiminasi Informasi Pelayanan Prima	1 dokumen
3.	Terlaksananya urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan secara optimal	Operasional PATEN	12 laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Umum adalah sebesar Rp. 19.320.000,- dan terealisasi sebesar Rp.19.320.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Monev Pembangunan Wilayah

   Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha adalah sebesar Rp. 11.914.800,- terealisasi Rp. 11.914.800,- atau 100 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

2. Desiminasi Informasi Pelayanan Prima

   Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan adalah sebesar Rp. 44.020.000,- terealisasi Rp. 44.019.000,- atau 100 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

3. Operasional PATEN

   Sasaran subkegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Swadaya masyarakat Kemantren Gedongtengen , didukung oleh kegiatan dengan subkegiatan.

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan secara optimal	- Fasilitasi Pemberdayaan - Fasilitas Forum Tim Penanggulangan Kemiskinan (Penangkis) se-Kecamatan Gedongtengen - Fasilitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga - Gebyar PAUD - Pawai Budaya	1) 5 lembaga 2) 30 orang 3) 11 bulan 4) 1 kali 5) 1 kali
2.	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	1. Musrenbang Kelurahan Sosromenduran 2. Musrenbang Kelurahan Pringgokusuman	- 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen

	Kelurahan yang optimal.	3. Musrenbang Kemantren Gedongtengen	
3.	Tercapainya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pringgokusuman yang sesuai dengan kearifan lokal.	- Pembuatan Taman dan Spot Selfie - Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) - Pemeliharaan Fasum Ringan Sarana Prasarana Wilayah - Perbaikan Gapura - Rehab Paving Blok - Rehab Saluran Air Hujan - Pembuatan Tutup Saluran Air Hujan - Pembangunan dan Pemeliharaan MCK Umum - Pembangunan SPAH di Wilayah - Pembuatan Vertical Garden - Pembuatan Pergola - Pemeliharaan Pos Ronda di Wilayah - Pemeliharaan Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan - Pemeliharaan CCTV - Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah - Jasa Konsultan Perencana - Jasa Konsultan Pengawas - Jasa Konstruksi Pelaksana	1. 2 unit 2. 1 unit 3. 1 paket 4. 1 unit 5. 615 m2 6. 120 m 7. 1 paket 8. 3 unit 9. 8 titik 10. 22 unit 11. 15 unit 12. 5 unit 13. 4 unit 14. 2 paket 15. 8 unit 16. 3 dokumen 17. 3 dokumen 18. 3 dokumen
4.	Tercapainya Keberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pringgokusuman	- Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK, Kampung, RW, RT,) - Bimtek Pra Musrenbang - Pelatihan Lorong Sayur	1. 5 lembaga 2. 1 kegiatan 3. 20 orang 4. 20 orang 5. 30 orang 6. 60 orang 7. 60 orang 8. 40 orang 9. 5 kegiatan 10. 100 orang

		- Pelatihan Kuliner B2SA Non Tepung Non Beras - Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik - Pelatihan Shibori Dasar bagi Penduduk Rentan - Bimtek Pra Musrenbang - FGD Penanganan Kemiskinan - Fasilitasi Lomba - Kegiatan Penyluhan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat se Kelurahan Pringgokusuman - Sosialisasi PAAR-EDI - Gebyar Senam Lansia - Fasilitasi Rakor Kelembagaan (TPPS, 9 Pilot Project, Tim Penangkis, Paguyuban RW, KESI, FKDM, Pokja Rukun Beragama, FPK, Kader Posyandu, Forum BS, Pokja Bunda Paud, KTB, RKB, RDK, Pokdarwis, WPA, Satgas GZSA,Linmas) - Pelatihan Pengolahan Sampah An Organik - Penguatan dan Fasilitasi Kelembagaan PKK - Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan	11. 45 orang 12. 110 orang 13. 18 lembaga 14. 40 orang 15. 4 kegiatan 16. 8 lembaga 17. 44 orang 18. 4 kegiatan

		- Pelatihan Membuat Roti - Latihan Grup Barongsai	
5.	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sosromenduran yang sesuai dengan kearifan lokal.	1. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Lingkungan di Wilayah 2. Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Pembangunan Kelurahan Sosromenduran. 3. Pemeliharaan Fasilitas CCTV 4. Pembuatan Taman dan Pergola Kampung Sosrowijyawan Kulon dan Kampung Sosrodipuran 5. Pengadaan Timbangan 6. Pengadaan Gerobag Sampah Terpilah 7. Perbaikan Jalan kampung/Rehab Paving blok Kampung Sosrowjiayan Kulon dan Kampung Sosrodipuran 8. Rehab Saluran Air Hujan (SAH) Kampung Sosrowijayan Wetan	1. 14 RW 2. 2 Dokumen 3. 1 Lokasi 4. 2 Kampung 5. 13 buah 6. 1 buah 7. 568 m2 8. 266 m2
6.	Tercapainya Keberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sosromenduran	1) Pelatihan Lorong Sayur 2) Pelatihan Ecoprint 3) Pelatihan Event Organizer 4) Pelatihan Packaging Brand UMKM 5) Workshop Penanganan Stunting pada Ibu Hamil 6) Pembinaan Mental dan Spiritual Ketua	1. 50 orang 2. 50 orang 3. 50 orang 4. 50 orang 5. 50 orang 6. 70 orang 7. 300 orang 8. 180 orang 9. 30 orang 10. 70 orang 11. 50 orang 12. 50 orang

		kampung, RW dan RT 7) Ruwahan Kelurahan Sosromenduran 8) Gelar Potensi Kelurahan Sosromenduran 9) Sosialisasi Gemar Makan Ikan 10)Bimbingan Teknis Musrenbang Kelurahan Sosromenduran 11)Peningkatan kapasitas Pengurus Kampung Wisata 12)Pelatihan Pengelohan Pangan Lokal 13)Pelatihan MC Bahasa Jawa 14)Sosialisasi Sadar Wisata dan CHSE 15)Workshop Perawatan ODGJ 16)Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas untuk Penanganan Bencana 17)Pelatihan Membuat Roti dan Minuman 18)Lomba Pidato dalam rangka HUT RI 19)Workshop Kesehatan lansia 20)Peningkatan Kapasitas Kader WPA 21)Workshop Kader Kesehatan RT dan RW Siaga se Kelurahan 22)Pelatihan Bahasa Inggris untuk Remaja dan Anak Sekolah 23)Sosialisasi Penanganan Kelompok Rentan 24)Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik (Ember Tumpuk) 25)Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) 26)Pelatihan Pengelolaan	13. 30 orang 14. 30 orang 15. 55 orang 16. 50 orang 17. 50 orang 18. 6 orang 19. 50 orang 20. 50 orang 21. 70 orang 22. 15 orang 23. 54 orang 24. 42 orang 25. 28 orang 26. 42 orang 27. 5 lembaga 28. 12 bulan

		Sampah Organik (Tas Pilah) 27) Fasiltasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, Kampung, LPMK, PKK) Kelurahan Sosromenduran. 28) Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah/Tenaga Teknis Kel. Sosromenduran	
7.	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan yang optimal	1) Evaluasi Perkembangan Kelurahan 2) Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sosromenduran 3) Penyusunan Data Monografi Kelurahan Pringgokusuman 4) Penyusunan Profil Kelurahan Sosromenduran 5) Penyusunan Profil Kelurahan Pringgokusuman 6) Penyusunan Profil Kemantren Gedongtengen	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen
8.	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang optimal	1. Fasilitasi FKUB Kemantren Gedongtengen 2. Fasilitasi Kelembagaan 3. Fasilitasi Persatuan Kaum Rois Kemantren Gedongtengen 4. Fasilitasi Pengamanan Box Pada Proses Penghitungan Pemilu 5. Fasilitasi Pengamanan Box Pada Proses Penghitungan Pilkada	1. 1 lembaga 2. 1 lembaga 3. 1 lembaga 4. 1 kegiatan 5. 1 kegiatan
9.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga	1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1) 5 lembaga

	Kemasyarakatan yang optimal		
10.	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat secara optimal	**A.** Evaluasi CSR dan Fasilitasi Kelembagaan **B.** Pelatihan Pemasaran Online	1. **100%**
11.	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga secara optimal	a. Pelatihan Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)	1) 1 kegiatan untuk 30 keluarga
12.	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing secara optimal	1. Sosialisasi Assupan Gizi untuk Balita	1. 2 kali
13.	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam secara optimal	a. Latihan Penyegaran KTB b. Pembinaan Linmas	100 100 OH 101 200 OH

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah sebesar Rp. 108.398.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 108.398.000,- atau 100 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut

1. Fasilitasi Pemberdayaan
2. Fasilitas Forum Tim Penanggulangan Kemiskinan (Penangkis) se-Kecamatan Gedongtengen
3. Fasilitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
4. Gebyar PAUD
5. Pawai Budaya

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan adalah sebesar Rp.56.508.660,- dan terealisasi sebesar Rp.56.507.100,- atau 100 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut :

1. Musrenbang Kelurahan Sosromenduran
2. Musrenbang Kelurahan Pringgokusuman
3. Musrenbang Kemantren Gedongtengen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pringgokusuman adalah sebesar Rp.724.769.236,- dan terealisasi Rp.719.126.500,- atau 99,22%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Pembuatan Taman dan Spot Selfie
2. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
3. Pemeliharaan Fasum Ringan Sarana Prasarana Wilayah
4. Perbaikan Gapura
5. Rehab Paving Blok
6. Rehab Saluran Air Hujan
7. Pembuatan Tutup Saluran Air Hujan
8. Pembangunan dan Pemeliharaan MCK Umum
9. Pembangunan SPAH di Wilayah
10. Pembuatan Vertical Garden
11. Pembuatan Pergola
12. Pemeliharaan Pos Ronda di Wilayah
13. Pemeliharaan Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan
14. Pemeliharaan CCTV
15. Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah
16. Jasa Konsultan Perencana
17. Jasa Konsultan Pengawas
18. Jasa Konstruksi Pelaksana

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pringgokusuman adalah sebesar Rp. 613.271.600,- dan terealisasi Rp. 612.007.600,- atau 99,79%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK, Kampung, RW, RT,)
2. Bimtek Pra Musrenbang
3. Pelatihan Lorong Sayur
4. Pelatihan Kuliner B2SA Non Tepung Non Beras

5. Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik
6. Pelatihan Shibori Dasar bagi Penduduk Rentan
7. Bimtek Pra Musrenbang
8. FGD Penanganan Kemiskinan
9. Fasilitasi Lomba
10. Kegiatan Penyluhan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat se Kelurahan Pringgokusuman
11. Sosialisasi PAAR-EDI
12. Gebyar Senam Lansia
13. Fasilitasi Rakor Kelembagaan (TPPS, 9 Pilot Project, Tim Penangkis, Paguyuban RW, KESI, FKDM, Pokja Rukun Beragama, FPK, Kader Posyandu, Forum BS, Pokja Bunda Paud, KTB, RKB, RDK, Pokdarwis, WPA, Satgas GZSA,Linmas)
14. Pelatihan Pengolahan Sampah An Organik
15. Penguatan dan Fasilitasi Kelembagaan PKK
16. Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan
17. Pelatihan Membuat Roti
18. Latihan Grup Barongsai

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sosromenduran adalah sebesar Rp. 532.912.000,- dan terealisasi Rp. 527.373.000,- atau 98,96%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Lingkungan di Wilayah
2. Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Pembangunan Kelurahan Sosromenduran.
3. Pemeliharaan Fasilitas CCTV
4. Pembuatan Taman dan Pergola Kampung Sosrowijyawan Kulon dan Kampung Sosrodipuran
5. Pengadaan Timbangan
6. Pengadaan Gerobag Sampah Terpilah
7. Perbaikan Jalan kampung/Rehab Paving blok Kampung Sosrowjiayan Kulon dan Kampung Sosrodipuran
8. Rehab Saluran Air Hujan (SAH) Kampung Sosrowijayan Wetan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sosromenduran adalah sebesar Rp. 632.084.900,- dan terealisasi Rp. 630.035.800,- atau 99,68%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

- Pelatihan Lorong Sayur
- Pelatihan Ecoprint
- Pelatihan Event Organizer
- Pelatihan Packaging Brand UMKM
- Workshop Penanganan Stunting pada Ibu Hamil
- Pembinaan Mental dan Spiritual Ketua kampung, RW dan RT
- Ruwahan Kelurahan Sosromenduran
- Gelar Potensi Kelurahan Sosromenduran
- Sosialisasi Gemar Makan Ikan
- Bimbingan Teknis Musrenbang Kelurahan Sosromenduran
- Peningkatan kapasitas Pengurus Kampung Wisata
- Pelatihan Pengelohan Pangan Lokal
- Pelatihan MC Bahasa Jawa
- Sosialisasi Sadar Wisata dan CHSE
- Workshop Perawatan ODGJ
- Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas untuk Penanganan Bencana
- Pelatihan Membuat Roti dan Minuman
- Lomba Pidato dalam rangka HUT RI
- Workshop Kesehatan lansia
- Peningkatan Kapasitas Kader WPA
- Workshop Kader Kesehatan RT dan RW Siaga se Kelurahan
- Pelatihan Bahasa Inggris untuk Remaja dan Anak Sekolah
- Sosialisasi Penanganan Kelompok Rentan
- Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik (Ember Tumpuk)
- Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah)
- Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik (Tas Pilah)
- Fasiltasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, Kampung, LPMK, PKK) Kelurahan Sosromenduran.
- Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah/Tenaga Teknis Kel. Sosromenduran

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Evaluasi Kelurahan adalah sebesar Rp. 5.401.775,- dan terealisasi Rp. 5.397.500,- atau 99,92%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi Perkembangan Kelurahan
2. Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sosromenduran

3. Penyusunan Data Monografi Kelurahan Pringgokusuman
4. Penyusunan Profil Kelurahan Sosromenduran
5. Penyusunan Profil Kelurahan Pringgokusuman
6. Penyusunan Profil Kemantren Gedongtengen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan adalah sebesar Rp. 29.596.200,- dan terealisasi Rp. 29.596.200,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi FKUB Kemantren Gedongtengen
2. Fasilitasi Kelembagaan
3. Fasilitasi Persatuan Kaum Rois Kemantren Gedongtengen
4. Fasilitasi Pengamanan Box Pada Proses Penghitungan Pemilu
5. Fasilitasi Pengamanan Box Pada Proses Penghitungan Pilkada

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan adalah sebesar Rp. 20.139.850,- dan terealisasi Rp. 20.139.850,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah sebesar Rp. 15.790.300,- dan terealisasi Rp. 15.775.300,- atau 99,91%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi CSR dan Fasilitasi Kelembagaan
2. Pelatihan Pemasaran Online

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga adalah sebesar Rp. 4.815.000,- dan terealisasi Rp. 4.815.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan Pelatihan Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing adalah sebesar Rp. 3.940.000,- dan terealisasi Rp. 3.940.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan Sosialisasi Assupan Gizi untuk Balita

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam adalah sebesar Rp. 6.500.000,- dan terealisasi Rp. 6.500.000,- atau 100 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut :

1. Latihan Penyegaran KTB
2. Pembinaan Linmas

Sasaran subkegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program menurunnya pelanggaran perda di Kemantren Gedongtengen, juga didukung oleh kegiatan dengan subkegiatan yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

(Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum: diambil dari Perkin eselon IV jawatan keamanan

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1.	Terselenggaranya koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan / atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan Perda dan Perkada secara optimal	- Jasa Tenaga Administrasi - Operasi Tramtibum Linmas - Operasi Penertiban APK Pemilu - Pembinaan PKL - Piket Linmas - Operasi Penertiban APK Pilkad	1. **24 orang** 2. **624 orang** 3. **150 orang** 4. **60 orang** 5. **120 orang** 6. **400 orang**

Untuk sub kegiatanKoordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebesar Rp. 119.615.000,- terealisasi Rp. 119.615.000,- atau 100 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Jasa Tenaga Administrasi
2. Operasi Tramtibum Linmas
3. Operasi Penertiban APK Pemilu
4. Pembinaan PKL
5. Piket Linmas
6. Operasi Penertiban APK Pilkada
7. Pondokan

Sasaran subkegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, juga didukung oleh kegiatan dengan subkegiatan yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sub Kegiatan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional secara optimal	1. Sarehan FKDM 2. Sarasehan FPK	1. 65 Orang 2. 60 Orang
2.	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang optimal	1. Upacara Dirgahayu RI 2. Tim Forum Koordinasi Pimpinan Kemantren	1. 1 kegiatan 2. 12 dokumen

Untuk sub kegiatan Faislitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional) adalah sebesar Rp. 5.645.000,- terealisasi Rp.5.645.000,- atau 100 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Sarehan FKDM
2. Sarasehan FPK

Untuk sub kegiatan Faislitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional) adalah sebesar Rp. 42.790.000,- terealisasi Rp.42.790.000,- atau 100 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Upacara Dirgahayu RI
2. Tim Forum Koordinasi Pimpinan Kemantren

7) Kemantren Ngampilan

Kemantren Ngampilan sebagai perangkat daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan yang dituangkan ke dalam tabel perubahan perjanjian kinerja Kemantren Ngampilan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III. 56 Perubahan Perjanjian Kinerja Kemantren Ngampilan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	405
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan	Hasil penilaian Mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat	A

Tercapainya sasaran strategis tersebut didukung oleh program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator setara eselon III sebagai berikut:

Tabel III. 57 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III

No.	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja Sasaran/Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemanten Ngampilan	405
1.1	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Ngampilan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	84,6 poin
1.2	Meningkatnya Swadaya masyarakat Kemantren Ngampilan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Rp. 775.000.000
1.3	Menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Ngampilan	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan	66 pelanggaran
1.4	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrsi oleh Inspektorat	A Nilai
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kemantren Ngampilan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Ngampilan memiliki 2 sasaran strategis yaitu Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan dengan target 405 terealisasi 405 dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kemantren Ngampilan dengan target A terealisasi A dan 4 (empat) sasaran program yaitu kepuasan layanan masyarakat di

Kemantren Ngampilan meningkat dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat dengan target 84,60 telah terealisasi 84,62 Selanjutnya sasaran program pelanggaran Perda di Kemantren Ngampilan menurun dengan indikator jumlah pelanggaran Perda menurun dengan target 66 telah terealisasi 65, dan sasaran program swadaya masyarakat Kemantren Ngampilan meningkat dengan indikator program angka swadaya murni dengan target Rp.775.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.780.670.000,00 (100,73%)

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Ngampilan meningkat, didukung oleh kegiatan: Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan, yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Sub kegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Ngampilan	- Jumlah dokumen Koordinasi sinergi dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal	4 dokumen
2	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan non Perizinan	- Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	1 laporan

Adapun anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan dengan sasaran sub kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan adalah sebesar Rp11.170.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.170.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

   Sosialisasi Adminduk, Layanan legalisasi dokumen kependudukan misal KTP, KK, izin penelitian untuk mahasiswa dari perguruan Tinggi di DIY, Persetujuan lokasi penelitian bagi mahasiswa dari luar DIY, izin tetap di DPMPTSP, persetujuan lokasi KKN, Surat keterangan waris tanah, waris bank, waris BPJS ketenagakerjaan, Surat Keterangan Mengetahui penduduk Kemantren

Ngampilan, untuk digunakan berbagai kepentingan (menikah, cerai, menjual tanah, keringanan biaya sekolah dll). Pelayanan tersebut dilakukan dengan didukung teknologi informasi dan juga memanfaatkan media sosial Kemantren yang terhubung ke ketua RT RW se Kemantren Ngampilan, sehingga ketika ada info yang akan kita sampaikan ke masyarakat, akan kita umumkan lewat berbagai media sosial, , informasi tentang vaksin, info pelayanan mall pelayanan publik, infomasi layanan capil dan informasi lainnya, diharapkan akan mendukung kepuasan masyarakat.

2. Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Ngampilan adalah sebesar Rp.20.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.300.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:
   - Gebyar UMKM, Gapoktan dan Bank Sampah
   - Informasi program dan kegiatan pembangunan dan perekonomian
   - Pendampingan kegiatan pembangunan dan perekonomian

Sasaran sub kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program pelanggaran perda di Kemantren Ngampilan menurun, juga didukung oleh kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	**Sasaran Subkegiatan**	**Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)**	**Target Perubahan**
1.	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp138.392.000,00 dan terealisasi

Rp138.392.000,00 atau 100%.Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu jumlah pelanggaran perda dengan target 66 kali pelanggaran dan terealisasi 65 kali, hal itu didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, dengan adanya frekuensi pengamanan masyarakat yang rutin, pemantauan wilayah dan sosialisasi/penyuluhan seperti Penyuluhan PKL dan koordinasi Linmas maka akan mendukung penurunan jumlah pelanggaran perda.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program swadaya masyarakat Kemantren Ngampilan meningkat, didukung oleh kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Ngampilan dan Notoprajan) dengan sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasrana Kelurahan (Ngampilan dan Notoprajan), Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Ngampilan dan Notoprajan).

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp2.710.612.370,- dan terealisasi Rp2.680.505.115,- atau 98.89%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Ngampilan:

   Anggarannya sebesar Rp552.762.500,00 dan terealisasi Rp534.410.500,00 atau 96,67%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

   - Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas
   - Pemeliharaan Konblok Kp.Ngampilan
   - Pemeliharaan Pengecatan Pagar Talud di Kampung Ngampilan
   - Pembangunan Fasilitas Umum di Kampung Ngadiwinatan
   - Pembangunan Pergola Penghijauan di Kampung Ngampilan
   - Pemasangan CCTV di Kelurahan Ngampilan
   - Pemeliharaan PJU di Kelurahan Ngampilan
   - Pemeliharaan Rabat Beton

2. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Notoprajan

   Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Notoprajan adalah sebesar Rp.498.900.000,00 dan terealisasi Rp.467.525.755,00 atau 93,71%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut:

   - Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas
   - Pemasangan CCTV
   - Pemeliharaan PJU (Penerangan Jalan Umum)
   - Pemeliharaan Jalan Konblok
   - Pembangunan Pos Satpam Semi Portabel
   - Pembangunan Kampung Serangan Sebagai Kampung Wisata Budaya dan Kuliner
   - Pemeliharaan SAH

3. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan

   Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan adalah sebesar Rp493.747.000 dan terealisasi Rp474.370.140,00 atau 96,07%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut :

   - Bantuan Paket Data Internet
   - Tenaga Teknis Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
   - Honor Pelayanan Masyarakat
   - Bakpia Day
   - Pelatihan Bank Sampah untuk 4 Kampung
   - Rakor Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat
   - Pelatihan Jemparingan untuk 4 Kampung
   - Pelatihan Ketrampilan Relawan untuk 4 Kampung
   - Senam Minggu Pungkasan untuk 4 Kampung
   - Sarasehan Jaga Warga dan KTB untuk 4 Kampung
   - Pelatihan Barista di Kampung Purwodiningratan
   - Pelatihan Pembuatan Makanan Pendamping Bakpia
   - Pelatihan Bagi Pendidik PAUD di Kampung Ngadiwinatan
   - Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan di Kampung Ngadiwinatan
   - Gebyar Kampung Ramah Anak di Kampung Pathuk
   - Pelatihan Karawitan di Kampung Ngampilan
   - Pelatihan Pembuatan Pupuk di Kampung Pathuk

- Sosialisasi Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat)
- FGD Penanganan Stunting
- Pelatihan Pengolahan Sampah Organik

4. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan

   Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan adalah sebesar Rp.411.554.000,00 dan terealisasi Rp.402.021.890,00 atau 97,68%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut:

   - Operasional RT, RW, Kampung dan LPMK (Rakor,Fotocopy, Paket Data)
   - Fasilitasi kegiatan kelembagaan masyarakat (Rakor)
   - Pelatihan Decoupage
   - Pelatihan Pembuatan Makanan Sehat Bagi Remaja dan Bumil
   - Pelatihan Pembuatan Parfum dan Pewangi Loundry
   - Pelatihan Pembuatan Shibori Dengan Kuas
   - Workshop Parenting Kebangsaan
   - Workshop Penyajian Data Informasi Rumah Data Keluarga (RDK)
   - Workshop Pencegahan Stunting Bagi Remaja
   - Pentas kesenian lokal kelurahan notoprajan
   - Fasilitasi Kegiatan JBM (Jam Belajar Masyarakat) RW
   - Jasa tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat
   - Jasa bagi pelayan masyarakat

5. Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Dengan anggaran 120.036.000,- tercapai Rp.119.886.000,- atau 99,87%.

6. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

   Terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat Kemantren adalah sebesar Rp41.826.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 41.826.500,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

   - Penyelenggaraan Musrenbang Kemantren dan Kelurahan
   - Penyusunan Dokumen Musrenbang Kemantren dan Kelurahan
   - Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (FORKOMPIMKA)
   - Sosialisasi, Pemilihan dan Pengukuhan Pengurus Kampung
   - Pemilihan dan Pengukuhan Pengurus LPMK
   - Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan RT/RW Kelurahan
   - Penyusunan Data Monografi

- Penyusunan Data Profil
- Monev Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan

7. Terlaksananya Evaluasi Kelurahan.

   Anggaran Evaluasi kelurahan sebesar Rp. 8.329.070,- terlaksana Rp.8.329.070 atau tercapai 100 %.

8. Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

   Anggaran Rp.27.782.000,- terlaksana Rp.27.748.000,- tercapai 99.87%

9. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

   Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat Kemantren Ngampilan sebesar Rp. 27.535.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.535.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan tugas sub kegiatan berupa Gebyar UMKM dan Workshop Manajemen UMKM

10. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

    Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Kemantren Ngampilan sebesar Rp. 48.709.000,00 dan teralisasi sebesar 48.709.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan tugas sub kegiatan berupa Lomba kelompok Tani Tingkat Kemantren Ngampilan

11. Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Dengan anggaran Rp. 150.854.000,- tercapai Rp. 150.554.000 atau 99.80%.

12. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup. Dengan anggaran Rp.9.865.000,- tercapai Rp.9.865.000,- atau 100%.

13. Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

    Kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan adalah sebesar Rp.29.875.000,00 dan terealisasi Rp.29.875.000,00 atau 100% Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan berupa : Pelatihan Keluarga Tanggap bencana

14. Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas. Dengan anggaran Rp.13.550.000,- tercapai Rp. 12.950.000,- atau 95.57%

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu angka Swadaya Murni sebesar Rp.775.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.780.670.000.- (tercapai100.73 %) hal itu didukung dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi pada kedua Kelurahan yang ada

di Kemantren Ngampilan (Kelurahan Ngampilan dan Notoprajan) untuk kepentingan lingkunganya. Swadaya murni tersebut tidak hanya pada pembangunan fisik tapi juga pada pemberdayaan masyarakat, ketika pekerjaan fisik yang besar sudah tertanggung APBD maka warga masyarakat mendukung dengan swadaya murni dalam skala kecil sesuai kemampuan masing-masing untuk membangun wilayahnya di masing-masing kelurahan se-Kemantren Ngampilan.

Terlaksananya Pelaksanaan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas yang dilaksanakan Jawatan Sosial dengan adanya Sosialiasi Stunting, monev pelaksanaan stunting, monitoring dan Rakordasi yang mana kegiatan tersebut akan mendukung masyarakat menjadi sehat, pengentasan stunting dan kemiskinan serta mendukung pertumbuhan ekonomi di masyarakat sehingga akan menumbuhkan keberdayaan masyarakat.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi, juga didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahana Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan Jawatan Keamanan dan sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan Jawatan Praja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) yang Mengikuti Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang
2	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 Dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp.39.960.000,- dan terealisasi Rp.39.930.000,- atau 99.92%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kemantren Ngampilan.
2. Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Ngampilan.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program-Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu Prosentase Permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dengan target 100% dan terealisasi 100%, hal itu didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, dengan adanya koordinasi yang baik dan bersinergi bersama antar unsur pimpinan di Kemantren Ngampilan secara terpadu melibatkan Koramil dan Polsek, sehingga potensi permasalahan masyarakat dan masalah sosial maupun gangguan ketertiban umum dapat teratasi dengan baik.

8) Kemantren Wirobrajan

Kemantren Wirobrajan sebagai perangkat daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan 8 parameter yang dituangkan ke dalam tabel perubahan perjanjian kinerja Kemantren Wirobrajan tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	379,66 Point
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan 8 parameter	A Nilai

Tercapainya sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Wirobrajan sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Kepuasan Layanan Masyarakat di Kemantren Wirobrajan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan	83,47 Poin
2	Menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Wirobrajan	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan	42 Pelanggaran
3	Meningkatnya Swadaya Murni Masyarakat Kemantren Wirobrajan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Rp. 1.035.955.000,-
4.	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Wirobrajan memiliki 4 (empat) sasaran program yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Wirobrajan dengan indikator program Nilai Survey Kepuasan Masyarakat kemantren Wirobrajan, meningkat 100,15% dari target 83,47 poin dan terealisasi 83,602 poin;
2. Menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Wirobrajan dengan indikator program jumlah pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan, turun 114,28% dengan target 42 pelanggaran dan realisasi 36 pelanggaran;
3. Meningkatnya Swadaya Masyarakat Kemantren Wirobrajan dengan indikator program Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan naik 100,12% dengan target Rp. 1.035.955.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.037.215.000,-;
4. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan indikator program Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dengan target 100% dan realisasi 100%.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kemantren Wirobrajan meningkat, didukung oleh kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan, yang dimasukkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Wirobrajan secara optimal	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah. 2. Pemeliharaan Makam Pracimalaya	1 Dokumen 1 Dokumen
2.	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha secara optimal	Operasional Pelayanan Yang Terkait Perizinan	12 Bulan
		Sosialisasi perizinan berusaha (OSS)	60 Orang
		Sosialisasi perizinan pemakaman	60 Orang
		Sosialisasi perizinan pondokan	60 Orang
		Sosialisasi persetujuan bangunan dan Gedung (PBG)	60 Orang

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
3.	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan secara optimal	Operasional Non Perizinan	12 Bulan
		Sosialisasi pelayanan public non perizinan	60 Orang
		Video inovasi	1 Kegiatan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 365.413.500,- dan terealisasi sebesar Rp 365.291.539,- atau 99,96%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

a. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Wirobrajan secara optimal.
b. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha secara optimal
c. Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan secara optimal

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat dengan target 83,47 poin dan realisasi 83,602 poin, hal itu didukung dengan pelaksanaan di sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dilaksanakan Jawatan Kemakmuran. Anggaran Perubahan Rp. 311.451.000,- dengan realisasi Rp. 311.329.039,- atau 99,96%. Kegiatan antara lain Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah (kemantren dan kelurahan) dan Pemeliharaan Makam Pracimalaya TPU milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang berada di Kelurahan Pakuncen;
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dilaksanakan oleh Jawatan Umum, Anggaran Perubahan Rp. 20.664.000,- dengan realisasi Rp. 20.664.000,- atau 100%. Kegiatannya sebagai berikut:
   1. Operasional Pelayanan Yang Terkait Perizinan;
   2. Sosialisasi Perizinan pemakaman;
   3. Sosialisasi perizinan pondokan;
   4. Sosialisasi persetujuan bangunan dan gedung (PBG);
   5. Sosialisasi perizinan berusaha (OSS)
   6. Pelayanan perizinan pemakaman TPU Pracimalaya :
      a. Izin Pemesanan Tempat Pemakaman (IPST);
      b. Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST);
      c. Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (IPT);
      d. Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman (PPT); dan
      e. Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN);
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan yang dilaksanakan di Jawatan Umum, anggaran perubahan Rp. 33.298.500,- dengan realisasi Rp. 33.298.500,- atau 100%. Uraian Kegiatan sebagai berikut :
   1) Operasional Pelayanan Non Perizinan;
   2) Pelayanan non perizinan yang meliputi :
      - Pelayanan Dispensasi Nikah;
      - Pelayanan Pernyataan Beda Nama;
      - Pelayanan Pernyataan Domisili Usaha;
      - Pelayanan Pernyataan Tempat Tinggal;
      - Pelayanan Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Kepengurusan Partai Politik;
      - Pelayanan Pernyataan Ahli Waris;
      - Pelayanan Pernyataan Anak Tidak/Belum Menikah dan Belum Bekerja;
      - Pelayanan Pernyataan Penghasilan Orang Tua;

- Pelayanan Pendampingan Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui Online Single Submission (OSS);
- Pelayanan Pendampingan Permohonan Dokumen Kependudukan;
- Pelayanan Pernyataan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atau Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4);
- Pelayanan Legalisasi;
- Pelayanan Pernyataan Belum Memiliki Rumah;
- Sosialisasi melalui website dan media sosial Kemantren Wirobrajan (instagram dan facebook).

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kemantren Wirobrajan, didukung oleh Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimasukkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang optimal	Operasi Penertiban PKL, Pondokan, Spanduk dan Vandalisme	34 Kali
		Koordinasi Sambang Kampung	6 Kali
		Pengamanan PAM Linmas	10 Kali
		Koordinasi Satuan Linmas Kemantren Wirobrajan	25 Orang
		Pembinaan/workshop Linmas Kemantren Wirobrajan	75 Orang
		Fasilitasi operasi penertiban Alat Peraga Kampanye	1 Lembaga
		Jasa tenaga Administrasi	12 Bulan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kemantren Wirobrajan adalah sebesar Rp. 98.351.000,- dan realisasi sebesar Rp 98.346.185,- atau 99,99%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang optimal.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kemantren Wirobrajan. Sebagaimana disebutkan bahwa indikator program tersebut adalah Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan dengan target 42 Pelanggaran dan realisasi 36 Pelanggaran atau jumlah pelanggaran Perda turun 114,28%,. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dengan Anggaran Perubahan Rp. 98.351.000,- dan realisasi sebesar Rp 98.346.185,- atau 99,99%. Uraian kegiatan antara lain:

1. Operasi penertiban PKL, Pondokan, spanduk dan vandalisme yang dilaksanakan rutin oleh BKO Kemantren Wirobrajan.
2. Koordinasi Sambang Kampung;
3. Koordinasi Satuan Linmas Kemantren Wirobrajan;
4. Pembinaan/Workshop Linmas.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kemantren Wirobrajan, didukung oleh:

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan:
    a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
    b. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan;
    c. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patangpuluhan;
    d. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wirobrajan;
    e. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakuncen;
    f. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan;
    g. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Prasarana Kelurahan Wirobrajan;
    h. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen.
3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub kegiatan:
    1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
    2. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
4. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan Sub Kegiatan :
    1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;

2. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
4. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
5. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
6. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam;
7. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

yang dimasukkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Output Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Honor Ketua TP PKK Kecamatan	4 kali
		Forum Kelembagaan Tingkat Kecamatan	12 bulan
		Honor Tim PENANGKIS	3 kelurahan
		WJNC	30 orang
2.	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang optimal	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan	210 Lembaga
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kemantren	
		Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan.	
3.	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan yang optimal	Evaluasi dan Lomba Kelurahan	9 Laporan
		Penyusunan Data Monografi	
		Penyusunan Profil Kelurahan dan Kemantren	
4.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patangpuluhan yang sesuai dengan kearifan lokal	Belanja Hibah Normalisasi Jalan menuju GTW RW 07	1 Paket
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Perencanaan	1 Dokumen
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Pengawasan	1 Dokumen

		Belanja Hibah Pemasangan Konblok RW 01, RW 02 dan RW 09 Kelurahan Patangpuluhan	410 m2
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Perencanaan	1 Dokumen
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Pengawasan	1 Dokumen
		Belanja Hibah Pembangunan SPAH RT 37, RT 48 dan RW 06 Kel. Patangpuluhan	19 Titik
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Perencanaan	1 Dokumen
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Pengawasan	1 Dokumen
		Belanja Hibah Pemeliharaan Pos Ronda RT 10 RW 02	1 Paket
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Perencanaan	1 Dokumen
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Pengawasan	1 Dokumen
		Belanja Hibah Pengadaan bin sampah terpilah RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 7, RW 8, RW 9, RW 10 Kelurahan Patangpuluhan	10 Unit
		Pemasangan CCTV di wilayah Kelurahan Patangpuluhan	1 Paket
		Belanja Hibah mesin pencacah sampah	1 Unit
		Pemeliharaan PJU	51 Titik
5.	Tercapainya Keberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patangpuluhan	Workshop Penguatan Kampung Wisata Kelurahan Patangpuluhan	30 orang
		Pelatihan Digital Marketing Kelurahan Patangpuluhan	30 orang
		Pelatihan Pembuatan Biopori Kelurahan Patangpuluhan	30 orang
		Pelatihan Ecoenzym dan Komposter Kelurahan Patangpuluhan	30 orang

		Festival Dolanan Tradisional Anak Kelurahan Patangpuluhan	100 orang
		Karnaval Budaya Patangpuluhan Kelurahan Patangpuluhan	300 orang
		Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Kelurahan Patangpuluhan	100 orang
		Sosialisasi Kanker Cerviks Kelurahan Patangpuluhan	75 orang
		Workshop Manajemen Kasus Kelurahan Patangpuluhan	50 orang
		Workshop Pengurus PKK Kelurahan Kelurahan Patangpuluhan	50 orang
		Bina Keluarga Remaja Kelurahan Patangpuluhan	40 orang
		Roadshow Posyandu Kelurahan Patangpuluhan	10 kali
		Gebyar Kreativitas PAUD Kelurahan Patangpuluhan	150 orang
		Pelatihan PPGD Kebencanaan Kelurahan Patangpuluhan	30 orang
		Penyuluhan Linmas Kelurahan Kelurahan Patangpuluhan	30 orang
		Penyuluhan Jaga Warga Kp. Sindurejan Kampung Sindurejan	30 orang
		Penyuluhan Jaga Warga Kampung Patangpuluhan	30 orang
		Penyuluhan Kampung Panca Tertib Kelurahan Patangpuluhan	30 orang
		Penyuluhan Motivasi Keluarga Penyandang Disabilitas Kelurahan Patangpuluhan	30 orang
		Pelatihan Budidaya Tanaman Hias Kelurahan Patangpuluhan	40 org
		Pelatihan Pembuatan Tumpeng Non Beras Kelurahan Patangpuluhan	40 org
		Pelaksanaan rapat koordinasi pengurus RT, RW, pengurus Kampung dan LPMK) Kel. Patangpuluhan	131 kali
		Pelaksanaan rapat koordinasi pengurus TP PKK Kelurahan, PKK RW dan PKK RT Kel. Patangpuluhan	62 lembaga
		Rapat Kelembagaan Kelurahan Kel. Patangpuluhan	27 lembaga
		Senam Sehat Warga dan Lansia Kel. Patangpuluhan	7 kali
		Fasilitasi Latihan Bergodo Patangpuluhan dan Bergodo Bugisan Kel. Patangpuluhan	12 kali
		Rakor Jam Belajar Masyarakat Kel. Patangpuluhan	10 lembaga

		Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Kelurahan Kel. Patangpuluhan	80 orang
		Musyawarah PKK Kelurahan Patangpuluhan Kel. Patangpuluhan	150 orang
		Rapat Koordinasi Posyandu Kel. Patangpuluhan	12 bulan
		Belanja Jasa Tenaga Teknis Administrasi	2 orang
		Belanja Honor Pelayan Masyarakat (Ketua LPMK, Kampung, RW, RT, PKK RT, PKK RW, PKK Kel)	64 lembaga
		Belanja Bantuan Komunikasi (Ketua RT & RW)	61 lembaga
		Pelatihan budaya untuk peningkatan kapasitas di Wilayah	20 orang
		Pelatihan boga untuk remaja di wilayah RW 01 Patangpuluhan	20 orang
		Pelatihan Pengelolaan Kebun Warga Manunggal Arana Boga RW 04	20 orang
		Pelatihan kerajinan untuk remaja RW 01 Patangpuluhan	20 orang
		Pelatihan manajemen UMKM RW 01 Patangpuluhan	20 orang
		Belanja Hibah Pengadaan kostum kelompok seni Bergada Hima Manggala Patangpuluhan kel. Patangpuluhan	1 paket
		Pelatihan Memasak, Packaging, & Pemasaran anggota P2WKSS Kel Patangpuluhan	20 orang
6.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wirobrajan yang sesuai dengan kearifan lokal	Pembersihan saluran air	20 m
		Pembuatan pagar ujung SAH	5 m2
		Belanja Hibah Bongkar dan pemasangan Konblok Baru Gang Irawan RT 07 RW 02	125 m2
		Belanja Hibah Bongkar dan pemasangan Konblok Baru RT 03 RW 01	38 m2
		Belanja Hibah Bongkar dan pemasangan Konblok Baru RT 31 RW 06	27,5 m2
		Belanja Hibah Bongkar dan pemasangan Konblok Baru RT 41 RW 09	40 m2
		Belanja Hibah Bongkar dan pemasangan Konblok Baru RT 47 RW 10	50 m2
		Belanja Hibah Bongkar dan pemasangan Konblok Baru RT 50 RW 11	80 m2

		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Perencanaan Konblok baru	1 dokumen
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Pengawasan Konblok baru	1 dokumen
		Belanja Hibah Pembuatan SPAH RT 37 RW 08	2 titik
		Belanja Hibah Pembuatan SPAH RT 46 RW 10	2 titik
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan SPAH	1 dokumen
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Pengawasan Pembuatan SPAH	1 dokumen
		Belanja Hibah Penggantian Tutup SAH RW 07	100 m
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Perencanaan Penggantian Tutup SAH	1 dokumen
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Pengawasan Penggantian Tutup SAH	1 dokumen
		Belanja Hibah Rehab Corblok Gang Rukun RT 41	161,5 m2
		Belanja Hibah Rehab Corblok Gang Wusanto RT 41	105 m2
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Konblok Gang Rukun RT 41	1 dokumen
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Konblok Gang Rukun RT 41	1 dokumen
		Belanja Hibah Pengadaan Ember Komposter BS Serasi, BS Wira Mandiri, BS Maju Jaya, BS Sak Estu, BS Wira Lestari, BS Wira Asri 06, BS Katon Kencono, BS Wira Asri 08, BS Wira Peni, BS Arjuna Sejahtera, BS Kencana Mandiri, BS Peduli Sampah, BS Setaman	13 unit
		Belanja Hibah Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah RW 10 (RT 45, 46, 47, 48 dan 49)	1 unit
		Belanja Hibah Papan Nama Kampung Layak Anak RW 03, RW 07 dan RW 11	3 unit
		Belanja Hibah Papan Nama Posyadu 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11A, 11B, 12 .	13 unit
		Belanja Hibah Papan Nama SPS PAUD Wira Melati 1, SPS PAUD Wira Melati 4 dan Pos PAUD Wira Melati 11	3 unit
		Belanja Hibah Tong Sampah RW 09, RW 10, RW 11 dan RW 12	4 unit
		Pemasangan CCTV Wilayah	1 paket
		Bongkar dan Pemasangan konblok	330 m2
		Jasa Konsultasi Perencanaan Bongkar dan Pemasangan konblok	1 dokumen

		Jasa Konsultasi Pengawasan Bongkar dan Pemasangan konblok	1 dokumen
		Pemasangan CCTV Wilayah	20 titik
		Pemasangan Grass blok di RTHP bekas makam Jopabran	228 m2
7.	Tercapainya Keberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wirobrajan.	Gelar Potensi wilayah Kelurahan Wirobrajan	40 orang
		Gebyar Budaya Kelurahan Wirobrajan	300 orang
		Gebyar Pemuda Arjuna Fest	50 orang
		Gebyar PAUD (pentas seni dan dolanan anak)	200 orang
		Workshop Penguatan Keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus	20 orang
		Workshop Penguatan kader Posbindu	30 orang
		Workshop Penyuluhan Caten (calon manten)	20 orang
		Workshop Penguatan kelembagaan forum bank sampah	30 orang
		Workshop sosialisasi kewaspadaan dini Kelurahan Wirobrajan	20 orang
		Workshop Penguatan kader Kesi	30 orang
		Workshop Penguatan kader kesehatan Kelurahan Wirobrajan	60 orang
		Workshop Penguatan SDM IPSM Wirobrajan	30 orang
		Workshop edukasi konseling kesehatan balita	30 orang
		Workshop Baduta Sehat Ibu Cerdas	30 orang
		Pelatihan Kreasi olahan ikan (GEMARI) dan menu karbohidrat pengganti beras	60 orang
		Pelatihan gamelan untuk anak dan remaja	20 orang
		Pelatihan pengolahan sampah anorganik	30 orang
		Pelatihan sistem nilai dan wujud budaya jawa (etika, seni budaya, dolanan anak)	30 orang
		Pelatihan pengolahan sampah organik	30 orang
		Pelatihan Mitra Keluarga	30 orang
		Pelatihan Terapi / Reflexology	30 orang
		Pelatihan PPGD (Penanggulangan Penderita Gawat Darurat) dan Mitigasi Bencana	30 orang
		FGD Jagawarga tentang penyelesaian konflik secara non litigasi	30 orang
		Sosialisasi Hak Anak Kelurahan Wirobrajan	30 orang
		Workshop Kesehatan Jiwa dan Raga Lansia	60 orang
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	3.776 orang
		Fasilitas Internet RT, RW	70 orang
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan bagi Pelayan Masyarakat dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.	172 lembaga

		Jasa Tenaga Administrasi	3 orang/bulan
		Workshop sosialisasi wisata sejarah kampung wirobrajan	30 orang
		Workshop budaya bagi pemuda dan pemudi jalan Arjuna	30 orang
		FGD Promosi Wisata Wirobrajan	30 orang
		Belanja Hibah Pengadaan kostum bregodo di Wirobrajan	80 setel
		Belanja Hibah Pengadaan alat tensi digital	12 unit
		Belanja Hibah Pengadaan Rak buku untuk hasil karya siswa didik di Paud Wira Melati 11 RT 51 RW 11.	3 unit
		Sambang Pondokan (kos)	50 orang
		Potensi Seni Tingkat RW	240 orang
		Senam Lansia	40 orang
		Workshop Edukasi Kebencanaan untuk anak-anak, lansia dan disabilitas kelurahan wirobrajan	360 orang
8.	Terselenggaranya Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Pakuncen yang tepat sasaran.	Pembelian Lampu PJU Lingkungan Rt 1 s/d RT 56	224 buah
		Belanja Hibah Normalisasi jalan di RW 08	1 paket
		Belanja Hibah jasa Konsultasi pengawasan	1 dokumen
		Belanja Hibah Pemasangan Grill SAH RW 1, RW 2, RW 6 dan RW 12 Kel. Pakuncen	10 grill
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi perencanaan	1 dokumen
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Pengawasan	1 dokumen
		Belanja Hibah Pembangunan Ralling Pengaman Tebing dan tangga RW 11 Kampung Gampingan	32 meter
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi perencanaan	1 dokumen
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Pengawasan	1 dokumen
		Belanja Hibah Pembangunan SPAH di RW 1, RW 2, RW 3, RW 5, RW 6, RW 7, RW 8, RW 9, RW 12 Kelurahan Pakuncen	9 titik
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi perencanaan	1 dokumen

		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Pengawasan	1 dokumen
		Belanja Hibah Pemeliharaan Gardu Ronda RW 1, RW 11 dan RW 12 kelurahan Pakuncen	3 unit
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi perencanaan	1 dokumen
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Pengawasan	1 dokumen
		Belanja Hibah Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus RW 10 Kelurahan Pakuncen	1 unit
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi perencanaan	1 dokumen
		Belanja Hibah Jasa Konsultasi Pengawasan	1 dokumen
		Belanja Hibah Pengadaan Tempat Sampah Terpilah RW 1, RW 2, RW 3, RW 4,RW 5, RW 6, RW 7, RW 8, RW 9, RW 10,RW 11,RW 12 Kelurahan Pakuncen	12 unit
		Belanja Hibah Timbangan Digital Sampah RW 1, RW 2, RW 3, RW 4a,RW 5a,RW 5b, RW 6, RW 7a, RW 7b, RW 7c, RW 8, RW 9a, RW 9b, RW 10,RW 11a, RW 11b, RW 12 Kelurahan Pakuncen	17 unit
		Pemasangan CCTV wilayah RW 2, RW 4, RW 5, RW 6, RW 7, RW 8.	14 titik
		Peningkatan gapuro penanda kampung (Gampingan, Tegalmulyo, Singosaren)	3 titik
		Jasa Konsultasi perencanaan	1 dokumen
		Jasa Konsultasi Pengawasan	1 dokumen
		Pemasangan CCTV wilayah	18 titik
9.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakuncen yang sesuai kebutuhan.	Pelatihan Tabulampot	30 orang
		Pelatihan Tanaman Toga Herbal	50 orang
		Pelatihan Event Organizer/Wedding	30 orang
		Pelatihan Hantaran dan Souvenir	25 orang
		Pelatihan SIM PKK	40 orang
		Workshop Dampak Pergaulan Bebas Bagi Remaja	75 orang
		Sosialisasi Kewirausahaan	75 orang
		Pelatihan Olahan Makanan Pokok Pengganti beras	40 orang

		Pelatihan Administrasi Posyandu	75 orang
		Sosialisasi IPSM	40 orang
		Workshop Pendampingan Management Depresi Bagi Lansia	40 orang
		Pembinaan Linmas	40 orang
		Sosialisasi Pokja JBM	40 orang
		Penyuluhan Kelembagaan LPMK	80 orang
		Gebyar PAUD	250 orang
		Pelatihan Pengelolaan Sampah	40 orang
		Bazar UMKM	110 orang
		Sosialisasi Kebangsaan Bagi Pemuda	50 orang
		Pelatihan Batik Modern	25 orang
		Sosialisasi Kesehatan Degeneratif	40 orang
		Pelatihan Perawatan Jenazah	40 orang
		Belanja Hibah Alat peraga Edukasi PAUD Ceria RW 06 Kelurahan Pakuncen	8 jenis
		Fasilitasi Internet RT dan RW	68 orang
		Fasilitasi Lembaga dan Kelurahan	82 lembaga
		Honorarium Tim dan Pelaksana Kegiatan	142 lembaga
		Belanja jasa tenaga administrasi	3 orang
10.	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang optimal	Rapat koordinasi lembaga Masyarakat kampung RT,RW	210 Lembaga
		Sosialisasi peningkatan kapasitas pengurus lembaga masyarakat, kampung, LPMK, RT, RW.	
		Fasilitasi pengamanan box pada proses penghitungan	
11.	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat secara optimal	1. Ekspo Potensi Wilayah 2. Workshop Peningkatan Kapasitas Forkom UMKM 3. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Ekonomi 4. Bazar Potensi Unggulan UMKM	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
12.	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga secara optimal	1. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Pertanian 2. Lomba Ketahanan Pangan 3. Gelar Potensi Pertanian Kemantren Wirobrajan	40 keluarga 80 keluarga 80 keluarga
13.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk	Gebyar difabel dan gelar potensi	200 orang
		Pelatihan Gamelan	15 orang
		Pelatihan Tari	15 orang

	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Penyuluhan tanggap penyandang disabilitas	40 orang
		Pentas HUT Kota Kemantren Wirobrajan	1 paket
14.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Workshop gemar ikan bagi anak milenial	40 orang
		Workshop penyusunan menu B2SA	40 orang
		Fasilitasi lomba-lomba	12 bulan
		Workshop identifikasi penyakit gagal ginjal pada anak	30 orang
15.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penguatan usaha dan motivasi dalam pembentukan kelompok usaha Bersama	50 orang
		Workshop pengembangan kreatifitas dan pengelolaan ekonomi (UP2K)	30 orang
16.	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup secara optimal	a. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Lingkungan b. Lomba Bank Sampah Tingkat Kemantren Wirobrajan c. Pelatihan Manajemen Bank Sampah	50 keluarga 150 keluarga 50 keluarga
17.	Terlaksanananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam yang optimal	Pembinaan Kedaruratan Bencana untuk KTB Kemantren Wirobrajan	50 keluarga
		Koordinasi Forum KTB Kemantren Wirobrajan	35 orang
		Peralatan operasional Ketenteraman dan Ketertiban	6 jenis
		Apel Kesiapsiagaan Bencana Kemantren Wirobrajan	120 orang
18.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Seminar remaja: Know Yourself and Achieve Your Dream	30 orang
		Workshop Administrasi PKK	40 orang
		Monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan PMT stunting	30 orang
		Workshop penguatan kapasitas orang tua dalam mengasuh anak di era milenial	30 orang

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp. 4.261.971.416,- dan terealisasi sebesar Rp 4.190.411.633,- atau 98,32%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
2. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang optimal;

3. Terlaksananya Evaluasi Kelurahan yang optimal;
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patangpuluhan yang sesuai dengan kearifan local;
5. Tercapainya Keberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patangpuluhan;
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wirobrajan yang sesuai dengan kearifan local;
7. Tercapainya Keberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wirobrajan;
8. Terselenggaranya Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Pakuncen yang tepat sasaran;
9. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakuncen yang sesuai kebutuhan;
10. Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang optimal;
11. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat secara optimal
12. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga secara optimal;
13. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
14. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
15. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
16. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup secara optimal;
17. Terlaksanananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam yang optimal;
18. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan dengan target Rp. 1.035.955.000,- dan realisasi Rp. 1.037.215.000,- atau 100,12% dari target, hal itu didukung dengan pelaksanaan di sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dilaksankan oleh Jawatan Sosial, Perubahan Anggaran Rp. 85.015.000,- dan realisasi Rp. 77.121.000,- atau 90,71%, target. Kegiatannya antara lain: Forum kelembagaan tingkat Kecamatan, kegiatan Tim Penangkis, Kegiatan PKK;

2. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dilaksankan oleh Jawatan Praja, Perubahan Anggaran Rp. 59.210.000,- dan realisasi Rp. 57.665.000,- atau 97,39% dari target. Kegiatannya antara lain: kegiatan Musrengbang Kelurahan dan Musrengbang Kecamatan tahun 2025 serta Pramusrengbang tahun 2026;
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Perubahan Anggaran Rp. 6.105.000,- dan realisasi Rp. 6.105.000,- atau 100% dari target. Kegiatan antara lain: evaluasi dan lomba kelurahan, penyusunan data monografi dan penyusunan profil kelurahan dan kemantren;
4. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patangpuluhan dilaksankan oleh Kelurahan Patangpuluhan, Perubahan Anggaran Rp. 341.670.000,- dan realisasi Rp. 336.823.450,- atau 98,58%. Kegiatannya antara lain pelaksanaan Belanja Hibah pemeliharaan Pos ronda, Belanja Hibah Pembangunan SPAH, Belanja Hibah pengadaan bin sampah terpilah, belanja Hibah normalisasi jalan GTW, belanja Hibah pemasangan konblok, belanja Hibah pengadaan mesin pencacah sampah, pemasangan CCTV wilayah;
5. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wirobrajan dilaksanakan oleh Kelurahan Wirobrajan Perubahan Anggaran Rp. 683.546.366,- dan realisasi Rp. 651.537.575,- atau 95,31% dari target. Kegiatannya antara lain belanja Hibah pemeliharaan konblok, pembuatan SPAH, belanja Hibah Gerobak Sampah, Belanja Hibah Ember komposter, Pemasangan CCTV wilayah;Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakuncen dilaksanakan oleh Kelurahan Pakuncen, kegiatannya antara lain pemeliharaan lampu PJU, pemeliharaan SAH, peningkatan gapuro penanda kampung, peningkatan MCK di RW 06;
6. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan dilaksanakan oleh Kelurahan Patangpuluhan, Perubahan Anggaran Rp. 630.900.200,- dan realisasi Rp. 622.524.445,- atau 98,67% dari target. Kegiatannya antara lain Workshop Penguatan Kampung Wisata Kelurahan Patangpuluhan, Pelatihan Ecoenzym dan Komposter Kelurahan Patangpuluhan, Karnaval Budaya Patangpuluhan Kelurahan Patangpuluhan;
7. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Prasarana Kelurahan Wirobrajan dilaksanakan oleh Kelurahan Wirobrajan, Perubahan Anggaran Rp. 803.299.050,- dan realisasi Rp. 802.607.204,- atau 99,91% dari target. Kegiatannya antara lain Gebyar Budaya Kelurahan Wirobrajan, Workshop Penguatan kader Kesi, Workshop Baduta Sehat Ibu Cerdas, Pelatihan pengolahan sampah anorganik;

8. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen dilaksanakan oleh Kelurahan Pakuncen, Perubahan Anggaran Rp. 571.541.500,- dan realisasi Rp.564.758.069,- atau 98,81%. Kegiatannya antara lain Pelatihan Tabulampot, Pelatihan Tanaman Toga Herbal, Pelatihan Hantaran dan Souvenir, Bazar UMKM;
9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Perubahan Anggaran Rp. 34.173.000,- dan realisasi Rp. 30.688.000,-. Kegiatannya antara lain Sosiialisasi Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Masyarakat, Kampung, LPMK,RT-RW;
10. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Perubahan Anggaran Rp. 61.036.000,- dan realisasi Rp. 61.036.000,- atau 100% dari target. Kegiatannya antara lain Ekspo Potensi Wilayah Kemantren Wirobrajan, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Ekonomi;
11. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Perubahan Anggaran Rp. 60.750.000,- dan realisasi Rp. 60.750.000,-atau sebesar 100% dari target. Kegiatannya antara lain Fasilitasi Kelembagaan Bidang Pertanian, Lomba Ketahanan Pangan;
12. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Perubahan Anggaran Rp. 77.690.000,- dan realisasi anggaran Rp. 77.690.000,- atau 100% dari target. Kegiatannya antara lain Gebyar Difabel (Pentas Seni, Potensi UMKM, Pemeriksaan Kesehatan & Talkshow), Pelatihan tari, Pelatihan Gamelan;
13. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Perubahan Anggaran Rp. 21.734.000,- dan realisasi Rp. 21.589.000,- atau 99,33% dari target. Kegiatannya antara lain Penyuluhan Identifikasi Penyakit Gagal Ginjal pada Anak, Lomba Cipta Menu B2SA (Baru) Tingkat Kemantren;
14. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Perubahan Anggaran Rp. 7.169.000,- dan realisasi Rp.7.169.000,- atau 100%. Kegiatannya antara lain Penguatan Usaha dan Motivasi dalam Pembentukan Kelompok Usaha Bersama ;
15. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Perubahan

anggaran Rp. 40.975.000,- dan realisasi Rp. 40.975.000,- atau 100% dari target. Kegiatannya antara lain Fasilitasi Kelembagaan Bidang Lingkungan, Lomba Bank Sampah Tingkat Kemantren;

16. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, Perubahan Anggaran Rp. 23.616.500,- dan realisasi Rp. 23.616.500,- atau 100% dari target. Kegiatannya antara lain Pembinaan Kedaruratan Bencana Untuk KTB Kemantren Wirobrajan, apel kesiapsiagaan bencana Kemantren Wirobrajan;
17. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Perubahan Anggaran Rp. 12.894.000,- dan realisasi Rp. 12.744.000,-. Kegiatannya antara lain Monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan PMT stunting, Seminar Remaja : Know Yourself and Achieve Your Dream.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kemantren Wirobrajan meningkat, didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, yang dimasukkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang optimal	Fasilitasi FKDM	30 orang
		Fasilitasi FPK	30 orang
2.	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang optimal	Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren	12 bulan
		Persiapan Peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus.	50 orang
		Upacara HUT RI Pengibaran Bendera.	1 kali
		Jasa Tenaga Administrasi	12 bulan

Perubahan Anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp. 92.269.000,- dan realisasi sebesar Rp 91.988.954,- atau 99,69% dari target. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang optimal.
2. Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang optimal.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah persentase permasalahan kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dengan target 100% dan realisasi 100%, hal itu didukung dengan pelaksanaan di sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dilaksanakan Jawatan Keamanan, Perubahan Anggaran Rp. 9.092.000,- dan realisasi Rp. 8.822.000,- atau 97,03% dari target. Kegiatan antara lain Fasilitasi FKDM dan Fasilitasi FPK di Kemantren Wirobrajan;
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Perubahan anggaran Rp. 83.177.000,- dan realisasi Rp. 83.166.954.- atau 99,98% dari target. Kegiatannya antara lain Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren (rutin melaksanakan koordinasi dengan Polsek, KUA, Koramil dan Puskesmas), penyelenggarakan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus di Kemantren Wirobrajan.

9) Kemantren Mantrijeron

Kemantren Mantrijeron sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan Sasaran Strategis berupa tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron yang dituangkan ke dalam Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Kemantren Mantrijeron Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	384,67 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A nilai

Tercapainya sasaran strategis tersebut didukung oleh program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator setara eselon III sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Mantrijeron meningkat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	85,04 poin
2	Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Mantrijeron	Angka Swadaya Masyarakat Total	Rp1.587.000.000,00
3	Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Mantrijeron	Jumlah Pelanggaran Perda	20 pelanggaran
4	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	77%

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Mantrijeron memiliki 4 (empat) sasaran program yaitu Kepuasan Layanan Masyarakat di Kemantren Mantrijeron Meningkat dengan indikator program Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dengan target 85,04 poin telah terealisasi 85,09 poin. Selanjutnya sasaran program Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Mantrijeron dengan indikator program Angka Swadaya Masyarakat Total dengan target Rp 1.587.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp2.063.860.549,00 (130,05%). Selanjutnya sasaran program Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Mantrijeron dengan indikator Jumlah Pelanggaran Perda dengan target 20 pelanggaran telah terealisasi 19 pelanggaran, dan sasaran program Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi dengan target 77% telah terealisasi 100%.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, didukung oleh kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

Dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut :

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dengan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Mantrijeron (Jawatan Kemakmuran)	Pemeliharaan Sarana dan Prasana Makam Sarilaya	12 Bulan
		Monev Pembangunan Wilayah	3 Dokumen
2	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Jawatan Umum)	Operasional pelayanan yang terkait perizinan non usaha	12 bulan
		Cetak leaflet	400 lembar
		Cetak Stopmap	758 lembar
		Sosialisasi Pelayanan Publik	2 kali
		Koordinasi Inovasi Darah dan Keterbukaan Informasi Publik	6 kali
3	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (Jawatan Umum)	Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren	10 kali
		Operasional pelayanan yang terkait dengan non perizinan	11 bulan
		Jasa Tenaga Administrasi	2 Orang
		FGD Standar Pelayanan Publik	1 kali
		Sosialisasi Pelayanan Non Perizinan	1 kali
		Sarasehan Pelayanan	1 kali

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp 463.840.925,00 dan terealisasi sebesar Rp 463.580.325,- atau 99,94%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Sasaran sub kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sebagaimana disebutkan bahwa indikator program tersebut adalah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dengan target 84,97 dan realisasi 84,98. Dalam pelaksanaan sub kegiatan tersebut Kemantren Mantrijeron dapat melaksanakan dengan lancar dan sesuai rencana target. Hal ini didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana pelayanan (non jaringan internet) yang memadai untuk di Kantor Kemantren, inovasi sudah di kelola dengan optimal dan baik mengedepankan keterbukaan informasi, pemanfaatan tekhnologi informasi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan petugas kemantren dalam membantu masyarakat mengakses layanan JSS, penilaian SKM dilakukan pertriwulan, sudah dilakukan analisa dan mitigasi untuk ketercapaian SKM, telah melakukan review Standar Pelayanan Publik, dan telah dilakukan review target pada Mei 2024 menjadi 85,04 poin serta telah melakukan SKM eksternal dan internal. Adapun kendala yang dihadapi adalah adanya masyarakat dengan pengetahuan literasi pelayanan digital yang masih rendah, kurangnya kenyamanan karena kebocoran di beberapa ruangan Kelurahan dan Genset yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Upaya Kemantren Mantrijeron dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah meningkatkan kemampuan petugas kemantren dalam membantu masyarakat mengakses layanan JSS, mengelola inovasi dengan optimal, mengedepankan keterbukaan informasi, pemanfaatan tekhnologi informasi dan kebutuhan masyarakat, dan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan (non jaringan internet) yang memadai untuk di Kantor Kemantren dan Kelurahan.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, didukung oleh Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat (Jawatan Sosial)	Jumlah Laporan Penangkis	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Bantuan Sosial Warga Miskin	1 Dokumen
		Jumlah Bulan Pelaksanaan Operasional PKK	12 Bulan

		Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pawai Budaya WJNC	1 Kali
		Jumlah Pelaksanaan Festival Seni Budaya Kemantren Mantrijeron	1 Kali
		Jumlah Pelaksanaan Rakor Pemberdayaan	24 Kali
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kemantren yang Terfasilitasi	10 Lembaga
2	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25 Lembaga Masyarakat
3	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan (Jawatan Praja)	Terlaksananya evaluasi kelurahan dan penyusunan data monografi kelurahan	3 Laporan
4	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mantrijeron yang sesuai dengan Kearifan Lokal	Pemeliharaan PJU Kampung	100 Titik
		Jasa Konsulta Perencana dan Pengawas	2 Dokumen
		Pemeliharaan SAH	315 m2
		Pemeliharaan SPAH	9 Titik
		Pembuatan Sarana dan Prasarana Pelengkap (Gapura Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)	89 Titik
		Pemasangan Konblok	841 m2
		Pembuatan SPAH	16 Titik
5	Tercapainya Keberdayaan Masyarkat di Kelurahan Mantrijeron	Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan	24 Lembaga
		Pelatihan MC	30 Orang
		Pelatihan Kerajinan Kulit	30 Orang
		Pelatihan Budidaya Lele	20 Orang
		Penggandaan/FC Lembaga	30 Orang
		Sosialisasi Stunting	40 Orang
		Sosialisasi Penyakit Degeneratif	50 Orang
		Pembinaan Posyandu Balita dan BKB	40 Orang
		Gebyar Senam Sehat Lansia	110 Orang
		Pelatihan Pendampingan ODGJ	30 Orang
		Pelatihan Sesorah Bahasa Jawa	50 Orang

		Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional	20 Orang
		Pelatihan Pertanian Pola Perkotaan	40 Orang
		Pelatihan Optimalisasi Advertising melalui sosial media	30 Orang
		Sosialisasi PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja)	50 Orang
		Konselor Mitra Keluarga	50 Orang
		Kesemaptaan Petugas Linmas	100 Orang
		Pelatihan Desain Grafis dan Fotografi	20 Orang
		Sosialisasi AKUN HATINYA PKK	40 Orang
		Sosialisasi Managemen PSM	40 Orang
		Tradisi Ngapem Kampung Mantrijeron	70 Orang
		Sedekah Warga Mantrijeron	100 Orang
		Gelar Pasar Rakyat	100 Orang
		Pelatihan MC Bahasa Jawa	20 Orang
		Kirab Prajurit Mantrijero	100 Orang
		Festival Dolanan Anak	110 Orang
		Pembinaan Kelompok Seni Tradisional	225 Orang
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Suryodiningratan yang sesuai dengan Kearifan Lokal	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Peningkatan dan Pemeliharaan PJU)	50 titik
		Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan listrik (peningkatan dan Pemeliharaan PJU)	50 titik
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan (Pemasangan Paving Block)	600 m2
		Pembuatan Biopori Jumbo	1 Paket
		Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan	4 unit
		Pembuatan taman (Pergola,taman)	1 Paket
		Rehabilitasi MCK	1 unit
		Pemasangan CCTV dan jaringan	12 unit
		Belanja jasa konsultan perencana pembangunan	6 dokumen
		Belanja jasa konsultan pengawas pembangunan	6 dokumen

7	Tercapainya Keberdayaan Masyarakat di Kelurahan Suryodiningratan	Coret Maret Belajar Bersama Seni Lukis	30 orang
		Fasilitasi Pelatihan Kesenian Karawitan, Ketoprak, Tari dan Lukis	10 kali
		Fasilitasi Senam Lansia	280 orang
		Festival Dolanan Anak Tradisional	150 orang
		FGD Pemetaan Potensi Daya Tarik Wisata Berbasis Kampung	80 orang
		FGD Perencanaan Pembangunan Berbasis Kampung (Musrembang Kampung)	160 orang
		FGD Sinergitas Lembaga Kemasyarakatan dalam Perberdayaan Masyarakat	120 orang
		Gelar Pasar Tani	200 orang
		Gelar Potensi Bazar UMKM Dodolan Kampung	100 orang
		Monitoring dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan	160 orang
		Pelatihan Digital Content Pelatihan Foto dan Video Berbasis Kamera Handphone	30 orang
		Pelatihan Ecoprint	30 orang
		Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Fasilitator Pembangunan Berbasis Kampung Bagi Pengurus Kampung	40 orang
		Pelatihan Pranantacara Dan Sesorah Bahasa Jawa	25 orang
		Pembinaan PKL Lapangan Minggiran sarasehan penataan PKL Lapangan Minggiran	50 orang
		Pembinaan Pos Yandu Balita Berbasis Kampung	160 orang
		Pembinaan Posyandu Lansia Dan Sambang Kelompok Lansia Berbasis Kampung	160 orang
		Penyuluhan Kesehatan Anak	40 orang
		Penyuluhan Kesehatan Ibu	50 orang

		Penyuluhan Menu Olahan Pangan B2SA	50 orang
		Penyuluhan motivasi/Achievement Motivation Traning AMT Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH)	35 orang
		Penyusunan Data Profile Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan Pra RPJMKel	35 orang
		Sarasehan wawasan Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama	50 orang
		Sosialisasi dan Monev Pembangunan Fisik	30 orang
		Gelar Potensi Kelurahan Suryodiningratan #2024	250 orang
		Workshop Pra Produksi Digital Profile Branding Kampung	15 orang
		Fasilitasi Lembaga Sosial di Kelurahan	31 lembaga
8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gedongkiwo yang sesuai dengan kearifan lokal	Pemeliharaan Sarpras Umum Ringan	Tersebar
		Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	172 titik
		Pemeliharaan Balai RW 18 dan lingkungan sekitar	1 paket
		Pembuatan Biopori Jumbo	9 titik
		Pembuatan dan Pemeliharaan Gapura	5 paket
		Pembuatan SPAH	19 unit
		Pemeliharaan Jalan Konblok	404,6 m2
		Pemeliharaan Pos Ronda RT 62	1 unit
		Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH)	50,22 m2
		Pengadaan Gerobak Sampah Pilah	3 unit
		Mesin pencacah sampah	4 unit
		Tempat sampah terpilah	3 unit
		Pemasangan CCTV	1 paket
9	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	21 lembaga

	di Kelurahan Gedongkiwo yang sesuai kebutuhan	Gedongkiwo (LPMK, Kampung,RW, RT,PKK, KarangTaruna, KESI, Komisi Lansia,Paguyuban Bank Sampah dan Sodakoh Sampah, Kampung KB, PSM, SPS PAUD, TKPK, BKM, Kelurahan Budaya, KTB) Kelurahan Gedongkiwo	
		Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Gedongkiwo	2 orang
		Pelatihan Kepariwisataan	36 orang
		Gladen Jemparingan (Kampung Gedongkiwo) Anak Muda	30 orang
		Pelatihan Pertanian Perkotaan (Suryowijayan)	20 orang
		Pelatihan Pokdarwis & Kampung Wisata	36 orang
		Pelatihan IT Kader IPSM	30 orang
		Workshop Bank Data PSM	30 orang
		Pelatihan Karawitan	25 orang
		Pelatihan Kader KB Terkait IT	40 orang
		Pembinaan Rumah Pondok Dan Gerakan Sapa Anak Kost	30 orang
		FGD Kader Mitra Keluarga	72 orang
		Simulasi 5 Bidang (PKBN, KDRT, PAAR, PPO, PKSTA)	20 orang
		Workshop Kesehatan Reproduksi Remaja	40 orang
		Sosialisasi Bahaya TB, HIV Dan AIDS	40 orang
		Sosialisasi Pencegahan Stunting Bagi Ibu Hamil	36 orang
		Workshop Kampung Ramah Anak (Kpg Suryowijayan)	36 orang
		Monev Dan Validasi Data KB Di Wilayah	120 orang
		Sosialisasi Pola Hidup Sehat Pada Lansia	60 orang
		Senam Sehat Lansia	60 orang
		Pelatihan Karangtaruna Peduli Winongo	50 orang

		Konseling Potensi Minat Dan Bakat Diri Pemuda	30 orang
		Gelar Upacara Adat	200 orang
		Gedongkiwo Expo	500 orang
		Pelatihan Pertanian Perkotaan Kampung Dukuh (Anggur, Duku, Klengkeng)	40 orang
		Pelatihan Dan Pembuatan Lorong Sayur (Rt 62)	20 orang
		Pelatihan Manajemen UMKM di Wilayah	40 orang
		Pelatihan Batik Ecoprint	40 orang
		Workshop Administrasi Posyandu	36 orang
		Pelatihan Public Speaking	40 orang
		Pelatihan Pembuatan Gendewa Jemparingan (Rt 52 Rw 11)	20 orang
		FGD Penanganan Kelompok Rentan Anak Dan Perempuan	60 orang
		Pelatihan Pembuatan Komposter Tanam	80 orang
		Workshop Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	50 orang
		Workshop Pengembangan Kapasitas Organisasi	50 orang
10	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Jawatan Praja)	Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	15 Lembaga Masyarakat
11	Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	Koordinasi Forkom UMKM	4 Kali
		Gelar Potensi UMKM	1 Kali
		Pelatihan Public Speaking	30 Peserta
		Workshop Manajemen UP2K	45 Orang
		Pengembangan Potensi CSR Kewilayahan Kemantren Mantrijeron	4 Kali
12	Terkelolanya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Jawatan Kemakmuran)	Koordinasi Kelompok Tani	6 Kali
		Bimtek Budidaya Jamur Memakai Limbah (BU JAMIL)	25 Peserta
		Bimtek Budidaya Tanaman Cabai Jawa (Piper Retrofractum Vahl)	25 Peserta

		Sosialisasi Bahan Pangan Lokal sesuai B2SA	50 Peserta
13	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Jawatan Sosial)	Jumlah Pelaksanaan Gelar Potensi Disabilitas	1 Kali
		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan Profil Laporan Tahunan Administrasi PKK Berbasis Digital	1 Kali
14	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan (Jawatan Kemakmuran)	Koordinasi Forkom Bank Sampah	8 Kali
		Monitoring Bank Sampah Kemantren Mantrijeron	12 Kali
		Pemeliharaan Kebersihan dan Sarana Prasarana Ruang Terbuka Hijau	2 Lokasi
15	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana (Jawatan Keamanan)	Sosialisasi Kampung Siaga dan Kampung Tangguh Bencana	3 kali
		Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	3 kali
16	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Jawatan Sosial)	Jumlah Pelaksanaan Gebyar PAUD	1 Kali
		Jumlah Pelaksanaan Gebyar Lansia	1 Kali
		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Administrasi Bina Keluarga Sejahtera	1 Kali

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp4.691.577.807,00 dan terealisasi Rp4.659.202.270,00 atau 99,31%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.
- Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Sasaran sub kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Angka Swadaya Masyarakat Total sebesar Rp 1.587.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp2.063.860.549,00,-. Hal ini didukung dengan kesadaran warga yang tinggi untuk mendukung kegiatan sosial di wilayah yang dibiayai dengan uang hasil jimpitan dan keaktifan masyarakat dalam berkegiatan sehingga menggerakan swadaya masyarakat. Adapun kendala yaitu menurunnya inisiatif warga dalam melaporkan angka swadaya. Upaya Kemantren Mantrijeron dalam mengatasi permasalahan yaitu menyampaikan informasi swadaya saat pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, mengoptimalkan whatsapp group dengan masyarakat dan melakukan digitalisasi pelaporan swadaya.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung oleh kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Jawatan Keamanan)	Monitoring Ketertiban Masyarakat	55 kali
		Sosialisasi Penegakan Hukum Non-Yustisi	2 kali
		Kegiatan Sambang Kampung	12 kali
		Sosialisasi Perlindungan Masyarakat di Wilayah	8 kali
		Pengamanan Masyarakat Hari Raya dan Libur Nasional	4 kali

		Monitoring dan Evaluasi Tim Bawaslu dan Panwas Kecamatan	2 kali

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp 79.570.000,- dan terealisasi Rp78.680.000,00 atau 98,88%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sasaran sub kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Jumlah Pelanggaran Perda dengan target 20 kali pelanggaran dan terealisasi 19 kali. Hal ini didukung kesiapsiagaan BKO Satpol PP Kemantren Mantrijeron dan sinergi penegakan Perda bersama apparat keamanan kelurahan (Babinkamtibmas & Babinsa), melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah tingkat Kemantren secara berkala kepada masyarakat, melakukan Operasi ketertiban secara rutin, dan merespon setiap laporan yang ada dengan cepat. Dalam pelaksanaannya, Kemantren Mantrijeron mengalami kendala karena kurangnya ketaatan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Pengampu tingkat Kota terhadap peraturan-peraturan yang tidak mensyaratkan persetujuan wilayah (RT, RW, Kelurahan) misalnya PBG sehingga terjadi permasalahan di lapangan. Upaya Kemantren Mantrijeron dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan kesiapsiagaan BKO Satpol PP Kemantren Mantrijeron dan sinergi penegakan Perda bersama aparat keamanan kelurahan (Babinkamtibmas & Babinsa) dan melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah tingkat Kemantren secara berkala kepada masyarakat.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Jawatan Keamanan)	Sarasehan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	1 kali
		Sarasehan Forum Pembauran Kebangsaan	1 kali
		Konsolidasi Jaga Warga	6 kali
		Fasilitasi Paskibraka/Bela Negara	6 kali

2	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Jawatan Praja)	Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren terlaporkan	1 Dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp58.005.000,- dan terealisasi Rp58.005.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)
b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sasaran sub kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yaitu Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi dengan target 77% dan terealisasi 100%. Hal ini didukung adanya peran aktif Forum Komunikasi Pimpinan tingkat Kemantren Mantrijeron dan sinergitas dengan kelembagaan masyarakat (FKDM, FPK, dll) dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian masalah. Dalam pelaksanaannya, Kemantren Mantrijeron mengalami kendala karena aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat khususnya warga dari luar wilayah Kemantren Mantrijeron yang berdampak pada konflik dimasyarakat dan sampah yang ditimbulkan serta arus lalu lintas macet dan adanya dinamika situasi dan kondisi politik di wilayah berkaitan dengan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta.

Upaya Kemantren Mantrijeron dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan adanya peran aktif Forkompin tingkat Kemantren Mantrijeron dan sinergitas dengan kelembagaan masyarakat (FKDM, FPK, dll) dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian masalah.

10) Kemantren Kraton

Kemantren Kraton sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu yang pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton dengan indikator kinerja Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton serta untuk meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik ditetapkan sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton dengan

indikator kinerja Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat kemudian untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut didukung Program dan Sasaran Program diantaranya yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran program Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Kraton , Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan sasaran program Meningkatnya Swadaya masyarakat Kemantren Kraton , Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran program Menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Kraton serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran program Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan serta Program PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemantren Kraton sebagaimana yang dituangkan ke dalam tabel perubahan perjanjian kinerja Kemantren Kraton tahun 2024 sebagai berikut:

	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja Sasaran / Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Nilai evaluasi perkem bangan pembangunan Kemantren Kraton	391,55
1.1	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Kraton	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85,75
1.2	Meningkatnya Swadaya masyarakat Kemantren Kraton	Angka Swadaya Masyarakat Total	1.032.431.000
1.3	Menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Kraton	Jumlah Pelanggaran Perda	36
1.4	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A
2.1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemantren Kraton	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Kraton memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) sasaran program yaitu Sasaran Strategis pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton dengan target 391,55 telah terealisasi sebesar 391,55 atau 100%, kemudian Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton dengan indikator Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat dengan target A dan terealisasi A (89,212) atau dengan capaian 100% Kemudian untuk Sasaran Program Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat di

Kemantren Kraton dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat dengan target 85,75 telah terealisasi 86,66 atau tercapai 101,06% Selanjutnya sasaran program Meningkatnya Swadaya Masyarakat Kemantren Kraton dengan indikator Angka swadaya masyarakat total dengan target Rp. 1.032.431.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.433.886.600,- atau tercapai 138,88% , selanjutnya sasaran program menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Kraton dengan indikator Jumlah Pelanggaran Perda dengan target 36 telah terealisasi 32 atau tercapai 111,11%, dan sasaran program Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator program Prosentase Pemerintahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi dengan target 100 % dan terealisasi 100 %. Dan sasaran program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemantren Kraton dengan indikator Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton dengan target A dan terealisasi A (86,04) atau tercapai 100%.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Kraton dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan didukung oleh kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang diampu oleh Kawatan Kemakmuran , kemudian kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan, dan dilaksanakan oleh Jawatan Umum, dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Sub kegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1	Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Kraton (Jawatan Kemakmuran)	1. Monev Pembangunan wilayah 2. Penyedia Jasa lainnya orang perseorangan	1 dokumen 12 bulan
2	Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinanan Non Usaha (Jawatan Umum)	- Sosialisasi Perizinan IMB dan reklame - Rapat Koordinasi Perizinan - Rapat koordinasi rutin	1 dokumen 22 dokumen 11 dokumen

3	Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan (Jawatan Umum)	- Sosialisasi Adminduk - Inovasi Lapis keraton - Rapat koordinasi pengelola website - Rapat koordinasi Inovasi OPD - Jamuan makan dan minum tamu - Belanja Tenaga administrasi - FGD konsultasi publik Pelayanan terpadu kemantren - Sosialisasi Pelayanan Publi dan adminduk	1 dokumen 36 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 11 dokumen 12 dokumen 1 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 198.265.415,-.dan terealisasi sebesarRp 198.265.415,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Kraton
2. Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinanan Non Usaha
3. Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sebagaimana disebutkan bahwa indikator program tersebut adalah nilai survey kepuasan masyarakat dengan target 85,75 dan realisasi 86,66 hal itu didukung dengan pelaksanaan yang baik pada sub-sub kegiatan diatas misal pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Kraton yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran dengan adanya Perencanaan monev pembangunan wilayah terintegrasi yaitu dengan mengadakan monev yang dilakukan tim terhadap pelaksanaan pembangunan wilayah, kemudian pelaksanaan Pengelola Pembinaan Pengembangan Perekonomian.

Selanjutnya didukung Sub Kegiatan Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinanan Non Usaha yang dilaksanakan oleh Jawatan Umum dengan adanya operasional pelayanan yang terkait perizinan, monitoring pemantauan perizinan dan sosialiasi pelayanan perizinan. Serta Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait

dengan non perizinan yang juga dilaksankan oleh Jawatan Umum dengan adanya Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Publik dan Adminduk. Dan juga dengan adanya pelayanan di Kemantren Kraton seperti Layanan legalisir dokumen kependudukan misal KTP, C1, izin penelitian untuk mahasiswadari Universitas di DIY, Persetujuan lokasi penelitian bagi mahasiswa dari luar DIY, izin tetap di DPMPTSP, persetujuan lokasi KKN, Surat keterangan waris tanah, waris bank, waris BPJS ketenagakerjaan,Mengetahui penduduk Kemantren Kraton untuk digunakan berbagai kepentingan (menikah, cerai, menjual tanah, keringanan biaya sekolah dll). Pelayanan tersebut dilkukan baik, ramah dan cepat serta dg didukung whatsap hotline Kemantren Kraton dimana manfaat hotline itu berupa whatapp Kemantren yg terhubung ke ketua RT RW se Kemantren Kraton, jd ketika ada info yang akan kita sampaikan ke masyarakat, akan kita umumkan lewat hotline, contoh pengumuman untuk berpartisipasi dalam mensukseskan survey BPS, informasi ada kegiatan atau usaha di wilayah Kemantren Kraton yang memerlukan kajian lingkungan memerlukan partisipasi atau masukan dari masyarakat mengenai kegiatan tersebut, informasi tetang vaksin, info pelayanan mall pelayanan publik, infomasi layanan capil dan informasi informasi lainnya,diharapkan akan mendukung kepuasan masyarakat

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Swadaya Masyarakat Kemantren Kraton dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, didukung oleh kegiatan-kegiatan di Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan juga didukung oleh Pemberdayaan Kelurahan (Patehan, Panembahan, Kadipaten) dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasrana Kelurahan (Patehan, Panembahan, Kadipaten),

Pemberdayaan Kelurahan (Patehan, Panembahan, Kadipaten) adapun kegiatan tersebut diantaranya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan Jawatan Sosial dengan dasilitasi pelayan masyarakat, forum pemberdyaan dan pelaksanaan WJNC, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dan Kemantren sebagai sarana menjaring aspirasi warga masyarakat yang akan dituangkan dalam renja kemudian menjadi DPA Kemantren Kraton, Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja dengan pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kelurahan dan penyusunan data monografi kelurahan, Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Patehan, Panembahan dan Kadipaten, Sub

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kel. Patehan, Panembahan dan kadipaten. Selanjutnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan Jawatan Praja, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran, Selanjutanya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisiasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan Jawatan Keamanan, Selanjutnya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan Jawatan Sosial, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnyayang dilaksanakan Jawatan Sosial, Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam yang dilaksanakan Jawatan Keamanan.dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jawatan Sosial)	- Pawai Budaya WJNC - Forum Pemberdayaan tingkat kemantren - Forum TP PKK Kemantren Kraton - Fasilitasi Pelayanan Masyarakat - Workshop Penguatan kader MK - Sosialisasi PAAR EDI - Workshop Pembinaan UP2K kelurahan se Kemantren Kraton	45 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 30 orang 30 orang 20 orang
2	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (jawatan Praja)	- Musrenbang Kelurahan - Musrenbang Kemantren Kraton	30 lembaga 30 lembaga
3	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan (Jawatan Praja)	- Evaluasi kelurahan - Penyusunan Data Monografi kelurahan	1 laporan 1 laporan
4	Terlaksananaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patehan	- Pemeliharaan PJU lingkungan - Pengadaan CCTV - Pembuatan Taman - Konblokisasi tersebar se Kel Patehan - Pemasangan Batu Candi tersebar se Kel. Patehan - Pengadaan tempat sampah terpisah - Pemeliharaan ringan	100 titik 4 unit 1 lokasi 500 m2 131 m2 6 set 1 paket
5	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patehan	- Pelatihan strory telling & Etika bagi para Pelaku wisata	25 orang

		- Penyuluhan Kader Posyandu - Senam Lansia - Jasa fasilitator pemberdyaan kelurahan - Pelatihan even organizer - Pelatihan berbusana Jawa - Pelatihan pengolahan makanan B2SA - Pelatihan packaging - Pelatihan perwatan ODGJ - Penyuluhan kader kesehatan - Pelatihan pengolahan sampah organic - Bimbingan belajar JBM - Fasilitasi rapat lembaga kemasyarakatan	25 orang 100 orang 1 orang 25 orang 25 orang 25 orang 30 orang 25 orang 25 orang 30 orang 10 kali 137 lembaga
6	Terlaksananaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Panembahan	3. Pemeliharaan PJU Lingkungan 4. Pemeliharan ringan tersebar 5. Pengadaan cermin cembung kampong Panembahan (RW 11,13,14) 6. Corblok (gg. Duryadi Pratopo RT 39,40,42) 7. Konblok kampong suryoputran (RW 9), Kampung Mangunegaran (RW 18) 8. Pelumpuran SPAH (Kampung Suryoputran dan Mangunegaran)	199 titik 1 kelurahan 10 titik 1 paket 1 paket 15 titik
7	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panembahan	9. Pelatihan adminstrasi Dasawisma 10.Pelatihan Bahasa Inggris dan Pemandu wisata 11.Pelatihan Bahasa Jawa 12.Pelatihan caregiver lansia 13.Pelatihan fisik motorink kasar bagi anak usia dini 14.Pelatihan kader sebagai agen inisiator untuk pengembangan kampong sehat Panembahan 15.Pelatihan keleuarga sehat, tanggap, tangguh bencana 16.Pelatihan kuliner tradisional 17.Pelatihan MC Bahasa jawa 18.Pelatihan pelayanan kesehatan masyarakat. 19.Pelayanan pemanfaatan sampah organic menjadi kerajinan 20.Pelatihan pemasaran online 21.Pelatihan pembentukan karakter dan publick speaking 22.Pelatihan pengelolaan bank sampah kampong suryoputran 23.Pengelolaan kampong wisata 24.Pelatihan penghijauan dan pengembangan lorong / kampong sayur dan lorong hijau 25.Pelatihan pengolahan sampah biopori 26.Pelatihan peningkatan kualitas Media penyampaian informasi perencanaan, program dan laporan pertanggungjawaban organisasi social 27.Pelatiahan pertolongan pertama kegawat daruratan dan penggulangan bencana 28.Pelatihan senam diabel bagi lansia 29.Pelatihan UMKM 30.Pembinaan dan pendampingan bagi kelurga ODGJ 31.Pembinaan RW siaga 32.Penyuluhan kesehatan (tentang penyakit hipertensi dan diabetes militus) 33.Ruang kreasi anak kampong gamelan 34.Sarasehan dan dialog mengenai pengadaan rutin kegiatan minat dan bakat warga 35.Sarasehan fungsi dan ketahanan keluarga	75 orang 50 orang 25 orang 40 orang 20 orang 56 orang 50 orang 30 orang 45 orang 32 orang 50 orang 25 orang 50 orang 40 orang 56 orang 45 orang 57 orang 56 orang 30 orang 40 orang 60 orang 50 orang 35 orang 40 orang 100 orang

		36.Sarasehan peningkatan kapasitas LPMK dalam mendukung pembangunan di Kelurahan Panembahan 37.Sarasehan peningkatan TKPK dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan Panembahan 38.Sarasehan peran serta keluarga dalam penurunan angka KDRT di Kelurahan Panembahan 39.Sosialisasi 5 kunci pangan dalam rumah tangga 40.Sosialisasi pembentukan dapur Balita Sehat 41.Sosialisasi pernikahan dini dalam rangka menuju Panembahan bebas tunting 42.Sosialisasi Pokja Posyandu 43.Sosialisasi zero TB, penyakit menulat dan tidak menular 44.Temu keluarga penyandang disabilitas 45.Workshop penangkis 46.Workshop peningkatan seni budaya melalui kegiatan lembaga-lembaga di kelurahan Panembahan 47.Gelar kreatif seni PAUD 48.Lomba masak untuk balita stunting 49.Lomba dongeng untuk anak usia 7-12 tahun	56 orang 55 orang 65 orang 47 orang 40 orang 40 orang 35 orang 50 orang 36 orang 50 orang 40 orang 47 orang 58 orang 150 orang 25 orang 25 orang
8	Terlaksananaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kadipaten	- Pembelian Lampu PJU Lingkungan - Penataan sarana dan Prasarana pendukung wisata - Pembuatan Media Story Telling bagi Wisatawan - Pembuatan garasi gerobak sampah dan dan tempat pemilahan sampah - Konblokisasi tersebar se kelurahan - Pengadaan tempat penampungan dan pemilahan sampah organik - Pemeliharan ringan RTHP RW 10 - Pengolahan sampah organik (biopori di wilayah) - Pengadaan alat pencacah sampah organik - Pemasangan papan nama kampung Kadipaten Kulon - Renovasi atap balai RW 13 - Renovasi pintu, canopy dan dinding balai RW 15 - Pemasangan Canopy Sumur Umum RT 44 - Perbaikan atap MCK umum RT 9 - Pengadaan tempat sampah terpilah 4 bin - Pengadaan gerobak sampah - Pembuatan Gapura tanda masuk kampung RW 7 - Pembuatan garasi gerobak sampah RT 9 - Pembuatan alat penca	80 unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 855 m^2 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 unit 2 unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 15 unit 5 unit 1 Paket 1 Paket 3 unit1 unit
9	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kadipaten	- Festival Pisungsung Ruwahan - Gelar Potensi Wilayah - Pelatihan Manajeman Kepariwisataan	60 orang 1 kegiatan 20 orang

		- Pelatihan Pemandu Wisata - Pelatihan Adat Tradisi Jawa - Pelatihan Pembuatan Makanan tradisional - Pelatihan Karawitan, macapat dan tari klasik - Pelatihan pembuatan pupuk organik - Penyelenggaraan turnamen olahraga dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda - Senam Sehat Germas - Workshop Konten Kreatif dengan Tema Nasionalisme - Pelatihan pendampingan keluarga pendam ping ODGJ - Pelatihan kader posyandu - Gebyar PAUD - Senam lansia di Wilayah - Jam Belajar Masyarakat (JBM) - Fasilitasi lembaga kemasyarakatan Kelurahan - Monev kel. Rentan dan afirmatif - Workshop Kampung Pancatertip - Workshop Penanganan Kebencanaan - Pelatihan Adm Pokja PKK dan Mitra Keluarga 1.	20 orang 20 orang 20 orang 9 kali 20 orang 1 kegiatan 85 orang 40 orang 20 orang 20 orang 1 kegiatan 4 kali 12 kali 142 lembaga 20 orang 30 orang 30 orang 30 orang
10	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jawatan Praja)	- Penyuluhan Penguatan Kapasitas RTRW 2. Pengamanan boks pada proses penghitungan suara pada Pemilu dan Pilkada	31 lembaga kemasyarakatan 2 dokumen
11	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat(Jawatan Kemakmuran)	- Gebyar Bank Sampah - Gelar Potensi UMKM dan Gapoktan - Pelatihan Administrasi Bank Sampah - Pelatihan Ecoprint Lanjutan - Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik - Lomba Cerdas Cermat Pengetahuan Sapta Pesona (Pokdarwis) - Koordinasi Forum UMKM, Gapoktan, BankSampah, Pokdarwis, CSR dan Lembaga Tingkat Kemantren	1 hari 2 hari 20 orang 20 orang 20 orang 1 dokumen 5 Lembaga
12	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga(Jawatan Kemakmuarn)	3.Pelatihan Budidaya Buah dalam Pot 4. Pelatihan Packaging Telur Asin	20 orang 20 orang
13	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (Jawatan Sosial)	5.Pelatihan Menu untuk Anak Stunting 6.Pelatihan Masakan Tradisional Pendukung Upacara Adat 7.Workshop Peran PKK dalam Penurunan Angka Stunting melalui GKSTTB 8.Workshop Peran PKK dalam Pencegahan Kebakaran dan Bencana melalui GKSTTB 9.Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PMT Stunting 10.Pelatihan Kader Posyandu Muda Berbasis IT 11.Sosialisasi Penanganan ODGJ 12.Festival Olah Raga Tradisional	20 orang 20 orang 30 orang 30 orang 3 kelurahan 43 orang 35 orang 1 hari 12 bulan
14	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya (Jawatan Sosial)	- Forum Tim Penanggulangan Kemiskinan	12 bulan

15	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Jawatan Keamanan)	- Forum Kampung Tangguh Bencana - Penyuluhan Mitigasi Bencana Kemantren Kraton	3 kali 2 kali

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp 4.051.263.241,- dan terealisasi Rp 4.011.337.815,- atau 99,01%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan
4. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Terlaksananya Evaluasi Kelurahan
6. Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
7. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyakarat
8. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
9. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
10. Terlaksananya Penumbuhan kesadaran dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya.
11. Terlaksananya pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu angka Swadaya Masyarakat Total sebesar Rp. 1.032.431.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.433.886.600,- atau tercapai 138,88% hal itu didukung dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi pada ketiga Kelurahan yang ada di Kemantren Kraton (Kelurahan Patehan, Panembahan dan Kadipaten) untuk kepentingan lingkunganya bersemangat untuk berbagi dan berswadaya serta kepedulian warga masyarakat untuk membangun wilayahnya dan bangkit untuk hidup sehat dan pemulihan ekonomi. Swadaya masyarakaat total tersebut tidak hanya pada pembangunan fisik tapi juga pada pemberdayaan masyarakat, ketika pekerjaan fisik yang besar sudah tertanggung APBD maka warga masyarakat mendukung dengan swadaya

masyarakat total dalam skala kecil sesuai kemampuan masing2 untuk membangun wilayahnya. Dan juga seperti pelaksanaan serta kerja bakti menjaga kebersihan lingkungan tetap terlaksana biarpun harus berswadaya mendukung Kota Yogyakarta dalam masa Darurat Sampah dengan pengolahan sampah secara mandiri.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Menurunnya pelanggaran perda di Kemantren Kraton, juga didukung oleh kegiatan Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau kepolisian Republik Indonesia yang optimal yang diampu oleh Jawatan Keamanan dan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Republik Indonesia	- .Frekuensi Pengamanan Masyarakat - Peralatan Operasional - Operasi Ketertiban Masyarakat - Penyuluhan Jaga Warga - Penyuluhan Linmas - Penyuluhan PKL - Sosialisasi Pondokan - Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu - Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada	54 kali 2 jenis 12 laporan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 15 kali 40 kali

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp 111.011.000,- dan terealisasi Rp 111.011.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Republik Indonesia

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu jumlah pelanggaran perda dengan target 36 kali pelanggaran dan terealisasi 32 kali, hal itu didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, dengan adanya frekuensi pengamanan masyarakat yang rutin, operasi ketertiban masyarakat, pemantauan wilayah dan sosialisasi / penyuluhan seperti Penyuluhan Jagawarga, Penyulhan Linmas, Penyuluhan

PKL, Sosialisasi Pondokan, pembekalan linmas dalam menghadapai Pemilu dan koordinasi Linmas maka akan mendukung penurunan jumlah pelanggaran perda.

Kemudian untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemeerintahan didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan oleh Jawatan keamanan serta Sub kegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasiona	Pembinaan FPK, FKDM, FKUB	2 kali
2	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan di kecamatan	- Peringatan HUT Kemerdekaan RI - Fasilitasi Forkompimka - Honor Forkompimka	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp 39.618.000,- dan terealisasi Rp 39.618.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Terlaksananya Fasilitasi / koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosilaisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)
b. Terlaksananya tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yaitu Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi jumlah dengan target 100 % dan terealisasi 100 %, hal itu didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, dengan adanya pembinaan FKDM, FKUB dan FPK serta koordinasi rutin lintas sektoral dengan melibatkan Forkompimka sehingga permasalahan-permasalah yang ada di Kemantren Kraton bisa terselesaikan 100%, permasalahan tersebut diantaranya :

TW I Tahun 2024

1. Terjalinnya koordinasi secara intensif sehingga terselesaikannya masalah.

   Penertiban area pinggir beteng Margihinggil Jalan Kenekan dengan memberikan pembinaan kepada warga RW 16 dan RW 18 untuk menjaga ketertiban warganya dengan tidak berjualan dan menaruh barang-barang di taman pinggir beteng margihinggil Jalan Kenekan Panembahan Melibatkan Forkompimka, BKO, RW dan kelurahan

TW II Tahun 2024

1. Mengatasi Permasalahan gelandangan di Plengkung Gading atas laporan warga masyarakat bahwa beberapa hari tidur di Plengkung Gading, ditindak lanjuti dengan koordinasi Forkompimtren kemudian mengkondisikan Plengkung Gading agar bersih dari gelandangan.
2. Mengatasi permasalahan ODGJ dari luar yang kambuh di Kelurahan Patehan yang sempat meresahkan warga masyarakat, atas hasil koordinasi Forkompimtren kemudian ditindak lanjuti dengan mengamankan ODGJ tersebut kemudian dilakukan pengobatan oleh Puskesmas Kraton dilanjutkan di bawa ke Rumah Sakit Harjolukito.
3. Mengatasi masalah di perbatasan RW5 dan RW 6 Kel. Patehan, berawal dari adanya mobil pick up yang di parkir sembarangan kemudian oleh warga masyarakat sekitar dipakai untuk membuang sampah sementara sehingga menumpuk dan menimbulkan bau karena tidak ada yang mengambil atau membersihkan, Kemudian atas hasil koordinasi Forkompimtren, DLH dan warga sekitar ditindak lanjuti dengan membersihkan sampah tersebut yang dilakukan oleh DLH kemudian lokasi tersebut dijaga oleh linmas selama 3 hari.
4. Pada saat Grebeg Idul Adha ada beberapa jalan yang dilalui prajurit dan bergodo sehingga diperlukan pengamanan karena dijumpai banyak kendaraan yang parkir sembarangan, sehingga perlu pengkondisian dan kerjasama Kemantren, Polsek, Koramil dan SatPol PP.

TW III Tahun 2024

Terjalinnya koordinasi secara intensif sehingga terselesaikannya masalah.

1. Peyelesaian parkir ditrotoar Pasar Ngasem

   Koordinasi dilakukan dengan Forkompimka dan BKO Satpol PP, dengan memanggil pengelola parkir kemudian diberi teguran dan himbauan, yang selanjutnya dipantau setiap pagi dengan melibatkan polsek untuk pengamanan pagi.
2. Penyelesaian pemalakan oleh pengamen Pasar Ngasem

   Koordinasi dilakukan dengan Forkompimka, yang ditindak lanjuti dengan memanggil pemalak tersebut ke Polsek kemudian dipertemukan dengan lurah pasar, kemudian disuruh membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi.

3. Penyelesaian pengamanan grebeg sekaten di Jalan Ngasem, Jl. Rotowijayan agar bebas parkir atau parkir disatu sisi saja. Koordinasi dilakukan beserta Forkompimka dan BKO Satpol PP sehingga antisipasi kemacetan berjalan baik.
4. Penyelesaian parkir bersap di Alkid, koordinasi dilakukan dengan Forkompimka dan Satpol PP BKO dengan ditindaklanjuti dengan monitoring dan memberi peringatan, jika masih membandel kendaraan akan diamankan.

TW IV Tahun 2024

Terjalinnya koordinasi secara intensif sehingga terselesaikannya masalah.

- Koordinasi dan pengkondisian oleh Forkompimtren, PPK, Panwaslucam dan Satpol PP BKO kemudian ditindaklanjuti dengan turun kelapangan melakukan penertiban dan penurunan atribut Paslon, kemudian dikirim ke gudang KPU.
- Penanganan ODGJ yang mengamuk di Musikanan Panembahan, koordinasi melibatkan Forkompimtren, Puskesmas dan TKSK. Kemudian ODGJ dibawa ke Grasia oleh BKO dan TKSK.
- Koordinasi pelaksanaan Operasi miras di minimarket dan kafe diwilayah Kemantren Kraton sehubungan menindaklanjuti surat edaran dari Pemerintah Kota Yogyakarta di Bulan Oktober kemudian ditindak lanjuti dengan turun kelapangan.
- Koordinasi forkompimtren bersama Puskesmas dan BKO Satpol PP dalam menangani dan mengevakuasi mayat di Jl. Rotowijayan Kadipaten, yang meninggal karena sakit dan hidup sebatangkara, kemudian mayat di bawa ke RS Bhayangkara Yogyakarta.
- Koordinasi Forkompimtren terkait pelaksanaan pengamanan agenda Keraton rangkaian Paramaiswari (salah satunya pameran di Keraton dengan tamu undangan dari berbagai tokoh nasional maupun dari wilayah seperti dari DPD dan para menteri), ikut mengkondisikan agar acara berjalan dengan lancar dan aman.
- Koordinasi Forkompimtren, PPK dan Panwas dalam rangka Pengawalan dan pengamanan pada saat rekapitulasi penghitungan suara Pilkada dan pengiriman logistik ke gudang KPU.

11) Kemantren Gondomanan

Kemantren Gondomanan sebagai perangkat daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan yang

dituangkan ke dalam tabel perubahan perjanjian kinerja Kemantren Gondomanan tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	369
2	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	A

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Gondomanan memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) sasaran program yaitu Sasaran Strategis pertama Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan dengan target 369 telah terealisasi sebesar 369,6 atau 100,16%, kemudian Sasaran Strategis kedua yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat dengan indikator Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat dengan target A dan terealisasi A (89,76) atau dengan capaian 100%. Capaian kinerja sasaran strategis yang tinggi tentu tidak dapat dilepaskan dari capaian kinerja program-program yang mendukungnya.

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan tercapai 369,6 atau terealisasi 100,16% dari target 369. Tercapainya sasaran strategis tersebut didukung oleh program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator setara eselon III sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	88,70
2	Pelanggaran Perda di Kemantren Gondomanan menurun	Jumlah Pelanggaran Perda	130
3	Swadaya Masyarakat Kemantren Gondomanan meningkat	Angka Swadaya Murni	Rp 1.044.024.000,-
4	Permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Prosentase Permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%

5	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemantren Gondomanan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Gondomanan memiliki 4 (empat) sasaran program yang mendukung tercapainya sasaran Strategis pertama yaitu Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat antara lain kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan meningkat dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat dengan target 88,70 telah terealisasi 88,72. Selanjutnya sasaran program pelanggaran Perda di Kemantren Gondomanan menurun dengan indikator jumlah pelanggaran Perda menurun dengan target 130 telah terealisasi 127, dan sasaran program swadaya masyarakat Kemantren Gondomanan meningkat dengan indikator program angka Swadaya Murni dengan target Rp.1.044.024.000,- telah terealisasi sebesar Rp.1.049.185.000,- serta Permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dengan indikator program Prosentase Permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi 100%. Dan sasaran program ke lima yaitu Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemantren Gondomanan mendukung tercapainya sasaran Strategis kedua yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat, telah tercapai 100% dengan nilai 85,52 (A poin) dati target nilai A poin.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan meningkat, didukung oleh kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan, yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Sub kegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Gondomanan	1. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	1 kegiatan

2	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan non Perizinan	- Operasional Pelayanan Administasi Terpadu Kemantren (Paten) - Sosialisasi Pelayanan Publik dan Perizinan	12 bulan 1 kali

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp.29.003.000,- dan terealisasi sebesar Rp.29.003.000,- atau 100,00%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Gondomanan
2. Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan non Perizinan

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sebagaimana disebutkan bahwa indikator program tersebut adalah nilai survey kepuasan masyarakat dengan target 88,70 dan realisasi 88,72 hal itu didukung dengan pelaksanaan yang baik pada sub-sub kegiatan diatas misal pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Gondomanan yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran dengan adanya pelatihan UMKM, terlaksananya koordinasi lembaga masyarakat (UMKM dan Gapoktan, Bank sampah) akan mendorong tumbuhnya perekonomian di warga masyarakat sehingga akan mendukung rasa kepuasan pada warga masyarakat. Selanjutanya pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan non Perizinan yang dilaksanakan di Jawatan Umum dengan adanya pelayanan terpadu di Kemantren Gondomanan seperti Layanan legalisasi dokumen kependudukan misal KTP, KK, izin penelitian untuk mahasiswa dari perguruan Tinggi di DIY, Persetujuan lokasi penelitian bagi mahasiswa dari luar DIY, izin tetap di DPMPTSP, persetujuan lokasi KKN, Surat keterangan waris tanah, waris bank, waris BPJS ketenagakerjaan, Surat Keterangan Mengetahui penduduk Kemantren Gondomanan untuk digunakan berbagai kepentingan (menikah, cerai, menjual tanah, keringanan biaya sekolah dll). Pelayanan tersebut dilakukan dengan baik, ramah dan cepat serta dengan didukung teknologi informasi dan juga memanfaatkan media sosial Kemantren yang terhubung ke

ketua RT RW se Kemantren Gondomanan, sehingga ketika ada info yang akan kita sampaikan ke masyarakat, akan kita umumkan lewat berbagai media sosial, contoh pengumuman untuk berpartisipasi dalam mensukseskan survey BPS, informasi ada kegiatan atau usaha di wilayah Kemantren Gondomanan yang memerlukan kajian lingkungan memerlukan partisipasi atau masukan dari masyarakat mengenai kegiatan tersebut, informasi tentang vaksin, info pelayanan mall pelayanan publik, infomasi layanan capil dan informasi lainnya, diharapkan akan mendukung kepuasan masyarakat.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program pelanggaran perda di Kemantren Gondomanan menurun, juga didukung oleh kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp.217.360.000,- dan terealisasi Rp. 217.360.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu jumlah pelanggaran perda dengan target 130 kali pelanggaran dan terealisasi 127 kali, hal itu didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, dengan adanya frekuensi

pengamanan masyarakat yang rutin, pemantauan wilayah dan sosialisasi/penyuluhan seperti Penyuluhan PKL, Sapaan Anak Kos, dan koordinasi Linmas maka akan mendukung penurunan jumlah pelanggaran perda.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program swadaya masyarakat Kemantren Gondomanan meningkat, didukung oleh kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Ngupasan dan Prawirodirjan) dengan sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasrana Kelurahan (Ngupasan dan Prawirodirjan), Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Ngupasan dan Prawirodirjan).

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp2.806.221.448,- dan terealisasi Rp2.791.430.137,- atau 99,47%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Ngupasan
2. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Prawirodirjan
3. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan
4. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan
5. Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7. Terlaksananya Evaluasi Kelurahan
8. Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
9. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
10. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
11. Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
12. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
13. Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
14. Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu angka Swadaya Murni sebesar

Rp.1.044.024.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.049.185,000- (tercapai 100,49%) hal itu didukung dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi pada kedua Kelurahan yang ada di Kemantren Gondomanan (Kelurahan Ngupasan dan Prawirodirjan) untuk kepentingan lingkunganya terutama setelah berakhirnya masa pandemi Covid 19 yang sudah berakhir dan mulai merangsang pertumbuhan ekonomi Masyarakat sehingga bersemangat untuk berbagi dan berswadaya serta kepedulian warga masyarakat untuk membangun wilayahnya. Swadaya murni tersebut tidak hanya pada pembangunan fisik tapi juga pada pemberdayaan masyarakat, ketika pekerjaan fisik yang besar sudah tertanggung APBD maka warga masyarakat mendukung dengan swadaya murni dalam skala kecil sesuai kemampuan masing-masing untuk membangun wilayahnya di masing-masing kelurahan se-Kemantren Gondomanan.

Terlaksananya Pelaksanaan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas yang dilaksanakan Jawatan Sosial dengan adanya Sosialiasi Stunting, monev pelaksanaan stunting, monitoring dan Rakordasi yang mana kegiatan tersebut akan mendukung masyarakat menjadi sehat, pengentasan stunting dan kemiskinan serta mendukung pertumbuhan ekonomi di masyarakat sehingga akan menumbuhkan keberdayaan masyarakat.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi, juga didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahana Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan Jawatan Keamanan dan sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan Jawatan Praja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) yang Mengikuti Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang
2	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren (Forkompintren)	12 bulan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp.73.350.000,- dan terealisasi

Rp.73.350.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kemantren Gondomanan.
2. Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Gondomanan.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu Prosentase Permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dengan target 100% dan terealisasi 100%, hal itu didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, dengan adanya koordinasi yang baik dan bersinergi bersama antar unsur pimpinan di Kemantren Gondomanan secara terpadu melibatkan Koramil dan Polsek, sehingga potensi permasalahan sebagai kawasan strategis di Kemantren Gondomanan sebagai pusat aktivitas masyarakat dan masalah sosial maupun gangguan ketertiban umum dapat teratasi secara terkoordinasi dengan baik.

Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis "Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat" adalah 89,76 (nilai A) dari target nilai A atau tercapai sebesar 100% dengan predikat peringkat kinerja Sangat baik.

Upaya pencapaian sasaran strategis Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat, didukung dengan 1(satu) program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja Kemantren Gondomanan meningkat.

Capaian kinerja sasaran strategis "Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat" tahun 2024 mengalami penambahan parameter menjadi 8 unsur yang sebelumnya pada tahun 2023 hanya 5 unsur. Namun demikian Kemantren Gondomanan telah mencapai nilai 89,76 (A poin) dari target A poin atau tercapai 100% dengan predikat peringkat kinerja Sangat baik. Hal ini menunjukkan proses internalisasi, pelaksanaan dan pendokumentasian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kemantren Gondomanan yang baik dan senantiasa diupayakan terus semakin baik. Selain itu, tindak lanjut terhadap catatan dan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya juga memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian nilai hasil pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tahun 2024.

Capaian kinerja sasaran strategis yang tinggi tentu tidak dapat dilepaskan dari capaian kinerja program-program yang mendukungnya. Pada tabel berikut memperlihatkan

perbandingan capaian target kinerja masing-masing program pada tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

No	Program	Indikator	Target Tahun				Capaian dan Prosentase Realisasi Tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Dokumen pemanfaatan ruang Strategis sumbu filosofis	-	-	-	2 dok	-	-	-	2 dok (100%)
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87,9	87,9	88,62	88,70	88,57 (101%)	88,62 (100,06%)	88,68 (100,06%)	88,72 (100,02%)
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat	469.200.000	478.584.000	1.032.240.000	1.044.024.000	480.256.250 (102%)	515.392. 000 (107,69%)	1.039.317. 000 (100,68%)	1.049.185.000 (100,49%)
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggar-an Perda	160	157	140	130	145 (109,38%)	152 (103,18%)	136 (102,86%)	127 (102,31%)
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase penyelesaian masalah pemerintahan umum	-	-	100%	100%	-	-	100% (100%)	100% (100%)
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	-	A	A	A	-	87,19 (A) (100%)	86,47 (A) (100%)	85,52(A) (100%)

Sedangkan persentase perbandingan capaian kinerja keuangan masing-masing program Kemantren Gondomanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan Program Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Program/Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	-	-	-	-	99,83 %
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	94,60	99,12	99,65	100 %	100 %

3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	98,95	98,02	99,19	98,97 %	99,47 %
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	99,94	100	100%	100%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	98,95	98,02	99,19	100%	100%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,29	94,87	92,83	95,48 %	93,09%
					96,80 %	**95,39 %**

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Selanjutnya capaian indikator kinerja program terhadap target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program dengan Target Renstra

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Prosentase capaian tahun ini terhadap target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemantaatan Ruang Strategis Sumbu filosofis	2 dok	2 dok	2 dok	100%
2	Program Penyelengga-raan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88,70	88,72	88,80	99,91%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat	1.044.024 .000	1.049.185.000	1.073.276.0 00	97,76%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	130	127	110	84,55%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase penyelesaian masalah sbg hasil koordinasi	100%	100%	100%	100%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	(A)	85,52(A)	(A)	100%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Dari data pada tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis dan semua program di Kemantren Gondomanan masuk kategori Sangat Tinggi dengan prosentase capaian yang sesuai target yang telah ditetapkan. Tentu hal ini tidak terlepas dari peran

faktor-faktor yang mendukung kinerja Kemantren Gondomanan tersebut. Meskipun masih ada beberapa faktor penghambat, namun berkat sinergi yang kuat antara Pemerintah, masyarakat dan stakeholder serta motivasi dan semangat untuk melayani dengan hati yang terbaik untuk masyarakat, maka hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi dan diminimalisir dengan baik.

12) Kemantren Pakualaman

Kemantren Pakualaman sebagai perangkat daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman yang dituangkan ke dalam tabel perubahan perjanjian kinerja Kemantren Pakualaman tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	407
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Pakualaman memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) sasaran program, yaitu Sasaran Strategis pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman dengan target 407 telah terealisasi sebesar 407 atau 100%, kemudian Sasaran Strategis kedua, yaitu Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman dengan indikator Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat dengan target A dan terealisasi A (89,993) atau dengan capaian 100%. Capaian kinerja sasaran strategis yang tinggi tentu tidak dapat dilepaskan dari capaian kinerja program-program yang mendukungnya.

Tercapainya sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program

Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Kepuasan Layanan Masyarakat di Kemantren Pakualaman	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman	83,00 poin
2	Meningkatnya Swadaya Masyarakat Kemantren Pakualaman	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	705.000.000 rupiah
3	Menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Pakualaman	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman	79 pelanggaran
4	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kemantren Pakualaman	Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman Terselesaikan sebagai Hasil Koordinasi	100 %
5	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilain SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Pakualaman memiliki 4 (empat) sasaran program yang mendukung tercapainya sasaran Strategis pertama, yaitu Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat antara lain Kepuasan Layanan Masyarakat di Kemantren Pakualaman meningkat dengan indikator program Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman dengan target 83,00 telah terealisasi 88,33. Selanjutnya sasaran program Pelanggaran Perda di Kemantren Pakualaman menurun dengan indikator Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman dengan target 79 telah terealisasi 79, dan sasaran Swadaya Masyarakat Kemantren Pakualaman meningkat dengan indikator program Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman dengan target Rp. 705.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 974.015.000,-, serta Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kemantren Pakualaman meningkat dengan indikator program Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman Terselesaikan sebagai Hasil Koordinasi 100%. Dan sasaran program ke lima, yaitu Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemantren Pakualaman mendukung tercapainya sasaran Strategis kedua, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman meningkat, telah tercapai 100% dengan nilai 89,993 (A nilai) dari target nilai A nilai.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Pakualaman meningkat, didukung oleh Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan, yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum secara optimal	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen
2.	Terlaksananya urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan Non Usaha secara optimal	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	12 dokumen
3.	Terlaksananya urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan secara optimal	Jumlah Laporan Pelaksanaan non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum adalah sebesar Rp. 27.697.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.697.800,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Monev Pembangunan Wilayah

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha adalah sebesar Rp. 5.551.500,- terealisasi Rp. 5.551.500,- atau 100 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan. Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan Non Usaha.

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan adalah sebesar Rp. 29.945.760,- terealisasi Rp. 29.933.760,- atau 99,96 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

a. Operasional PATEN
b. Forum Konsultasi Publik
c. Diseminasi Informasi Pelayanan Prima
d. Koordinasi Pengembangan Inovasi Kemantren Pakualaman
e. Operasional Website dan Media Sosial Kemantren Pakualaman
f. Operasional Pelayanan Pengaduan, Informasi dan PPID Kemantren Pakualaman

Sasaran subkegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Swadaya Masyarakat Kemantren Pakualaman, didukung oleh kegiatan dengan subkegiatan:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan secara optimal	Jumlah Laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12 laporan
2.	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang optimal.	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Kelurahan	215 Lembaga Kemasyarakatan
3.	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungketur secara optimal	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	64 unit
4.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunungketur secara optimal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	206 Pokmas/ormas
5.	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti secara optimal	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	25 unit
6.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwokinanti secara optimal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	249 Pokmas/ormas
7.	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan yang optimal	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	1 laporan
8.	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang optimal	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	1 lembaga kemasyarakatan
9.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang optimal	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	215 lembaga kemasyarakatan
10.	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat secara optimal	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	12 laporan
11.	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga secara optimal	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	50 keluarga
12.	Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup secara optimal	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kelestarian lingkungan hidup	40 keluarga

13.	Terlaksananya peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	185 keluarga
14.	Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan hidup bersih dan sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan hidup bersih dan sehat	35 keluarga
15.	Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	35 keluarga
16.	Terlaksananya pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	35 keluarga
17.	Terlaksananya pelatihan keluarga tanggap bencana alam secara optimal	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam secara optimal	20 keluarga
18.	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	55 keluarga

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah sebesar Rp. 122.255.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 122.255.300,- atau 100 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Pawai Budaya WJNC Kemantren Pakualaman
2. Fasilitasi PKK Kemantren Pakualaman
3. Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan
4. Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kemantren Pakualaman
5. Peringatan Malam 1 Suro

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan adalah sebesar Rp. 47.507.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.507.900,- atau 100 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Musrenbang Kelurahan Gunungketur

2. Musrenbang Kelurahan Purwokinanti
3. Musrenbang Kemantren Pakualaman
4. Sosialisasi Perencanaan Pembangunan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungketur adalah sebesar Rp. 471.600.982,- dan terealisasi Rp. 469.119.760,- atau 99,47%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum
2. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
3. Gerobak Sampah Pilah Kampung Gunungketur (Belanja Hibah)
4. Mesin Pencacah Sampah Organik Kampung Gunungketur, Margoyasan dan Kauman (Belanja Hibah)
5. Timbangan Digital Bank Sampah 9 RW (Belanja Hibah)
6. Gapura Kampung Margoyasan (Belanja Hibah)
7. Pekerjaan Paving Block Barat Lapas RW 08 (Belanja Hibah)
8. Pekerjaan Paving Block Gang Budi Darmo (Belanja Hibah)
9. Pekerjaan Paving Block Barat SD Muhammadiyah Sukonandi (Belanja Hibah)
10. Pekerjaan Paving Block RW 03, GG 6A RT 10 Depan Asrama Wajo (Belanja Hibah)
11. Pekerjaan Paving Block Gang Nanas RW 3 RT 11 (Belanja Hibah)
12. Pekerjaan Paving Block Jalan RW 02 / RT 05 (Belanja Hibah)
13. Pekerjaan Paving Block Jalan RW 02 / RT 06 (Belanja Hibah)
14. Pekerjaan Paving Block Jalan RW 02 / RT 08 (Belanja Hibah)
15. Pekerjaan Paving Block RW 03 GG 20A RT 10 (Belanja Hibah)
16. Pekerjaan Paving Block Timur SD Muhammadiyah Sukonandi (Belanja Hibah)
17. Pemeliharaan MCK Umum RT 29 RW 07 (Belanja Hibah)
18. Pemeliharaan SPAH di Wilayah RW 03 04 06 (Belanja Hibah)
19. Pemeliharaan Cermin Tikungan
20. CCTV Kampung (Belanja Modal)

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunungketur adalah sebesar Rp. 689.724.900,- dan terealisasi Rp. 689.687.900,- atau 99,99%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur (honor pelayan masyarakat, rapat koordinasi)

2. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Kelurahan Gunungketur (rapat koordinasi, honor instruktur)
3. FGD Konvensi Hak Anak
4. FGD Literasi Keuangan Berbasis Digital Bank
5. Gelar Karya Anak Kelurahan Gunungketur
6. Gelar Kreatifitas Seni Lansia Kelurahan Gunungketur
7. Gelar Potensi Seni Budaya dan UMKM Kelurahan Gunungketur
8. Pelatihan Media Sosial Kampung Wisata
9. Pelatihan Pembuatan Rujak Ice Cream
10. Pelatihan Pembuatan Teh Celup Telang
11. Pelatihan Pertanian Perkotaan
12. Pelatihan Pra Koperasi
13. Warsimah Pasaran
14. Jasa Lainnya Orang Perseorangan
15. Gerak Kibar Kebangsaan Guntur Berdaya
16. Merti Kampung Gunungketur
17. Musrenbang Tingkat Kampung Kelurahan Gunungketur
18. Pembuatan Video Profil

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti adalah sebesar Rp. 502.013.200,- dan terealisasi Rp. 469.313.000,- atau 93,49%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pemeliharan Jalan KelurahanPurwokinanti
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum
3. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah Kelurahan Purwokinanti
4. Pemeliharaan SAH di wilayah Kelurahan Purwokinanti (Belanja Hibah)
5. Pemeliharaan Taman Kelurahan Purwokinanti (Belanja Hibah)
6. Paving Block Kampung Kepatihan (Belanja Hibah)
7. Gerobak Sampah Pilah di wilayah Kelurahan Purwokinanti (Belanja Hibah)
8. Mesin Pencacah Sampah Organik (Belanja Hibah)
9. Pengadaan Cermin Tikungan di wilayah Kelurahan Purwokinanti (Belanja Hibah)
10. CCTV Kampung (Belanja Modal)

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwokinanti adalah sebesar Rp. 791.236.250,- dan terealisasi Rp. 790.616.250,-

atau 99,92%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Lembaga Kemasayarakatan Kelurahan Purwokinanti (rapat koordinasi, honor pelayan masyarakat)
2. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Kelurahan Purwokinanti (rapat koordinasi)
3. Gebyar Sumpah Pemuda
4. Gelar Kreatifitas Anak Usia Dini Kelurahan Purwokinanti
5. Gelar Potensi Seni Budaya Pariwisata dan UMKM di wilayah Kelurahan Purwokinanti
6. Gelar Upacara Adat Ruwahan
7. Pelatihan Digital Marketing
8. Pelatihan Fotografi (Dasar)
9. Pelatihan Kerajinan
10. Pelatihan Lorong Sayur
11. Pelatihan Membatik Dasar (Batik Tulis & Shibori)
12. Pelatihan Penanaman TOGA
13. Pelatihan Pengisian Admin Posyandu dan SIP
14. Pelatihan Pengolahan Makanan B2SA
15. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan
16. Pelatihan Pertanian Hidroponik
17. Pelatihan PPGD
18. Pelatihan Pra Koperasi
19. Pelatihan Public Speaking dan Pranataadicara
20. Pelatihan Teknologi Maintenance CCTV
21. Pelatihan Web Developer
22. Lomba Administrasi PKK
23. Senam Lansia di wilayah
24. Workshop Bahaya Narkoba Khusus untuk Remaja
25. Workshop Kesehatan Reproduksi bagi PUS (Pasangan Usia Subur)
26. Workshop Manajemen Organisasi PSM
27. Workshop Peningkatan Semangat UMKM
28. Workshop Rumah Sehat dan Layak Huni
29. Jasa Lainnya Orang Perseorangan
30. Pengadaan Tensimeter diwilayah (Posbindu 10 RW)
31. Pengadaan Tensimeter untuk Posyandu Lansia

32. Workshop Media Sosial untuk Pemuda
33. Kreasi Mug Keramik Ecoprint
34. Musrenbang Tingkat Kampung

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Evaluasi Kelurahan adalah sebesar Rp. 12.590.800,- dan terealisasi Rp. 12.590.800,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Dokumen Monografi Kelurahan
2. Dokumen Profil Kelurahan
3. Evaluasi Kemantren Tingkat Kota Yogyakarta (SI KEREN)
4. Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan adalah sebesar Rp. 19.780.000,- dan terealisasi Rp. 19.780.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pengamanan Box pada proses penghitungan untuk Pemilu tahun 2024
2. Fasilitasi Pengamanan Box pada proses penghitungan untuk Pilkada tahun 2024

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan adalah sebesar Rp. 920.000,- dan terealisasi Rp. 920.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan. Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kemantren.

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah sebesar Rp. 23.352.500,- dan terealisasi Rp. 23.344.400,- atau 99,97%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Kelembagaan Pelaku Ekonomi Kemantren Pakualaman
2. Forum Gandeng Gendong Tingkat Kemantren
3. Pelatihan Media Marketing Online Pemantapan UMKM dalam Manajemen Usaha
4. Pelatihan Pembuatan Bakpia Kukus dan Pengemasan Produk
5. Rakor Pojok UMKM

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga adalah sebesar Rp. 4.175.000,- dan terealisasi Rp. 4.175.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Forum Gapoktan
2. Koordinasi Kelompok Wanita Tani

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 26.014.800,- dan terealisasi Rp. 25.984.800,- atau 99,88%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut :

1. Pelatihan Pemanfaatan Lahan Perkarangan/Pertanian Perkotaan
2. Pelatihan Pilah Pilih Sampah
3. Workshop Menuju Zero Sampah (Anorganik) di Wilayah Kemantren Pakualaman
4. Evaluasi Hasil Monev Bank Sampah Tingkat Kemantren
5. Fasilitasi Forum Bank Sampah Tingkat Kemantren
6. Fasilitasi Proklim dan Kampung Hijau Kemantren Pakualaman
7. Koordinasi Pengelolaan Sampah DAIS
8. Monitoring Pengolahan Bank Sampah Tingkat Kampungi

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing adalah sebesar Rp. 24.887.500,- dan terealisasi Rp. 24.887.500,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Gebyar Lansia
2. Gebyar PAUD
3. Sarasehan PKK Kemantren Pakualaman
4. Workshop Kegiatan Difabel
5. Workshop Pembinaan Kelembagaan PSM
6. Workshop tentang Paralegal untuk Pengurus SIGRAK, FPKK, dan Tokoh Masyarakat
7. Pendampingan dan Sapa Difabel

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sebesar Rp. 8.280.000,- dan terealisasi Rp. 8.280.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Operasional Kerja Bakti Fasilitas Umum Kemantren Pakualaman
2. Pembinaan dan Evaluasi Keterpaduan BKB, PAUD dan Posyandu
3. Pertemuan Forum IMP dalam Program KB Tingkat Kemantren

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya adalah sebesar Rp. 7.602.300,- dan terealisasi Rp.

7.602.300,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Workshop Kewirausahaan Pada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
2. Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan
3. Operasional Pertemuan IPSM
4. Operasional Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga adalah sebesar Rp. 3.407.300,- dan terealisasi Rp. 3.407.300,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan. Pelatihan Kader Mitra Keluarga sebagai Konselor

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas adalah sebesar Rp. 8.122.300,- dan terealisasi Rp. 8.122.300,- atau 100 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Program Kerja Forum Anak
2. Fasilitasi Forum Anak Kemantren
3. Fasilitasi Kecamatan Layak Anak
4. Fasilitasi Komisi Lansia Kemantren

Sasaran subkegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program menurunnya pelanggaran perda di Kemantren Pakualaman, juga didukung oleh kegiatan dengan subkegiatan yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

(Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum: diambil dari Perkin eselon IV Jawatan Keamanan)

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam secara optimal	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20 keluarga
2.	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13 Laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam adalah sebesar Rp. 1.840.000,- dan terealisasi Rp. 1.840.000,- atau 100 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan. Koordinasi Forum Kampung Tanggap Bencana (KTB)

Untuk sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebesar Rp. 103.227.000,- terealisasi Rp. 103.226.000,- atau 99,99%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Jasa Tenaga Administrasi
2. Pembelian Peralatan Operasional
3. Workshop Penegakan Regulasi Tertib Perizinan bagi Pelaku Usaha
4. Fasilitasi operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilu tahun 2024
5. Fasilitasi operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pilkada tahun 2024
6. Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
7. Sapa Pelaku Usaha
8. Pengamanan Kegiatan Insidentil Masyarakat

Sasaran subkegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, juga didukung oleh kegiatan dengan subkegiatan yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV Jawatan Praja dan Jawatan Keamanan sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sub Kegiatan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional secara optimal	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sub Kegiatan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional secara optimal	275 orang
2.	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang optimal	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen

Untuk sub kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional) adalah sebesar Rp. 57.344.000,- terealisasi

Rp. 57.344.000,- atau 100 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan Pemadam Kebakaran Karang Taruna Kemantren Pakualaman
2. Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama Kemantren Pakualaman
3. Fasilitasi Forum Kampung Panca Tertib
4. Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)
5. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
6. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
7. Forum Linmas Se-Kemantren Pakualaman
8. Operasional Jaga Warga
9. Jasa Lainnya Orang Perseorangan

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah sebesar Rp. 36.932.000,- terealisasi Rp. 36.932.000,- atau 100 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI
2. Fasilitasi dan Honor Forum Penyelenggaraan Pemerintah Kemantren

Upaya pencapaian sasaran program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, didukung dengan 1 (satu) program, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman.

Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman" tahun 2024 mengalami penambahan parameter menjadi 8 unsur yang sebelumnya pada tahun 2023 hanya 5 unsur. Namun demikian Kemantren Pakualaman telah mencapai nilai 89,993 (A nilai) dari target A nilai atau tercapai 100% dengan predikat peringkat kinerja Sangat Baik.

13) Kemantren Mergangsan

Kemantren Mergangsan sebagai perangkat daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan yang

dituangkan ke dalam tabel perubahan perjanjian kinerja Kemantren Mergangsan tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	402
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokarsi oleh Inspektorat	A

Tercapainya sasaran strategis tersebut didukung Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator setara eselon III sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Mergangsan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	86
2	Meningkatnya Swadaya Masyarakat Kemantren Mergangsan	Angka swadaya masyarakat total	Rp 1.593.231.000
3	Menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Mergangsan	Jumlah Pelanggaran Perda	65
4	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Pemerintahan kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %
5	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemantren Mergangsan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Mergangsan memiliki 5 (lima) sasaran program yaitu Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Mergangsan dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat dengan target 86 telah terealisasi 86,05. Selanjutnya sasaran program Meningkatnya Swadaya Masyarakat Kemantren Mergangsan dengan indikator Angka swadaya masyarakat total dengan target Rp 1.593.231.000 dan telah terealisasi sebesar Rp 2.081.965.000, selanjutanya sasaran program menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Mergangsan dengan indikator Jumlah Pelanggaran Perda dengan target 65 telah terealisasi 67, dan sasaran program Meningkatnya Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator program Prosentase Pemerintahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dengan target 100 % dan terealisasi 100 %.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Mergangsan dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan, dan dilaksanakan oleh Jawatan Umum, dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1	Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Mergangsan	➢ Monitoring Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi ➢ Pemeliharaan Makam (TPU Sasonoloyo)	1 dokumen 12 bulan
2	Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinanan Non Usaha	- Operasional pelayanan yang terkait perizinan Non Usaha - Monitoring pemantauan perizinan makam, PKL, dan pondokan - Sosialisasi Perizinan	12 bulan 12 bulan 1 dokumen
3	Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	- Jasa Tenaga Administrasi Pelayanan - Operasional pelayanan yang terkait Non Perizinan - Sosialisasi Jogja Smart Service - Penyusunan SKM	12 bulan 12 bulan 240 orang 1 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp 299.913.216,-.dan terealisasi sebesar Rp 299.748.721,- atau 99,95%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Mergangsan
2. Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinanan Non Usaha
3. Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sebagaimana disebutkan bahwa indikator program tersebut adalah nilai survey kepuasan masyarakat dengan target 86 dan realisasi 86,05 hal itu didukung dengan pelaksanaan yang baik pada sub-sub kegiatan diatas misal pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Mergangsan yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dengan adanya Monitoring Evaluasi pembangunan wilayah terintegrasi yaitu dengan mengadakan monev yang dilakukan tim terhadap pelaksanaan pembangunan wilayah, kemudian pelaksanaan Pemeliharaan Makam (TPU Sasonoloyo). Selanjutnya didukung Sub Kegiatan Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinanan Non Usaha yang dilaksanakan oleh Jawatan Umum dengan adanya operasional pelayanan yang terkait perizinan non usaha, monitoring pemantauan perizinan makam, PKL, dan pondokan dan sosialiasi perizinan. Serta Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan yang juga dilaksankan oleh Jawatan Umum dengan adanya Jasa Tenaga Administrasi Pelayanan, Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan, terlaksananya Sosialisasi Jogja Smart Service dan Penyusunan SKM Tahun 2024. Dan juga dengan adanya pelayanan di Kemantren Mergangsan seperti pembaruan ijin makam di TPU Sasanalaya, Layanan legalisir dokumen kependudukan misal KTP, C1, izin penelitian untuk mahasiswa dari Universitas di DIY, Persetujuan lokasi penelitian bagi mahasiswa dari luar DIY, izin tetap di DPMPTSP, persetujuan lokasi KKN, Surat keterangan waris tanah, waris bank, waris BPJS ketenagakerjaan, surat Mengetahui kependudukan Kemantren Mergangsan untuk digunakan berbagai kepentingan (menikah, cerai, menjual tanah, keringanan biaya sekolah dll). Pelayanan tersebut dilakukan baik, ramah dan cepat serta dengan didukung whatsap hotline Kemantren Mergangsan dimana manfaat hotline itu berupa whatsapp Kemantren yang terhubung ke warga se-Kemantren Mergangsan yang membutuhkan informasi, jadi ketika ada permintaan info atau pertanyaan dari masyarakat mengenai berbagai kegiatan misalnya, informasi tetang vaksin, info pelayanan mall pelayanan publik, infomasi layanan capil dan informasi informasi lainnya,diharapkan akan mendukung kepuasan masyarakat

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Swadaya Masyarakat Kemantren Mergangsan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, didukung oleh kegiatan-kegiatan di Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan juga didukung oleh Pemberdayaan Kelurahan (Keparakan, Wirogunan, Brontokusuman) dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana

Prasrana Kelurahan (Keparakan, Wirogunan, Brontokusuman), Pemberdayaan Kelurahan (Keparakan, Wirogunan, Brontokusuman) adapun kegiatan tersebut adalah :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan Jawatan Sosial dengan fasilitasi pelayan masyarakat, forum pemberdayaan dan pelaksanaan WJNC,
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dan Kemantren sebagai sarana menjaring aspirasi warga masyarakat yang akan dituangkan dalam renja kemudian menjadi DPA Kemantren Mergangsan, Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja dengan pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kelurahan dan penyusunan data monografi kelurahan, Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Keparakan, Wirogunan dan Brontokusuman, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kel. Keparakan, Wirogunan dan Brontokusuman.
3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan Jawatan Praja, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran.
4. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang dilaksanakan Jawatan Sosial, Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas yang dilaksanakan Jawatan Sosial, Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam yang dilaksanakan Jawatan Keamanan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jawatan Sosial)	Rapat Koordinasi Kelembagaan	2 laporan
2	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Jawatan Praja)	Musrenbang Kelurahan dan Kemantren	4 dokumen
3	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan (Jawatan Praja)	Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	3 dokumen
4	Terlaksananaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keparakan	➢Pemeliharaan PJU ➢Pemeliharaan Fasum ➢Pemeliharaan Conblok ➢Pemeliharaan Gapura Dipowinatan ➢Pemeliharaan Pos Ronda ➢Pemeliharaan SAH ➢Pengadaan Cermin Tikungan ➢Pengadaan Kostum Karawitan ➢Pengadaan Mesin Pencacah Sampah ➢Pengadaan Timbangan Sampah Digital ➢Penyediaan Sarpras Paud ➢Taman Spot Pertigaan ➢Pengadaan CCTV	➢150 titik ➢1 unit ➢1 lokasi ➢1 lokasi ➢4 unit ➢1 Dokumen ➢5 unit ➢10 pasang ➢1 unit ➢4 unit ➢1 unit ➢1 unit ➢24 titik
5	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keparakan	➢Gelar Potensi dan Budaya ➢Gladen Jemparingan ➢Pelatihan Guide Wisata ➢Pelatihan Kebencanaan ➢Pelatihan Ketahanan Pangan Keluarga ➢Pelatihan Lansia Produktif (Pembuatan Telur Asin) ➢Pelatihan Manajemen UMKM dan Packaging ➢Pelatihan Orkes Kentongan Sukorena ➢Pelatihan Pengelolaan Manajemen Bank Sampah ➢Pelatihan Pengolahan Sampah Organik (LOSIDA) ➢Pelatihan Pengolahan TOGA/Pembuatan Jamu Instan ➢Pelatihan Pomo Pami ➢Pelatihan Tari Klasik dan Kreasi ➢Sosialisasi Pengelolaan Sampah ➢Workshop Manajemen Kader Posyandu dan Kader Kesehatan ➢Workshop Pembinaan Karakter Kepemudaan ➢Workshop Penanganan Masalah Sosial ➢Workshop Pendampingan Disabilitas ➢Workshop Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital	➢1 kali ➢1 Kali ➢1 Kali ➢1 Kali ➢1 Kali ➢1 Kali ➢1 Kali ➢1 Kali ➢1 Kali ➢1 Kali ➢1 Kali ➢1 Kali ➢1 Kali ➢1 Kali ➢1 Kali ➢1 Kali ➢1 Kali ➢1 Kali ➢1 Kali ➢1 Kal

6	Terlaksananaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wirogunan	➢Pemeliharaan PJU Wilayah ➢Pengecatan Pergola ➢Pemeliharaan Gapura ➢Pengadaan Alat Pencacah Plastik ➢Pemeliharaan SAH ➢Peningkatan dan Pemeliharaan MCK Umum ➢Pembangunan SPAH ➢Perbaikan dan Pemeliharaan Pavingblock ➢Pemeliharaan Pos Ronda ➢Pengadaan Cermin Cembung ➢Pengadaan Gerobak sampah ➢Pengadaan Tempat Sampah Pilah ➢Pengadaan CCTV	➢250 titik ➢15 Titik ➢2 unit ➢1 unit ➢150 m ➢3 titik ➢30 titik ➢1033 m2 ➢1 unit ➢36 unit ➢20 buah ➢101 buah ➢7 unit
7	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wirogunan	➢Gelaran Potensi Wilayah ➢Koordinasi Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kelurahan ➢Pelatihan Boga ➢Pelatihan Budidaya Pertanian Perkotaan ➢Pelatihan Kebencanaan ➢Pelatihan Kerajinan ➢Pelatihan Manajemen Usaha ➢Pembinaan Budaya dan Pariwisata ➢Pembinaan dan Penguatan Anak ➢Pembinaan Lansia ➢Workshop P4GN	➢3 Kegiatan ➢2 Kegiatan ➢3 Kegiatan ➢3 Kegiatan ➢1 Kegiatan ➢1 Kegiatan ➢2 Kegiatan ➢3 Kegiatan ➢2 Kegiatan ➢1 Kegiatan ➢1 Kegiatan
8	Terlaksananaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Brontokusuman	➢Pemeliharaan Fasum ➢Pemeliharaan PJU ➢Pembelian Gerobak Sampah Terpilah ➢Pembelian Timbangan untuk Bank Sampah ➢Pembuatan SPAH ➢Pemeliharaan Conblock ➢Pemeliharaan SAH ➢Pengadaan Cermin Tikungan	➢1 unit ➢184 buah ➢6 buah ➢1 buah ➢29 titik ➢1678 m2 ➢250 m ➢8 unit
9	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brontokusuman	➢BRONTOFEST ➢Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan ➢Kesamaptaan Petugas Linmas ➢Pelatihan B2SA Kudapan Non Beras ➢Pelatihan Ecoenzym ➢Pelatihan Manajemen Usaha ➢Pelatihan Penanganan Bencana ➢Pelatihan UMKM Digital Marketin ➢Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Lembaga Sosial Masyarakat ➢Penyuluhan Kesehatan Bagi Lansia ➢Sosialisasi P4GN ➢Workshop Pengembangan Kampung Wisata ➢Workshop Pengembangan Usaha UMKM	➢1 Kegiatan ➢2 Kegiatan ➢1 Kegiatan ➢1 Kegiatan ➢1 Kegiatan ➢1 Kegiatan ➢1 Kegiatan ➢1 Kegiatan ➢1 Kegiatan ➢3 Kegiatan ➢1 Kegiatan ➢1 Kegiatan ➢1 Kegiatan ➢1 Kegiatan
10	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jawatan Praja)	➢Fasilitasi Pengamanan Box pada proses penghitungan PEMILU 2024 ➢Fasilitasi Pengamanan box pada proses penghitungan PILKADA 2024 ➢Fasilitasi Saksi Parpol Pada Proses Penghitungan Suara Pemilu 2024 ➢Sarasehan RT, RW, LPMK Kampung	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

11	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	➢Gelar Produk UMKM & Gapoktan ➢Pelatihan Olahan Makanan Kekinian ➢Workshop Hygenitas Produk Makanan dan Peningkatan Pendapatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
12	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Jawatan Kemakmuran)	➢Pelatihan Budidaya Anggur ➢Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik LPGPR)	1 Kegiatan 1 Kegiatan
13	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Jawatan Sosial)	➢Bimtek (Pelatihan) Pengurus Pokja Bunda PAUD ➢Festival Olahraga Tradisional dan Lomba Lari 3K dan Turnamen Voli Tingkat Kemantren ➢Gebyar Lansia Kemantren Mergangsan Senam bersama lansia kemantren dan Workshop Menjadi Lansia SMART (Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif)) ➢Pentas Seni HUT Kota Tingkat Kemantren Workshop Ketahanan Keluarga melalui PAAREDI (Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital) Mewujudkan Keluarga Indonesia Sejahtera dan Harmonis (KISAH) ➢Workshop Pendampingan Administrasi PKK	1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
14	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Jawatan Sosial)	➢Pelatihan Karawitan ➢Wayang Jogja Night Carnival LWJNC) ➢Sarasehan Pemuda Kemantren Mergangsan ➢Workshop Penguatan Forum Anak Tingkat Kemantren	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
15	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Jawatan Keamanan)	➢Apel Siaga Bencana ➢Pelatihan Tanggap Bencana Kebakaran	1 kegiatan 1 kegiatan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp 5.352.253.649,- dan terealisasi Rp 5.274.452.615,- atau 98,55%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan
4. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Terlaksananya Evaluasi Kelurahan
6. Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
7. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyakarat
8. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

9. Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
10. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.
11. Terlaksananya pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu angka Swadaya Masyarakat Total sebesar Rp. 1.593.231.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.081.965.000,- atau senilai 130,68 %,- hal itu didukung dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi pada ketiga Kelurahan yang ada di Kemantren Mergangsan (Kelurahan Keparakan, Wirogunan dan Brontokusuman) untuk kepentingan lingkunganya terutama dalam pemulihan ekonomi bersemangat untuk berbagi dan berswadaya serta kepedulian warga masyarakat untuk membangun wilayahnya dan bangkit untuk hidup sehat dan peningkatan ekonomi. Swadaya masyarakaat total tersebut tidak hanya pada pembangunan fisik tapi juga pada pemberdayaan masyarakat, ketika pekerjaan fisik yang besar sudah tertanggung APBD maka warga masyarakat mendukung dengan swadaya masyarakat total dalam skala kecil sesuai kemampuan masing-masing untuk membangun wilayahnya. Dan juga seperti pelaksanaan serta kerja bakti menjaga kebersihan lingkungan tetap terlaksana biarpun harus berswadaya mendukung Kota Yogyakarta dalam masa Darurat Sampah dengan pengolahan sampah secara mandiri setelah mendapatkan berbagai pelatihan pengolahan sampah termasuk dengan metode Biopori.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Menurunnya pelanggaran perda di Kemantren Mergangsan, juga didukung oleh kegiatan Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau kepolisian Republik Indonesia yang optimal yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Republik Indonesia	a. Sosialisasi Penegakan Hukum Non Yustisi b. Sambang Kampung c. Sapaan PKL d. Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 e. Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada 2024 f. Monitoring Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	a. 45 orang b. 2 kali c. 1 kali d. 1 kegiatan e. 1 kegiatan f. 11 bulan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp 50.502.000,- dan terealisasi Rp 50.502.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Republik Indonesia

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu jumlah pelanggaran perda dengan target 65 kali pelanggaran dan terealisasi 67 pelanggaran, hal itu didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, dengan adanya frekuensi pengamanan masyarakat yang rutin, Monitoring Ketertiban dan Keamanan Masyarakat, Sosialisasi Penegakan Hukum Non Yustisi, Sambang Kampung, Sapaan PKL, Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024, dan Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada.

Kemudian untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemeerintahan didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan serta Sub kegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	a. Bimtek Bela Negara untuk Generasi Muda b. Fasilitasi Lembaga Keamanan dan Ketertiban di Tingkat Kemantren Mergangsan (FKDM, FKUB, FPK, MRC) c. Koordinasi Penanganan Permasalahan Ketertiban d. Pembinaan Penanganan Bencana di Kemantren Mergangsan e. Pembinaan Kepemudaan	1. 60 orang 2. 4 jenis 3. 5 kali 4. 4 kali 5. 1 kali
2	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan di kecamatan	1. Belanja jasa Tenaga administrasi Jawatan Praja 2. Fasilitasi FORKOPIMKA 3. Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1. 12 bulan 2. 1 lembaga 3. 1 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp 103.306.700,- dan terealisasi Rp 103.306.700,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Terlaksananya Fasilitasi / koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)
- Terlaksananya tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yaitu Persentase permasalahan kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi jumlah dengan target 100 % dan terealisasi 100 %, hal itu didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, dengan adanya rapat koordinasi kelembagaan di bawah Kemantren Mergangsan misalnya FKDM, FKUB, FPK, dan MRC, Bimtek Bela Negara untuk Generasi Muda, Pembinaan Penanganan Bencana di Kemantren Mergangsan, Pembinaan Kepemudaan serta koordinasi rutin lintas sektoral dengan melibatkan Forkompimka sehingga permasalahan-permasalah yang ada di Kemantren Mergangsan bisa terselesaikan 100%, permasalahan tersebut diantaranya :

1. Koordinasi terkait Outlet 23 yang menjual miras
2. Penyelesaian PKL Tenda Biru di Wirogunan
3. Penyelesaian PKL di pinggir sungai Code
4. Pengamanan Festival Takbir Keliling
5. Pengamanan Mubeng Beteng 1 Suro
6. Pengamanan HUT Kota Yogyakarta

7. Monitoring penanggulangan sampah dengan GZSA (Gerakan Zero Sampah Anorganik) dari Jawatan Kemakmuran, Jawatan Keamanan dengan Forkopimtren.
8. Pengamanan HUT Kota
9. Sudah dilakukan koordinasi antara panwas, PPK dan sudah berkoordinasi dengan Forkopimtren.
10. Penertiban sampah di Jl. Brigjen Katamso dan Sisingamangaraja dengan melibatkan forkompimka, DLH, Satpol PP BKO, pihak Kemantren Mergangsan dan warga sekitar.
11. Koordinasi permasalahan kebisingan antara Play On Cafe dan warga sekitar.
12. Penertiban PKL di wilayah Mergangsan.
13. Penertiban Rontek di perempatan Pojok Beteng, perempatan Tungkak, Perempatan Jl. Menukan dan jalan-jalan sekitar Mergangsan lainnya dengan melibatkan Kemantren Mergangsan dan Satpol PP BKO.
14. Koordinasi terkait bendera partai dan APK lain di wilayah Mergangsan yang melibatkan Panwas, PPK, Jawatan Keamanan dan Forkopimtren, Polsek, dan Koramil, yang kemudian ditindak lanjuti dengan monitoring bendera-bendera tersebut dan kemudian ditindak lanjuti dengan pencopotan bendera partai oleh partai yang bersangkutan.
15. Melakukan Pengamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ketika ada keramaian hari besar agama, HUT Pemkot, dan pengamanan keramaian wilayah lainnya yang melibatkan Forkompimka dan BKO Satpol PP.

14) Kemantren Umbulharjo

Kemantren Umbulharjo sebagai perangkat daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo yang dituangkan ke dalam tabel perubahan perjanjian kinerja Kemantren Umbulharjo tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	388,43
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokarsi oleh Inspektorat	A

Tercapainya sasaran strategis tersebut didukung Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator setara eselon III sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Umbulharjo	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	86,02
2	Meningkatnya Swadaya Masyarakat Kemantren Umbulharjo	Angka swadaya masyarakat total	3.851.825.200
3	Menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pelanggaran Perda	51
4	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Pemerintahan kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Umbulharjo memiliki 4 (empat) sasaran program yaitu Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Umbulharjo dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat dengan target 86,02 telah terealisasi 86,06 Selanjutnya sasaran program Meningkatnya Swadaya Masyarakat Kemantren Umbulharjodengan indikator Angka swadaya masyarakat total dengan target 3.851.825.200 Rupiah dan telah terealisasi sebesar 3.852.141.395 Rupiah , selanjutnya sasaran program menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Umbulharjo dengan indikator Jumlah Pelanggaran Perda dengan target 51 telah terealisasi 51, dan sasaran program Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator program Prosentase Pemerintahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi dengan target 100 % dan terealisasi 100 %.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program pertama yaitu “Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Umbulharjo” dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan, dan dilaksanakan oleh Jawatan Umum, dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1	Terselenggaranya Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen
2	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan secara optimal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan dalam ProgramPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 138.025.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 138.025.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Umbulharjo
2. Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.Sebagaimana disebutkan bahwa indikator program tersebut adalah nilai survey kepuasan masyarakat dengan target 86,02 telah terealisasi 86,06 atau sebesar 100,05%. Hal ini didukung dengan pelaksanaan yang baik pada sub-sub kegiatan diatas misal pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Umbulharjo yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran dengan adanya penyusunan Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum sejumlah 1 dokumen.

Selanjutnya didukung sasaran sub kegiatan Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan yang dilaksanakan oleh Jawatan Umum dengan Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan sejumlah 12 laporan.

Faktor pendorong pencapaian target nilai survey kepuasan masyarakat antara lain:

1. Intensitas koordinasi untuk mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan, termasuk didalamnya review SOP

2. Informasi produk layanan yang dapat diakses dengan mudah melalui media WA pelayanan dan Website kemantren
3. Pelaksanaan konsultasi publik terhadap perbaikan pelayanan
4. Peningkatan kemampuan untuk melayani
5. Kuesioner sudah mengunakan google form.

Faktor penghambat pencapaian target nilai survey kepuasan masyarakat antara lain:

1. Perubahan kriteria respon aduan yang menyebutkan respon kurang optimal apabila respon penerimaan aduan lebih dari 24 jam. Dari Kominfo ada informasi untuk penilaian respon penerimaan aduan karena mengalami kendala untuk koordinasi dan informasi yang lebih lengkap.

   Tindaklanjutnya: menggunakan WA grup untuk berkoordinasi dan mencari informasi yang lebih lengkap.
2. Kebutuhan layanan dari masyarakat yang tidak sesuai dengan jenis/produk layanan kemantren/kelurahan.

Langkah untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program kedua "Meningkatnya Swadaya Masyarakat Kemantren Umbulharjo" dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, didukung oleh kegiatan-kegiatan di Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan juga didukung oleh Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Semaki, Muja-muju, Tahunan, Warungboto, Pandeyan, Sorosutan dan Giwangan). Adapun kegiatan tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jawatan Sosial)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan
2	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan secara Optimal. (Jawatan Praja)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	466 Lembaga masyarakat
3	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan yang optimal (Jawatan Praja)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan
4	Terlaksananaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semaki	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	59 unit
5	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semaki	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64 Pokmas / Ormas

6	Terlaksananaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Muja-Muju	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	152 unit
7	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muja-Muju	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	117 Pokmas / Ormas
8	Terlaksananaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tahunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit
9	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahunan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	98 Pokmas / Ormas
10	Terlaksananaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Warungboto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	111 unit
11	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Warungboto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	79 Pokmas / Ormas
12	Terlaksananaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandeyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	94 unit
13	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandeyan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	97 Pokmas / Ormas
14	Terlaksananaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sorosutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	305 unit
15	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorosutan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	113 Pokmas / Ormas
16	Terlaksananaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Giwangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 unit
17	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Giwangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	88 Pokmas / Ormas
18	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jawatan Keamanan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga
19	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Jawatan Keamanan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga
20	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan
21	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Jawatan Kemakmuarn)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga
22	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Jawatan kemakmuran)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga

23	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Jawatan Sosial)	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	140 Keluarga
24	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Jawatan Sosial)	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	70 Keluarga
25	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Jawatan Sosial)	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	35 Keluarga
26	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Jawatan Sosial)	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	35 Keluarga

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sasaran sub kegiatan diatas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp 10.616.631.468,00 dan terealisasi Rp 10.560.556.138,00 atau 99,47%. Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu angka Swadaya Masyarakat Total sebesar 3.851.825.200 Rupiah dan telah terealisasi sebesar 3.852.141.395 Rupiah atau sebesar 100,01%. Pencapain target ini didukung dengan faktor pendukung sebagai berikut :

1. Komitmen yang tinggi dari Kelurahan untuk menghimpun data kegiatan yang menggunakan dana swadaya masyarakat.
2. Kegiatan kemasyarakatan sudah normal kembali, sehingga partisipasi masyarakat relatif tinggi.
3. Kegiatan di masyararakat berupa kerja bakti, ronda, jimpitan, posyandu, Arisan Bapak2/Ibu2, PKK, HUT RI dan HUT Kota.

Selain faktor pendukung diatas masih terdapat faktor penghambat antara lain:

1. Belum ada panduan sebagai dasar penyamaan variabel jenis kegiatan swadaya masyarakat di tingkat kota, sehingga masih menggunakan persepsi masing-masing.
2. Apabila tidak diminta, warga masyarakat tidak menginformasikan data angka swadaya masyarakat kepada kelurahan.

Tindaklanjut: Kelurahan inventaris data dari RT dan RW pada saat pertemuan.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program ketiga "Menurunnya pelanggaran perda di Kemantren Umbulharjo" didukung oleh kegiatan Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau kepolisian Republik Indonesia yang optimal yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp 244.249.200,00 dan terealisasi Rp 244.249.200,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu jumlah pelanggaran perda dengan target 51 kali pelanggaran dan terealisasi 51 kali, hal itu didukung oleh faktor pendorong antara lain :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana, seperti mobil operasional BKO.
2. Melakukan pendekatan secara persuasif terkait dengan kebersihan. (Patroli secara rutin dan laporan dari warga) Pendekatan untuk PKL patroli satu kali sehari.
3. Melakukan operasi ketertiban secara rutin bersama dengan BKO dan Linmas.
4. Adanya Penyuluhan Pembinaan Ketertiban Pedagang Kaki Lima.
5. Mengindentifikasi sampah visual atau yang berkaitan dengan pilkada.

6. Terdapat penambahan 12 kasus terkait PBG, Sampah visual, Reklame

Selain faktor pendorong diatas, terdapat pula faktor penghambat antara lain

1. Wilayah kemantren yang paling luas diantara 14 Kemantren
2. Cuaca yang tidak menentu menyebabkan pelaksanaan penegakan perda menjadi terhambat
3. Adanya pelanggaran sampah visual yang berulang masih menjadi penghambat dan yang paling banyak. Tindaklanjutnya melakukan pendekatan secara persuasif diberikan edukasi dan himbauan. Apabila tidak berhasil bekerjasama dengan satpol PP Kota melibatkan jawatan keamanan dan BKO.

Kemudian untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program keempat yaitu "Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan" didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan oleh Jawatan keamanan serta Sub kegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Sub Kegiatan)	Target Perubahan
1	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasiona	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	110 orang
2	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp 128.986.000,00 dan terealisasi Rp 128.986.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Fasilitasi / koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosilaisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)
2. Terlaksananya tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yaitu Persentase permasalahan kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi jumlah dengan target 100 %dan

terealisasi 100 %, hal itu didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, dengan adanya koordinasi FKDM, FKUB dan FPK serta koordinasi rutin lintas sektoral dengan melibatkan Forkompimtren sehingga permasalahan-permasalah yang ada di Kemantren Umbulharjo bisa terselesaikan 100%. Selain hal tersebut faktor pendorong yang mendukung terealisirnya target adalah sebagai berikut :

1. Adanya koordinasi dan komunikasi intensif antara Kemantren Umbulharjo dengan stakeholder.
2. Koordinasi terkait dengan permasalahan diwilayah.
3. Adanya WA Group Forkompimtren.
4. Bila ada permasalahan yang muncul dikematren segera dikomunikasikan.
5. Pengajian rutin yang ada di Kemantren.
6. Persiapan dan pelaksanaan PIN Polio.
7. Persiapan dan pelaksanaan Upacara Hut RI.
8. Persiapan dan pelaksanaan untuk netralitas Pilkada.
9. Koordinasi 1 kali disetiap triwulannya

15) Kemantren Kotagede

Kemantren Kotagede sebagai perangkat daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis

1. tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede dan
2. meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede dengan indikator kinerja Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat yang dituangkan ke dalam tabel perubahan perjanjian kinerja Kemantren Kotagedetahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	399
1.1	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Kotagede	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	91.20
1.2	Meningkatnya Swadaya masyarakat Kemantren Kotagede	Angka Swadaya Masyarakat Total	3.261.358.000Rupiah
1.3	Menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Kotagede	Jumlah Pelanggaran Perda	36

1.4	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A
2.1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemantren Kotagede	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Kotagede memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) sasaran program yaitu Sasaran Strategis pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede dengan target 399 telah terealisasi sebesar 402.47 atau 100,87 %, kemudian Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede dengan indikator Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat dengan target A dan terealisasi A (89,547) atau dengan capaian 100% Kemudian untuk Sasaran Program Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Kotagede dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat dengan target 91,20 telah terealisasi 91,20 atau tercapai 100 % Selanjutnya sasaran program Meningkatnya Swadaya Masyarakat Kemantren Kotagede dengan indikator Angka swadaya masyarakat total Kemantren Kotagede dengan target 3.261.358.000 realisasi 3.319.283.100,- atau 101,78 %, sasaran program Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren kotagede dengan target 36 realisasi 28, sasaran program Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi target 100% realisasi 100% dan sasaran program Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede target A realisasi A atau 100%

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Kotagede meningkat, didukung oleh:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
2. Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

Yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7 Dokumen
3.	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	33 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub kegiatan tersebut diatas adalah sebesar Rp 70.582.500,- dan terealisasi sebesar Rp 69.582500,- atau 98.58 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan sebesar Rp. 23.350.000 ,- terealisasi Rp. 23.350.000,- atau 100%
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha sebesar Rp. 7.870.000 ,- terealisasi Rp. 6.870.000,- atau 87.29 %
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan sebesar Rp.39.362.500 ,- terealisasi Rp. 39.362.500,- atau 100 %

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu dengan indikator program nilai survey kepuasan masyarakat dengan target 91,20 % dan realisasi 91,20 %, hal tersebut didukung dengan adanya pelaksanaan yang baik pada sub-sub kegiatan diatas misal pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kemantren yang dilaksanakan Jawatan Praja yaitu adanya pelaksanaan musrenbang yang mampu mengakomodir usulan masyarakat dari level RT, RW sampai kampung sehingga bisa masuk menjadi renja Kemantren yang akan menumbuhkan rasa puas pada masyarakat, dan pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Umum Kemantren Kotagede yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran dengan adanya pelatihan UMK, terlaksananya koordinasi lembaga masyarakat (UMKM dan Gapoktan, Bank sampah) akan mendorong tumbuhnya perekonomian di warga masyarakat sehingga akan mendukung rasa kepuasan pada warga masyarakat. Selanjutanya pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan dan Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan yang dilaksanakan di Jawatan Umum dengan adanya pelayanan di Kemantren Kotagede seperti Layanan legalisir dokumen kependudukan misal KTP, C1, izin penelitian untuk mahasiswa dari Universitas di DIY, Persetujuan lokasi penelitian bagi mahasiswa dari luar DIY, izin tetap di DPMPTSP, persetujuan lokasi KKN, Surat keterangan waris tanah, waris bank, waris BPJS ketenagakerjaan, Mengetahui penduduk Kemantren Kotagede untuk digunakan berbagai kepentingan (menikah, cerai, menjual tanah, keringanan biaya sekolah dll). Pelayanan tersebut dilkukan baik, ramah dan cepat serta dg didukung whatsap hotline Kemantren Kotagede dimana manfaat hotline itu berupa whasapp Kemantren yg terhubung ke ketua RT RW se Kemantren Kotagede diharapkan akan mendukung kepuasan masyarakat. Kemudian pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan Jawatan Sosial dengan adanya Sosialiasi Stunting, Sosialisasi GKSTTB (Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana) , monev pelaksanaan stunting , monitoring dan Rakordasi PAUD yang mana kegiatan tersebut akan mendukung masyarakat menjadi sehat, pengentasan stunting dan kemiskinan serta mendukung pertumbuhan ekonomi dimasyarakat sehingga akan menumbuhkan kepuasan masyarakat.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede oleh kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Prenggan , Purbayan , Rejowinangun) dengan sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (Prenggan , Purbayan , Rejowinangun)), Pemberdayaan Kelurahan (Prenggan , Purbayan , Rejowinangun), Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan , Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber

Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.

Yang dituangkan dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut :

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejowinangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	434 unit
2	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejowinangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	158 Pokmas / Ormas
3	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prenggan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	185 unit
4	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prenggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	145 Pokmas / Ormas
5	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purbayan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	775 unit
6	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purbayan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	315 Pokmas / Ormas
7	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46 Laporan
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	315 Lembaga Masyarakat
9	Evaluasi Kelurahan,	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan
10	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Masyarakat
11	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat,	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan
12	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Keluarga	100 keluarga
13	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam PeningkatanPendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1 dokumen
14	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	120 Keluarga

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan adalah sebesar Rp 4.846.140.162,- dan terealisasi Rp. 4.820.163.852,- atau 99,46 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberdayaan Kelurahan Prenggan dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prenggan sebesar Rp. 891.744.631 ,- terealisasi Rp.885.995.000,- atau 99,36 %

   dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prenggan sebesar Rp. 562.860.000,- terealisasi Rp.561.290.232,- atau 99,72 %
2. Kegiatan pemberdayaan Kelurahan Purbayan dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purbayan sebesar Rp. 802.510.000 ,- terealisasi Rp.798.159.050,- atau 99,46 %

   dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purbayan sebesar Rp. 571.638.000 ,- terealisasi 571.588.000,- atau 99,99 %.
3. Kegiatan pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejowinangun sebesar Rp. 969.294.531,- terealisasi Rp.957.565.550,- atau 98.79 %

   dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejowinangun sebesar Rp. 624.253.500 ,- terealisasi Rp.621.726.500,- atau 99.60 %
4. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 176.470.000,- terealisasi Rp. 176.470.000,- atau 100 %
5. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub KegiatanPeningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. 33.820.000,- realisasi Rp. 33.820.000,- atau 100 % dan sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan sebesar Rp. 4.991.000,- terealisasi Rp. 4.991.000,- atau 100 % .
6. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan sebesar Rp.42.325.000,- terealisasi Rp. 42.325.000,- atau 100 % .
7. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat sebesar Rp. 69.031.500,- terealisasi Rp. 69.031.500,- atau 100%, Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga sebesar Rp. 22.212.000 realisasi Rp. 22.212.000,- atau 100 %, Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing sebesar

Rp. 62.240.000,- terealisasi Rp. 62.240.000 atau 100 % dan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam sebesar Rp. 12.750.000,- terealisasi Rp. 12.750.000,- atar 100%

Sasaran sub kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, yaitu angka Swadaya Murni sebesar Rp. 3.261.358.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.319.283.100-, atau 100% hal itu didukung dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi pada ketiga Kelurahan yang ada di Kemantren Kotagede (Kelurahan Prenggan, Purbayan dan Rejowinangun) untuk kepentingan lingkunganya untuk membangun wilayahnya. sawadaya murni tersebut tidak hanya pada pembangunan fisik tapi juga pada pemberdayaan masyarakat, ketika pekerjaan fisik yang besar sudah tertanggung APBD maka warga masyarakat mendukung dengan swadaya murni dalam skala kecil sesuai kemampuan masing-masing untuk membangun wilayahnya. Dan juga seperti pelaksanaan penyemprotan disinfektan tidak bisa seluruhnya ditanggung pemerintah maka masyarakat Kemantren Kotagede dengan kesadaran sendiri secara mandiri melaksanakan penyemprotan serta kerja bakti menjaga kebersihan lingkungan

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program pelanggaran perda di Kemantren Kotagede menurun, juga didukung oleh Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yang dituangkan ke dalam IV sebagai berikut :

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	42 Laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut diatas adalah sebesar Rp. 319.677.750,- dan terealisasi Rp . 319.677.750,- atau 100 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 319.677.750,- dan terealisasi Rp . 319.677.750,- atau 100 %.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator program jumlah Pelanggaran Perda Kemantren kotagede dengantarget 36 realisasi 28 atau 122.22 % didukung oleh Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. hal tersebut didukung dengan adanya pelaksanaan yang baik pada sub-sub kegiatan diatas misal pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kemantren yang dilaksanakan Jawatan Praja yaitu adanya pelaksanaan musrenbang yang mampu mengakomodir usulan masyarakat dari level RT, RW sampai kampung sehingga bisa masuk menjadi renja Kemantren yang akan menumbuhkan rasa puas pada masyarakat, dan pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Kotagede yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran dengan adanya pelatihan UMK, terlaksananya koordinasi lembaga masyarakat (UMKM dan Gapoktan, Bank sampah) akan mendorong tumbuhnya perekonomian di warga masyarakat sehingga akan mendukung rasa kepuasan pada warga masyarakat. Selanjutanya pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan dan Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan yang dilaksanakan di Jawatan Umum dengan adanya pelayanan di Kemantren Kotagede seperti Layanan legalisir dokumen kependudukan misal KTP, C1, izin penelitian untuk mahasiswa dari Universitas di DIY, Persetujuan lokasi penelitian bagi mahasiswa dari luar DIY, izin tetap di DPMPTSP, persetujuan lokasi KKN, Izin satgas covid, Surat keterangan waris tanah, waris bank, waris BPJS ketenagakerjaan, Mengetahui penduduk Kemantren Kotagede untuk digunakan berbagai kepentingan (menikah, cerai, menjual tanah, keringanan biaya sekolah dll). Pelayanan tersebut dilkukan baik, ramah dan cepat serta dg didukung whatsap hotline Kemantren Kotagede dimana manfaat hotline itu berupa whasapp Kemantren yg terhubung ke ketua RT RW se Kemantren Kotagede diharapkan akan mendukung kepuasan masyarakat. Kemudian pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan Jawatan Sosial dengan adanya Sosialiasi Stunting, Sosialisasi GKSTTB (Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana) , monev

pelaksanaan stunting , monitoring dan Rakordasi PAUD yang mana kegiatan tersebut akan mendukung masyarakat menjadi sehat, pengentasan stunting dan kemiskinan serta mendukung pertumbuhan ekonomi dimasyarakat sehingga akan menumbuhkan kepuasan masyarakat.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program pelanggaran perda di Kemantren Kotagede menurun, juga didukung oleh:

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan subkegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Koordinasi sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Yang dituangkan ke dalam IV sebagai berikut :

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480 Orang
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Kegiatan tersebut diatas adalah sebesar Rp. 37.628.000,- dan terealisasi Rp 37.628.000,- atau 100 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional sebesar Rp. 24.880.000,- terealisasi Rp. 24.880.000,- atau 100 %
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebesar Rp. 22.830.000,-terealisasi Rp. 22.830.000,- atau 100 %

Sasaran sub kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum, yaitu Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% hal itu didukung dengan adanya peran serta Forkompimtren dengan melakukan :

1. Edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan pembuangan sampah
2. Pembersihan coretan-coretan dari aksi vandalisme dan pengecetan ulang
3. Rapat koordinasi bersama paguyuban PKL se Kemantren kotagede.
4. Koordinasi terkait langkah-langkah pencegahan konflik di masa pemilu.
5. Forkompimtren Kotagede berperan dalam penanganan stunting.
6. Melakukan koordinasi pengamanan Hari Raya.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ,Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan , Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran .

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD. Sub Kegiatan. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD , Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD , Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai .
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sub kegiatan
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, Pengadaan Mebel dan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, SubKegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut :

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesa	27 dokumen
2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 laporan

3	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai	12 laporan
4	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah laporan administrasi kepegawaianperangkat daerah selesai	12 laporan
5	Terselenggraanya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan
6	Tersedianya pengadaan barang milik Daerah penunjang Urusan pemerintah daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	116 unit
7	Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang selesai tepat wakt	Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selesai	12 laporan
8	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang selesai	12 laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut diatas adalah sebesar Rp. 6.822.995.608,- dan terealisasi Rp .6.362.447.108,- atau 93,25%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 15.180.000,- terealisasi Rp. 15.180.000,- atau 100 %
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 5.201.136.000.,- terealisasi Rp. 4.766.320.277 ,- atau 91.62 %
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.312.000.,- terealisasi Rp. 3.312.000,- atau 100 %
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.518.000,- terealisasi Rp. 1.518.000,- atau 100 %
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp.233.971.065.,- terealisasi Rp. 233.448.690,- atau 99.78 %
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp.229.342.401,- terealisasi Rp. 222.837.900,- atau 97.16 %
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.706.724.000,- terealisasi Rp. 701.434.578,- atau 99.25 %
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.431.812.142,- terealisasi Rp. 419.395.663,- atau 97,12%

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh 3 program, yaitu Program Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Ketiga program ini mendukung sasaran keempat yaitu Terkendalinya Jumlah Penduduk, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel III. 58 Anggaran dan Realisasi Belanja Pencapaian Sasaran Terkendalinya Jumlah Penduduk

No	Sasaran	Program PD	Indikator Program PD	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Terkendalinya Jumlah Penduduk			5-8 CBR	5,18	100	7.303.916.845	6.774.447.269	92,75
1		Program Pengendalian Penduduk	Capaian Layanan Fasilitasi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Penyediaan Data Pengendalian Penduduk Berbasis Gender	90,21%	92,87%	102,95	246.510.345	246.506.750	100
2		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	mCPR *(Contraceptive Prevalence Rate)*	62,59%	62,60%	100,02	2.045.825.000	1.932.426.929	94,46
3			Persentase Jumlah Kampung KB Berkelanjutan	71,11%	75,56%	106,26	897.695.300	889.190.000	99,05
4			Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (unmetneed)	16,17%	12,55%	122,39%	1.027.841.000	1.007.760.000	98,05
5		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera dengan Stratifikasi Paripurna	12,71%	13,58%	106,85%	3.086.045.200	2.698.563.590	87,44

Sumber: DP3AP2KB, 2024.

Rincian tiap program dijelaskan sebagai berikut:

1. **Program Pengendalian Penduduk**, mendukung sasaran strategis keempat, yaitu Terkendalinya Jumlah Penduduk. Program Pengendalian Penduduk memiliki 1 indikator yaitu Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta

penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender, dengan capaian seperti pada tabel berikut:

Tabel III. 59 Capaian Sasaran Program Pengendalian Penduduk

No	Indikator Program	2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender	90,21%	92,87%	102,95

Sumber: DP3AP2KB, 2024.

Pada Tabel 9 menunjukkan realisasi anggaran program pendukung sasaran Terkendalinya Jumlah Penduduk, yaitu Program Pengendalian Penduduk memiliki capaian kinerja yang sangat baik dengan nilai capaian 102,95% dan mampu melakukan efisiensi dengan capaian serapan anggaran 100%, dan kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Dengan formula 40% ketersediaan data di New Siga + 60% lembaga yang memanfaatkan, di mana ketersediaan data di New Siga sebesar 91,67% dan lembaga yang memanfaatkan sebesar 93,67%, maka realisasinya sebesar (40% x 91,67% + 60% x 93,67%) = 92,87%, dari target 90,21%, sehingga capaiannya di atas 100% yaitu 102,95%.

2. **Program Keluarga Berencana**, mendukung sasaran strategis ke-4 yaitu Terkendalinya Jumlah Penduduk. Program Keluarga Berencana memiliki 3 indikator yaitu mCPR (modern Contraceptive Prevalence Rate), Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan, dan Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) dengan capaian masing-masing seperti pada tabel berikut:

Tabel III. 60 Capaian Sasaran Program Keluarga Berencana

No	Indikator Program	2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)	62,59%	62,60%	100,02
2	Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan	71,11%	75,56%	106,26
3	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	16,17%	12,55%	122,39

Sumber: DP3AP2KB, 2024.

1. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 9 sebelumnya, terlihat bahwa realisasi anggaran program pendukung sasaran Terkendalinya Jumlah Penduduk,

yaitu Program Keluarga Berencana dengan indikator program mCPR, memiliki capaian kinerja yang sangat baik dengan nilai capaian 100,02% dan mampu melakukan efisiensi dengan capaian serapan anggaran 94,46%, dan kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Dengan formula mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) = (Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB modern : Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100, di mana Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB Modern sebesar 23.705 dan Jumlah Pasangan Usia Subur sebesar 37.870 maka realisasinya sebesar 62,60%, dari target 62,59%, sehingga capaiannya di atas 100% yaitu 100,02%. Adapun data mCPR Kota Yogyakarta tahun 2024 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 61 mCPR Kota Yogyakarta per Kemantren Tahun 2024

No	Kemantren	Jumlah PUS	Jumlah Peserta KB Aktif Modern
1.	Tegalrejo	3.576	2.009
2.	Jetis	2.090	1.223
3.	Gondokusuman	3.248	2.150
4.	Danurejan	1.716	1.185
5.	Gedongtengen	1.607	1.050
6.	Ngampilan	1.530	826
7.	Wirobrajan	2.404	1.566
8.	Mantrijeron	3.271	1.949
9.	Kraton	1.493	768
10.	Gondomanan	1.308	918
11.	Pakualaman	772	476
12.	Mergangsan	3.070	2.198
13.	Umbulharjo	7.572	4.733
14.	Kotagede	4.213	2.654
	Total	**37.870**	**23.705**

Sumber: DP3AP2KB, 2024.

2. **Persentase Jumlah Kampung KB Berkelanjutan.** Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 9 sebelumnya, terlihat bahwa realisasi anggaran program pendukung sasaran Terkendalinya Jumlah Penduduk, yaitu Program Keluarga Berencana dengan indikator program Persentase Jumlah Kampung KB Berkelanjutan, memiliki capaian kinerja yang sangat baik dengan nilai capaian 106,26% dan mampu melakukan efisiensi

dengan capaian serapan anggaran 99,05%, dan kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Dengan formula Persentase Jumlah Kampung KB Berkelanjutan = Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan = (Jumlah Kampung KB Berkelanjutan x Jumlah Kampung KB di Kota Yogyakarta) *100%, di mana Jumlah Kampung KB Berkelanjutan sebanyak 34 dan Jumlah Jumlah Kampung KB di Kota Yogyakarta sebanyak 45, maka realisasinya sebesar 75,56%, dari target 71,11%, sehingga capaiannya di atas 100% yaitu 106,26%. Adapun data klasifikasi Kampung KB di Yogyakarta tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel III. 62 Klasifikasi Kampung KB di Yogyakarta Tahun 2024

No	Kemantren	Dasar	Berkembang	Mandiri	Berkelanjutan	Total
1.	Tegalrejo	0	0	3	1	4
2.	Jetis	0	0	1	2	3
3.	Gondokusuman	0	0	0	5	5
4.	Danurejan	0	0	1	2	3
5.	Gedongtengen	0	0	1	1	2
6.	Ngampilan	0	0	0	2	2
7.	Wirobrajan	0	0	1	2	3
8.	Mantrijeron	0	0	1	2	3
9.	Kraton	0	0	1	2	3
10.	Gondomanan	0	0	1	1	2
11.	Pakualaman	0	0	0	2	2
12.	Mergangsan	0	0	1	2	3
13.	Umbulharjo	0	0	3	4	7
14.	Kotagede	0	0	0	3	3
Total		**0**	**0**	**14**	**34**	**45**

Sumber: DP3AP2KB, 2024.

3. **Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*).**

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 9 sebelumnya, terlihat bahwa realisasi anggaran program pendukung sasaran Terkendalinya Jumlah Penduduk, yaitu Program Keluarga Berencana dengan indikator *unmetneed*, memiliki capaian kinerja yang sangat baik dengan nilai capaian 122,39% dan mampu melakukan efisiensi dengan capaian serapan anggaran 98,05%, dan kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Dengan formula *unmetneed* = (Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) = ((Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak lagi + Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda) : Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100, di

mana Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak lagi sebesar 3.893, Jumlah Pasangan Usia Subur yang Ingin Anak Ditunda sebesar 860 dan Jumlah Pasangan Usia Subur sebesar 37.870, maka realisasinya sebesar 12,55%, dari target 16,17%, sehingga capaiannya di atas 100% yaitu 122,39%. Adapun data *unmetneed* Kota Yogyakarta tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel III. 63 *Unmetneed* Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	INGIN ANAK TUNDA (IAT)	TIDAK INGIN ANAK LAGI (TIAL)	JUMLAH	%
1	Tegalrejo	3.576	131	458	589	16,47
2	Jetis	2.090	62	240	302	14,45
3	Gondokusuman	3.248	46	255	301	9,27
4	Danurejan	1.716	25	193	218	12,70
5	Gedongtengen	1.607	27	175	202	12,57
6	Ngampilan	1.530	36	245	281	18,37
7	Wirobrajan	2.404	52	302	354	14,73
8	Mantrijeron	3.271	105	332	437	13,36
9	Kraton	1.493	43	212	255	17,08
10	Gondomanan	1.308	13	66	79	6,04
11	Pakualaman	772	16	92	108	13,99
12	Mergangsan	3.070	40	168	208	6,78
13	Umbulharjo	7.572	161	800	961	12,69
14	Kotagede	4.213	103	355	458	10,87
JUMLAH		**37.870**	**860**	**3.893**	**4.753**	**12,55**

Sumber: Siga, 2024.

3. **Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**, mendukung sasaran strategis keempat, yaitu Terkendalinya Jumlah Penduduk. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), memiliki 1 indikator yaitu Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera Dengan Stratifikasi Paripurna, dengan capaian seperti pada tabel berikut:

Tabel III.64 Capaian Sasaran Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

No	Indikator Program	2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna	12,71%	13,58%	106,85

Sumber: DP3AP2KB, 2024.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 9 sebelumnya, terlihat bahwa realisasi anggaran program pendukung sasaran Terkendalinya Jumlah Penduduk, yaitu Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera Dengan Stratifikasi Paripurna, memiliki capaian kinerja yang sangat baik dengan nilai capaian 106,85% dan mampu melakukan efisiensi dengan capaian serapan anggaran 87,44%, dan kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Dengan formula Persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna = (Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna / Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera di Kota Yogyakarta) *100%, di mana Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna sebesar 129, dan Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera di Kota Yogyakarta sebesar 950, maka realisasinya sebesar 13,58%, dari target 12,71%, sehingga capaiannya di atas 100% yaitu 106,85%.

1. **Kesimpulan**

- Dari analisis keempat sasaran, keepatindikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar $\geq$ 100%, yaitu sasaran Meningkatnya Keberdayaan Perempuan, Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan, Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak, dan Terkendalinya Jumlah Penduduk.
- Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 sangat efektif dan efisien dalam rangka mendukung capaian IKU dengan rincan capaian masing–masing sasaran sebagai berikut:
    a. Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dengan capaian kinerja 108,77% dan capaian keuangan 99,51%.
    b. Sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dengan capaian kinerja 100% dan capaian keuangan 98,49%.
    c. Sasaran Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak dengan capaian kinerja 100% dan capaian keuangan 99,56%.
    d. Sasaran Terkendalinya Jumlah Penduduk dengan capaian kinerja 100% dan capaian keuangan 92,75%.
    e. Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi DP3AP2KB dengan capaian kinerja 100% dan capaian keuangan 91,69%.

9. Urusan Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan salah satu satuan kerja pendukung urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam mendukung urusan tersebut Dinas Perhubungan memiliki Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Umum (LLAJ) yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III. 65 perubahan perjanjian kinerja eselon II tahun 2024.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kelancaran	Tingkat Pelayanan Jalan	25,002
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A

Berdasarkan tabel di atas Dinas Perhubungan memiliki 1 sasaran startegis yaitu Meningkatnya Kelancaran dengan indikator kinerja Tingkat Pelayanan Jalan. Target indikator kinerja tersebut adalah 25,002 dan terealisasi sebesar 25,76. Dengan hasil survey di 22 ruas jalan dan mendapat hasil maka pada tahun 2024 keadaan lalu lintas di kota yogyakarta rata-rata masih lancar kecuali di beberapa ruas jalan arteri sekitar pusat kota terlihat kurang lancar.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran strategis Meningkatnya Kelancaran, juga didukung oleh Program-program yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja sdministrator setara eselon III sebagai berikut:

Tabel III. 66 perubahan perjanjian kinerja administrator setara eselon III tahun 2024.

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target Perubahan
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan	91,52%
		Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	95,85 %
		Persentase Juru parkir yang tertib	97,97 %
		Persentase ketertiban lalu lintas	83,07%
		Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas	100%
		Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik	71,31%
		Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2

Dinas Perhubungan mempunyai 1 Program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) dengan 7 Indikator program :

- Presentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan untuk mengetahui jumlah angkutan umum dan barang yang laik jalan dengan menghitung jumlah kendaraan yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan yang di uji. Target 91,52% dan terealisasi 89,05%, dengan melihat hasilnya maka masih lumayan banyak kendaraan yang tidak laik jalan di kota yogyakarta..
- Presentase sarana dan prasaran parkir yang terpenuhi dimana untuk mengetahui sarana prasarana perparkiran yang dalam kondisi baik dari jumlah parasaran yang sudah terpasang dengan target 95,80 % dan terealisasi 97,69 %, kondisi sarana prasaran parkir yang terpasang dalam keadaan baik.
- Presentase juru parkir yang tertib untuk mengetahui jumlah juru parkir yang tertib dari seluruh juru parkir yang terdata di Dinas Perhubungan dengan target 97,85% dan terealisasi 97.97%, dengan hasil ini bisa diketahui rata-rata juru parkir yang terdata di Dinas perhubungan tertib dalam mematuhi aturan perparkiran.
- Presentase Ketertiban Lalu Lintas. Target 83,07% dan terealisasi 86,16%, dengan melihat hasilnya maka diketahui sudah banyak masyarakat yang memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta tertib berlalu lintas di kota yogyakarta.
- Persentase Pemenuhan Sarpras Lalu Lintas Berkategori Baik untuk mengetahui ada berapa banyak Sarpras dalam kondisi baik dengan target 71,31% dengan realisasi 71,31%. Dengan melihat realisasinya maka dapat diketahui sarpras lalu lintas di Kota Yogyakarta rata-rata dalam kondisi baik.
- Persentase Pengendalian dampak lalu lintas yang diharapkan bisa uantuk mengendalikan pembangunan tempat usaha yang dibangun di Kota Yogyakarta dengan memberikan rekomendasi dengan melihat letak bangunan dan ketersediaan lahan perparkiran sehingga tidak menimbulkan gangguan lalu lintas dengan target 100% dan realisasinya 100%, dengan melihat hasil realisasi maka dapat diketahui bahwa permohonan yang masuk setelah dilakukan sidang, memenuhi syarat dalam mendirikan dan mengembangan tempat usaha
- Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilakukan untuk menata ruas jalan yang mengalami kepadatan kendaraan yang melewatinya dengan target setiap tahun 2 ruas jalan dengan realisasi 2 ruas jalan yang berhasil dilakukan Manajemen rekayasa Lalu lintas sehingga dengan adanya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas diharapkan Jalan-jalan di Kota Yogyakarta supaya jangan terjadi kemacetan.

Dalam rangka menunjang tercapainya target sasaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), juga didukung oleh kegiatan dan sub.kegiatan yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut :

No	Sasaran kegiatan/sub.kegiatan	Indikator kinerja sub.kegiatan (output sub.kegiatan)	Target Perubahan
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabu yang Tersedia	109 unit
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	155 unit
2	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratar Izin Penyelenggaraan danTerbangunnya F Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dala SistemPelayanan Perizinan Berusaha Teri Secara Elektronik	7 dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanan Izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IzinPenyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir KewenanganKabupaten/Kota	7 laporan
3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian I Kendaraan Bermotor yangTersedia	2 unit
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor yangDitingkatkan K	6 orang
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengu Kendaraan Bermotor	6000 set
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Oper Prosedur Pengujian BerkalaKendaraan Be	1 laporan
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian I Kendaraan Bermotor yangTerpelihara	2 uit
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelengga Pengujian Berkala KendaraanBermotor	22 laporan
4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Ma dan Rekayasa Lalu LintasUntuk Jaringan Kabupaten/Provinsi	2 laporan
	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan dan Rekayasa Lalu Lintasuntuk Jaringan Kabupaten/Kota	2 laporan

	Pengawasan dan Pengendalian Eektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Penger Efektivitas PelaksanaanKebijakan untuk J Kabupaten/Kota	44 laporan
5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkron Penilaian Hasil Andalalin	25 laporan
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujua Andalalin yang terawasi	24 kali
6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pem Pemenuhan PersyaratanPenyelenggaraan Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupa	48 laporan
7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Angkutan Orang dan/atau BarangAntar K (Satu)Daerah Kabupaten/Kota yang Terse	5 unit

Anggaran Perubahan untuk kegiatan dan sub.kegiatan yang menunjang pelaksanaan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebesar Rp 12.992.404.700 dan terealisasi Rp. 12.804.697.123 atau 98,56 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan diatas mendukung pencapaian target indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Dari tujuh indikator program di atas, indikator semua merupakan indikator positif yang artinya semakin tinggi realisasi maka capain kinerjanya akan semakin baik, yang dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$$

Dalam mencapai target kinerja Dinas perhubungan terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong :
    1. Telah adanya dukungan regulasi baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun Perda untuk mengutamakan angkutan umum;
    2. Adanya pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas sebagai salah satu upaya Dinas Perhubungan dalam mengatasi dampak terhadap penurunan kelancaran lalu lintas;
    3. Adanya pemeliharaan dan penambahan perlengkapan jalan secara bertahap serta peningkatan dari sisi tekhnologi;
    4. Adanya dukungan instansi terkait dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Bidang Perhubungan sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran peraturan bidang Perhubungan;
    5. Adanya Forum Kelompok Kerja Parkir sebagai wadah komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku perparkiran;
    6. Adanya potensi Tempat Khusus Parkir pada lahan / persil milik warga dengan memberikan Rekomendasi terhadap ijin penyelenggaraan perparkiran, dengan maksud untuk mengurangi beban parkir on street;
    7. Adanya sarana pengujian yang memadai bagi wajib uji untuk melakukan uji kelaikan bermotor.
    8. Adanya layanan transportasi umum massal perkotaan yang semakin baik.
2. Faktor Penghambat :
    1. Lambatnya pertumbuhan / terbatasnya jalan di kota, sementara laju pertumbuhan kendaraan tidak terkendali;
    2. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi di jalan;
    3. Adanya becak bermotor yang masih beroperasi di jalan, sementara becak bermotor tidak memenuhi standart keselamatan sebagai angkutan umum;
    4. Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan bidang perhubungan;
    5. Kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal;
    6. Kurangnya ketersediaan tempat parkir khusus (off street) sehingga menggunakan badan jalan untuk kegiatan perparkiran (on street).
    7. Adanya kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang berada pada tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang berpotensi menimbulkan bangkitan parkir liar.

10.Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam urusan Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melaksanakan dalam dua program yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik serta Program Aplikasi Informatika dengan kebijakan yang diambil adalah meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi, meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat, meningkatkan pemberitaan positif terhadap informasi Pemerintah Kota Yogyakarta, meningkatnya konten yang diproduksi melalui YK TV, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pada ruang publik, meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan *e-government*, meningkatkan pengetahuan teknologi informasi bagi aparatur dan meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung *e-government*.

Pada tahun 2024 program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik memiliki 3 (tiga) indikator program, yaitu :

a. Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2 X 24 Jam

Realisasi pada indikator ini sebesar 96.79% dimana target sebesar 97.50%., sehingga tingkat capaian adalah 99.27%. Perhitungan capaian target program ini diperoleh dari telah ditindaklanjutinya 3824 pesan yang masuk ke aplikasi pengaduan *Jogja Smart Service* dari total aduan sebanyak 3951 pesan. Pencapaian target program ini didukung oleh kesiapan petugas lapangan JSS yang dengan cepat menindaklanjuti setiap pesan yang masuk ke menu Pengaduan di Aplikasi JSS. Beberapa aduan belum ditindaklanjuti oleh admin OPD terlapor dikarenakan kategori yang dilaporkan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk penyelesaiannya serta beberapa aduan yang masuk bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga terlewat dalam memberikan jawaban.

Metadata :

Jumlah Aduan	=	3951
Ditindaklanjuti dalam tempo 2x24 jam	=	3824

Formula Penghitungan

((Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam / Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi) x 100%

Hasil Perhitungan = 3824/3951 x 100% = 96.79 %

b. Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta

Realisasi dari indikator ini sebesar 99.85% dari target yang ditetapkan yaitu 99.90%. Tingkat capaian dari realisasi yaitu 99.94%. Berita-berita positif dan netral berasal dari berbagai program pemerintah Kota Yogyakarta yang diapresiasi oleh berbagai pihak termasuk dari pihak media baik media cetak maupun media online sehingga dalam pemberitaannya menampilkan

apresiasi positif, sementara itu untuk berita yang negatif merupakan efek dari berbagai fenomena yang belum terselesaikan secara baik menurut media, seperti penangangan sampah. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah secara rutin mengadakan monitoring dan evaluasi setiap triwulan untuk meningkatkan kinerja admin program-program pemerintah Kota Yogyakarta dan hubungan dengan media massa serta para wartawan.

Metadata :

Jumlah pemberitaan positif dan netral (media cetak) = 5297
Jumlah keseluruhan pemberitaan media cetak = 5305

Formula Penghitungan

(Jumlah pemberitaan positif dan netral (media cetak) dibagi Jumlah keseluruhan pemberitaan media cetak) x 100%

Hasil Perhitungan = 5297/5305 x 100% = 99.85 %

c. Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV

Realisasi pada indikator ini yaitu sebesar 78.56% dari target sebesar 73.80%, yaitu dengan diproduksinya 1799 konten dari target akhir yang diproduksi 2290 konten. Dari realisasi tersebut didapat tingkat capaian realisasi sebesar 106.45%.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian dalam indikator ini adalah Perangkat daerah sebagai penyelenggara layanan publik memiliki kesadaran tinggi atas pentingnya publikasi. Video liputan YKTV bermanfaat tidak sebatas sebagai sarana publikasi ke masyarakat namun juga memiliki fungsi dokumentasi yaitu bukti dukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemkot Yogyakarta melalui Perangkat Daerah terkait sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkot Yogyakarta.

Faktor lain yang mendukung adalah keberadaan media massa dan influencer media sosial sebagai mitra publikasi dalam penyebaran informasi terkait kebijakan, program, kegiatan dan layanan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Metadata :

Jumlah konten yang diproduksi = 1799
Jumlah rencana produksi konten = 2290

Formula Penghitungan

(Jumlah konten yang diproduksi dibagi Jumlah rencana produksi konten) x 100%

Hasil Perhitungan = 1799/2290 x 100% = 78.56 %

Dari ketiga indikator program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dapat ditentukan penghitungan sektor pengelolaan informasi publik diambil dari {(60% persentase tindak lanjut aduan) + (20% persentase pemberitaan positif) + (20% persentase konten yang diproduksi)} X 100%

Hasil Perhitungan = ((60%*96.79)+(20%*99.85)+(20%*78.56))*100% = 93.76 %

Jumlah anggaran dalam program Informasi dan Komunikasi publik sebesar Rp3.823.342.500,- terealisasi sebesar Rp 3.795.596.200,- atau 99.27%. Keberhasilan Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik selain pengelolaan aduan, telah mendapat penghargaan antara lain :

- Keterbukaan Informasi Badan Publik terbanyak, sebanyak 20 (duapuluh) badan publik predikat Informatif
- Mendukung Pemkot Yogyakarta meraih penghargaan kategori badan publik pengelola website/medsos terbaik dan kategori badan publik paling ramah difabel.

  Pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat DIY 2024, tanggal 10 Desember 2024

Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diraih menunjukan apa yang sudah dilakukan berada di jalur yang benar atau sebagaimana mestinya. Di samping itu adanya peningkatan OPD yang mendapatkan penghargaan dan masuk dalam kategori informatif adalah proses menuju badan publik yang profesional dan menunaikan tanggung jawab keterbukaan informasi badan publik.

Dalam pelaksanaanya program Informasi dan Komunikasi publik mengalami beberapa hambatan antara lain :

Masih ada warga yang belum paham memanfaatkan aplikasi aduan JSS .

1. Masih ada OPD yang saling melempar aduan sehingga pelapor tidak segera medapatkan solusi.
2. Belum maksimal dalam memanfaatkan SP4N Lapor
3. SDM pengelola melaksanakan tugas sebagai tugas tambahan bukan tugas utama.
4. Keterbatasan tempat sampah sehingga menyebabkan pemberitaan negatif tentang sampah menjadi tinggi.
5. Keterbatasan personil untuk pembuatan konten sehingga konten diutamakan untuk kegiatan tingkat pemkot
6. Jadwal agenda Perangkat Daerah yang bersamaan, sehingga tidak semua permohonan peliputan dapat dipenuhi. Sehingga, Perangkat Daerah diharapkan tetap melakukan dokumentasi dan publikasi melalui website dan media sosial yang dimiliki.

Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah :

1. Mengoptimalkan sosialisasi program pemerintah melalui berbagai media cetak dan online dan media sosial
2. Perlu komitmen pimpinan OPD untuk memberikan dukungan dalam pengelolaan pengaduan.

3. Koordinasi lebih intens dengan operator OPD agar respon aduan melalui JSS bisa lebih cepat, dan melakukan koordinasi rutin dengan pengelola jss di masing-masing OPD/unit kerja
4. Optimalisasi media sosial untuk promosi publikasi kegiatan/program Pemerintahn Kota Yogyakarta
5. Sosialisasi lebih gencar dalam penanganan sampah untuk merubah perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan .
6. melakukan optimalisasi produksi konten melalui kanal YK TV

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika juga memiliki 3 (tiga) indikator program yaitu :

1. Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun

   Pada indikator program Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun, dari target 90.95% terealisasi sebesar 90.95% sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pencapaian ini diperoleh dari pembangunan aplikasi pada tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berhasil membangun 201 aplikasi/web dari target akhir 221 aplikasi/web sebagai wujud percepatan implementasi *Smart City*.

   Metadata :

   Jumlah aplikasi yang dibangun = 201
   Jumlah rencana aplikasi = 221

   Formula Penghitungan

   (Jumlah aplikasi yang dibangun dibagi Jumlah rencana aplikasi) x 100%
   Hasil Perhitungan = 201/221 x 100% = 90.95 %

   Faktor yang mendukung ketercapiaan indikator program Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibanguna adalah sudah tersedianya infrastruktur IT dan jaringan internet, tersedianya software pembangunan aplikasi dan kemampuan programmer-programmer di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

   Sementara itu faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan aplikasi adalah Kekurangan sumber daya manusia dan peralatan kerja (eksisting16 programmer, idealnya membutuhkan 60 programmer)

2. Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik

   Untuk prosentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik target yang ditetapkan adalah 87.50% dengan pencapaian kinerja sebesar 97.00% sehingga mencapai target yang telah ditentukan. Pencapaian ini diperoleh dari Jumlah ruang publik yang terpasang *CCTV* dari target 200 terpasang 194 *CCTV* ruang publik.

Metadata :

Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV = 194
Jumlah ruang publik = 200

Formula Penghitungan

(Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV dibagi Jumlah ruang publik) x 100%

Hasil Perhitungan = 194/200 x 100% = 97.00 %

Faktor yang mendukung ketercapaian indikator Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi yang dibangun adalah adanya permohonan pemasangan CCTV dari OPD untuk keperluan pemantauan. Sedangkan hambatan yang muncul adalah adanya spesifikasi teknis CCTV yang tidak sesuai (CCTV yang sudah terpasang lama) sehingga tidak bisa diintegrasikan ke Jogja Smart Service.

3. Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas

Pada indikator persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas terealisasi sebesar 358 ruas jalan yang dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi dibandingkan ruas Jalan Kota di Kota Yogyakarta yaitu 490 atau sebesar 73.06% melebihi target yang telag ditentukan yaitu 71.43%.

Metadata :

Jumlah ruas jalan yang dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi = 358
Jumlah ruas Jalan Kota di Kota Yogyakarta = 490

Formula Penghitungan

(Jumlah ruas jalan yang dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi dibagi Jumlah ruas Jalan Kota di Kota Yogyakarta) x 100%

Hasil Perhitungan = 358/490 x 100% = 73.06 %

Dari ketiga indikator program Pengelolaan Aplikasi Informatika dapat ditentukan penghitungan sektor pemanfaatan teknologi informasi diambil dari {(60% persentase aplikasi) + (20% persentase infrastruktur teknologi) + (20% persentase kota cerdas)} X 100%

Hasil Perhitungan =((60%*90.95)+(20%*97.00)+(20%*73.06))*100% = 88.58%

Jumlah anggaran yang dipergunakan dalam program Aplikasi Informatika adalah Rp 14.918.440.850,- dan terealisasi Rp 13.936.872.409,- atau sebesar 93.42%

Dalam Pelaksanaan program Aplikasi Informatika juga telah mendapatkan apresiasi berupa peningkatan nilai indeks SPBE. Pada tahun 2024 Indeks SPBE memperoleh nilai 3,5 meningkat dari nilai tahun 2023 sebesar 3.41 poin.

Peningkatan nilai SPBE ini diperoleh dari peningkatan nilai pada aspek Domain Kebijakan (4.0) dan Domain Tatakelola (3.0)

Keberhasilan program Aplikasi Informatika juga ditunjukkan dengan Aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) yang mendapatkan penghargaan Government Techno Awards 2024 DIY oleh MarkPlus Corporate pada acara Indonesia Marketing Festival (IMF) 2024.

Faktor pendorong terlaksananya program Aplikasi Informatika antara lain tersedianya perangkat dan fasilitas pendukung data center, tersedianya perangkat Hiperconverged Infrastruktur (HCI) yang memudahkan pengelolaan, Programmer SDM yang dapat dihandalkan, ketersediaan jaringan internet dan server yang mencukupi, adanya regulasi terkait dengan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif yang sudah diharmonisasi dengan peraturan lain yang berkaitan, adanya tim monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua OPD terkait, sudah adanya pemahaman dari sebagian provider tentang pentingnya menjaga estetika kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Aplikasi Informatika adalah harga server HCI yang cukul mahal yakni untuk 1 node di harga 1,3 M dan untuk server ada masa *end of life product* (produk yg digunakan sudah tidak ada jaminan dr segi software dan hardware dr produsen sehingga sangat beresiko manakala tidak melakukan pengadaan server baru sementara anggaran pengadaan banyak yang dirasionalisasi.

Dalam penataan infrastruktur pasif telekomunikasi Penataan jaringan fiber optik yang sudah ada melalui sistem ducting belum dapat dilakukan secara berkelanjutan akibat keterbatasan anggaran

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta memiliki 2 sasaran strategis pada urusan teknis, yakni Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM, Meningkatnya Kinerja sektor industry dan Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Sasaran meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM memiliki dua indikator kinerja yakni Nilai omset koperasi dan Nilai Omset UKM Usaha Mikro. Sasaran meningkatnya kinerja sektor industry juga terdiri dari dua indikator kinerja yakni Jumlah Tenaga Kerja IKM dan Nilai Investasi IKM. Sedangkan sasaran pendukung meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki satu indikator kinerja yakni Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024		REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA KINERJA
				MURNI	PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya	Nilai omset koperasi	Rp	369.330.174.952	397.157.422.559	397.206.633.350	100,01 %	Sangat Baik

	Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Nilai Omset UKM Usaha Mikro	Rp	5.760.000.000	5.760.000.000	5.863.115.800	101,79 %	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	Orang	18.718	18.718	18.821	100,55 %	Sangat Baik
		Nilai Investasi IKM	Rp	19.165.867.834	130.935.000.000	140.000.000*	106,92 %	Sangat Baik

Seluruh indikator kinerja sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta tahun 2024 terpenuhi dengan predikat kinerja sangat baik. Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM memiliki tiga sasaran dengan tiga indikator kinerja. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM memiliki dua indikator kinerja yakni Nilai Omset Koperasi dan Nilai Omset UKM Usaha Mikro. Target kinerja indikator Nilai Omset Koperasi adalah Rp 369.330.174.952 pada Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2024.

Target tersebut diubah menjadi Rp 397.157.422.559 pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Realisasi atas target tersebut sebesar Rp 5.863.115.800. Dengan demikian, capaian kinerjanya sebesar 101,79 %. Target kinerja indikator Jumlah Tenaga Kerja IKM Tahun 2024 ditetapkan sebesar 18.718 orang. Realisasi atas target tersebut adalah 18.821 orang. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,55 %. Target kinerja indikator Nilai Investasi IKM Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 19.165.867.834 kemudian diubah menjadi Rp 130.935.000.000 pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 106,92 %.

Sebagai usaha untuk mencapai target kinerja, dilaksanakan sejumlah upaya. Indikator kinerja Nilai Omset Koperasi diwujudkan melalui pelaksanaan empat program kerja, antara lain Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Sedangkan indikator kinerja Nilai Oset UKM Usaha Mikro diwujudkan melalui pelaksanaan dua program kerja yakni, Program Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM. Program Pemberdayaan UMKM terdiri dari satu kegiatan, yaitu Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Kegiatan ini terdiri dari tiga sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Program Pengembangan UMKM terdiri dari satu kegiatan yakni Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Kegiatan ini terdiri dari satu sub

kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi.

Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri memiliki dua indikator kinerja antara lain Jumlah Tenaga Kerja IKM dan Nilai Investasi IKM. Target indikator Jumlah Tenaga Kerja IKM ditetapkan sebesar 16.425 orang dan terealisasi sebesar 17.944. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 109,25 %. Sedangkan target indikator Nilai Investasi IKM sebesar Rp 15.948.506.955, terealisasi Rp 29.830.452.498. Capaian kinerja indikator ini adalah 187,04 %.

Untuk mewujudkan target sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri, dilaksanakan empat program kerja antara lain Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri dari satu kegiatan yakni Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari tiga sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri, dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Program Pengendalian Izin Usaha Industri terdiri dari satu kegiatan yakni Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sector Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional terdiri dari satu kegiatan yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui SIINAS.

Terdapat satu kegiatan yang merupakan bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri. Kegiatan itu adalah Peningkatan Pelayanan BLUD. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan sejumlah program. Rumusan indikator dan formulasi program sebagai berikut :

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA PROGRAM
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) tahun n
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian kesehatan kategori sehat tahun n
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi s.d. tahun n
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah koperasi yang volume usahanya meningkat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah wirausaha baru tahun n
		Jumlah UKM ber-NIB	Jumlah UKM yang mempunyai NIB tahun n
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri	Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	(IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang berijin industri	(Jumlah IKM yang berizin industri / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	(Data IKM yang ter-update) / Total Data IKM) x 100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pendapatan UPT logam	Pendapatan UPT logam tahun n

(Sumber: Meta Data Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta)

Adapun target dan realisasi dari program yang dijalankan antara lain :

Program PD (Program berdasarkan Kepmendagri 50 Th 2020)	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Satuan	2024	
				Target Program PD	Realisasi
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) tahun n	unit	115	115
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian kesehatan kategori sehat tahun n	unit	115	115
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi s.d. tahun n	orang	690	690
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah koperasi yang volume usahanya meningkat	unit	27	27
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah wirausaha baru tahun n	Wirausaha	100	115
	Jumlah UKM ber-NIB	Jumlah UKM yang mempunyai NIB tahun n	Wirausaha	400	400
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri	Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset	UMKM	40	40
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	(IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	%	6,97 %	10,17 %
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang berijin industri	(Jumlah IKM yang berizin industri / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	%	1,8 %	61,87 %
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	(Data IKM yang ter-update) / Total Data IKM) x 100%	%	100%	100%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pendapatan UPT logam	Pendapatan UPT logam tahun n	Rp	490.500.000	566.776.486

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran program Dinas Perinkopukm tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik. Akuntabilitas baik yang dimaksud adalah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM). Tahun 2024 target indikator kinerja ini adalah 115 unit koperasi. Realisasi target kinerja jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik sebesar 115 unit koperasi. Dengan demikian capaian kinerja target ini mencapai 100 %.

   Untuk mewujudkan indikator kinerja program ini dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

   1. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi.
   2. Klinik Koperasi Sehat, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan koperasi yang sehat dan kompetitif.
   3. Melaksanakan Pemeringkatan Koperasi. Pemeringkatan Koperasi merupakan salah satu bentuk pengawasan koperasi yang bertujuan untuk melihat tingkat kualitas koperasi baik dilihat dari aspek kelembagaan koperasi, usaha koperasi, keuangan koperasi, manfaat koperasi terhadap anggota maupun manfaat koperasi terhadap masyarakat. Pemeringkatan koperasi memberikan nilai dan pengelompokan koperasi menjadi koperasi berkualitas, cukup berkualitas dan tidak berkualitas. Tahun 2024 dilakukan pemeringkatan koperasi bagi 50 koperasi.
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi memiliki satu target kinerja yakni jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat. Formula penghitungannya adalah jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian kesehatan kategori sehat tahun n (tahun berjalan). Target kinerja indikator ini pada tahun 2024 yakni 115 unit koperasi. Sedangkan realisasinya sebesar 115 unit koperasi. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

   Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

   Untuk mencapai target kinerja program ini dilaksanakan Penilaian Kesehatan Koperasi. Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, baik konvensional maupun Syariah.

Melalui aktivitas ini, permasalahan yang dihadapi koperasi juga dapat dideteksi. Hal-hal yang diperhatikan dalam penilaian koperasi antara lain prinsip perkoperasian, legalitas lembaga dan manajemen. Prinsip perkoperasian meliputi tata Kelola koperasi, kecukupan permodalan, pengelolaan permodalan, profil resiko. Legalitas lembaga meliputi legalitas badan hukum, legalitas izin usaha, keanggotaan dan kelengkapan organisasi. Sedangkan aspek manajemen mencakup Manajemen Umum, Manajemen Kelembagan, Manajemen Permodalan, Manajemen Aset dan Manajemen Likuiditas.

Aktivitas penilaian Kesehatan kopersi ini menyasar 115 koperasi. Dengan dilaksanakannya Penilaian Kesehatan Koperasi diharapkan koperasi di masa depan mampu memberikan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi seluruh anggota.

3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi. Formula penghitungannya adalah jumah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi sampai dengan tahun n (tahun berjalan). Tahun 2024 target indikator kinerja ini ditetapkan sebesar 690 orang. Sedangkan realisasinya sebesar 690 orang. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

   Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Aktivitas yang dilakukan antara lain :

   1. Bimbingan Teknis Perkoperasian
   2. Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP
   3. Temu Koordinasi Peserta Diklat DAK
   4. Diklat sertifikasi dan uji kompetensi
   5. Pendampingan pasca diklat

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah koperasi yang berkembang usahanya. Formula penghitungannya adalah Jumlah koperasi yang volume usahanya meningkat. Tahun 2024 target indikator kinerja ini ditetapkan sebesar 27 unit dan terealisasi sebesar 27 unit. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

   Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan satu sub kegiatan yaitu Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

   Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut :

1. Melaksanakan pameran produk-produk koperasi. Pada tahun 2024 dilakukan Gelar Potensi Koperasi pada rangkaian Peringatan Hari Koperasi Kota Yogyakarta, turut serta sebagai peserta pameran pada Peringatan Hari Koperasi Tingkat Nasional dan Pameran Smaradahana.
2. Pembinaan kelompok Pra Koperasi.
3. Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir, pada tahun 2024 telah dilaksanakan Monev Dana Bergulir APBN, APBD, MKPL dan Monev BUKP. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dana bergulir dan permasalahan yang dihadapi.
4. Rangkaian Hari Koperasi. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi 2024 telah dilaksanakan Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian, Workshop/Sarasehan Hari Koperasi dan pameran.
5. Pemilihan Duta Muda Koperasi

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) memiliki dua indikator kinerja yakni jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan dan Jumlah UKM ber-NIB.

   Formula penghitungan indikator jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan adalah Jumlah wirausaha baru tahun n (tahun berjalan). Target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 100 orang dan terealisasi sebesar 100 orang. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %.

   Jumlah UKM ber-NIB, formula penghitungan indikatornya adalah Jumlah UKM yang mempunyai NIB tahun n (tahun berjalan). Target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 400 UMKM dan terealisasi sebesar400 UMKM. Capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

   Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dan memiliki tugas sub kegiatan antara lain Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

   Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut :

   1. Melakukan updating data UMKM
   2. Diseminasi Pengetahuan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM
   3. Diseminasi Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Pelaku UMKM,
   4. Diseminasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Gandeng Gendong
   5. Pelatihan Home Business Camp (HBC)
   6. Pelatihan Karang Mitra Usaha (KaMU)
   7. Pelatihan Managemen Resiko bagi Wirausaha Baru yang diikuti
   8. Pendampingan intensif pasca pelatihan

9. Pembuatan iklan layanan masyarakat dan program televisi
10. Fasilitasi tempat promosi bagi peserta pelatihan HBC dan KaMU

6. Program pengembangan UMKM memiliki satu indikator kinerja yakni Jumlah UKM Mandiri. Formula penghitungannya adalah Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 40 UMKM dan terealisasi 40 UMKM. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

   Program ini memiliki satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dan memiliki satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatn Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

   Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Produktifitas dan Pemasaran Serta Pengembangan UKM, dilaksanakan dalam 2 angkatan dengan peserta masing-masing 30 orang.
2. Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Swasta. Sebagai salah satu kegiatan yang berguna bagi pelaku usaha untuk menambah informasi bagi perbaikan produknya dan dapat memotivasi masyarakat untuk berwirausaha
3. Pameran dan promosi produk UMK.
4. Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak. Upaya untuk mempromosikan dan memasarkan produk UMKM baik produk diluar daerah maupun di dalam daerah melalui media.
5. Penyaluran tenda kerucut bagi UMKM di wilayah Kemantren melalui mekanisme hibah.

7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri memiliki satu indikator kinerja yakni Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi. Formula penghitungan indikator ini adalah IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi dibagi total jumlah IKM Kota Yogyakarta dikali 100%. Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator ini adalah 6,97 % dan terealisasi sebesar 10,17%. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini mencapai 145, 90%.

   Program ini memiliki satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dan tiga sub kegiatan antara lain Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Pelaksanaan program ini diampu oleh Bidang Industri dan UPT Logam.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bidang Industri antara lain :

1. Pendampingan kepada IKM Kerajinan
2. Kajian Pengembangan Sentra di 14 Kecamatan
3. Kajian Persiapan Pendirian PDIN
4. Pelatihan Manajemen Usaha
5. Pelatihan Teknis Produksi
6. Pelatihan Diversifikasi Produk
7. Fasilitasi dan Pendampingan Anggota Dekranasda
8. Fasilitasi Registrasi HAKI
9. Fasilitasi promosi
10. Pameran produk IKM
11. Pembuatan video profil IKM
12. Promosi dan sosialisasi melalui program televisi
13. Sosialisasi Program Unggulan Bidang Industri melalui Medsos
14. Penguatan kelembagaan IKM
15. Pendampingan bagi IKM
16. Business Matching
17. Penguatan P3DN

Sedangkan upaya-upaya yang dijalankan oleh UPT Logam antara lain :

1. Fasilitasi Pelayanan UPT Logam
2. Fasilitasi Pelayanan PDIN
3. Pelatihan Pengelolaan Usaha Pengecoran
4. Pelatihan Proses Trimming dan Melting untuk Penggunaan Mesin Injeksi
5. Pendampingan Kolaboratif Inovasi Desain Produk IKM
6. Penyuluhan Pengelolaan Sentra IKM
7. Pelatihan Dasar Moulding IMDIA
8. Pelatihan Perancangan Peralatan Penepat (JIG) bagi Pengelola UPT Logam
9. Pelatihan CAD Lanjut bagi Operator dan Pengelola UPT Logam
10. Pelatihan Pola Kayu Dasar
11. Pelatihan Setter Mesin Injeksi
12. Pendukung Layanan UPT Logam
13. Pelatihan Manajemen Sosmed
14. Pelatihan Desain Produk
15. Pelatihan Pemrograman Mesin
16. Pelatihan Peningkatan Skill Komunikasi Branding Sentra IKM

17. Pendampingan Kemitraan
18. Peningkatan Kompetensi Skill Branding Sentra IKM

8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional memiliki satu indikator kinerja yakni Persentase Data Informasi Industri yang ter-update. Formula penghitungannya adalah data IKM yang ter-update) dibagi total Data IKM dikali 100%. Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator ini adalah 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini mencapai 100 %.

   Program ini memiliki satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota; dan satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

   Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan :

1. updating data IKM
2. Penyampaian informasi industry dalam SIINAS

9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki dua indikator kinerja yakni yakni pendapatan UPT Logam dan nilai SAKIP hasil penilaian Inspektorat. Formula penghitungan indikator pendapatan UPT Logam adalah pendapatan UPT Logam tahun n (tahun berjalan). Target indikator kinerja ini pada tahun 2024 sebesar Rp 490.500.000 dan membukukan realisasi sebesar Rp 566.776.486. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 115,55 %.

12. Urusan Penanaman Modal

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta terbagi menjadi 1 urusan yang memiliki 5 Program yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Program tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja yang memuat sasaran program, indikator program, indikator program, dan target sebagaimana tercantum dalam table berikut:

Tabel 1 Target dan Realisasi Sasaran Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terapadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai Investasi meningkat	Nilai Investasi	323.380.884.182 – 733.200.000.000	806.892.968.992,82	110.05%*

Catatan:
1. Target Kinerja dari Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Sumber data: data rilis realisasi investasi TW 1, TW 2 dan TW 3 dari Kementerian Investasi/BKPM di OSS
3. Range tertinggi dari target realisasi investasi setiap tahunnya kemungkinan akan berubah sesuai dengan target yang ditentukan DPMPTSP DIY setiap tahun, sedangkan range bawah dari target realisasi telah ditentukan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Nilai Realisasi Investasi di triwulan IV tahun 2024 hingga saat ini belum rilis resmi oleh BKPM sehingga data realisasi investasi s/d Desember 2024 belum bisa kami sajikan. Untuk saat ini, data yang kami sajikan adalah realisasi investasi s/d triwulan III dengan capaian sebesar Rp 806.892.968.992,82. Angka realisasi investasi s/d triwulan III ini sudah melebihi *range* target yang telah ditentukan di tahun 2024 yaitu sebesar Rp 323.380.884.182,00 s/d Rp 733.200.000.000,00 dengan capaian sebesar 110.05%.

Pencapaian target sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun 2024 untuk **"Nilai Investasi Meningkat"** dari tahun 2023 yaitu sebesar Rp 862.424. 406.597,00 menjadi Rp 806.892.968.992,82 ditahun 2024. Data realisasi investasi tersebut belum dapat dibandingkan karena realisasi investasi di tahun 2023 yang disajikan adalah realisasi investasi dalam satu tahun, berbeda dengan capaian realisasi investasi tahun 2024 yang masih menggunakan data cut off triwulan III karena belum ada rilis resmi realisasi investasi triwulan IV OLEH bkpm/Kementrian Investasi. Jika disandingkan dengan target investasi di tahun 2024, sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun 2024 untuk **"Nilai Investasi Meningkat"** dengan target batas minimal Rp 323.380.884.182,00 sampai dengan batas maksimal Rp 733.200.000.000 telah terealisasi sebesar 110.05% (dibandingkan dengan batas maksimalnya) atau sebesar Rp 806.892.968.992,82.

Tabel III. 67 Target dan Realisasi Kinerja Program
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	Jumlah Investor Baru	6.633 investor baru	11.350 investor baru
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur 2. Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	1. Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur 2. Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	87% 100%	99,01% 100%
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan	Persentase investor yang mengalami penambahan modal	Persentase investor yang mengalami penambahan modal	22.60%	65.09%

	Penanaman Modal	usaha berdasarkan LKPM	usaha berdasarkan LKPM		
4.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	80%	100%

Dalam mewujudkan tercapainya nilai target nilai investasi meningkat telah berbagai program pendukung yang mampu mendorong tercapinya Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang sebelumnya telah ditetapkan. Beberapa program yang mendukung tercapainya sasaran strategis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Tabel III. 68 Program dan Sub Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Sub kegiatan yang menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	Jumlah Investor Baru	Rp 1.331. 425.250	Rp 1.314. 472.750	Penetapatan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas atau Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Jumlah Investor Baru dengan target 6.633 investor baru dapat dicapai dengan angka realisasi sebesar 11.350 investor baru. Hal ini disebabkan karena:

1. Adanya peraturan yang mendorong kemudahan investasi antara lain:
   a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha;
   b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Yogyakarta;
   c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
   d. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

e. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Berusaha;
f. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan;
g. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.

2. Adanya Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi.
3. Adanya promosi investasi melalui beberapa wadah antara lain pameran investasi, pengelolaan promosi melalui sosial media, pembuatan video dan foto promosi investasi, podcast serta sosialisasi Perizinan Berusaha, sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan, Sosialisasi Promosi Investasi, dan Sosialisasi Mal Pelayanan Publik.
4. Adanya layanan Aplikasi Cek Poin Jogja (dapat memantau potensi investasi kota Yogyakarta).
5. Adanya Sistem Mal Pelayanan Publik Digital dan sudah diresmikan sejak tanggal 20 Juni 2023.
6. Adanya Publikasi Kajian Pemetaan Potensi Investasi Kota Yogyakarta melalui website DPMPTSP.

Tabel III. 69 Program dan Sub Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Sub kegiatan yang menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur 2. Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	1) Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur 2) Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Rp 698.550.000	Rp 698.550.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Pada Program Pelayanan Penanaman Modal terdapat 2 indikator yaitu Persentase Perizinan dan

Nonperizinan yang sesuai prosedur dengan target 87% tercapai 99.01% dan Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti dengan target 100% tercapai 100%. Beberapa faktor yang mendorong tercapainya realisasi tersebut antaralain:

1. Tersedianya layanan pendampingan secara tatap muka melalui loket DPMPTSP maupun melalui Helpdesk WA Perizinan DPMPTSP Kota Yogyakarta terkait proses perizinan dan non perizinan;
2. Adanya koordinasi antara internal bidang DPMPTSP dan petugas pengampu/OPD Teknis;
3. Tersedianya Forum Penyelesaian Permasalahan perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh pemohon;
4. Adanya Tim Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan, Pelaksanaan Proses permohonan Perizinan dan non Perizinan Terintegrasi melalui https://perizinanonline.jogjakota.go.id dan https://jss.jogjakota.go.id;
5. Adanya sarana konsultasi, informasi, dan pengaduan yang sudah disediakan melalui surat langsung ke OPD, email, WA, kotak pengaduan,aplikasi JSS dan Loket Pelayanan KIP DPMPTSP sehingga masyarakat/pemohon dapat melakukan konsultasi, informasi, dan pengaduan melalui berbagai sarana yang telah disediakan dan adanya koordinasi antara internal bidang DPMPTSP dan petugas pengampu/OPD Teknis dalam penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh pemohon yang diwadahi dalam RAKON TAKON.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat antara lain:

1. Proses pengajuan izin tidak bisa selesai dalam satu hari sehingga pengajuan izin sampai bulan Desember masih belum bisa terbit di bulan yang sama karena perlunya pemeriksaan berkas dan melengkapi berkas;
2. Ketidakpahaman pemohon berkaitan dengan dengan persyaratan perizinan dan non perizinan;
3. Perlunya update dan maintanance sistem perizinan dan non perizinan yang didelegasikan yang dilayani oleh DPMPTSP;
4. Konsultasi bersifat teknis dengan OPD terkait tidak bisa dilayani setiap hari di MPP;
5. Adanya beberapa pengaduan yang masuk sering kali tentang OPD teknis karena masyarakat/pemohon belum banyak yang mengetahui harus kemana mereka saat mengajukan pertanyaan atau aduan sehingga pengaduan ditujukan ke DPMPTSP, namun oleh DPMPTSP dijembatani agar pengaduan bisa ditindaklanjuti oleh OPD teknis.

Tabel III. 70 Program dan Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Sub kegiatan yang menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program Pengendalian Pelaksanaan		Persentase investor yang mengalami penambahan	Rp 629.968.800,00	Rp 625.192.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan

	Penanaman Modal	Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	modal usaha berdasarkan LKPM			Pelaksanaan Penanaman Modal
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdapat indikator yaitu Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM dengan target 22,60% tercapai 65,09%* (masih menggunakan angka cut off TW III tahun 2024 karena realisasi investasi TW IV belum rilis resmi LKPM). Capaian pada program ini lebih tinggi daripada target yang telah ditentukan. Hal ini didukung dengan adanya beberapa faktor pendorong antara lain:

1. Tersedianya layanan pendampingan baik melalui tatap muka maupun melalui Helpdesk WA OSS DPMPTSP Kota Yogyakarta terkait dengan proses perizinan berusaha dan kendala perizinan berusaha;
2. Tersedianya layanan pendampingan penyampaian LKPM (Laporan kegiatan Penanaman Modal) kepada Pelaku Usaha;
3. Tersedianya Forum Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Penanaman Modal;
4. Adanya kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dan Bimbingan Teknis penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diselenggarakan DPMPTSP kepada Pelaku Usaha;
5. Adanya Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Keputusan Walikota Nomor 154 Tahun 2024;
6. Adanya Tim Koordinasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Keputusan Walikota Nomor 152 Tahun 2024;
7. Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi melalui sistem OSS;
8. Adanya koordinasi rutin internal bersama dengan Perangkat Daerah Teknis di Pemerintah Kota Yogyakarta , Provinsi maupun Kementrian;
9. Sudah diberlakukannya Sanksi Otomatis pada sistem OSS RBA kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya penyampaian LKPM;
10. Mendapatkan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Dalam upaya mencapai target sasaran program, ditemukan beberapa faktor penghambat tercapainya target sasaran program, anatara lain:

1. Data yang digunakan adalah Data LKPM TW III tahun 2024, tanggal 1-10 Januari 2025 adalah periode pelaporan LKPM Triwulan IV 2024 yang disampaikan oleh Pelaku Usaha. Belum ada

Rilis data Realisasi Investasi Triwulan IV 2024 dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM;

2. Data yang ditampilkan belum termasuk pelaporan LKPM Perusahaan Skala Kecil (berdasarkan Perka BKPM 5 Tahun 2021 pelaku usaha kecil wajib menyampaikan LKPM setiap Semester) sehingga data yang digunakan untuk capaian pada triwulan IV belum memperhitungkan jumlah LKPM skala kecil yang dijadikan dasar perhitungan capaian dalam hal jumlah investor wajib LKPM yang telah lapor LKPM sebagai pembagi. Sudah berkoordinasi dan mengirimkan surat permohonan data kepada Kementerian Investasi namun terkait LKPM Perusahaan Skala Kecil saat ini tidak masuk dalam realisasi investasi yang dirilis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ;
3. Ketidakpahaman pelaku usaha berkaitan dengan kewajiban penyampaian LKPM;
4. Kurang patuhnya pelaku usaha terhadap kewajiban penyampaian LKPM.

Tabel III. 71 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Sub kegiatan yang menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	Rp 317.764.700,00	Rp 315.866.700,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdapat indikator Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data dengan target 80% tercapai 100%. Hal ini didukung dengan adanya beberapa factor pendorong sebagai berikut:

1. Tersedianya sistem penyimpanan data informasi yang cukup lengkap (SIADI). Sistem Arsip Digital (SIADI) bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pencarian arsip tersebut agar lebih efektif dan efisien;
2. Terdapat ruang arsip yang memadai untuk melakukan penyimpanan dan pencarian berkas arsip;
3. Penataan arsip lebih tertata dan terstruktur sesuai jenis dan lokasi izin;
4. Beberapa arsip IMB telah terdigitalisasi dengan jumlah arsip IMB yang ada di DPMPTSP sebanyak 71.326 berkas, dan yang sudah terdigitalisasi sebanyak 8.308 berkas;
5. Adanya pemasangan RFID pada berkas arsip IMB untuk memudahkan pencarian atas permohonan duplikat IMB. Untuk saat ini, rencana pemasangan RF ID sebanyak 71.326 berkas , dan yang sudah terpasang sebanyak 13.000 berkas.

Selain itu, ditemukan juga beberapa faktor penghambat dalam upaya pencapaian target sasaran program, antara lain:

1. Belum terselesaikannya digitalisasi arsip yang masuk ke database disebabkan keterbatasan anggaran. Saat ini, jumlah arsip yang belum dilakukan digitalisasi sebanyak 62.390 berkas;
2. Database penyimpanan data masih terpisah dibeberapa tempat sehingga belum semuanya tersentral;
3. Belum terselesaikannya pemasangan RFID pada seluruh arsip disebabkan keterbatasan anggaran. Saat ini, RFID yang belum dipasang sebanyak 58.326 berkas.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan	Program	Sasaran Program	Sub Kegiatan Yang Menunjang
2	**Kepemudaan dan Olahraga**	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Indeks Kapasitas Pemuda Olahraga dan Pramuka	a.Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 2.Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing wira usaha pemula 3.Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kab/kota 4.Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 5.Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 6. Sub KegiatanPeningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda b.Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota 1.Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota

		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Meningkat	a.Kegiatan pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewengangan daerah kabupaten/Kota 1.Sub Kegiatan koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota b.Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota 1.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 2.Sub Kegiatan Partisipasi dan keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 1.Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah 2.Sub KegiatanPembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 3.Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 1.Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan 2.Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 1.Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 2.Sub kegiatan Pemberdayaan perkumpulan Olahraga Rekreasi 3.Sub kegiatan Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi 4.Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga wisata,tantangan dan petualangan
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kapasitas Kepramukaan Meningkat	a.Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 1.Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah ada tiga program, yaitu:

1. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan** memiliki sasaran program yakni Meningkatnya Indeks Kapasitas Pemuda Olahraga dan Pramuka. Indikator kinerja program ini adalah Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan dengan target 67,11 % dan terealisasi sebesar 66,47%. Untuk menunjang capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan oleh :

a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
   1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor;
   2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing wira usaha pemula;
   3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kab/kota;
   4. Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan;
   5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota;
   6. Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan,Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.

b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
   1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan memiliki sasaran program yakni Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Meningkat. Indikator kinerja program ini adalah Persentase kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif dengan target 67,68% dan terealisasi sebesar 63,73%

Untuk menunjang capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan oleh:

a. Kegiatan pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewengangan daerah kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota
b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dengan Sub kKegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kotab dan Sub kegiatan Partisipasi dan keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet

Berprestasi Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga

d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan Sub Kegiatan Standarisasi Organisasi Keolahragaan dan Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan

e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi, Sub Kegiatan Pemberdayaan perkumpulan Olahraga Rekreasi dan Sub Kegiatan Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi

3. **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan** memiliki sasaran program yakni Kapasitas Kepramukaan Meningkat. Indikator kinerja program ini adalah Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%. Untuk menunjang capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan oleh Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

3. Urusan Statistik

Pelaksanaan urusan statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik dan dapat mencapai target yang ditetapkan, yakni telah dimanfaatkannya 2 (enam) Buku Statistik yang telah diterbitkan yaitu :

1) Analisis Gini Ratio Kota Yogyakarta Tahun 2023

2) Profil Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki indikator program yaitu :

a) Persentase penyebarluasan dataset

Pada indikator program Persentase penyebarluasan dataset, realisasi yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 100% dari target 56.52%. Pencapaian ini diperoleh dari jumlah dataset yang dipublikasikan tahun 2024 dibandingkan jumlah dataset yang dikumpulkan.

Metadata :

Jumlah dataset yang dipublikasikan = 525
Jumlah dataset yang dikumpulkan = 525

Formula Penghitungan

(Jumlah dataset yang dipublikasikan) dibagi
(Jumlah dataset yang dikumpulkan) x100%

Hasil Perhitungan = 525/525 x 100% = 100 %

Anggaran yang dilaksanakan dalam pelaksanaan urusan statistik adalah Rp.427.816.000,- dengan realisasi Rp 415.994.240,- atau sebesar 97.24%.

Keberhasilan pelaksanaan urusan statistik oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta ditunjukkan juga dengan peningkatan nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Pusat. Pada tahun 2024 memperoleh nilai 2.85 dengan predikat "Baik", meningkat dari penilaian EPSS tahun 2023 yang memperoleh nilai 2,05 predikat Cukup. Perolehan Indeks IPS 2,85 ini didapatkan dari hasil penilaian masing-masing domain sebagai berikut :

Domain Prinsip Satu Data Indonesia = 3.00
Domain Kualitas Data = 2.69
Domain Proses Bisnis Statistik = 2.90
Domain Kelembagaan = 2.83
Domain Statistik Nasional = 2.78.

Faktor pendorong terlaksananya Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di tahun 2024 adalah :

1. Ketersediaan SDM Statistisi yang memadai.
2. Ketersediaan SDM Geospasial dalam pengelolaan data spasial OPD.
3. Kerjasama yang baik dengan BPS Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pembinaan/pendampingan kegiatan statistik sektoral di Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. OPD yang kooperatif dalam pelaksanaan pengumpulan data dan penyusunan metadata statistik.
5. Beberapa OPD mulai terbuka memberitahukan rencana kegiatan statistik yang akan dilaksanakan kepada Kominfo.
6. OPD mulai menyadari pentingnya permohonan rekomendasi kegiatan statistik kepada BPS.
7. Ketersediaan SDM sebagai enumerator pada pelaksanaan Pendataan PKL.

Hambatan yang dihadapi adalah :

1. Belum ada SDM khusus yang memiliki ketugasan di bidang statistik dan manajemen data di OPD selain di Dinas Kominfosandi.
2. SDM penyelenggara kegiatan statistik di OPD belum memahami proses bisnis statistik yang telah ditetapkan.

3. Masih ada OPD yang belum memberitahukan rencana kegiatan statistik kepada Dinas Kominfosandi.

4. Urusan Persandian

Dalam pelaksanaan urusan persandian, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandi menetapkan Indikator yaitu “Indeks Pengamanan Informasi”. Capaian kinerja tujuan diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2024 dengan target tahun 2024, selanjutnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III. 72 Target dan Realisasi Indikator Tujuan 2

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Pengamanan Informasi	403	592	146.90

Formula penghitungan Indeks Pengamanan Informasi adalah sebagai berikut :

Indeks Pengamanan Informasi = Skor Indeks Kemamanan Informasi (KAMI)

Pelaksanaan urusan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Keamanan Informasi“ dengan Indikator yaitu “Indeks Pengamanan Informasi ”. Program yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ini adalah Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi. Kebijakan yang diambil adalah meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi, meningkatkan pengamanan sinyal frekuensi, meningkatkan pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika.

Pada indikator Indeks Pengamanan Informasi jumlah target yang ditetapkan 403 poin untuk skor Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dan realisasi yang berhasil dicapai adalah 592 poin sehingga tingkat pencapaian realisasi adalah 146.90%. Tercapaianya target dari indikator Indeks Pengamanan informasi ini diperoleh dari tercapainya target dari peningkatan nilai di 5 (lima) area keamanan informasi yang memenuhi tingkat kelengkapan penerapan standar ISO 27001 di Dinas Kominfo dan Persandian. Terpenuhinya standar ini karena pada tahun 2024 Dinas Kominfo dan Persandian telah melakukan sertifikasi ISO 27001:2013. Nilai 592 poin merupakan nilai yang cukup baik dari nilai maksimal 645 poin.

Indikator tujuan Meningkatnya Keamanan Informasi didukung oleh kinerja dari Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator program Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi

Pada indikator program Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi terealisasi sebesar 105.71% dari target 57.14%. Pencapaian ini diperoleh dari jumlah terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan informasi terhadap jumlah total layanan persandian untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan informasi.

Metadata :

Jumlah Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan informasi	=	111
Jumlah Total layanan persandian untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan informasi	=	105

Formula Penghitungan

(Jumlah Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan informasi) / (Jumlah Total layanan persandian untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan informasi) x 100%

Hasil Perhitungan = 111/105 x 100% = 105.71 %

Anggaran untuk pelaksanaan urusan persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah sebesar Rp 334.820.088,- dengan realisasi Rp 332.569.450,- atau sebesar 99.33%.

Dalam pelaksanaannya, urusan persandian mengalami hambatan antara lain yaitu :

1) Pengujian keamanan aplikasi (*pentest*) sudah dilakukan dengan output berupa laporan hasil *pentest,* namun untuk tindak lanjut memerlukan koordinasi dengan bidang lain.
2) Audit keamanan informasi yang terkadang bersamaan waktu pelaksanaannya sehingga cukup mengganggu pekerjaan lainnya.
3) Kurangnya kompetensi SDM yang berkaitan dengan audit dan pengujian keamanan informasi.
4) Tidak meratanya literasi digital bagi pegawai dan masyarakat disebabkan kurangnya informasi mengenai kegiatan tersebut

Untuk mengatasi permasalahan di atas Diskominfosandi melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi rutin dengan bidang lain maupun OPD terkait untuk menindaklanjuti laporan hasil *pentest*.
2. Menyesuaikan jadwal audit dan mempersiapkan bahan yang diperlukan sedari awal
3. Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan skill dan kompetensi SDM terkait audit dan pengujian keamanan informasi
4. Menyebarkan informasi kegiatan literasi digital melalui media sosial, membuka pendaftaran seluas-luasnya bagi masyarakat kota, termasuk sekolah-sekolah di wilayah kota Yogyakarta

5. Urusan Kebudayaan

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta merupakan salah satu satuan kerja pendukung urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam mendukung urusan tersebut Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta memiliki Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel III. 73 Capaian Kinerja Sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024

No.	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Persentase pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasi	69,78	82,02	117,54
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	100%

Berdasarkan tabel di atas Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta memiliki dua sasaran strategis. Pada 2024 capaian kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta berhasil melebihi target kinerjanya.

Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan" dengan indikator persentase Pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasi pada 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 74 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formula Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Persentase pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasi	Persentase Kenaikan sanggar yang ber-NIK	60%	81,77%	136,28%
			Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	79,5%	82,27%	103,48%

Berdasarkan data dan formula di atas, dapat diketahui realisasi capaian kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tahun 2024 sebagai berikut.

$$\frac{(81{,}77\% + 82{,}27\%)}{2} x100\% = \mathbf{82,02}\%$$

Dengan demikian, capaian kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tahun 2043 pada sasaran strategis ”Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan” sebesar **82,02%**.

Ketercapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ini tidak lepas dari pendampingan intensif terhadap sanggar-sanggar dan lembaga budaya di wilayah Kota Yogyakarta. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta juga memberikan fasilitasi bagi lembaga budaya yang telah ber-NIK. Fasilitasi ini memotivasi lembaga budaya lainnya yang belum memiliki NIK untuk mendaftarkan lembaga/sanggarnya. Hal ini karena NIK menjadi bukti legalitas sanggar/lembaga budaya sehingga eksistensi/keberadaan lembaga budaya tersebut semakin diakui. Selain itu, lembaga budaya yang telah ber-NIK dapat lebih percaya diri untuk mengeksplorasi potensi yang dimilikinya.

Peningkatan jumlah sanggar/lembaga budaya yang terdaftar Nomor Induk Kebudayaan setiap tahunnya menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan meningkat. Hal ini karena setiap lembaga budaya beranggotakan sejumlah orang yang memiliki minat, ketertarikan, dan bahkan mata pencaharian di bidang seni budaya. Semakin banyak jumlah lembaga budaya yang terdaftar Nomor Induk Kebudayaan semakin banyak pula masyarakat yang berperan aktif dalam pengembangan kebudayaan di Kota Yogyakarta. Dapat dikatakan, keberadaan lembaga budaya, terutama lembaga budaya yang telah ber-NIK sangat mendukung kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya di Kota Yogyakarta.

Sementara itu, capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)” dengan indikator kinerja “Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat” juga sesuai dengan target kinerja, yaitu **A** dengan nilai sebesar **88,286**. Evaluasi Reformasi Birokrasi pada 2024 ini dilaksanakan berdasarkan delapan parameter penilaian yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah; Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat; Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SiRUP; Indeks Profesionalitas ASN; Penilaian Pengawasan Arsip Internal; serta Penilaian Indeks Pembangunan Statistik.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

Tabel III. 75 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program Tahun 2024

No.	Program	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Program	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	79,55%	82,27%	103,42%
			Tingkat Apresiasi Masyarakat terhadap Bahasa dan Sastra	77,11%	82,77%	107,34%
			Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	77,11%	82,3%	106,73%
			Persentase Pengembangan Pelestarian Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni	87%	95,56%	109,84%
			Persentase Dukungan Operasional Taman Budaya Embung Giwangan	100%	100%	100%
			Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola UPT Pengelolaan Taman Budaya	85	86,60	101,88%
			Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	82,5	83,93	101,73%
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	100%

Selama 2024 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta melaksanakan berbagai program kegiatan yang ditujukan bagi tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Sinergitas antarbidang juga telah dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta.

Kegiatan yang mendukung tercapainya peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta, terutama dalam rangka meningkatkan persentase pelaku seni budaya yang aktif antara lain sebagai berikut.

- **Penguatan Kelembagaan Lembaga Budaya**

  Dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta melaksanakan FGD Penguatan Kelembagaan Lembaga Budaya. FGD ini melibatkan 80 lembaga budaya yang telah memiliki Nomor Induk Kebudayaan (NIK). Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat peran lembaga budaya dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya di Kota Yogyakarta. Selain itu, hasil diskusi ini diharapkan mampu berkontribusi nyata bagi keberlanjutan budaya lokal.

- **Kampung Menari**

  Sejak dilaunching pada 2023 di 169 kampung di seluruh Kota Yogyakarta, kegiatan Kampung Menari tetap dilaksanakan pada 2024, tepatnya setiap Selasa Wage dan Kamis Pahing di 169

kampung. Peserta Kampung Menari mendapat kesempatan tampil pada penutupan Rumaket yang diselenggarakan di Taman Budaya Embung Giwangan pada 15 Mei 2024. Selanjutnya, pada 9 Juni 2024 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menyelenggarakan Gebyar Kampung Menari yang diikuti 169 kampung di Taman Budaya Embung Giwangan. Dalam gelaran ini setiap kampung berkompetisi menampilkan tari Jampi Jogja. Pada Gelar Kampung menari ini 20 kampung mendapat apresiasi yang diklasifikasikan dalam empat aspek.

- **Sekar Rinonce**

  Sekar Rinonce merupakan upaya untuk memanfaatkan kawasan cagar budaya sekaligus memperkuat citra Malioboro sebagai bagian Sumbu Filosofi yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sekar Rinonce juga menjadi wadah bagi seniman-seniman Kota Yogyakarta untuk berekspresi dan memperkenalkan sanggar atau kelompok seninya. Melalui Sekar Rinonce, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta mengapresiasi kelompok/sanggar seni budaya yang telah memiliki Nomor Induk Kebudayaan (NIK). Total sanggar/lembaga budaya ber-NIK yang difasilitasi melalui Sekar Rinonce pada 2024 sebanyak 96 lembaga budaya.Sekar Rinonce dilaksanakan rutin setiap Selasa dan Sabtu Malam di pedestrian depan Teras Malioboro 2 dan depan Pasar Beringharjo.

- **Kotabaru Heritage Film Festival**

  Kotabaru Heritage Film Festival merupakan festival film untuk mempromosikan keunikan Kota Yogyakarta dari sisi warisan budaya (*heritage*), baik warisan budaya benda (*tangible*) maupun warisan budaya takbenda (*intangible*). Kotabaru Heritage Film Festival (KHFF) dilaksanakan pada 9 Agustus 2024 hingga 11 Agustus 2024 di Lapangan Widoro Kandang SMAN 3 Yogyakarta. Festival film ini diikuti oleh 171 film yang telah mendaftar dari 19 kota dan kabupaten dari seluruh Indonesia. Penghargaan karya film dalam penyelenggaraan KHFF 2024 diberikan kepada empat kategori yaitu Mahaditya (umum), Purwaseswa (pelajar), Karyanagri (Produksi Pemerintah Pusat), Sahasrakarya (Produksi Pemerintah Daerah).

- **Pentas Godhong Apa-Apa**

  Pentas Godhong Apa-Apa merupakam kegiatan seni budaya yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta untuk memfasilitasi para pelaku budaya dalam menuangkan karya-karya seninya. Dalam penyelenggaraan Pentas Godhong Apa-Apa, para pelaku seni budaya diharapkan semakin kreatif dan dapat melestarikan nilai-nilai budaya di Kota Yogyakarta. Sebanyak 20 Pentas Godhong Apa-Apa terselenggara selama 2024.

- **Gelar Potensi Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)**

  Gelar Potensi RKB dilaksanakan pada tanggal 9–11 Agustus 2024 sebagai salah satu rangkaian penyelenggaraan Kotabaru Heritage Festival yang bertempat di lapangan Widoro Kandang

SMA Negeri 3 Kota Yogyakarta Jl. Sajiono No.5-15, Kotabaru. Kegiatan Gelar Potensi RKB 2024 mengangkat potensi pertunjukan kolaborasi "Sinema Berdansa" dengan 3 Judul Pementasan, yaitu "Cintaku di Kampus Biru", "Pengabdi Setan", dan "Serangan Fajar". Penyelenggaraan Gelar Potensi RKB Tahun 2024 juga mengangkat potensi kuliner sebagai salah satu potensi budaya yang dimiliki oleh RKB yang bertajuk "Pasar Kobar" Managed by Pasar Kangen.

- **Festival Seni Tingkat Kota**

  Festival Seni tingkat Kota Yogyakarta merupakan salah satu agenda dalam subkegiatan Gelar Budaya Jogja. Festival Seni yang pesertanya dari perwakilan kemantren ini dilaksanakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagai bentuk pembinaan di wilayah. Pemenang festival ini kemudian mewakili Kota Yogyakarta di tingkat DIY. Festival Seni antarkemantren yang dilaksanakan pada 2024, yaitu:

  1. Festival Langencarita (30-31 Mei - 1 Juni 2024) di Taman Budaya Embung Giwangan;
  2. Festival Teater Kota Yogyakarta (17-20 Juli 2024) di TBY;
  3. Festival Kethoprak Kota YK (9-12 September 2024) di TBY; serta
  4. Festival Langen Sekar (22-24 September 2024) di nDalem Mangkubumen.

- **Jogja Cross Culture**

  Jogja Cross Culture (JCC) sebagai salah satu ikon event seni budaya di Kota Yogyakarta senantiasa menyuguhkan pembaruan-pembaruan yang menjangkau kolaborasi lintas budaya secara luas. Kolaborasi seni budaya ini melibatkan unsur seniman dan berbagai kelompok masyarakat dari 14 kemantren di Kota Yogyakarta. JCC 2024 dilaksanakan pada 25 Mei 2024 dengan tajuk "Rikat Rakit Raket". Rikat berarti bergerak dan bekerja cepat; rakit berarti berproses saling melengkapi dan menyempurnakan; sedangkan raket berarti kebersamaan yang saling mendukung. Tema ini dipilih dalam rangka untuk merekatkan Kembali hubungan masyarakat yang sempat terpecah-pecah akibat Pemilu pada bulan Februari 2024.

- **Festival Jogja Kota**

  FESTA yang digelar pada 6–8 Desember 2024 dengan tema "Balad" yang berarti Gugur Gunung, Gotong Royong, Kerja Bakti. FESTA Tahun 2024 menampilkan seni pertunjukan beserta potensi wilayah kolaborasi masyarakat 14 Kemantren se-Kota Yogyakarta yang terklasterisasi dalam Kawasan Cagar Budaya (KCB). Selain menampilkan seni pertunjukan yang unik dan merepresentasikan potensi-potensi di wilayah masing-masing, setiap KCB juga menyediakan booth yang berisi produk-produk unggulan baik kuliner maupun produk kreatif yang bisa dibeli oleh pengunjung.

  Pada pagelaran FESTA 2024 dimeriahkan juga oleh Kontingen Kampung Menari dari 45 Kelurahan se-Kota Yogyakarta yang menampilkan Tari Sesigrakan yang dilombakan dengan

hadiah bagi 10 penampil terbaik. Selain itu, FESTA tahun ini juga menampilkan partisipasi seniman dari Kabupaten Badung dan mempersembahkan penampilan terbaik dari para Kontingen Kota Yogyakarta pada Festival Seni tingkat DIY dan para seniman muda Kota Yogyakarta yang merupakan hasil pembinaan melalui kegiatan Resital Seni Pertunjukkan Karawitan, Sendratari dan Langensekar.

- **Harmoni Embung Giwangan**

  Harmoni Embung Giwangan pada dasarnya adalah permainan musik ansambel yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan sejumlah alat musik tertentu. Alat musik yang digunakan dalam kegiatan ini adalah kenong. Harmoni Embung Giwangan memainkan lagu-lagu dengan aransemen sederhana dengan didampingi instruktur.

  Harmoni Embung Giwangan mulai dilaksanakan pada 2024 di Taman Budaya Embung Giwangan. Inovasi ini menjadi salah satu layanan edukasi yang dilaksanakan secara reguler di Taman Budaya Embung Giwangan. Aktivitas ini diharapkan mampu mengembalikan ketertarikan generasi muda terhadap seni tradisi melalui pemanfaatan media gamelan yang interaktif dan menyenangkan.

- **Festival Sastra Yogyakarta**

  Festival Sastra Yogyakarta dilaksanakan pada 28–30 November 2024 di Taman Budaya Embung Giwangan dengan tema “SIYAGA”. Tajuk ‘SIYAGA’ menautkan perayaan sastra ini untuk membaca realitas kebangsaan di masa transisi, sebagai upaya seni dalam merawat demokrasi. Sebagaimana gelombang sosial-politik selalu memantik riak dalam perjalanan sastra kita. Sebagai peristiwa publik, SIYAGA menjadi ruang bersama untuk mempertanyakan kembali cara pandang kita atas keragaman praktik sastra, dan refleksi bersama di mana semestinya festival ini menempatkan diri. Banyak agenda yang menjadi rangkaian Festival Sastra Yogyakarta 2024. Beberapa agenda besar ini yaitu Sayembara Puisi Nasional, Sastra Boga, Panggung Pasar Sastra, Diskusi Sastra, dan Bedah Buku.

- ***Youth Museum Internship Program***

  Youth Museum Internship Program (YMIP) atau program magang museum merupakan salah satu kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam rangka Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM museum swasta di Kota Yogyakarta dengan berbagai kegiatan yang berdampak positif bagi peningkatan pengelolaan museum.

  YMIP dilaksanakan pada 1 Oktober–15 Desember 2024 dengan menggandeng beberapa universitas untuk menghadirkan mahasiswa magang di Museum. Peserta YMIP 2024 sebanyak 20 orang yang berasal dari Sejarah dan Arkeologi UGM, Sejarah UNY, dan Tata Kelola Seni ISI Yogyakarta. Para peserta YMIP diharapkan dapat mempraktikkan ilmunya secara langsung

di museum dan membantu museum untuk meningkatkan tata kelola di museumnya. Museum yang menjadi lokasi magang program ini yaitu Museum batik Yogyakarta, Museum Dewantara Kirti Griya, Museum dr. YAP Prawirohusodo, dan Museum Bahari.

Adapun upaya untuk meningkatkan persentase Warisan Budaya yang diapresiasi dilaksanakan melalui beberapa kegiatan berikut.

- **Sosialisasi WBCB**

  Pada 2024 Sosialisasi Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) dilaksanakan dalam bentuk Heritage Fun Bike-Njajah Kutha Milang Kori. Kegiatan ini dilaksanakan pada 9 Maret 2024 di Taman Budaya Embung Giwangan. Sosialisasi ini mengajak masyarakat umum yang ada di Kota Yogyakarta sebagai peserta. Kegiatan ini juga mengundang Dewan Warisan Budaya sebagai narasumber yang memaparkan mengenai pengenalan Warisan Budaya Cagar Budaya (WBCB) KCB Kotagede dan regulasi aturan-aturan pengembangan di KCB Kotagede.

  Selain kegiatan sosialisasi dalam bentuk *Heritage Fun Bike*, sosialisasi WBCB dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion* pada 21 Mei 2024 di Hotel Tjokro Style. Kegiatan ini mengundang para pemangku kepentingan yang ada di 4 KCB di Kota Yogyakarta. Beberapa pemangku kepentingan antara lain OPD terkait, pemangku wilayah, dan para pengusaha bidang jasa dan konstruksi yang ada di Kota Yogyakarta. Diharapkan FGD ini dapat memberikan pemahaman informasi mengenai regulasi pelestarian dan pembangunan yang ada di KCB.

- **Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan**

  Kegiatan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan dilaksanakan mulai bulan Januari 2024 hingga Desember 2024. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu peninjauan lapangan dan rapat pemberian arahan atau rekomendasi yang melibatkan Dewan Warisan Budaya (DWB). Peninjauan lapangan dilakukan untuk mendapatkan data riil kondisi di lapangan sebagai bahan pembahasan rapat pemberian arahan atau rekomendasi. Peninjauan dilakukan setelah mendapatkan surat permohonan rekomendasi kebudayaan dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta. Setelah itu data hasil peninjauan lapangan dibahas dalam rapat pemberian arahan atau rekomendasi bersama DWB pada hari kamis di setiap minggunya. Hasil arahan atau rekomendasi kemudian dicantumkan dalam dokumen Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan. Dokumen Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan untuk kemudian dikirimkan ke DPMPTSP Kota Yogyakarta sebagai prasyarat penerbitan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

- **Penyusunan Naskah Rekomendasi Penetapan/Pemeringkatan BWB dan/atau BCB**

  Kegiatan Penyusunan Naskah Rekomendasi Penetapan/Pemeringkatan BWB dan/atau BCB dilaksanakan selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari hingga Desember. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Yogyakarta sebagai tim ahli yang

memiliki kompetensi dan ketugasan untuk mengkaji sekaligus memeringkatkan dan/atau menetapkan objek diduga cagar budaya menjadi Cagar Budaya atau Warisan Budaya. Pada 2024 TACB Kota Yogyakarta menyusun prioritas kajian berdasarkan usulan masyarakat dan kerawanan suatu objek untuk segera ditetapkan. Selama 2024 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta bersama TACB Kota Yogyakarta telah melakukan 20 kunjungan lapangan beserta 20 naskah yang sudah dikaji oleh TACB Kota Yogyakarta.

- **Apresiasi Kelestarian dan Keterawatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya**

  Kegiatan Apresiasi Kelestarian dan Keterawatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya dilaksanakan mulai bulan Juli hingga Desember 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam beberapa rangkaian pendukung, seperti penilaian dan kunjungan lapangan bersama Tim Penilai, *Focus Group Discussion* (FGD), dan Penyerahan Apresiasi. Penyerahan Apresiasi dilaksanakan secara *ceremonial* di The Alana Malioboro Hotel Yogyakarta. Penyerahan Apresiasi diberikan langsung oleh Pj Wali Kota Yogyakarta Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A. kepada pemilik/pengelola 20 objek bangunan Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Para penerima apresiasi berhak mendapatkan uang apresiasi sebesar Rp12.500.000,00 beserta plakat dan piagam penghargaan.

- **Kajian Warisan Budaya Tak benda**

  Pada 2024 telah dilaksanakan Kajian pada 3 objek WBTb yang diduga sebagai Warisan Budaya Tak benda Kota Yogyakarta. Ketiga objek WBTb tersebut yaitu rewang, tenongan, dan bahu danyang. Adapun tujuan dari diadakan kegiatan Kajian Warisan Budaya Takbenda ini yaitu untuk mengungkap kekayaan budaya bangsa; mengetahui sejarah, makna filosofi, fungsi, dan persebaran dari warisan budaya tak benda; serta melestarikan warisan budaya Takbenda Kota Yogyakarta.

- **Rumaket**

  Kegiatan Rumaket merupakan perayaan warisan budaya tak benda (WBTb). Rumaket yang digelar pada 8–15 Mei 2024 di Taman Budaya Embung Giwangan ini mengangkat wayang, batik, dan keris. Rangkaian acara Rumaket berupa pameran keris, talkshow/workshop, fashion show, live music, serta panggung pembukaan dan penutupan. Tidak hanya sebagai bentuk perayaan warisan budaya, Rumaket menjadi media untuk saling bertemu, saling berkolaborasi dan bersinergi antarpelaku seni budaya dan masyarakat.

- **Pelatihan Dalang Anak dan Remaja**

  Kegiatan Pelatihan Dalang Anak dan Remaja ditujukan untuk mendukung terciptanya bibit generasi penerus yang berkarakter luhur dan memiliki bekal pengetahuan serta daya inovasi dalam berkesenian. Kegiatan rutin Pelatihan Dalang dilaksanakan tiap Minggu, dari tanggal 4 Februari s/d 15 Desember 2024 di Pendopo Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota

Yogyakarta. Kegiatan Pelatihan Dalang di tahun 2023 terdiri dari pelatihan rutin tiap Minggu dan fieldtrip.

Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta, yang terdiri dari pelajar dengan rentang usia 8 hingga 15 tahun. Setiap minggu, para peserta dibimbing langsung oleh tiga instruktur dari Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Kota Yogyakarta, yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang pedalangan. Pada pelaksanaannya Pelatihan Dalang Anak dan Remaja dibagi menjadi dua kelas, yaitu Kelas Mahir dan Kelas Pemula. Kelas Mahir diperuntukkan bagi peserta yang sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang seni pedalangan dan bahkan pernah mengikuti perlombaan pedalangan. Adapun Kelas Pemula ditujukan untuk mereka yang baru memulai belajar seni pedalangan, baik yang belum memiliki pengetahuan sama sekali maupun yang baru mulai mengenal dasar-dasar mendalang.

Berbagai kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dilaksanakan dalam rangka pelestarian kebudayaan di Kota Yogyakarta. Dukungan dari stakeholder terkait dan partisipasi masyarakat sangat mendorong capaian kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan inilah yang menjadi kunci keberhasilan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam melestarikan kebudayaan di Kota Yogyakarta.

6. Urusan Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mempunyai 2 tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Urusan perpustakaan memiliki 2 program yaitu Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Urusan kearsipan memiliki 3 program yaitu program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, serta Program Perizinan Penggunaan Arsip. Program tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja yang memuat sasaran program, indikator program, dan target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel III. 76 Target kinerja program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	**URUSAN PERPUSTAKAAN**			
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya kepuasan layanan perpustakaan	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	78,5 skala
		Meningkatnya kualitas pengembangan bahan pustaka	Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	37747 judul
		Meningkatnya kualitas perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	40,28%
2.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian,	Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat	1 naskah

		dan pendaftaran naskah kuno		
2	**URUSAN KEARSIPAN**			
1	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Kualitas pengelolaan arsip	Jumlah arsip statis terdigitalisasi	1200 arsip
			Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori "sangat baik"	38 %
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya Kualitas perlindungan dan penyelamatan arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	1400 arsip
3	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Terwujudnya Pelayanan perizinan penggunaan arsip tertutup sesuai standar	Persentase arsip tertutup yang dilayankan	100%

Dalam mewujudkan tercapainya target kinerja urusan perpustakaan pada Program Pembinaan Perpustakaan dengan indikator jumlah perpustakaan yang telah dibina, telah dilaksanakan pembinaan ke perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus/instansi di wilayah Kota Yogyakarta.

Capaian realisasi dari indikator Presentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP pada tahun 2024 adalah 40,28%. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya 35,65%, realisasi ini sesuai dengan target yang dibuat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Untuk indikator Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan, telah dilaksanakan survey kepuasan layanan perpustakaan ke pemustaka di Perpustakaan Kota Yogyakarta. Survey dilaksanakan dua kali dalam setahun.

Capaian realisasi dari Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan pada tahun 2024 semester 1 sebesar 83,46 sedangkan untuk semester 2 sebesar 83,47 lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu 78,5.

Capaian realisasi dari indikator jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan pada tahun 2024 mencapai 100,34%, yaitu sebanyak 37877 judul lebih besar dari target yang telah ditetapkan 37747 judul. Pengembangan judul buku berupa pembelian buku tersebut digunakan untuk menambah koleksi Perpustakaan Kota, Pevita dan perpustakaan keliling di wilayah Kota Yogyakarta.

Capaian kinerja Program Pembinaan Perpustakaan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 77 Realisasi Program Pembinaan Perpustakaan

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan perpustakaan meningkat	Presentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	40,28%	40,28%
			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	78,5	83,47

			Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	37747 judul	37877 judul

Dalam mewujudkan tercapainya target pada Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan indikator jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat dan didaftarkan oleh masyarakat, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar, dan workshop. Kegiatan lain yang dilakukan oleh Perpustakaan Kota Yogyakarta berupa pendataan naskah kuno yang sudah mendapatkan 200 judul naskah dalam Katalog Gantari untuk mendorong masyarakat di Wilayah Kota Yogyakarta dalam penyimpanan, perawatan, dan pendaftaran naskah kuno.

Capaian realisasi dari indikator jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat pada tahun 2024 terdapat 1 naskah sesuai dengan target di tahun 2024.

Tabel III. 78 Realisasi Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat	1 Naskah	a. Naskah

7. Urusan Kearsipan

Dalam mewujudkan tercapainya target kinerja urusan kearsipan, pada Program Pengelolaan Arsip dengan indikator program jumlah arsip statis terdigitalisasi, telah dilakukan digitalisasi arsip statis di Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).

Capaian realisasi dari indikator program jumlah arsip statis terdigitalisasi sampai tahun 2024 mencapai 1.200 arsip yang telah terdigitalisasi sama dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk indikator program Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik telah dilaksanakan penilaian kinerja kearsipan dengan pengawasan kearsipan secara internal terhadap OPD.

Capaian realisasi dari indikator program Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori sangat baik mencapai 96%, lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu 38%.

Tabel III. 79 Realisasi Program Pengelolaan Arsip

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Program pengelolaan arsip	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Arsip	Jumlah arsip statis terdigitalisasi	1200 arsip	1200 arsip

			Presentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori ”sangat baik”	38%	96%

Dalam mewujudkan tercapainya target pada Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan indikator program jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan, telah dilaksanakan kegiatan penyelamatan arsip dengan akuisisi/penarikan arsip statis dari setiap OPD di Pemerintah KotaYogyakarta untuk disimpan dan dirawat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta sebagai Lembaga Daerah.

Capaian realisasi dari indikator program jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sampai tahun 2024 adalah 1400 arsip sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III. 80 Realisasi Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Kualitas perlindungan dan penyelamatan arsip meningkat	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	1400 arsip	1400 arsip

Dalam mewujudkan tercapainya target pada Program Perizinan Penggunaan Arsip dengan indikator program Persentase arsip tertutup yang dilayankan telah dilaksanakan kegiatan menyusun identifikasi arsip tertutup serta menyusun daftar arsip tertutup.

Capaian realisasi dari indikator program Persentase arsip tertutup yang dilayankan sampai tahun 2024 adalah 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Tabel III. 81 Realisasi Program Perizinan Penggunaan Arsip

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Terwujudnya pelayanan perizinan penggunaan arsip tertutup sesuai standar	Persentase arsip tertutup yang dilayankan	100 %	100%

8. Urusan Kelautan dan Perikanan

Dinas Pertanian dan Pangan juga mengampu urusan perttanian. Dalam melaksanakan ketugasan urusan pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan mengampu 4 (empat) program yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon 3 sebagai berikut.

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja (Program)	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Sub Kegiatan yang Menunjang
1.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin	Persentase unit budidaya ikan yang yang berizin	15.79%	15.79%	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya
						Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
						Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya termasuk ke dalam urusan kelautan dan perikanan. Program ini diukung oleh 2 kegiatan dan 3 subkegiatan. Subkegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya memiliki output Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan dengan target 75 kelompok dan tercapai 101.35% (75 kelompok). Realisasi keuangannya Rp 185.646.000 (99.38%). Aktivitas yang dilaksanakan yaitu Kaji Terap Perikanan, Bimtek Pengembangan Budidaya Lele untuk Kelompok Perikanan, Bimtek Budidaya Gurami, FGD Program Kegiatan Perikanan Kota Yogyakarta, Pendampingan Kelompok Budidaya Perikanan, Penyuluhan Teknologi Sektor Perikanan, Penilaian Kelas Kelompok Perikanan, dan Restocking Ikan. Subkegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan memiliki output berupa Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan target 6 kelompok yang tercapai 100%. Realisasi keuangannya sebesar Rp 189.703.000 (99.75%). Adapun aktivitas yang dilaksanakan diantaranya Agro Expo, Bimtek budidaya ikan hias dan aquascape, Bimtek pengembangan budidaya lele, dan Kontes ikan hias. Adapun subkegiatan terakhir yaitu Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota memiliki output Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 3 unit dan terealisasi 100%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 453.849.388 (99.90%). Aktivitas yang dilaksanakan yaitu Pengelolaan sarana prasarana di BBI Mendungan, BBI Nitikan, dan Subraiser.

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja (Program)	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Sub Kegiatan yang Menunjang
2.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin	Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin	52.38%	57.14%	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan didukung oleh 1 indikator, 1 kegiatan, dan 1 subkegiatan. Subkegiatan tersebut yaitu Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang memiliki output berupa Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko dengan target 19 unit usaha dan terealisasi 100%. Adapun realisasi keuangannya sebesar Rp 185.055.335 (99.76%). Aktivitas yang dilaksanakan yaitu Bimtek olahan ikan, Kontes olahan ikan, dan Kampanye Gemarikan.

9. Urusan Pariwisata

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024 melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Program-program tersebut sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang memuat Sasaran Program, indikator Program dan Target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel III.82
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Daya Tarik Destinasi Pariwisata meningkat	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang Berstandar Layanan Prima	56,89%	75,86 %
		Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata	75,35 skala 0-100	75,59 skala 0-100
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan meningkat	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	5.000.000 Orang	10.583.877 Orang
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	150.000 Orang	355.333 Orang
3.	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata meningkat	Persentase SDM Pariwisata yang Meningkat Kompetensinya	50%	50%

4.	Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	57,11%	57,11%

Sasaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan Indikator Program : 1) Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang Berstandar Layanan Prima, dengan target 56,89% dan realisasi 75,86 %. Hal ini didukung oleh faktor pendorong yaitu: a) Kota Yogyakarta masih menjadi destinasi wisata utama di Indonesia. b) Daya Tarik Wisata (DTW) terus melakukan inovasi dalam pelayanan dan sarpras untuk mengakomodir layanan wisatawan, namun masih ditemukan juga faktor penghambat untuk pencapaian target tersebut antar lain adalah; a) Terbatasnya lahan pengelolaan sampah di Daya Tarik Wisata (DTW); dan b) Tidak tersedianya dokumen/data yang dinamis. 2) Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata, dengan target 75,35 skala 0-100 dan realisasi 75,59 skala 0-100. Hal ini didukung oleh faktor pendorong yaitu : a) Pokdarwis dan Kampung Wisata di wilayah kelurahan semakin bergairah mengembangkan diri terutama dengan partisipasinya dalam ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia); dan b) Semangat dan dukungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada sektor pariwisata sangat tinggi. Beberapa faktor penghambat yaitu : a) Tidak tersedianya lahan Pengembangan Sarana Prasarana DTW; dan b) Keterbatasan kualitas SDM dan sarpras di beberapa DTW.

Sasaran Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator program jumlah kunjungan wisatawan 5.150.000 orang, yang terdiri dari Wisatawan Nusantara 5.000.000 orang, dan Wisatawan Mancanegara 150.000 orang. Realisasi tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan 10.939.210 orang, yang terdiri dari Wisatawan Nusantara 10.583.877 orang dan Wisatawan Mancanegara 355.333 orang. Beberapa faktor menjadi pendorong tercapainya target tersebut yaitu faktor pendukung : a) Penyelenggaraan beberapa event yang salah satunya termasuk dalam Kharisma Event Nasional (KEN) yaitu: Wayang Jogja Night Carnival. Adapun event yang telah dilaksanakan yaitu : Pawai Alegoris, dan Unjuk Bakat dan Grand Final Dimas & Diajeng. b) Libur/cuti bersama perayaan hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah, libur Natal & Tahun baru, dan libur sekolah dari Tingkat SD sampai Perguruan Tinggi, dan c) Meningkatnya Direct Flight Internasional di Bandara YIA, sehingga kunjungan wisatawan mancanegara meningkat. Tetapi ada beberapa yang menjadi penghambat pencapaian target yaitu : a) Tingginya harga akomodasi, perjalanan dan konsumsi; dan b) Belum maraknya Event dan Festival yang diselenggarakan pada malam hari.

Sasaran Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif terdiri atas dua Indikator yaitu 1) Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata yang tersertifikasi, dengan target 50% dan realisasi 50%. Hal ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya faktor pendorong : a) Dukungan warga dan pemangku wilayah cukup tinggi, sehingga mempermudah

proses terbentuknya kampung wisata; b) Motivasi masyarakat meningkat untuk berperan serta pada setiap kegiatan pariwisata, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Yogyakarta; dan c) Pembentukan Forkom Pokdarwis dan Forkom Kampung Wisata memudahkan koordinasi dan pelaksanaan program. Sedangkan faktor penghambat yaitu : a) Masih ada disharmoni dalam pelaksanaan peran dan fungsi antara Pengelola Kampung Wisata dan Pokdarwis; dan b) Sebagian besar Pokdarwis dan beberapa Kampung Wisata belum memiliki kelengkapan administrasi untuk mendukung aktivitas pariwisata yang dilaksanakan. 2) Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi, dengan target 57,11% dan realisasi 57,11%. Hal ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya faktor pendorong : a) Dukungan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Usaha Pariwisata di Bidang Industri; dan b) Terlaksananya kegiatan pendampingan usaha pariwisata dan pengawasan usaha pariwisata, serta pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi usaha pariwisata untuk membantu mensosialisasikan regulasi terbaru dan mekanisme dalam sertifikasi usaha pariwisata. Sedangkan faktor penghambat yaitu; a) Peraturan dan perubahan kebijakan yang kemudian mempengaruhi pelaksanaan kegiatan; b) Masih ada usaha pariwisata yang belum siap untuk dilakukan sertifikasi; dan c) Perubahan proses pemilihan penyedia jasa dengan menggunakan elektronik sistem e-katalog dengan menyediakan etalase “Sertifikasi” terlebih dahulu.

10. Urusan Pertanian

Dinas Pertanian dan Pangan juga mengampu urusan perttanian. Dalam melaksanakan ketugasan urusan pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan mengampu 4 (empat) program yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon 3 sebagai berikut.

Tabel III. 83 Perjanjian Kinerja Eselon 3 (Urusan Pertanian)

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja (Program)	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Sub Kegiatan yang Menunjang
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	100%	100%	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
		Meningkatnya persentase varietas tanaman	Persentase varietas tanaman buah	3.54%	3.54%	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

		buah yang telah bersertifikat	yang telah bersertifikat			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
		Meningkatnya Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi	Persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi	75.00%	75.00%	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian termasuk ke dalam urusan pertanian. Program ini didukung oleh 3 indikator, 3 kegiatan, dan 4 subkegiatan. Subkegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi memiliki output berupa jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dengan target 2 laporan dan terealisasi 100%. Realisasi keuangannya sebesar Rp 13.176.360 (85.86%). Adapun aktivitas yang dilaksanakan adalah Pemantauan Produksi dan Penggunaan Alsintan, Pendampingan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi, Sosialisasi Kartu Tani, Sosialisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi, Sosialisasi Penggunaan Pestisida, Sosialisasi Penggunaan Pupuk Berimbang, dan Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian (AUTP). Yang kedua subkegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman memiliki output berupa Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian dengan target 327 VUB dan tercapai 100%. Realisasi keuangan Rp 1.150.814.762 (99.90%). Aktivitas yang dilaksanakan diantaranya Pengelolaan Kebun Hortikultura, Kebun Plasma Nutfah Pisang (KPNP), Laboratorium Kultur Jaringan, dan Kebun Tegalrejo.

Adapun subkegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman memiliki output Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dengan target 3 dokumen dan tercapai 100%. Realisasi keuangan Rp 54.312.050 (99.93%). Subkegiatan ini berisi aktivitas Pengelolaan Kebun Tanaman indukan bersertifikat. Yang terakhir subkegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan, memiliki output Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar dengan target 4 laporan dan tercapai 100%. Adapun realisasi keuangannya sebesar Rp 41.208.000 (99.77%). Aktivitas yang dilaksanakan yaitu Sosialisasi Peredaran Obat Hewan, Bimtek Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, dan Pengawasan Peredaran Obat Hewan.

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja (Program)	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Sub Kegiatan yang Menunjang
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	Peningkatan Jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	23 unit	23 unit	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian didukung oleh 1 indikator, 1 kegiatan, dan 1 subkegiatan. Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya memiliki output Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara dengan target 1 unit dan terealisasi 100%. Adapun realisasi keuangannya Rp 10.297.900 (99.98%). Aktivitas yang dilaksanakan yaitu rehab Greenhouse Hortikultura.

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja (Program)	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Sub Kegiatan yang Menunjang
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan asal hewan dan perikanan	Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	31.24%	31.24%	Pengawasan Peredaran Produk Hewan
						Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
						Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan unit usaha bidang kesehatan hewan	Persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi	100%	100%	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
						Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
						Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner didukung oleh 2 indikator, 4 kegiatan, dan 6 subkegiatan. Indikator yang pertama yaitu Peningkatan persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi terdiri atas 3 subkegiatan. Subkegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan memiliki output berupa Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan dengan target 24 laporan dan terealisasi 100%. Aktivitas yang dilaksanakan meliputi FGD Kebijakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan,

Kampanye Minum Susu, Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan Asal Hewan , Pemantauan dan Pemeriksaan Pemotongan Hewan Kurban, Workshop Pemotongan Hewan Kurban, dan Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 381.353.500 (99.94%). Subkegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki output Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan target 24 dokumen dan tercapai 100%. Realisasi keuangan Rp 279.834.000 (99.00%). Aktivitas yang dilakukan di subkegiatan ini yaitu Pengujian mutu produk hewan dan perikanan. Sementara subkegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan memiliki output berupa Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik, dengan target 4 unit usaha dan terealisasi 100%. Subkegiatan ini berisi aktivitas Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan Segar Hasil Perikanan serta pengawasan unit usaha.

Indikator yang kedua yaitu Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi terdiri atas 3 subkegiatan. Subkegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan memiliki Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan, dengan target 14 wilayah dan terealisasi 100%. Aktivitas dalam subkegiatan ini meliputi Pembinaan dan Pengawasan Unit Usaha Kesehatan Hewan, Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan, Sosialisasi Kesejahteraan Hewan, Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Pada Hewan Kurban, dan Sosialisasi Lalu Lintas Hewan . Adapun realisasi keuangannya Rp 96.459.000 (99.76%). Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memiliki output Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan target 12 laporan dan tercapai 100%. Keuangan terealisasi Rp 293.041.998 (99.47%), dengan aktivitas yang dilaksanakan meliputi pengelolaan pelayanan jasa medik veteriner di Poliklinik hewan Kota Yogyakarta. Subkegiatan yang terakhir yaitu Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan memiliki output Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan dengan target 12 laporan dan terealisasi 100%. Aktivitas yang dilaksanakan meliputi Pemotongan Hewan di Rumah Potong Hewan, Pemotongan Hewan Hari Raya Idul Fitri, Pemotongan Hewan Hari Raya Idul Adha, dan Sosialisasi Pemotongan Hewan ASUH. Adapun realisasi keuangannya Rp 434.898.896 (99.66%).

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja (Program)	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Sub Kegiatan yang Menunjang
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terkendalinya zoonosis prioritas	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	100%	100%	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian didukung oleh 1 indikator, 1 kegiatan, dan 1 subkegiatan. Subkegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis memiliki output Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis, dengan target 1 laporan dan tercapai 100%. Realisasi keuangannya Rp 232.948.246 (99.67%). Adapun aktivitas yang dilaksanakan dalam subkegiatan ini yaitu Pengendalian Populasi/ Sterilisasi Kucing, Vaksinasi Rabies yang bekerjasama dengan wilayah (45 kelurahan, Praktik Dokter hewan dan OPD terkait), FGD Pengendalian Zoonosis Prioritas, Pengolahan Limbah Medis, dan Pengambilan sampel Paska Vaksinasi Rabies.

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja (Program)	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Sub Kegiatan yang Menunjang
5.	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya pembinaan kelompok tani	Cakupan bina kelompok tani	24.31%	27.03%	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
						Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian didukung oleh 1 indikator kinerja, 1 kegiatan, dan 3 subkegiatan. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa memiliki output berupa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya, dengan target tahun 2024 1 unit dan terealisasi 100%. Adapun realisasi keuangannya Rp 110.124.000 (99.91%). Aktivitas yang dilaksanakan meliputi Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Penyusunan Data Statistik Pertanian dan Peternakan, Lomba Penghargaan Bidang Pertanian Tingkat DIY Tahun 2024, Penyusunan Dokumen Programa Penyuluhan Pertanian Tahun 2025, Kegiatan Pelatihan untuk Penyuluh, dan Kegiatan Kelembagaan Petani.

Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa memiliki output Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target 4 unit untuk tahun 2024. Target kinerja tersebut terealisasi 100%, sedangkan

realisasi keuangannya Rp 605.392.400 (99.75%). Aktivitas dalam subkegiatan ini yaitu Bimbingan Teknis untuk kelompok tani, Pembinaan Kelompok Tani, Penilaian Kelas Kelompok Tani, Pembinaan Kelompok Ternak, Gelar Potensi Pertanian, Lomba Burung Berkicau, dan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian. Sedangkan subkegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian memiliki output Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian dengan target tahun 2024 58 unit. Target kinerja tersebut terealisai 100%, sementara realisasi keuangannya sebesar Rp 14.300.000 (99.90%). Aktivitas yang dilaksanakan yaitu Demplot Penyuluh Pertanian.

11. Urusan Perdagangan

Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dengan meningkatkan kinerja sektor perdagangan diukur dengan indikator kinerja program. Dinas perdagangan mengampu 6 (enam) program yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel III. 84 Perjanjian Kinerja dan realisasi tahun 2024 Dinas Urusan Perdagangan

No	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	Sub Kegiatan yang Menunjang
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pendapatan sarana distribusi perdagangan meningkat	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat	34,48%	34,48%	1. Kegiatan enyediaan Sarana distribusi Perdagangan 2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 3. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 4. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
			Pendapatan retribusi Pasar	Rp. 15.015.878.000	Rp. 17.946.182.379	
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Omset Usaha Kecil Mikro meningkat	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	8%	13,92%	5. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

						6. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Kasus Peredaran Bahan Berbahaya menurun	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	25%	25%	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok terjaga	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	90,20%	98,04%	7. Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 8. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Alat UTTP yang bertanda tera sah meningkat	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	100%	99,96%	9. Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang 10. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan UPT Pusat Bisnis meningkat	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Rp.5.598.578.000	Rp. 5.933.182.475	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
		Nilai Akuntabilit	Hasil penilaian SAKIP oleh	A Nilai	A Nilai	1. Perencanaan ,

	Kabupaten/Kota	as Kinerja Dinas Perdagangan Meningkat	Inspektorat untuk Dinas Perdagangan			Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah kota yogyakarta berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan mengemban 2 misi, pertama misi ke-3 yaitu Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa, kedua misi ke-6 yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.

Untuk melaksanakan misi daerah diatas dapat diwujudkan dengan penetapan tujuan dan sasaran kinerja dinas perdagangan yang terdiri dari 2 sasaran, yang pertama yaitu Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan dengan Indikator Indek Kinerja Perdagangan di tahun 2024 ditargetkan 51,54% atau terealisasi 54,28% atau tercapai 105,33%. Misi kedua yaitu

Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat dengan target A Nilai atau terealisasi A Nilai.

Pada tujuan dan sasasran perangkat daerah diatas diukur dengan tingkat capaian kinerja program pada lingkup pengelolaan pasar rakyat, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengendalian dan pengawasan perdagangan, standardisasi dan perlindungan konsumen pada pelayanan Metrologi legal, Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis dan Penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja Pada Sekretariat.

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan pada tahun 2024 bersumber dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perdagangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.357.859.781,00 yang digunakan untuk melaksanakan urusan di bidang perdagangan yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kinerja, pada sasaran pertama yaitu meningkatnya Kinerja sektor perdagangan dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 33.549.260.624,00 terealisasi Rp. 31.822.611.692,00 atau tercapai 94,85%, sedangkan sasaran kedua yaitu Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 14.808.599.157,00 terealisasi sebesar Rp. 13.534.323.306,00 atau tercapai 91,40%, dijabarkan melalui program/kegiatan/subkegiatan yang terdiri dari 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima).

Capaian indikator kinerja dan anggaran program yang mendukung indikator sasaran strategis dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator/ Program	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Realisasi (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan**	**Indeks kinerja perdagangan**	**51,54**	**54,28**	**105,33%**	**33.549.260.624**	**31.822.611.692**	**94,85%**
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan				155.722.000	154.169.000	99,00%
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				23.420.404.610	23.069.044.741	98,50%
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				1.258.641.000	1.258.637.900	100,00%
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen				391.049.350	391.018.840	99,99%
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri				1.079.282.250	1.053.104.200	97,57%

No	Sasaran	Indikator/ Program	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Realisasi (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				7.244.161.414	5.896.637.011	81,40%
2	**Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan**	**Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat**	**A Nilai**	**A Nilai**	**100,00%**	**14.808.599.157**	**13.534.323.306**	**91,40%**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				14.808.599.157	13.534.323.306	91,40%
Total Belanja						**48.357.859.781**	**45.356.934.998**	**93,79%**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasarn PD meliputi 2 sasaran, sasaran kinrja yang pertama yaitu meningkatnya kinerja sektor perdagangan dengan indikator Pendapatan UPT Pusat Bisnis dengan target pendapatan sebesar sebesar Rp.5.598.578.000,00 terealisasi Rp. 5.933.182.475,00 atau tercapai 105,98%, ditargetkan anggaran belanja sebesar Rp. 7.244.161.414,00 yang terealisasi sebesar Rp. 5.896.637.011,00 atau tercapai 81,40%, adanya capaian yang melebihi target ini karena pembayaran sewa kios, counter, dan fasilitas lainnya sesuai tatakala, Optimalisasi media dan lahan promosi, Fasilitas penunjang layanan Pusat Bisnis semakin diminati pelaku usaha untuk memanfaatkan area promosi dan penjualan Pusat perbelanjaan Beringharjo maupun area 103 Pasar Prawirotaman.

Sasaran kinerja yang kedua yaitu Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat program ini diukur dengan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan dengan target Nilai A terealisasi Nilai A. Pada program ini dialokasikan anggaran belanja dengan target Rp. 14.808.599.157,00 terealisasi Rp. 13.534.323.306,00 atau tercapai 91,40% Tercapainnya indikator tersebut karena hasil penilaian mandiri Dinas Perdagangan telah melengkapi dan menindaklanjuti aspek penilaan pada Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yaitu dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Menyusun laporan perencanaan Rencana Kerja Tahunan dan Lima Tahunan dan laporan penganggaran sesuai dengan arah Kebijakan Daerah
b) Melakukan Pengukuran Kinerja secara rutin setiap Triwulan
c) Melakukan Pelaporan Kinerja melalui pengisian laporan Kinerja fisik dan Anggaran, Penatalaksanaan keuangan baik belanja maupun penerimaan pendapatan sesuai dengan kebijakan daerah.

d) Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja bersama tim kota atas pelaksanaan kinerja sasaran dan indikator program PD.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator pertama program ini adalah Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat merupakan Indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat capaian pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dibawah tugas dan fungsi Bidang Pasar Rakyat Pada tahun 2024 indikator ini telah mencapai realisasi 34,48% dari target 34,48% atau tercapai 100%, dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 23.420.404.610,00 terealisasi Rp. 23.069.044.741,00 atau tercapai 98,50%.

Penilaian indikator pasar rakyat berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2022 tentang pasar tentang pasar rakyat, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan jumlah pasar rakyat yang berstandar yaitu 1 (satu) pasar setiap tahun dengan mempertimbangkan aspek fisik, manajemen, ekonomi dan sosial dengan persyaratan memenuhi syarat standar pasar rakyat, apabila memiliki persentase ≥70% sesuai dengan kelas pasar rakyat yang dinilai, diantara pasar rakyat yang menjadi sasaran ada 10 (sepuluh) pasar yang dinilai yaitu:

a. Pasar Beringharjo dengan tingkat capaian 94,59%
b. Pasar Prawirotaman dengan tingkat capaian 95,95%
c. Pasar Kranggan dengan tingkat capaian 91,89%
d. Pasar Ngasem dengan tingkat capaian 87,84%
e. Pasar Demangan dengan tingkat capaian 89,19%
f. Pasar Giwangan dengan tingkat capaian 82,43%
g. Pasar Serangan dengan tingkat capaian 79,73%
h. Pasar lempuyangan dengan tingkat capaian 81,08%
i. Pasar Kota Gede dengan tingkat capaian 79,73%
j. Pasar Pingit dengan tingkat capaian 81,08%

Implementasi untuk mencapai kinerja program ini di lakukan melalui Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Dan Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya, yang menjadi faktor keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a) Melakukan pemeliharaan, perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pasar rakyat di 29 Pasar Rakyat
b) Melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban di pasar rakyat Kota Yogyakarta di 29 Pasar Rakyat
c) Melakukan pembinaan dan pemberdayaan pedagang, paguyuban, komunitas, dan lembaga di pasar rakyat 29 Pasar Rakyat

d) Melakukan penyapuan dan pembersihan lingkungan di 29 pasar rakyat

Indikator kedua program ini adalah Pendapatan retribusi pasar adalah indikator ke 2 (dua) yang digunakan untuk menentukan tingkat capaian kinerja pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dibawah tugas dan fungsi di Bidang Pasar Rakyat, UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I, UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II dan UPT PASTY, Pada tahun 2024 pendapatan retribusi pasar rakyat mencapai realisasi Rp. 17.946.182.379,00 dari target Rp. 15.015.878.000,00 atau tercapai 119,51%.

dengan objek retribusi berdasarkan perda pasar rakyat meliputi klasifikasi pasar rakyat type A, B, C dan D dengan fasilitas pasar rakyat terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Fasilitas utama meliputi kios, los dan pelataran, sedangkan fasilitas penunjang meliputi tempat parkir kendaraan, tempat bongkar muat, tempat penyimpanan barang, tempat promosi, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola, kamar mandi/WC, sarana pengamanan, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik, penerangan umum dan radio Pasar Rakyat.

Implementasi untuk mencapai kinerja program ini di lakukan melalui Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, yang menjadi faktor keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisa dan potensi pendapatan retribusi pasar berdasarkan kajian potensi, survey lapangan, dan penilaian manfaat di 29 Pasar Rakyat.
2. Melakukan teknis pemungutan, pencatatan, pengadministrasian penerimaan pendapatan retribusi pasar rakyat pada wilayah masing masing UPT di 29 Pasar Rakyat secara optimal.
3. Melaksanakan evaluasi, pembinaan dan pendampingan petugas maupun wajib retribusi di 29 pasar rakyat.
4. Memberikan kemudahan layanan administrasi secara digital melalui aplikasi SIMPATIK PASAR secara bertahap.
5. Melakukan tindakan Gercep (Gerakan Cepat Penagihan) retribusi oleh personil di internal Dinas di 29 pasar rakyat

3. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Indikator Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina digunakan untuk menentukan tingkat capaian pada kinerja Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri di bawah tugas dan fungsi Bidang Bimbingan Uusaha, Pada tahun 2024 indikator ini mencapai realisasi 13,92% dari target 8,00% atau tercapai 174,01% dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 1.079.282.250 terealisasi Rp. 1.053.104.200 atau tercapai 97,57%

dengan tujuan meningkatkan omzet pelaku UMKM binaan melalui fasilitasi pengembangan pemasaran dan promosi penggunaan produk dalam negeri. Implementasi untuk mencapai kinerja

program ini di lakukan melalui Kegaiatan Penyelenggaraan Promosi Peningkatan Penggunan Produk Dalam Negeri, yang menjadi faktor keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a) Fasilitasi Promosi di Pameran:
   a. Pekan Raya Jakarta (PRJ) - Jakarta Fair di JI Expo Kemayoran Jakarta, pelaksanaan tanggal 12 juni - 14 Juli 2024 yang di ikuti oleh 45 UMKM dengan capaian omset sebesar Rp. 518.144.000,00
   b. Pameran Bali ITT Expo 2024 di Atrium Mall Level 21 Denpasar pelaksanaan tanggal 23 - 26 Mei 2024 diikuti oleh 8 UMKM dengan capaian omset sebesar Rp. 28.305.000,00
   c. Indonesia City Expo / APEKSI di BSCC Dome, Balikpapan, pelaksanaan tanggal 4 - 6 Juni 2024 yang di ikuti oleh 6 UMKM dengan capaian omset sebesar Rp. 31.785.000,00
   d. DISDAGFEST#2 di PLAZA Ngasem Yogyakarta, pelaksanaan tanggal 30 Nopember – 2 Desember 2024 yang di ikuti oleh 30 UMKM dengan capaian Omzet sebesar Rp. 11.347.000,00

   Selama penyelenggaraan Pameran diatas di ikuti oleh 89 UMKM dengan Total Omset yang dicapai Rp. 589.581.000,00

b) Fasilitasi Kemitraan dengan Toko Modern dalam bentuk fasilitasi kerjasama promosi / pemasaran produk dengan Minimarket dengan peserta 150 UMKM.

c) Fasilitasi kemitraan dengan E-Commerce berupa peningkatan omzet penjualan melalui adaptasi system pemasaran dan promosi produk dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan peserta 150 UMKM

   Berdasarkan kegiatan yang dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini berhasil meningkatkan omset sebesar 13,92% dari 8% ada penambahan omset yang dicapai sebesar 5,9% pencapaian ini merupakan bagian dari kerjasama antara Dindag dengan UMKM dalam pemilihan produk unggulan yang ditampilkan seperti Batik, Craft, Fashion, Leather/Kulit dan Kuliner selain itu juga dimeriahkan oleh pentas hiburan yang menarik, menampilkan berbagai jenis layanan perangkat daerah berkaitan dengan pelayanan Dinas Perdagangan antara lain bazar komoditas bahan kebutuhan pokok, layanan metrologi legal dan layanan BLUD Pusat Bisnis dan pemilihan tema, lokasi dan waktu yang tepat terutama adanya minat pengunjung pameran yang antusias mengunjungi gerai pameran dengan harga terjangkau sehingga meningkatkan daya beli konsumen pada event skala nasional yang diselenggarakan rutin setiap tahun.

4. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Indikator Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya merupakan Indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat capaian Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Pada tahun 2024 indikator ini telah mencapai realisasi 25% dari target 25% atau tercapai 100% Program ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pendistribusian barang yang beredar dalam bentuk makanan maupun pangan di pasar rakyat maupun toko modern hal ini akan berdampak pada tingkat keamanan pangan yang di konsumsi. Implementasi untuk mencapai kinerja program ini di lakukan melalui kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang menjadi faktor keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a) Melakukan pengawasan penggunaan bahan tambahan makanan dan pangan (BTM/P) yang disarankan sesuai dengan standar kesehatan secara periodik di toko swalayan, pasar rakyat, obyek wisata dan pasar tiban bulan romadon terutama pada pengawasan penggunaan bahan berbahaya Formalin, Rhodamin B, Boraks dan Methanol Yellow.
b) Melakukan pengujian sampel bahan makanan dan pangan dengan uji test kit secara mandiri, pengujian melalui Balai Pom dan BLKK dengan target sampel sebanyak 480 sampel dari hasil pengujian testkit mandiri dan Lembaga tersertivikasi sebanyak 494 sampel, dari pengujian sampel yang dilkukan terdapat inidikasi adanya penggunaan bahan berbahaya pada makanan kemudian dilakukan tahapan berikutnya untuk pengujian pada lembaga tersertivfikasi melalui BBPOM dan BLKK untuk memastikan kandungan yang ada pada makanan atau pangan untuk mendapatkan hasil yang akurat dengan hasil yang dinyatakan Positif sebanyak 15 sampel.
c) Melakukan Sosialisasi/Edukasi/desiminasi Keamanan Pangan dikota yogyakarta dengan sasaran pasar rakyat dilakukan sebanyak 10 kali dengan sasaran pedagang, komunitas dan masyarakat.
d) Melakukan kerjasama dan kolaborasi secara intes dan berkelanjutan dengan stakeholder terkait, diantaranya BBPOM dan BLKK dan Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Pangan Kota Yogyakarta, Pemerintah DIY.

5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Indikator Stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok digunakan untuk menentukan tingkat capaian pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Pada tahun 2024 indikator ini mencapai realisasi 98,04% dari target 90,20% atau tercapai 108,70%, dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 1.258.641.000 terealisasi sebesar Rp. 1.258.637.900 atau tercapai 100,00%.

dengan tujuan untuk pengendalian dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sehingga meningkatkan daya beli ditingkat konsumen dan pelaku usaha mikro dan kecil Kota Yogyakarta dengan harga yang terjangkau terutama di 51 komoditas yang beredar di pasar rakyat satu diantaranya pada komoditas bawang merah mengalami kenaikan/lonjakan harga berturut turut selama 3 hari terjadi selama periode bulan april hal ini karena Kota Yogyakarta sebagai pemanfaat jalur distribusi bukan sebagai penghasil produk pertanian sehingga mengandalkan suplai dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berpengaruh pada ketersediaan komoditas dipasar, selain itu faktor perubahan iklim yang tidak menentu dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan panen petani yang berdampak pada biaya produksi yang semakin tinggi. Implementasi untuk mencapai kinerja program ini di lakukan melalui kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, yang menjadi faktor keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a) Melakukan Sinkronisasi dan Diseminasi ketersediaan BAPOKTING tingkat distributor, pengecer dan Pedagang sebanyak 2 kali dengan pemangku kepentingan yaitu, distributor, Bulog, Bank Indonesia, Suplier, pelaku usaha dan petani yang memberikan andil terhadap kelancaran distribusi bahan pokok yang tersedia dipasaran dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
b) Melakukan pemantauan dan publikasi harga BAPOKTING setiap hari di 4 (empat) pasar pantauan sebagai langkah penegndalian dan kebijakan kota Yogyakarta untuk 51 komoditas.
c) Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Operasi Pasar Rakyat di tujuh pasar rakyat, Pasar Murah di empat belas kemantren dengan sasaran masyarakat kalangan menengah kebawah dengan dengan pemeberian pengurangan biaya pengiriman distribusi sebesar Rp. 2000 per kilogram sebanyak 520.069 kilogram disetiap komoditas terutama beras, terigu, gula pasir, telor, minyak goreng dan bawang merah.
d) Pemanfaatan Fungsi Kios Segoro Amarto di 4 pasar pantauan yaitu pasar bringharjo, prawirotaman, sentul dan kranggan dan Warung Mrantasi yang telah berkomitmen antara pedagang dengan pemerintah pada pendistribusian batang kebutuhan pokok sebagai alat pengendalian harga dan informasi harga yang beredar berdasarkan Harga Eceran tertinggi (HET).

6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Indikator Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah digunakan untuk menentukan tingkat capaian pada kinerja Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, pada tahun 2024 indikator ini mencapai realisasi 99,96% dari target

100,00% atau tercapai 99,96% dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 391.049.350 terealisasi 391.018.840 atau tercapai 99,99%.

Realisasi diatas yang belum tercapai karena selama periode tahun 2024 masih terdapat peralatan UTTP yang dimiliki oleh pelaku usaha belum memiliki ijin beredar yang dipersyaratkan sehingga UPT metrologi tidak dapat melakukan pelayanan sebelum ijin tersebut diproses dan mendapatkan ijin beredar dari Direktorat Metrologi Legal.

UPT Metrologi terus berupaya melakukan edukasi dan penyuluhan secara bertahap melalui proram ini yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada pelaku usaha di bidang barang dan jasa pada lingkup terib ukur yang dapat memberikan manfaat luas dalam bentuk perlindungan konsumen di kota Yogyakarta disamping itu keberadaan UPT metrologi legal untuk menyediakan sarana dan prasarana dan peningkatan pelayanan agar mendapatkan kepastian dan keakurasian alat yang di tera/tera ulang sehingga dapat meminimalisir dari tindakan yang dapat merugikan konsumen.

Implementasi untuk mencapai kinerja program ini di lakukan melalui kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan, yang menjadi faktor ketidak keberhasilan ini karena masih ada penggunaan alat UTTP yang dimiliki pelaku usaha belum memiliki ijin edar dari direktorat metrologi legal, untuk dapat dilayanai di UPT Metrologi legal alat tersebut harus memiliki ijin edar yang sah hal ini menyebabkan tidak terlayaninya tera/tera ulang alat UTTP sehingga adanya alat UTTP yang difasilitasi hanya yang sudah mendapatakan ijin yang sah yang berdampak pada jumlah UTTP tidak mengalami kenaikan, namun demikian dari jumlah alat UTTP dari target 18.000 terealisasi 17.993 atau 99,96% hanya terpaut 7 alat UTTP yang belum mendapatkan tera sah. Adapun kegiatan ini terus berupayan meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada seluruh pengguna layanan untuk menindaklanjuti kondisi ini dan tetap melakukan pelayanan yang optimal yaitu dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Memberikan fasilitas layanan tera/tera ulang alat UTTP yang didukung oleh tenaga penera yang tersertivikasi oleh badan sertivikasi nasional melalui layanan mobile khususnya bagi pedagang pasar rakyat maupun langsung di UPT metrologi legal secara berkala.
b) Melakukan edukasi/penyuluhan dan sidang di tempat bagi 570 pelaku usaha dibidang barang dan jasa secara bertahap.
c) Standar alat yang digunakan telah memenuhi standar uji dan memadai didukung dengan rutin melakukan kalibrasi alat di direktorat metrologi legal setiap tahun.

12. Urusan Perindustrian

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri memiliki satu indikator kinerja yakni Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi. Formula penghitungan indikator ini adalah IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi dibagi total jumlah IKM Kota Yogyakarta dikali 100%. Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator ini adalah 6,97 % dan terealisasi sebesar 10,17%. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini mencapai 145, 90%.

Program ini memiliki satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dan tiga sub kegiatan antara lain Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Pelaksanaan program ini diampu oleh Bidang Industri dan UPT Logam.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bidang Industri antara lain :

a. Pendampingan kepada IKM Kerajinan
b. Kajian Pengembangan Sentra di 14 Kecamatan
c. Kajian Persiapan Pendirian PDIN
d. Pelatihan Manajemen Usaha
e. Pelatihan Teknis Produksi
f. Pelatihan Diversifikasi Produk
g. Fasilitasi dan Pendampingan Anggota Dekranasda
h. Fasilitasi Registrasi HAKI
i. Fasilitasi promosi
j. Pameran produk IKM
k. Pembuatan video profil IKM
l. Promosi dan sosialisasi melalui program televisi
m. Sosialisasi Program Unggulan Bidang Industri melalui Medsos
n. Penguatan kelembagaan IKM
o. Pendampingan bagi IKM
p. Business Matching
q. Penguatan P3DN

Sedangkan upaya-upaya yang dijalankan oleh UPT Logam antara lain :

1. Fasilitasi Pelayanan UPT Logam
2. Fasilitasi Pelayanan PDIN
3. Pelatihan Pengelolaan Usaha Pengecoran
4. Pelatihan Proses Trimming dan Melting untuk Penggunaan Mesin Injeksi
5. Pendampingan Kolaboratif Inovasi Desain Produk IKM

6. Penyuluhan Pengelolaan Sentra IKM
7. Pelatihan Dasar Moulding IMDIA
8. Pelatihan Perancangan Peralatan Penepat (JIG) bagi Pengelola UPT Logam
9. Pelatihan CAD Lanjut bagi Operator dan Pengelola UPT Logam
10. Pelatihan Pola Kayu Dasar
11. Pelatihan Setter Mesin Injeksi
12. Pendukung Layanan UPT Logam
13. Pelatihan Manajemen Sosmed
14. Pelatihan Desain Produk
15. Pelatihan Pemrograman Mesin
16. Pelatihan Peningkatan Skill Komunikasi Branding Sentra IKM
17. Pendampingan Kemitraan
18. Peningkatan Kompetensi Skill Branding Sentra IKM

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional memiliki satu indikator kinerja yakni Persentase Data Informasi Industri yang ter-update. Formula penghitungannya adalah data IKM yang ter-update) dibagi total Data IKM dikali 100%. Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator ini adalah 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini mencapai 100 %.

Program ini memiliki satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota; dan satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan :

1. updating data IKM
2. Penyampaian informasi industry dalam SIINAS

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki dua indikator kinerja yakni yakni pendapatan UPT Logam dan nilai SAKIP hasil penilaian Inspektorat. Formula penghitungan indikator pendapatan UPT Logam adalah pendapatan UPT Logam tahun n (tahun berjalan). Target indikator kinerja ini pada tahun 2024 sebesar Rp 490.500.000 dan membukukan realisasi sebesar Rp 566.776.486. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 115,55 %.

13. Urusan Transmigrasi

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi adalah urusan transmigrasi. Dalam melaksanakan urusan transmigrasi didukung oleh Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator kinerja persentase peminat transmigrasi yang

ditempatkan sebesar 15,00% dan terealisasi sebesar 16,22% (Capaian 108,11%). Program ini melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Sasaran program dan indikator kinerja program urusan transmigrasi tertuang dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Program dan Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatkan Penempatan transmigran	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase peminat transmigrasi yang ditempatkan	15,00	16,22

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dengan 16 (enam belas) indikator program semuanya terealisasi >= 100%. Hal ini merefleksikan bahwa Kegiatan yang dilaksankanan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah sesuai dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

3.1.7.3. Pelaksanaan Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Urusan Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tanggal 27 April 2023 menetapkan bahwa Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Bappeda mempunyai 2 sasaran strategis untuk mengukur keberhasilan capaian kinerjanya sesuai yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2024. Adapun perjanjian kinerja Bappeda Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2024

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,6 Skala 0-100
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.097.349.494,-	PERUBAHAN APBD TA.2024
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.379.540.280,-	PERUBAHAN APBD TA.2024
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.782.504.212,-	PERUBAHAN APBD TA.2024
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.018.166.869,-	PERUBAHAN APBD TA.2024
Jumlah Anggaran		**Rp. 15.277.560.855,-**	

Yogyakarta, 19 AUG 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Ir. SUGENG PURWANTO, M.M.A.	**AGUS TRI HARYONO, ST.,MT**
NIP. 196505251991031017	**NIP. 197203061996031004**

Adapun capaian sasaran strategis untuk Bappeda dapat dilihat pada table dibawah ini:

TABEL
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator : Indeks Perencanaan Pembangunan Metadata Indikator : (20% capaian sasaran pemkot + 40% sasaran perangkat daerah + 40% capaian program perangkat daerah) dikali 100	Persen	92,6 Skala 0-100	99,67	107,63 %
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	Nilai	A	AA	100%

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh 3 program utama yaitu :

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

   Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 3 kegiatan yang tersebar di 3 bidang/sektoral yang ada di Bappeda, yaitu :

   1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

      Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pada tahun 2024 dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,6 % , realisasi untuk capaian kinerja sebesar 99,47 %. Realisasi program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tahun 2024 naik sebesar 6,87% dibandingkan target tahun 2024.

      Capaian tersebut berada di kriteria penilaian sangat tinggi. Kinerja program sektor pemerintahan dan pembangunan manusia diukur menggunakan indikator persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia, dengan formulasi rata-rata capaian target sasaran perangkat daerah dan program OPD sektor pemerintahan dan pembangunan manusia. Total ada dua komponen perhitungan ketercapaian indikator ini.

      Komponen pertama adalah capaian target sasaran perangkat daerah sektor pemerintahan dan pembangunan manusia. Sasaran perangkat daerah sektor pemerintahan dan pembangunan manusia terdiri dari 43 sasaran tercapai sebanyak 37 sasaran perangkat daerah. Hasil

perhitungan dari ketercapaian sasaran perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebesar 99,35%.

Komponen kedua adalah capaian program perangkat daerah sektor pemerintahan dan pembangunan manusia dihitung dari rata-rata capaian masing-masing program mitra OPD sektor pemerintahan dan pembangunan manusia dibawah kendali 3 ketua tim kerja di bawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yaitu tim kerja pembangunan manusia, tim kerja kesejahteraan rakyat, dan tim kerja pemerintahan. Program perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terdiri dari 138 program perangkat daerah tercapai sebanyak 135 program perangkat daerah. Dari hasil perhitungan capaian program perangkat daerah sektor pemerintahan dan pembangunan manusia tercatat sebesar 99,59%.

Dari dua perhitungan indikator tersebut maka pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program pemerintahan dan pembangunan manusia adalah sebagai berikut : 99,35% + 99,59% = 198,94% : 2 = 99,47%. Dengan capaian tertinggi dari capaian program perangkat daerah sektor pemerintahan dan pembangunan manusia sebesar 99,59 % diikuti capaian sasaran perangkat daerah sektor pemerintahan dan pembangunan manusia sebesar 99,35 %.

2. Koordinasi Perencanaan Bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian pada tahun 2024 dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,6 % , realisasi untuk capaian kinerja sebesar 99,88 %. Realisasi program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian tahun 2024 naik sebesar 7,28% dibandingkan dengan target yang direncanakan di tahun 2024.

Capaian tersebut berada di kriteria penilaian sangat tinggi. Kinerja program sektor perekonomian diukur menggunakan indikator persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam dengan formulasi rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dan program perangkat daerah mitra bidang perekonomian. Total ada dua komponen perhitungan ketercapaian indikator ini.

Komponen pertama adalah capaian target sasaran perangkat daerah sektor perekonomian. Sasaran perangkat daerah sektor perekonomian terdiri dari 51 sasaran tercapai sebanyak 50 sasaran perangkat daerah. Hasil perhitungan dari ketercapaian sasaran perangkat daerah bidang perekonomian sebesar 99,99%.

Komponen kedua adalah capaian program perangkat daerah sektor perekonomian dihitung dari rata-rata capaian masing-masing program mitra OPD sektor perekonomian dibawah kendali 3 ketua tim kerja di bawah bidang perekonomian yaitu tim kerja Ekonomi Keuangan Daerah, tim kerja Pariwisata dan Kebudayaan, dan tim kerja Pengembangan Dunia Usaha. Program perangkat daerah mitra bidang perekonomian terdiri dari 138 program perangkat daerah

tercapai sebanyak 135 program perangkat daerah. Dari hasil perhitungan capaian program perangkat daerah sektor perekonomian tercatat sebesar 99,77%.

Dari dua perhitungan indikator tersebut maka pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian adalah sebagai berikut : 99,99% + 99,77% = 199,76% : 2 = 99,88%. Dengan capaian tertinggi dari capaian sasaran perangkat daerah sektor perekonomian sebesar 99,99 % diikuti capaian program perangkat daerah sektor perekonomian dan SDA sebesar 99,77 %.

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada tahun 2024 dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,6 % , realisasi untuk capaian kinerja sebesar 99,53 %. Realisasi program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah tahun 2024 naik sebesar 6,93% dibandingkan dengan target yang direncanakan di tahun 2024.

Capaian tersebut berada di kriteria penilaian sangat tinggi. Kinerja program sektor infrastruktur dan kewilayahan diukur menggunakan indikator persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan dengan formulasi rata-rata capaian sasaran Perangkat daerah dan program perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Total ada dua komponen perhitungan ketercapaian indikator ini.

Komponen pertama adalah capaian target sasaran perangkat daerah sektor Infrastruktur dan kewilayahan. Sasaran perangkat daerah sektor Infrastruktur dan kewilayahan terdiri dari 23 sasaran tercapai sebanyak 22 sasaran perangkat daerah. Hasil perhitungan dari ketercapaian sasaran perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebesar 99,25%.

Komponen kedua adalah capaian program perangkat daerah sektor Infrastruktur dan kewilayahan dihitung dari rata-rata capaian masing-masing program mitra OPD sektor Infrastruktur dan kewilayahan dibawah kendali 3 ketua tim kerja di bawah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yaitu tim kerja Pekerjaan Umum dan Perhubungan, tim kerja Permukiman dan Pengembangan Wilayah , dan tim kerja Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Program perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari 85 program perangkat daerah tercapai sebanyak 80 program perangkat daerah. Dari hasil perhitungan capaian program perangkat daerah sektor Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tercatat sebesar 99,80%.

Dari dua perhitungan indikator tersebut maka pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut : 99,25% + 99,80% =

199,05% : 2 = 99,53%. Dengan capaian tertinggi dari capaian sasaran perangkat daerah sektor Infrastruktur dan kewilayahan sebesar 99,80 % diikuti capaian program perangkat daerah sektor Infrastruktur dan kewilayahan sebesar 99,25 %.

2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2024 dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,6 % , realisasi untuk capaian kinerja sebesar 99,90 %. Realisasi program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2024 naik sebesar 7,3% dibandingkan target tahun 2024.

Capaian tersebut berada di kriteria penilaian sangat tinggi. Kinerja program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah diukur menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu : Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah, persentase kemanfaatan Analisa data dalam perencanaan pembangunan dan persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang penetapan perbaikan kinerja perangkat daerah tahun 2023-2026 di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta di mana Bappeda melakukan reviu untuk indikator kinerja program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Indikator Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran Daerah sesasaran daerah dengan 13 indikator yang menjadi komponen perhitungan ketercapaian indikator ini. Hasil perhitungan rata-rata capaian sasaran daerah tercatat sebesar 99,69% (Metadata RPD Sektor Fisik Tahun 2024), sedangkan indikator Persentase kemanfaatan Analisa data dalam perencanaan pembangunan dihitung dengan formula Jumlah kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan dibagi Jumlah total analisa data dalam perencanaan pembangunan. Jumlah kemanfaatan data sebanyak 569 sedangkan Jumlah total analisa data dalam perencanaan pembangunan sebanyak 569, sehingga hasil dari indikator tersebut adalah 100% (Metadata RPD Sektor Fisik Tahun 2024). Sedangkan indikator persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan dihitung dengan formula jumlah evaluasi dokumen perencanaan yang tepat waktu dibagi jumlah keseluruhan dokumen evaluasi yang harus disusun. Sesuai dengan realisasi yang ada di metadata jumlah evaluasi dokumen perencanaan yang tepat sebanyak 4 dibagi jumlah keseluruhan dokumen evaluasi yang harus disusun sebanyak 4 sehingga hasil dari indikator tersebut adalah 100%. Dari tiga perhitungan indikator tersebut maka pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah sebagai berikut : 99,69% + 100% + 100% = 299,69% : 2 = 99,90%.

Pencapaian ketiga indikator tersebut diatas didukung dari : pelaksanaan desk sasaran daerah,pelaksanaan desk metadata sektoral serta pelaksanaan desk evaluasi Renja (Desk Timbal

Balik) yang dilaksanakan setiap triwulan yang didampingi secara intensif oleh bidang-bidang sektoral serta penyelenggaraan forum satu data.

Dengan tercapainya sasaran program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tersebut bukan berarti bahwa kinerja akan berjalan ditempat, namun untuk dijadikan pendorong untuk capaian target yang lebih baik lagi karena dinamisasi perencanaan dan regulasi yang selalu berganti serta pelaksanaan kegiatan akan selalu berkembang.

1. Urusan Penelitian dan Pengembangan

   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disamping mewadahi Urusan Perencanaan juga mewadahi Urusan Penelitian dan Pengembangan. Program yang mendukung urusan penelitian dan pengembangan yaitu program penelitian dan pengembangan daerah.

   Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program penelitian dan pengembangan daerah pada tahun 2024 terdiri dari 2 indikator yaitu persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta skor rata-rata inovasi perangkat daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Adapun indikator pertama yaitu persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 92 % , realisasi untuk capaian kinerja sebesar 93,75 %. Realisasi dari indikator tersebut naik sebesar 1,75% dibandingkan target tahun 2024. Formula untuk perhitungan indikator ini bisa dilihat pada metadata Perangkat Daerah Bappeda Tahun 2023-2026.

   Capaian tersebut berada di kriteria penilaian sangat tinggi. Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan daerah diukur menggunakan indikator persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dengan cara perhitungan : (25% Kajian Pemerintah Kota yang telah masuk jurnal atau DSS + 30% Kajian Bappeda yang telah terkomunikasikan kepada OPD + 35% Kajian Bappeda yang menjadi bahan pertimbangan kebijakan OPD + 10% Kajian terimplementasi pada program OPD) x 100%. Sumber data yang digunakan adalah Kajian Pemerintah Kota yang telah masuk jurnal/DSS (100), Kajian Bappeda yang telah terkomunikasikan kepada OPD (100) ,Kajian Bappeda yang menjadi bahan pertimbangan kebijakan oleh OPD (100), Kajian terimplementasi pada program OPD (37,50).

   Sedangkan untuk indikator yang ke dua yaitu skor rata-rata inovasi perangkat daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri target yang direncanakan di tahun 2024 sebesar 75 (sangat inovatif), realisasi untuk capaian kinerja sebesar 88,44 (sangat inovatif). Realisasi dari indikator tersebut naik sebesar 13,44 poin dibandingkan target tahun 2024.

   Selanjutnya untuk mencapai sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di dukung oleh 1 program utama yaitu Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Program ini terdiri dari 8

Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Adapun untuk indikator sasaran strategis ini adalah kategori hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan 8 parameter. Hasil yang diperoleh Bappeda tahun 2024 adalah sebesar "92,121" dengan kategori "AA" dan mendapat predikat "Istimewa".

2. Urusan Sekretariat Daerah

1. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta

Sebagai salah satu unit kerja pendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu urusan secretariat daerah, Bagian Tata Pemerintahan memiliki Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III. 85 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	100%
2	Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Wilayah	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351-412)

Sasaran program Bagian Tata Pemerintahan yang pertama yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan dengan indikator program Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu . Target indikator program tersebut adalah 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 576.530.272, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 393.718.00 dengan realisasi Rp. 390.728.500 atau sebesar 99,24% dan sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan anggaran sebear 182.812.272 dengan realisasi Rp. 169.972.602 atau sebesar 92,98%

Tercapainya target sasaran program Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan meliputi penyusunan dan penyampaian laporan sebagai berikut :

1) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
2) Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta;
3) Penyusunan ringkasan LPPD Kota Yogyakarta;
4) Monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan; dan
5) Forpi yang difasilitasi.

Sasaran program yang kedua yaitu perkembangan pembangunan wilayah dengan indikator program nilai perkembangan pembangunan wilayah. Target indikator program tersebut adalah cepat berkembang (nilai ≥ 351). Dari target tersebut seluruh kelurahan (45 kelurahan) se Kota Yogyakarta sudah mencapai kategori cepat berkembang (393,91). Anggaran perubahan untuk pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan subkegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan adalah sebesar Rp. 948.554.300 dan terealisasi Rp.880.285.670 atau 92,80%.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan;
2. Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan;
3. Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan;

Pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan dimulai dengan pengisian self assessment oleh kelurahan melalui aplikasi epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id. Dari hasil self assessment, kelurahan akan mengetahui kategori perkembangan masing-masing kelurahan yakni, kurang berkembang (dengan nilai ≤ 200), berkembang (dengan nilai 201-350), dan cepat berkembang (dengan nilai ≥351). Berdasarkan hasil self assessment tersebut kecamatan/kemantren mengadakan lomba kelurahan tingkat kecamatan/kemantren yang diikuti oleh kelurahan dengan kategori berkembang dan cepat berkembang. Dari hasil lomba dimaksud, kecamatan/kemantren kemudian menetapkan satu kelurahan sebagai wakil kecamatan/kemantren untuk mengikuti lomba kelurahan tingkat Kota Yogyakarta. Dari target indikator program yang telah ditetapkan yaitu kategori cepat berkembang dengan nilai ≥351, seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta telah mencapai kategori cepat berkembang.

Dalam pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan subkegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan terdapat beberapa hambatan yang ditemui, antara lain:

1. Keterbatasan jumlah personil di kelurahan serta banyaknya ketugasan lain yang harus dilaksanakan oleh aparat di kelurahan, sehingga seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemutakhiran data-data kewilayahan melalui aplikasi, seperti Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) serta Monografi Kelurahan, khususnya dalam pencarian data yang harus diinput dalam aplikasi dimaksud.
2. Dalam Evaluasi Kinerja Kecamatan, pelaksanaannya harus melibatkan banyak personil dari berbagai OPD/Unit Kerja sebagai anggota tim.

   Hal ini menjadi kendala dalam hal koordinasi penilaian, karena jadwal kegiatan dari OPD/Unit Kerja yang bersangkutan sangat beragam dan kompleks.

   Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

- Membantu kelurahan dalam mencari data yang dibutuhkan dalam pengisian Prodeskel dan Monografi Kelurahan di berbagai OPD/Unit Kerja terkait yang dibagi secara online melalui google drive serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perangkat kecamatan/kemantren dan kelurahan yang memang belum bisa memahami tata cara pengisian aplikasi untuk belajar langsung secara luring di Bagian Tata Pemerintahan Setda kota Yogyakarta (bimtek secara personal).
- Membuat inovasi SIKEREN, yakni berupa aplikasi dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan, sehingga memudahkan personil kecamatan/kemantren mengirimkan berkas pendukung administrasi serta memudah tim untuk memberikan penilaian kapan saja dan dimana saja, karena bisa dilaksanakan secara online.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta

Untuk Mewujudkan Kota Yogyakarta yang Good Governance, Clean Government, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum maka dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta perlu untuk dilakukan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta memiliki program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang terdapat pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel revisi perubahan perjanjian kinerja administrator setara eselon III tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategi kesejahteraan rakyat.	89%

Terhadap indikator Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategi kesejahteraan rakyat. Pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan target 89%, Maka Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta melaksanakan pengukuran monitoring dan evaluasi kebijakan terhadap OPD mitra dari total pekerjaan yang harus selesai sesuai target. Dan, Indikator ini digunakan untuk melihat apakah cakupan implementasi kebijakan sudah memenuhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bagian Kessejahteraan Rakyat.

Untuk menindaklanjuti target sasaran isu strategis pada Bagian Kesejahteraan Rakyat , yang sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Isu Strategis dan Permasalahan Strategis Di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Yakni adapun permasalahan tersebut adalah :

a. Belum optimalnya penanganan sunting di wilayah; dan

b. Perubahan peraturan dari pemerintah pusat terkait bentuk kelembagaan di kelurahan.

Dalam hal ini Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta, telah menyusun untuk mengatasi permasalahan isu strategis tersebut yaitu dengan :

a. Telah selesai menyusun Keputusan Walikota Nomor 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Fokus Penurunan Stunting Tahun 2025;
b. Telah selesai menyusun Peraturan Walikota tentang Pedagang Kaki Lima Tahun 2024; dan
c. Dalam proses penyusunan Draft Rancangan Peraturan Walikota tentang Posyandu.

Kemudian berdasarkan Peraturan Walikota No 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakian Rakyat Daerah pada Lampiran I , bahwa Tugas pokok dan fungsi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan monitoring evaluasi pada pelaksanaan kebijakan Daerah, serta pelaksanaan dalam pembinaan administrasi di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran isu strategis Bagian Kesejahteraan Rakyat dan indikator Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, juga didukung oleh 3 (tiga) Kelompok Tim kerja yakni :

a. Tim Kerja Bina Mental
b. Tim Kerja Kesejahteraan Sosial
c. Tim Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

1. Tim Kerja Bina Mental

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual adalah sebesar Rp. 3.114.578.000,00 dan sudah terealisasi sebanyak Rp 3.111.010.000,00 pada prosentase capaian sampai dengan 99,89%.

Adapun hambatan yang muncul pada Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual ,ditemukannya peraturan dari Pusat terkait kegiatan haji, disampaikan ke daerah terkadang lama. Sehingga harus menunggu lebih lanjut.

Maka dalam penyelesaian permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan yaitu dengan Berkoordinasi dengan Pusat terkait Informasi Peraturan lebih lanjut, dan tetap melaksanakannya dengan tepat waktu.

2. Tim Kerja Kesejahteraan Sosial

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja Tim Kerja (Output Tim Kerja)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial adalah sebesar Rp. 220.480.000,00 dan sudah terealisasi sebanyak Rp 214.505.500,00 pada prosentase capaian sampai dengan 97,29%.

Adapun hambatan yang muncul pada Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial adalah :

1. Kurang optimalnya berkoordinasi dengan mitra OPD, dikarenakan keterbatasan waktu masing-masing pihak;
2. Tidak lengkapnya data yang diperoleh dan pada metadata implementasi kebijakan sehingga pada saat merumuskan amanat kebijakan kurang tepat sasaran.
3. Kemudian dalam penyelesaian permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan adalah :
   a. Koordinasi yang berkelanjutan dengan OPD mitra terkait yang mencakup Implementasi Kebijakan pada Bagian Kesra.
   b. Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, dan bekerjasama dengan SDM Subbag lain, serta Penyediaan Tenaga Teknis untuk membantu dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.

Dengan demikian, pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan dan berjalan secara maksimal.

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja Tim Kerja (*Output* Tim Kerja)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.	4 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat adalah sebesar Rp. 301.811.000,00 dan sudah terealisasi sebanyak Rp 298.579.718,00 pada prosentase capaian sampai dengan 98,93%.

Dalam Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat selama ini, sudah berjalan sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan secara optimal. Karena sudah sesuai dengan tata kala dan target per triwulan yang direncanakan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksaan kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik dan optimal. Hal tersebut tidak lepas dari komitmen dan upaya-upaya perbaikan dalam mengatasi Sasaran Isu Strategis Bagian Kesejahteraan Rakyat dimana telah dilakukan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Isu Strategis dan Permasalahan Strategis Di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024, Dokumen Revisi Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Tugas Pokok dan Fungsi didalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakian Rakyat Daerah. Diharapkan dari hasil yang telah dicapai tersebut Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, dapat memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dan sinergitas komitmen antara Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, dengan OPD mitra, dan Masyarakat.

3. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta Setda Kota Yogyakarta

Dalam perjanjian kinerja tahun 2024 Bagian Hukum memiliki target kinerja program "Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum". Program tersebut dituangkan ke dalam tabel perjanjian kinerja yang memuat sasaran program, indikator program, dan target sebagai berikut:

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	99,2

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum dengan indikator program Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum dengan target 99,2%, disusunlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum dan besar anggaran sebagai berikut:

Kegiatan	Anggaran
a. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 1.606.173.224,-

Demi tercapainya target kegiatan dimaksud maka disusun beberapa sub kegiatan dengan beberapa sasaran kegiatan dan target kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target Kegiatan 2024
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	295 Dokumen
2.	Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM	5 Kasus
3.	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5 Dokumen

Berdasarkan data dari sim pelaporan per tanggal 31 Desember 2024, dapat dilihat realisasi fisik dan keuangan untuk kegiatan tersebut diatas sebagai berikut:

Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan Apbd 2024

No.	Kegiatan	Anggaran	Target		Realisasi	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	701.958.400,-	100%	701.958.400,-	100%	701.884.135,-
2.	Fasilitasi Bantuan Hukum	288.390.000,-	100%	288.390.000,-	100%	215.270.997,-
3.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	583.260.824,-	100%	583.260.824,-	100%	573.900.500,-

Adapun untuk hasil sasaran program Meningkatnya Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum, dapat dilaporkan bahwa indikator perhitungannya sebagai berikut : 40% produk hukum diharmonisasi dibagi dengan produk hukum ditetapkan ditambah 20% produk hukum ditetapkan dibagi dengan produk hukum yang didokumentasi ditambah 20% peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dibagi dengan peraturan perundang-undangan yang terinformasikan ditambah 10% perkara terselesaikan dibagi dengan perkara masuk ditambah 10% hasil penilaian Kota Peduli HAM.

Pada Kegiatan Fasilitasi dan Kordinasi Hukum dan Sub Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, proses harmonisasi dilakukan untuk seluruh produk hukum berupa Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan keputusan Wali Kota. Untuk produk hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, harmonisasi dilakukan semenjak perencanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan Program Pembentukan Kepala Daerah (Propemperkada). Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022 dan SE Kemenkumham RI No M.HH-01.PP.04.02

Tahun 2022, untuk proses harmonisasi kedua produk hukum tersebut dilakukan dengan melibatkan Perancang Peraturan Perundangan-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum baik dari substansi materi maupun legal drafting agar produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk produk hukum berupa Keputusan Wali Kota dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum melalui proses koreksi draft Keputusan Wali Kota yang diusulkan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja agar sesuai dan selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait. Setelah proses harmonisasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dilaksanakan, tahap selanjutnya akan dilakukan fasilitasi oleh Gubernur dan dibuat dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota tentang fasilitasi produk hukum berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (2) Permendagri 80/2015 tentang pembentukan produk hukum.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, jumlah produk hukum yang telah diharmonisasi dan ditetapkan sejumlah :

Peraturan Daerah : 10

Peraturan Wali Kota : 92

Keputusan Wali Kota : 503

Pada Sub Kegiatan Layanan Bantuan Hukum pada tahun 2024, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat predikat Kota “Peduli HAM” dengan Total Nilai 100 yang penilaiannya terdiri dari aspek Hak Atas Bantuan Hukum, Hak Atas Informasi, Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan, Hak Atas Keberagaman dan Pluralisme, Hak Atas Kependudukan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Pekerjaan, Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Hak Atas Perumahan yang Layak, Hak Perempuan dan Anak, serta Implementasi HAM. Atas pencapaian tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat Piagam Penghargaan dengan Nomor: MHA-01.HA.02.01.01 Tahun 2024.

Selain itu, sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan nilai total sebesar 96,4 dengan rincian nilai B04 sebesar 89,17, nilai B08 sebesar 100, dan nilai B12 sebesar 100. Berdasarkan Surat Nomor IDK-HA.02.03-04 dari Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, capaian Kota Yogyakarta menjadi yang tertinggi diantara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga berupaya hadir membantu masyarakat dengan program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang pada tahun 2024 bekerjasama dengan 21 (dua puluh satu) LBH/OBH se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada pelaksanaannya di tahun ketiga ini, dianggarkan sebesar Rp.264.000.000 dan terserap 99,7% yakni sebesar Rp.263.000.000.

Hal ini sangat membanggakan karena penyerapan tahun 2024 ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya menyentuh di angka 51%. Peningkatan penyerapan ini tidak terlepas dari upaya sinergitas dari berbagai pihak baik Penerima Bantuan Hukum, LBH/OBH selaku mitra Pemberi Bantuan Hukum, Bagian Hukum selaku verifikator, serta Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang terdiri dari unsur akademisi, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Bappeda, BPKAD, dan Dinsosnakertrans. Selain itu, juga terdapat beberapa inovasi yakni setiap LBH/OBH mitra diwajibkan memberikan penyuluhan hukum mengenai layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di 45 (empat puluh lima) kelurahan di Kota Yogyakarta serta dibuka seluas-luasnya penyerapan dari LBH/OBH tanpa batasan pagu seperti tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2024, Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM menangani 11 (sebelas) perkara dengan rincian 6 (enam) perkara perdata tingkat pertama di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 2 (dua) perkara perdata tingkat banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan 3 (tiga) perkara tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI.

Anggaran Bantuan Hukum dan HAM belum dapat terserap maksimal karena adanya honor tim penanganan perkara yang tidak bisa terserap maksimal karena kebanyakan perkara dapat diselesaikan pada proses mediasi saja tanpa masuk ke pokok perkara dan pembuktian, sehingga honor yang sudah dianggarkan tidak dapat dicairkan.

Pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah, pendokumentasian produk hukum daerah dilakukan dengan pencetakan dan penjilidan himpunan dan lembaran berita daerah, sedangkan untuk penginformasian peraturan perundang-undangan dilakukan dengan pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, penyuluhan dan sosialisasi produk hukum sekaligus dilakukan pembinaan kelurahan sadar hukum.

Pendokumentasian dan penginformasian peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui media Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Adapun konsekuensi dari integrasi ini, JDIH Pemerintah Kota Yogyakarta harus memenuhi parameter-parameter yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Petunjuk Teknis Penilaian Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nomor PHN.HN.03.05.87.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-3.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023, JDIH Pemerintah Kota Yogyakarta menempati peringkat ke-4 (keempat) Kota se Indonesia untuk kategori EKA ACALAPATI dengan nilai 94 (Eka Acalapati dalam penilaian Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai Anggota JDIHN yang bernilai paling tinggi dalam pengelolaan JDIH dan dapat dijadikan contoh bagi Anggota JDIHN lainnya). Sebelumnya, pada Tahun 2023 JDIH Kota Yogyakarta menempati urutan ke-6 (keenam) pada Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2022.

Di Tahun 2024, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan 10 (sepuluh) kali kegiatan sosialisasi dan 14 (empat belas) kali Penyuluhan Hukum yang melibatkan instansi vertical seperti Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, dan juga DPRD Kota Yogyakarta, Biro Hukum Setda DIY, dan perangkat daerah terkait. Adapun sasaran dari penyuluhan dan sosialisasi tersebut diantaranya siswa sekolah, pengurus TP PKK, Kadarkum se Kota Yogyakarta, tokoh-tokoh Masyarakat, LPMK, RT, RW di wilayah kota Yogyakarta.

4. Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta

Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) unit kerja di bawah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta mengampu 2 (dua) program utama yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Program Perekonomian dan Pembangunan seperti yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel III. 86 perubahan perjanjian kinerja administrator setara eselon III tahun 2024

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program dan Kegiatan)	Target
1.	Meningkatnya Kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	94,58%
	Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah secara optimal	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	45 dokumen

2.	Meningkatnya pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan perekonomian dan kinerja BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	a. Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis perekonomian b. Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)	89 % 84,62%
	Terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian dan bahan pengelolaan BUMD dan BLUD secara optimal	a) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD b) Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil c) Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	24 dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen
3	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	13 dokumen
3.1	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah Dokumen/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai	24 Dokumen
3.2	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah Dokumen/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai	8 dokumen
3.3	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	1 dokumen
3.4	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah selesai	8 Dokumen
3.5	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	15 unit
3.6	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	4 Dokumen
3.7	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik	Jumah pemeliharaan barang milik daerah selesai	37 unit

Tabel III. 87 Indikator Kinerja Utama pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kerja sama daerah yang ditindaklanjuti meningkat	Persentase kerja sama Daerah yang ditindaklanjuti	94,58%	98,72%*
2.	Meningkatnya pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan perekonomian dan kinerja BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis perekonomian	89 %	89 %
		Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)	84,62%	80,77%**

*) Menggunakan data hasil evaluasi Semester I Tahun 2024
**) Menggunakan data hasil evaluasi TW III Tahun 2024

Sasaran program Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta yang pertama yaitu Kerja sama daerah yang ditindaklanjuti meningkat dengan indikator program

Persentase kerja sama Daerah yang ditindaklanjuti dan ditargetkan sebesar 94,58% dan tercapai sebesar 98,72% (tercapai 104,38% dari yang ditargetkan). Sasaran tersebut dapat tercapai karena adanya sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah (Teman Perkasa) yang mampu memastikan setiap rencana kerja sama dipersiapkan dengan cermat. Selain itu dokumen kerja sama daerah selalu dievaluasi secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun.

Sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan perekonomian dan kinerja BUMD dan BLUD yang berkinerja baik dengan indikator program Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis perekonomian ditargetkan sebesar 89% dan tercapai sebesar 89% atau tercapai 100% dari yang ditargetkan. Hal tersebut didukung adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar stakeholder, sehingga kebijakan yang direncanakan dapat dilaksanakan. Sasaran Program yang ketiga yaitu BUMD dan BLUD berkinerja baik meningkat dengan indikator program Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik ditargetkan sebesar 84,62% dan tercapai sebesar 80,77%. Terdapat deviasi antara target dan realisasi, dari target 20 BLUD yang sehat terealisasi 19 BLUD yang sehat pada triwulan III 2024, karena mulai tingginya realisasi belanja operasional baik yang bersumber dari pendapatan BLUD maupun APBD pada triwulan III yang menyebabkan turunnya profitabilitas akibat penurunan surplus sebelum pos laba-rugi. Pada kondisi triwulan III ini belum dapat menggambarkan capaian kinerja BUMD dan BLUD Tahun 2024 mengingat, transaksi keuangan masih berjalan dan belum final. Laporan final akan disajikan setelah melalui proses evaluasi pada awal Tahun 2025

Tercapainya target sasaran program Kerja sama daerah yang ditindaklanjuti meningkat juga didukung oleh kegiatan Fasilitasi Kerja sama Daerah dengan sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri, dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama yang dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut:

Tabel III. 88 kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan
1	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri yang tepat waktu	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	45 dokumen
2	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri yang tepat waktu	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 dokumen
3	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama yang tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan

Anggaran Perubahan pada sub kegiatan fasilitasi Kerjasama dalam negeri adalah sebesar Rp591.929.000 dan terealisasi sebesar Rp588.549.593 atau 99.4%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Bahan Kebijakan Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah
2) Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Disahkan
3) Dokumen Penawaran Kerja Sama Dalam Negeri
4) Dokumen Rencana Pengembangan Website Fasilitasi Kerja Sama Daerah
5) Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri
6) Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI)
7) Materi Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah
8) Pemutakhiran Database Kerja Sama Dalam Negeri
9) Penyusunan Bahan Kebijakan Kerja Sama Daerah

Anggaran Perubahan pada subkegiatan fasilitasi Kerjasama luar negeri adalah sebesar Rp160.955.000 dan terealisasi sebesar Rp160.662.638 atau 99.8%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:

i. Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri
ii. Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta Inisiasi Kerja Sama Luar Negeri

Anggaran Perubahan pada subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama adalah sebesar Rp237.760.000 dan terealisasi sebesar Rp236.816.375 atau 99.6%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sub kegiatan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama.

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerja sama daerah yang meliputi subkegiatan fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi pelaksanaan kerja sama adalah terjadinya ketidaklancaran komunikasi dengan mitra kerja sama untuk memastikan tindak lanjut dari dokumen kerja sama daerah yang telah disepakati. Beberapa kerja sama daerah yang tidak dapat ditindaklanjuti terjadi salah satunya karena faktor mitra yang tidak memiliki perencanaan kerja sama yang jelas dalam jangka panjang atau disebabkan karena terjadinya perubahan organisasi mitra. Hal ini kemudian menjadi catatan dalam proses perencanaan kerja sama dan dalam menentukan jangka waktu kerja sama.

Selanjutnya, tercapainya target sasaran program Kebijakan perekonomian yang direalisasikan meningkat didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, subkegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dan subkegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil yang dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut:

Tabel III. 89 kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan
1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan	24 dokumen

	Pengelolaan BUMD dan BLUD yang tepat waktu	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
2	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Distribusi Perekonomian	7 dokumen
3	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil yang tepat waktu	Jumlah dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 dokumen

Anggaran Perubahan pada subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD adalah sebesar Rp465.511.000 dan terealisasi sebesar Rp462.185.780 atau 99.3%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Bahan pendukung kebijakan BUMD/BLUD yang tersusun;
b. Data laporan kinerja BUMD dan BLUD yang terdokumentasikan;
c. Dokumen hasil evaluasi RBA BLUD yang tersusun;
d. Dokumen hasil evaluasi RKA BUMD yang tersusun;
e. Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD yang tersusun.

Anggaran Perubahan pada subkegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian adalah sebesar Rp349.160.000 dan terealisasi sebesar Rp344.377.055 atau 98,6%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:

i. Bahan pendukung Kebijakan Perekonomian Daerah;
ii. Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang terdokumentasikan;
iii. Data Perekonomian Daerah yang diperbarui;
iv. Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
v. Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
vi. Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Anggaran Perubahan pada subkegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil adalah sebesar Rp176.950.000 dan terealisasi sebesar Rp176.749.150 atau 99.9%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sub kegiatan Studi/kajian terkait UMKM dan ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD terdapat beberapa hambatan yang ditemui, antara lain:

a. belum lengkapnya regulasi/kebijakan di tingkat daerah dalam pembinaan BUMD dan BLUD;

b. Adanya data yang kurang lengkap, sehingga menghambat proses evaluasi kinerja BUMD dan BLUD;
c. Terdapat permasalahan kekurangan personil yang mengampu pembinaan BUMD dan BLUD sehingga kurang maksimal dalam memberikan fasilitasi kepada BUMD dan BLUD.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan teknis BUMD/BLUD untuk melengkapi regulasi berkaitan pengelolaan BUMD mengoptimalkan koordinasi dengan stakeholder dan memanfaatkan teknologi informasi seperti media whatsapp grup yang melibatkan perangkat daerah dan tim monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD. Selain itu, Bagian Perekonomian dan Kerjasama juga merancang aplikasi Sistem Informasi Manajemen BUMD dan BLUD untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi serta menampilkan laporan yang lebih akuntabel dan mudah diakses.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian subkegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian dan subkegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil terdapat beberapa hambatan yang ditemui, antara lain:

a. Kesulitan dalam mengakses data UMKM yang valid, sehingga menghambat proses analisa perkembangan jumlah UMKM di Kota Yogyakarta;
b. Belum tersedia informasi yang mudah diakses terkait kondisi inflasi, faktor/andil yang mempengaruhi inflasi;
c. belum tersedianya data pelaku ekonomi kreatif yang teringrasi dalam sebuah database/website yang dapat diperbaharui secara periodik.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain mengoptimalkan koordinasi dengan *stakeholder* dan memanfaatkan media whatsapp grup yang melibatkan perangkat daerah dan tim monitoring dan evaluasi masing-masing unsur yang menjadi tugasnya. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dalam media penyimpanan dengan mengoptimalkan platform Google Drive, sehingga memudahkan dalam proses akses data internal. Selain itu, Bagian Perekonomian dan Kerjasama sudah menyusun rancangan proses bisnis dalam melaksanakan ketugasan di bidang pengendalian inflasi, percepatan akses keuangan daerah, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, dan program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), update data perekonomian, dan ekonomi kreatif yang akan disempurnakan pada tahun 2025.

5. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi Pembangunan merupakan salah satu unit kerja pendukung Program Perekonomian dan Pembangunan di dalam Sekretariat Daerah. Dalam mendukung urusan

tersebut Bagian Administrasi Pembangunan memiliki Program Perekonomian dan Pembangunan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III. 90 perubahan perjanjian kinerja administrator setara eselon III tahun 2024

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketepatan pelaksanaan kegiatan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,54 %
		Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan	89%

Berdasarkan tabel di atas Bagian Administrasi Pembangunan memiliki sasaran program yaitu Meningkatnya ketepatan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dengan indikator Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan target 98,54 % dan Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan dengan target 89%.

Kegiatan utama untuk mencapai target indikator Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan adalah Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.

Anggaran perubahan tahun 2024 untuk pelaksanaan kegiatan utama tersebut adalah Rp544.342.000 dengan realisasi sebesar Rp528.407.400 atau 97,07%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan target kegiatan di atas yang mendukung pencapaian target indikator Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan.

Berdasarkan pasal 17 ayat 3 pada Peraturan Wali Kota 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD, bahwa realisasi fisik sub kegiatan sesuai dengan Laporan Bulanan yang disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat setiap tanggal 4 (empat) bulan berikutnya dengan menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen pelaporan.

Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan dengan menghitung persentase penyelesaian semua sub kegiatan di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun formula yang digunakan untuk perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk menghitung Total Realisasi Sub Kegiatan per SKPD/Unit Kerja

$$RK = \sum i - jRealisasi\ Sub\ Kegiatan$$

RK = Realisasi Sub Kegiatan
RO = Realisasi Sub Kegiatan dari awal s.d akhir

❖ Untuk menghitung Total Realisasi Fisik per SKPD/Unit Kerja

$$RD = \frac{\sum(RKi - j \times BKi - j)}{100\%}$$

RD = Realisasi SKPD/unit kerja

$$BKi = \frac{Anggaran\ Sub\ Kegiatan \times 100\%}{\sum i - jAnggaran\ Sub\ Kegiatan}$$

❖ Untuk menghitung Total Realisasi fisik semua sub kegiatan pada Pemerintah Kota Yogyakarta

$$RT = \frac{\sum(RDi - j \times BDi - J)}{100\%}$$

RT = Realisasi Total
RD = Realisasi SKPD/unit kerja
BD = Bobot SKPD/Unit kerja dalam %
I = awal

Untuk menghitung total bobot masing-masing SKPD/Unit Kerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BDi = \frac{Anggaran\ SKPD\ /\ unit\ kerja \times 100\%}{\sum i - jAnggaran\ SKPD\ /\ unit\ kerja}$$

Untuk realisasi Tahun 2024 dapat dilihat dari grafik berikut:

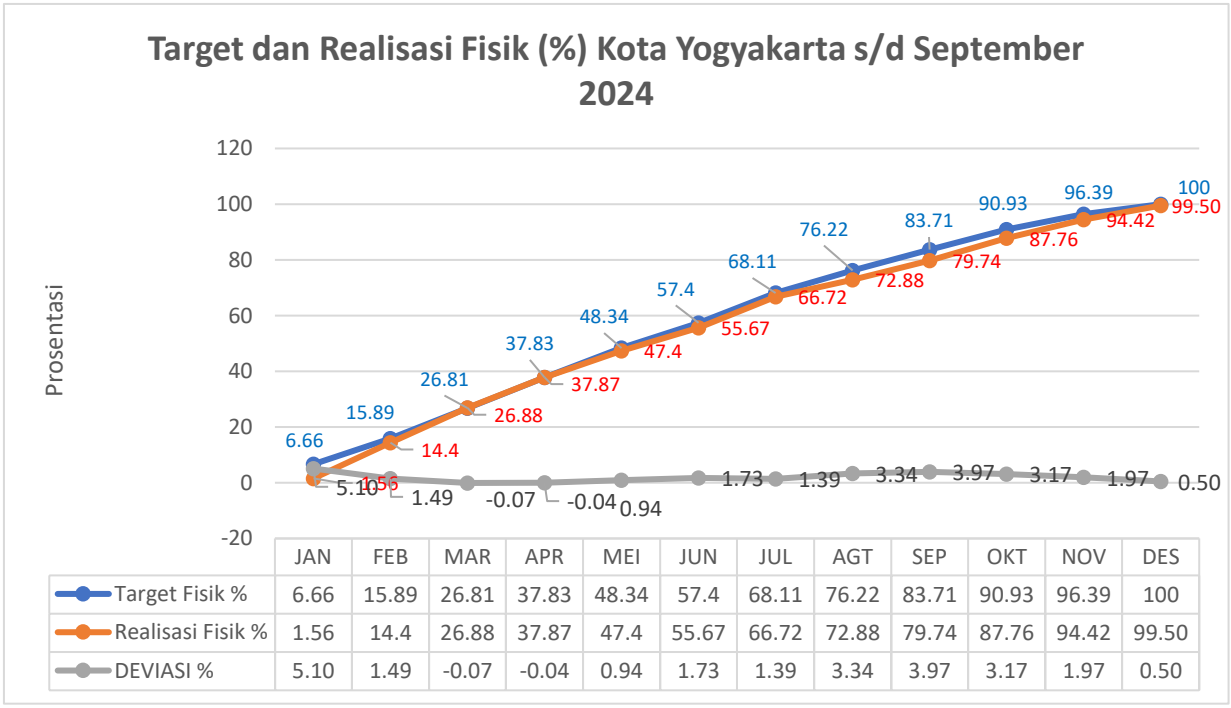

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Target Fisik %	6.66	15.89	26.81	37.83	48.34	57.4	68.11	76.22	83.71	90.93	96.39	100
Realisasi Fisik %	1.56	14.4	26.88	37.87	47.4	55.67	66.72	72.88	79.74	87.76	94.42	99.50
DEVIASI %	5.10	1.49	-0.07	-0.04	0.94	1.73	1.39	3.34	3.97	3.17	1.97	0.50

Berdasarkan data olahan tersebut diketahui bahwa realisasi pada tahun ini telah melampaui target sebesar 98.52% dikarenakan persentase realisasi fisik semua sub kegiatan di Pemerintah Kota Yogyakarta berada pada angka 99,37%.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran indikator program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, juga didukung oleh 3 (tiga) tim kerja yakni :

1. Tim Kerja Kebijakan Pembangunan
2. Tim Kerja Pengendalian Pembangunan
3. Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

a. Tim Kerja Kebijakan Pembangunan

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1.2 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan adalah sebesar Rp. 97.493.000 dan terealisasi Rp 95.951.0000,00 atau 98,42%.

Dalam pelaksanaan Kebijakan Pembangunan terdapat hambatan yang ditemui yaitu Adanya kebijakan di pemerintah pusat yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan pada Perangkat Daerah.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain adalah Akan dilakukan FGD lintas OPD untuk membahas kebijakan dari pemerintah pusat.

b. Tim Kerja Pengendalian Pembangunan

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja Tim Kerja (*Output* Tim Kerja)	Target Perubahan
1.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan adalah sebesar Rp. 254.691.400,00 dan terealisasi Rp 240.548.900,00 atau 94,45%.

Adapun hambatan yang muncul pada pelaksanaan Pengendalian Pembangunan adalah :

a. Ada pekerjaan yang tidak selesai
b. Ada pekerjaan yang selesai namun tidak sesuai target

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara antara lain:

a. Adanya monitoring dan evaluasi realisasi fisik serta pengendalian fisik tiap bulan.
b. Ada Early Warning Report yang memberi laporan realisasi fisik langsung ke kepala OPD, sehingga kepala OPD bisa melakukan monitoring

c. Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja Tim Kerja (*Output* Tim Kerja)	Target Perubahan
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengendalian pembangunan adalah sebesar Rp. 192.157.600,00 dan terealisasi Rp 191.907.500,00 atau 99,87%.

Dalam pelaksanaan Evaluasi dan pengendalian pembangunan terdapat hambatan yang ditemui antara lain:

1. Ada OPD yang masih lemah di perencanaan sehingga membuat pekerjaan terlambat
2. Masih ada OPD yang tidak tepat membuat target fisik (pengadaan di akhir tahun)

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara yaitu :

Setiap OPD diwajibkan membuat ROPK (Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan), yang berfungsi sebagai kertas kerja untuk membuat perencanaan dan target fisik.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksaan kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik. Hal Tersebut tidak lepas dari komitmen dan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon III. Diharapkan dari hasil yang telah dicapai tersebut Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta dapat mempertahankan dan meningkatkan komitmen pelayanan kepada masyarakat.

6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta

Peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta (BPBJ Setda Kota Yogyakarta) perlu untuk dilakukan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, BPBJ Setda Kota Yogyakarta memiliki program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel perubahan perjanjian kinerja administrator setara eselon III tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemenuhan standar ketepatan waktu dan tingkat layanan pengadaan barang/jasa meningkat.	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar pelayanan.	95 %

Terhadap indikator persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar pelayanan dengan target 95%, BPBJ Setda Kota Yogyakarta melakukan pengukuran dari total jumlah paket pengadaan berdasarkan RUP pada tahun berjalan. Indikator ini digunakan untuk melihat pemenuhan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, khususnya pada Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (e-Tendering), jangka waktu penyelesaian proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dari Pengumuman sampai dengan Penyampaian Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) untuk metode:

1. Tender: 30 (tiga puluh) Hari Kerja (HK)
2. Seleksi: 55 (lima puluh lima) Hari Kerja (HK)
3. Tender Cepat: 10 (sepuluh) Hari Kerja (HK)

Kemudian ditambah 2 (dua) hari kerja untuk proses pelimpahan kembali ke OPD/PPKom.

Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan dengan menghitung jangka waktu penyelesaian proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dimulai dari Pengumuman sampai dengan proses pelimpahan kembali ke OPD/PPKom. Apabila jangka waktu penyelesaian proses pemilihan kurang atau sama dengan waktu yang ditetapkan, maka dikatakan "*sesuai dengan standar pelayanan*". Selanjutnya akan dihitung persentase paket pengadaan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan tersebut dibanding dengan seluruh paket pengadaan barang/jasa sesuai RUP pada tahun berjalan. Adapun formula yang digunakan untuk perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu =

$$\frac{Jumlah\ paket\ pengadaan\ yang\ dilaksanakan\ sesuai\ dengan\ standar\ pelayanan}{Total\ Jumlah\ Paket\ Pengadaan\ sesuai\ RUP\ (Tender, Seleksi, dan\ Tender\ Cepat)}\ x\ 100\%$$

Keterangan:
Total jumlah paket pengadaan berdasarkan RUP pada tahun berjalan

Keterangan	Jumlah Tender
Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	68
Total Jumlah Paket Pengadaan (Tender, Seleksi dan Tender Cepat)	**68**

Untuk realisasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu =

$$= \frac{Jumlah\ paket\ pengadaan\ yang\ dilaksanakan\ sesuai\ dengan\ standar\ pelayanan}{Total\ Jumlah\ Paket\ Pengadaan\ sesuai\ RUP\ (Tender,Seleksi,dan\ Tender\ Cepat)} x\ 100\%$$

$$= \frac{68}{68} x\ 100\%$$

$$= 100\ \%$$

Berdasarkan data olahan tersebut diketahui bahwa realisasi pada tahun ini telah melampaui target sebesar 85.5% dikarenakan persentase realisasi tender tepat waktu berada pada angka 100%.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran indikator program pemenuhan standar ketepatan waktu dan tingkat layanan pengadaan meningkat, juga didukung oleh 3 (tiga) kelompok substansi yakni :

1. Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
2. Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3. Kelompok Substansi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa

1. Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan
1.	Terlaksananya pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Optimal	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.1 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebesar Rp. 207.237.000,00 dan terealisasi Rp 207.125.116,00 atau 99,95%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yakni pada tahun 2024 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta telah melaksanakan pemilihan penyedia melalui tender, tender cepat dan seleksi dengan total sebanyak 68 paket.

Dalam pelaksanaan Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdapat beberapa hambatan yang ditemui antara lain :

1. Masih banyak OPD yang melakukan proses pelimpahan berkas pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan tatakala yang tercantum dalam perencanaan SiRUP.
2. Apabila ada kesalahan dalam dokumen pemilihan, tidak segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait sehingga membutuhkan perpanjangan waktu dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa.
3. Target dan realisasi pelaksanaan tender berubah sebagai akibat dari data RUP yang selalu mengalami perubahan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain adalah mengadakan workshop atau FGD dengan mengundang narasumber ahli pengadaan barang/jasa agar terdapat peningkatan pemahaman proses pemilihan penyedia dan proses pelaksanaan tender.

Selain itu dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga senantiasa meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait untuk meminimalisir revisi yang dapat berakibat pada terlambatnya pelaksanaan tender. Monitoring terhadap tatakala pelaksanaan tender juga selalu dilakukan dengan cara mengingatkan PPKom agar tidak terlambat dalam pemasukan dokumen pemilihan.

2. Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik secara optimal	Aplikasi SPSE yang dimonitor	1 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa Kelompok Substansi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik adalah sebesar Rp. 129.075.000,00 dan terealisasi Rp 128.693.426,00 atau 99,70%. Anggaran tersebut secara umum dialokasikan untuk penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa seperti misalnya Penggunaan Aplikasi SPSE, SiRUP dan mengatasi kendala-kendala dalam aplikasi tersebut. Adapun hambatan yang muncul pada pelaksanaan Kelompok Substansi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik adalah :

a. Pemahaman pihak-pihak terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang masih minim sehingga masih terdapat banyak kesalahan dalam pengisian SiRUP.
b. Adanya kebijakan dari LKPP terkait migrasi e-katalog v.5 ke v.6 melalui Surat Edaran Kepala LKPP nomor 9 Tahun 2024, ternyata pada pelaksanaannya sistem dan SDM terkait belum siap sehingga banyak pengadaan e-purchasing dialihkan sementara menggunakan metode pengadaan lain seperti e-PL.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara memaksimalkan fungsi helpdesk dalam hal pelayanan bagi penyedia terutama melalui online dengan memanfaatkan whatsapp, email, maupun telepon.

3. Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa secara optimal	Jumlah orang yang mengikusi pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	50 Orang

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa Kelompok Substansi pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa adalah sebesar Rp. 209.620.820,00 dan terealisasi Rp 206.541.300,00 atau 98,53%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pencapaian sasaran subkegiatan seperti misalnya :

a. Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan yang telah dilakukan melalui kegiatan berikut :
    a. Penyelenggaraan Workshop Pemenuhan Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 26 Februari 2024
    b. Pelaksanaan Podcast dengan Tema Inovasi Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Administrasi Pemgadaan) tanggal 6 Maret 2024
    c. Penyelenggaraan Focus Group Discussion Permasalahan Hukum dan Mitigasi Risiko Dalam Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 28 Mei 2024
    d. Adanya Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan tanggal 6 Juni 2024
    e. Pelaksanaan Podcast dengan tema materi muatan perubahan Perwal PBJ Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 menjadi Perwal Kota Yogyakarta Nomor 82 tahun 2023 tanggal 14 Juni 2024
    f. Penyelenggaraan Focus Group Discussion FGD Pengelolaan Kontrak dan Permasalahan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta tangga; 29 Oktober 2024
b. Tersusunnya Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksaan kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik. Hal Tersebut tidak lepas dari komitmen dan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon III. Diharapkan dari hasil yang telah dicapai tersebut Bagian

Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta dapat mempertahankan dan meningkatkan komitmen pelayanan kepada masyarakat.

7. Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta

Analisis yang dilakukan adalah analisis program teknis non Pelayanan Administrasi Perkantoran. Bagian Umum dan Protokol memiliki Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dan Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Keprotokolan	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,5 Skala 0 - 100
1.1	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	13 Dokumen
1.2	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai	27 Dokumen
1.3	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai	8 Laporan/Dokumen
1.4	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	3 Paket
1.5	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	11 Laporan
1.6	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	4 Laporan
1.7	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai	112 Unit
1.8	Terselenggaranya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Orang
1.9	Terselenggaranya fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang selesai tepat waktu	Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan	46 Paket
1.10	Terselenggaranya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang selesai tepat waktu	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	36 Laporan

Dalam mewujudkan tercapainya target sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator program Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan telah dilaksanakan pengumpulan data pada Semester I dan II, pengolahan dan penghitungan data dilakukan di Semester II. Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan tersebut menggambarkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bagian Umum dan Protokol kepada masyarakat melalui penerimaan surat yang disampaikan untuk pimpinan dan pelayanan kepada pimpinan (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten, dan Staf Ahli) dalam lingkup baik administrasi, kerumahtanggaan, dan keprotokolan. Untuk capaian program dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tahun Anggaran 2024	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Indikator Program	81,50	81,53	100,04 %
Keuangan (Anggaran Perubahan)	Rp.9.903.974.908.00	Rp.9.482.434.829,00	95,74 %

Keberhasilan pencapaian realisasi tersebut tidak lepas dari komitmen dan upaya-upaya pengoptimalan capaian kinerja serta koordinasi yang intensif antara Bagian Umum dan Protokol dengan semua pihak yang berkepentingan.

8. Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta

Bagian Organisasi mengampu 2 program yang terdiri atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan. Program tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja yang memuat sasaran program, indikator program/kegiatan, dan target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Program/ Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan. 2. Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah	50% Sangat Tinggi

Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan didapatkan dari Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan dibagi jumlah total Perangkat Daerah dikali 100%. Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan ini adalah perangkat daerah yang telah melakukan self assesment melalui pengisian form keberhasilan di aplikasi SATRIYA dan sudah berkoordinasi dengan OPD DIY terkait pengampu Keistimewaan. Tahun 2024 ini, terdapat 23

Perangkat Daerah yang telah melakukan self assesment melalui pengisian form keberhasilan di aplikasi SATRIYA dan sudah berkoordinasi dengan OPD DIY terkait pengampu Keistimewaan, antara lain:

1. Inspektorat
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
7. Dinas Lingkungan Hidup
8. Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Perdagangan
11. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
14. Kemantren Tegalrejo
15. Kemantren Pakualaman
16. Kemantren Jetis
17. Kemantren Danurejan
18. Kemantren Kotagede
19. Kemantren Gondokusuman
20. Kemantren Kraton
21. Kemantren Gondomanan
22. Kemantren Wirobrajan
23. Kemantren Umbulharjo

Sedangkan Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah didapatkan dari parameter sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
3. Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
5. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
6. Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
7. Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur

8. Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur
9. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur
10. Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah
11. Budaya Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan parameter diatas, akan diperoleh nilai dengan rentang predikat sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi (46,1-55)
2. Tinggi (37,1-46)
3. Sedang (28,1-37)
4. Rendah (19,1-28)
5. Sangat Rendah (10-19)

Tahun 2024 ini, telah diperoleh nilai kematangan organisasi sebesar 2091, dengan jumlah total Perangkat daerah sebanyak 41 perangkat daerah. Sehingga, nilai kematangan Organisasi yang diperoleh adalah 51 (lima puluh satu), dengan predikat Sangat Tinggi.

Dalam mewujudkan tercapainya target kinerja, Bagian Organisasi yang terdiri dari 1 sub bagian dan 2 tim kerja, telah melaksanakan:

1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan
    1. Evaluasi terhadap Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis;
    2. Evaluasi dan penyesuaian analisis jabatan seluruh perangkat daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    3. Pengkajian penataan kelembagaan wilayah.
2. Tim Kerja Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
    1. Pendampingan penyusunan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah/Unit Kerja;
    2. Pendampingan Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah/Unit Kerja;
    3. Pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah/Unit Kerja;
    4. Penyusunan Kebijakan Pedoman Ketatalaksanaan yang terdiri atas:
        a. Peraturan Wali Kota Nomor Nomor 74 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas;
        b. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
        c. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah.

3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi

a. Evaluasi dan penyusunan perubahan Keputusan Wali Kota Nomor 228 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Nomor 239 tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2026
b. Penyusunan Rencana Aksi reformasi birokrasi tahun 2024 dan pendampingan pelaksanaannya;
c. Penyusunan Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah;
d. Pembentukan Tim Penyelenggaraan SAKIP yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota sebagai tindak lanjut Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Pendampingan penyusunan Laporan Kinerja tingkat Perangkat Daerah dan perjanjian kinerja Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian target tersebut karena adanya :

1. Komitmen Kepala Daerah sampai dengan Kepala Perangkat Daerah dalam meningkatkan reformasi birokrasi;
2. Koordinasi yang intensif antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi dan Keuangan merupakan salah satu unit kerja pendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu urusan sekretariat daerah. Dalam mendukung urusan tersebut Bagian Administrasi dan Keuangan memiliki program penunjang urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III. 91 perubahan perjanjian kinerja administrator setara eselon III tahun 2024

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program dan Kegiatan)	Target
1.	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai
1.1	Terlaksananya perencanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	22 Dokumen
1.2	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai	32 Dokumen
1.3	Terlaksananya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Kegiatan

1.4	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	1 Dokumen
1.5	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai	20 Dokumen
1.6	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan/ dokumen administrasi umum perangkat daerah selesai	22 Dokumen
1.7	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah pengadaan barang milik daerah	4 Unit
1.8	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	2 Laporan
1.9	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	46 Unit

Berdasarkan tabel di atas Bagian Administrasi dan Keuangan memiliki sasaran program yaitu Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah dengan indikator program Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah. Target indikator program tersebut adalah A.

Kegiatan utama untuk mencapai target indikator Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah adalah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Sementara kegiatan pendukungnya adalah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran perubahan tahun 2024 untuk pelaksanaan kegiatan utama tersebut adalah sebesar Rp375.182.000 dengan realisasi sebesar Rp375.043.900 atau 99,96%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan target kegiatan di atas yang mendukung dalam pencapaian target indikator Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 nomor: 700.1.2.1/86/E.AKIP/B/IV/2024 tanggal 4 April 2024, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memperoleh nilai 84,47 dengan predikat A (memuaskan) atau tercapai 100% dari

target yang telah ditetapkan. Nilai tersebut diperoleh dari akumulasi atas penilaian terhadap 4 komponen. Empat komponen tersebut adalah:

1. Perencanaan kinerja dengan bobot 30% memperoleh nilai 29,53;
2. Pengukuran kinerja dengan bobot 30% memperoleh nilai 26,84;
3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15% memperoleh nilai 13,66; dan
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25% memperoleh nilai 14,44.

Usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut diantaranya adalah dengan cara:

a. menindaklanjuti LHE implementasi SAKIP Setda tahun sebelumnya. Apa yang direkomendasikan dalam LHE tersebut dilaksanakan atau dipenuhi untuk perbaikan SAKIP Setda.
b. Melaksanakan proses SAKIP dari perencanaan sampai pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk penyusunan Renstra dan Renja berdasarkan pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Untuk penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi, pengukuran kinerja, dan LKIP berdasarkan pada Perwal nomor 22 tahuun 2024 tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
c. Melaksanakan koordinasi intensif dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan pengukuran kinerja secara rutin.
d. Menyusun dan mengirim semua dokumen SAKIP sesuai dengan tatakala (tepat waktu).

Hambatan yang dialami untuk mencapai target indikator Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah, adalah adanya indikator sasaran yang tidak tercapai karena kurang maksimalnya capaian kinerja indikator yang disampaikan oleh Perangkat Daerah teknis pengampu urusan pemerintahan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah berkoordinasi dengan Unit Kerja yang mengampu indikator sasaran tersebut agar dapat memperbaiki capaian target pada tahun berikutnya.

10. Urusan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Dalam mendukung urusan tersebut Sekretariat DPRD memiliki Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel III. 92 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	Indeks Kepuasan Layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	79,5

Berdasarkan tabel di atas Sekretariat DPRD memiliki sasaran strategis yaitu kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD meningkat dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD. Target indikator kinerja untuk sasaran strategis pertama adalah 79,5, pada semester I terealisasi 84,7 dan pada semester II terealisasi 85,7 meningkat 1 point dari semester I. Dengan hasil tersebut secara umum kualitas pelayanan di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dipersepsikan BAIK oleh pengguna layanan. Selain itu semua unsur pelayanan menunjukkan hasil yang baik dengan nilai rata-rata indeks 3. Di lihat dari nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan diperoleh kinerja pelayanan BAIK.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran strategis kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD meningkat, juga didukung oleh Program-program yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja administrator setara eselon III sebagai berikut:

Tabel III. 93 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2024.

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target Perubahan
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100%
		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100%
		Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan	100%
		Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan	100%
		Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD	75%
		Persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi	100%

Sekretariat DPRD mempunyai 1 Program untuk mendukung sasaran strategis yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 6 indikator program :

a. Persentase produk hukum yang diselesaikan. Target indikator 100% dan terealisasi 100%, melihat hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah dan penyebarluasan produk hukum yang diselesaikan terealisasi 100%.
b. Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan. Target indikator 100% dan terealisasi 100%, melihat hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa baik pembahasan penganggaran maupun pengawasan yang diselesaikan terealisasi 100%.

c. Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan dengan target indikator 100% dan terealisasi 50%, dengan hasil ini bisa diketahui bahwa masih ada beberapa DPRD yang tidak mengikuti bimbingan teknis. Ini dikarenakan kegiatan pendalaman tugas belum dapat direalisasikan sesuai Permendagri 6 Tahun 2024 bahwa nggota DPRD yang baru belum dapat melaksanakan pendalaman tugas apabila belum mengikuti orientasi ketugasan DPRD, pelaksanaan bimbingan teknis yaitu bimbingan teknis partai bergantung pada ada tidaknya undangan dari DPP Partai yang bersangkutan, belum terbentuknya alat kelengkapan DPRD, serta sesuai Permendagri 6 Tahun 2024 untuk ADEKSI DPRD sudah tidak menjadi penyelenggara pelaksanaan bimbingan teknis / pendalaman tugas DPRD.
d. Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan. Target indikator 100% dan terealisasi 100%, dengan melihat hasil ini bisa diketahui bahwa administrasi dan keuangan tenaga ahli DPRD dan kelompok pakar terealisasi 100%.
e. Persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi. Target indikator 100% dan terealisasi 100%, dengan melihat hasil ini bisa diketahui bahwa aspirasi masyarakat dengan komponen pokok-pokok pikiran, pelaksanaan reses, dan audiensi terfasilitasi 100%.
f. Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD. Target indikator 75% dan terealisasi 80,80%, dengan melihat hasil ini bisa diketahui bahwa kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD terealisasi 100% bahkan melampaui target yang telah direncanakan.

Anggaran Perubahan untuk kegiatan dan sub.kegiatan yang menunjang pelaksanaan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah sebesar Rp. 35.159.923.500,- dan terealisasi Rp. 26.531.184.623,- atau 75,46%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD,
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran,
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan,
4. Peningkatan Kapasitas DPRD,
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat,
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD,
7. Pembahasan Kerja Sama Daerah,
8. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD.

Sasaran kegiatan diatas mendukung pencapaian target indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Enam indikator program di atas, merupakan indikator positif yang artinya semakin tinggi realisasi maka capaian kinerjanya akan semakin baik, yang dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$$

Dalam mencapai target kinerja Sekretariat DPRD terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendorong :

1. Target pembahasan dan penyelesaian raperda sudah ada di propemperda,
2. Komitmen DPRD untuk membahas dan menyelesaikan beberapa raperda dalam propemperda 2024 di semester pertama,
3. Triwulan IV selesai 7 raperda sesuai perubahan Propemperda. 7 raperda yang dibahas antara DPRD dan Walikota yaitu : (Raperda Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Jogja; Raperda Pencabutan Perda LPMK; Raperda RPJPD Kota Yogyakarta; Raperda Air Limbah; Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum; Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; dan Raperda Pengelolaan Sampah),
4. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Biro Hukum Setda DIY dan Kanwil Kemenkumham DIY terkait tahapan pembahasan raperda,
5. Komunikasi antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan DPRD terkait progress propemperda tahun 2024,
6. Koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi.

Faktor Penghambat :

1. Dalam tahapan pembahasan raperda juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu perlunya konsultasi, fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur,
2. Dalam tahap pembahasan raperda ada tahapan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham DIY. Dalam tahapan ini terkadang membutuhkan waktu yang lama, karena dimungkinkan rekomendasi hasil harmonisasi berupa penyempurnaan dari draft raperda,
3. Seringkali terjadi kegiatan DPRD tidak dapat terlaksana sesuai agenda yang sudah di tetapkan,

4. Pasca pelantikan pengambilan sumpah janji DPRD masa jabatan 2024 - 2029, masih belum terbentuk pimpinan definitif dan alat kelengkapan DPRD, sehingga beberapa kegiatan Dewan tidak dapat terlaksana sesuai tata kala yang telah disusun,
5. Untuk penatausahaan keuangan masih menggunakan 2 aplikasi baik dari SIPKD maupun SIPD RI Kemendagri.

11. Urusan Inspektorat

I. ANALISIS SASARAN INSPEKTORAT

No	Kinerja & Target Program	Perjanjian Kinerja	Keterangan
1.	Program: Program Penyelenggaraan Pengawasan Indikator Program: - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi : Target: 95,2% - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset : Target : 95,2% - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana : Target : 95,2% - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat : Target : 95,2% - Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal : Target: 94,74%	Sasaran Program: Kepatuhan auditan terhadap hasil Pengawasan Meningkat Indikator Program: - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi : Target: 95,2% - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset : Target : 95,2% - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana : Target : 95,2% - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat : Target : 95,2% - Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal : Target: 94,74%	**SESUAI**
2.	Program: Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Sasaran Program: Kinerja Pengawasan meningkat Indikator Program:	

No	Kinerja & Target Program	Perjanjian Kinerja	Keterangan
	Indikator Program: 3. Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi : target : 27,27% 4. Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset : target : 50% 5. Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana : target : 36,36% 6. Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat : target : 50%	Indikator Program: 1. Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi : target : 27,27% 2. Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset : target : 50% 3. Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana : target : 36,36% 4. Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat : target : 50%	**SESUAI**
3	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Program : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah :Target : A	Sasaran Program : Nilai SAKIP Inspektorat Indikator Program : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah :Target : A	**SESUAI**

Kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian hasil yang dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu) atau kelompok (kinerja kelompok) atau institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan). Kinerja program atau kebijakan berkaitan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program atau kebijakan telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut.

Kinerja program pada Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024, dalam rangka mencapai visi misi dan mencapai sasaran strategis OPD yaitu :

a. Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan; dan

b. Meningkatnya nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra di masing-masing Bidang.

maka untuk mencapai sasaran strategis tersebut maka disusun 3 (tiga) Program, yaitu :

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Adapun program dan target capaian masing-masing tertuang dalam perjanjian kinerja OPD setiap tahunnya.

Sehubungan dengan pelaporan dan data yang dijabarkan pada LKPJ 2024 adalah 2 (dua) Program teknis yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, maka penjabaran dan analisis dilakukan pada 2 (dua) program teknis (non pelayanan administrasi perkantoran).

Berikut matriks masing-masing program dan kegiatan pendukungnya.

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Program	Kegiatan Pendukung
1.	Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan	Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana 4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 5. Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi 2. Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 3. Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana 4. Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Sasaran Strategis ***"Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan"***

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam periode Rencana Strategis 2023-2026, dan sasaran strategis ***"Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan"*** merupakan perubahan dari sasaran strategis di periode renstra 2017-2022 Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta. Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2023 dan target akhir Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta :

Tabel III. 94 Perbandingan Kinerja Sasaran Dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			Realisasi		Prosenatse Realisasi dibanding Target	
			Target Akhir Renstra	Target 2023	Target 2024	2023	2024	Th 2023	Th 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%

Berdasarkan tabel bahwa nilai kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2024 masih berada pada level 3 dibanding tahun 2023. Hal ini berdasarkan penilaian BPKP Perwakilan DIY dengan Laporan Nomor PE.09.03/LHP-216/PW12/6/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian mandiri Kabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2024, dimana tahun 2023 tercapai pada level 3 dari target level 3. Adapun Prosentase yang dicapai ditahun 2024 dibanding dengan target akhir renstra 2026 adalah sebesar 100%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahun 2024 target renstra **TERPENUHI.**

II. ANALISIS PROGRAM PADA INSPEKTORAT

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini memiliki 5 (lima) indikator program yang seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Program ini diampu oleh 4 Bidang Inspektorat yang disajikan dalam perhitungan sebagai berikut :

Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan

1) Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi

Perhitungan realisasi capaian indikator program di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi :

No	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024		
			T	R	Cap
1	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	95,2%	100 %	105,04 %
		Perhitungan realisasi capaian indikator program ke 1 : Jumlah rekomendasi : 16 Jumlah yang ditindaklanjuti : 16 Realisasi = 16/16 X100% = 100% Capaian = 100%/95,2%*100 = 105,04%			

Jumlah Temuan Rekomendasi dan Tindak Lanjut Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tahun 2024

Audit	Tahun 2024		
	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Operasional	5	12	12
Kinerja	2	4	4
ADTT	0	0	0
Jumlah	7	16	16

2) Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Perhitungan realisasi capaian indikator program di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset :

No	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024		
			T	R	Cap
2	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	95,2%	100 %	105,04 %
		Perhitungan realisasi capaian indikator program ke 2 : Jumlah rekomendasi : 26 Jumlah yang ditindaklanjuti 26 Realisasi = 26/26X100% = 100% Capaian = 100%/95,2%*100 = 105,04%			

Jumlah Temuan Rekomendasi dan Tindak Lanjut Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2024

Audit	Tahun 2024		
	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Operasional	6	17	17
Kinerja	4	9	9
ADTT	0	0	0
Jumlah	10	26	26

3) Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhitungan realisasi capaian indikator di bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana :

No	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024		
			T	R	Cap
3	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Sarana dan Prasarana	95,2 %	100 %	105,04 %
		Perhitungan realisasi capaian indikator program ke 3 : Jumlah rekomendasi : 59 Jumlah yang ditindaklanjuti : 59 Realisasi = (59/59)X100% = 100% Capaian = 100%/95,2%*100 = 105,04%			

Jumlah Temuan Rekomendasi dan Tindak Lanjut Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tahun 2024

Audit	Tahun 2024		
	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Operasional	13	30	30
Kinerja	2	4	4
ADTT	27	25	25
Jumlah	42	59	59

4) Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Perhitungan realisasi capaian indikator di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat :

No	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024		
			T	R	Cap
4	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	95,2%	100 %	105,04%
		Perhitungan realisasi capaian indikator program ke 4 : Jumlah rekomendasi : 6 Jumlah yang ditindaklanjuti 6 Realisasi = (6/6)X100% = 100% Capaian = (100%/95,2%)*100 = 105,04%			

Jumlah Temuan Rekomendasi dan Tindak Lanjut di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024

Audit	Tahun 2024		
	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Operasional	3	3	3
Kinerja	2	3	3
ADTT	0	0	0
Jumlah	5	6	6

5) Prosentase Capaian Indikator Eksternal

Perhitungan realisasi capaian indikator eksternal:

No	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024		
			T	R	Cap
5	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal	94,74 %	100%	105,55%

		Perhitungan realisasi capaian indikator program ke 5 : Jumlah rekomendasi ekternal = 96 Jumlah yang ditindaklanjuti = 96 Realisasi = (96/96)X100% = 100% Capaian = (100%/94,74%)*100 = 105,55%			

Berdasarkan Evaluasi kinerja program dapat dilihat dari hasil perhitungan diatas dari 5 indikator pada program penyelenggaraan pengawasan belum semuanya terealisasi 100% dengan capaian diatas 100%

1. Jumlah tindak lanjut pemeriksaan internal dan eksternal tahun 2024 sebagai berikut :

Selain pemeriksaan internal oleh Aparat Pengawas Intern pemerintah (APIP) dengan auditee adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakrtar terdapat juga pemeriksaan eksternal yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) terhadap kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta. Rekomendasi BPK dijadikan acuan dikarenakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu Pemerintah Daerah dengan melihat seberapa aktif Pemerintah Daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dengan demikian capaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menjadi indikator kinerja eksternal Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta, karena Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta melakukan pendampingan kepada OPD dalam menyelesaikan rekomendasi BPK. Adapun rekomendasi dan tindaklanjut pemeriksaan internal dan eksternal tahun 2024 adalah :

Pemeriksa	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Realisasi		
			Selesai	Dalam Proses	Belum sesuai tindaklanjut	(%)
Inspektorat Daerah	64	107	107	0	0	100
BPK	36	96	96	0	0	100

Dalam hal penjaminan kualitas atas tindaklanjut rekomendasi BPK telah dilakukan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dan telah dinyatakan sesuai, namun hasil final dan penetapan status **"SELESAI"** menunggu informasi dari BPK.

Selain BPK, instansi eksternal yang juga melakukan pemeriksaan dengan auditee Pemerintah Kota Yogyakarta diantaranya adalah BPKP, Inspektorat Pemerintah Daerah DIY, dan Inspektorat Jenderal dari Kementerian, namun rekomendasi dari ketiga Instansi tersebut tidak menjadi indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta. Meskipun demikian, Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta tetap mengawal penyelesaian tindaklanjut atas

rekomendasi ketiga Instansi tersebut. Adapun data hasil temuan, rekomendasi dan tindaklanjut ketiga Instansi tersebut antara lain :

Hasil Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Realisasi (%)
			Selesai	Dalam Proses	Belum sesuai tindaklanjut	
Inspektorat DIY	0	0	0	0	0	0
BPKP	0	22	15	7	0	68,18
Irjen Teknis	0	0	0	0	0	0

2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini memiliki 4 (empat) indikator program yaitu :

1. Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi;
2. Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
3. Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana; dan
4. Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

Capaian kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dapat disajikan dalam tabel berikut :

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	27,27 %	63,64%	233,33%
		Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	50%	70%	140%
		Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	36,36 %	45,45%	125%
		Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	50%	50%	100%

Adapun perhitungan realisasi per indikator program dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Indikator Program	Formula Indikator	Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang	Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang yang mencapai nilai 3,00	Realisasi
1	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Aparatur x 100%	11	7	63,64%
2	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset x 100%	10	7	70%
3	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana x 100%	11	5	45,45%
4	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100%	10	5	50%

Evaluasi kinerja program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dapat dilihat dan dibandingkan bahwa dari hasil perhitungan diatas indikator kinerja program terealisasi diatas target dengan capaian masing-masing diatas 100%. Dengan demikian dapat dikatakan target Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi adalah **TERCAPAI**.

12. Urusan Kepegawaian

Tabel III. 95 Target Kinerja Program BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2024

No	Kinerja & Target Program	Perjanjian Kinerja	Ket
1.	**Program:** Program Kepegawaian Daerah	**Sasaran Program:** Karir ASN berkembang	Sesuai
	Indikator Program: 1. Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta; Target: 88,38 % 2. Persentase JF yang terlayani; Target: 86,65 % 3. Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian; Target: 100 % 4. Persentase Jumlah Data ASN yang dikelola; Target: 91,00 % 5. Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai; Target: 92.40 % 6. Presentase penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai; Target: 92.20% 7. Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan; Target: 84.62%	**Indikator Program:** 1. Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta Target: 88,38 % 2. Persentase JF yang terlayani; Target: 86,65 % 3. Persentase ketepatan Waktu pelayanan administrasi kepegawaian; Target: 100 % 4. Persentase Jumlah Data ASN yang dikelola; Target: 91,00% 5. Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai Target: 92.40 % 6. Presentase penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai; Target: 92.20% 7. Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan; Target: 84.62%	
2.	**Program:** Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Sasaran Program:** Kompetensi Aparatur Sipil Negara meningkat	Sesuai
	Indikator Program: 1. Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ; Target: 95.36 %	**Indikator Program:** 1. Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ; Target: 95.36 %	

Kinerja program atau kebijakan berkaitan dengan sampai seberapa jauh kegiatan- kegiatan dalam program atau kebijakan telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut. Dalam upaya pencapaian target kinerja di Tahun 2024, BKPSDM Kota Yogyakarta didukung oleh 3 program teknis dan 1 Program Penunjang/Administratif dengan 14 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut ditunjukan pada tabel sebagai berikut.

Tabel III. 96 Strategi, Program dan Kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Kualitas Aparatur Sipil Negara Meningkat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN
			Mutasi dan promosi ASN
			Pengembangan kompetensi ASN
			Pengembangan kompetensi ASN (UPT PKP)
			Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
		Program Pengembangan	Pengembangan Kompetensi Teknis

(Sumber: Kelompok Substansi PEP BKPSDM Kota Yogyakarta)

A. Persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa pengembangan karier PNS dilakukan pada jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Pejabat Fungsional dengan mempertimbangkan penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sesuai dengan siklus anggaran. Sedangkan pengisian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional jenjang ahli pertama dan jabatan fungsional jenjang terampil dapat dilakukan melalui pengadaaan CPNS. Khusus untuk karir kelompok jabatan fungsional melalui pengangkatan PNS dalam JF, pengangkatan pertama, pengangkatan

perpindahan, pengangkatan penyesuaian/ inpassing, dan promosi.

Penyusunan kebutuhan PNS untuk jangka waktu (5) lima tahunan yang dirinci pada setiap tahunnya berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan usulan kebutuhan ASN setiap tahunnya harus memperhatikan ketersediaan APBN/APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk ASN dalam pemenuhan dasar di bidang Kesehatan dan pendidikan.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2024 sesuai alokasi kebutuhan CPNS hanya membuka 10 (Sepuluh) Formasi TA.2024. Penetapan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, dimana proses pengumuman seleksi hingga pengumuman akhir pelaksanaan Seleksi dari Bulan Agustus- November 2024.

Sedangkan mengenai Manajemen PPPK diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2018 mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja. Manajemen PPPK berdasarkan Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja calon pegawai. Usulan kebutuhan PPPK berdasarkan peta jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Yogyakarta, dengan memperhatikan Jumlah ASN yang memasuki Batas Usia Pensiun Tahun 2024, kondisi geografis, rasio jumlah penduduk, rasio alokasi anggaran. PPPK di Pemerintah Kota Yogyakarta diprioritaskan menduduki Jabatan Fungsional bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang mengacu Kepmenpan RB Nomor 158 tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK.

Penetapan formasi PPPK Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Keputusan Menpan RB Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah TA. 2024 sejumlah 140alokasi formasi antara lain PPPK Tenaga Kesehatan sejumlah 4 (empat) formasi, Tenaga Pendidikan sejumlah 3 (Tiga) orang, dan PPPK Teknis sejumlah 133 Formasi. Tahun 2023 lalu pengadaan PPPK di Pemerintah Kota Yogyakarta didominasi Formasi Tenaga kesehatan dan tenaga Pendidik.

Pada Tahun 2024 BKPSDM Kota Yogyakarta melaksanakan manajemen kepegawaian untuk kegiatan mutasi dan promosi antara lain:, mutasi dan promosi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Pengangkatan dan Pengembangan Karier Jabatan Fungsional ASN sebanyak 455 orang pegawai, antara lain:

a. Pelantikan dalam jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi = 5 Orang
b. Pelantikan dalam jabatan Administrator = 30 Orang
c. Pelantikan dalam jabatan Pengawas = 64 Orang

d. Pengangkatan dalam jabatan JF = 356 Orang

Pembatasan kewenangan penjabat kepala daerah secara khusus diatur dalam Pasal 132 Peraturan Pemerintah No 49/2008 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, hal ini berpengaruh terhadap jumlah mutasi, promosi pegawai dan pengembangan karier ASN tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Termasuk Surat Persetujuan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ perihal Persetujuan Kemendagri Kepada Pelaksana Tugas/ Penjabat/Penjabat sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah yang mengatur proses pengangkatan JPT di Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam Pilkada tahun 2024 Penjabat Wali Kota Yogyakarta dilarang melakukan mutasi pejabat 6 (Enam) Bulan sebelum tanggal penetapan Calon hingga akhir jabatannya kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementrian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 2 dan ancaman pidana bila melanggar pasal tersebut dituangkan dalam pasal 190 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Pemerintah Kota Yogyakarta juga mematuhi himbauan Bawaslu RI dalam surat 438/PMK/K1/03/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang sejalan dengan UU Pilkada tersebut dengan tidak melakukan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pemenuhan penataan ASN adalah indikator program pertama BKPSDM kepegawaian daerah dengan formulasi indikatornya yaitu kepegawaian daerah dengan formulasi indikatornya yaitu:

$$\textit{Persentase pemenuhan penataan ASN} = \left(\frac{Jumlah\ ASN\ yang\ tertata}{Jumlah\ kebutuhan\ ASN\ yang\ akan\ ditata} \right) x100\%$$

Penyelesaian 20% pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menghitung sasaran strategis, yaitu dengan menjumlahkan beberapa jenis tolok ukur yang masuk kategori instrumen IKU pemenuhan penataan ASN pada tahun 2024.

Tolak ukur yang masuk kategori instrumen IKU pemenuhan penataan ASN di tunjukan pada Tabel I.2

Tabel III. 97 Tolak ukur pemenuhan penataan ASN Tahun 2024

No	Pemenuhan Penataan ASN	Target DPA	Realisasi DPA	Target (orang)	Realisasi (orang)
1	Penataan JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Pengawas	3 Dokumen	3 Dokumen		278
2	Penataan Jabatan Fungsional Tertentu	1 Dokumen	1 Dokumen		758
3	Penataan CASN	1 Laporan	1 Laporan		271
	Jumlah			**1103**	1307

(Sumber: Metadata Kelompok Substansi PEP BKPSDM Kota Yogyakarta)

Dalam proses penataan pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta didukung oleh fungsi UPT Penilaian Kompetensi Pegawai (PKP) BKPSDM Kota Yogyakarta yang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan penilaian kompetensi. Pada tahun 2024 telah melaksanakan penilaian kompetensi sebanyak 402 orang pegawai. BKPSDM Kota Yogyakarta telah merealisasikan jumlah ASN yang tertata sebanyak 1307 orang, melebihi dari target reviu renstra jumlah ASN yang tertata sebanyak 1103 orang dan target jumlah keseluruhan kebutuhan ASN yang akan ditata sebanyak orang. Berdasarkan data pada Tabel I.2 diketahui perhitungan indikator kinerja sebagai berikut.

Persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta = $\left(\frac{1307}{1103}\right) x100\%$

= 118,49%

Apabila dibandingkan dengan formulasi sasaran yaitu 20% persentase pemenuhan penataan ASN", maka hasilnya sebagai berikut.

ASN yang tertata = 20% x 118,5

= 23.70 %

Dari penghitungan tersebut menghasilkan capaian indikator sasaran dengan formula 20 % pemenuhan penataan ASN sebesar 23.70%.

B. Persentase Jabatan Fungsional (JF) yang terlayani

Kelompok Jabatan Fungsional (JF) memiliki kedudukan penting dan bertanggung jawab kepada pejabat tinggi Pratama, administrator dan pejabat pengawas yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas JF. Jabatan fungsional merupakan kelompok jabatan karier ASN yang bertugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, juga dapat memimpin Unit Organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan pelayanan keterampilan dan

keahlian tertentu.

Selama tahun 2024 BKPSDM kota Yogyakarta telah fasilitasi dan pelayanan administrasi untuk kelompok jabatan fungsional antara lain:

Tabel II1. 98 Jumlah Layanan Jabatan Fungsional ASN

No	Jenis layanan	Jumlah layanan
1	Kenaikan jabatanJF	77
2	Pengangkatan JF	10
3	Pengangkatan Pertama	289
4	Pengangkatan karena perpindahan	4
	Pengangkatan kembali JF	2
5	Penyesuaian nomenklatur	835
	Jumlah	1217

Sumber: Data Tim Kerja Pengembangan Karier Jabatan Fungsional 2024

BKPSDM Kota Yogyakarta juga melaksanakan sosialisasi regulasi Jabatan Fungsional sejumlah 190 Orang, Diseminasi Jabatan Fungsional sejumlah 140 Orang dan pembinaan Pegawai dalam jabatan fungsional sejumlah 160 Orang. BKPSDM telah berhasil menyelesaikan layanan Jabatan fungsional yang terlayani sesuai target Renstra 2024.

Realisasi Jabatan Fungsional yang terlayani pada tahun 2024 yaitu

Persentase JF yang terlayani = $\left(\frac{1217}{1217}\right) x100\%$

= 100 %

C. Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian

Jumlah permintaan pelayanan pada tahun 2024 sebanyak 2079 dokumen layanan/ pegawai, dengan penyelesaian pelayanan administrai kepegawaian yang tepat waktu sejumlah 2079 layanan/pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 99 Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian

No	Jenis data kepeg yg dikelola	
1	Layanan Pensiun Atas Permintaan Sendiri	2
2	Layanan Pensiun Batas Usia Pensiun	282
3	Layanan Pensiun Janda/Duda	9
4	Layanan Pensiun Anumerta	1

5	Fasilitasi Pensiun yang Tidak Cakap Kesehatan	3
6	Layanan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri tanpa Pensiun	5
7	Fasilitasi Layanan perceraian	10
8	Fasilitasi Kartu Isteri	68
9	Fasilitasi Kartu Suami	93
10	Fasilitasi Uji Kesehatan	3
11	Pengelolaan dan penyelesaian pelanggaran displin	10
12	Fasilitasi tanda pengenal Pegawai	340
13	Fasilitasi Layanan Mutasi Masuk	14
14	Fasilitasi Layanan Mutasi Keluar	5
15	Fasilitasi Kenaikan Pangkat	961
16	Fasilitasi LHKPN	273
	Jumlah	2079

Sumber: Bidang Administrasi Kepegawaian 2024

$$\text{Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian} = \left(\frac{\text{Jumlah pelayanan ASN yang diselesaikan}}{\text{Jumlah permintaan pelayanan}} \right) x100\%$$

$$\text{Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian} = \left(\frac{2079}{2079} \right) x100\%$$

$$= 100\ \%$$

D. Persentase jumlah data ASN yang di kelola

Kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan pemerintah untuk mendukung proses pen gambilan keputusan berbasis data. Kebijakan tersebut termasuk didalamnya Data ASN diperlukan manajemen data untuk menghasilkan data yang akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses bagi yang berkepentingan.

BKPSDM Kota Yogyakarta sebagai Wali Data Data Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta bertugas mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data, menyebarluaskan data hingga menyimpan metadata. Produsen Data berasal dari ASN Pemerintah Kota Yogyakarta ataupun Subbag Umum Kepegawaian di setiap OPD Pemerintah Kota Yogyakarta.

Proses pengelolaan data dan sistem informasi kepegawaian menggunakan 2 (dua) sistem utama

yaitu SIMPEG dan SIASN yang memuat seluruh informasi dan data Pegawai ASN meliputi:

1. Data identitas pegawai dan riwayat hidup,
2. Data Keluarga
3. Riwayat pendidikan formal dan non formal,
4. Riwayat jabatan dan kepangkatan,
5. riwayat penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan,
6. Riwayat pengalaman berorganisasi,
7. Riwayat gaji,
8. Riwayat pendidikan dan latihan,
9. Daftar penilaian prestasi kerja,
10. surat keputusan,
11. Riwayat Hukuman Disiplin
12. Kompetensi pegawai

Pengelolaan Data ASN BKPSDM mempunyai fungsi strategis dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain proses mutasi dan promosi, proses Pola Karier dan Manajemen talenta yang memetakan karir seorang ASN dan kebutuhan pemenuhan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator maupun Jabatan Fungsional Pemerintah Kota Yogyakarta dan sejumlah fungsi administrasi dan teknis kepegawaian lainnya.

BKPSDM Kota Yogyakarta telah berhasil melaksanakan pembaharuan dan pengelolaan data kepegawaian sebanyak 5.535 data kepegawaian dan telah terealisasi sesuai target Renstra 2024 yaitu sebesar 100 persen, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\textit{Persentase Jumlah Data ASN yang dikelola} = \left(\frac{Jumlah\ data\ yang\ dikelola}{Jumlah\ Data\ Pegawai} \right) x100\%$$

$$\textit{Persentase Jumlah Data ASN yang dikelola} = \left(\frac{5535}{5535} \right) x100\%$$

$$= 100\ \%$$

E. Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai

Tujuan pemberian kesejahteraan bagi seluruh pegawai di 51 OPD/unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja, sehingga pegawai diharapkan dapat produktif dalam bekerja memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sejumlah Pelayanan kesejahteraan dan penghargaan bagi ASN antara lain:

Tabel III.100 Jenis Layanan Kesejahteraan dan Penghargaan

1	Pemberian TPP	5535
2	Fasilitasi KGB dan KP4	51
3	Fasilitasi tanda kehormatan satya lencana	181
4	JKK, JKM	1
5	Penghargaan ASN berprestasi	20
6	Fasilitas Layanan tapera BUP	282
	Jumlah	6070

Sumber: Timja Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan

Formulasinya sebagai berikut:

$$\textit{Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai} = \left(\frac{\textit{Jumlah layanan kesejahteraan yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\textit{Jumlah Pengajuan Pelayanan Kesejahteraan}} \right) x100\%$$

$$\textit{Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai} = \left(\frac{6070}{6070} \right) x100\%$$

$$= 100\ \%$$

BKPSDM Kota Yogyakarta telah berhasil merealisasikan layanan kesejahteraan pegawai yang diselesaikan tepat waktu dan telah sesuai dengan target Renstra 2024, yaitu sebesar **100 persen**

F. Persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN terdapat 4 tahapan pengelolaan kinerja, yakni:

1. Perencanaan kinerja;
2. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai;
3. Penilaian kinerja;
4. Tindak lanjut hasil penilaian kinerja.

Penilaian Kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai menggunakan aplikasi berbasis web Penilaian Kinerja Pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta. Selama tahun 2024, BKPSDM Kota Yogyakarta telah melaksanakan penyelesaian penilaian kinerja pegawai dengan aplikasi berbasis web untuk 5.535 ASN.

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Yogyakarta, BKPSDM telah memfasilitasi Aplikasi e-Kinerja BKN yang terhubung dalam Jogja Smart Service (JSS) untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai ASN, sesuai Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2023 tentang penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi e-Kinerja BKN sebagai panduan bagi instansi pemerintah dalam memanfaatkan sistem informasi

pengelolaan kinerja pegawai ASN seperti layanan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kedepannya aplikasi digunakan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Instansi pemerintah dapat mengunduh data penilaian kinerja pegawai secara periodik sesuai dengan kebutuhan melalui menu laporan, atau mengintegrasikan sistem pembayaran TPP dengan Aplikasi e-Kinerja di myasn.bkn.go.id

Selain itu terdapat aplikasi berbasis web E-PKP di JSS khusus mengukur kinerja PNS secara nyata, faktual, objektif bukan sekedar formalitas yang berkorelasi dengan pengembangan kompetensi, Karir PNS, pemberian penghargaan berupa TPP bagi PNS. Dalam pengelolaan kinerja PNS aplikasi tersebut memberikan kemudahan dalam pengelompokan dan kompilasi data kinerja pegawai secara berjenjang. Tahun 2024 BKPSDM Kota Yogyakarta telah melakukan fasilitasi dan menyelesaikan penilaian kinerja sejumlah 4709 PNS, dengan formulasi sebagai berikut

$$\textit{Persentase Penyelesaian Kinerja Pegawai} = \left(\frac{\textit{Jumlah Penilaian kinerja PNS yang diselesaikan}}{\textit{Jumlah Total PNS}} \right) x100\%$$

$$\textit{Persentase Penyelesaian Kinerja Pegawai} = \left(\frac{4709}{4709} \right) x100\%$$

$$= 100\ \%$$

G. Persentase ketepatan waktu menyelesaikan Pendidikan

Salah satu pengembangan kompetensi ASN melalui formal yang diatur Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri SIpil Pemerintah Kota Yogyakarta, bahwa tugas belajar dalam penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan biaya pendidikan ditanggung oleh penanggung biaya pendidikan, bukan atas biaya sendiri serta melalui proses seleksi yang dibuka untuk umum.

Bahwa Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar untuk program Strata 2 (S2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun, program pendidikan Strata 3 (S3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun, dan jangka waktu pelaksanaan tugas belajar untuk program pendidikan profesi dan/atau dokter spesialis disesuaikan dengan ketentuan dari perguruan tinggi/lembaga. Selanjutnya, jangka waktu pelaksanaan tugas belajar tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) semester dengan persetujuan Instansi.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui BKPSDM Kota Yogyakarta telah memfasilitasi Tugas Belajar sebanyak 6 ASN dan izin belajar untuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta sejumlah 170 PNS di sejumlah Universitas di Yogyakarta.

Pegawai yang mendapatkan beasiswa dari Lembaga Bantuan Pengelolaan Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan sebanyak 3 Orang terdiri dari 2 orang melaksanakan Tugas Belajar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan 1 orang di University of Melbourne Australia.

Pegawai yang mendapatkan beasiswa dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia sejumlah 2 orang dengan melaksanakan tugas belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penyandang beasiswa BAPPENAS berjumlah 1 orang pada Program Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Diponegoro Semarang. Pegawai yang lulus tugas belajar di Universitas Gadjah Mada sejumlah 1 orang sebagai Dokter Spesialis.

Peserta tugas belajar yang mengajukan usulan tugas belajar dan lulus tepat waktu ditahun 2024 sebanyak 1 orang. BKPSDM Kota Yogyakarta telah berhasil merealisasikan indikator ketepatan waktu menyelesaikan pendidikan sesuai dengan target Renstra, yaitu sebesar 100%.

$$\textit{Persentase ketepatan waktu menyelesaikan pendidikan} = \left(\frac{\textit{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan tepat waktu}}{\textit{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan}} \right) x100\%$$

$$\textit{Persentase ketepatan waktu menyelesaikan pendidikan} = \left(\frac{1}{1} \right) x100\%$$

$$= 100\ \%$$

H. Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pada tahun 2024 peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis ASN sebanyak 2656 orang dengan metode klasikal (tatap muka) dengan memanfaatkan teknologi informasi memungkinkan pengembangan teknis ASN dapat menjangkau ASN Pemerintah Kota Yogyakarta dengan metode daring sejumlah 10.561 ASN. Dari jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi tersebut terdapat 17 pegawai tidak lulus diklat pengadaan barang dan jasa.

Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan dihitung dari perbandingan antara Jumlah ASN yang lulus diklat dengan jumlah ASN yang mengikuti diklat. Formulasi indikator peningkatan kompetensi teknis ASN

$$\textit{Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan} = \left(\frac{\textit{Jumlah ASN yang lulus pendidikan pelatihan}}{\textit{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan}} \right) x100\%$$

adalah

Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan = $\left(\frac{2656}{2673}\right) x100\%$

= 99,36 %

Apabila dibandingkan dengan formulasi sasaran yaitu 20% persentase kelulusan diklat, maka hasilnya sebagai berikut. Kelulusan ASN yang mengikuti diklat = 20% x 99,3 = 19,88%

Perhitungan Capaian Kinerja Kinerja organisasi dengan formulasi :

20% pemenuhan penataan ASN + 10% jabatan fungsional yang terlayani + 15% ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian + 5% jumlah data ASN yang dikelola + 15% pelayanan kesejahteraan pegawai + 10% penyelesaian penilaian kinerja pegawai + 5% ketepatan waktu menyelesaikan pendidikan + 20% Kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Tabel III.101 Realisasi Per Indikator Sasaran Tahun 2024

Indikator Program	Formula Indikator Program (Outcome)	Realisasi sasaran Program(%)	Hasil Perhitungan Formulasi Indikator Sasaran PD (%)	Capaian sasaran Perangkat Daerah terhadap target Renstra (%)
Persentase pemenuhan penataan ASN	(Jumlah ASN yang tertata / umlah keseluruhan kebutuhan ASN yang akan ditata)100%	1307 (1~~103~~) 100 = 118,50	20 —) 118,50 100 = 23,7	(103,57 / ~~92,27~~) 100 = 112,24
Persentase JF yang terlayani	(Jumlah JF yang terlayani /)100% Jumlah JF yang mengajukan layanan	1217 (~~12~~ ~~1~~7 10) 0 = 100	10 (— / 10) 100 0 = 10	
Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah penyelesaian pelayanaan administrasi (kepegawaian yang tepat waktu /)100% Jumlah permintaan pelayanan	(2079) 100 2079 = 100	15 (— / 10) 100 0 = 15	
Persentase jumlah data ASN yang di kelola	(Jumlah data yang dikelola / 100% Jumlah data pegawai)	(5535) 100 5.535 = 100	5 (— / 10) 100 0 = 5	

Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai.	(Jumlah layanan kesejahteraan yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah pengajuan pelayanan kesejahteraan) 100%	(6070 / 6070) 100 = 100	15 (— / 10) 100 0 = 15	
Persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai	(Jumlah penilaian kinerja PNS yang terselesaikan / Jumlah total PNS) 100%	(4709 / 4709) 100 = 100	10 (— / 10) 100 0 = 10	
Persentase ketepatan waktu menyelesaikan pendidikan	(Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan tepat waktu / Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan) 100%	1 / 1) 100 = 100	5 (— / 100) 100 = 5	
Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan	(Jumlah ASN yang lulus diklat / Jumlah ASN yang mengikuti diklat) 100%	(2656 / 2673) 100 = 99,36	20 (— / 100) 99,36 = 19,87	
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	(Hasil Penilaian RB Inspektorat / Target RB n Tahun) 100%	**92,251 setara AA**	92,251 (—)100% 90 = 102,50	102,50

13. Urusan Keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai 2 {dua} sasaran Strategis dengan 3 program utama dengan formulasi sebagai berikut:

a. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja

Tabel III. 102 Sasaran strategis dan Indikator Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	MeningkatnyaAkuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan asset daerah	%	94,72	98,88	104,39
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp	706.603.687.940,00	842.865.622.059,51	119,28

b. Rumusan Indikator dan Formulasi Program

Tabel III. 103 Indikator dan Formulasi Program

Program	Indikator Program	Formula Program
Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran = Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%
	Persentase penyerapan belanja daerah	Persentase penyerapan belanja daerah = Realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%
	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik = Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%
Pengelolaan Baang MIlik DaerahPengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik = Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali
	Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian	(Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian / Realisasi pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian) x 100%
	Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar
	Nilai pendapatan Pajak Daerah	Nilai pendapatan Pajak Daerah

Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program dijabarkan dalam table berikut :

Indikator Program	Formula Indikator Program	Sumber data	Perhitungan	Target yang dihasilkan
Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran = Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%	-jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu : 4 dukumen -jumlah dokumen penganggaran : 4	(4:4) x 100%	100%
Indikator Program	Formula Indikator Program	Sumber data	Perhitungan	Target yang dihasilkan
Persentase penyerapan belanja daerah	Persentase penyerapan belanja daerah = Realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%	-realisasi belanja daerah tahun n -perencanaan belanja daerah tahun n	Perhitungan realisasi; 2.168.217.552.145 / 2.270.266.425.605 X 100%	95,50%
Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik = Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	-Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik : 39 - jumlah seluruh OPD : 41	(41:41) x 100%	100%
Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik =	Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan	(41:41) x 100%	100%

milik daerah kategori baik	Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali	barang milik daerah kategori baik : 38 jumlah seluruh OPD : 41		
Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian	(Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian / Realisasi pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian) x 100%	**13.**Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian **14.**Realisasi pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian	100%	113,03%
Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Rp16.000.000.000,-	Rp28.758.278.740,-
Nilai pendapatan Pajak Daerah	Nilai pendapatan Pajak Daerah	Nilai pendapatan Pajak Daerah	Rp481.723.900.000,-	Rp575.834.201.429,-

Analisis Capaian Kinerja Strategis ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis dapat diformulasikan dalam dua indikator kinerja, yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset meningkat serta peningkatan pajak daerah. Indikator sesuai kriteria spesifik, dapat dinilai,dan diukur, berorientasi pada hasil dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Strategis yang telah dicapai yaitu :

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah dengan indikator nilai pendapatan asli daerah tahun 2024 sebesar Rp 842.865.622.059,51 dari target pendapatan asli daerah yang merujuk pada Peraturan Wali Kota tentang Pergeseran Perubahan APBD Ketiga Tahun 2024 sebesar Rp 781.054.844.583,30 yaitu sebesar 107,92%.
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah, dengan indikator sasaran Penilaian audit eksternal dengan target renstra adalah Wajar dan capaian kinerjanya Wajar Tanpa Kecuali (WTP) dan telah meraih WTP ke 15(lima belas)
3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas, dengan target 95,12% telah terealisasi sebesar 95,12 atau dengan kata lain sudah memenuhi target 100%.
4. Optimalisasi pajak daerah dengan indikator realisasi pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp 575.834.201.429,00 dari target pajak daerah yang merujuk pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp 532.000.000.000,00 dengan capaian108,24%

Tabel III. 104 Realisasi Pajak Daerah
Berdasarkan Anggaran Perubahan APBD TA. 2024

No.	JenisPajak	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Reklame	6.500.000.000	8.610.341.390	132,47
2.	Pajak Air Tanah	4.000.000.000	4.101.912.273	102,55
3.	Pajak Bumi & Bangunan	118.000.000.000	125.590.296.203	106,43
4.	BPHTB	64.500.000.000	63.670.741.993	98, 71
5.	PBJT :	339.000.000.000	373.860.909.570	110,28
	PBJT-Makanan dan Minuman	85.000.000.000	91.034.025.025	107,10
	PBJT-Tenaga Listrik	58.000.000.000	61.629.024.898	106,26
	PBJT-Jasa Perhotelan	183.000.000.000	205.248.934.658	112,16
	PBJT-Jasa Parkir	3.000.000.000	3.313.081.769	110,44
	PBJT-Jasa Kesenian	10.000.000.000	12.635.843.220	126,36
	JUMLAH	**532.000.000.000**	**575.834.201.429**	108,24

1. Urusan Pemerintahan Umum

Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui 1 program penunjang dan 5 program utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel III. 105 Perjanjian Kinerja Eselon 3 dan Realisasi Tahun 2024

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A	A
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Meningkat	Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	82%	83,62%
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Partisipasi politik masyarakat meningkat	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	67%	74,34%
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Meningkat	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta	60%	71,05%

5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Meningkat	Persentase penanganan potensi konflik berbasis ekonomi, sosial, dan budaya	72%	84,03%
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah Meningkat	Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah	77%	94,17%

Program dan Penjelasan capaian Kinerja Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Dengan indikator program persentase pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan tercapai 83,62% dari target 82%. Adapun formula indikatornya adalah jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta dikali 100%. Pada tahun 2024 ini jumlah peserta yang ditingkatkan pemahamannya dan menjalani post test sebanyak 686 orang, sedangkan yang meningkat pemahamannya sebanyak 584. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah peserta yang menjalani post test sebanyak 730, dan yang meningkat pemahamannya 600 orang. Maka perhitungannya secara akumulatif adalah (600+584)/(686+730) x 100% = 83,62%. Hal ini dapat tercapai karena sinergi dengan stakeholder terkait yang baik, antus iasme masyarakat dalam mengikuti program, serta kinerja SDM yang baik dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan Ideologi Pancasila.

Secara umum, jumlah peserta yang disasar dalam program ini menurun dibandingkan tahun lalu, di mana tahun lalu jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan Pancasila sebanyak 730 orang sementara tahun ini sebanyak 686 orang. Pada tahun 2024, Badan Kesbangpol menerapkan langkah-langkah strategis guna memastikan kegiatan yang dilaksanakan tetap sesuai dengan prinsip netralitas dan menghindari potensi penunggangan kepentingan oleh pihak-pihak tertentu, dengan cara membatasi sejumlah kegiatan yang melibatkan banyak peserta. Pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

Selain melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan, dimulai dari tahun 2024 ini, Badan Kesbangpol melakukan upaya pengarusutamaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda melalui pembentukan dan pembinaan Paskibraka. Paskibraka mengajarkan disiplin, tanggung jawab, dan semangat nasionalisme yang sejalan dengan sila-sila Pancasila. Melalui

pelatihan dan pelaksanaan tugas sebagai pengibar bendera, anggota Paskibraka mencerminkan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial, serta memperkuat rasa cinta tanah air dan penghargaan terhadap keberagaman Indonesia. Paskibraka menjadi sarana efektif untuk memupuk karakter bangsa sesuai dengan ideologi Pancasila.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Dengan indikator Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik, dan formula: jumlah lembaga yang disasar pendidikan politik dibagi dengan jumlah lembaga yang terdata di Bakesbangpol Kota Yogyakarta dikalikan 100%. Pada tahun 2024 beberapa lembaga yang disasar pendidikan politik antara lain SMA/SMK, Kampung, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok seni. Dari data yang didapatkan, sampai dengan tahun 2024 didapatkan jumlah lembaga yang telah disasar pendidikan politik sejumlah 252 lembaga dari 339 jumlah lembaga yang terdaftar. Sehingga didapatkan 252/339) x 100% = 74,34% dari target semula 67%. Maka realisasi program ini telah mencapai 110,95%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 merpakan tahun Pemilu. Perhatian publik terhadap pendidikan politik semakin meningkat karena hal tersebut, sehingga antusiasme masyarakat menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi faktor pendorong capaian program Pendidikan Politik.

Selain melalui pendidikan politik, persiapan yang dilakukan dalam rangka menyambut Pemilu 2024 adalah melalui Sosialisasi dan Deklarasi Pilkada Damai di tingkat Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk:

a. Mengedukasi Masyarakat: Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya Pilkada, hak-hak mereka sebagai pemilih, dan tanggung jawab mereka dalam proses ini. Selain itu, diharapkan informasi mengenai calon-calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta platform mereka, sehingga pemilih dapat membuat keputusan yang cerdas.
b. Meningkatkan Kesadaran akan Pilkada yang Damai: Pilkada sering kali dapat menjadi sumber potensi konflik. Melalui deklarasi pemilu damai, diharapkan kesadaran dan komitmen untuk menjaga pemilu yang damai, tanpa kekerasan fisik atau verbal.
c. Mendorong Partisipasi Aktif: Pilkada yang demokratis memerlukan partisipasi aktif dari semua warga negara, selain itu juga untuk mendorong warga untuk terlibat dalam diskusi politik yang sehat dan berpendidikan.
d. Membangun Kesepahaman Bersama: Pilkada sering kali menghadirkan berbagai pandangan dan pendapat, maka hal ini dapat difasilitasi melalui dialog yang sehat dan mendukung, di mana

berbagai pihak dapat saling mendengarkan dan mencari kesepemahaman bersama tentang isu-isu penting.

e. Mengurangi Potensi Konflik: Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesbangpol, dengan menyebarkan pesan damai dan mengedukasi masyarakat tentang pelaksanaan pilkada damai, diharapkan potensi konflik selama pemilu dapat diminimalisir.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta, yang diformulasikan dengan jumlah organisasi yang teregister dan terdaftar di Kota Yogyakarta dibagi jumlah organisasi yang terdata di Kota Yogyakarta dikalikan 100%. Pada tahun 2024 ini jumlah ormas yang terdata di Badan Kesbangpol sejumlah 152 dan yang terdaftar dan teregister sebanyak 108. Sehingga didapatkan (108 / 152) x 100% = 71,05 dari target 60%. Target program ini tercapai karena upaya jemput bola yaitu aktif menghubungi dan mendatangi ormas yang sudah terdata, namun tidak jarang nomor yang dihubungi maupun alamat yang didatangi nihil, atau sudah berpindah alamat. Selain itu, Badan Kesbangpol juga memberikan apresiasi untuk ormas-ormas yang aktif dan berprestasi melalui Ormas Award. Strategi untuk mengatasi faktor penghambat tercapainya sasaran ini adalah dengan cara lebih proaktif dalam mendatangi dan menggandeng Ormas dalam kegiatan Badan Kesbangpol. Dengan strategi tersebut, diharapkan ormas di Kota Yogyakarta akan merasa bahwa kehadirannya dibutuhkan dan dapat bermanfaat bagi Kota Yogyakarta sehingga mau mendaftarkan dirinya. Secara keseluruhan, jumlah ormas terdata mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan apabila ormas yang sebelumnya telah terdata, dan setelah dilakukan pendataan ulang namun ormas tersebut sudah tidak aktif atau berpindah alamat di luar Kota Yogyakarta, maka ormas tersebut dinyatakan dihapus dari database ormas yang terdata di Badan Kesbangpol.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya

Indikator untuk mengukur keberhasilan dari program ini yaitu Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya dengan formula potensi konflik berbasis sosial, ekonomi dan budaya yang tertangani dibagipotensi konflik yang terjadi dikali 100%. Target program ini telah tercapai 84,03% dari target 72% atau tercapai 118,42% dengan perhitungan sebagai berikut: potensi konflik berbasis ekonomi, sosial budaya yang tertangani sebanyak 121 kasus, sedangkan total seluruh potensi konflik berbasis ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi sebanyak 144 kasus. Sehingga (121/144) x 100% = 84,03%. Target ini dapat tercapai karena faktor sinergi antar OPD, Instansi Vertikal dan masyarakat dalam koordinasi serta upaya penanganan konflik berbasis ekososbud cukup baik, sehingga dapat meredam potensi konflik berbasis sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan hal yang menjadi penghambat adalah faktor masih kurangnya kemampuan kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi setiap potensi konflik/ konflik, serta penanganan konflik. Maka dari itu, Badan Kesbangpol menyelenggarakan Bimtek Penanganan Konflik untuk anggota FKDM dan tokoh masyarakat sebagai upaya tindak lanjut dari permasalahan yang ada.

Capaian indikator program ini menunjukkan hasil yang meningkat dibandingkan tahun lalu. Potensi konflik berbasis sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi mengalami peningkatan sejalan dengan kemampuan penanganan potensi konfliknya.

Selain penanganan potensi konflik berbasis ekonomi, sosial dan budaya, program ini juga berfokus pada bagaimana upaya memperkuat fondasi masyarakat agar lebih tahan terhadap pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba. Bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta, Badan Kesbangpol menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) di Kelurahan Pandeyan, Sorosutan, Brontokusuman, Keparakan, Tegalrejo, Bener, Terban, Wirogunan, dan Giwangan. Program ini dilaksanakan sebagai respons atas data yang menunjukkan peningkatan prevalensi penyalahgunaan NAPZA di Yogyakarta. Pada tahun 2022, DIY berada di peringkat keenam dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sebagian besar penyalahguna adalah mahasiswa dari luar kota, dengan narkoba jenis ganja dan pil dari luar negeri menjadi yang paling banyak beredar. Kelurahan Bersinar menargetkan lingkungan kelurahan untuk menciptakan wilayah bebas NAPZA melalui edukasi, pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini juga melibatkan kolaborasi antara penggiat anti-napza, perangkat lurah, serta relawan intervensi berbasis masyarakat.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator untuk mengukur ketercapaian program ini adalah persentase penyelesaian potensi konflik sosial yang terjadi wilayah, dari yang ditargetkan 77% dapat tercapai 94,17%. Untuk formulasi perhitungan didapatkan dari jumlah potensi konflik sosial yang tertangani dibagi dengan jumlah potensi konflik sosial yang terjadi. Data ini bersumber dari SISDASISCAM (Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik) dan dirangkum dari 14 kemantren yang ada di Kota Yogyakarta. Tahun 2024 ini tercatat sejumlah 120 potensi konflik, dan sebanyak 113 yang dapat tertangani, sehingga (113/120) x 100% = 94,17%, atau merupakan 122% dari yang telah ditargetkan. Hal ini didukung oleh kerjasama dari berbagai pihak seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FORKOPIMDA dan juga dukungan dari masyarakat Kota Yogyakarta. Dalam pencapaian target program ini, masih terdapat kendala seperti adanya isu aktivitas Aliansi Mahasiswa pada satu suku/etnis yang masih menjadi salah satu penyumbang terbanyak konflik yang belum tertangani.

Jumlah potensi konflik sosial yang terjadi wilayah pada tahun 2024 ini menurun dibandingkan tahun lalu, di mana pada tahun 2023 terjadi 148 konflik sosial, sementara pada tahun 2024 terjadi 120 konflik sosial. Selain isu pada satu suku/etnis, hal yang masih menjadi permasalahan besar adalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Maka salah satu langkah yang diambil adalah dengan memberikan program peningkatan kapasitas kepada Guru Bimbingan Konseling terkait kewaspadaan dini terhadap kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Dengan meningkatnya kemampuan kewaspadaan din, diharapkan guru dapat mengenali tanda-tanda atau indikasi awal kekerasan seksual yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah, baik pada siswa maupun antar sesama guru. Selain itu, juga untuk memberikan dukungan yang tepat kepada korban jika kekerasan tersebut sudah terjadi. Dan yang paling utama, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh komunitas sekolah melalui guru BK, tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, sehingga terwujud budaya saling menjaga dan melindungi.

Untuk menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan bebas dari ancaman kekerasan dalam rangka menjaga kondusivitas daerah, Badan Kesbangpol juga menyelenggarakan sosialisasi penanggulangan ekstrimisme dan radikalisme berbasis kekerasan dengan tema “Pemahaman dan Pencegahan Ideologi Ekstrimisme dalam Konteks Beragama”. Dalam kegiatan ini disampaikan strategi moderasi beragama untuk meminimalisir ekstrimisme dalam kehidupan beragama,

pemetaan kerawanan ekstrimisme di DIY, dan langkah-langkah pencegahan dan penanganan ekstrimisme.

3.2. Capaian akuntabilitas kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan secara berkala secara triwulanan dan tahunan dengan sistem desk timbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui pembandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi.

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2024 yang diperbandingkan dengan target Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut ini :

1. Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah. Penetapan sasaran dan indikatornya tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 Angka rata-rata lama sekolah di kota Yogyakarta pada tahun 2024 adalah sebesar 12,11 tahun dari target 11,12 tahun dengan persentase capaian sebesar 100%.
2. Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pariwisata, dengan indicator Rata-Rata belanja wisatawan yang merupakan indikator kinerja baru yang menggantikan indikator kinerja sebelumnya yaitu Lama Tinggal Wisatawan (*Length of Stay*) sesuai rekomendasi BPKP yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor PE.09.03/LHP-27/PW12/3/2024. Rata-rata belanja wisatawan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 menurut kajian Dinas Pariwisata per periode Januari hingga Oktober 2024 mencapai Rp2.245.736. Nilai ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000, sehingga capaian kinerjanya mencapai 112,29%.
3. Sasaran 3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan daerah tercermin dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan jumlah barang dan jasa

yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pada tahun 2024 pemerintah kota Yogyakarta menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,08% - 5,76% dan telah tercapai sebesar 5,05% dengan persentase capaian 99,41%.

4. Sasaran 4 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat, Sasaran ini menggunakan tolok ukur angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.. Angka kemiskinan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 sebesar 6,26% dari target yang telah ditetapkan sebesar 6,13% - 6,48% dengan persentase capain 100%.
5. Sasaran 5 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Pengukuran sasaran ini menggunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yakni persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Pengukuran persentase kesesuaian pemanfaatan pola ruang di Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara membandingkan luas rencana dalam dokumen RDTR dengan luas eksisting pada tahun 2024, sehingga menghasilkan nilai sebesar 85,26% dari target sebesar 85,23% dengan persentase ketercapainnya pada tahun 2024 sebesar 100,04%.
6. Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dapat diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target nilai IKLH yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 55,19 dan tercapai sebesar 55,53 dengan persentase capaian 100,62%
7. Sasaran 7 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dengan indikator Indeks Keberdayaan Masyarakat. Pada tahun 2024 indeks keberdayaan masyarakat yang diperoleh adalah sebesar 81,85 dari target 78,00dengan persentase capaian 104,94%
8. Sasaran 8 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan, Untuk mengukur sasaran kedelapan ada 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan yakni nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun rata-rata capaian kedua indikator sasaran ini adalah 100% dengan kategori predikat sangat tinggi, yaitu nilai A untuk akuntabilitas kinerja pemerintah dan predikat WTP bagi Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.
9. Sasaran 9 Menurunnya Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat, sasaran ini diukur melalui indikator menurunnya angka kriminalitas dan menurunnya jumlah pelanggaran perda. Adapun realisasi terhadap indikator menurunnya angka kriminalitas yaitu terdapat 637 kasus kriminalitas sepanjang tahun 2024 dari target sebanyak 700 kasus kriminalitas, dengan persentase capaian 109%. Sedangkan untuk indikator menurunnya

jumlah pelanggaran perda terdapat 2.506 pelanggaran dari target sebanyak 4.170 pelanggaran perda dengan presentase capaian 139,90%.

10. Sasaran 10 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Pada tahun 2024 nilai indeks pengembangan insfrasruktur wilayah terealisasi sebesar 88,72 dari target sebesar 92,13 dengan capaian 96,30%.
11. Sasaran 11 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, sasaran ini diukur dengan indikator angka harapan hidup, pada tahun 2024 angka harapan hidup dikota Yogyakarta mencapai 75,73 tahun dari target yang telah ditetapkan yaitu 75,53 tahun, dengan demikian capaian saasaran ini mencapai 100,26%.

3.3.Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan kebijakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III. 106 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Kebijakan/Masalah yang Diselesaikan
1	Penanganan Darurat Sampah	Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta No. 600.1.17.3/4438/SE/2023	Kebijakan Penanganan Darurat Sampah di Kota Yogyakarta dimaksudkan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan di wilayah Kota Yogyakarta agar tetap bersih, nyaman dan asri di tengah kondisi darurat Penutupan Pelayanan TPA Regional Piyungan. Pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Yogyakarta dilakukan secara masif baik kegiatan pengurangan sampah maupun penanganan sampah. Pengurangan sampah anorganik dengan program Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA), Gerakan MBAH DIRJO (Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Jogja) yang bertujuan untuk mengurangi sampah organik, serta pemilihan sampah di level sumber rumah tangga, unit usaha, perhotelan, dll.
2	Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Maksud ditetapkannya kebijakan pedoman pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat adalah perlu dilakukan penataan ulang peran, tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan untuk meningkatkan efektifitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
3	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta	Tujuan ditetapkannya kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta adalah untuk acuan pembangunan Kota Yogyakarta periode 2025-2045 dengan menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, dan terarah sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Kebijakan/Masalah yang Diselesaikan
4	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kebijakan penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik yang ditetapkan pada regulasi ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengelolaan air limbah domestik agar dapat mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman serta menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan unggul.
5	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Maksud ditetapkannya kebijakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat dengan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman gangguan keamanan serta mewujudkan kota yang nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan untuk memberdayakan masyarakat dengan pedoman pada nilai keistimewaan. Secara lebih rinci terkait ketentuan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang meliputi tertib sosial, tertib lingkungan, tertib usaha, tertib bangunan, dan tertib ruang milik jalan.
6	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Penetapan kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk meningkatkan pendayagunaan dan perlindungan tenaga kerja, melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, memperluas dan menjamin kesamaan kesempatan kerja, kesejahteraan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan perkembangan industri dan perubahan sosial ekonomi.
7	Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah	Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dengan menyesuaikan regulasi terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika lingkungan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan.
8	Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain	Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain	Maksud disusunnya tata cara kerjasama badan layanan umum daerah dengan pihak lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kerja sama oleh UPT BLUD dengan pihak lain dengan berfokus pada peningkatan pelayanan, optimalisasi sumber daya termasuk pemanfaatan aset daerah dan kemampuan sumber daya manusia dengan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
9	Pedoman Pengendalian Kecurangan	Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan	Maksud dari kebijakan ini adalah sebagai upaya pencegahan, pendeteksian, dan penanganan kecurangan, dalam pengelolaan keuangan daerah untuk tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
10	Penyelenggaraan Pengembangan	Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang	Penetapan landasan dan pedoman penyelenggaraan pengembangan anak usia dini

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Kebijakan/Masalah yang Diselesaikan
	Anak Usia Dini Holistik Integratif	Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	holistik integratif dimaksudkan untuk menjamin hak anak atas tumbuh kembang optimal, peningkatan kesehatan, rangsangan, pendidikan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan kesejahteraan. Kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia enam bulan sangat menentukan peningkatan derajat kesehatan, status gizi, kecerdasan dan keceriaan, kematangan emosional, spiritual, dan kesejahteraan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
11	Pedoman Permohonan Dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan	Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Permohonan Dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan	Maksud dari ditetapkannya kebijakan ini adalah menyesuaikan ketentuan dengan regulasi yang lebih tinggi, perkembangan zaman, dan perubahan sosial yang meliputi penapisan dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan dan perubahan persetujuan lingkungan, teknis penyimpanan limbah B3, pengawasan, pembinaan, dan pelaporan, serta pendanaan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola lingkungan hidup, meningkatkan kepastian hukum, dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar lingkungan yang berlaku. Sehingga tercipta lingkungan yang aman dan nyaman di Kota Yogyakarta.
12	Kampung Keluarga Berkualitas	Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kampung Keluarga Berkualitas	Maksud ditetapkannya kebijakan kampung keluarga berkualitas adalah untuk menetapkan langkah yang terintegrasi dan konvergen dalam pembentukan dan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga.
13	Magang	Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Magang	Maksud disusunnya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan mengatasi kesenjangan kompetensi pegawai negeri sipil serta memberikan praktik kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
14	Peraturan Pemberian Insentif Dan Kemudahan Berusaha	Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pemberian Insentif Dan Kemudahan Berusaha	Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mengatur pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan usaha kepada masyarakat dan investor dalam rangka menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15	Pasar Rakyat	Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pasar Rakyat	Maksud ditetapkannya regulasi ini adalah untuk pemberdayaan pasar rakyat, peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pasar rakyat, dan mendorong pembangunan perbaikan fasilitas pasar rakyat untuk pengelolaan pasar yang lebih efektif dan profesional sehingga dapat meningkatkan peran pasar rakyat sebagai pusat perekonomian lokal.
16	Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi	Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan	Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah memberikan landasan hukum, acuan, pedoman, dan panduan pengelolaan dan pemanfaatan TIK

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Kebijakan/Masalah yang Diselesaikan
	Informasi Dan Komunikasi	Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	dalam rangka pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE untuk meningkatkan keselarasan dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan publik.
17	Perpustakaan	Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Perpustakaan	Tujuan ditetapkannya regulasi ini adalah untuk menetapkan standar dan prosedur dalam pengumpulan, pengelolaan dan pemeliharaan bahan pustaka, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga perpustakan, serta mendorong digitalisasi dan integrasi sistem informasi perpustakaan untuk kemudahan akses, dengan harapan perpustakaan di Yogyakarta dapat berfungsi optimal sebagai pusat informasi, pendidikan, dan rekreasi bagi masyarakat.
18	Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Yogyakarta	Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Yogyakarta	Tujuan ditetapkannya kebijakan ini adalah menyediakan landasan hukum bagi pelaksanaan PPDB di Kota Yogyakarta, sehingga proses penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel sehingga proses PPDB di Kota Yogyakarta dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan adil, memastikan pendidikan sebagai hak masyarakat terpenuhi, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta.
19	Batas Wilayah Dan Kelurahan Di Kemantren Dan Kelurahan Di Kemantren Mantrijeron, Wirobrajan, Jetis, Dan Gondokusuman	Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2043 Tentang Batas Wilayah Dan Kelurahan Di Kemantren Dan Kelurahan Di Kemantren Mantrijeron, Wirobrajan, Jetis, Dan Gondokusuman	Maksud ditetapkannya kebijakan ini adalah untuk menjamin tertib administrasi pemerintah dan memberikan kejelasan terhadap batas wilayah, meningkatkan koordinasi, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kemantren, dan Kelurahan di Kemantren Mantrijeron, Wirobrajan, Jetis, dan Gondokusuman Kota Yogyakarta.
20	Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan	Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan	Maksud dari kebijakan ini adalah sebagai pedoman, tata cara, paduan dalam pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan dan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.
21	Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga (BOSDA PPO)	Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga	Tujuan disusunnya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan BOSDA PPO untuk pemenuhan pembinaan dan pengembangan olahraga pada satuan pendidikan sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan masyarakat yang sehat, bugar dan sejahtera.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Kebijakan/Masalah yang Diselesaikan
22	Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan	Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan	Maksud dari regulasi ini adalah untuk meringankan beban finansial peserta didik dari keluarga kurang mampu tanpa hambatan biaya, diharapkan tidak ada peserta didik terhenti pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Sehingga memastikan akses pendidikan yang merata dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Yogyakarta.
23	Pemberian Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan	Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan profesi bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di Kota Yogyakarta.
24	Penerapan Peraturan Zonasi	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penerapan Peraturan Zonasi	Maksud dari kebijakan ini adalah mengatur pemanfaatan ruang di Yogyakarta secara efektif dan efisien dengan penetapan ketentuan pandangan bebas, Garis Sempadan Bangunan (GSB), orientasi dan dominasi fungsi pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang pada persil < 40 m2, rekomendasi pelampauan ketentuan pemanfaatan ruang, dan ketentuan Koefisien Tapak Bangunan (KTB) pada bangunan dengan ketinggian > 10 m sehingga terciptanya lingkungan yang tertata dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta.
25	Pembinaan Jasa Konstruksi	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Pembinaan Jasa Konstruksi	Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan jasa konstruksi di daerah dalam rangka menciptakan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi yang berkualitas dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.
26	Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas	Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas	Maksud ditetapkannya kebijakan ini adalah untuk mewujudkan jaminan layanan pendidikan pada seluruh jalur, jenjang, dan jenis pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas agar mendapatkan akses yang setara dalam pendidikan yang layak dan berkualitas serta sesuai dengan hak peserta didik penyandang disabilitas sebagai warga negara.
27	Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai	Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai	Penetapan kebijakan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengurangi timbunan plastik sekali pakai di wilayah Kota Yogyakarta untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, indah, dan sehat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan menekan laju timbulan sampah yang berasal dari produk dan/atau kemasan plastik sekali pakai.
28	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif	Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengenaan	Maksud ditetapkannya kebijakan ini adalah untuk acuan penyelenggaraan pengenaan sanksi administratif yang mengakibatkan pencabutan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Kebijakan/Masalah yang Diselesaikan
	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh pemerintah daerah sebagai bentuk mewujudkan tertib Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Yogyakarta dan meningkatkan kualitas operasional dan kepatuhan regulasi pada pelaku usaha.
29	Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Tahun 2023-2026	Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Tahun 2023-2026	Penetapan kebijakan ini dimaksudkan untuk melaksanakan pembangunan ketahanan pangan dan gizi yang dilakukan melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor dalam meningkatkan ketahanan pangan, konsumsi, dan keamanan pangan, pangan dan gizi serta kesehatan masyarakat dan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pemenuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman secara merata di seluruh Kota Yogyakarta.
30	Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Kotabaru	Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Kotabaru	Maksud ditetapkannya kebijakan ini adalah untuk mengatur secara lebih rinci terkait penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Kotabaru sebagai Kawasan Cagar Budaya dengan citra Kawasan *Garden City* sebagai regulasi untuk menciptakan tata ruang dan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
31	Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Malioboro	Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Malioboro	Kebijakan yang ditetapkan dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan dan penataan kawasan secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan Kawasan Malioboro sebagai pusat pelayanan perekonomian dengan daerah yang berkarakter dan beridentitas sebagai Cagar Budaya dengan pendekatan yang berbasis humanis dalam penataan bangunan dan lingkungan berkelanjutan.
32	Ketentuan Umum Retribusi Daerah	Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah	Penetapan kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatur secara lebih rinci mengenai ketentuan umum retribusi daerah yang meliputi jenis, tarif, mekanisme pemungutan retribusi, dan optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan retribusi yang lebih efisien dengan melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu yang digunakan dalam melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
33	Ketentuan Umum Pajak Daerah	Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah	Kebijakan yang ditetapkan dimaksudkan untuk menetapkan berbagai ketentuan terkait pajak daerah dengan berkontribusi wajib yang bersifat memaksa untuk kemakmuran rakyat, melibatkan subjek, wajib pajak, dan penanggung pajak. Jenis pajak yang diatur meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Kebijakan/Masalah yang Diselesaikan
			Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
34	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Maksud ditetapkannya kebijakan ini adalah untuk memberikan kepastian dan dasar hukum tentang LKK, memelihara dan melestarikan nilai kegotongroyongan, mengembangkan peran masyarakat secara optimal dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Serta ditetapkannya kebijakan ini dengan tujuan untuk melakukan optimalisasi peran dan tata kelola LKK, mempercepat terwujudnya pembangunan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan urusan pemerintahan.
35	Pedoman Pemberian Santunan Kematian Secara Elektronik	Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Secara Elektronik	Kebijakan yang ditetapkan dimaksudkan untuk memberikan santunan kematian secara elektronik kepada ahli waris yang ditetapkan sebagai keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial dengan memberikan perhatian dan kepedulian dalam meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia. Dengan melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melalui Sistem Layanan Santunan Kematian Berbasis Digital yang disebut Sankem Berbagi yaitu aplikasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan Santunan Kematian secara elektronik.
36	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan	Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan	Maksud ditetapkannya kebijakan terkait jaminan sosial dan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan adalah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan dengan memberikan bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam upaya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pekerja rentan dalam bekerja dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pekerja rentan.
37	Tarif Layanan Non Medis Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Non Medis Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	Kebijakan yang ditetapkan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan mencerdaskan masyarakat secara optimal dan efektif melalui pusat kesehatan masyarakat dengan pengembangan pelayanan non medis sebagai strategi pengembangan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia di bidang kesehatan.
38	Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta	Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta	Maksud ditetapkannya kebijakan pada rencana aksi pengelolaan warisan dunia sumbu filosofi Yogyakarta untuk mengatur secara lebih rinci terkait pedoman dalam melakukan pelestarian dan pengelolaan terhadap sumbu filosofi Yogyakarta sebagai warisan dunia oleh *United*

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Kebijakan/Masalah yang Diselesaikan
			Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization dengan nama *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks* secara optimal diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.
39	Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045	Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045	Kebijakan yang ditetapkan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penduduk tumbuh seimbang, manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi, keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, dan menciptakan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan kependudukan yang mengakomodir peran serta berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat dalam bentuk *Grand Design* pembangunan kependudukan.
40	Pedoman Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Maksud ditetapkannya kebijakan ini adalah untuk memperoleh data yang sesuai dengan fakta riil penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial yang diperlukan untuk memberikan jaminan perlindungan sosial bagi keluarga di Kota Yogyakarta.
41	Pelayanan Kelurahan Dan Kemantren Berbasis Elektronik	Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Pelayanan Kelurahan Dan Kemantren Berbasis Elektronik	Kebijakan yang ditetapkan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kecepatan, ketepatan, keakuratan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan inovasi publik di wilayah kelurahan dan kemantren dengan melaksanakan pelayanan secara elektronik.
42	Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Pakualaman	Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Pakualaman	Maksud ditetapkannya kebijakan ini bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan pembangunan kawasan Pakualaman sebagai cagar budaya yang selaras dengan rencana tata ruang daerah, serta memberikan pedoman untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, memperkuat karakter kawasan sebagai pusat kebudayaan, serta menjadikannya area yang nyaman dan layak huni bagi masyarakat, sehingga mampu merepresentasikan nilai filosofi dan sejarah Yogyakarta secara berkelanjutan.
43	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Laksda Adisucipto	Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Laksda Adisucipto	Kebijakan yang ditetapkan dimaksudkan untuk pengembangan tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan di Koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Laksda Adisucipto yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan sebagai dasar acuan perizinan pemanfaatan ruang serta memberikan panduan rancangan kota dan penataan lingkungan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Kebijakan/Masalah yang Diselesaikan
			pada Koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Laksda Adisucipto.
44	Rencana Aksi Daerah Upaya Kesehatan Jiwa Tahun 2024-2028	Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Upaya Kesehatan Jiwa Tahun 2024-2028	Maksud ditetapkannya kebijakan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Jiwa dan perencanaan anggaran bagi kegiatan pelayanan yang efektif yang dilaksanakan oleh berbagai sektor untuk mengatasi permasalahan Kesehatan Jiwa di Daerah. Serta bertujuan menciptakan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengurangi beban penyakit yang diakibatkan oleh masalah dan gangguan jiwa, memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK dan ODGJ secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya Kesehatan Jiwa.
45	Manajemen Strategis Jogja Aman Kebakaran	Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Manajemen Strategis Jogja Aman Kebakaran	Maksud ditetapkannya kebijakan ini untuk acuan dalam meningkatkan ketahanan dan keselamatan kebakaran lingkungan di Daerah, membangun komitmen dan sinergi peran *stakeholder* dalam SKKL Daerah, meningkatkan indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran serta menurunkan tingkat risiko kebakaran di Daerah.
46	Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Kebijakan yang ditetapkan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah pertama dengan memberikan insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai perwujudan hak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
47	Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Maksud ditetapkannya kebijakan ini untuk memberikan pedoman teknis dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta, memastikan bahwa kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
48	Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah pertama dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat, dengan harapan masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih mudah memperoleh hunian layak, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

3.4.Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Laporan tentang tindak lanjut Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III. 107 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2023

Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya pemenuhan RTHP dengan menyesuaikan prioritas dan anggaran. 2. Pengadaan RTHP agar mempertimbangkan akses jalan bagi masyarakat.	1. Sosialisasi masih terus dilakukan dengan mendasarkan pada Perwal no.17 tahun 2021 mengenai penyelenggaraan RTHP yang memprioritaskan penggunaan lahannya dominan untuk peningkatan kualitas tutupan vegetasi dan fungsi tambahan lainnya untuk tempat interaksi masyarakat yang nyaman dan layak. Urutan prioritas ini masih kami laksanakan dan masih kami sosialisasikan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan menjadi fungsi non RTH. 2. Akses jalan bagi masyarakat akan dipertimbangkan, sepanjang lokasi dan luasan lahan mendukung, dan sesuai dengan proporsi minimal yang diperbolehkan dalam regulasi yang ada.	1. Melaksanakan sosialisasi baik secara formal maupun non formal pada saat pengawasan dilakukan atau di forum-forum tertentu. Muatan materi yang disampaikan berupa amanat dari perwal 17/2021 tentang penyelenggaraan RTHP yang baik, termasuk pada tujuan utama RTHP untuk peningkatan kualitas tutupan vegetasi dan meminimalisir alih fungsi RTH menjadi non RTH. 2. Akses jalan bagi masyarakat sudah diupayakan dan dipertimbangkan pada saat proses pembelian lahan. 3. Penataan desain RTHP dengan membuat DED berdasarkan aturan yang ada dalam Perwal 17/21 sesuai dengan komposisinya, dan juga mempertimbangkan usulan warga sekitar yang disampaikan pada FGD/sosialisasi, sepanjang kepentingan-kepentingan tersebut masih sejalan dengan regulasi yang ada. 4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan wilayah setempat untuk menyusun solusi bersama jika terdapat permasalahan yang terjadi di RTHP.	1. Meminimalisir alih fungsi lahan karena masyarakat sudah teredukasi untuk mempertahankan fungsi utama RTHP sebagai tempat pengembangan tutupan vegetasi dalam rangka peningkatan kualitas iklim mikro dan udara di Kota Yogyakarta. 2. Pembangunan RTHP yang mematuhi regulasi yang ada tanpa mengabaikan masukan/usulan dari warga sepanjang usulan tersebut masih sejalan dengan amanat pada Perwal 17/21.
1. Permasalahan pengolahan sampah agar diberi ruang untuk pembahasan khusus dengan masyarakat, sosialisasi masterplan pengelolaan sampah	1. Pemberian sosialisasi terhadap permasalahan sampah sudah dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2024 di 45 Kelurahan, sosialisasi meliputi ;	1. Sosialisasi dan edukasi dalam pengelolaan persampahan dilaksanakan pada Tahun 2024 melibatkan masyarakat, sekolah, dan pelaku/ pegiat pengelolaan	1. Memperluas akses informasi terkait pengelolaan persampahan

Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
kepada masyarakat, dan tindaklanjutnya. 2. mewujudkan sampah sebagai sumber tenaga, bisa bekerjasama dengan pihak ketiga menjadikan sampah menjadi barang bermanfaat. 3. Dinas Lingkungan Hidup agar melengkapi AMDAL dan Andalalin TPS3R Kranon dan Karangmiri. 4. Mempercepat realisasi proses hilirisasi pengelolaan sampah dengan mengembangkan TPS3R menjadi TPST.	a. Pemberitahuan kondisi sampah di kota Yogyakarta pasca penutupan TPA Piyungan; b. Rencana pengolahan sampah kota Yogyakarta melalui TPS3R. 2. Dalam mewujudkan Pengelolaan sampah kota Yogyakarta disamping melalui pengembangan TPS3R, upaya Kerjasama dengan pihak ketiga dengan kontrak melalui e-katalog telah dilakukan untuk mengatasi sampah residu dari TPS3R. 3. Untuk TPS3R Kranon dan Karangmiri menggunakan dokumen SPPL 4. Pengelolaan sampah dengan mengembangkan 3 lokasi TPS3R sampai dengan saat ini mampu mengolah sampah ±130 ton perhari, pengolahan sampah TPS3R akan lebih dimaksimalkan setelah Pembangunan TPS3R Kranon dan Karangmiri selesai 100%.	sampah di wilayah seperti Forum Bank Sampah dan Fasilitator Kelurahan. Edukasi meliputi pengurangan, pemilahan, penyaluran, serta pengolahan sampah sejak dari sumber serta rencana pengelolaan sampah Kota Yogyakarta melalui Unit Pengolahan Sampah. 2. DLH menjalin kerjasama dengan mitra swasta selama bulan April - Desember 2024 untuk melaksanakan pengelolaan sampah residu guna meningkatkan kinerja pengolahan sampah. Selain itu, DLH mengolah sampah menjadi material RDF yang selanjutnya dimanfaatkan oleh offtaker sebagai bahan bakar alternatif salah satunya PT. Solusi Bangun Indonesia 3. Dokumen lingkungan berupa SPPL untuk UPS Kranon telah terbit pada 14 Mei 2024 serta SPPL untuk UPS Karangmiri telah terbit pada 14 Mei 2024 4. Kota Yogyakarta melaksanakan pengolahan sampah melalui pengembangan unit pengolahan sampah meliputi: • UPS Nitikan dengan kapasitas 55 ton/hari • UPS Kranon dengan kapasitas 25 ton/hari • UPS Karangmiri dengan kapasitas 15 ton/hari • UPS Sitimulyo dengan kapasitas 20 ton/hari Untuk melengkapi proses pengolahan sampah, Pemkot Yogyakarta melakukan pengadaan Insinerator yang ditempatkan di UPS	

Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Giwangan dan UPS Sitimulyo	
5. Meningkatkan realisasi belanja modal, terutama yang langsung berdampak pada masyarakat.	Terdapat dinamika dalam proses pengadaan: 1. Belanja Modal Mesin Inseniator pada Dinas Lingkungan Hidup, sebesar lima milyar lima ratus juta rupiah mengalami gagal proses pelelangan karena pihak ketiga tidak memenuhi TKDN dan tidak ada kesepakatan dalam negosiasi teknis khususnya dalam waktu penyelesaian pekerjaan. 2. Pengadaan barang sesuai dengan harga di portal e-katalog dan kesepakatan lelang 3. Pengadaan *Instalasi Suction Sentral*, belanja modal peralatan sebesar lima ratus juta rupiah tidak terjadi kesepakatan saat negosiasi waktu pelaksanaan (Rumah Sakit Umum Daerah) 4. Belanja Modal Pembangunan Gedung Hijau Rusun Bener senilai Rp 60.102.600,00 tidak terealisasi karena dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan Dana Reward Pengelolaan Rusun Terbaik 2 (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) 5. Upaya yang telah dilakukan untuk percepatan realisasi belanja diantaranya dilakukan Pembinaan penatausahaan keuangan rutin bulanan dengan rekonsiliasi serta memberikan arahan dan pendampingan melalui Surat Edaran Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023,	1. Dilakukan inventarisasi lebih awal untuk barang barang yg memerlukan ijin impor dan barang barang ber TKDN sehingga apabila barang tidak ditemukan di pasaran masih dimungkinkan dilakukan penyesuaian baik melalui pergeseran anggaran maupun melalui perubahan APBD. 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara lebih intensif 3. Untuk tatakala pengadaan pekerjaan konstruksi dilakukan lebih awal	Peningkatan realisasi belanja modal yang berdampak langsung kepada Masyarakat.
1. Membuat dan menyampaikan laporan secara detail potensi *loss* PAD agar kekurangan dapat dimintakan	Penyusunan sebuah kajian yang dimaksudkan untuk menganalisis potensi risiko atau kehilangan penerimaan pajak daerah yang mungkin terjadi.Hal	Terkait dengan penghitungan potensi hilangnya PAD akan disusun sebuah kajian yang dimaksudkan untuk menganalisis potensi	Penyusunan kajian Pendapatan Asli Daerah yang terdampak pengelolaan Kawasan warisan dunia.

Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
kompensasi ke DIY dan tidak dibebankan dengan meningkatan nilai pajak pada kawasan yang masuk dalam kawasan penyangga	ini mencakup pajak dari sektor pariwisata, perhotelan, restoran, perdagangan, hiburan, parkir dan sektor lainnya	risiko atau kehilangan penerimaan pajak daerah yang mungkin timbul akibat implementasi kebijakan tertentu, terutama dari sektor yang secara langsung terpengaruh oleh pengelolaan kawasan warisan dunia. Hal ini mencakup pajak dari sektor pariwisata, perhotelan, restoran, perdagangan, hiburan, parkir dan sektor lainnya	
1. Fasilitasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pelaku UMKM dengan penyediaan sarana dan pendampingan pemanfaatan IT untuk pemasaran produk UMKM.	Dinas Perindustian, Koperasi dan UKM telah memberikan pelatihan peningkatan dan pemasaran serta pengembangan UKM melalui SDM dan teknologi kepada pelaku UKM dalam hal pemanfaatan IT kerjasama dengan STSRD, Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, Praktisi UPN "Veteran" Yogyakarta, PT. Angkasa Pura, Coach dari Pelatih Indonesia, STIKOM, Tenaga pendamping dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Fasilitasi pelatihan digitalisasi kolaborasi antara Paguyuban Sri Tanjung, Bank Indonesia, BPD DIY dan OJK.	Dinas Perindustian, Koperasi dan UKM telah melaksanakan pendampingan bagi UKM.	Memperluas jangkauan pemasaran
1. Pemerintah Kota Yogyakarta segera mengupayakan perbaikan saluran penggelontor limbah.	Perbaikan saluran penggelontor merupakan kewenangan dari Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan (Balai PIALAM DIY). Dinas PUPKP akan berkoordinasi dengan Balai PIALAM.	Telah dilaksanakan rapat koordinasi di DPUESDM DIY pada 13 Oktober 2024	Kewenangan OPD terkait kerusakan struktur jembatan, talud sungai, dan saluran gelontor
1. Pemenuhan sarana prasarana bagi wilayah berprestasi	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta melaksanakan Evaluasi Perkembangan Kelurahan (Lomba Kelurahan) dan Evaluasi Kinerja Kemantren setiap tahun. Adapun 5 kemantren terbaik hasil Evaluasi Kinerja Kemantren, mendapatkan penghargaan berupa : 1. Piagam Penghargaan 2. Piala/Trophy	Telah terlaksana Evaluasi Perkembangan Kelurahan (Lomba Kelurahan) dan Evaluasi Kinerja Kemantren dengan memberikan penghargaan terhadap Kemantren dan Kelurahan terbaik.	Pemberian apresiasi bagi Kemantren dan Kelurahan berprestasi.

Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	3. Hadiah berupa Barang untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana perkantoran kemantren sejumlah total : ● Juara I sebesar Rp. 15.000.000 ● Juara II sebesar Rp. 12.500.000 ● Juara III sebesar Rp. 10.000.000 ● Harapan I sebesar Rp. 7.500.000 ● Harapan II sebesar Rp. 5.000.000 4. Kunjungan kerja bagi Mantri Pamong Praja ke Luar Jawa. Sementara 5 kelurahan terbaik hasil Evaluasi Perkembangan Kelurahan (Lomba Kelurahan), mendapatkan penghargaan berupa : a. Piagam Penghargaan b. Piala/Trophy c. Hadiah berupa uang yang diberikan melalui Ketua Umum LPMK sejumlah : ● Juara I sebesar Rp. 15.000.000 ● Juara II sebesar Rp. 12.500.000 ● Juara III sebesar Rp. 10.000.000 ● Harapan I sebesar Rp. 7.500.000 ● Harapan II sebesar Rp. 5.000.000 Kunjungan kerja bagi Lurah dan Ketua Umum LPMK ke Luar Jawa.		
1. Pemantauan terhadap pemanfaatan air tanah terutama oleh usaha yang membutuhkan air yang cukup besar.	1. Sudah ada perjanjian kerjasama business to business antara PDAB Tirtatama DIY dengan PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta terkait alokasi pemanfaatan air baku dari PDAB untuk mengurangi penggunaan air baku yang bersumber dari air tanah. 2. Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki	1. PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta telah melaksanakan kerja sama dengan beberapa hotel yang ada di Kota Yogyakarta dalam penyediaan air bersih untuk kebutuhan operasional hotel. 2. Dinas PUPKP Kota Yogyakarta melaksanakan workshop dan mendorong	Mendorong penggunaan air bersih akses aman yang bersumber dari PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta. .

Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyediaan Air Baku Usaha di Kota Yogyakarta dimana setiap usaha wajib menyediakan air baku yang bersumber dari PDAM Tirtamarta kecuali bagi usaha mikro kecil.	kelompok masyarakat pemanfaat/pengguna sumur komunal untuk menggunakan/memanfaatkan air bersih dari PDAM Tirtamarta.	
1. Bappeda sebagai *core* pengembangan ekonomi kreatif agar menyusun perencanaan dan menyampaikan laporan pengembangan ekonomi kreatif.	Dinas Perdagangan: Kami akan berupaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan akan berkolaborasi dengan konsep yang disusun atau diarahkan oleh bappeda dalam pengembangan ekonomi kreatif. City Branding Management sebagai penguat posisi ekonomi kreatif telah dilakukan kajian oleh Bappeda dengan re-branding Yogyakarta as a City of Festivals. Roadmap ekonomi kreatif telah disusun oleh Bagian Perekonomian Setda Kota Yogyakarta. Perencanaan ke depan akan dilakukan bersama unsur ABCGM (Akademisi, Bisnis, akomunitas (community), pemerintah (government), dan media) dengan penganggaran di Bagian Perekonomian dan Kerjasama. UPT Pusat Bisnis : berdasarkan tupoksinya mengelola ruang-ruang yang dapat berperan dalam pengembangan ekonomi kreatif di pasar rakyat, sesuai kompetensinya yaitu menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekraf (SDM) baik yg berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan maupun OPD lainnya, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas PKU. Oleh karena itu Dinas Perdagangan sangat terbuka melakukan kerjasama dan kolaborasi dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta dengan menggunakan ruang/area	1. Pelaksanaan Jogja Festival Forum Expo kerjasama dengan Komunitas Ekraf (Jogja Festival, Pelaku Event Jogja, Jogja Creative Society), Kemenparekraf, Dinas Pariwisata DIY, British Council. 2. Penetapan Kota Yogyakarta sebagai Kota Kreatif bidang Seni Rupa oleh Kemenparekraf. 3. Pembentukan pra Komisi Ekonomi Kreatif (KEK) di bawah koordinasi Bagian Perekonomian dan Kerjasama.	1. Penguatan Branding Kota Yogyakarta sebagai Kota Kreatif di jejaring Kota Kreatif Nasional dan International. 2. Penyelarasan perencanaan Pengembangan Ekraf secara komprehensif dan *multi point of view*.

Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	strategis yang berada di pasar rakyat. Dinas Pariwisata: Merujuk Perwal No. 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah. Terkait pengembangan ekonomi kreatif tidak secara spesifik disebutkan menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, tetapi melalui Bidang Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata melaksanakan koordinasi bersama *stakeholders* terkait dalam rangka pengembangan 17 sub sektor ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta. Di Kota Yogyakarta pengembangan ekonomi kreatif diampu oleh beberapa OPD. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewenangan yang telah ditetapkan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini, indikator yang dimaksud menjadi tanggung jawab OPD lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidangnya. Meskipun demikian, Dinas Pariwisata tetap mendukung upaya pembangunan daerah melalui program dan kegiatan yang selaras dengan tugas fungsinya, serta berkoordinasi apabila terdapat keterkaitan dengan sektor pariwisata. Hal ini bertujuan untuk menjaga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tanpa terjadi tumpang tindih tugas antar OPD.		
1. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menginventarisir dan menyusun laporan terkait kegiatan revitalisasi bangunan kraton dan penataan sumbu filosofi termasuk *by name by address* warga yang terdampak.	Dinas Kebudayaan akan bersurat ke Pemda DIY untuk koordinasi terkait sinkronisasi data antara Pemkot Yogyakarta dengan Pemda DIY mengenai kegiatan revitalisasi bangunan kraton dan penataan sumbu filosofi	Telah dilaksanakan koordinasi dan evaluasi dengan pemerintah daerah DIY perihal hasil penataan fasad bangunan di Malioboro yang merupakan salah satu komponen sumbu filosofis. Dinas Kebudayaan dalam kesempatan tersebut juga memberikan masukan dan saran atas penataan tersebut	Koordinasi penataan malioboro, sebagai salah satu komponen sumbu filosofis

Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Tata Ruang menginventarisir dan menyusun laporan mengenai perubahan tata ruang yang terdampak kegiatan revitalisasi bangunan kraton dan penataan sumbu filosofi	Setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta serta kegiatan fisik yang telah dilakukan berupa revitalisasi bangunan Kraton dan situs sekitarnya menjadikan perubahan tata ruang dan lingkungan pada kawasan tersebut. Perubahan dan penataan kawasan mendatang diperlukan yang selanjutnya akan dilakukan inventarisasi dan identifikasi pasca kegiatan revitalisasi pada kawasan tersebut. Peninjauan kembali ketentuan rencana tata ruang akan lebih terinci pada perumusan ulang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada kawasan yang berimpitan, diantaranya Kawasan Kraton dan Njeron Beteng, Malioboro, dan jalur Plengkung Gading-Panggung Krapyak. Peninjauan ulang kembali RTBL tersebut menjabarkan kembali ketentuan teknis dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan menyesuaikan selaras dengan materi program Dokumen Rencana Pengelolaan (DRP) dan Rencana Pengelolaan Pelestarian Kawasan Sumbu Filosofi	Paska penetapan Pergub DIY No 2 Tahun 2024, Kota Yogyakarta telah: 1. Menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Dunia sumbu Filosofis Yogyakarta 2. Menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor. 49 Tahun 2024 tentang RTBL Kawasan Malioboro 3. Melaksanakan Evaluasi bersama Biro Hukum DIY tentang rancangan Peraturan Wali Kota Pedoman Teknis Pengelolaan Sumbu Filosofis 4. Melaksanakan penyiapan rancangan Peraturan Wali Kota RTBL Kawasan Mangkubumi dan RTBL Kawasan Kraton	1. Percepatan penetapan pengaturan pada kawasan sumbu filosofis dan kawasan cagar budaya kraton. 2. Penyesuaian terhadap ketentuan tata ruang melalui kegiatan peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Kota Yogyakarta (RTRW dan RDTR)
Menyiapkan program, terutama domain kemantren dalam konsep pengembangan kewilayahan	Kemantren memberikan dukungan melalui pelatihan budaya dan fasilitasi pelestarian upacara adat dan tradisi serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk pelestarian cagar budaya untuk pariwisata berbasis budaya di wilayah..	Beberapa kemantren dan kelurahan di kawasan sumbu filosofi telah mengadakanpelatihan kebudayaan dan fasilitasi pelestarian upacara dan adat dan tradisi, contoh : Kemantren Mantrijeron telah mengadakan pentas sepanjang tahun untuk menghidupkan tradisi dan pengembangan ekonomi masyarakat. Adanya penyelenggaraan upacara Apeman maupun nyadran di wilayah	Agar dapat lebih optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat pengguna layanan sarana prasarana Kota Yogyakarta.

Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar menginventarisir dan menyusun laporan mengenai perubahan administrasi kependudukan bagi warga yang terdampak kegiatan revitalisasi bangunan kraton dan penataan sumbu filosofi laporan secara jelas mengenai administrasi kependudukan	Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data administrasi kependudukan, aspek yg mempengaruhi perubahan biodata terutama dalam perpindahan penduduk hanya meliputi 7 alasan pindah seperti pekerjaan, pendidikan, keamanan, kesehatan, perumahan, keluarga, dan lain-lain. Sehingga aspek perubahan penduduk akibat revitalisasi bangunan kraton dan penataan sumbu filosofi tidak tercover dalam data kependudukan. Bagi warga yang terdampak, meskipun pindah secara tempat tinggal, tetapi domisili tetap memakai alamat yang lama. Hal ini akan dilakukan koordinasi dengan wilayah yang terkena dampak revitalisasi bangunan krator melalui mantri pamong praja setempat.	Sudah dilakukan koordinasi dengan wilayah yang terkena dampak revitalisasi bangunan kraton dan akan melakukan pendataan bagi warga yang terkena dampak revitalisasi.	Pendataan warga terdampak revitalisasi.
a. BKPSDM agar merumuskan roadmap penguatan ASN yang ditempatkan di wilayah, dengan memprioritaskan ASN yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta untuk menempati posisi di wilayah.	Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 24 ayat 1 huruf e disebutkan bahwa pegawai ASN wajib bersedia ditempatkan diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan Perwakilan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia. Seharusnya dengan regulasi yang sudah cukup jelas tersebut maka wajib dipatuhi seluruh ASN terutama ASN Pemerintah Kota Yogyakarta. Tetapi faktanya masyarakat kurang merasakan kehadiran ASN salah satu sebabnya adalah banyak yang tidak bertempat tinggal diwilayah tersebut. Sehingga BKPSDM sedang merumuskan kebijakan penguatan ASN yang ditempatkan di wilayah. salah satu tahapan perumusan kebijakan adalah melakukan identifikasi terhadap objek kebijakan dalam hal ini adalah ASN terkait domisili dan tempat tinggalnya sehingga akan mendapatkan data yang cukup valid yang bisa digunakan dalam menyusun roadmap	Untuk memprioritaskan ASN yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta agar menempati posisi di wilayah mengalami kesulitan dan keterbatasan untuk dilakukan karena: 1. Regulasi UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN; PP 17 Tahun 2011 Jo PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS; dan Perka BKN nomor 26 Tahun 2019 menekankan bahwa pengangkatan, penempatan, promosi, dan pengelolaan pegawai didasarkan pada **kualifikasi, kompetensi, dan kinerja**. 2. Untuk melaksanakan system merit, Pemerintah Kota Yogyakarta telah membangun system Manajemen Talenta sebagai instrumen pengembangan karier pegawai khususnya untuk menyiapkan talenta talenta terbaik berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Sistem ini telah mendapatkan validasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara melalui surat Nomor	Penguatan ASN di wilayah

Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	penguatan ASN terutama yang akan ditempatkan diwilayah.	B-1486/SM.01.02/04/2024 tanggal 26 April 2024 tentang Persetujuan Manajemen Talenta PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. 3. Dengan memprioritaskan ASN yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta untuk menempati posisi di wilayah maka tidak dapat menjamin kualitas kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai, hal ini tentu akan berdampak pula terhadap pelayanan di masyarakat. 4. Sebagian besar ASN Kota Yogyakarta bertempat tinggal di luar wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta. 5. BKPSDM telah melakukan prioritas pemenuhan kebutuhan ASN di wilayah yang didasarkan pada hasil analisis jabatan dan beban kerja melalui mekanisme pengadaan CPNS/PPPK, mutasi/Penataan ASN dan Promosi ASN dengan rincian sebagai berikut: • Mutasi 3 PNS jabatan pelaksana dari Dinas ke Kemantren Mantrijeron, Umbulharjo, Wirobrajan. • Jumlah PPPK Tahun 2024 yang ditempatkan di wilayah berjumlah 3 orang. • Jumlah Pelantikan pejabat struktural yang ditempatkan di wilayah berjumlah 21 PNS. • Untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi ASN di Wilayah, BKPSDM telah melakukan pelbagai diklat, sosialisasi dan bimtek khusus untuk pegawai	

Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Kemantren/kelurahan dan/atau melibatkan pegawai Kemantren/Kelurahan sebagai peserta.	

3.5. Penghargaan yang Diterima Tahun 2024

Pelaksanaan berbagai program kerja dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2024 ini mendapat apresiasi dengan diterimanya berbagai penghargaan baik dari Pemerintah maupun swasta. Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2024 antara lain:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta meraih tiga penghargaan dalam Penganugerahan Baznas Award 2024 pada Kamis 29 Februari 2024 di Bidakara Hotel Jakarta, yaitu pada kategori Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik, BAZNAS dengan Publikasi Konten Kantor Digital Teraktif dan BAZNAS dengan Operator SiMBA Terbaik.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Jumat 8 Maret 2024 di Kantor BPK RI Perwakilan DIY.
3. Pemerintah Kota Yogyakarta meraih lima penghargaan dalam acara puncak penghargaan TOP BUMD Awards 2024 yang diinisiasi oleh Majalah Top Business di Jakarta, Rabu 20 Maret 2024.
4. Enam lurah di Kota Yogyakarta mendapatkan anugerah Non Litigation Peacemaker (NLP) atas peran aktifnya sebagai juru perdamaian di wilayah. Lurah Rejowinangun, Lurah Suryatmajan, Lurah Gunungketur, Lurah Notoprajan, Lurah Ngampilan, dan Lurah Panembahan. Kelurahan Rejowinangun dan Suryatmajan juga berhasil meraih penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) atas keberhasilannya dalam upaya kelayakan investasi, peningkatan sektor pariwisata dan pembukaan lapangan kerja. Anugerah Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Jagaddhita diberikan penghargaan Paralegal Justice Award 2024 pada hari Sabtu 1 Juni 2024 dalam acara Anugerah Paralegal Justice Award 2024 di Hotel Bidakara Jakarta.
5. Pemerintah Kota Yogyakarta menerima penghargaan atas Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Terbaik I dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Rabu 26 Juni 2024 di PO Hotel Semarang.

6. Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat 22 penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY tahun 2024 dari Komisi Informasi Daerah (KID) DIY.
7. Pemerintah Kota Yogyakarta menerima piagam penghargaan Government Techno Awards 2024 DIY oleh MarkPlus Corporate pada acara Indonesia Marketing Festival (IMF) 2024 di Royal Ambarukmo Hotelpada 1 Agustus 2024. Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai berhasil mengembangkan layanan publik berbasis digital dengan Super App Jogja Smart Service (JSS). Aplikasi ini merupakan sebuah layanan digital Pemerintah Kota Yogyakarta dengan konsep Single ID, Single Sign On, Single Window untuk layanan kepada pegawai maupun masyarakat.
8. Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh penghargaan Beli Lokal Awards dari PT Tokopedia dengan kategori pendorong Program Digitalisasi dan Pengembangan Kapasitas Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Produk Lokal yang diterima pada tanggal 25 Agustus 2024.
9. Pemerintah Kota Yogyakarta kembali meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2024 dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Sabtu 7 September 2024 di JI Expo Kemayoran.
10. Kota Yogyakarta menerima penghargaan Prastisha Pustaka pada ajang Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Award 2024 di Rattan Inn Banjarmasin pada tanggal 18 September 2024, Penghargaan Prastisha Pustaka diberikan kepada Kota Pusaka yang dianggap memberikan sumbangsih luar biasa terhadap pelestarian kotanya. Bagi Kota Yogyakarta, penghargaan ini diberikan atas komitmennya dalam mempertahankan identitas dan warisan budaya, termasuk Sumbu Filosofis yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO.
11. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia menetapkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Kreatif 2024 dengan sub sektor seni rupa pada 26 September 2024.
12. Pemerintah Kota Yogyakarta meraih penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DGTI) Tahun 2024 sebagai pemerintah kabupaten/kota terbaik di DIY dan terbaik ke-4 nasional pada Jumat 11 Oktober 2024 di Auditorium MM UGM.
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Yogyakarta meraih penghargaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atas capaian implementasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Penghargaan tersebut diberikan pada puncak acara Peer Learning Meeting (PLM) atau Pertemuan Pembelajaran Sebaya Nasional yang berlangsung pada 6-8 November 2024. Di ikuti 700 orang Mitra Program TPBIS dari Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota dan Perpustakaan Desa/Kelurahan di Indonesia.

14. Kemenkuham RI menetapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) milik Pemkot Yogya sebagai pengelola JDIH Terbaik IV nasional tahun 2024 yang diterimakan pada tanggal 22 Agustus 2024.
15. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya berhasil meraih penghargaan dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah (AKDP) tahun 2024 kategori Daya Saing Daerah untuk daerah dengan kapasitas fiskal sedang pada 13 Desember 2024.
16. Pemerintah Kota Yogyakarta meraih penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) 2024 dari Kementerian Kebudayaan kategori terbaik atau emas pada 18 Desember 2024 di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Pemberian tugas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

Terkait hal tersebut, di tahun 2024 Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan urusan keistimewaan yang bersumber dari Dana Keistimewaan namun sudah menjadi bagian dari APBD Kota Yogyakarta. Merujuk hal tersebut bahwa pada tahun 2024 Pemerintah Kota Yogyakarta tidak melaksanakan Tugas Pembantuan baik yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian maupun yang berasal dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kemantren dan 45 Kelurahan dan tidak memiliki desa. Dengan kondisi tersebut maka Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2024 tidak memberikan tugas pembantuan kepada desa.

BAB V
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 ini adalah bentuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyusunan dokumen LKPJ ini merupakan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas evaluasi atas capaian pembangunan daerah. Dokumen LKPJ menjadi cerminan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun. Paparan hasil pembangunan daerah tersebut dapat diukur melalui kontribusi sejumlah program dan kegiatan pembangunan dalam melaksanakan arah kebijakan dan atau urusan yang telah ditetapkan. Kontribusi program dan kegiatan yang berkualitas diharapkan dapat memiliki daya ungkit terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah sebagai bukti keberhasilan pembangunan daerah berkelanjutan yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terhadap 11 sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebesar 101,79%.

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 sampai dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2024 masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, masukan yang bersifat membangun sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja kedepan, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih produktif, efektif, dan efisien.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disampaikan, semoga Allah SWT memberikan perlindungan, kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta.

WALI KOTA YOGYAKARTA

HASTO WARDOYO

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651
YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

KESIMPULAN PANITIA KHUSUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta,

Yang kami hormati, Ketua Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati, Unsur FORKOMPINDA Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah beserta segenap Pejabat Eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta, rekan-rekan Wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini dalam keadaan sehat wal afi'at.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu kepada kami selaku Juru Bicara Panitia Khusus untuk melaporkan Kesimpulan Panitia Khusus tentang Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Anggota Panitia Khusus dan Tim Eksekutif yang telah banyak membantu dalam melakukan pembahasan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta hingga selesai.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Setelah mendengar dan memperhatikan :

1. Usulan-usulan Anggota DPRD yang didapat melalui pelaksanaan reses yang telah terinput dalam SIPD dengan jumlah usulan 1852 dan telah terverifikasi di TAPD sejumlah 64,14%
2. Hasil rapat-rapat pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus, baik yang dilakukan secara internal maupun bersama Tim Eksekutif;

3. *Hasil Studi Banding ke Beppeda* Litbang Kota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin pada tanggal 19 sampai dengan 22 Januari 2025 dan Studi Banding ke Bappelitbang Kota Bandung pada tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2025.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas Panitia Khusus sepakat untuk memberikan catatan sebagai berikut :

A. Bidang Hukum dan Pemerintahan
   1. Terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan bidangnya serta sarana prasarana yang memadai baik di Kemantren maupun Kelurahan sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
   2. Penambahan penganggaran untuk pengadaan dan perawatan Ruang Terbuka Hijau Publik di wilayah Kelurahan dan Kecamatan sebagai ajang berkumpul masyarakat.
   3. Memperbanyak pelatihan digital bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat terutama di era digitalisasi.
   4. Penambahan cctv terutama di daerah-daerah rawan untuk meningkatkan keamanan di wilayah.

B. Bidang Perekonomian
   1. Memperbanyak pelatihan-pelatihan Usaha Mikro Kecil / UMK bagi masyarakat yang diselenggarakan di tiap kelurahan untuk mendukung peningkatan keterampilan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
   2. Mendorong para pelaku pariwisata mendapat akses untuk peningkatan kapasitas dalam mengelola obyek dan potensi wisata di wilayah sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.
   3. Memperbanyak kegiatan festival budaya untuk mengenalkan potensi budaya dan wisata pada suatu wilayah.
   4. Memperbanyak pelatihan untuk penguatan manajemen serta pendampingan bagi bagi usaha mikro kecil.

C. Bidang Infrastruktur
   1. Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan drainase agar dapat berfungsi secara maksimal.
   2. Pembangunan dan perbaikan talud di wilayah yang dapat membahayakan fasum dan masyarakat.
   3. Manajemen rekayasa lalu lintas yang komprehensif untuk menurunkan tingkat kemacetan di Kota Yogyakarta.
   4. Penanganan terhadap permasalahan sampah di Kota Yogyakarta harus segera dilakukan, sosialisasi terhadap program pemilahan dan pengolahan sampah harus tersosialisasi dengan baik ke masyarakat.
   5. Penambahan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum / PJU terutama ditempat-tempat rawan untuk mengurangi tingkat kejahatan di Kota Yogyakarta.

D. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
   1. Memperbanyak penyuluhan kesehatan di masyarakat dengan berbagai tema untuk menambah informasi masyarakat terkait permasalahan kesehatan.

2. Peningkatan kapasitas kader posyandu, peningkatan sarana dan prasarana posyandu.
3. Sosialisasi jaminan pendidikan daerah dan beasiswa bagi masyakarat
4. Memperbanyak kegiatan pembinaan kelompok sanggar maupun organisasi budaya.

Selanjutnya Panitia Khusus menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah kebijakan penting dalam perumusan rencana Pembangunan daerah yang disusun bertujuan untuk memberikan arahan dan saran kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah / RKPD sesuai tema dan prioritas pembangunan kota Yogyakarta dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / RPJMD. Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan rangkuman aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pokok-pokok Pikiran yang telah disusun tidak hanya berhenti sampai pada penyusunan RKPD
2. Eksekutif melaporkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD kepada DPRD, mana saja yang dapat, sedang atau sudah terlaksana dan mana yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan dengan membuat suatu sistem informasi yang dapat memantau kegiatan perangkat daerah yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
3. Kamus Usulan yang dipergunakan sebagai dasar usulan pokok pikiran DPRD yang telah disusun dapat dibuat dinamis menyesuaikan kebutuhan dimasyarakat selama masih dalam kerangka prioritas yang telah disusun dalam RKPD maupun perencanaan jangka menengah daerah.
4. Perangkat daerah dapat lebih selektif dalam menentukan pokok-pokok Pikiran DPRD yang sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Komunikasi yang baik harus terjalin antara DPRD, mitra Bappeda dan perangkat daerah untuk meminimalisir usulan Pokok-pokok Pikiran yang tidak disetujui.
5. Bappeda Kota Yogyakarta menyusun suatu sistem yang memudahkan pengumpulan data usulan sebelum tahapan penyusunan Pokok-pokok Pikiran dimulai.

Kemudian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta selengkapnya adalah sebagaimana terlampir.....

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.
Demikian Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Penyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta.

Selaku Juru Bicara Panitia Khusus, kami mohon maaf apabila di dalam menyampaikan Laporan Panitia Khusus terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.

Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamu'alaikum Wr.

Yogyakarta, 14 Maret 2025

PANITIA KHUSUS PENYUSUN POKOK-POKOK PIKIRAN

DPRD KOTA YOGYAKARTA

1.	Fajar Kurniawan, S.IP	Ketua/Anggota	1.
2.	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Wakil Ketua /Anggota	2.
3.	Darini, S.IP.	Anggota	3.
4.	Haryanto, S.E.	Anggota	4.
5.	H. Danang Rudiyatmoko, S.E.	Anggota	5.
6.	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota	6.
7.	Muhammad Affan, S.IP, S.H.	Anggota	7.
8.	Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota	8.
9.	H. Setyaji Hermawan	Anggota	9.
10.	Taufiq Setiawan, S.Sn.	Anggota	10.
11.	Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota	11.
12.	Choliq Nugroho Adji	Anggota	12.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 5/KEP/DPRD/III/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOGJA (PERSERODA)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, maka Pembahas rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan :

1. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 014/K-PKS/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
2. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 013/F-PDIP/III/2025, tanggal 5 Maret 2025, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
3. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02/FP-NasDem/DPRDKotaYka/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
4. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/F-PPP/JOG/III/2025 tanggal 06 Maret 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
5. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 002/F.PAN/III/2025, tanggal 7 Maret 2025, perihal Utusan Pansus;
6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 061/FPG-KOTA/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;
7. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/F.Gerindra/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Perubahan Utusan Fraksi Gerindra sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);
2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait; dan
3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Maret 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

RM. SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 5/KEP/DPRD/III/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOGJA (PERSERODA)

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOGJA
(PERSERODA)

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Munazar, M.Psi.	Ketua/Anggota	PARTAI GOLKAR
2	Muhammad Sofyan, S.T.	Wakil Ketua/Anggota	PAN
3	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	PDI-P
4	H. Danang Rudiyatmoko	Anggota	PDI-P
5	Sigit Nurcahyo, S.H.	Anggota	PDI-P
6	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota	PDI-P
7	Dhian Novitasari, S.Pd.	Anggota	PARTAI GERINDRA
8	Krisnadi Setiawan	Anggota	PARTAI GERINDRA
9	Fajar Kurniawan, S.IP	Anggota	PKS
10	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Anggota	PARTAI GOLKAR
11	I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.	Anggota	PPP
12	Oleg Yohan	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

RM. SINARBIYATNUJANAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 6/KEP/DPRD/III/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, maka Pembahas rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pemakaman;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan :

1. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 014/K-PKS/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
2. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 013/F-PDIP/III/2025, tanggal 5 Maret 2025, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
3. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02/FP-NasDem/DPRDKotaYka/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
4. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/F-PPP/JOG/III/2025 tanggal 06 Maret 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
5. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 002/F.PAN/III/2025, tanggal 7 Maret 2025, perihal Utusan Pansus;
6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 061/FPG-KOTA/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;
7. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/F.Gerindra/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Perubahan Utusan Fraksi Gerindra sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait; dan
3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Maret 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

RM. SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 6/KEP/DPRD/III/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Taufiq Setiawan, S.Sn.	Ketua/Anggota	PPP
2	Sigit Wicaksono, S.Kom.	Wakil Ketua/Anggota	PARTAI NASDEM
3	Darini, S.IP.	Anggota	PDI-P
4	Endro Sulaksono	Anggota	PDI-P
5	Subagyo	Anggota	PDI-P
6	Marwoto Hadi, S.H.	Anggota	PARTAI GERINDRA
7	Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota	PKS
8	Mu'adz A.A,S.E.,M.E.	Anggota	PKS
9	Muhammad Affan, S.IP.,S.H.	Anggota	PARTAI GOLKAR
10	Affan Baskara Patria, S..IP.	Anggota	PAN
11	Agus Trianto	Anggota	PPP
12	Choliq Nugroho Adji	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

RM. SINARBIYATNUJANAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR :7/KEP/DPRD/III/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, maka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan :

1. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 014/K-PKS/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
2. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 013/F-PDIP/III/2025, tanggal 5 Maret 2025, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
3. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02/FP-NasDem/DPRDKotaYka/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
4. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/F-PPP/JOG/III/2025 tanggal 06 Maret 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
5. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 002/F.PAN/III/2025, tanggal 7 Maret 2025, perihal Utusan Pansus;
6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 061/FPG-KOTA/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;
7. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/F.Gerindra/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Perubahan Utusan Fraksi Gerindra sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun Anggaran 2024;
2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait; dan
3. Menyusun catatan dan rekomendasi DPRD dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Maret 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

RM. SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 7/KEP/DPRD/III/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Ketua/Anggota	PAN
2	H. Setyaji Hermawan	Wakil Ketua/Anggota	PPP
3	Haryanto, S.E.	Anggota	PDI-P
4	Agus Riyanto	Anggota	PDI-P
5	Novita Mawar Sharon	Anggota	PDI-P
6	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota	PARTAI GERINDRA
7	Nurcahyo Nugroho	Anggota	PKS
8	R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota	PARTAI GOLKAR
9	Yogo Prasetyo Prihutomo	Anggota	PARTAI GOLKAR
10	Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota	PAN
11	Dwi Candra Putra, S.P.,M.IP.	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

RM. SINARBIYATNUJANAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 8 /KEP/DPRD/III/2025
TENTANG
PENETAPAN POKOK – POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan pokok – pokok pikiran DPRD dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai penyusunan awal RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pokok – pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan kepada Wali Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2026.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Maret 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

RM. SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 8/KEP/DPRD/III/2025
TENTANG
PENETAPAN POKOK – POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1	[02.01.TEGALREJO] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Peningkatan dan perbaikan jalan pemasangan paving block seluas 200m2, di wilayah RT 15, RT 16 RW 05 Kelurahan Tegalrejo , Kemantren Tegalrejo	RT 15, RT 16 RW 05 Kelurahan Tegalrejo , Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Tegalrejo	Kemantren Tegalrejo	200	m2	73450000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2	[01.18.TEGALREJO] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	RW 07 Kelurahan Kricak, Yogyakarta mendirikan sebuah kelompok seni keprajuritan/bregada yang diberi nama BREGADA SAPTA NAYAKA UTAMA. kami belum memiliki alat musik dan kostum bregada sehingga setiap ada kegiatan sementara ini masih menyewa alat dan kostum. Berdasarkan hal tersebut Kami mengajukan permohonan bantuan pengadaan kostum bregada dan alat musik melalui Program Pokok Pikiran Masyarakat (Pokir)	Pendopo RT 30 RW 07 Kricak Kidul, Kelurahan Kricak, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Tegalrejo	Kemantren Tegalrejo	61	orang	48800000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Difungsikan kembali drainase (SAH) dari balai RW 01 ke barat.	Jatimulyo RW 01 RT 02 Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	m2	600000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
4	[02.01.TEGALREJO] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Penambahan paving ± 50 m x 3 m yang sekarang putus	Jatimulyo RW 01 RT 61 Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Tegalrejo	Kemantren Tegalrejo	150	m2	56062500	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
5	[02.01.TEGALREJO] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Penebalan jalan setapak di RT 61	Jatimulyo RW 01 RT 61 Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Tegalrejo	Kemantren Tegalrejo	50	m2	18687500	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
6	[02.11.TEGALREJO] Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Posyandu	Pengadaan meja dan kursi	Jatimulyo RW 01 RT 01 Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Tegalrejo	Kemantren Tegalrejo	6	unit	3000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7	[02.24.TEGALREJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	diadakan alat pengolah sampah	Kricak RW 07 RT 29 Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Tegalrejo	Kemantren Tegalrejo	3	unit	33000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
8	[02.10.TEGALREJO] Cermin Tikungan di wilayah	Mohon bantuan kaca cembung 4 titik	Kricak RW 07 RT 31 Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Tegalrejo	Kemantren Tegalrejo	4	unit	11000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
9	[01.12.TEGALREJO] Pelatihan Boga di wilayah	Mohon diadakan pelatihan untuk ibu-ibu RW 08 untuk menambah penghasilan	Kricak RW 08 RT 37 Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Tegalrejo	Kemantren Tegalrejo	20	orang	7000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
10	[02.10.TEGALREJO] Cermin Tikungan di wilayah	Pemangan Cermin Tikungan 2 titik	Bangirejo RT 42 RW 12 Kelurahan Karangwaru Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Tegalrejo	Kemantren Tegalrejo	2	unit	5500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
11	[01.12.GEDONGTENGEN] Pelatihan Boga di wilayah	Pelatihan olahan makanan untuk UMKM	Kampung Jogonegaran RW 13, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	20	orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
12	[01.15.GEDONGTENGEN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	warga memohon bantuan pelatihan UMKM untuk pelatihan UMKM di wilayah.	Kampung Sutodirjan RT 71 dan 72, Pringgokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	20	orang	7167000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
13	[02.09.GEDONGTENGEN] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	penambahan titik penerangan di gang-gang masuk	Kampung Sosrowijayan RW 02, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gedongtengen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	titik	30000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
14	[01.18.MANTRIJERON] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	Bregada Cakramanggala belum memiliki kostum untuk kegiatan dan peringatan kebudayaan di Kota Yogyakarta	Kumendaman MJ II-453, RT 20 RW 06, Kalurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	50	Orang	40000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

15	[03.02] Peningkatan kapasitas kader dalam kompetensi klaster 2 untuk posyandu meliputi ibu dan anak sesuai transformasi layanan primer	Perlunya peningkatan kapasitas pelayanan dan juga kader posyandu untuk membantu menjaga kesehatan masyarakat di wilayah kraton	RW 02 Mandungan, Ngadisuryan, Kalurahan Patehan, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	47	Orang	38916000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
16	[03.23] Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang ber KTP Yogyakarta melalui program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD)	masih adanya warga yang sulit memperoleh bpjs gratis	Kampung Jlagran RW 02, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	10	orang	453600	-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
17	[01.16.GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	mohon untuk di support kegiatan di kampung seperti RW dan PKK.	Kampung Sosrodipuran RW 4, 5, dan 6, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	6	kegiatan	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
18	[06.09] Padat Karya Infrastruktur	jalan berupa tanah berada di pinggir sungai winongo yang rawan terjadi ambles dan longsor pada talud saat terjadi hujan	Bangunrejo RT 59 RW 13 Kricak Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	kegiatan	330000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
19	[22.02] Perbaikan /Pemeliharaan Talud Sungai	agar tidak terjadi longsor susulan	Bangunrejo RT 56 RW 13 Kricak Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	270	m3	3000000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
20	[02.26.GONDOKUSUMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan dan signage lainnya)	Pengadaan Papan Nama (Kampung Baciro) RW 8, RW 9, RW 10, RW 21 Baciro Gondokusuman	RW 08, RW 09, RW 10, RW 21 Baciro Gondokusuman , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	4	buauh	16000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
21	[02.10.TEGALREJO] Cermin Tikungan di wilayah	alat untuk menambah jarak pandang pengemudi dan mengurangi tingkat kecelakaan di wilayah	Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Tegalrejo	Kemantren Tegalrejo	27	titik	74250000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
22	[02.09.TEGALREJO] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Penerangan jalan di wilayah	Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Tegalrejo	Kemantren Tegalrejo	41	titik	45100000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
23	[02.26.GONDOKUSUMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan dan signage lainnya)	Pergantian Tiang dan Papan Nama Jalan dengan model Khas Yogyakarta RW 8, RW 9, RW 21 Baciro Gondoksuman	RW 8, RW 9, RW 21 Baciro Gondoksuman , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	12	pasang	48000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
24	[17.06] Pendampingan Kelompok Perikanan	bantuan bahan pakan ikan di wilayah. Ada budidaya ikan di wilayah Sutodirjan akan tetapi belum ada dana untuk kelanjutan dari giat budidaya ikan tersebut setelah beberapa waktu lalu ditebarkan benih ikan hanya dari warga sekitar yang dengan sukarela makani atau memberi makan ikan. Jadi butuh suport dari pemerintah untuk kelanjutan budidaya ikan tersebut.	Kampung Sutodirjan RT 71 dan 72, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	15	orang	850000	-	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
25	[24.05] Pemeliharaan / Perbaikan Trotoar sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pengecatan Trotoar Kelling Taman Kanthil RW 09	Taman Kanthil RW 09 Baciro Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	400	meter	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
26	[24.03] Peningkatan Jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pengasapalan Jalan Gambir RW 09 Baciro Gondokusuman	Jalan Gambir RW 09 Baciro Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	200	m2	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
27	[02.03.JETIS] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	kondisi pos ronda sudah tidak layak	Badran RT 45 RW 10 Bumijo Jetis, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Jetis	Kemantren Jetis	1	unit	3750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
28	[02.08.JETIS] Pemeliharaan SAH di wilayah	pelumpuran saluran karena penuh dengan endapan	Badran RT 45 RW 10 Bumijo Jetis, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Jetis	Kemantren Jetis	60	m1	12000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
29	[02.08.JETIS] Pemeliharaan SAH di wilayah	Pembuatan SAH baru, Saluran lama tidak berfungsi karena tersumbat	Badran RT 45 RW 10 Bumijo Jetis, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Jetis	Kemantren Jetis	40	m1	18080000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
30	[02.02.JETIS] Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	pemenuhan kebutuhan air bersih warga melalui sumur bor	Badran RT 44 RW 10 Bumijo Jetis, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Jetis	Kemantren Jetis	1	unit	30000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
31	[02.14.JETIS] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah	pelatihan pembuatan ecoenzym karena banyaknya sampah kulit buah dan sayur yang tidak dimanfaatkan	Bank sampah rejeki RT 43 RW 10 Badran Bumijo Jetis, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Jetis	Kemantren Jetis	40	orang	7831000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
32	[02.11.JETIS] Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Posyandu	pengadaan alat ILP karena kekurangan sarana pendukung posyandu berupa alat tensi, alat timbangan berat badan, alat pengukur gula darah, asam urat dan kolesterol	Badran RW 10 Bumijo Jetis, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Jetis	Kemantren Jetis	1	unit	5019500	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
33	[01.14.JETIS] Pelatihan Kerajinan di wilayah	pelatihan membuat ecoprint karena untuk menambah penghasilan dan peningkatan ekonomi	Badran Gg Wijaya Kusuma RW 10 Bumijo Jetis, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Jetis	Kemantren Jetis	40	orang	15895000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
34	[01.14.JETIS] Pelatihan Kerajinan di wilayah	pelatihan membuat hantaran menambah penghasilan dan peningkatan ekonomi	Badran Gg Wijaya Kusuma RW 10 Bumijo Jetis, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Jetis	Kemantren Jetis	20	orang	5295000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

35	[02.27.NGAMPILAN] Pemeliharaan Balai RT/RW/Kampung	Perbaikan lantai dan tembok balai RK di RW 09 kampung Purwodiningratan, Kelurahan Ngampilan	Balai RK di RT 43 RW 09 kampung Purwodiningratan, Kelurahan Ngampilan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Ngampilan	Kemantren Ngampilan	1	Paket	20000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
36	[02.03.NGAMPILAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Perbaikan Pos Ronda RT 43 RW 09	Kampung Purwodiningratan RT 43 RW 09, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Ngampilan	Kemantren Ngampilan	2	paket	15000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
37	[02.03.NGAMPILAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Perbaikan Pos Ronda RT 39 RW 08	Kampung Purwodiningratan RT 39 RW 08, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Ngampilan	Kemantren Ngampilan	2	paket	15000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
38	[24.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Perbaikan jalan aspal di jalan Gambirsawit RW 1 sampai RW 6 di Kampung patangpuluhan, Wirobrajan	jalan gambir sawit, patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1000	m3	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
39	[24.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Jalan aspal Rusak parah di gang Blekiti RT 26 sampai 30 RW 06	Gang Blekiti RT 26 - 30 RW 06 , Kampung Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1000	m3	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
40	[02.03.NGAMPILAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Perbaikan Pos Ronda RT 7 RW 01	Kampung Serangan RT 7 RW 1, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Ngampilan	Kemantren Ngampilan	1	Unit	30000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
41	[02.03.NGAMPILAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Perbaikan Pos ronda Volume 1 Satuan Unit Peta Lokasi	Kampung Serangan RT 29 RW 02,Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Ngampilan	Kemantren Ngampilan	1	Unit	30000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
42	[02.01.GONDOMANAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Perbaikan jalan yang rusak untuk diganti paving blok	Kampung Prawirodirjan RT 59 RW 18 ,Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondomanan	Kemantren Gondomanan	500	m2	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
43	[02.27.GONDOMANAN] Pemeliharaan Balai RT/RW/Kampung	Perbaikan Kantor RW 7 Prawirodirjan	Kampung Prawirodirjan RW 7, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Prawirodirjan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondomanan	Kemantren Gondomanan	1	Paket	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
44	[01.20.UMBULHARJO] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event	banyak anak-anak muda yang lulus sekolah tetapi belum punya pekerjaan,sehingga ditakutkan akan mengarah ke yang negatif.	sorosutan rw 03,04,05,08, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	20	orang	12250000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
45	[02.03.UMBULHARJO] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	pos ronda tidak muat,ketika di gunakan untuk kumpulan warga dan sering bocor ketika hujan saat digunakan	tungkak kebonan rt 11/03,jl.pakel baru utara no2 sorosutan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	60	m	3750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
46	[02.09.KOTAGEDE] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	jalanan gelap,ditakutkan terjadi kecelakaan,sehingga perlu pemasangan PJU di beberapa titik	rt 50/08 rejowinangun kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	15	titik	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
47	[06.07] Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	banyak ibu ibu muda yang ingin mencari uang tambahan lewat penjualan online,tetapi belum tau caranya bagaimana menjual online	giwangan umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	44000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
48	[23.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	Fasilitasi Pembuatan saluran air limbah	Tempel Wirogunan RW 11, Tahunan,Umbulharjo,Yogyakarta ,rfl +62 858-7604-6503, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	meter	110000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
49	[02.09.GEDONGTENGEN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Penambahan Lampu Penerangan Jalan kampung	Kampung Jogonegaran RW 13, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gedongtengen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	titik	30000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
50	[01.15.GEDONGTENGEN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan sablon untuk pemuda jogonegaran.	Kampung Jogonegaran RW 13, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	20	orang	12733000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
51	[02.02.GEDONGTENGEN] Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	Perbaikan pintu MCK	Kampung Jlagran RW 02 RT 09, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	2	unit	12500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

52	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Assesment mendalam untuk memastikan instalasi yang tersambung sesuai dengan spek saluran primernya.	RW 06 Suryowijayan, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta. A.n. Hardi Prawoto ; 081227064777, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	meter	300000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
53	[08.01] Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan	Menciptakan kegiatan remaja dan pemuda untuk wadah kegiatan terarah	Kampung Suryodiningratan, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta. A.n. Raditya Gupala ; 085236144882, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	20	0rang	-	-	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
54	[02.11.MANTRIJERON] Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Posyandu	Pengadaan timbangan bayi dan pengadaan sragam posyandu	Suryodiningratan, Mantrijeron, Kora Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	40	orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
55	[16.08] Pengembangan pemberdayaan kelompok Nglarisi	Perhatian pada UMKM	Kampung Ngadinegaran, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta. A.n. Rachmat Abadi ; 0895410557616., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	40	orang	4960000	-	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
56	[02.06.GEDONGTENGEN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	Permohonan pot tanaman beserta media tanaman	kampung Sosrodipuran RW 4, 5, 6, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	60	unit	12660000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
57	[02.10.GONDOKUSUMAN] Cermin Tikungan di wilayah	Pengadaan Cermin cembung persimpangan jalan diwilayah RW 08, RW 09, RW 10 dan RW 21	diwilayah RW 08, RW 09, RW 10 dan RW 21 Baciro Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	12	titik	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
58	[02.08.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Pemeliharaan SAH di RW 08	Wilayah RW 08 Baciro Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	600	meter	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
59	[01.15.DANUREJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Warga RW 09 Suryatmajan berharap ada pelatihan keterampilan buat warga seperti menjahit, memasak	Warga RW 09 Suryatmajan , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	60	orang	30000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
60	[02.01.WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	JALAN CAMPUR PAVING DAN ASPAL JUGA SUDAH RUSAK	JALAN NAKULO RW 10 DAN RW 11 KETANGGUNGAN WIROBRAJAN (ditengah antara jalan SADEWA dan jalan ARJUNA), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	150	M1	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
61	[02.10.WIROBRAJAN] Cermin Tikungan di wilayah	JALAN KAMPUNG RAMAI DAN RAWAN	JALAN MADUBRONTO DAN SEKITAR RW 3 PATANGPULUHAN, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	4	UNIT	11000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
62	[01.14.WIROBRAJAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	PENINGKATAN PENGUSAHA KULIT	PENGRAJIN KULIT DI RW 3 PATANGPULUHAN, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	20	orang	5070000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
63	[02.08.WIROBRAJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Beberapa cor sudah rusak	Warga Kelurahan Wirobrajan Jl. Singomulanjoyo RW 01 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	2	meter	7260000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
64	[02.05.WIROBRAJAN] Pembangunan sumur resapan air hujan di wilayah	Jalan tergenang ketika hujan	Warga Kelurahan Wirobrajan Gang kecil masuk (tdk ada namanya) RT 07 RW 02, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	2	titik	13552000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
65	[02.05.WIROBRAJAN] Pembangunan sumur resapan air hujan di wilayah	Adanya genangan air saat hujan	Warga Kelurahan Wirobrajan Jl. Ontosono (barat SMP Muhammadiyah 3) RT 11 RW 03 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	3	titik	20328000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
66	[02.01.WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Banyak paving yang sudah rusak	Warga Kelurahan Wirobrajan Gang Srikandi RT 24 Rw 05, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	75	M persegi	26775000	Non Belanja Transfer	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

67	[02.01.WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Adanya genangan air saat hujan	Warga Kelurahan Wirobrajan Ontorejo 34 utara jalan RT 31 RW 06 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	50	M persegi	18150000	Non Belanja Transfer	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
68	[02.05.WIROBRAJAN] Pembangunan sumur resapan air hujan di wilayah	Adanya genangan air saat hujan	Warga Kelurahan Wirobrajan RT 31 RW 06 selatan RTHP Bu Mugiani, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	1	buah	6776000	Non Belanja Transfer	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
69	[02.05.WIROBRAJAN] Pembangunan sumur resapan air hujan di wilayah	Adanya genangan air saat hujan	Warga Kelurahan Wirobrajan RT 26 RW 06 Timur bengkel ke utara , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	1	buah	6776000	Non Belanja Transfer	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
70	[02.01.WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	jalan tergenang air saat hujan	Warga Kelurahan Wirobrajan Sebelah barat rumah Jl Harjuna No 25 RT 46 RW 10 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	28,5	m persegi	10345500	Non Belanja Transfer	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
71	[01.14.TEGALREJO] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Meningkatkan kerajinan wilayah terutama PKK RW 10 Dekaman	Kampung Demakan RW 10 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Tegalrejo	Kemantren Tegalrejo	30	orang	7485000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
72	[23.05] Perbaikan Saluran Air Limbah	Fasilitasi Perbaikan Pembuangan saluran air limbah	Umbulharjo,Tahunan,Celeban RW 007,Om Niky +62 852-2588-9050, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	meter	110000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
73	[02.09.DANUREJAN] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	32 (tigapuluh dua) buah lampu penerangan jalan umum dalam kondisi matihingga sekarang belum diganti membuat kondisi keamanan menjadi rawan dan meresahkan warga sekitar bahkan sering digunakan sebagai ajang para remaja berlainan jenis untuk duduk-duduk di waktu malam hari	Sepanjang Talud Sungai Code RW 14 kampung Juminahan, Tegalpanggung Danurejan Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	32	buah	3120000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
74	[02.03.DANUREJAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	2 (dua) buah pos Ronda di wilayah RW 15 Kampung Juminahan ,kelurahan Tegalpanggung dalam kondisi yang tidak layak dan atap pos banyak yang rusak / pecah , sehingga terjadi kebocoran saat musim hujan tiba sehingga kegiatan ronda di musim penghujan menjadi tidak optimal	RT 59 dan RT 60 , RW 15 Kampung Juminahan Kelurahan Tegalpanggung kecamatan danurejan Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	2	unit	7500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
75	[23.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	perawatan saluran limbah	Kampung Panembahan RW 15 PIC Pak Frans (+62 812-2037-0889) , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	m2	20000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
76	[22.04] Perbaikan /Pemeliharaan Irigasi permukaan	Kondisi saluran rusak	Gg Jatiwangi utara rusun bener tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	200	m2	600000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
77	[22.03] Perbaikan /Pemeliharaan Talud Sungai	menanggulangi terjadi longsor	RT 1 RW 3 Karangwaru Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	200	m1	2000000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
78	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	saluran air hujan sepanjang jalan gotong royong menuju kali buntung rusak atau tersumbat sehingga menyebabkan banjir	RT 3 RW 2 Karangwaru Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	500	m1	4000000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
79	[23.04] Perbaikan IPAL komunal	penggantian tutup plat bak IPAL komunal yang sudah terjadi korosi	RT 19 RW 5 Karangwaru Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	buah	2700000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
80	[25.02] Pemeliharaan Talud Permukiman	tidak ada akses menuju jalan magelang sehingga harus memutar	RT 25 RW 6 Karangwaru Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	200	m1	600000000	-	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
81	[16.05] Pendampingan Sentra bagi Industri Kecil Menengah (IKM)	pendampingan sentra industri produk jajanan pasar	kelompok ngudi rejeki karangwaru tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	kelompok	1195000	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
82	[06.08] Pelatihan Satpam tingkat kota	seiring ikon Jogja sebagai kota pariwisata ,banyaknya pemuda pemudi lulus SMA yang sangat berminat untuk bekerja menjadi security di hotel tetapi terkendala belum memiliki ijasah security	Sosrokusuman RW 06 Suryatmajan , Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	88000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
83	[17.02] Rintisan Kampung Pangan Lestari (RKPL)	bimbingan teknis dalam rangka agar masyarakat meningkatkan cadangan pangan dengan memanfaatkan lahan yang ada	Kampung petinggen karangwaru tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1	kampung	1329000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

84	[06.05] Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota	banyak pemudi dan ibu ibu muda ingin punya penghasilan.banyak usulan untuk pengajuan pelatihan NAIL ART yang saat ini sedang booming	tahunan rw 02, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	94600000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
85	[17.02] Rintisan Kampung Pangan Lestari (RKPL)	bimbingan teknis masyarakat meningkatkan cadangan pangan dengan memanfaatkan lahan yang ada	kampung blunyahrejo karangwaru tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1	kampung	1329000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
86	[17.06] Pendampingan Kelompok Perikanan	penambahan wawasan dan pemahaman terhadap budidaya ikan bagi kelompok	kampung blunyahrejo karangwaru tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1	kampung	850000	-	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
87	[18.01] Pembinaan Pengelolaan Kampung Baca	pendampingan pengelolaan kampung baca dengan mengembangkan literasi terapan dimasyarakat melalui omah sinau masyarakat	pengurus OMSIMAS karangwaru tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	lokasi	-	-	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
88	[06.09] Padat Karya Infrastruktur	Kondisi paving blok dan gorong-gorong di Jetisharjo Rt 22 Rw 05 sudah rusak dan perlu peremajaan. Jalan tersebut menjadi akses utama warga dalam berkegiatan ekonomi. Sebagian besar warga RT 22 berprofesi sebagai wiraswasta yang bergerak di bidang kuliner dan jasa. Ketika musim hujan air hujan tidak bisa lancar masuk gorong-gorong. Di sisi lain, kondisi paving yang rusak dan bergelombang sangat menganggu aktivitas warga dan berpotensi menimbulkan kecelakaan	Jetisharjo RT 022/RW 005, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	kegiatan	330000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
89	[06.09] Padat Karya Infrastruktur	Ada tiga kali bencana longsor di Kampung Tompeyan. Terakhir, bencana ini menipa rumah bapak Suroso, warga RT 07/ RW 03 pada 25 Februari 2022. Meski tanah longsor sepanjang 4 meter tidak mengakibatkan ada korban jiwa, namun menimbulkan kerugian material. sebagian bangunan rumah bapak Suroso mengalami kerusakan. Beberapa tahun sebelumnya, di belakang rumah tersebut juga mengalami longsor sepanjang 5 meter. selain bapak suroso ada 5 KK yang tinggal di bantaran Sungai Winongo.	Kampung Tompeyan RT 07/ RW 03, Tegalrejo, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	kegiatan	330000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
90	[06.09] Padat Karya Infrastruktur	Masyarakat Bangunrejo RW 12 mayoritas bekerja buruh harian lepas sehingga banyak ditemukan warga ekonomi rentan. dalam meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pemerintah kelurahan kricak sudah membantu secara fisik maupun non fisik. namun, karena keterbatasan kelurahan kricak sehingga tidak mampu untuk menjangkau 3 kampung. Oleh karena itu butuhnya perhatian dan bantuan dari pemerintah kota Yogyakarta khususnya dalam hal sarana dan prasarana Peningkatan Fungsi Jalan	Bangunrejo RT 52, RT 55/ RW 12, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	kegiatan	330000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
91	[03.24] Promosi atau sosialisasi tentang jaminan kesehatan	masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi serta langkah penggunaaan jaminan kesehatan	Cokrodirjan, kelurahan Suryatmajan , Danurejan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	orang	-	-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
92	[10.03] Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran penduduk	Kampung Suryatmajan, Kelurahan Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50	orang	4990000	-	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
93	[23.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	Saluran Air imbah yang macet dan sering membuat air menjadi meluap	jalan Lempuyangan, Depan Stasiun Kereta Lempuyangan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	500	m	550000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
94	[23.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	Saluran Air Limbah yang sering macet dan menjadi langganan meluap keluar disaat musim penghujan tiba	RT37 RT 41 RW 10 kampung Bausasran ,Kelurahan Bausasran, Danurejan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	500	m	7500000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
95	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah tidak layak huni Roni Kiswanto	Singojayan no 85, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

96	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah tidak layak huni David Margono	Singojayan no 92, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
97	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	Pemenuhan Gizi Lansia dan Balita	Singojayan RW 01, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	titik	924000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
98	[16.03] Pengembangan usaha mikro kecil dan penguatan manajemen berusaha yang berlegalitas dan naik kelas	belum semua pelaku usah memiliki PIRT dan NIB	RT 5 Karangwaru Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	kelompok	3900000	-	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
99	[23.05] Perbaikan Saluran Air Limbah	Pipa sudah macet,sehingga menyebabkan air meluap dan air masuk ke rumah penduduk	Brontokusuman Rt 10 Rw 04, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	20	M2	22000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
100	[06.14] Pelatihan Desain Grafis tingkat kota	ilmu dan ketrampilan desain grafis yang tentunya deasa ini sangat dibutuhkan tapi nyatanya masih banyak muda mudi yang belum mahir dalam bidang desain grafis	Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18	orang	49500000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
101	[06.07] Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	perkembangan jaman yang menuntut agar masyarakat mengerti tentang pentingnya social media marketing	Kampung Bausasran, Bausasran, Danurejan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	44000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
102	[03.14] Penyuluhan tentang kesehatan Diabetes Melitus	kelompok Lansia wilayah yang tentunya harus diberi pengetahuan tentang Diabetes Militus	Kampung Surytamajan, Suryatmajan, danurejan , Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	26	orang	598000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
103	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Ibu Wanti Rahayu Atapnya sudah banyak yang bocor,perlu pwrbaikan	Keparakan Lor MGI/613 Rt 28 Rw 07 Kelurahan Keparakan Kemantren Mergangsan , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
104	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Bapak Herdy Kristin atapnya sudah rusak,perlu perbaikan	Suryoputran PB3/98 Rt 34 Rw 09 Kelurahan Panembahan Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
105	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Bp Budi Raharjo Dinding dan lantainya rusak,perlu perbaikan	Keparakan Lor MGI/565 Rt 30 Rw 07 Kelurahan Keparakan Kemantren Mergangsan , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
106	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Bpk Ali Mujiman Atap dan dindingnya Rusak,perlu perbaikan	Keparakan Lor MGI/696 Rt 36 Rw 08 Kelurahan Keparakan Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
107	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Ibu Tri Yuni Nurwarni Atapnya sudah bocor,perlu perbaikan	Keparakan Lor MGI/757 Rt 33 Rw 08 Kelurahan Keparakan Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
108	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Ibu Indriyani Dyah Atapnya bocor,perlu perbaikan	Keparakan Lor MGI/621 Rt 29 Rw 07 Kelurahan keparakan Kemantren Mergangsan , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
109	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Bp Bagus Sugiarto Dindingnya banyak yang Retak dan lantainya jebol,Perlu perbaikan	Keparakan Lor MGI/600 Rt 30 Rw 07 Kelurahan Keparakan Kemantren Mergangsan , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
110	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Bp Budiman Atapnya bocor,Perlu perbaikan	Dipowinatan MGI/108 Rt 08 Rw 02 Kelurahan Keparakan Kemantren Mergangsan , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
111	[03.07] Inisiasi Posyandu Remaja	mendorong keterlibatan para remaja dan anak muda dalam kegiatan posyandu	Purbayan Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100	Orang	1250000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
112	[03.05] Penyuluhan Kesehatan untuk Ibu Balita	bertambahnya pemahaman para ibu dalam pengasuhan balita yang sehat	Purbayan Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100	orang	2800000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
113	[03.09] Pelatihan kader Posbindu	peningkatan pemahaman kader posyandu di wilayah dengan lokasi posyandu	Purbayan Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100	Orang	8340000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
114	[03.24] Promosi atau sosialisasi tentang jaminan kesehatan	banyak masyarakat belum faham terkait Jaminan Kesehatan	purbayan kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	Orang	-	-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

115	[03.24] Promosi atau sosialisasi tentang jaminan kesehatan	banyak masyarakat belum faham terkait Jaminan Kesehatan	Prenggan Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	orang	-	-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
116	[03.24] Promosi atau sosialisasi tentang jaminan kesehatan	banyak masyarakat belum faham terkait Jaminan Kesehatan	Rejowinangun Kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	Orang	-	-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
117	[03.24] Promosi atau sosialisasi tentang jaminan kesehatan	banyak masyarakat belum faham terkait Jaminan Kesehatan	Kelurahan Warungboto Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	Orang	-	-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
118	[03.24] Promosi atau sosialisasi tentang jaminan kesehatan	banyak masyarakat belum faham terkait Jaminan Kesehatan	Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	Orang	-	-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
119	[03.24] Promosi atau sosialisasi tentang jaminan kesehatan	banyak masyarakat belum faham terkait Jaminan Kesehatan	Kelurahan Sorosutan Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	Orang	-	-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
120	[03.24] Promosi atau sosialisasi tentang jaminan kesehatan	banyak masyarakat belum faham terkait Jaminan Kesehatan	kelurahan Semaki kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	Orang	-	-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
121	[03.24] Promosi atau sosialisasi tentang jaminan kesehatan	Banyak masyarakat belum faham terkait Jaminan Kesehatan	Kelurahan Tahunan Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	Orang	-	-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
122	[03.24] Promosi atau sosialisasi tentang jaminan kesehatan	Banyak masyarakat belum faham terkait Jaminan Kesehatan	Kelurahan Giwangan Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	Orang	-	-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
123	[03.24] Promosi atau sosialisasi tentang jaminan kesehatan	Banyak masyarakat belum faham terkait Jaminan Kesehatan	Kelurahan Muja-Muju Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	Orang	-	-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
124	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	rumah yang dihuni lansia dan hidup sendiri ini dalam keadaan tidak layak dan berbahaya, dengan atap rumah banyak yang bocor dan tiang rumah mau roboh	Rumah Ibu Purwatmi, RT 07 RW 03 Gemblakan atas , Suryatmajan , danurejan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
125	[21.01] Pembangunan gedung milik daerah	Pembangunan Gedung Milik Daerah: Pembuatan DED dan Pembangunan Gedung Serbaguna eks Balai eks RK Basen , kompensasi atas hibah tanah dari warga ke pemkot tahun 2019	RW 05 Basen Kelurahan Purbayan Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	130	m2	60000000	-	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
126	[25.01] Pembangunan Talud Permukiman	Pembangunan Talud Pemukiman (Pembangunan Talud di kawasan benteng cepuri) , RT 41 dan 42 RW 10 (pojok Selatan dan depan masjid Sholihin)	RT 41 dan 42 RW 10 (pojok Selatan dan depan masjid Sholihin), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	200	m3	600000000	-	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
127	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	rumah yang dihuni oleh seorang ibu Lansia ini sangat tidak layak dimana genteng dan tiang-tiang rumah terlihat banyak yg rusak	Rumah Ibu Saniyem, Cokrodirjan DN2/368 Suryatmajan , danurejan Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
128	[24.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Pemasangan baru Penerangan Jalan Umum di Lingkungan	RT 34, rt 35 , RT 36 RW 11 Kampung Pilahan Kelurahan Rejowinangun Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	23	Titik	138000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
129	[24.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Pemasangan baru Penerangan Jalan Umum di Lingkungan	RT 53, RT 54, RT 55 RW 13 Kampung Purbayan Kelurahan Purbayan Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	45	Titik	225000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
130	[24.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Pemasangan baru Penerangan Jalan Umum di Lingkungan	RT 48 RW 05 Kelurahan Rejowiangun Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	8	titik	48000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
131	[24.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Penerangan Jalan Umum Pengganti Lampu PLN di jl. Karangsari dan jl. Semangu	PJU Lingkungan kampung Jl. Karangsari dan Jl. Semangu Kelurahan Rejowinangun Kotagedec, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	titik	225000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
132	[24.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Penerangan Jalan Lingkungan	RT 15 RW 05 Kelurahan Rejowinangun Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	titik	90000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
133	[24.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Penerangan Jalan Umum Lingkungan	RW 01 Kampung Gedongkuning Kelurahan Rejowinangun Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	25	titik	150000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

134	[24.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Penerangan Jalan Umum	Gang Andhinni Gang Dwipangga Gang Turangga , Makam Setyo Binangun rw 07 Rejowinangun Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	30	titik	180000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
135	[24.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Penerangan Jalan Umum	RW 04 janturan warungboto Kelurahan Warungboto Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	30	titik	180000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
136	[24.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Jalan aspal Rusak ,	Gang saridi Gang Rajiman RW 06 Pandeyan Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	200	m2	200000000	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
137	[24.03] Peningkatan Jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Penggantian jalan cor blok menjadi jalan aspal	Gendeng Jalan Mojo III Kelurahan Baciro Kemantren Gondokusuman (08122906911 an. Agus Tri Cahyono, Ir. MT, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	571	m3	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
138	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Kurangnyan pemahaman tentang bergada bagi kelompok budaya di wilayah tegalpanggung, sehingga perlu adanya pembinaan kelompok workshop budaya	RKB Kelurahan Tegalpanggung, Danurejan (08156857234), , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	orang	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
139	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Pengadaaan Sarana Prasarana Kelompok Barongsai Mahkota Suci	Tukangan DN 2/449 RT. 23 RW.05, Tukangan, Tegalpanggung, Danurejan 55212 (087720317997 AN. Yuli Sapta Wulandari, S. Pd), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	Paket	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
140	[17.04] Pendampingan Kelompok Tani	Perlunya pendampingan kelompok Tani	Kelompk Tani Sukowati Kelurahan Purbayan Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	15	Orang	-	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
141	[17.04] Pendampingan Kelompok Tani	perlunya pendamoingan bagi kelompok tani	KWT Maharani Basen RW 04 Kelurahan Purbayan Kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	15	Orang	-	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
142	[09.06] Penguatan Kampung Ramah Anak (KRA)	perlunya penguatan bagi pendampingan anak	Kelurahan Purbayan Kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Kali	3880000	-	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
143	[22.02] Perbaikan /Pemeliharaan Talud Sungai	Lokasi rawan banjir di Kali Belik yang terletak diperbatasan antara kampung Ironmejan dan Sagan	Kali Belik yang terletak diperbatasan antara kampung Ironmejan dan Sagan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	M3	1500000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
144	[22.04] Perbaikan /Pemeliharaan Irigasi permukaan	Dampak banjir yang ditimbulkan membuat aktifitas ekonomi di wilayah RT 30 RW 07, RT 31 RW 08 kampung Ironmejan, Klitren lumpuh	RT 30 RW 07, RT 31 RW 08 kampung Ironmejan, Klitren lumpuh, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	M3	300000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
145	[22.03] Perbaikan /Pemeliharaan Talud Sungai	Solusi penanganan banjir bisa diatasi jika air yang mengalir tidak hanya disalurkan melalui Kali Belik saja, melainkan juga disalurkan melalui Kali yang ada di wilayah Jln. Prof. Yohanes Sagan, sebelah timur Galeria Mall, dimana saat ini kali tersebut tidak berfungsi	Timur Galeria Mall, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	M3	1500000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
146	[07.01] Soisalisasi JPD	Permohonan advokasi ijazah yang tertinggal/ tertahan disekolahan dikarenakan tunggakan biaya sekolah	Gondokusuman dan Danurejan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	10	orang	-	-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
147	[22.04] Perbaikan /Pemeliharaan Irigasi permukaan	Di wilayah RW 02 Bausasran, Saluran Air Hujan (SAH) terutama di selokan air mayoritas buntu, sehingga diusulkan agar dilakukan pengerukan air tersebut	Wilayah RW 02 Bausasran, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	M3	300000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
148	[25.02] Pemeliharaan Talud Permukiman	Permohonan perbaikan SAL dan SAH disepanjang jalan Karno Waluyo RW 05 RW 06 Tegal Panggung Danurejan. Cp: Suhariyanto (0896 7039 8152)	Disepanjang jalan Karno Waluyo RW 05 RW 06 Tegal Panggung Danurejan. Cp: Suhariyanto (0896 7039 8152), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	M3	300000000	-	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

149	[23.05] Perbaikan Saluran Air Limbah	Permohonan perbaikan SAL dan SAH disepanjang jalan Karno Waluyo RW 05 RW 06 Tegal Panggung Danurejan. Cp: Suhariyanto (0896 7039 8152)	Disepanjang jalan Karno Waluyo RW 05 RW 06 Tegal Panggung Danurejan. Cp: Suhariyanto (0896 7039 8152), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	M3	110000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
150	[25.02] Pemeliharaan Talud Permukiman	Saluran Air Hujan (SAH) di RT 16, 17, dan 18 Kampung Sosrokusuman Suryatmajan bermasalah dan sering melua	RT 16, 17, dan 18 Kampung Sosrokusuman Suryatmajan , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	M3	300000000	-	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
151	[16.06] Penguatan manajemen Karang Mitra Usaha (KAMU)	Warga pelaku UMKM membutuhkan tambahan modal	Gondokusuman dan Danurejan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	50	orang	50000000	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
152	[06.05] Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota	Warga RW 09 Suryatmajan berharap ada pelatihan keterampilan buat warga seperti menjahit, memasak, dan lain-lain	Warga RW 09 Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	94600000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
153	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Bp Iwan Wardoyo Atapnya bocor,perlu perbaikan	Keparakan Kidul MGI/1221 Rt 56 Rw 13 Kelurahan Keparakan Kemantren Mergangsan , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
154	[17.02] Rintisan Kampung Pangan Lestari (RKPL)	Pelatihan olahan pangan dengan bahan baku pisang	RT10 RW 02 Tegalmulyo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1	titik	1329000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
155	[22.01] Pembangunan Talud Sungai	Karna curah hujan yang sangat deras menyebabkan dinding talud tergerus dan mengalami kerusakan .	Bumijo, Kec.Jetis, Kota Yogyakarta., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	125	m3	1300000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
156	[22.01] Pembangunan Talud Sungai	Pembangunan talud sungai untuk melindungi sarpras umum diatasnya.	Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	200	m3	3000000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
157	[06.07] Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	perlunya pelatihan sosial media bagi pemuda	Tersebar Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	44000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
158	[03.07] Inisiasi Posyandu Remaja	perlunya pengetahuan terkait kesehatan bagi remaja	Kelurahaan Tegal Panggung Kemantren danurejan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	orang	24840000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
159	[03.07] Inisiasi Posyandu Remaja	Perlunya pengetahuan posyandu di kalangan remaja	RW 07 Ronodigdayan Kelurahan Bausasran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	20	orang	220000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
160	[03.07] Inisiasi Posyandu Remaja	perlunya informasi dan pengetahuan tentang posyandu di kalangan remaja	Kampung Cokrodirjan Kelurahan suryatmajan Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	20	orang	220000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
161	[03.22] Sosialisasi lintas sektor dan masyarakat di wilayah terkait update info kesehatan dan program kerja kesehatan dari pemerintah	perlunya masyarakat mengetahui perkembangan terkini terkait kebijakan kesehatan	Kelurahan Purbayan Kemantren Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	Orang	2200000	-	Operasional Pelayanan Puskesmas
162	[18.03] Pelayanan Perpustakaan Keliling	perlunya gencar dilakukan sosialisasi dan pelayanan perpustakan keliling untuk meningkatkan minat baca warga masyarakat	Kampung Ledok Tukangan Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50	orang	-	-	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
163	[03.22] Sosialisasi lintas sektor dan masyarakat di wilayah terkait update info kesehatan dan program kerja kesehatan dari pemerintah	perlunya masyarakat mengetahui perkembangan terkini terkait kebijakan kesehatan	Kelurahan Prenggan Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	Orang	2200000	-	Operasional Pelayanan Puskesmas
164	[03.22] Sosialisasi lintas sektor dan masyarakat di wilayah terkait update info kesehatan dan program kerja kesehatan dari pemerintah	perlunya masyarakat mengetahui perkembangan terkini terkait kebijakan kesehatan	Kelurahan Rejowinangun Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	Orang	2000000	-	Operasional Pelayanan Puskesmas
165	[23.05] Perbaikan Saluran Air Limbah	banyaknya permasalahan saluran air limbah di kampung Tegalkemuning	Kampung Tegalkemuning Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	300	m2	330000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
166	[03.05] Penyuluhan Kesehatan untuk Ibu Balita	bertambahnya pemahaman para ibu dalam pengasuhan balita yang sehat	Kelurahan Prenggan Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	Orang	2800000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
167	[03.05] Penyuluhan Kesehatan untuk Ibu Balita	bertambahnya pemahaman para ibu dalam pengasuhan balita yang sehat	Kelurahan Rejowinangun Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	Orang	782000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

168	[09.02] Penguatan Kapasitas Pengelola Rumah Data Kependudukan	agar pengurus rumah data dapat menjalankan programnya dengan baik	kelurahan Purbayan Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30	Orang	1628000	-	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
169	[11.01] Peningkatan Kapasitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)	Perlunya peningkatan kapasitas Pengurus KTB Kampung Purbayan	Kampung Purbayan Kelurahan Purbayan Kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	Orang	10000000	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
170	[11.01] Peningkatan Kapasitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)	perlunya peningkatan kapasitas bagi pengurus KTB Basen	Kelurahan Purbayan Kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	Orang	10000000	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
171	[11.01] Peningkatan Kapasitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)	perlunya peningkatan kapasitas pengurus KTB alun-alun	Kelurahan Purbayan Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	Orang	10000000	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
172	[12.03] Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana Satlinmas	perlunya pelatihan dasar penanggulangan Bencana pada Satlinmas kelurahan	Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	50	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
173	[12.03] Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana Satlinmas	perlunya pelatihan dasar penanggulangan Bencana pada Satlinmas kelurahan	Kelurahan Bausasran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	50	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
174	[24.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Pengadaan Penerangan Jalan Umum	Kp.Jagalan Ledoksari = 10 titik/unit (RW 01), Kp.Jagalan Beji : 10 titik/unit (RW 02), Kp. Kepatihan = 5 titik (RW 9 & RW 10), Kp.Purwokinanti=2 titik (RT 21 RW 5), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	27	Unit	162000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
175	[15.06] Pelatihan Kepariwisataan	perlunya pemahaman terkait pariwisata bagi masyarakat	Kampung Wisata purbayan Kelurahan Purbayan Kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	50	Orang	47250000	-	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
176	[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	perlunya kegiatan untuk menampilkan potensi di Kampung Wisata Purbayan kotagede	Kelurahan Purbayan Kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	paket	735000000	-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
177	[15.04] Promosi melalui berbagai media / mengiklankan potensi wisata yang siap jual melalui media cetak, elektronik, virtual, maupun media sosial	Banyak Potensi Wisata Di Kampung Jagalan Ledoksari, Seperti Wisata Kuliner dan Situs Bersejarah yang perlu di promosikan	Kampung Jagalan Ledoksari, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	Kali	-	-	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
178	[15.03] Pentas Kawasan / menampilkan seluruh potensi wisata pada suatu kawasan destinasi wisata dan sekitarnya terutama destinasi wisata baru yang belum dikenal	Pementasan Atraksi Seni Jagalan Festival yang diselenggarakan setiap Tahun, menampilkan potensi seni dan kuliner Kawasan Wisata Baru Kampung Jagalan Ledoksari	Kampung Jagalan Ledoksari, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	Pengisi Acara	5000000	-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
179	[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	Perlu Atraksi Seni Jagalan Festival yang diselenggarakan setiap Tahun di Kampung Jagalan Ledoksari, untuk menampilkan potensi wisata seni, budaya, dan UMKM pariwisata	Kampung Wisata Jagalan Ledoksari, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	Kampung Wisata	735000000	-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
180	[24.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Mohon warga kami diperhatikan, jalan dikampung sudah bertahun-tahun tidak pernah diaspal ulang.	Kampung Mangunegaran RW 16,17,18 PIC Pak Frans (+62 812-2037-0889) , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1694	m2	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
181	[23.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	sampah numpuk untuk saluran limbah tidak ada perawatan mohon untuk perawatannya	Kampung Panembahan RW 15 PIC +62 812-2037-0889 (pak Frans), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	m2	225000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

182	[24.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Jalan Aspal di sepanjang Patehan Tengah sudah lama tidak mendapat perbaikan dan di beberapa sisi sudah bolong dan tidak baik, padahal Jalan Patehan Tengah merupakan penghubung Jalan utama menuju alun-alun selatan dan plengkung gading serta merupakan jalan alternatif pemecah kerumunan dan kemacetan jika terjadi kemacetan di plengkung gading dan alun-alun selatan.	Jalan Patehan Tengah, Kalurahan Patehan, Kemantren Kraton Kota Yogyakarta. Contact Person : 082218195445(Taufik Nur Budi, Ketua RT 21 Kampung Patehan Tengah)., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	350	meter	200000000	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
183	[24.03] Peningkatan Jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pengaspalan Jalan Anggrek RW 08 Baciro Gondokusuman	Sepanjaang Jalan Anggrek RW 08 Baciro Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	225	meter	200000000	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
184	[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	Perlu kegiatan Atraksi Seni Harjowinatan Festival yang diselenggarakan setiap Tahun di Kampung Kepatihan, untuk menampilkan potensi wisata seni, budaya, dan UMKM di wilayah	Kampung Kepatihan, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	Kampung Wisata	735000000	-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
185	[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	Perlu kegiatan Atraksi Seni Purwokinanti Festival yang diselenggarakan setiap Tahun di Kampung Jagalan Ledoksari, untuk menampilkan potensi wisata seni, budaya, dan UMKM	Kampung Wisata Purwokinanti, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	Kampung Wisata	735000000	-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
186	[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	Perlu kegiatan Atraksi Seni Ratmakan Festival yang diselenggarakan setiap Tahun di Kampung Jagalan Ledoksari, untuk menampilkan potensi wisata seni, budaya, dan UMKM	Kampung Wisata Ratmakan, Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	Kampung Wisata	735000000	-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
187	[20.01] Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	FASILITASI PEMBANGUNAN UNTUK RTHP KELURAHAN PRENGGAN	RW 11 RT 55 PRENGGAN,KOTA GEDE, PIC/PENANGGUNG JAWAB (PUJI WIDODO 0895418905335) , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1619	m2	1200000000	-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
188	[15.03] Pentas Kawasan / menampilkan seluruh potensi wisata pada suatu kawasan destinasi wisata dan sekitarnya terutama destinasi wisata baru yang belum dikenal	Pementasan Kawasan Kampung Wisata Kepatihan, menampilkan potensi seni dan kuliner Kawasan Wisata Baru Kampung Kepatihan	Kampung Kepatihan, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	Pengisi Acara	128820000	-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
189	[23.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	FASILITASI PEMBANGUNAN SALURAN AIR LIMBAH	Tempel RW 11 , Tahunan, Umbulharjo, PIC (SENO 08995135798), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	meter	1500000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
190	[18.04] Sosialisasi pengelolaan arsip keluarga	Pentingnya pembelajaran arsip bagi masyarakat	Kelurahan Purwokinanti, Jl. Harjowinatan No.19, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35	orang	-	-	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
191	[17.05] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Pembentukan dan Pengembangan Pembudidaya Ikan Lele untuk menunjang perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta	Jl. Harjowinatan No.19, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1	Angkatan (20 orang)	-	-	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
192	[16.05] Pendampingan Sentra bagi Industri Kecil Menengah (IKM)	Pendampingan tenaga ahli sesuai dengan arah pengembangan sentra Bakpia Pathuk	Kampung Pathuk, Kelurahan Ngampilan, Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	sentra	1195000	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
193	[22.02] Perbaikan /Pemeliharaan Talud Sungai	Banjir melanda kawasan pemukiman yang selalu menjadi langganan saat musim penghujan di sepanjang Kali belik (perbatasan Sagan dan Ironmejan) dengan titik terparah di RT 30 RW 07 serta RT 31 RW 08 kampung Ironmejan ,kelurahan Klitren, Gondokusuman, bisa diatasi dengan cara meninggikan talud disepanjang Kali Belik	RT 30 RW 07 dan RT 31 RW 08 Kampung Ironmejan , kelurahan Klitren , Gondokusuman Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Andi '0817468878, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	500	meter	5000000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
194	[06.08] Pelatihan Satpam tingkat kota	seiring ikon Jogja sebagai kota pariwisata ,banyaknya pemuda pemudi lulus SMA yang sangat berminat untuk bekerja menjadi security di hotel tetapi terkendala belum memiliki ijasah security	Sosrokusuman RW 06 Suryatmajan , Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Andi '0817468878, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	88000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
195	[03.02] Peningkatan kapasitas kader dalam kompetensi klaster 2 untuk posyandu meliputi ibu dan anak sesuai transformasi layanan primer	masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi serta langkah penggunaaan jaminan kesehatan	Cokrodirjan, kelurahan Suryatmajan , Danurejan, Kota Yogyakarta, Andi '0817468878, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	30	orang	690000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

196	[10.03] Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran penduduk	Kampung Suryatmajan, Kelurahan Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Andi '0817468878, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50	orang	4990000	-	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
197	[23.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	Saluran Air imbah yang macet dan sering membuat air menjadi meluap	jalan Lempuyangan, Depan Stasiun Kereta Lempuyangan, Kota Yogyakarta, Andi '0817468878, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	500	meter	7500000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
198	[24.08] Pengadaan dan Pemeliharaan Marka Jalan Perkotaan	mengurangi kecepatan motor para pengguna jalan mengingat di kedua jalan ini merupakan jalan pintas yang ramai dipakai oleh pengguna jalan	jalan Abiyoso RT 10 RW 03 Demangan Gondokusuman, Kota Yogyakarta , Andi '0817468878, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	1	titik	5600000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
199	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni Sudarmawan	Ngadimulyo RW 03 RT 14 Pakuncen, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
200	[23.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	Saluran Air Limbah yang sering macet dan menjadi langganan meluap keluar disaat musim penghujan tiba	RT37 RT 41 RW 10 kampung Bausasran ,Kelurahan Bausasran, Danurejan, Kota Yogyakarta, Andi '0817468878, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	500	meter	7500000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
201	[06.14] Pelatihan Desain Grafis tingkat kota	ilmu dan ketrampilan desain grafis yang tentunya deasa ini sangat dibutuhkan tapi nyatanya masih banyak muda mudi yang belum mahir dalam bidang desain grafis	Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Andi '0817468878, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18	orang	49500000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
202	[24.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Perbaikan Jalan/Konblok depan Masjid	RW 03 Ngadimulyo Pakuncen, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	titik	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
203	[06.07] Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	perkembangan jaman yang menuntut agar masyarakat mengerti tentang pentingnya social media marketing	Kampung Bausasran, Bausasran, Danurejan, Kota Yogyakarta, Andi '0817468878, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	44000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
204	[24.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pengasapalan Jalan Menjangan sepanjang 100 Meter	RW 06 Kleben Pakuncen, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	titik	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
205	[03.14] Penyuluhan tentang kesehatan Diabetes Melitus	kelompok Lansia wilayah yang tentunya harus diberi pengetahuan tentang Diabetes Militus	Kampung Surytamajan, Suryatmajan, danurejan , Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Andi '0817468878, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	26	orang	598000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
206	[16.05] Pendampingan Sentra bagi Industri Kecil Menengah (IKM)	Pendampingan peningkatan Kualits Sentra Ketupat	RW 05 Pakuncen Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	Kelompok	610000	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
207	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah tidak layak huni an Sutarto	RT 41 RW 09 Gampingan Pakuncen, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
208	[12.05] Perawatan Kampung Panca Tertib	Evaluai Kegiatan Tertib Lingkungan dan Tertib Sosial FKPT (Forum Kampung Panca Tertib) Purwokinanti	Forum Kampung Panca Tertib (FKPT) Purwokinanti, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	1	kampung	3680000	-	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
209	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah tidak layak huni Ibu Kusbini	RT 48 RW 11 Gampingan Pakuncen Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
210	[12.05] Perawatan Kampung Panca Tertib	Evaluai Kegiatan Tertib Lingkungan dan Tertib Sosial FKPT (Forum Kampung Panca Tertib) Jagalan Ledoksari	Forum Kampung Panca Tertib (FKPT) Jagalan Ledoksari, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	1	kampung	3680000	-	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

211	[12.05] Perawatan Kampung Panca Tertib	Evaluai Kegiatan Tertib Lingkungan dan Tertib Sosial FKPT (Forum Kampung Panca Tertib) Jagalan Beji	Forum Kampung Panca Tertib (FKPT) Jagalan Beji, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	1	kampung	3680000	-	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
212	[12.05] Perawatan Kampung Panca Tertib	Evaluai Kegiatan Tertib Lingkungan dan Tertib Sosial FKPT (Forum Kampung Panca Tertib) Kepatihan	Forum Kampung Panca Tertib (FKPT) Kepatihan, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	1	kampung	3680000	-	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
213	[23.05] Perbaikan Saluran Air Limbah	SAL yang di jalan kampung, mohon untuk dibersihkan. Sudah bertahun-tahun tidak diadakan pelumpuran, mohon segera kalua hujan meluap.	Kampung Kadipaten Wetan RW 8 PIC +62 812-2037-0889 (pak Frans), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	25	m2	27500000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
214	[11.01] Peningkatan Kapasitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)	Kebutuhan akan peningkatan kompetensi KTB Jagalan Ledoksari, KTB Jagalan Beji, KTB Purwokinanti, dan KTB Kepatihan baik anggota, pengurus maupun masyarakat di Kelurahan Purwokianti terkait mitigasi bencana banjir, kebakaran, dan risiko bencana	Jl. Harjowinatan No.19, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	kegiatan	10000000	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
215	[04.02] Sunatan Massal Tingkat Kota	Bantuan sunatan massal gratis se kemantren Mantrijeron	RW 13 Dukuh, Gedongkiwo Mantrijeron, Yogyakarta a.n. Yulius Widyartoro Dewa 085225650865, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	orang	85350000	-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
216	[11.01] Peningkatan Kapasitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)	Kebutuhan akan peningkatan kompetensi KTB baik anggota, pengurus maupun masyarakat di Kelurahan Gunungketur terkait mitigasi bencana dan risiko bencana	Jl. Jayaningprangan No.10, Kelurahan Gunungketur, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	kegiatan	10000000	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
217	[11.02] Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Pentingnya sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran dini seperti memadamkan api dengan selimut dan apar ,pengetahuan bahaya kebakaran pada 4 Kampung di Kelurahan Purwokinanti	4 Kampung (Kampung Jagalan Ledoksari, Kampung Jagalan Beji, Kampung Purwokinanti, Kampung Kepatihan) di Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	kegiatan	15512000	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
218	[25.01] Pembangunan Talud Permukiman	Pembangunan talud di area pemukiman rawan longsor	RW 11 Gedongkiwo, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Agung Ari Subagyo 085726497470, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	m3	300000000	-	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
219	[11.02] Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Pentingnya sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran dini seperti memadamkan api dengan selimut dan apar ,pengetahuan bahaya kebakaran pada 4 Kampung di Kelurahan Gunungketur	4 Kampung (Kampung Margoyasan, Kampung Nototarunan, Kampung Gunungketur, Kampung Kauman) di Kelurahan Gunungketur, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	kegiatan	15512000	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
220	[08.01] Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan	Pentingnya Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Kelurahan Purwokinanti	Jl. Harjowinatan No.19, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2	orang	310000	-	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota

221	[08.01] Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan	Pentingnya Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Kelurahan Gunungketur	Jl. Jayaningprangan No. 10, Kelurahan Gunungketur, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	45	kelurahan	59145000	-	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
222	[25.02] Pemeliharaan Talud Permukiman	Perbaikan talud kawasan permukiman rawan longsor.	RT 40 RW 9 Gedongkiwo, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Haryono Thomas ; 083822746999, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	m3	300000000	-	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
223	[25.01] Pembangunan Talud Permukiman	Pembangunan talud kawasan permukiman rawan longsor	RW 8 Gedongkiwo, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Bambang Lesmono ; 085643083378, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	meter	300000000	-	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
224	[17.03] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pengembangan Pertanian Perkotaan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga	(KT Purwotani, KT Tuwuh Kinanti, KT Kinanti Asri) Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1	kali	320000	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
225	[11.03] Pelatihan Redkar (relawan kebakaran)	Perlunya pelatihan relawan kebakaran bagi kelurahan di Kota Yogyakarta	Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	65	orang	7701000	-	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
226	[11.03] Pelatihan Redkar (relawan kebakaran)	Perlunya pelatihan relawan kebakaran bagi kelurahan di Kota Yogyakarta	Kelurahan Bausasran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	65	orang	7701000	-	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
227	[11.03] Pelatihan Redkar (relawan kebakaran)	Perlunya pelatihan relawan kebakaran bagi kelurahan di Kota Yogyakarta	Kelurahan Baciro Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	65	orang	7701000	-	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
228	[11.03] Pelatihan Redkar (relawan kebakaran)	Perlunya pelatihan relawan kebakaran bagi kelurahan di Kota Yogyakarta	Kelurahan Kotabaru Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	65	orang	7701000	-	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
229	[11.03] Pelatihan Redkar (relawan kebakaran)	Perlunya pelatihan relawan kebakaran bagi kelurahan di Kota Yogyakarta	Kelurahan Suryatmajan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	65	orang	7701000	-	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
230	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	perlu adanya pengembangan pada kampung sayur di kelurahan dengan harapan bisa lebih tumbuh dan berkembang dalam semua aspek	Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	20	orang	1329000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
231	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	perlu adanya pengembangan pada kampung sayur di kelurahan dengan harapan bisa lebih tumbuh dan berkembang dalam semua aspek	Kelurahan Bausasran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	20	orang	1329000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
232	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	perlu adanya pengembangan pada kampung sayur di kelurahan dengan harapan bisa lebih tumbuh dan berkembang dalam semua aspek	Kelurahan Baciro Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	20	orang	1329000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
233	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	perlu adanya pengembangan pada kampung sayur di kelurahan dengan harapan bisa lebih tumbuh dan berkembang dalam semua aspek	Kelurahan Kotabaru Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	20	orang	1329000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
234	[12.02] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Petugas Linmas Kelurahan perlu dikembangkan kapasitas SDM nya guna menunjang ketrampilannya	Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	50	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
235	[12.02] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Petugas Linmas Kelurahan perlu dikembangkan kapasitas SDM nya guna menunjang ketrampilannya	Kelurahan Bausasran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	50	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas

236	[12.02] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Petugas Linmas Kelurahan perlu dikembangkan kapasitas SDM nya guna menunjang ketrampilannya	Kelurahan Suryatmajan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	50	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
237	[12.02] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Petugas Linmas Kelurahan perlu dikembangkan kapasitas SDM nya guna menunjang ketrampilannya	Kelurahan Kotabaru Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	50	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
238	[12.02] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Petugas Linmas Kelurahan perlu dikembangkan kapasitas SDM nya guna menunjang ketrampilannya	Kelurahan Baciro Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	50	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
239	[12.05] Perawatan Kampung Panca Tertib	perlu pembinaan pengurus panca tertib se kelurahan Purbayan	Kelurahan Purbayan Kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	50	Orang	3680000	-	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
240	[03.07] Inisiasi Posyandu Remaja	perlunya pembinaan bagi posyandu remaja di Kelurahan Prenggan	Kelurahan Prenggan Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	Orang	500000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
241	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Mencegah genangan air dan banjir, menjaga infrastruktur jalan tetap terjaga, serta meningkatkan kenyamanan lingkungan warga.	Gang Srigunting RW.02 jl. Kukilo RT.09 RW.02 Kelurahan Tahunan Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	246	m2	1500000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
242	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Mengatasi genangan air, meningkatkan sistem drainase, dan menjaga infrastruktur lingkungan.	Gg VI RT 029 RW 07 Kelurahan Tahunan Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	800	m3	4800000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
243	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Mengontrol aliran air, mencegah banjir, dan melindungi infrastruktur.	RT 25 RW 06 Jl Soga ke Jalan Wijaya Kelurahan Tahunan Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	30	m3	90000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
244	[22.04] Perbaikan /Pemeliharaan Irigasi permukaan	Melancarkan aliran air untuk kebutuhan irigasi pertanian.	RT 19,21,22,49, (RW 05)& RW 07 Kelurahan Tahunan kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	40	m3	150000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
245	[17.07] Bimbingan Teknis Olahan Produk Perikanan	Masyarakat Butuh bimbingan teknis dalam hal mengolah produk perikanan yang lebih bergii dan terjangkau	Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	50	orang	350000	-	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
246	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Menjaga fungsi saluran air, mencegah genangan dan banjir, serta melindungi infrastruktur.	pertigaan Jalan Wijaya - jl. Soga - Jl. Celeban Kelurahan Tahunan Kemantren Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	450	m3	1350000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
247	[17.07] Bimbingan Teknis Olahan Produk Perikanan	Masyarakat Butuh bimbingan teknis dalam hal mengolah produk perikanan yang lebih bergiizi dan terjangkau	Kelurahan Bausasran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	50	orang	350000	-	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
248	[24.03] Peningkatan Jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Karna curah hujan sangat deras, dan intensitas kendaraan roda 4 sangat tinggi menyebabkan jalan banyak berlubang.	Jalan Pingit , Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	m3	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
249	[17.07] Bimbingan Teknis Olahan Produk Perikanan	Masyarakat Butuh bimbingan teknis dalam hal mengolah produk perikanan yang lebih bergiizi dan terjangkau	Kelurahan Kotabaru Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	50	orang	350000	-	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko

250	[17.07] Bimbingan Teknis Olahan Produk Perikanan	Masyarakat Butuh bimbingan teknis dalam hal mengolah produk perikanan yang lebih bergiizi dan terjangkau	Kelurahan Baciro Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	50	orang	350000	-	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
251	[17.07] Bimbingan Teknis Olahan Produk Perikanan	Masyarakat Butuh bimbingan teknis dalam hal mengolah produk perikanan yang lebih bergiizi dan terjangkau	Kelurahan Suryatmajan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	50	orang	350000	-	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
252	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Menjaga fungsi saluran air, mencegah genangan dan banjir, serta melindungi infrastruktur.	Gg. 4 RT.30 RW.07 (lapangan panahan) Kelurahan tahunan Kemantren Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	300	m3	900000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
253	[03.10] Penyuluhan tentang kesehatan Usia Produktif	warga masyarakat yang ada di usia produktif perlu penyuluhan tentang kesehatan	Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	orang	27250000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
254	[03.10] Penyuluhan tentang kesehatan Usia Produktif	warga masyarakat yang ada di usia produktif perlu penyuluhan tentang kesehatan	Kelurahan Bausasran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	20	orang	220000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
255	[03.10] Penyuluhan tentang kesehatan Usia Produktif	warga masyarakat yang ada di usia produktif perlu penyuluhan tentang kesehatan	Kelurahan Baciro Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	orang	4400000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
256	[03.10] Penyuluhan tentang kesehatan Usia Produktif	warga masyarakat yang ada di usia produktif perlu penyuluhan tentang kesehatan	Kelurahan Kotabaru Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	Orang	2475000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
257	[03.10] Penyuluhan tentang kesehatan Usia Produktif	warga masyarakat yang ada di usia produktif perlu penyuluhan tentang kesehatan	Kelurahan Suryatmajan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	20	orang	220000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
258	[11.01] Peningkatan Kapasitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)	Perlunya peningkatan Kapasitas Kampung Tangguh Bencana untuk warga kampung di kelurahan	Kampung Tegalkemuning Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50	orang	20000000	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
259	[11.01] Peningkatan Kapasitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)	Perlunya peningkatan Kapasitas Kampung Tangguh Bencana untuk warga kampung di kelurahan	Kampung Tukangan Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50	orang	20000000	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
260	[11.01] Peningkatan Kapasitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)	Perlunya peningkatan Kapasitas Kampung Tangguh Bencana untuk warga kampung di kelurahan	Kampung Ledok Tukangan Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50	orang	20000000	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
261	[11.01] Peningkatan Kapasitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)	Perlunya peningkatan Kapasitas Kampung Tangguh Bencana untuk warga kampung di kelurahan	Kampung Tegal Lempuyangan Kelurahan Bausasran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50	orang	20000000	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
262	[11.01] Peningkatan Kapasitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)	Perlunya peningkatan Kapasitas Kampung Tangguh Bencana untuk warga kampung di kelurahan	Kampung Ronodigdayan Kelurahan Bausasran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50	orang	20000000	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
263	[11.01] Peningkatan Kapasitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)	Perlunya peningkatan Kapasitas Kampung Tangguh Bencana untuk warga kampung di kelurahan	Kampung Kotabaru Kelurahan Kotabaru Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50	orang	20000000	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

264	[11.01] Peningkatan Kapasitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)	Perlunya peningkatan Kapasitas Kampung Tangguh Bencana untuk warga kampung di kelurahan	Kampung Gendeng Kelurahan Baciro Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50	orang	20000000	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
265	[06.10] Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengembangan bisnis	Demangan Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	44000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
266	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Tidak layak Huni Ibu Kasro	RT48 RW 11 gampingan Pakuncen, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
267	[06.03] Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Pembuatan Kue Tradisional Penambahan PMT	Iromjan Klitren Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	63200000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
268	[09.02] Penguatan Kapasitas Pengelola Rumah Data Kependudukan	Pembinaan UP2K	Iromejan Klitren Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	Kali	940000	-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
269	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Pelatihan Permainan Tradisional	Iromejan Klitren Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	orang	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
270	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	PENUTUPAN GRILL UNTUK DRAINASE ,KARENA UNTUK PENGECEKAN SAAT HUJAN	PRENGGAN RW 09, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	BUAH	20000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
271	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	Pemberian makan Tambahan pemulihan gizi Stunting	RW 01 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kelompok	924000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
272	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	Pemberian Makan TAmbahan Pemulihan gizi buruk Stunting	RW 02 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kelompok	924000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
273	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	Pemberian makan tambahan Pemulihan gizi buruk Stunting	RW 03 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kelompok	2772000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
274	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	Pemberian makan tambahan Pemulihan gizi buruk Stunting	RW 05 Kelurahan Patangpuluhan kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kelompok	924000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
275	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	Pemberian makan tambahan pemulihan gizi buruk stunting	RW 06 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kelompok	924000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
276	[22.04] Perbaikan /Pemeliharaan Irigasi permukaan	Perbaikan tutup saluran irigasi yang sudah membahayakan mengingat menjadi bagian dari jalan dan ruang kegiatan publik	RT 54 RW 15 Minggiran, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Eka Pria Surasa ; 08112632277, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	60	meter	200000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
277	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	Pemberian makan tambahan pemulihan Gizi buruk Stunting	RW 07 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kelompok	924000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
278	[24.03] Peningkatan Jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pembangunan jalan berrupa jembatan layang melintasi sudut makam guna aksesmasuk ke ... / memfungsikan jalan inspeksi sungai. Terutama untuk keperluan kegawatdaruratan.	RT 02 RW 01 Suryowijayan, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Toras ; 087839227466, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	55	meter	900000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
279	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	Pemberian maka tambahan pemulihan gizi buruk stunting	RW 10 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kelompok	924000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
280	[16.05] Pendampingan Sentra bagi Industri Kecil Menengah (IKM)	Pendampingan Sentra Pengrajin Blangkon	RW 06 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	Kelompok	610000	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

281	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	rumah tidak layak huni an Ibu Tumiasih	RT 09 RW 02 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
282	[24.03] Peningkatan Jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	JALAN BANYAK BERLUBANG DAN SDH PULUHAN TAHUN TDK PERBAIKAN	JALAN MASJID PAKUNCEN KELURAHAN PAKUNCEN WIROBRAJAN, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	200	M1	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
283	[24.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	PENERANGAN KURANG DAN LAMPU BANYAK YG RUSAK	JALAN MASJID PAKUNCEN KELURAHAN PAKUNCEN KEMANTREN WIROBRAJAN, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	UNIT	30000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
284	[24.03] Peningkatan Jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	JALAN WIRATAMA BANYAK RUSAK PADAHAL JALUR UTAMA	JALAN WIRATAMA TEGALREJO KEMANTREN TEGALREJO, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	500	M1	5000000000	-	Pemeliharaan Berkala Jalan
285	[24.03] Peningkatan Jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	JALAN RUSAK DAN BERLUBANG-LUBANG	JALAN TEGALMULYO DAN JALAN DI RW 2 PAKUNCEN KEMANTREN WIROBRAJAN, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	700	M1	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
286	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Pelatihan stir mobil	RW 17 Minggiran, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Bayu Wijaya ; 085865333894, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	0rang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
287	[06.07] Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Pelatihan Digital Marketing bagi Pemuda	RW 12 Singosaren Pakuncen, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	44000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
288	[17.02] Rintisan Kampung Pangan Lestari (RKPL)	Pelatihan olahan Pangan UMKM	RW 12 Singosaren Pakuncen, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1	Kelompok	1329000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
289	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	Penambahan Gizi Lansia dan Posyandu Anak	RW 12 Pakuncen , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kelompok	924000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
290	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Permintaan Pelatihan Stir Mobil Pemuda	Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
291	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Pelatihan stir mobil	Kampung Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Yogo Hutomo ; 089673865757, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	66000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
292	[24.03] Peningkatan Jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Karena curah hujan sangat deras lalulintas kendaraan roda 4 maka menyebabkan jalanan berlubang dan tergerus .	Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10	m3	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
293	[06.07] Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Pelatihan Digital Marketing	RW 06 Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	44000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
294	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Pelatihan stir mobil	Kampung Suryowijayan, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Toras ; 087839227466, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
295	[06.16] Pemberian Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Di wilayah RT 04, RW 02, Kel. Purbayan, terdapat kelompok masyarakat penyandang Disabilitas berusia produktif memiliki kondisi ekonomi yang belum berkecukupan dan tidak memiliki kemampuan kerja, maka dibutuhkan Pelatihan dan peningkatan softskill yang sesuai agar memiliki kemampuan bekerja yang layak dan sesuai bagi penyandang disabilitas.	Jl. Tebu Ireng, Purbayan, RT 04, RW 02, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	Orang	32725000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

296	[17.05] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Bimtek, pelatihan, dan pembentukan kelompok budidaya ikan pemuda.	RW 13 Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Taufik ; 089606909033., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	55	0rang	-	-	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
297	[24.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Perbaikan jalan permukiman/lingkungan dengan aspal, Mengurangi resiko terjadinya kecelakaan serta menambah keindahan kampung	Gang Joyonegaran 1 (547 m2), Gang Joyonegaran 2 (364 m2) dan Jl Trusthajumena perbatasan antara kampung Joyonegaran dengan Tempel Tahunan(1.060 m2), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,971	meter persegi	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
298	[21.01] Pembangunan gedung milik daerah	balai menjadi tempat kegiatan warga kampung wirogunan, akan tetapi balai sudah tidak layak pakai, dan berbahaya, dikarenakan tembok banyak yang bercelah dan genteng banyak yang pecah	Balai Kampung Wirogunan RW 08, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	400	meter persegi	1500000000	-	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
299	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	saluran air hujan tersumbat, dengan harapan aliran air lancar sehingga tidak banjir	Jl. Trutshajumena perbatasan antara kampung Joyonegaran dengan Tempel Tahunan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	364	meter	1100000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
300	[24.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Belum ada PJU, perlu adanya Pembangunan penerangan jalan sepanjang jalan inspeksi RW 22 dan 23	RW 22 dan RW 23 Kel. Wirogunan , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10	titik	60000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
301	[24.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Perbaikan aspal jalan di depan hotel galery	Warga RW 10 kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2400	Meter persegi	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
302	[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	Kurang aktif nya kegiatan pemuda, sehingga perlu adanya kegiatan masyarakat yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, seperti pembuatan event gebyar Prawirotaman	Kampung Prawirotaman , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	kali	250700000	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
303	[23.05] Perbaikan Saluran Air Limbah	Terjadi kerusakan jaringan saluran air limbah	RW 08 RT 27, 29, 30, 31 dan 32 kelurahan Brontokusuman , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	550	meter	8250000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
304	[23.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	Saluran air limbah yang mampet untuk menjaga kesehatan warga	RT 16 RW 05 kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	80	Meter persegi	1200000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
305	[23.05] Perbaikan Saluran Air Limbah	Terjadi kerusakan jaringan saluran air limbah	RW 09 RT 33, 34, 35 kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	142	meter	156000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
306	[23.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi	Pembuatan SAL (peralon) dari rumah-rumah warga RT 40 ke saluran limbah terpusat ada sekitar 13 rumah	RT 40 RW 10 Karangkajen, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	13	SR	211900000	-	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
307	[06.07] Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Memberikan pemahaman serta wawasan perkembangan teknologi dan informasi untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian dibidang teknologi dan informasi IT	Kampung Prawirotaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	44000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
308	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Perlu adanya pembuatan SAH agar air hujan mengalir dan tidak menimbulkan banjir	Jl. Jawad faqih RT 44 RW 12 Karangkajen, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	150	meter	900000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
309	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Pembinaan kelompok sanggar guna meningkatkan kemampuan dan keahlian kelompok budaya	Kampung Prawirotaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	Event	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
310	[22.01] Pembangunan Talud Sungai	Pembangunan talud sungai code yang melintasi wilayah RW 23. Sepanjang aliran kali code yang melintasi wilayah kota Yogyakarta, hanya wilayah ini yang belum ada talud, guna mencegah banjir bagi warga RW 23	Rt 80 dan RT 82 RW 23 Karangkajen, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	150	Meter persegi	1500000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
311	[23.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	Saluran air limbah yang mampet perlu diperbaiki untuk menjaga kesehatan warga	Rt 64,65,66 RW 18 karanganyar , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	120	Meter persegi	1800000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
312	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembuatan SAH samping rumah pak muhsin ke barat, sehingga air dapat mengalir dengan lancar sehingga tidak banjir	RW 15 Karangkajen, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	80	meter persegi	500000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

313	[23.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi	Perlu adanya penggantian pipa saluran air limbah di utara gang waskito supaya air mengalir lancar	RW 02 dan 03 timuran, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	SR	16300000	-	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
314	[24.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan	Untuk menghindari resiko kecelakaan warga dan pengguna jalan perlu pengadaan rambu jalan	RW 07 dan 08 Karanganyar, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	6	titik	5400000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
315	[20.02] Pengadaan Sarpras di RTHP / Penyempurnaan RTHP	Penyempurnaan ruang terbuka hijau publik untuk warga kampung karanganyar	RW 18 Karanganyar, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	300	meter persegi	40000000	-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
316	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	Pelatihan Pemanfaatan lahan untuk menanam sayuran sebagai sumber pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	RW 16 Karanganyar, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	30	Orang	1329000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
317	[23.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi	Perlu adanya perbaikan saluran air limbah antara perbatasan RT 05 dan 06 supaya air mengalir lancar	Rt 05 dan 06 timuran, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	SR	16300000	-	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
318	[11.03] Pelatihan Redkar (relawan kebakaran)	Wilayah yang padat penduduk dan rawan akan bahaya kebakaran	Kampung Karanganyar RW 16, 17, 18, 19, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	65	Orang	7701000	-	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
319	[06.03] Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Pelatihan membuat snack untuk peningkatan ekonomi keluarga	RW 20, 21 dan 22 Lowanu, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	63200000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
320	[11.01] Peningkatan Kapasitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)	Untuk peningkatan edukasi anggota tentang mitigasi dan resiko kebencanaan	RW 20, 21, 22 Lowanu, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20	orang	10000000	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
321	[11.02] Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Pelatihan pencegahan kebakaran untuk warga, guna memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pencegahan kebakaran	RW 01,02,03 timuran, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	65	Orang	7701000	-	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
322	[23.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi	Pembangunan dan penyediaan sambungan (SAL) dari seluruh unit limbah rumah tangga kakus, cuci, dapur ke saluran limbah terpusat minimal 20 rumah	RT 15 gang Bintoro Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	20	SR	326000000	-	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
323	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembangunan saluran air hujan yang tersumbat dengan sistem drainase perkotaan	Rt 15,16,21 gang Bintoro Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	200	Meter	1200000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
324	[03.11] Skrining Kesehatan untuk Lansia dan Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	Di wilayah Kampung Ponggalan terdapat 50 Lansia belum memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya hidup sehat, sehingga membutuhkan Penyuluhan agar menjaga perilaku hidup menjadi lebih sehat.	RT 15, RW 05, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kegiatan	2950000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
325	[03.11] Skrining Kesehatan untuk Lansia dan Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	Di wilayah RT 25, RW 06, Tahunan terdapat 50 Lansia belum memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya hidup sehat, sehingga membutuhkan Penyuluhan agar menjaga perilaku hidup menjadi lebih sehat.	RT 25, RW 06, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kegiatan	6000000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
326	[03.11] Skrining Kesehatan untuk Lansia dan Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	Di wilayah RT 42, RW 11, Kel. Sorosutan terdapat 50 Lansia belum memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya hidup sehat, sehingga membutuhkan Penyuluhan agar menjaga perilaku hidup menjadi lebih sehat.	RT 42, RW 11, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kegiatan	2950000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
327	[03.11] Skrining Kesehatan untuk Lansia dan Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	Di wilayah RT 23, RW 06, Kel. Purbayan terdapat 50 Lansia belum memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya hidup sehat, sehingga membutuhkan Penyuluhan agar menjaga perilaku hidup menjadi lebih sehat.	RT 23, RW 06, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kegiatan	250000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
328	[03.11] Skrining Kesehatan untuk Lansia dan Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	Di wilayah RT 01, RW 01, Kel. Prenggan terdapat 50 Lansia belum memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya hidup sehat, sehingga membutuhkan Penyuluhan agar menjaga perilaku hidup menjadi lebih sehat.	RT 01, RW 01, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kegiatan	250000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

329	[03.11] Skrining Kesehatan untuk Lansia dan Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	Di wilayah RT 04, RW 01, Kel. Rejowinangun terdapat 50 Lansia belum memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya hidup sehat, sehingga membutuhkan Penyuluhan agar menjaga perilaku hidup menjadi lebih sehat.	RT 04, RW 01, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kegiatan	6750000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
330	[03.11] Skrining Kesehatan untuk Lansia dan Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	Di wilayah RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju terdapat 50 Lansia belum memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya hidup sehat, sehingga membutuhkan Penyuluhan agar menjaga perilaku hidup menjadi lebih sehat.	RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kegiatan	6000000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
331	[03.11] Skrining Kesehatan untuk Lansia dan Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	Di wilayah RT 12, RW 04, Kel. Semaki terdapat 50 Lansia belum memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya hidup sehat, sehingga membutuhkan Penyuluhan agar menjaga perilaku hidup menjadi lebih sehat.	RT 12, RW 04, Kel. Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kegiatan	6000000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
332	[03.11] Skrining Kesehatan untuk Lansia dan Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	Di wilayah RT 05, RW 01, Kel. Warungboto terdapat 50 Lansia belum memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya hidup sehat, sehingga membutuhkan Penyuluhan agar menjaga perilaku hidup menjadi lebih sehat.	RT 05, RW 01, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kegiatan	2950000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
333	[03.11] Skrining Kesehatan untuk Lansia dan Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	Di wilayah RT 30, RW 08, Kel. Pandeyan terdapat 50 Lansia belum memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya hidup sehat, sehingga membutuhkan Penyuluhan agar menjaga perilaku hidup menjadi lebih sehat.	RT 30, RW 08, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kegiatan	2950000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
334	[25.01] Pembangunan Talud Permukiman	Antisipasi Longsor Infrastutur Kawasan Permukiman Pinggir Sungai Tekik, RT 27	RT 43 RW 11 Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Ketua RW 11 Tono 0857 9992 7274, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	500	m3	1500000000	-	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
335	[22.01] Pembangunan Talud Sungai	Peningkatan Kualitas Permukiman Pinggir Sungai aman dan nyaman untuk di tempat , Infrastrutur Kawasan Permukiman Pinggir Sungai, Pembangunan talud di sungai gajahwong RT 43, RT 44 RW 11	RT 43 RT 44 RW 11 Kampung Gambiran Ketua RW Tono 0857 9992 7274, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	200	m3	3000000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
336	[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Di wilayah Kp. Ponggalan, Kel. Giwangan Terdapat Kelompok Beragama Islam dengan jamaah 100 orang namun untuk menyelenggarakan Pengajian terkendala konsumsi untuk jamaah, maka dengan diadakannya hari (hari besar keagamaan) diharapkan menambah ketekunan beribadah dan mempertebal keimanan.	RT 16 RW 06, Kp. Ponggalan, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100	Orang	1100000	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
337	[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Di wilayah RT 40, RW 10, Kel. Sorosutan Terdapat Kelompok Beragama Islam dengan jamaah 100 orang namun untuk menyelenggarakan Pengajian terkendala konsumsi untuk jamaah, maka dengan diadakannya hari (hari besar keagamaan) diharapkan menambah ketekunan beribadah dan mempertebal keimanan.	RT 40, RW 10, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100	Orang	1100000	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
338	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Rehab SAH, Pembangunan SAH, Pembangunan SAH Gg.Jangkang Air Hujan Lancar, Semua warga masyaraka RW 11 pada umumnya	Jl.Gambir Sawit RW 10,RW 11, Kampung Gambiran, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1000	m3	6000000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
339	[25.01] Pembangunan Talud Permukiman	Karna curah hujan yang sangat tinggi maka intensitas air sangat tinggi menyebabkan dinding talud tergerus .	Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	m3	45000000	-	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
340	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Pelatihan teater berkelanjutan untuk peningkatan potensi dan merangkul anak muda dalam kegiatan positif.	Kampung Suryowijayan, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Ayu Toras ; 081337677334, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	0rang	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya

341	[16.06] Penguatan manajemen Karang Mitra Usaha (KAMU)	Di wilayah Pandeyan terdapat komunitas UMKM Dapur Ngebul, dengan anggotaya menerima banyak pesanan kue, makanan ringan, dan makanan berat, maka memerlukan Penguatan Manajemen, tertib pembukuan, jejaring permodalan,dan peningkatan teknologi guna menunjang perkembangan dan kemajuan UMKM.	Jl. Tegal Watu, Pandeyan, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	50	ukm	50000000	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
342	[22.01] Pembangunan Talud Sungai	Di wilayah Muja Muju RT 50 RW 05, terdapat pinggiran sungai yang membutuhkan talud dikarenakan terkikis air sungai dan semakin melebar sehingga membahayakan masyarkat,, pengerjaan talud yang dibutuhkan sepanjang sekitar 12 m2, lebar 1,5 m2 dan tinggi 2 m2.	Ledhok Timoho RT 50 RW 05 muja-muju Umbulharjo yogyakarta (+62 817-9427-087 Sri Haryani) , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	36	m3	200000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
343	[15.03] Pentas Kawasan / menampilkan seluruh potensi wisata pada suatu kawasan destinasi wisata dan sekitarnya terutama destinasi wisata baru yang belum dikenal	Di wilayah Kp. PonggalanGiwanganTerdapat Giat Masyarakat potensial yang bisa dikembangkan, dengan tajuk Festival Kesenian dan Budaya Kp. Ponggalan Giwangan, dengan kegiatan Pentas Seni, Pawai Budaya, Gelar UMKM, Penampilan Karawitan dan Kethoprak, serta Kegiatan merawat lingkungan dalam satu rangkaian acara yg sama, yaitu dengan Pengenalan Potensi Air di wilayah dan penebaran benih ikan.	RT 15, RW 05, Kp. Ponggalan, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	PENGISI ACARA	128820000	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
344	[06.01] Pelatihan Manajemen Event Organizer tingkat kota	Pelatihan manajemen event organizer pemuda	Kemantren Mantrijeron. A.n. Sendiko ; 089517519147, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	88000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
345	[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	Festival Kampung Wisata	Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Bimo Adi Prasetyo ; 081216668282, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	3	hari	735000000	-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
346	[16.02] Pemasaran produk berbasis Kemitraan dengan E Commerce	Di Wilayah Tahunan, RT 25, RW 06, terdapat pelaku UMKM Pembuat Kue, namun terkendala dalam jaringan pemasaran digital, maha membutuhkan Pelatihan dan Pendampingan pengembangan pemasaran melalui digital marketing.	RT 25, RW 06, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	50	Orang	-	-	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
347	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Di wilayah RT RT 15, RW 05, Kel. Giwangan, Kel. Giwangan, terdapat Kelompok Kebudayaan Melukis / Seni Rupa dengan adanya regenerasi anggota dan untuk menunjang Perkembangan, maka membutuhkan pembinaan berupa FGD, Workshop, dan Pentas	RT 15, RW 05, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Tegalrejo	Kemantren Umbulharjo	1	Kelompok	5000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
348	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Di wilayah RT 06, RW 02, Kel. Giwangan, Kel. Giwangan, terdapat Kelompok Kebudayaan Seni Tari Tradisional dengan adanya regenerasi anggota dan untuk menunjang Perkembangan, maka membutuhkan pembinaan berupa FGD, Workshop, dan Pentas	RT 06, RW 02, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	Kelompok	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
349	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Di wilayah RT 23, RW 06, Kel. Purbayan, Kel. Giwangan, terdapat Kelompok Kebudayaan Musik Tradisional dengan adanya regenerasi anggota dan untuk menunjang Perkembangan, maka membutuhkan pembinaan berupa FGD, Workshop, dan Pentas	RT 23, RW 06, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	Kelompok	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya

350	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Di wilayah RT 12, RW 05, Kel. Muja Muju, Kel. Giwangan, terdapat Kelompok Kebudayaan Tembang Mocopat dengan adanya regenerasi anggota dan untuk menunjang Perkembangan, maka membutuhkan pembinaan berupa FGD, Workshop, dan Pentas	RT 12, RW 05, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	Kelompok	-	-	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
351	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Di wilayah RT 41, RW 11, Kel. Sorosutan, Kel. Giwangan, terdapat Kelompok Kebudayaan Musik Tradisional dengan adanya regenerasi anggota dan untuk menunjang Perkembangan, maka membutuhkan pembinaan berupa FGD, Workshop, dan Pentas	RT 41, RW 11, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	Kelompok	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
352	[07.08] Jam Belajar Masyarakat	Untuk Menjaga efektifitas Jam Belajar Masyarakat di wilayah RT 47, RW 12, Kel. Sorosutan Maka membutuhkan Pendampingan dan Fasilitasi Belajar, agar pelaksanaan JBM dapat berjalan dengan maksimal.	RT 47, RW 12, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	Orang/bulan	300000	-	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
353	[07.08] Jam Belajar Masyarakat	Untuk Menjaga efektifitas Jam Belajar Masyarakat di wilayah RT 43, RW 11, Kel. Sorosutan Maka membutuhkan Pendampingan dan Fasilitasi Belajar, agar pelaksanaan JBM dapat berjalan dengan maksimal.	RT 43, RW 11, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	Orang/bulan	300000	-	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
354	[07.08] Jam Belajar Masyarakat	Untuk Menjaga efektifitas Jam Belajar Masyarakat di wilayah RT 40, RW 10, Kel. Sorosutan Maka membutuhkan Pendampingan dan Fasilitasi Belajar, agar pelaksanaan JBM dapat berjalan dengan maksimal.	RT 40, RW 10, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	Orang/bulan	300000	-	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
355	[07.08] Jam Belajar Masyarakat	Untuk Menjaga efektifitas Jam Belajar Masyarakat di wilayah RT 25, RW 06, Tahunan Maka membutuhkan Pendampingan dan Fasilitasi Belajar, agar pelaksanaan JBM dapat berjalan dengan maksimal.	RT 25, RW 06, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	Orang/bulan	300000	-	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
356	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	Di Daerah RT 06, RW 02, Kel. Giwangan Terdapat Poktan dan Kelompok Budidaya Pertanian Perkotaan yang memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat lorong sayur namun tidak memiliki bahan, alat dan pendampingan, maka dari itu membutuhkan komponen pertanaman, sarana prasarana pertanian, pemupukan dan penyiraman, pendampingan dan monitoring kegiatan.	RT 06, RW 02, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1	Lokasi	1329000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
357	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	Di Daerah RT 52, RW 05, Kel. Muja Muju Terdapat Poktan, KWT (Kelompok Wanita Tani), dan Kelompok Budidaya Pertanian Perkotaan yang memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat lorong sayur namun tidak memiliki bahan, alat dan pendampingan, maka dari itu membutuhkan komponen pertanaman, sarana prasarana pertanian, pemupukan dan penyiraman, pendampingan dan monitoring kegiatan.	RT 52, RW 05, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1	Lokasi	1329000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
358	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Ibu Siti Hasanah Atapnya bocor dan dindingnya masih dari bambu,perlu perbaikan	Keparakan Kidul MGI/1218 Rt 56 Rw 13 Kelurahan Keparakan Kemantren Mergangsan , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

359	[04.02] Sunatan Massal Tingkat Kota	di wilayah RT 06, RW 02, Kel. Giwangan Terdapat 10 Anak Usia Sekolah Kurang Mampu secara finansial yang sudah waktunya untuk melakukan kewajiban sunat sesuai tata cara beragama dan untuk kesehatan, maka perlunya keiikutsertaan dalam program Sunatan Massal.	RT 06, RW 02, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	Orang	85350000	-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
360	[04.02] Sunatan Massal Tingkat Kota	di wilayah RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju Terdapat 10 Anak Usia Sekolah Kurang Mampu secara finansial yang sudah waktunya untuk melakukan kewajiban sunat sesuai tata cara beragama dan untuk kesehatan, maka perlunya keiikutsertaan dalam program Sunatan Massal.	RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	orang	85350000	-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
361	[04.02] Sunatan Massal Tingkat Kota	di wilayah RT 43, RW 11, Kel. Sorosutan Terdapat 10 Anak Usia Sekolah Kurang Mampu secara finansial yang sudah waktunya untuk melakukan kewajiban sunat sesuai tata cara beragama dan untuk kesehatan, maka perlunya keiikutsertaan dalam program Sunatan Massal.	RT 43, RW 11, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	Orang	85350000	-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
362	[04.02] Sunatan Massal Tingkat Kota	di wilayah RT 53, RW 12, Kel. Sorosutan Terdapat 10 Anak Usia Sekolah Kurang Mampu secara finansial yang sudah waktunya untuk melakukan kewajiban sunat sesuai tata cara beragama dan untuk kesehatan, maka perlunya keiikutsertaan dalam program Sunatan Massal.	RT 53, RW 12, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	Orang	85350000	-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
363	[04.02] Sunatan Massal Tingkat Kota	di wilayah RT 25, RW 06, Tahunan Terdapat 10 Anak Usia Sekolah Kurang Mampu secara finansial yang sudah waktunya untuk melakukan kewajiban sunat sesuai tata cara beragama dan untuk kesehatan, maka perlunya keiikutsertaan dalam program Sunatan Massal.	RT 25, RW 06, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	Orang	85350000	-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
364	[04.01] Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Di Wilayah RT 15, RW 05, Kel. Giwangan terdapat Lanjut Usia Kurang Mampu secara Finansial / Miskin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, maka memerlukan Bantuan Asistensi untuk memenuhi kebutuhannnya. dengan jumlah 10 Orang per Bulan	RT 15, RW 05, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	Bulan	300000	-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
365	[04.01] Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Di Wilayah RT 25, RW 06, Tahunan terdapat Lanjut Usia Kurang Mampu secara Finansial / Miskin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, maka memerlukan Bantuan Asistensi untuk memenuhi kebutuhannnya. dengan jumlah 10 Orang per Bulan	RT 25, RW 06, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	Bulan	300000	-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
366	[04.01] Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Di Wilayah RT 42, RW 11, Kel. Sorosutan terdapat Lanjut Usia Kurang Mampu secara Finansial / Miskin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, maka memerlukan Bantuan Asistensi untuk memenuhi kebutuhannnya. dengan jumlah 10 Orang per Bulan	RT 42, RW 11, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	Bulan	300000	-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
367	[04.01] Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Di Wilayah RT 23, RW 06, Kel. Purbayan terdapat Lanjut Usia Kurang Mampu secara Finansial / Miskin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, maka memerlukan Bantuan Asistensi untuk memenuhi kebutuhannnya. dengan jumlah 10 Orang per Bulan	RT 23, RW 06, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	Bulan	300000	-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

368	[04.01] Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Di Wilayah RT 01, RW 01, Kel. Prenggan, terdapat Lanjut Usia Kurang Mampu secara Finansial / Miskin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, maka memerlukan Bantuan Asistensi untuk memenuhi kebutuhannnya. dengan jumlah 10 Orang per Bulan	RT 01, RW 01, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	Bulan	300000	-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
369	[04.01] Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Di Wilayah RT 04, RW 01, Kel. Rejowinangun terdapat Lanjut Usia Kurang Mampu secara Finansial / Miskin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, maka memerlukan Bantuan Asistensi untuk memenuhi kebutuhannnya. dengan jumlah 10 Orang per Bulan	RT 04, RW 01, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	Bulan	300000	-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
370	[04.01] Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Di Wilayah RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju terdapat Lanjut Usia Kurang Mampu secara Finansial / Miskin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, maka memerlukan Bantuan Asistensi untuk memenuhi kebutuhannnya. dengan jumlah 10 Orang per Bulan	RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	Bulan	300000	-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
371	[04.01] Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Di Wilayah RT 12, RW 04, Kel. Semaki terdapat Lanjut Usia Kurang Mampu secara Finansial / Miskin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, maka memerlukan Bantuan Asistensi untuk memenuhi kebutuhannnya. dengan jumlah 10 Orang per Bulan	RT 12, RW 04, Kel. Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	Bulan	300000	-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
372	[04.01] Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Di Wilayah RT 05, RW 01, Kel. Warungboto terdapat Lanjut Usia Kurang Mampu secara Finansial / Miskin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, maka memerlukan Bantuan Asistensi untuk memenuhi kebutuhannnya. dengan jumlah 10 Orang per Bulan	RT 05, RW 01, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	Bulan	300000	-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
373	[04.01] Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Di Wilayah RT 30, RW 08, Kel. Pandeyan terdapat Lanjut Usia Kurang Mampu secara Finansial / Miskin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, maka memerlukan Bantuan Asistensi untuk memenuhi kebutuhannnya. dengan jumlah 10 Orang per Bulan	RT 30, RW 08, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	Bulan	300000	-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
374	[07.02] Pelatihan Berjenjang Pendidik PAUD Tingkat Mahir	Kurangnya pengetahuan dalam penangganan kader	Klitren Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	40	orang	28744000	-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
375	[11.01] Peningkatan Kapasitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)	Pelatihan penggunaan dan pengadaan sarana prasarana alat KTB	Sapen Demangan Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25	orang	15000000	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
376	[03.09] Pelatihan kader Posbindu	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya sarana dan Prasarana	KItren Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	kegiatan	1265000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
377	[03.02] Peningkatan kapasitas kader dalam kompetensi klaster 2 untuk posyandu meliputi ibu dan anak sesuai transformasi layanan primer	Kurangya Sumber Daya Manusia untuk kader wilayah	Sapen Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	kegiatan	1265000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
378	[03.09] Pelatihan kader Posbindu	Kurangnya penetahuan tentang manfaat dan pentingnya kesehatan	Klitren Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	kegiatan	1265000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

379	[08.01] Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan	Kurangnya pehahaman terhadap pentingnya Organisasi Kepemudaan dimasyarakat	Klitren Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	45	kelurahan	59145000	-	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
380	[06.10] Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Banyaknya masyarakat yang kurang kesempatan kerja	Pengok Demangan Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	44000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
381	[23.04] Perbaikan IPAL komunal	Pembuatan IPAL Komunal untuk warga tepi Sungai wilayah RT52 (10 KK) , Terwujudnya wilayah yang sehat	RT 52 RW 11 Kelurahan Prenggan Kemantren Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	SR	16500000	-	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
382	[23.04] Perbaikan IPAL komunal	Perawatan IPAL dan Pengecekan instalasi yang rusak	RT 21 RW 05 RT 57 RW 13 Kampung prenggan Kemantren Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	30	titik	48000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
383	[22.01] Pembangunan Talud Sungai	Untuk keamanan warga, rawan longsor	RW 13 RT 57 Kampung Prenggan Kemantren Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	240	m3	3000000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
384	[22.02] Perbaikan /Pemeliharaan Talud Sungai	rawan longsor untuk keamanan warga	RT52 R 11 Kampung Tegalgendu Kelurahan Prenggan Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	m3	1500000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
385	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Perbaikan/SAH di Jl Wijiadjisoro blk Kemantren Kotagede ambles dan meluap karana selokan mengecil, air lancar tidak banjir tidak merusak jalan dan gorong-gorong	Jalan Wijiadjisoro belakang kemantren Kotagede Kampung Tinalan Kelurahan Prenggan Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	50	m	150000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
386	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Perbaikan/SAH karena besarnya air yang menggenang saat hujan di jalan kampung yang mengganggu aktifitas warga Memperlancar dan meningkatkan keamanan, kenyamanan warga serta meningkatkan keawetan jalan	Jl. Ringin Putih kelurahan Prenggan Kemantren kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10	m3	50000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
387	[10.01] Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Perlunya Sosialisasi Pencatatan Sipil adalah kegiatan untuk mempublikasikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang seluk beluk terkait pencatatan sipil	Kelurahan Purbayan Kemantren Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	Orang	12500000	-	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
388	[10.02] Sosialisasi Penyelenggaraan Layanan Adminduk	perlunya Menginformasikan kepada masyarakat terkait mekanisme dan prosedur penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	Kelurahan Purbayan Kemntren Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	Orang	2300000	-	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
389	[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	Perlunya fasilitasi bagi Kamwis untuk menampilkan potensi wisata dan UMKM pariwisata yang dikemas dalam sebuah atraksi wisata	Kampung Wisata Prenggan Kelurahan Prenggan Kemantren Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	paket	735000000	-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
390	[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	Perlunya fasilitasi bagi Kamwis untuk menampilkan potensi wisata dan UMKM pariwisata yang dikemas dalam sebuah atraksi wisata	Kampung Wisata Rejowinangun Kelurahan Rejowinangun Kemantren Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	paket	735000000	-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
391	[18.04] Sosialisasi pengelolaan arsip keluarga	memberikan pembelajaran pentingnya arsip bagi masyarakat	RW 05 Karang Kelurahan Prenggan Kemantren Kotagede bantaran Sungai Gajah Wong , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35	orang	-	-	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
392	[18.04] Sosialisasi pengelolaan arsip keluarga	memberikan pembelajaran pentingnya arsip bagi masyarakat	RW 11 Kampung Gambiran Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Bantaran Sungai Gajah Wong, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35	Orang	-	-	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
393	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB kurang, dan balita BB tidak naik	RW 01 Prenggan Kelamtren Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	anak	20790000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

394	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB kurang, dan balita BB tidak naik	RW 07 Kelurahan Prenggan Kemantren Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	anak	23100000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
395	[25.02] Pemeliharaan Talud Permukiman	Pemeliharaan Talud Pemukiman	RT 50 RW 08 Kelurahan Rejowinangun Kotagede titik koord : -7.810421, 110.394531 NO. HP : 085878113636 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	375	m3	1125000000	-	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
396	[24.03] Peningkatan Jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pengaspalan jalan , jalan sudah kondisi rusak	Jalan Semangu Kelurahan Rejowinangun Kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	750	m3	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
397	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Mengurangi genangan air dan mencegah banjir	RW 06 (RT 17,18,19 dan 20) Kelurahan Rejowinangun Kemantren Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	450	m3	2700000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
398	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Memberikan bantuan hunian yang layak untuk warga masyarakat yang membutuhkan	an Hesti Jetis sorosutan UH 6 RT 31 RW 8 Kelurahan Sorosutan Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
399	[05.02] Pemberian Motivasi bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Di Wilayah RT 04, RW 02, Kel. Purbayan terdapat kelompok Masyarakat disabilitas yang mengalami disorientasi kehidupan seperti tidak adanya semangat untuk melanjutkan hidup karena merasa persaingan mencari pekerjaan sangat ketat apalagi dengan memiliki keterbatasan, maka dibutuhkan Motivasi untuk meningkatkan kembali semangat dan terciptanya orientasi yang mengarah kepada hal yang bersifat peningkatan ekonomi.	Jl. Tebu Ireng, Purbayan, RT 04, RW 02, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	orang	32725000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
400	[05.01] Pemberian Motivasi bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	"Di wilayah Muja muju terdapat 20 KK yang memiliki anggota keluarga disabilitas, karena memiliki keterbatasan para penyandang disabilitas merasa berbeda dengan lingkungan sosialnya dan sulit untuk beradaptasi, maka membutuhkan motivasi agar merasa sama dan menjadi kekuatan tambahan untuk pribadi penyandan disabilitas dalam berkehidupan sosial masyarakat"	RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	Orang	28900000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
401	[15.06] Pelatihan Kepariwisataan	Di Wilayah RT 15, RW 05, Kp. Ponggalan terdapat Kelompok masyarakat yang berusia produktif dengan jumlah 25 orang, dengan kondisi di wilayah tersebut terdapat potensi pengembangan pariwisata, namun minim dalam pengelolaan dan manajemen agar dapat bersaiing dengan objek pariwisata yang lain, maka membutuhkan pelatihan kepariwisataan untuk menunjang potensi pariwisata yang akan dirintis agar dapat bersaing dengan objek pariwisata yang lain	RT 15, RW 05, Kp. Ponggalan, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	Angkatan	47250000	-	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
402	[15.06] Pelatihan Kepariwisataan	Di Wilayah RT 06, RW 02, Kel. Giwangan terdapat Kelompok masyarakat yang berusia produktif dengan jumlah 25 orang, dengan kondisi di wilayah tersebut terdapat potensi pengembangan pariwisata, namun minim dalam pengelolaan dan manajemen agar dapat bersaiing dengan objek pariwisata yang lain, maka membutuhkan pelatihan kepariwisataan untuk menunjang potensi pariwisata yang akan dirintis agar dapat bersaing dengan objek pariwisata yang lain	RT 06, RW 02, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	Angkatan	47250000	-	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI

403	[17.02] Rintisan Kampung Pangan Lestari (RKPL)	Di wilayah RT 27, RW 07 Kel. Sorosutan Terdapat kelompok tani yang memiliki lahan kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan yang damanfaatkan sebagai tempat ternak dan pemeliharaan kambing sebagai sumber pangan, maka dengan itu membutuhkan sarana dan prasarana: seperti alat dan bahan pembuatan kandang, tempat pakan, tempat minum, peralatan kebersihan beserta 20 ekor kambing untuk dibudidaya. selanjutnya membutuhkan pendampingan dan monitoring agar peternakan dapat berkembang.	RT 27, RW 07 Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1	Lokasi	1329000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
404	[23.05] Perbaikan Saluran Air Limbah	SAL kondisi rusak dan meluap ketika musim hujan sehingga menyebabkan jalan diatasnya (paving blok) mengalami kerusakan. Perbaikan dan pemeliharaan SAL	Sepanjang gang Parangklitik (Rt 17, RW 04) arah keselatan di area / dekat pasar Pujokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	170	meter persegi	187000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
405	[24.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Memperlancar aktivitas masyarakat terutama di malam hari dan mendukung keamanan serta ketertiban masyarakat	tersebar Wilayah RW 07 Kelurahan Purbayan Kemantren Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	69	titik	414000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
406	[24.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Memperlancar aktivitas masyarakat terutama di malam hari dan mendukung keamanan serta ketertiban masyarakat	RW 10 Dalem Kelurahan Purbayan Kemantren Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	41	titik	246000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
407	[24.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Memperlancar aktivitas masyarakat terutama di malam hari dan mendukung keamanan serta ketertiban masyarakat	RW 08 Kelurahan Purbayan kemantren Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	19	titik	114000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
408	[24.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Memperlancar aktivitas masyarakat terutama di malam hari dan mendukung keamanan serta ketertiban masyarakat	RW 9 Kampung Alun-alun Kelurahan Purbayan kemantre Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	20	titik	120000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
409	[05.03] Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	Membantu Disabilitas dalam bermobilitas sehari hari	RW11 Kampung Tegalgendu, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	Orang	-	-	Penyediaan Alat Bantu
410	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	Pengembangan Kampung Sayur agar kelompok Tani naik Kelas, Meningkatkan Ekonomi Keluarga dari Lorong Sayur menjadi lebih masiv di kampung Tegalgendu	KT Subur Makmur RW11 Kampung Tegalgendu, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1	paket	1329000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
411	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Pembinaan Kelompok sanggar seni laras puri Memotivasi anggota kelompok agar tampil di pertunjukan	Kelompok sanggar seni laras puri RW 11 Tegal Gendu Kelurahan Prenggan Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	kegiatan	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
412	[06.09] Padat Karya Infrastruktur	Jetisharjo RW 07 adalah suatu wilayah yang berada dibantaran kali code di kota Yogyakarta yang dimana permukaan tanah di wilayah sekitar kali code tidak rata sehingga di beberapa titik mengakibatkan rawan tanah longsor yang tentu saja sangat membahayakan atas warga sekitarnya. Dengan alasan ini membutuhkan talud untuk menahan tanah agar tidak longsor	Wilayah RT 31 dan rt 32 RW 07 Jetisharjo, Kelurahan Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	kegiatan	330000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
413	[06.08] Pelatihan Satpam tingkat kota	Pelatihan satpam untuk peluang kesempatan kerja warga wilayah.	Kemantren Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Danang ; 089531065773., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	0rang	88000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
414	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Selokan yang menghubungkan antara RW.11 dan RW.12 Yang berbatasan dengan RW 04 Warungboto mengalami penyumbatan aliran air oleh lumpur sehingga alirannya terhambat dan tidak lancar.	RW 11, RW 12 Kelurahan Muja Muju & RW 04 Kelurahan Warungboto, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	900	m3	2700000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

415	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Banyak usia muda produktif belum punya SIM	Kecamatan Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
416	[03.24] Promosi atau sosialisasi tentang jaminan kesehatan	Pemahaman terhadap masyarakat yang kurang jelas	Klitren Lor Klitren Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	40	orang	-	-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
417	[06.14] Pelatihan Desain Grafis tingkat kota	Perlunya pelatihan desain grafis bagi aktifis kampung ; termasuk sebagai penolong bagi UMK dalam kebutuhan-kebutuhan desain.	Kemantren Mantrijeron. A.n. Sendiko ; 089517519147, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18	orang	49500000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
418	[16.08] Pengembangan pemberdayaan kelompok Nglarisi	peningkatan ekonomi wilayah	Pengok Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	30	orang	3560000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
419	[06.01] Pelatihan Manajemen Event Organizer tingkat kota	Banyaknya event yang ada di jogja namun SDM wilayah blum siap	Klitren Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	88000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
420	[23.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi	Perlunya sambungan (tertier) SAL ke rumah warga untuk mengurangi bakteri koli sumur-sumur, jadi prasarana perikanan, peternakan, dan pertanian kota.	RW 16 Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Bambang Erwanto ; 081775160381., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	SR	244500000	-	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
421	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	untuk memfasilitasi masyarakat usia 20 tahun ke atas yang belum bisa menyetir mobil dan belum memiliki SIM A	59GW+GPM, Jl. Nyi Pembayun, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55172 (akbar 0895622128738), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
422	[24.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	tidak adanya lampu penerangan jalan seputar makam Prenggan utara	59GW+GGM, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta City, Special Region of Yogyakarta 55172 (nanang margiyanto Rt 25, WA 085726490950), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	8	unit	48000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
423	[23.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi	Instalasi sambungan tertier ke rumah-rumah warga guna perbaikan kesehatan air sumur ; dan jadi prasarana penunjang perikanan, pertanian, dan peternakan kota.	RT 01 RW 01 Ngadinegaran, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Dewanto Pamungkas ; 081235771511., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	SR	81500000	-	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
424	[17.05] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Pelatihan perikanan untuk usaha kelompok.	RW 01 Ngadinegaran, Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Dewanto Pamungkas ; 081235771511., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	10	0rang	850000	-	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
425	[23.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi	Instalasi sambungan SAL ke rumah-rumah guna perbaikan kesehatan sumur dan jadi prasarana bagi perikanan, peternakan, pertanian kota.	RW 13 Mantrijeron, Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Ediprasetyo ; 08562552199., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10	SR	163000000	-	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
426	[24.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Perbaikan jalan	RW 10 Jogokaryan, Mantrijeron, Mantrijeron, yogyakarta. A.n. Danang ; 089531065773., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	meter	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
427	[05.03] Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	Perlunya kartu tanda pengenal khusus bagi warga berkebutuhan khusus (WBK). Berlaku bagi yang berkebutuhan khusus bukan hanya disabilitas yang wantah.	Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	orang	-	-	Penyediaan Alat Bantu
428	[22.01] Pembangunan Talud Sungai	TALUD SUNGAI WINONGO SDH LAMA RUSAK	SERANGAN RW 04 KELURAHAN NGAMPILAN KEMANTREN NGAMPILAN, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	400	M1	6000000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
429	[22.01] Pembangunan Talud Sungai	TALUD SUNGAI WINONGO SUDAH RUSAK LAMA BELUM ADA PEMBANGUNAN	RW 09 WIROBRAJAN KEMANTREN WIROBRAJAN, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	400	M1	6000000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai

430	[20.02] Pengadaan Sarpras di RTHP / Penyempurnaan RTHP	Penambahan Tanaman Perindang	Pengok Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	5	unit	5000000	-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
431	[03.23] Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang ber KTP Yogyakarta melalui program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD)	Sosialisasi yng kurang maksimal	Klitren Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	30	orang	13608000	-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
432	[23.04] Perbaikan IPAL komunal	SEPTICTANK KOMUNAL AMBLAS	GENDINGAN RT 18 RW 03 KEMANTREN NGAMPILAN, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	TITIK	28000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
433	[22.02] Perbaikan /Pemeliharaan Talud Sungai	PENINGGIAN TALUD KARENA DEKAT PEMUKIMAN WARGA	GENDINGAN RT 18 RW 3 KEMANTREN NGAMPILAN, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	400	M1	6000000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
434	[07.01] Soisalisasi JPD	BANYAK WARGA YANG BELUM TAHU DAN BERHARAP AKSES	WARGA RT 17 DAN RT 18 RW 04 PAKUNCEN KEMANTREN WIROBRAJAN, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	10	kali	100000000	-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
435	[06.16] Pemberian Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	PERHATIAN UTK DISABILITAS DALAM PERAWATAN	WARGA DAN PENGURUS DISABILITAS RT 02 RW 02 PAKUNCEN KEMANTREN PAKUNCEN (JALAN TEGALMULYO), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	orang	32725000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
436	[03.11] Skrining Kesehatan untuk Lansia dan Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	PENINGKATAN CEK KESEHATAN LANSIA	WARGA LANSIA RW 01 DAN RW 02 PATANGPULUHAN KEMANTREN WIROBRAJAN, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	kali	500000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
437	[03.11] Skrining Kesehatan untuk Lansia dan Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	PENINGKATAAN CEK KESEHATAN LANSIA	LANSIA RW 11 DAN RW 12 WIROBRAJAN KEMANTREN WIROBRAJAN, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	KALI (SETAHUN)	500000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
438	[03.11] Skrining Kesehatan untuk Lansia dan Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	BANTUAN ALAT CEK KESEHATAN	PENGURUS RW SE PATANGPULUHAN KEMANTREN WIROBRAJAN, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Kemantren Wirobrajan	60	orang	4680000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
439	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Bpk Priyo Pentadi atap dan plafonnya bocor,perlu perbaikan	Mergangsan Kidul MG 2 Rt 74 Rw 24 Kelurahan Wirogunan Kemantren Mergangsan CP 083869511559, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
440	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	KELOMPOK LANSIA BEERHARAP ALAT KESENIAN UNTUK MENINGKATKAN KECERIAAN DIANTARA LANSIA	LANSIA RW 01 DAN RW 02 PATANGPULUHAN KEMANTREN WIROBRAJAN, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	SET	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
441	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Bpk Baru Utomo atap dan plafonnya bocor,perlu perbaikan	Mergangsan Kidul MG2 Rt 76 Rw 24 Kelurahan Wirogunan Kemantren Mergangsan CP 083869511559, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
442	[06.07] Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	KESULITAN DALAM PEMASARAN PRODUK	MUDA MUDI RW 10 PAKUNCEN KEMANTREN WIROBRAJAN, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	44000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
443	[06.01] Pelatihan Manajemen Event Organizer tingkat kota	TERAMPIL DALAM PERSAINGAN	MUDA MUDI RW 10 PAKUNCEN KEMANTREN WIROBRAJAN, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	88000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
444	[23.05] Perbaikan Saluran Air Limbah	Dalam salurannya, airnya sampai meluap dan sampai masuk ke rumah penduduk	Wirogunan Rt 27 Rw 08 Kelurahan Wirogunan Kemantren Mergangsan , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	400	M	440000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

445	[23.05] Perbaikan Saluran Air Limbah	Masih banyak rumah warga di Kampung Sanggrahan yang belum mempunyai Sambungan Rumah (limbah) sehingga di khawatirkan berdampak kepada kesehatan masyarakat yang diakibatkan dari bakteri ekoli, Dengan adanya Sambungan Rumah yang tersambung ke saluran komunal / utama di harapkan meningkatan derajat kesehatan masyarakat di KampungSanggrahan.	warga di RT01, RT02, RT03, RT04, RT05, RT06 di RW01 dan RW02, Kelurahan Semaki Kemantren Umbulharjo Dodiek Sadewo (0856 0020 0590), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	SR	16500000	-	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
446	[03.11] Skrining Kesehatan untuk Lansia dan Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	Kurangnya wadah untuk tempat beraktifitas lansia, Menumbuhkan semangat karena bisa bertemu beraktifitas dengan yang lain	RW 8, 9 10 Kelurahan Semaki kemantren Umbulharjo Bu Suharningsih 083869200066, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100	Orang	10000000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
447	[24.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Di beberapa wilayah kurangnya lampu penerangan,sehingga terlihat gelap	Mergangsan Kidul Rt 76 Rw 24 Kelurahan Wirogunan Kemantren Mergangsan CP 083869511559, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	Titik	30000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
448	[22.04] Perbaikan /Pemeliharaan Irigasi permukaan	Salurannya sudah menumpuk tanah,sehingga aliran airnya menjadi dangkal diperlukan pengerukan / pelumpuran	Mergangsan Kidul Rt 74 Rw 24 Kelurahan Wirogunan Kemantren Mergangsan CP 083869511559, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	500	M	1500000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
449	[23.05] Perbaikan Saluran Air Limbah	Saluran yang sudah ada mampet dan airnya meluap	Sentul Rejo Rt 27 Rw 08 Kelurahan Wirogunan Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	400	M	440000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
450	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	Pemenuhan Gizi Balita	Singojayan RW 01 Santo 087738790197 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kelompok	924000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
451	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	RTLH a.n Sutarto	RT 41 RW 09 Gampingan Pakuncen Wirobrajan No. Hp : 0857-1081-5881, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
452	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	RTLH Ibu Kusbini	RT 48 RW 11 Gampingan Pakuncen Wirobrajan NO. Hp : 0857-1081-5881, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
453	[08.01] Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan	upgrading kemampuan kapasitas pemuda	RW 05 Pakuncen Bp Wasis 087719751772, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	45	kelurahan	59145000	-	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
454	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	RW 01 Kelurahan Patangpuluhan	RW 01 Kelurahan Patangpuluhan Bp didit 0882005562367, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kelompok	924000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
455	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	Pemberian Makan Tambahan Pemulihan Gizi Buruk Stunting	RW 02 Kelurahan Patangpuluhan Bp didit 0882005562367, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kelompok	924000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
456	[03.25] Penyuluhan keamanan pangan bagi industri rumah tangga pangan	Warga RW 09 Suryatmajan berharap ada pelatihan keterampilan buat warga seperti menjahit, memasak	Warga RW 09 Suryatmajan , Kota Yogyakarta, Andi '0817468878, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100	orang	74000000	-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

457	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	Pemberian makan tambahan Pemulihan Gizi Buruk stunting	Kelurahan Patangpuluhan Bp didit 0882005562367, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	kelurahan	8316000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
458	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	RTLH a.n Tumiasih	RT 09 RW 02 Patangpuluhan No. Hp : 0882-0055-62367, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
459	[06.07] Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Pelatihan Digital Marketing	RW 06 Wirobrajan No. Hp : 0823-3430-5192, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	44000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
460	[17.03] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Akses mendapat bibit tanaman pisang	RW 02 Pakuncen No. Hp : 0857-1081-5881, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	3	Kelompok	320000	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
461	[16.05] Pendampingan Sentra bagi Industri Kecil Menengah (IKM)	Pendampingan sentra Kerajinan Blangkon	RW 06 Kelurahan Patangpuluhan Bp didit 0882005562367, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	Kelompok	610000	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
462	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Pelatihan Stir Mobil	Kecamatan Wirobrajan No. Hp : 0823-3430-5192, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
463	[16.05] Pendampingan Sentra bagi Industri Kecil Menengah (IKM)	Pelatihan Kerajinan daur ulang sampah	RW 06 Kelurahan Patangpuluhan Bp didit 0882005562367, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	5	Kelompok	-	Non Belanja Transfer	-
464	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	Penambahan Gizi Lansia dan Posyandu Anak	RW 12 Pakuncen No. Hp : 0878-3341-5934, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kelompok	924000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
465	[16.03] Pengembangan usaha mikro kecil dan penguatan manajemen berusaha yang berlegalitas dan naik kelas	Pelatihan Manajemen UMKM	RW 12 Singosaren Pakuncen No. Hp : 0878-3341-5934, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	100	Orang	4400000	-	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
466	[17.03] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pelatihan olah pangan UMKM	RW 12 Singosaren Pakuncen No. Hp : 0878-3341-5934, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	100	Orang	320000	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
467	[06.07] Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Pelatihan Digital Marketing	RW 12 Singosaren Patangpuluhan No.Hp : 0878-3341-5934, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	44000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
468	[22.01] Pembangunan Talud Sungai	Balai RT 57 RW 14 kampung Juminahan ,kelurahan Tegalpanggung,Danurejan memerlukan renovasi dan perbaikan supaya layak digunakan untuk kegiatan warga kampung Juminahan	RT 57 RW 14 Kampung Juminahan , Kelurahan Tegalpanggung, Danurejan Yogyakarta, Kota Yogyakarta. Andi '0817468878, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	20	M3	300000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
469	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Bpk Eko Yogo Ismanto Atap nya sudah bocor,Perlu perbaikan	Keparakan Lor MGI/545 A Rt 28 Rw 07 Kelurahan Keparakan Kemantren Mergangsan , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
470	[22.02] Perbaikan /Pemeliharaan Talud Sungai	Pengendalian air sungai	Sungai Belik Iromejan Kltren Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	meter	1500000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
471	[24.08] Pengadaan dan Pemeliharaan Marka Jalan Perkotaan	Pemasangan Polisi Tidur	Demangan RW01,02 03, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	1	titik	5600000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
472	[14.01] Gelar Upacara Adat	pendampingan dalam acara merti kampung Mergangsan lor	RW 15 Kampung Mergangsan Lor, Kalurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Kontak Suratman Pemuda RT 49, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1	event	5000000	-	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
473	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	SAH Rusak	RT 54 , Kalurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron kontak Ketua RT 54 Bp Bagus, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	12	meter	100000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

474	[06.09] Padat Karya Infrastruktur	DAERAH AGAK KUMUH	GAMPINGAN RT 47 RW 10 PAKUNCEN KEMANTREN WIROBRAJAN, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	kegiatan	330000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
475	[22.01] Pembangunan Talud Sungai	Pengaman Tebing Lanjutan	RT 17 RW 06 Kelurahan Giwangan kemantren Umbulharjo , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	22	m3	300000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
476	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Keamanan dari banjir untuk rumah-rumah disekitarnya	RT. 17./RW. 06 (Jl. Panti Werdha) Kelurahan Giwangan kemantren Umblharjo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	250	m3	1500000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
477	[23.05] Perbaikan Saluran Air Limbah	Masih banyak yang belum tersalur	Jalan Kusuma wilayah RW.17 Gendeng Cp. Aris Isnawan 081326595108, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	70	SR	1155000000	-	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
478	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Belum adanya SAH dan SAL di daerah ini	Danukususman Gang Sumarlan RW.04, Baciro, Gondokusuman CP. HAryanto 081542356549, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	455	m2	3000000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
479	[24.06] Pemeliharaan Jembatan yang tercantum dalam data dasar jembatan	Jembatan rusak perlu perbaikan	Danukusuman RT.22 RW. 06 Baciro Gondokusuman CP. Teguh Niratmo 082226209878, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	titik	-	-	Pemeliharaan Rutin Jembatan
480	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Belum ada SAH	Kampung Baciro RT 34 RW. 10 Baciro Gondokusuman CP. Sugiman 088216649505, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	200	m2	1200000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
481	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	SAH Kurang memadai	Jl. Tunjung RT.86 RW 21Baciro, Gondokusuman CP. Aris Wibowo 082135188179, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	300	m2	1800000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
482	[11.01] Peningkatan Kapasitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)	Perlunya pelatihan dan penambahan pengetahuan dan skil untuk anggota KTB	Kampung Sapen Rt 18-28 Rw 06-08 Kelurahan Demangan Kemantren Gondokusuman CP 081578630617, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Pelatihan	10000000	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
483	[24.03] Peningkatan Jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Jalan Tidak Nyaman	Kampung Baciro RT.89 RW. 21 Baciro, Gondondokusuman CP. Aris Wibowo 082135188179, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	530	m2	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
484	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Masyarakat kurangnya mengenali alat musik gamelan	Kelompok Karawitan Eko Manunggal Kampung Sapen Rt 18-28 Rw 06-08 Kelurahan Damangan Kemantren Gondokusuman CP 081578630617, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	Pelatihan	-	-	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
485	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Pelatihan untuk pementasan sanggar tari	Sanggar tari Arum Dalu Kampung Sapen Rt 18-28 Rw 06-08 Kelurahan Demangan Kemantren Gondokusuman CP 081578630617, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	Pelatihan	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
486	[24.03] Peningkatan Jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	jalan Kurang mulus	Jalan Mawar RT 40,41 RW 11 Sanggrahan Baciro, Gondokusuman CP. Sujino 0811677626, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	45	m3	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
487	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Plumpungan dari semen ada yang pecah	Gendeng RT 70,71 RW 17 Baciro Gondokusuman CP. Aris Isnawan 081326595108, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	150	m2	500000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

488	[21.01] Pembangunan gedung milik daerah	Kontruksi bangunan nya sudah mulai rusak dan atapnya bocor	Kampung Sapen Rt 27 Rw 08 Kelurahan Demangan Kemantren Gondokusuman CP 081578630617, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	2000000000	-	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
489	[21.01] Pembangunan gedung milik daerah	Balai yang ada sudah rusak dan atapnya sudah bocor	Sentul Rejo Rt 28 Rw 08 Kelurahan Wirogunan Kemantren Mergangsan CP 082134204195, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	1500000000	-	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
490	[20.02] Pengadaan Sarpras di RTHP / Penyempurnaan RTHP	Sarpras di RTHP blm maksimal	Kantor Kelurahan Bausasran Akhmad Y (P. Lurah) 08156808072 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1	Paket	50000000	-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
491	[23.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	Pembersihan saluran Iar limbah dr lumpur dan kotoran lainnya pengerukan SPAL (Saluran pembuangan air limbah)	Klitren lor RT 25,26 RW 06 Klitren Gondokusuman Cp. Swinarno 087738285000, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	titik	30000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
492	[24.08] Pengadaan dan Pemeliharaan Marka Jalan Perkotaan	Pengadaan Rubber Speed Bump Pengadaan dan Pemeliharaan Marka Jalan Perkotaan	Iromejan RW.08 Klitren Gondokusuman Cp. Aris Kusbiantoro 081285329325, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	1	titik	5600000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
493	[17.03] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pelatihan budidaya tanaman hias untuk supplay BAJ dan pasar online.	RW 17 Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Aji ; 083825921134., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	8	0rang	320000	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
494	[23.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL), Saluran Air Limbah yang mampet	RW 18 Karanganyar , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	120	meter persegi	1800000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
495	[23.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL), Saluran Air Limbah yang mampet	RW 05 Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	80	meter persegi	1200000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
496	[06.07] Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Pelatihan Web Creator Tingkat Kota, Memberikan Pemahaman Serta Wawasan Perkembangan Teknologi dan Informasi, Meningkatkan Ketrampilan dan Keahlian dibidang teknologi dan Informasi TI	Kampung Prawirotaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	44000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
497	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Pembinaan Kelompok Sanggar, maupun organisasi budaya , meningkatkan kemampuan dan keahlian kelompok budaya	Kampung Prawirotaman , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	event	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
498	[17.03] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Gelar Potensi Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hasil/produk pertanian belum diolah dan dimanfaatkan secara maksimal serta belum memiliki daya saing di pasaran	Kecamatan Wirobrajan Pak Sarwanto No Hp 081578005040, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	2	Kelompok	320000	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
499	[17.03] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pelatihan Budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Perlunya peningkatan pengetahuan kelompok tani terhadap tanaman yang dapat menjadi obat	Kecamatan Wirobrajan Pak Sarwanto No Hp 081578005040, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	40	orang	320000	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
500	[16.01] Pemasaran produk berbasis Kemitraan dengan Toko Modern	Bazar Potensi Unggulan UMKM. Promosi produk UMKM yang masih kurang.	Kecamatan Wirobrajan Pak Sarwanto No Hp 081578005040, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perdagangan	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	Kelompok	3900000	Non Belanja Transfer	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
501	[16.05] Pendampingan Sentra bagi Industri Kecil Menengah (IKM)	Sosialisasi dan Pendampingan Nglarisi bagi Kelompok Gandeng Gendong. Adanya pembentukan Kelompok Gandeng Gendong baru dan berkembangnya aplikasi Nglarisi di JSS	Kecamatan Wirobrajan Pak Sarwanto No Hp 081578005040, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	Kelompok	10000000	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
502	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	sering terjadi banjir genangan saat hujan	Pilahan Gang Dahlia I RT 39 RW 12Rejowinangun Kotagede Yogyakarta 081226547686, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	250	m2	1500000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
503	[22.01] Pembangunan Talud Sungai	Cakrup sudah tidak layak	RW.002, Bausasran, Danurejan, Andi '0817468878, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Titik	200000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai

504	[06.07] Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Perlu ada Pelatihan Pemasaran Online	RW.002 Bausasran, Danurejan, Andi '0817468878, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	44000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
505	[23.02] Penyambungan Sambungan Rumah dengan kepadatan Rendah	Permohonan sambungan baru SAL	RW.002 Bausasran, Danurejan, Andi '0817468878, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	20	SR	326000000	-	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
506	[06.07] Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Perlu adanya pelatihan Marketing onlife untuk meningkatkan penjualan	Bausasran, Danurejan, Andi '0817468878, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	44000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
507	[22.01] Pembangunan Talud Sungai	Bausasran, Danurejan, Andi '0817468878	Bausasran, Danurejan, Andi '0817468878, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Titik	200000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
508	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	SAH rusak	Jalan Nogosari, Kalurahan Patehan , Kemantren Kraton ,kontak Pak Sutaryoko Ketua LPMK Kalurahan Patehan ,hp 0817274553, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	500	meter	3000000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
509	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Pelumpuran Saluran irigasi Tersier	Saluran air hujan, dari Selatan RS Pratama - Jl Tritunggal , kontak Pak Sarmidi Ketua RW 16, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1500	meter	9000000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
510	[22.02] Perbaikan /Pemeliharaan Talud Sungai	Jalan Pinggir sungai yang amblas	RW 09 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	titik	1000000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
511	[08.01] Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan	Banyak pemuda yang ada di wilayah belum mengerti tentang apa itu Leadership dan cara berorganisasi yang benar	Kantor Kelurahan Tegalpanggung Danurejan Karang Taruna CP. Vito Erlangga (085156126763), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	45	kelurahan	59145000	-	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
512	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Kurangnya pemahaman tentang Bregada bagi kelompok Budaya di wilayah tegalpanggung, sehingga perlu adanya pembinaan kelompok workshop BUdaya Tegal syogo.	KAntor Kelurahan Tegalpanggung Danurej anRKB Kelurahan Tegalpanggung 08156857234, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	orang	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
513	[24.03] Peningkatan Jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pembuatan Jalan di pinggir kali di wilayah RW 09, RW 10 dn RW 11 panjang 100 meter, lebar 3 meter, bedengan tinggi 7 meter	Cokrokusuman RW 09, 10, 11, Cokrodiningratan, Jetis , 0811-257-194, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	300	m2	30000000	-	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
514	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembangunan SAH di wilayah Kricak Kidul RT 44 RW 09 untuk mengurangi genangan air saat musim hujan.	Kricak Kidul RT 44 RW 09, Kricak, Tegalrejo , 0857-2793-4295, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	50	m	400000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
515	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pemeliharaan saluran air hujan SAH /Drainase di wilayah	Klitren lor Rt 3RW 1 Klitren Gondokusuman Cp. Bu Westri 081328355355 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	13	titik	200000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
516	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Perbaikan Saluran Pembuangan Air	Bangunrejo RT 54 RW 12 Kricak, Tegalrejo , 0823-3246-5487, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	m2	300000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
517	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pemeliharaan saluran air hujan SAH / Drainase di wilayah	Klitren Lor RT 9 RW 3 Klitren Gondokusuman Cp. Suparno 082243437580, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	110	m2	700000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

518	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pemeliharaan Saluran air hujan SAH / Drainase di wilayah	Klitren lor RT. 1 RW1 Klitren Gondokusuman CP. Bu Westri 081328355355, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	200	m2	1200000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
519	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pemeliharaan Saluran air hujan SAH / Drainase wilayah	iromejan RW 7 & RW 8 Klitren Gondokusuman CP. Aris Kusbiantoro 081285329325, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	m2	600000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
520	[24.03] Peningkatan Jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pembuatan Jalan di pinggir kali di wilayah RW 09, RW 10 dn RW 11 panjang 100 meter, lebar 3 meter, bedengan tinggi 7 meter	Cokrokusuman RW 09, 10, 11, Cokrodiningratan, Jetis , 0811-257-194 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	300	m2	30000000	-	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
521	[24.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Aspal kondisi rusak , banyak yang berlubang dan sering terjadi kecelakaan	Jalan Wiratama Kelurahan Tegalrejo, Tegalrejo - 0812-2715-3781, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2400	m2	5000000000	-	Pemeliharaan Berkala Jalan
522	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Pelumpuran dan perbaikan saluran	Jl. Suhartono Johar Nurhadi, RT. 06 RW. 2 Kotabaru Gondokusuman Cp. Atang Ponco Setiawan 08179402294, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	600	m2	900000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
523	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Perbaikan dan Pelumpuran Saluran	Jl Juadi RT.08 RW 02 Kotabaru Gondokusuman Cp. Atang Ponco Setiawan 08179402294, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	200	m2	600000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
524	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Saluran air hujan dari jalan jagalan yang menuju ke sungai code sudah lama tidak diperbaiki, pondasinya rentan jebol membahayakan rumah warga yang berada di samping saluran.	Jagalan Ledoksari PA I, RW 01, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	m'	800000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
525	[12.03] Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana Satlinmas	Pentingnya pengetahuan dan pelatihan dasar bagi Satlinmas dalam menanggulangi bencana untuk membantu KTB dan BPBD jika terjadi suatu bencana	Kelurahan Purwokinanti (Jl. Harjowinatan No.19), Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	1	kali	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
526	[12.03] Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana Satlinmas	Pentingnya pengetahuan dan pelatihan dasar bagi Satlinmas dalam menanggulangi bencana untuk membantu KTB dan BPBD jika terjadi suatu bencana	Kelurahan Gunungketur (Jl. Jayaningprangan No. 10), Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	1	kali	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
527	[12.01] Kesamaptaan Petugas Linmas	Pentingnya peningkatan kapasitas SDM bagi Petugas Linmas	Kelurahan Purwokinanti (Jl. Harjowinatan No. 19), Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	1	kali	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
528	[12.01] Kesamaptaan Petugas Linmas	Pentingnya peningkatan kapasitas SDM bagi Petugas Linmas	Kelurahan Gunungketur (Jl. Jayaningprangan No.10), Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	1	kali	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
529	[12.02] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Pentingnya pengembangan Kapasitas SDM bagi Petugas Linmas agar dapat melaksanakan tugas dengan baik	Kelurahan Purwokinanti (Jl. Harjowinatan No.19), Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	1	kali	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
530	[12.02] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Pentingnya pengembangan Kapasitas SDM bagi Petugas Linmas agar dapat melaksanakan tugas dengan baik	Kelurahan Gunungketur (Jl. Jayaningprangan No.10), Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	1	kali	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
531	[09.01] Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (KB)	Pengembangan Kampung keluarga berkualitas	Kantor Keluarahan Demangan Gondokusuman Cp. Heri Istyawan 08122954841, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	paket	4176000	-	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
532	[14.01] Gelar Upacara Adat	Menyelenggarakan upacara adat Umbul Donga Apeman	Kantor kelurahan Demangan Gondokusuman Cp. Heri Istyawan 08122954841, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1	paket	5000000	-	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi

533	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Pengadaan seragam bregada. Bregada kampung Kumendaman berpotensi menjaga dan mengangkat latar belakang sejarah dan budaya karena kampung Kumendaman adalah kampung eks kawasan komandan bregada keraton.	Kampung Kumendaman, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Graad Honeystar ; 085718966866., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	unit	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
534	[14.01] Gelar Upacara Adat	Pentingnya menggelar festival budaya adat di kelurahan gunungketur	Kelurahan Gunungketur (Jl.Jayaningprangan No.10), Kemantren Gunungketur, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1	Event	5000000	-	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
535	[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	Pentingnya fasilitasi bagi Kampung Wisata Gunungketur untuk menampilkan potensi wisata dan UMKM agar menjadi daya tarik wisatawan	Kampung Wisata Gunungketur, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	Kampung Wisata	735000000	-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
536	[08.01] Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan	Pentingnya peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan Karang Taruna Gunungketur	Karang Taruna Gunungketur, Kelurahan Gunungketur(Jl. Jayaningprangan No.10), Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	45	kelurahan	59145000	-	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
537	[08.01] Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan	Pentingnya pelatihan pengelolaan bagi Karang Taruna Purwokinanti untuk meningkatkan kapasitas	Karang Taruna Purwokinanti, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	45	kelurahan	59145000	-	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
538	[14.01] Gelar Upacara Adat	Melestarikan Adat dan Tradisi Pakualaman Festival	Paguyuban Purwo Argo Budaya, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	Event	-	-	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
539	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Pentingnya FGD bagi Kelompok Sanggar Rampak Kiprah Budaya	Notowinatan PA II/442, RT 18 RW 05, Kelurahan Gunungketur, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	Kelompok	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
540	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Petingnya Workshop bagi Sanggar Tari Pandan Wangi untuk meningkatkan kapasitas	Notowinatan PA II/442 RT 18 RW 05, Kelurahan Gunungketur, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	Kelompok	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
541	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Pentingnya Workshop bagi Sanggar Tari Abhinaya untuk meningkatkan kapasitas	Purwokinanti PA I RT 28 RW 06, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	Kelompok	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
542	[17.05] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Kelompok perikanan lele yang sudah berjalan 4 tahun tapi belum pernah mendapatkan bimtek dan pelatihan.	Kampung Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Anto ; 081237763304., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	10	0rang	850000	-	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
543	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Ibu Titin Astuti Atap nya bocor dan Konstruksi bangungannya sudah rapuh,perlu perbaikan	Sapen GKI/642 Rt 24 Rw 07 Kelurahan Demangan Kemantren Gonfokusuman CP 081578630617, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

544	[02.04.MERGANGSAN] Pemeliharaan CCTV di wilayah	Diwilayah rawan terjadinya kerusuhan dan tindakan kriminal	Keparakan Lor Rt 27 - 32 Rw 07 Kelurahan Keparakan Kemantren Mergangsan CP 083869511559, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	6	Titik	3600000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
545	[02.03.MERGANGSAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Pos ronda yang sekarang konstruksinya sudah rapuh,perlu perbaikan	Mergangsan Kidul Rt 74 Rw 24 Kelurahan Wirogunan Kemantren Mergangsan CP 083869511559, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	1	Unit	12750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
546	[02.10.MERGANGSAN] Cermin Tikungan di wilayah	Di persimpangan gang kampung rawan dengan kecelakaan	Mergangsan Kidul Rt 76 Rw 24 Kelurahan Wirogunan Kemantren Mergangsan CP 083869511559, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	4	Titik	2750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
547	[02.26.GEDONGTENGEN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan dan signage lainnya)	Pembuatan gapura di jalan masuk wilayah RT 7 dan 9 RW 02 Jlagran	Kampung Jlagran RW 02 PIC (+62 877-3971-8088) Pak Panut, Kota Yogyakarta", Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	1	unit	50000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
548	[02.01.GEDONGTENGEN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Perbaikan paving blok di jalan gang wilayah RT 7 dan 9 RW 02	Kampung Jlagran RW 02 PIC (+62 877-3971-8088) Pak Panut, Kota Yogyakarta", Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	525	m2	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
549	[02.10.MERGANGSAN] Cermin Tikungan di wilayah	Di beberapa persimpangan gang kampung rawan terjadinya kecelakaan	Keparakan Lor Rt 27 - 32 Rw 07 Kelurahan Keparakan Kemantren Mergangsan CP 083869511559, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	5	Titik	13750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
550	[02.02.KRATON] Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	Sumur warga RT 47 sudah pernah di ACC tahun 2023 tapi sampai sekarang belum terealisasi. Minta difailitasi pompa dan penampungan air untuk listrik aka nada iuran warga yang menggunakan.	Kampung Panembahan RW 14 PIC +62 812-2037-0889 (pak Frans), Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	1	unit	35000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
551	[02.22.KRATON] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah: Pengadaan Tas Pilah	Bank sampah mohon bantuan tempat sampah khusus botol-botol	Kampung Panembahan RW 15 PIC +62 812-2037-0889 (pak Frans), Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	3	set	7500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
552	[01.10.KRATON] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Di Tamansari ada sanggar karawitan, mohon difasilitasi untuk pelatihan dan pementasan.	Kampung Patehan Nogosari RW 8, 9, 10 PIC +62 812-2037-0889 (pak Frans), Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	60	orang	5520000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
553	[02.04.MERGANGSAN] Pemeliharaan CCTV di wilayah	Di wilayah rawan terjadinya kerusuhan dan tindak kejahatan	Mergangsan Kidul Rt 74.75.76 Rw 24 Kelurahan Wirogunan Kemantren Mergangsan CP 083869511559, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	3	Titik	21000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
554	[01.16.KRATON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Untuk yandu balita dan lansia tidak mendapat anggaran, bisakah kami difasilitasi supaya kegiatan tidak selalu kami harus iuran.	Kampung Kadipaten wetan RW 7,8,9 PIC +62 812-2037-0889 (pak Frans), Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	3	Lembaga Kemasyarakatan	4950000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
555	[02.01.KRATON] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Perbaikan paving blok di jalan gang wilayah RT 47 RW 12	Kampung Panembahan RW 12 PIC +62 812-2037-0889 (pak Frans), Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	125	m2	43000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
556	[02.02.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	Renovasi MCK yang kurang layak digunakan RT 27 RW 07 Pengok Kidul Baciro Kemantren Gondokusuman	RT 27 RW 07 Pengok Kidul Baciro Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	1	unit	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
557	[01.13.MANTRIJERON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan budidaya tanaman hias untuk menjadi supplayer BAJ dan dipasarkan online.	RW 17 Dukuh Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Aji ; 083825921134., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	20	0rang	9070000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

558	[24.06] Pemeliharaan Jembatan yang tercantum dalam data dasar jembatan	Perombakan Jembatan Kali manunggal yang menghubungkan RW 06 dan RW 07 di Sisi Selatan Kurang termanfaatkan karena posisi yang terlalu tinggi sehingga menyulitkan lansia melintas RT 24 RW 07 Baciro Gondokusuman	jembatan Kali manunggal RT 24 RW 07 Baciro Gondokusuman , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	unit	-	-	Pemeliharaan Rutin Jembatan
559	[01.13.MANTRIJERON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pelatihan bududaya tanaman hias untuk menjadi supplayer BAJ dan dipasarkan online.	RW 18 Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Aji ; 083825921134., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	20	0rang	9070000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
560	[01.19.GONDOKUSUMAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan	Baciro Fest (Gelar Potensi UMKM dan Budaya) Lokasi Di Jalan Tunjung Depan SMA PIRI Baciro Gondokusuman	Di Jalan Tunjung Depan SMA PIRI Baciro Gondokusuman , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	1	event	14870000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
561	[01.01.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah	Penyuluhan Kader dan Ibu Hamil Baciro Kemantren Gondokusuman	Baciro Kemantren Gondokusuman , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	1	unit	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
562	[01.10.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan kader PSM Baciro Gondokusuman	Baciro Gondokusuman CP 085803563257 (karni, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	30	orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
563	[01.10.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Sosialisasi tentang PSM ke RW atau RT	Kelurahan Baciro Kemantren Gondokusuman PC : 085803563257 (Karni Lestari), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	35	orang	3435000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
564	[21.01] Pembangunan gedung milik daerah	Renovasi Balai RW 04 Prenggan, Kotagede	RW 04 Prenggan Kotagede CP 08978243004 (Pak Hari) , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	unit	1000000000	-	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
565	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Masih minimnya pengetahuan ibu-ibu tentang tata cara pembuatan makanan yang layak jual sebagai usaha untuk membantu perekonomian keluarga	Nitikan, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo (Tri Astuti - 08994181884), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	20	orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
566	[02.05.KOTAGEDE] Pembangunan sumur resapan air hujan di wilayah	Perbaikan penutup Saluran Air Hujan di RW 03 RT 18 Prenggan Kotagede	RT 18 RW 03 Prenggan Kotagede CP 08978243004 (Pak Hari) , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	10	m2	34408500	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
567	[02.27.UMBULHARJO] Pemeliharaan Balai RT/RW/Kampung	Renovasi Atap Balai RT 45 RW 08 Pandeyan Umbulharjo	Balai RT 45 RW 08 Pandeyan Umbulharjo CP 081226808585 (Pak Soeyitno) , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	unit	90400000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
568	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	sering terjadi banjir genangan saat air parit meluap & saat hujan	Pilahan Gang Melati RT 37 RW 12 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta, Kota Yogyakarta 085602671176, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	175	m2	1200000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
569	[02.01.UMBULHARJO] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Pembangunan Konblok di Rt 30 dan Rt 37 RW 08 Pandeyan Umbulharjo	RT 30 dan RT 37 RW 08 Pandeyan Umbulharjo CP 081226808585 (Pak Soeyitno) , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	250	m2	105450000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
570	[02.20.KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah. Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta/ kelurahan.	Kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan bank sampah	RT 32 RW 8 Purbayan Kotagede Yogyakarta, Kota Yogyakarta 0895341717249, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	1	unit	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
571	[23.05] Perbaikan Saluran Air Limbah	SAL kondisi rusak dan meluap ketika musim hujan sehingga menyebabkan jalan diatasnya (paving blok) mengalami kerusakan. Perbaikan dan pemeliharaan SAL	Sepanjang gang Parangklitik (Rt 17, RW 04) arah keselatan di area / dekat pasar Pujokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	170	meter persegi	187000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
572	[02.01.MERGANGSAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Paving Block kondisi rusak, membahayakan pengguna jalan	RT 03 RW 01 Timuran, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	50	meter	82000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
573	[02.01.MERGANGSAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Paving Block kondisi rusak, membahayakan pengguna jalan.	RT 07 RT 9 RW 03 Timuran, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	240	meter	302000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
574	[02.01.KOTAGEDE] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Jalan lingkungan masih tanah, menghambat akses aktifitas harian warga	Pilahan RT 37 RW 12 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta HP. 081578016026, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	143	M2	52981500	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

575	[02.01.MERGANGSAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Paving Block kondisi rusak, membahayakan pengguna jalan.	RT 38,39, 40 RW 10 Karangkajen, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	150	meter	250000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
576	[02.01.MERGANGSAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Paving Block kondisi rusak, membahayakan pengguna jalan	Gang Merpati, RT 45-46, RW 12 Karangkajen, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	71	meter	120000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
577	[02.01.MERGANGSAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Paving Block kondisi rusak, membahayakan pengguna jalan	RT 55 RW 15 Karangkajen, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	280	meter	470000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
578	[02.10.MERGANGSAN] Cermin Tikungan di wilayah	Pengadaan cermin tikungan	RW 01.02.03 Timuran, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	15	titik	41250000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
579	[02.10.MERGANGSAN] Cermin Tikungan di wilayah	Pengadaan cermin tikungan	RW 04 RT 12, 13 dan RW 06 RT 18 Brontokusuman , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	3	titik	8250000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
580	[02.10.MERGANGSAN] Cermin Tikungan di wilayah	Pengadaan cermin tikungan	RW 08, RT27,29 RW 07, RT23,25, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	5	titik	13750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
581	[02.10.MERGANGSAN] Cermin Tikungan di wilayah	Pengadaan cermin tikungan	RT 49, rw 13 Karangkajen, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	2	titik	5500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
582	[02.10.MERGANGSAN] Cermin Tikungan di wilayah	Pengadaan cermin tikungan	RW 15 RT 55 (pojok masjid Sholihin), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	2	titik	5500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
583	[23.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi	Penggantian pipa saluran air limbah di utara gang waskito karena sering mampet	RW 02 & 03 Timuran, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	SR	16300000	-	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
584	[23.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi	Perbaikan saluran air limbah perbatasan RT 05 dan 06, karena sering mampet	RT05&06 Timuran, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	SR	16300000	-	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
585	[11.02] Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Pelatihan pencegahan kebakaran dalam RT	RW 01.02.03 Timuran, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	65	orang	7701000	-	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
586	[02.05.KOTAGEDE] Pembangunan sumur resapan air hujan di wilayah	seringnya terjadi banjir genangan saat hujan deras berlangsung	RW 12 Pilahan Rejowinangun Kotagede Yogyakarta 081215040506, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	30	buah	19836000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
587	[02.01.MANTRIJERON] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Perlu Paving block	RT 62 RW 12 Gedongkiwo Mantrijeron 08986675760 Gaos sunandar , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	134	Meter	40200000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
588	[02.08.MANTRIJERON] Pemeliharaan SAH di wilayah	Perlu perbaikan SAH	RT 62 RW 12 Gedongkiwo Mantrijeron 08986675760 Gaos sunandar , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	50	Meter	50000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
589	[02.05.MANTRIJERON] Pembangunan sumur resapan air hujan di wilayah	Banyak Genangan	RT 62 RW 12 Gedongkiwo Mantrijeron 08986675760 Gaos sunandar , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	Titik	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
590	[11.03] Pelatihan Redkar (relawan kebakaran)	Perlu pelatihan mitigasi bencana	RT 62 RW 12 Gedongkiwo Mantrijeron 08986675760 Gaos sunandar , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	Kegiatan	7701000	-	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
591	[01.18.KRATON] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	Perlu kostum	RW 17 dan RW 18 Panembahan,Kraton 08175450401 Suyono Bangun Prasetyo , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	40	Orang	40000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
592	[01.01.MANTRIJERON] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah	pencgahan sakit	RT 66 RW 13 Gedongkiwo Mantrijeron Yogyakarta081336681981Suniyah, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	kegiatan	2380000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
593	[01.12.MANTRIJERON] Pelatihan Boga di wilayah	untuk keterampilan hidup masyarakat	RT 66 RW 13 Gedongkiwo Mantrijeron Yogyakarta081336681981 Suniyah, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	kegian	5970000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
594	[03.07] Inisiasi Posyandu Remaja	merawat dan membina remaja agar terhindar dari sakit	RT 66 RW 13 Gedongkiwo Mantrijeron Yogyakarta081336681981 Suniyah, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12	Kegiatan	3000000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
595	[03.13] Penyuluhan tentang kesehatan hipertensi	pencegahan sakit	RT 66 RW 13 Gedongkiwo Mantrijeron Yogyakarta081336681981 Suniyah, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	55	Kegiatan	13750000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
596	[03.14] Penyuluhan tentang kesehatan Diabetes Melitus	pencegahan sakit	RT 66 RW 13 Gedongkiwo Mantrijeron Yogyakarta081336681981 Suniyah, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	55	Kegiatan	13750000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

597	[03.16] Penyuluhan tentag Tuberkulosis	mencegah sakit	RT 66 RW 13 Gedongkiwo Mantrijeron Yogyakarta081336681981 Suniyah, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	6	Kegiatan	10140000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
598	[03.01] Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang perencanaan kehamilan , layanan kontrasepsi, gizi ibu hamil, dan layanan antenatal	pencegahan sakit	RW 09 , Suryadiningratan ,Mantrijeron087880612867 Nurul Asri Antari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	180	Orang	21600000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
599	[01.02.MANTRIJERON] Senam Lansia di wilayah	banyak lansia	RW 09, Suryadiningratan, Mantrijeron 087735503316 Sutini, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	4	kegiatan	20260000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
600	[02.01.MERGANGSAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	perlu di paving block	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	150	meter	270000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
601	[01.02.MERGANGSAN] Senam Lansia di wilayah	banyak lansia	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	1	Kegiatan	3400000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
602	[01.06.MERGANGSAN] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah	rawan bencana	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	1	Kegiatan	5361000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
603	[01.12.MERGANGSAN] Pelatihan Boga di wilayah	banyak SDM yang ingin pelatihan boga	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	1	kegiatan	7930000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
604	[01.13.MERGANGSAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	lahan banyak nganggur	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	1	kegiatan	8690000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
605	[01.14.MERGANGSAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	perlu pengembangan pelatihan kerjainan	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	1	kegiatan	7930000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
606	[01.15.MERGANGSAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	banyak umkm	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	1	Kegiatan	7310000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
607	[01.18.MERGANGSAN] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	belum ada kostum	Pemberdayaan Kewilayahan, Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	1	kegiatan	15000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
608	[19.05] Fasilitasi pengurusan perubahan peta bidang pada sertifikat tanah warga yang digunakan untuk Fasum	perlunya pendampingan pengurusan alas hak tanah untuk dijadikan fasum bagi warga	RT 30 RW 7 Purbayan Kotagede Yogyakarta 0816680431, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	5	Bidang	15950000	-	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
609	[02.04.MERGANGSAN] Pemeliharaan CCTV di wilayah	rawan kejahatan	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	1	titik	42000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
610	[02.05.MERGANGSAN] Pembangunan sumur resapan air hujan di wilayah	banyak genangan air	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	6	titik	21000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

611	[02.10.MERGANGSAN] Cermin Tikungan di wilayah	Cermin Tikungan di wilayah	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	4	titik	11000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
612	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	minimnya ketrampilan beberapa warga masyarakat	Pilahan RW 12 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta 081578016026, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
613	[02.11.MERGANGSAN] Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Posyandu	perlu paud dan posyandu	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	4	unit	1250000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
614	[02.12.MERGANGSAN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di wilayah	sampah organik banyak	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	10	set	15000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
615	[02.13.MERGANGSAN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	sampah banyak	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	10	set	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
616	[02.14.MERGANGSAN] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah	banyak sampah	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	10	set	15000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
617	[02.15.MERGANGSAN] Pengolahan Sampah Organik : Keranjang Takakura di wilayah	banyak sampah	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	10	paket	2500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
618	[02.17.MERGANGSAN] Pengolahan Sampah Organik : Losida (Lodong Sisa Dapur) di wilayah	banyak sampah	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	10	set	13761000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
619	[02.18.MERGANGSAN] Pengolahan Sampah Organik : Vermikompos di wilayah	banyak sampah	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	10	Buah	2500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
620	[24.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Kondisi Jalan di atas SAH mengalami kerusakan, kontruksi besinya patah, sehingga membahayakan bagi pengguna jalan, perlu dilakukan pengecoran beton untuk mengatasinya.	Jalan Gang Sisi timur SMKN 1 Yogyakarta , Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	158	meter	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
621	[11.01] Peningkatan Kapasitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)	masih kurangnya pengetahuan beberapa relawan tentang mitigasi kebencanaan	Pilahan RW 12 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta 081578016026, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	paket	10000000	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
622	[24.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Sepanjang jalan tersebut sudah banyak aspal yang berlubang, pecah sehingga menyebabkan banyak kecelakaan bagi pengguna jalan, perlu dilakukan perbaikan atau pengaspalan kembali pada jalan tersebut	RW 03 kampung Jlagran Kel Pringgokusuman Kemantren Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	150	meter	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
623	[24.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Sepanjang jalan tersebut sudah banyak aspal yang berlubang, pecah sehingga menyebabkan banyak kecelakaan bagi pengguna jalan, perlu dilakukan perbaikan atau pengaspalan kembali pada jalan tersebut	RW 05 kampung Blunyarejo,ke karang waru Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	meter	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
624	[01.18.GEDONGTENGEN] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	Notoyudan GT II/1307 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	20	Buah	25000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

625	[02.27.TEGALREJO] Pemeliharaan Balai RT/RW/Kampung	Perbaikan Balai RW.04 Blunyahrejo, Karangwaru	Balai RW.04 Blunyahrejo, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Tegalrejo	Kemantren Tegalrejo	1	paket	70000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
626	[01.05.KOTAGEDE] Gebyar PAUD di wilayah	perlunya wadah bagi anak anak PAUD	kelurahan Purbayan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	1	kegiatan	20735000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
627	[02.01.UMBULHARJO] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	kondisi jalan konblok rusak	Jalan Gambiran Gang Semut no 43 Rt 32 RW 08 , kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	360	m3	151848000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
628	[02.01.TEGALREJO] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Perbaikan jalan berupa cor 3mx100m	Kricak RW 01 RT 61, Kricak, Tegalrejo , 0812-1589-877, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Tegalrejo	Kemantren Tegalrejo	300	m2	97500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
629	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembuatan SAH panjang 30m	Kricak RW 01 RT 61, Kricak, Tegalrejo , 0812-1589-877, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	30	m	200000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
630	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Perbaikan penggantian gorong-gorong SAH di jalan wilayah RT 03 RW 01 dengan volume 300m	Jatimulyo RT 03 RW 01, Kricak, Kemantren Tealrejo, 0856-4344-1070, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	300	m	1800000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
631	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembanguan SAH sepanjang 150 m	Jatimulyo RT 03 RW 01 Kelurahan Kricak, 0856-4344-1070, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	150	m	900000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
632	[01.14.MANTRIJERON] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan kerajinan ukir kecil untuk produksi cinderamata kayu gaharu dan kayu cendana untuk pasar online.	Kemantren Mantrijeron. A.n. Yulius Widyartoro Dewa ; 085225650865., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	20	0rang	12000000	-	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
633	[24.08] Pengadaan dan Pemeliharaan Marka Jalan Perkotaan	Pengadaan pita penggaduh	"Kricak RW 07 RT 31 Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo, 0895-2535-8000 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	1	titik	5600000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
634	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembuatan gorong gorong, baru RT 44 RW 09 Kricak, panjang 40 mtr, lebar 1 mtr, tinggi 1,2 mtr	Kricak RW 09 RT 44 Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo, 0895-2535-8000, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	48	m3	300000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
635	[01.08.NGAMPILAN] Pelaksanaan Les Non Kognitif di wilayah	Pelatihan dan lomba membaca tulisan latin berbahasa Jawa guna pengenalan bahasa Jawa dan pembentukan kecerdasan verbal-nonvebal.	Kemantren Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Yulius Widyartoro Dewa ; 085225650865., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Ngampilan	Kemantren Mantrijeron	40	0rang	4500000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
636	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Pelumpuran dan Perbaikan SAH	Bangunrejo RW 12 RT 54 Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo, 0823-3246-5487 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	m	300000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
637	[02.27.MANTRIJERON] Pemeliharaan Balai RT/RW/Kampung	Renovasi Balai RW 18, Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta.	RW 18 Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Kirwanto ; 085729239924., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	Paket	106020000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
638	[02.03.MANTRIJERON] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Pemeliharaan pos ronda.	RT 75 RW 16 Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Maryono ; 082245411906., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	unit	22800000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
639	[02.02.DANUREJAN] Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	Pembongkaran Saptic tank (Saluran wc ke saptic tank rusak)	Selatan museum Romo mangun RW.01 Kotabaru, Gondokusuman Cp. Darsam 089624411089, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Gondokusuman	9	m2	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
640	[02.03.MANTRIJERON] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Pemeliharaan pos ronda.	Kampung Ngadinegaran, Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Woko Waskito ; 081329969204., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	10	meter	10000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
641	[02.24.MANTRIJERON] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	Pengadaan timbangan untuk bank sampah.	RW 13 Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Taufik ; 089606909033., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	unit	2250000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

642	[02.26.DANUREJAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan dan signage lainnya)	Perlu penanda wilayah	Gendeng RW 16 - 17 , Baciro, Gondokusuman CP. Aris Isnawan 081326595108, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Gondokusuman	1	titik	65000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
643	[01.10.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Sosialisasi Rumah Sehat Layak Huni	Aula Kelurahan Baciro, Gondokusuman CP. Sutikno 085878243345, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	30	orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
644	[01.19.GONDOKUSUMAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan	Belum ada kajian pengembangan wisata berbasis potensi kampung	Aula Kelurahan Baciro, Gondokusuman CP. Laksmono Hapsoro 085868155309, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	1	paket	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
645	[02.25.MANTRIJERON] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas ≤ 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda)	Dengan mesin pencacah peluang tampung sampah plastik lebih besar dan dapat memperoleh nilai tambah ekonomi lebih.	RW 10 Suryodiningratan, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Raditya Gupala ; 085236144882., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	unit	13000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
646	[01.16.GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Untuk memudahkan menyampaikan informasi berkaitan perkembangan pengolahan sampah	Kantor Kelurahan Baciro, Gondokusuman CP. Setyowati 082242450874, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	30	orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
647	[01.13.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Banyaknya warga yang membutuhkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan ketrampilan dan perekonomian kedepannya	Lempuyangan DN 3/ 314 RT.23 RW. 004 Moh Mansyur 087839406743 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	50	orang	3250000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
648	[01.14.DANUREJAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Banyaknya warga yang membutuhkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan ketrampilan dan perekonomian kedepannya	Bausasran DN 3/602 RT 41 RW 011 Danang Indera K risharyanto, ST 081226222294 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	50	orang	14490000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
649	[01.17.DANUREJAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah	Melestarikan adat tradisi yang ada di wilayah melalui fasilitasi penyelenggaraan upacara adat (Memetri Budaya)	Lempuyangan DN 3/324 RT 015 RW 005 Mohammad Fadlan Thoyibi 081392405211, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	1	Paket	21431000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
650	[02.25.DANUREJAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas ≤ 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda)	Pengelolaan sampah belum bisa tertangani dengan baik	Lempuyangan DN 3/ 314 RT.23 RW. 004 Moh Mansyur 087839406743 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	3	unit	39000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
651	[01.11.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Pelatihan Batik jumputan dan sibori lanjutan	Kantor Kelurahan Klitren Gondokusuman Cp. Adi Prayitno 081238664635, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	20	orang	10980000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
652	[02.01.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Perbaikan Paving Blok RT 12	Klitren Lor RT 12 RW. 3 Klitren Gondokusuman Cp. Suparno 082243437580, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	60	m2	27120000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
653	[02.01.GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Perbaikan Paving Blok RT. 47 RW 12	Gang Witso RT. 47 RW.12 Kepuh Klitren Gondokusuman Cp. Sunaryo 081802743797, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	150	m2	67800000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
654	[02.08.MANTRIJERON] Pemeliharaan SAH di wilayah	Perlunya pemeliharaan SAH di kawasan RW 14 Dukuh karena berimbas ke RW lain di selatannya.	RW 14 Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Muji ; 08111841994., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	25	meter	25000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
655	[02.24.MANTRIJERON] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	Pengadaan timbangan bank sampah RW 10 Jogokaryan.	RW 10 Jogokaryan, Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Dananfg ; 089531065773., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	unit	2250000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

656	[02.20.GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah. Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta/ kelurahan.	Pengadaan Grobog tempat sampah botol plastik	Kantor Kelurahan Klitren Gondokusuman Cp. Adi Prayitno 081238664635, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	16	unit	24000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
657	[01.06.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah	Simulasi penanganan bencana di wilayah	KAntor Kelurahan Klitren Gondokusuman Cp. Heri Purnomo 081931704929, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	200	orang	19575000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
658	[02.02.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	Perbaikan MCK umum dan jetpump Pokmair 1 (penggunaan air semakin banyak dari warga masyarakat	RT 16 RW 05 Kotabaru, Gondokusuman Cp. Haryanto 081936161998, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	2	unit	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
659	[02.25.MANTRIJERON] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas ≤ 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda)	Pengadaan mesin pencacah sampah untuk lebih efektif efisiennya bank sampah.	RW 10 Jogokaryan, Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Danang ; 089531065773, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	unit	2250000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
660	[02.05.MANTRIJERON] Pembangunan sumur resapan air hujan di wilayah	Pembuatan sumur peresapan air hujan untuk mengurangi genangan dan tangkapan air bagi sumur-sumur di kawasan selatannya.	RW 10 Suryodiningratan, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Raditya Gupala ; 085236144884., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	5	Titik	15000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
661	[02.10.MANTRIJERON] Cermin Tikungan di wilayah	cermin yang ada sudah rusak tidak bisa digunakan lagi	Minggiran RT 62, RW 16 , Kalurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron, Kontak Bapak Asnur, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	3	unit	3750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
662	[02.05.MANTRIJERON] Pembangunan sumur resapan air hujan di wilayah	mengatasi genangan di wilayah saat musim penghujan	Gang Mulyoharjo, Gang Agel ,Kalurahan Suryodingratan, Kemantren Mantrijeron, Kontak Bapak Sulardi, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	6	titik	18000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
663	[02.04.MANTRIJERON] Pemeliharaan CCTV di wilayah	keamanan lingkungan	1. Gang Mulyoharjo, 2. Gang Agel, 3, Jalan Dongkelan ,Kalurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mntrijeron , kontak Bp Sulardi, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	6	titik	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
664	[24.08] Pengadaan dan Pemeliharaan Marka Jalan Perkotaan	mengurangi kecepatan berlalu lintas,dan berhati - hati, dengan Pita penggaduh serta polisi tidur	1. Jalan Minggiran 2, Jalan Dongkelan Kontak Bp Sulardi, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	1	Titik	5600000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
665	[01.15.MANTRIJERON] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	meningkatkan kemampuan produktifitas marketing	RW 16 , Kalurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, kontak PKK RW 16 Ibu Sri Yuniarti, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	20	orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
666	[02.11.MANTRIJERON] Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Posyandu	Fasilitasi Posbindum,JBM,Yandu Lansia, Balita	RW 16, Kalurahan Suryodiningratan, Kemantren Mergangsan ,Kontak PKK RW 16 Ibu Sri Yuniarti, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	3	unit	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
667	[01.15.MERGANGSAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatihan untuk Ibu - ibu PKK Produktifitas,pengemasan,marketing	PKK RW15 Kalurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, kontak Ibu Uswatun, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	20	orang	7310000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
668	[07.08] Jam Belajar Masyarakat	agar Program JBM bisa maksimal	RW 15, Kalurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, kontak Pengurus PKK RW 15 Ibu Uswatun, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	orang/bulan	300000	-	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
669	[01.15.MERGANGSAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pelatiahan penunjang kreatifitas dan produktifitas Pemuda Kampung Mergangsan Lor	RT 49 RW 15, Kalurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Kontak Bp Suratman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	20	orang	7310000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

670	[01.15.MERGANGSAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Pendampingan dan Pameran untuk UMKM	RW 15, Kalurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Kontak Ibu Eni, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	20	orang	7310000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
671	[07.03] Honor pengajar PAUD Bersetifikat Diklat Pendidik PAUD Tingkat Dasar	agar pendidik PAUD Mekarsari 14 yang non S-1 bisa mendapatkan honorarium	RW 14 Wirogunan , Kemanttren Mergangsan, kontak Ibu Uswatun, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	40	orang	28744000	-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
672	[02.11.MERGANGSAN] Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Posyandu	fasilitasi PAUD alat permainan PAUD Mekarsari 14 Wiroguan	PAUD RW 14 Wirogunan ,Kemantren Mergangsan , Kontak Ibu Uswatun, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	3	unit	1250000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
673	[02.05.MANTRIJERON] Pembangunan sumur resapan air hujan di wilayah	air menggenang di Wilayah	Minggiran Mj 2/1533,RT 57 RW 15 Kalurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron, Kontak Bp Sariwan Ketua RT 57, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	9	pembangunan titik	27000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
674	[02.10.MANTRIJERON] Cermin Tikungan di wilayah	keamanan lalu lintas di jalan dan gang	1. Jalan minggiran 2 unit, 2. Jalan Minggiran baru 2 unit, 3. Gang Pisang 2 unit, wilayah Kalurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	6	unit	7500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
675	[24.08] Pengadaan dan Pemeliharaan Marka Jalan Perkotaan	keamanan lalu lintas kendaraan di jalan	1. Polisi tidur di Gang Pisang, 2. Rambu hati hati di Gang Siwalan, Gang Pisang, Jalan Minggiran baru, Jalan Minggiran, kontak Sumarwanto, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	1	titik	6500000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
676	[02.04.MANTRIJERON] Pemeliharaan CCTV di wilayah	pengadaan 4 titik CCTV bagi keamanan lingkungan	Jalan Minggiran, Gang Siwalan, Gang Duwet, Jalan Minggiran baru Kalurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	4	unit	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
677	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	SAH rusak	RT 54, RW 14 Kalurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	12	meter	100000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
678	[01.15.MERGANGSAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	perlu penguatan UMKM penunjang Kampung Wisata	PKK RW 16, Kalurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	20	orang	20000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
679	[02.04.KRATON] Pemeliharaan CCTV di wilayah	untuk keamanan Kampung perlu pemasangan	Jalan Kadipaten Kulon, Kadipaten Lor, kalurahan Kadipaten Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	8	titik	15000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
680	[02.01.NGAMPILAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	JALAN BANYAK BERGELOMBANG DAN RUSAK	GENDINGAN RT18 RW 03 KEMANTREN NGAMPILAN (CP 0818266356 : SAPARUDIN), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Ngampilan	Kemantren Ngampilan	500	M1	85000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
681	[02.20.MERGANGSAN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah. Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta/ kelurahan.	Transportasi sampah kurang	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	3	unit	12000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
682	[02.21.MERGANGSAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	sampah banyak yang tercampur	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	3	unit	22500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
683	[02.22.WIROBRAJAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah: Pengadaan Tas Pilah	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Mergangsan	10	set	2500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

684	[02.24.MERGANGSAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	penimbangan kecil menyusahkan pengurus untuk menimbang	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	2	unit	4500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
685	[02.25.MERGANGSAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas ≤ 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda)	organik banyak perlu pencacahan	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	1	unit	13000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
686	[02.26.MERGANGSAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan dan signage lainnya)	perlu papan nama jalan	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	3	unit	10000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
687	[02.27.MERGANGSAN] Pemeliharaan Balai RT/RW/Kampung	Balai RW perlu perbaikan	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandar, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	1	Paket	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
688	[02.28.MERGANGSAN] Peningkatan kapasitas anggota Forum Bank Sampah	Perlu untuk edukasi Forum bank Sampah	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	1	Kegiatan	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
689	[03.01] Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang perencanaan kehamilan , layanan kontrasepsi, gizi ibu hamil, dan layanan antenatal	Pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	120	orang	3760000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
690	[05.03] Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	SEMANGAT BERUSAHA TERKENDALA ALAT BANTU (MEMBUTUHKAN MOTOR DISABILITAS)	WARGA RT 17 RW 04 PAKUNCEN KEMANTREN WIROBRAJAN (CP : MUGIYANTI KETUA RT 17), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	alat bantu	-	-	Penyediaan Alat Bantu
691	[03.02] Peningkatan kapasitas kader dalam kompetensi klaster 2 untuk posyandu meliputi ibu dan anak sesuai transformasi layanan primer	Pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	240	Kegiatan	24000000	-	Operasional Pelayanan Puskesmas
692	[03.03] Implementasi Kelas Ibu Hamil	Pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	120	orang	3760000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
693	[03.04] Penyuluhan tentang kesehatan Bayi Baru Lahir	Pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	120	orang	3760000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
694	[03.05] Penyuluhan Kesehatan untuk Ibu Balita	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	135	orang	4005000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
695	[03.06] Skrining anak Usia Pendidikan Dasar dan Kegiatan BIAS	Pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	184	kegiatan	36800000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
696	[03.08] Skrining untuk Usia Produktif	Pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	94	Kegiatan	21620000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

697	[03.09] Pelatihan kader Posbindu	pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandar, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	450	orang	24750000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
698	[03.10] Penyuluhan tentang kesehatan Usia Produktif	Pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	270	orang	3870000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
699	[02.01.WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	JALAN INSPEKSI PAVINGBLOCK PINGGIR KALI WINONGO	JALAN INSPEKSI KALI WINONGO RT 35 - 36 RW 07 PATANGPULUHAN KEMANTREN WIROBRAJAN (CP 083840130937 : KARMANTO), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	100	M2	32500000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
700	[02.01.KOTAGEDE] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	jalan area kampung masih tanah, karena gang kampung tembus jalan raden ronggo no 1 prenggan kotagede	prenggan utara KG II/600 RT 25 RW 05 prenggan,kotagede,yogyakarta, akses jalan tembus timur jalan raden ronggo no 1 (RT 25 AN. bapak nanang margiyanto 085726490950), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	200	m2	15052016	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
701	[03.11] Skrining Kesehatan untuk Lansia dan Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	Pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	120	kegiatan	27600000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
702	[03.13] Penyuluhan tentang kesehatan hipertensi	pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	75	orang	4125000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
703	[03.14] Penyuluhan tentang kesehatan Diabetes Melitus	pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	75	orang	4125000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
704	[03.15] Penyuluhan tentang kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	30	kegiatan	3000000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
705	[02.03.WIROBRAJAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	POS RONDA SUDAH RUSAK	JL. MADUBRONTO RW 03 PATANGPULUHAN KEMANTREN WIROBRAJAN (CP 087878073384 : SHOLIHAN KETUA RW 03), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	1	unit	15000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
706	[03.16] Penyuluhan tentag Tuberkulosis	Pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	75	orang	4125000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
707	[03.17] Pemberian makanan tambahan bagi penderita Tuberkulosis	pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	-	Kegiatan	-	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
708	[01.02.DANUREJAN] Senam Lansia di wilayah	Perlunya Lansia di Kampung diberikan wadah kegiatan berupa senam	Kampung Tegalkemuning DN 2 Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	30	orang	2640000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

709	[03.18] Penyuluhan tentang HIV	Pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	75	orang	4125000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
710	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	128	orang	62371800	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
711	[02.25.MERGANGSAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas ≤ 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda)	pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	1	kegiatan	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
712	[03.22] Sosialisasi lintas sektor dan masyarakat di wilayah terkait update info kesehatan dan program kerja kesehatan dari pemerintah	pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	4	Kegiatan	24480000	-	Operasional Pelayanan Puskesmas
713	[03.22] Sosialisasi lintas sektor dan masyarakat di wilayah terkait update info kesehatan dan program kerja kesehatan dari pemerintah	pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	4	kegaitan	24480000	-	Operasional Pelayanan Puskesmas
714	[03.23] Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang ber KTP Yogyakarta melalui program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD)	Pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kegiatan	-	-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
715	[03.24] Promosi atau sosialisasi tentang jaminan kesehatan	pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	4	kegaitan	24480000	-	Operasional Pelayanan Puskesmas
716	[03.25] Penyuluhan keamanan pangan bagi industri rumah tangga pangan	pencegahan sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	kegiatan	37000000	-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
717	[03.26] Penyuluhan Keamanan Pangan Siap Saji bagi usaha jasa boga, restoran, rumah makan, kantin, Depot Air Minum (DAM), dan tempat pengelolaan pangan tertentu	Pencegahan Sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	kegiatan	7568000	-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
718	[03.26] Penyuluhan Keamanan Pangan Siap Saji bagi usaha jasa boga, restoran, rumah makan, kantin, Depot Air Minum (DAM), dan tempat pengelolaan pangan tertentu	Pencegahan Sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kegiatan	7568000	-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

719	[01.02.GONDOKUSUMAN] Senam Lansia di wilayah	Perlunya Lansia di Kampung diberikan wadah kegiatan berupa senam	Kampung Gendeng Kelurahan Baciro Kemantren Gondokusuman Kota yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	30	orang	2120000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
720	[03.27] Jaminan Kesehatan Khusus (JAMKESUS) Terpadu Khusus Penyandang Disabilitas Tidak Mampu KTP Kota Yogyakarta	Pencegahan Sakit	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	kegiatan	-	-	Penyediaan Alat Bantu
721	[05.03] Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	bantuan sosial, ada yang membutuhkan	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Kegiatan	-	-	Penyediaan Alat Bantu
722	[04.01] Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Bantuan Sosial	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	Bulan	300000	-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
723	[04.02] Sunatan Massal Tingkat Kota	BANTUAN SOSIAL	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	orang	85350000	-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
724	[05.01] Pemberian Motivasi bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Bantuan sosial	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	orang	28900000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
725	[05.02] Pemberian Motivasi bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	orang	32725000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
726	[06.01] Pelatihan Manajemen Event Organizer tingkat kota	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	88000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
727	[01.17.DANUREJAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah	Kampung Tukangan dikenal memiliki banyak upacara adat yang harapannya bisa dilestarikan dengan adanya kegiatan penyelnggaraan upacara adat budaya di wilayah	Kampung Tukangan Kelurahan Tegalpanggung Kemantren danurejan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	1	Kegiatan	25000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
728	[01.20.DANUREJAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event	Karang Taruna Kemantren Danurejan barusaja terbentuk setelah lama mati suri, maka perlu adanya pembinaan kepemudaan dalam hal ini untuk Karang taruna kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	1	kegiatan	5560000	-	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
729	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
730	[06.03] Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	63200000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

731	[06.04] Pelatihan Barista tingkat kota	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	154000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
732	[02.03.DANUREJAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Kampung Tegalkemuning memiliki 3 Pos ronda di masing-masing RW 08, 09, 10 yang masih dirasa kurang nyaman dan kurang layak utk melaksnakan kegiatan ronda	Kampung tegalkemuning Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	3	unit	11250000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
733	[06.05] Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	94600000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
734	[06.06] Pelatihan Menjahit Dasar tingkat kota	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	99000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
735	[06.07] Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	44000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
736	[06.08] Pelatihan Satpam tingkat kota	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	88000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
737	[06.09] Padat Karya Infrastruktur	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Kegiatan	330000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
738	[06.10] Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Kegiatan	44000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
739	[06.11] Pelatihan Menjahit Terampil tingkat kota	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	99000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
740	[06.12] Pelatihan Housekeeping tingkat kota	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	88000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
741	[06.13] Pelatihan Otomotif Mobil tingkat kota	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah Wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	88000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
742	[06.15] Pemberian Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	orang	28900000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
743	[07.01] Soisalisasi JPD	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	10	kali	100000000	-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

744	[07.02] Pelatihan Berjenjang Pendidik PAUD Tingkat Mahir	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	40	orang	28744000	-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
745	[01.11.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Kelurahan Kotabaru yang digadang-gadang menjadi cikal bakal malioboro kedua perlu diberikan pelatihan kepariwisataan	Kelurahan Kotabaru Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	50	orang	5000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
746	[07.02] Pelatihan Berjenjang Pendidik PAUD Tingkat Mahir	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandar, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	40	orang	28744000	-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
747	[24.08] Pengadaan dan Pemeliharaan Marka Jalan Perkotaan	banyaknya anak kecil di wilayah dan kendaraan yang berlalu lalang. adanya polisi tidur supaya pengendara bisa pelan-pelan dalam berkendara.	notoprajan rw 3, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	1	titik	5600000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
748	[07.03] Honor pengajar PAUD Bersetifikat Diklat Pendidik PAUD Tingkat Dasar	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	Orang/bulan	275000	-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
749	[02.28.DANUREJAN] Peningkatan kapasitas anggota Forum Bank Sampah	Perlu adanya peningkatan kapasitas anggota forum bank Sampah di wilayah	Kampung Tukangan Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	50	orang	5000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
750	[07.04] Honor pengajar PAUD Bersetifikat Diklat Pendidik PAUD Tingkat Lanjut	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	Orang/bulan	325000	-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
751	[07.05] Honor pengajar PAUD Berijasah S1 PAUD/Psikologi atau Bersertifikat Diklat Pendidik PAUD Tingkat Mahir	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	Orang/bulan	375000	-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
752	[07.06] Honor pengajar PAUD Bersertifikat Bimtek Kompetensi Pedagogik Pendidik PAUD	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	Orang/bulan	225000	-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
753	[08.01] Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	45	kelurahan	59145000	-	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
754	[09.01] Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (KB)	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	Kali	4176000	-	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
755	[09.02] Penguatan Kapasitas Pengelola Rumah Data Kependudukan	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Kali	2490000	-	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain

756	[09.03] Monev Rumah DataKu	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Kali	460000	-	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
757	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	MASIH MINIMNYA PENGETAHUAN IBU-IBU TENTANG TATA CARA PEMBUATAN MAKANAN YANG LAYAK JUAL SEBAGAI USAHA UNTUK MEMBANTU PEREKONOMIAN KELUARGA	NITIKAN SOROSUTAN RT 50/13 (TUTIK - 08551000185), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	20	ORANG	56000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
758	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	MASIH MINIMNYA PENGETAHUAN PEMUDA TENTANG TATA CARA PEMBUATAN BUCKET BUNGA /SNACK	NITIKAN UH 6/260 RT 52 RW 13 (KHALISA NUR SHADRINA - 087738846495), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	20	ORANG	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
759	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	MASIH MINIMNYA PENGETAHUAN IBU-IBU TENTANG TATA CARA PEMBUATAN MAKANAN YANG LAYAK JUAL SEBAGAI USAHA UNTUK MEMBANTU PEREKONOMIAN KELUARGA	NITIKAN RT 52 RW 13 (SITI MUSLIKHAH - 0817460765), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	20	ORANG	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
760	[09.08] Pendampingan Kemantren Layak Anak (Kelana)	Keterampilan manajemen hidup	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Kali	4380000	-	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
761	[02.08.UMBULHARJO] Pemeliharaan SAH di wilayah	MASIH ADANYA SALURAN AIR HUJAN YANG TIDAK TERTUTUP SEHINGGA CUKUP MEMBAHAYAKAN SAAT MUSIM HUJAN TIBA	DAGARAN RT 26 RW 7 SOROSUTAN (MUDALONO - 085150722296), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	200	METER	25000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
762	[02.03.UMBULHARJO] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	POS RONDA YG DIPAKAI SELAMA INI UNTUK KEGIATAN SISKAMLING DINILAI KURANG LAYAK DAN BUTUH PERBAIKAN	NALEN UH 6/192 RT 36 RW 15 (ZAENAL MUSTOFA - 081229775618), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	UNIT	3750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
763	[02.03.UMBULHARJO] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	POS RONDA YG DIPAKAI SELAMA INI UNTUK KEGIATAN SISKAMLING DINILAI KURANG LAYAK DAN BUTUH PERBAIKAN	JL. SOROSUTAN GG. GARUDA 899B (SIGIT SUDIBYO - 081802655405), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	UNIT	3750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
764	[01.18.KOTAGEDE] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	BELUM ADANYA SERAGAM ATAU KOSTUM UNTUK GRUP KESENIAN DI WILAYAH	GEDONG KUNING RT 05/02 (IRA - 089574288395), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	12	set	6000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
765	[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	PENYELENGGARAAN EVENT ADAT DI KAMPUNG SELAMA INI MEMBUTUHKAN SUPPORT DANA YANG CUKUP BESAR	GEDONG KUNING RT 05/02 (IRA - 089574288395), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	KAMPUNG	5000000	-	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
766	[02.26.NGAMPILAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan dan signage lainnya)	untuk bisa memberikan tanda wilayah atau sebagai icon kampung	rw 4 notoprajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Ngampilan	Kemantren Ngampilan	2	buah	113000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
767	[02.01.KOTAGEDE] Peningkatan dan perbaikan Jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	JALAN RUSAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN	GEDONG KUNING RT 04/01 (YOSSI - 08562977966), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	78	m2	28899000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
768	[02.08.KOTAGEDE] Pemeliharaan SAH di wilayah	SALURAN AIR HUJAN YG ADA SUDAH MENGALAMI PENDANGKALAN	REJOWINANGUN RT 19/06 (ISTARI - 085848131944), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	300	METER	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
769	[01.02.MANTRIJERON] Senam Lansia di wilayah	Keterampilan manajemen hidup	Talud sungai winongo di Rt 12 Rw 02 Suryowijayan , Gedongkiwo , Mantrijeron08122726415wibowo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	Kegiatan	4562000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
770	[02.21.KOTAGEDE] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	KURANGNYA FASILITAS BIN SAMPAH PADA FASUM	GEDONGKUNING RT 10/03 (MUDAKIR - 081802669780), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	5	PAKET	7500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
771	[01.06.MANTRIJERON] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah	Keterampilan manajemen hidup	Rt 12 Rw 02 Suryowijayan , Gedongkiwo , Mantrijeron 08122726415 wibowo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	Kegiatan	5986000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
772	[02.27.NGAMPILAN] Pemeliharaan Balai RT/RW/Kampung	ada beberapa kontruksi yang sudah rusak dan harus di perbaiki	rw 4 notoprajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Ngampilan	Kemantren Ngampilan	1	paket	20000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

773	[06.14] Pelatihan Desain Grafis tingkat kota	BANYAKNYA PEMUDA YANG KURANG MENGUASAI DESAIN GRAFIS	GEDONGKUNING RT 10/03 (FAJAR SIDIK - 087839604863), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18	orang	49500000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
774	[02.02.NGAMPILAN] Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	pembangunan MCK untuk warga karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki MCK sendiri	rw 4 notoprajan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Ngampilan	Kemantren Ngampilan	1	paket	15000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
775	[02.08.DANUREJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	MASIH ADANYA SALURAN AIR HUJAN YANG TIDAK TERTUTUP SEHINGGA CUKUP MEMBAHAYAKAN SAAT MUSIM HUJAN TIBA	GEDONGKUNING RT 11/04 (SUWARDI - 081215286462), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Kotagede	250	METER	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
776	[01.09.MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Keterampilan manajemen hidup	Rt 12 Rw 02 Suryowijayan , Gedongkiwo , Mantrijeron08122726415wibowo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	Kegiatan	5130000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
777	[02.21.KOTAGEDE] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	KURANGNYA FASILITAS BIN SAMPAH PADA FASUM	GEDONGKUNING rt 10/03 (VATARA FIRZA - 0895363167820), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	3	PAKET	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
778	[18.02] Bank Buku	KURANGNYA MINAT BACA MASYARAKAT YANG DISEBABKAN MINIMNYA BUKU YANG TERSEDIA	GEDONGKUNING rt 10/03 (VATARA FIRZA - 0895363167820), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	KAMPUNG	-	-	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
779	[02.03.MANTRIJERON] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	pos ronda rusak	Rt 12 Rw 02 Suryowijayan , Gedongkiwo , Mantrijeron08122726415wibowo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	unit	27750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
780	[01.14.UMBULHARJO] Pelatihan Kerajinan di wilayah	WARGA KURANG ILMU PENGETAHUAN TENTANG BATIK ECOPRINT	BALIREJO RT 26 RW 08 (SRI ROSTAMTI - '081328434393), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	20	ORANG	10000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
781	[01.17.UMBULHARJO] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah	KURANGNYA SEMANGAT BELAJAR ANAK-ANAK JIKA TIDAK ADA PENGAJARNYA/PEMBIMBINGNYA	BALIREJO RT 16 RW 05 MUJA MUJU (SUGIYARTI - 082133958644), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	10	OH	30240000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
782	[02.24.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	TIDAK PUNYA TIMBANGAN UNTUK MENIMBANG SAMPAH YG ADA	NITIKAN RT 48 RW 12 SOROSUTAN (ATIK - 085878259220), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	2	BUAH	3500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
783	[07.02] Pelatihan Berjenjang Pendidik PAUD Tingkat Mahir	MASIH MINIMNYA PENGETAHUAN PENDIDIKAN BAGI ANAK	NITIKAN RT 48 RW 12 SOROSUTAN (ATIK - 085878259220), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	40	Orang	28744000	-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
784	[01.14.UMBULHARJO] Pelatihan Kerajinan di wilayah	TIDAK ADANYA PENGETAHUAN TENTANG BATIK ECOPRINT	NITIKAN RT 48 RW 12 SOROSUTAN (SARTINI - 082325055044), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	20	ORANG	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
785	[06.06] Pelatihan Menjahit Dasar tingkat kota	BELUM ADANYA PENGETAHUAN MENDASAR MENGENAI MENJAHIT YG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBANTU PEREKOMIAN KELUARGA	NITIKAN RT 48 RW 12 SOROSUTAN (SARTINI - 082325055044), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	99000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
786	[07.02] Pelatihan Berjenjang Pendidik PAUD Tingkat Mahir	MASIH MINIMNYA PENGETAHUAN PENDIDIKAN BAGI ANAK	NITIKAN RT 46 RW 12 SOROSUTAN (TRI UTAMI - 0817466333), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	40	ORANG	28744000	-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
787	[02.10.MANTRIJERON] Cermin Tikungan di wilayah	keamanaan transportasi	Rt 12 Rw 02 Suryowijayan , Gedongkiwo , Mantrijeron08122726415wibowo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	3	unit	41250000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
788	[02.24.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	TIDAK PUNYA TIMBANGAN UNTUK MENIMBANG SAMPAH YG ADA	NITIKAN RT 46 RW 12 SOROSUTAN (TRI UTAMI - 0817466333), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	2	UNIT	3500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
789	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	MINIMNYA TONG SAMPAH UNTUK MEMILAH SAMPAH DI WILAYAH	NITIKAN RT 46 RW 12 SOROSUTAN (TRI UTAMI - 0817466333), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	18	UNIT	135000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
790	[02.01.UMBULHARJO] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	JALAN RUSAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN	NITIKAN RT 57 RW 13 SOROSUTAN (FITRI - 085228583877), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	300	METER	55000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

791	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	DEBIT AIR YANG BERLEBIH JIKA HUJAN TURUN	NITIKAN RT 57 RW 13 SOROSUTAN (FITRI - 085228583877), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	400	METER	2400000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
792	[02.12.MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di wilayah	Perlu pembuatan komposter komunal	Rt 12 Rw 02 Suryowijayan , Gedongkiwo , Mantrijeron 08122726415 wibowo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	kegiatan	38100000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
793	[02.01.UMBULHARJO] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Paving Blok di RT 01 RW 01 Sorosutan dengan Keluasan 240 m2	Sepanjang Jalan RT 01 RW 01 Sorosutan Umbulharjo CP 087715307626 (Yoyok) , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	240	m2	88000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
794	[02.13.MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	sisa dapur banyak	Rt 12 Rw 02 Suryowijayan , Gedongkiwo , Mantrijeron08122726415wibowo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	buah	18970000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
795	[02.10.UMBULHARJO] Cermin Tikungan di wilayah	ADANYA BEBERAPA TITIK PERSIMPANGAN JALAN KAMPUNG YANG MEMBAHAYAKAN PENGGUNA	NITIKAN RT 57 RW 13 SOROSUTAN (FITRI - 085228583877), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	6	UNIT	27500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
796	[02.26.MANTRIJERON] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan dan signage lainnya)	perlu papan nama jalan	Rt 12 Rw 02 Suryowijayan , Gedongkiwo , Mantrijeron08122726415wibowo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	6	unit	8550000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
797	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	MASIH MINIMNYA PENGETAHUAN IBU-IBU TENTANG TATA CARA PEMBUATAN MAKANAN YANG LAYAK JUAL SEBAGAI USAHA UNTUK MEMBANTU PEREKONOMIAN KELUARGA	NITIKAN RT 57 RW 13 SOROSUTAN (FITRI - 085228583877), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	20	ORANG	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
798	[02.28.MANTRIJERON] Peningkatan kapasitas anggota Forum Bank Sampah	peningkatan kapasitas anggota bank sampah	Rt 12 Rw 02 Suryowijayan , Gedongkiwo , Mantrijeron 08122726415 wibowo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	2	Kegiatan	1380000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
799	[03.21] Pemeriksaan Kualitas Air	Pencegahan sakit	Rt 12 Rw 02 Suryowijayan , Gedongkiwo , Mantrijeron08122726415wibowo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	20	Lokasi	2000000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
800	[03.11] Skrining Kesehatan untuk Lansia dan Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	Pencegahan sakit	Rt 12 Rw 02 Suryowijayan , Gedongkiwo , Mantrijeron08122726415wibowo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	55	RW	13750000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
801	[03.09] Pelatihan kader Posbindu	Pencegahan sakit	Rt 12 Rw 02 Suryowijayan , Gedongkiwo , Mantrijeron08122726415wibowo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12	Kegiatan	42960000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
802	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	Pencegahan sakit	Rt 12 Rw 02 Suryowijayan , Gedongkiwo , Mantrijeron 08122726415 wibowo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	245	Balita	121275000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
803	[03.02] Peningkatan kapasitas kader dalam kompetensi klaster 2 untuk posyandu meliputi ibu dan anak sesuai transformasi layanan primer	Pencegahan sakit	Rt 12 Rw 02 Suryowijayan , Gedongkiwo , Mantrijeron08122726415wibowo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12	Kegiatan	42960000	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
804	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	MASIH MINIMNYA PENGETAHUAN IBU-IBU TENTANG TATA CARA PEMBUATAN MAKANAN YANG LAYAK JUAL SEBAGAI USAHA UNTUK MEMBANTU PEREKONOMIAN KELUARGA	NITIKAN RT 48 RW 12 SOROSUTAN (HERMI KUSHAYATI - 0895368299229), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	20	ORANG	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
805	[02.11.KOTAGEDE] Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Posyandu	TIDAK ADANYA RAK UNTUK MENYIMPAN BERKAS	GEDONGKUNING RT 09 RW 03 REJOWINANGUN (ETTY - 085326647896), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	3	UNIT	1600000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
806	[02.01.KOTAGEDE] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Pembangunan Paving Blok di Gang Kenanga 1 Dan 2 RT 46 RW 05 dengan luasa 400 m2 Rejowinangun Kotagede	Gang Kenanga 1 dan 2 RT 46 RW 05 Rejowinangun Kotagede CP 081328816631 (Pak Sajad) , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	400	m2	135973500	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
807	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	MAHALNYA HARGA SAYUR SEHINGGA KEMANDIRIAN PERLU DIADAKAN	REJOWINANGUN RT 18 RW 06 REJOWINANGUN (SITI ERIMAWATI - 087845665868), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1	LOKASI	1329000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
808	[07.03] Honor pengajar PAUD Bersetifikat Diklat Pendidik PAUD Tingkat Dasar	peningkatan kesejahteraan	Rt 12 Rw 02 Suryowijayan , Gedongkiwo , Mantrijeron08122726415wibowo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	Orang/bulan	275000	-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

809	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	RTLH	Ngadisuryan KT I/215 RT 1 RW 1 Patehan, Kraton083154542228Krisdianto, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
810	[02.21.KOTAGEDE] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	MINIMNYA TONG SAMPAH UNTUK MEMILAH SAMPAH DI WILAYAH	REJOWINANGUN RT 18 RW 06 REJOWINANGUN (SITI ERIMAWATI - 087845665868), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	20	UNIT	7500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
811	[01.12.MANTRIJERON] Pelatihan Boga di wilayah	keterampilan hidup	RT 10/02 Suryowijayan 081227663377 Wandiyo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	Kegiatan	5970000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
812	[02.08.KOTAGEDE] Pemeliharaan SAH di wilayah	SALURAN AIR HUJAN YANG ADA SUDAH MENGALAMI PENDANGKALAN	REJOWINANGUN RT 23 RW 07, Gg. ANDINI (KETUA RT - 081578704681), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	200	METER	5700000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
813	[02.04.MANTRIJERON] Pemeliharaan CCTV di wilayah	bahaya kejahatan, rawan kejahatan	RT 10/02 Suryowijayan 081227663377 Wandiyo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	Paket	147400000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
814	[01.14.KOTAGEDE] Pelatihan Kerajinan di wilayah	TIDAK ADANYA PENGETAHUAN TENTANG BATIK ECOPRINT	REJOWINANGUN RT 22 RW 07 (SUTRISNO - 081227727077), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	20	ORANG	10000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
815	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	MASIH MINIMNYA PENGETAHUAN TENTANG TATA CARA PEMBUATAN MAKANAN (BAKPIA) YANG LAYAK JUAL SEBAGAI USAHA UNTUK MEMBANTU PEREKONOMIAN KELUARGA	REJOWINANGUN RT 22 RW 07 (SUTRISNO - 081227727077), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	20	ORANG	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
816	[02.08.KOTAGEDE] Pemeliharaan SAH di wilayah	SALURAN AIR HUJAN YANG ADA SUDAH MENGALAMI PENDANGKALAN	REJOWINANGUN RT 22 RW 07, Gg. DWI PANGGA (WAWAN - 082135771135), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	300	METER	5700000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
817	[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Peningkatan kapasitas masyarakat	RT 10/02 Suryowijayan 081227663377 Wandiyo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100	Orang	1100000	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
818	[02.08.KOTAGEDE] Pemeliharaan SAH di wilayah	SALURAN AIR HUJAN YANG ADA SUDAH MENGALAMI PENDANGKALAN	REJOWINANGUN RT 22 RW 07, Gg. TURANGGA (WAWAN - 082135771135), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	300	METER	5700000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
819	[02.08.KOTAGEDE] Pemeliharaan SAH di wilayah	SALURAN AIR HUJAN YANG ADA SUDAH MENGALAMI PENDANGKALAN	REJOWINANGUN RT 22 RW 07, JLN. NOGOBONDO (WAWAN - 082135771135), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	300	METER	5700000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
820	[01.02.MANTRIJERON] Senam Lansia di wilayah	Pencegahan sakit	RW 01 Suryowijayan Kel. Gedongkiwo Mantrijeron Yogyakarta +62895631973750 Drs. Tulus Widodo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	Kegiatan	4712000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
821	[01.09.MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	keterampilan hidup	RW 01 Suryowijayan Kel. Gedongkiwo Mantrijeron Yogyakarta +62895631973750 Drs. Tulus Widodo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	Kegiatan	5130000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
822	[02.11.KOTAGEDE] Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Posyandu	MINIMNYA ALAT PERAGA YG DIMILIKI	REJOWINANGUN RT 22 RW 07, JLN. NOGOBONDO (WAWAN - 082135771135), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	3	UNIT	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
823	[01.10.MANTRIJERON] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	keterampilan hidup	RW 01 Suryowijayan Kel. Gedongkiwo Mantrijeron Yogyakarta +62895631973750 Drs. Tulus Widodo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	Kegiatan	91660000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
824	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	DEBIT AIR YANG BERLEBIH JIKA HUJAN TURUN	REJOWINANGUN RT 20 RW 06 (EKO - 08122779400), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	200	METER	1200000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
825	[02.01.KOTAGEDE] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	JALAN RUSAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN	REJOWINANGUN RT 20 RW 06 (EKO - 08122779400), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	168	m2	62244000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
826	[01.02.MERGANGSAN] Senam Lansia di wilayah	keterampilan hidup	Surokarsan MG II RW 07 Wirogunan Mergangsan 08195573639Nur Fauziah Ali , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	1	Kegiatan	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

827	[02.10.KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah	ADANYA BEBERAPA TITIK PERSIMPANGAN JALAN KAMPUNG YANG MEMBAHAYAKAN PENGGUNA	REJOWINANGUN RT 20 RW 06 (EKO - 08122779400), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	4	titik	11000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
828	[01.12.MERGANGSAN] Pelatihan Boga di wilayah	keterampilan hidup	Surokarsan MG II RW 07 Wirogunan Mergangsan 08195573639Nur Fauziah Ali , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	1	Kegiatan	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
829	[02.26.KOTAGEDE] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan dan signage lainnya)	TIDAK ADANYA GAPURA IDENTITAS KAMPUNG	REJOWINANGUN RT 20 RW 06 (EKO - 08122779400), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	1	UNIT	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
830	[01.20.MERGANGSAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event	keterampilan hidup	Surokarsan MG II RW 07 Wirogunan Mergangsan 08195573639Nur Fauziah Ali , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	1	Kegiatan	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
831	[02.03.MERGANGSAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	pos ronda rusak	Surokarsan MG II RW 07 Wirogunan Mergangsan 08195573639Nur Fauziah Ali , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	3	unit	38250000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
832	[02.24.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	TIDAK PUNYA TIMBANGAN UNTUK MENIMBANG SAMPAH YG ADA	NITIKAN RT 46 RW 12 SOROSUTAN (HANDAYANI - 0895366115794), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	2	BUAH	3500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
833	[02.15.KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Keranjang Takakura di wilayah	TIDAK ADANYA TEMPAT UNTUK MEMBUAT KOMPOS	REJOSASI RT 18 RW 06 REJOWINANGUN (SITI MURNIYATI - 085643956882), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	2	BUAH	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
834	[02.11.KOTAGEDE] Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Posyandu	TIDAK ADANYA RAK UNTUK MENYIMPAN BERKAS	GEDONGKUNING RT 10 RW 03 REJOWINANGUN (TITIK MURNIASIH - 085328893022), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	3	UNIT	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
835	[02.19.MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan.	Tidak tersedianya gerobak sampah yang bisa meng akomodir kebutuhan pengelolaan sampah di wilayah RW 16 Suryodiningratan, Mantrijeron. Hal ini dikarenakan gerobak yang dimilikisudah rusak dan perlu pengadaan baru agar warga bisa secara maksimal mengelola sampah di wilayah.	Minggiran MJ II/1438 RT 58 RW 16 Suryodiningratan, Mantrijeron CP : 081226886390 (Saptono), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	2	unit	4000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
836	[01.12.MANTRIJERON] Pelatihan Boga di wilayah	Butuh pelatihan boga	Suryowijayan Mj 1 / 44 ,rt 03 rw 01 Gedongkiwo,Mantrijeron Kota Yk, 081327660560 , Naning Cahyati, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	1	Kegiatan	5970000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
837	[02.10.MANTRIJERON] Cermin Tikungan di wilayah	BUTUH KEMANAAN TRANSPORTASI	Suryowijayan Mj 1 / 44 ,rt 03 rw 01 Gedongkiwo,Mantrijeron Kota Yk, 081327660560 , Naning Cahyati, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	15	Unit	41250000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
838	[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	butuh fasilitasi	Suryowijayan Mj 1 / 44 ,rt 03 rw 01 Gedongkiwo,Mantrijeron Kota Yk, 081327660560 , Naning Cahyati, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100	Orang	1100000	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
839	[02.01.MANTRIJERON] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	kondisi jalan rusak dan berlubang membahayakan masyarakat dan pengguna jalan	Jalan Minggiran RT 58 RW 16, Minggiran MJ II, Suryodiningratan, Mantrijeron CP :081226886390 (Saptono), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	420	meter	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
840	[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	butuh fasilitasi	Suryowijayan Mj 1 / 44 ,rt 03 rw 01 Gedongkiwo,Mantrijeron Kota Yk, 081327660560 , Naning Cahyati, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1	kegiatan	-	Non Belanja Transfer	-

841	[07.08] Jam Belajar Masyarakat	butuh jam belajar masyarakat	Suryowijayan Mj 1 / 44 ,rt 03 rw 01 Gedongkiwo,Mantrijeron Kota Yk, 081327660560 , Naning Cahyati, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	Orang/bulan	300000	-	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
842	[09.06] Penguatan Kampung Ramah Anak (KRA)	perlu dikuatkan KRA	Suryowijayan Mj 1 / 44 ,rt 03 rw 01 Gedongkiwo,Mantrijeron Kota Yk, 081327660560 , Naning Cahyati, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Kali	3880000	-	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
843	[02.01.MANTRIJERON] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Kondisi Jalan dalam gang kampung yang sudah rusak memerlukan pembaharuan konblok paving untuk menunjang mobilitas warga.	RT 62 RW 16 Minggiran, Kampung Minggiran, Kalurahan Suryodiningratan, Mantrijeron CP : 081226886390 (Saptono), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	140	meter	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
844	[18.01] Pembinaan Pengelolaan Kampung Baca	perlu dibina	Suryowijayan Mj 1 / 44 ,rt 03 rw 01 Gedongkiwo,Mantrijeron Kota Yk, 081327660560 , Naning Cahyati, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	kegiatan	-	-	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
845	[02.27.DANUREJAN] Pemeliharaan Balai RT/RW/Kampung	Kondisi balai sering terjadi kebocoran disaat turun hujan dan cat dinding banyak memudar dikarenakan rembesan air	Jl. Ronodigdayan, Bausasran RW 06, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	1	Paket	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
846	[02.11.MERGANGSAN] Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Posyandu	Perlu adanya paud dan posyandu	Surokarsan MG II RW 07 Wirogunan Mergangsan 08195573639 Nur Fauziah Ali , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	2	unit	2500000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
847	[02.17.MERGANGSAN] Pengolahan Sampah Organik : Losida (Lodong Sisa Dapur) di wilayah	Banyak sisa dapur organik	Surokarsan MG II RW 07 Wirogunan Mergangsan 08195573639Nur Fauziah Ali , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	12	set	2000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
848	[02.19.MERGANGSAN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan.	transportasi sampah	Surokarsan MG II RW 07 Wirogunan Mergangsan 08195573639Nur Fauziah Ali , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	2	Unit	7000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
849	[02.19.MERGANGSAN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan.	banyak samapah organik	Surokarsan MG II RW 07 Wirogunan Mergangsan 08195573639Nur Fauziah Ali , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	2	unit	7000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
850	[02.21.MERGANGSAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	banyak sampah	Surokarsan MG II RW 07 Wirogunan Mergangsan 08195573639Nur Fauziah Ali , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	10	Paket	35000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
851	[02.23.MERGANGSAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Komposter	sampah organik banyak	Surokarsan MG II RW 07 Wirogunan Mergangsan 08195573639Nur Fauziah Ali , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	10	Buah	3000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
852	[02.27.MERGANGSAN] Pemeliharaan Balai RT/RW/Kampung	Balai RW perlu perbaikan	Surokarsan MG II RW 07 Wirogunan Mergangsan 08195573639Nur Fauziah Ali , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	2	Paket	20000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
853	[01.14.MANTRIJERON] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan ecoprint.	RW 10 Suryodiningratan, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Agustinus Supardjijo ; 089506589279, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	25	0rang	9750000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

854	[06.08] Pelatihan Satpam tingkat kota	keterampilan hidup	Surokarsan MG II RW 07 Wirogunan Mergangsan 08195573639Nur Fauziah Ali , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	88000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
855	[06.03] Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Surokarsan MG II RW 07 Wirogunan Mergangsan 08195573639Nur Fauziah Ali	Surokarsan MG II RW 07 Wirogunan Mergangsan 08195573639Nur Fauziah Ali , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	63200000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
856	[06.14] Pelatihan Desain Grafis tingkat kota	keterampilan hidup	Surokarsan MG II RW 07 Wirogunan Mergangsan 08195573639Nur Fauziah Ali , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18	orang	49500000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
857	[01.13.MANTRIJERON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	banyak lansia	Suryodiningratan mj2 kel Suryodiningratan kec Mantrijeron Kota Yogyakarta 083866588883Farida Aryani , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	25	orang	8000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
858	[02.15.MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Keranjang Takakura di wilayah	Banyak oragnik dari rumah	Suryodiningratan mj2 kel Suryodiningratan kec Mantrijeron Kota Yogyakarta 083866588883Farida Aryani , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	100	Paket	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
859	[02.16.MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Ember Tumpuk di wilayah	Banyak oragnik dari rumah	Suryodiningratan mj2 kel Suryodiningratan kec Mantrijeron Kota Yogyakarta 083866588883Farida Aryani , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	100	Buah	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
860	[02.05.MANTRIJERON] Pembangunan sumur resapan air hujan di wilayah	Pengadaan sumur peresapan air hujan.	RW 10 Suryodiningratan, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Agustinus Supardjijo ; 089506589279., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	3	Titik	9000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
861	[02.17.MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Losida (Lodong Sisa Dapur) di wilayah	Banyak oragnik dari rumah	Suryodiningratan mj2 kel Suryodiningratan kec Mantrijeron Kota Yogyakarta 083866588883Farida Aryani , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	100	set	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
862	[02.19.MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan.	banyak sampah organik	Suryodiningratan mj2 kel Suryodiningratan kec Mantrijeron Kota Yogyakarta 083866588883Farida Aryani , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	2	unit	4000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
863	[02.22.MANTRIJERON] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah: Pengadaan Tas Pilah	banyak sampah tercampur	Suryodiningratan mj2 kel Suryodiningratan kec Mantrijeron Kota Yogyakarta 083866588883Farida Aryani , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	40	set	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
864	[03.20] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Ibu Hamil Resiko Kurang Energi Kronis (KEK) dan Ibu Hamil KEK	Pencegahan sakit	Suryodiningratan mj2 kel Suryodiningratan kec Mantrijeron Kota Yogyakarta 083866588883Farida Aryani , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	10	Bumil	25800000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
865	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	Pencegahan sakit	Suryodiningratan mj2 kel Suryodiningratan kec Mantrijeron Kota Yogyakarta 083866588883Farida Aryani , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	245	Balita	121275000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
866	[03.21] Pemeriksaan Kualitas Air	Pencegahan sakit	Suryodiningratan mj2 kel Suryodiningratan kec Mantrijeron Kota Yogyakarta 083866588883Farida Aryani , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	20	Lokasi	2000000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

867	[02.12.MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di wilayah	Pelatihan pengolahan sampah organik dan pengadaan peralatan dan perlengkapannya.	RW 10 Suryodiningratan, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Agustinus Supardjijo ; 089506589279., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	25	0rang	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
868	[06.03] Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	keterampilan hidup	Suryodiningratan mj2 kel Suryodiningratan kec Mantrijeron Kota Yogyakarta 083866588883Farida Aryani , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	63200000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
869	[06.07] Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	keterampilan hidup	Suryodiningratan mj2 kel Suryodiningratan kec Mantrijeron Kota Yogyakarta 083866588883Farida Aryani , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	44000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
870	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	pemanfaatan lahan untuk pengembangan Kampung sayur	RW 04, Kalurahan Kadipaten, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1	lokasi	1329000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
871	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Normalisasi sumur peresapan air hujan.	RW 10 Suryodiningratan, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Agustinus Supardjijo ; 089506589279., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	12	Titik	100000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
872	[02.02.KRATON] Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	untuk kesahatan warga	RW 04, Kalurahan Kadipaten, Kemantren Kraton, kontak Bapak Warsito, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	1	unit	25000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
873	[02.04.MANTRIJERON] Pemeliharaan CCTV di wilayah	Perlunya penambahan CCTV untuk keamanan.	RW 10 Suryodiningratan, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Raditya Gupala ; 085236144882., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	10	Titik	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
874	[01.13.KRATON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	pemanfaatan lahan	RW 3 Kalurahan Kadipaten, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	20	orang	6550000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
875	[17.07] Bimbingan Teknis Olahan Produk Perikanan	menambah Masyarakat Gemar makan ikan	RW 02 Kalurahan Kadipaten, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	20	0rang	350000	-	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
876	[02.01.MANTRIJERON] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	perbaikan atau pergantian jalan paving block yang sudah rusak parah (berlubang)	gang parangklithik, jogokariyan RT 41 / RW 11, Mantrijeron kota yogyakarta (pak rizal ketua RT 41 CP : 085602008101), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	150	m2	52500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
877	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	pembuatan penutup selokan karena terdapat lubang di SAH yang menganggu akses jalan	GANG BUSTAN HANI KARANGKAJEN RW 11 RT 42 Kel.Brontokusuman Kec Mergangsan (pak irwan chotami RT 42 cp: 082116189993), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	80	m	200000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
878	[02.01.MANTRIJERON] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Pembangunan Paving Blok	KEL. GEDONGKIWO, KEC. MANTRIJERON, KOTA YOGYAKARTA., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	574	m2	141161724	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
879	[02.01.MANTRIJERON] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	perbaikan paving blok yang sudah banyak kerusakan di gang sido asih	Jogokariyan RT 45 RW 11kel mantrijeron, kec Mantrijeron (pak nur widayat RT 45 CP: +62 812-3396-3627), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	125	m2	43750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
880	[02.26.MANTRIJERON] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan dan signage lainnya)	Pengadaan Papan Nama di Kel.Gedongkiwo	Kel.Gedongkiwo, Kec.Mantrijeron., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	6	Buah	8850000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
881	[02.08.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Kondisi intake drainase dan perkerasan jalan yang tidak menyatu rawan pecah dan ambles	Jl. Srikandi Demagan Kidul RW 04, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	101	m	69000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

882	[02.08.DANUREJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Genangan air seringkali terjadi disaat turun hujan dan menyebabkan banjir diwilayah sekitar	Macanan, RW 06, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	75	Meter	75000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
883	[01.19.DANUREJAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan	Memfasilitas peningkatan terhadap potensi produk UMKM melalui pagelaran budaya untuk meningkatkan ekonomi wilayah sekitar	Lempuyangan RT 17 RW 05, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	2	Paket	91140000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
884	[02.10.DANUREJAN] Cermin Tikungan di wilayah	Memitigasi resiko kecelakaan pada setiap tikungan jalan pada kawasan padat penduduk	Lempuyangan RT 17 RW 05, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	19	unit	52250000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
885	[01.01.GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah	Menjaga Kesehatan lingkungan wilayah sekitar	Danukusuman RT 12 RW 4, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	20	OS	2375000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
886	[02.10.GONDOKUSUMAN] Cermin Tikungan di wilayah	mengantipisasi kecelakaan disetiap tikungan jalan	Danukusuman RT 12 / RW 4, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	5	Titik	13750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
887	[01.15.DANUREJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	warga yang membutuhkan pendampingan ketermapilan meningkatkan potensi UMKM dan pemasaran pada era digital	Lempuyangan RW 05, 06, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	40	Orang	3250000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
888	[02.02.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	Renofasi kamar mandi karena sudah saatnya pemeliharaan	Danukusuman RW 04/RT 14, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	1	Unit	18080000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
889	[24.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran air dari Masjid Mustqiem sampai sungai	Danuksuman RW 04/ RT 15, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	m2	300000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
890	[02.26.WIROBRAJAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan dan signage lainnya)	pemasangan polisi tidur portable	rt 04 rw 01 kelurahan wirobrajan ...malik +62 896-2087-6505 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Dinas Perhubungan	1	titik	5600000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
891	[02.04.NGAMPILAN] Pemeliharaan CCTV di wilayah	pemasangan cctv	ngampilan rt 08 2titik,07 2titik...aan 62 857-9933-4539 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Ngampilan	Kemantren Ngampilan	4	titik	3000000	Non Belanja Transfer	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
892	[02.13.WIROBRAJAN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Pembuatan Kandang Maggot..Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah organik yang bisa memberikan nilai tambah ekonomi	Wilayah RW 03 dan RW 06 patangpuluhan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	2	set	30000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
893	[01.02.DANUREJAN] Senam Lansia di wilayah	Meningkatan kesehatan lansia	Klitren RW 05, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Gondokusuman	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
894	[02.02.WIROBRAJAN] Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	Pemeliharaan Kamar Mandi RTHP	warga kampumg patangpuluhan rw 5, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	1	unit	15000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
895	[02.22.WIROBRAJAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah: Pengadaan Tas Pilah	Pembuatan Keranjang Botol Bekas	Warga kampung Sinduerejan..RT 39 s/d RT 51 (13 RT) , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	13	unit	26000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
896	[02.08.WIROBRAJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Pemeliharaan SAH	Warga kampung Sindurejan rw 08 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	1	unit	2900000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
897	[02.03.WIROBRAJAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	Pemeliharaan Pos Ronda	Warga kampung Sindurejan..RT 49 RW 10 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	1	unit	2910000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
898	[02.10.WIROBRAJAN] Cermin Tikungan di wilayah	Pemasangan Cermin Tikungan	RW 01 s/d Rw 06 warga patangpuluhan , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	15	unit	41250000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
899	[02.06.DANUREJAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	Pembuatan Pagar Besi Makam Duwet	Warga kampung Patangpuluhan rw 03 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Wirobrajan	1	unit	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
900	[02.09.PAKUALAMAN] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	pemkot ambil alih tagihan penerangan gang RT.01 dan 02 saat ini swadaya masyarakat	pemkot ambil alih tagihan penerangan gang RT.01 dan 02 saat ini swadaya masyarakat , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	20	titik	5000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
901	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	1 unit perbaikan rumah(a/n.Bpk.Muhadi,jl.Suryopranoto RT.07 RW.02 Kel.Gunungketur)	1 unit perbaikan rumah(a/n.Bpk.Muhadi,jl.Suryopranoto RT.07 RW.02 Kel.Gunungketur) , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

902	[02.25.DANUREJAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas ≤ 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda)	Pengolahan sampah yang masih belom bisa tertangani dengan baik	Bausasran RW 02, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	3	Unit	39000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
903	[12.02] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Perlu adanya pengembangan kapasitas SDM petugas Linmas	Lempuyangan RT 17, RW 05 - 081952600001 (Arief), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	1	Kali	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
904	[01.12.WIROBRAJAN] Pelatihan Boga di wilayah	pelatihan boga songgobuwono wirobrajan pelatihan memasak dan memanfaatkan peluang usaha mandiri	pelatihan boga songgobuwono wirobrajan yohana sri puji utami 085725955790, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	25	orang	9946500	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
905	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Menjaga kelestarian budaya	Lempuyangan RW 06, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	Kelompok	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
906	[23.05] Perbaikan Saluran Air Limbah	Saluran air limbah yang sudah seharusnya dilakukan pemeliharaan atau perbaikan	Lempuyangan RT 18 RW 05, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	80	m2	88000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
907	[01.14.DANUREJAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan ecoprint untuk meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan kreatifitas masyarakat di wilayah	Klitren RW 08, , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Gondokusuman	20	Orang	12820000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
908	[01.12.WIROBRAJAN] Pelatihan Boga di wilayah	pelatihan memasak	siti badiyah 085640462879 kelompoik boga kuncen hijau kuncen wb 1/214 rt 20 rw 04, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	30	orang	15928150	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
909	[01.09.DANUREJAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Meningkatkan kelestarian budaya wilayah	Lempuyangan Jl Ronodigdayan RT 17, RW 05 - 0819-5260-0001 / Arief, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	20	Orang	39937000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
910	[01.07.DANUREJAN] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran Kognitif di wilayah	Meningkatkan kemampuan belajar anak di wilayah	Lempuyangan RW 04, 05 dan 06 - 0819-5260-0001 / Arief, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	96	OH	3840000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
911	[23.04] Perbaikan IPAL komunal	Ipal bocor sehingga ketika hujan bau kotoran	Tegalmulyo RT 14 RW 03 Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta HP 081238483470, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	unit	28000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
912	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	peningkatan kapasitas skill mengemudi masyarakat sekitar area wisata dalam rangka memperluas kesempatan bekerja di industri pariwisata dan jasa sewa kendaraan	Ngadisuryan KTI/64 RT 07 RW 02 Patehan, Kemantren Kraton CP : 081328296055 Bu Dwi , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
913	[02.11.GEDONGTENGEN] Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Posyandu	Masih ada sarana posyandu dan paud yang masih kurang seperti rak buku, alat peraga edukasi PAUD	Notoyudan GT II RT 89 RW 25, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta 085944639036, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	3	unit	7250000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
914	[06.04] Pelatihan Barista tingkat kota	memperkaya skill pemuda untuk dapat bersaing di dunia kerja	Ngadisuryan KTI/64 RT 07 RW 02 Patehan, Kemantren Kraton CP : 081328296055 (Bu Dwi) , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	154000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
915	[06.07] Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	memperkaya skill pemuda untuk dapat bersaing di dunia kerja	Ngadisuryan KTI/64 RT 07 RW 02 Patehan, Kemantren Kraton 081328296055 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	44000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
916	[06.08] Pelatihan Satpam tingkat kota	memperkaya skill masyarakat untuk dapat bersaing di dunia kerja	Ngadisuryan KTI/64 RT 07 RW 02 Patehan, Kemantren Kraton 081328296055 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	88000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

917	[02.19.MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan.	Perlunya gerobag sampah terpilah.	Kemantren Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Yulius Widyartoro Dewa ; 085225650865., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	4	unit	16000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
918	[07.03] Honor pengajar PAUD Bersetifikat Diklat Pendidik PAUD Tingkat Dasar	penambahan honor untuk pengajar paud di wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup guru PAUD	Ngadisuryan KTI/64 RT 07 RW 02 Patehan, Kemantren Kraton 081328296055 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	Orang/bulan	275000	-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
919	[07.05] Honor pengajar PAUD Berijasah S1 PAUD/Psikologi atau Bersertifikat Diklat Pendidik PAUD Tingkat Mahir	penambahan honor untuk pengajar paud	Ngadisuryan KT I/64 RT 07 RW 02 Patehan, Kemantren Kraton 081328296055 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	Orang/bulan	375000	-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
920	[02.24.GEDONGTENGEN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	belum ada timbangan	Notoyudan GT 2 RT 89 RW 25 Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta 085944639036, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	1	unit	450000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
921	[07.06] Honor pengajar PAUD Bersertifikat Bimtek Kompetensi Pedagogik Pendidik PAUD	sosialisasi honor paud	Ngadisuryan KTI/64 RT 07 RW 02 Patehan, Kemantren Kraton 081328296055 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	Orang/bulan	225000	-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
922	[02.10.JETIS] Cermin Tikungan di wilayah	belum terpasang cermin tikungan	Gondolayu lor RT 54 RW 10 HP 081325677115, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Jetis	Kemantren Jetis	1	unit	2750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
923	[06.08] Pelatihan Satpam tingkat kota	belum punya sertifikat satpam	Perum Sorosutan Indah S-21 RT 63 RW 08 HP 087839993336, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	88000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
924	[02.01.JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	jalan konblok rusak	Gondolayu lor RT 54 RW 10 Jetis, Yogyakarta HP 081325677115, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Jetis	Kemantren Jetis	100	m2	39550000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
925	[07.08] Jam Belajar Masyarakat	sosialisasi jam belajar masyarakat	Ngadisuryan KTI/64 RT 07 RW 02 Patehan, Kemantren Kraton 081328296055 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	150	orang	3450000	-	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
926	[09.01] Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (KB)	kurangnya penguatan tentang penguatan kampung ramah anak	Ngadisuryan KTI/64 RT 07 RW 02 Patehan, Kemantren Kraton 081328296055 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Kali	3880000	-	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
927	[23.05] Perbaikan Saluran Air Limbah	saluran air rusak	Ngadisuryan KTI/64 RT 07 RW 02 Patehan, Kemantren Kraton 081328296055 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	50	m	55000000	-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
928	[02.02.MERGANGSAN] Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	fasilitas perlu perbaikan	Karanganyar RT 66 RW 18 Kelurahan Brontokusuman Kemantren Mergangsan , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	2	unit	20000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
929	[02.03.MERGANGSAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	fasilitas perlu perbaikan	Karanganyar RT66 RW18 Kelurahan Brontokusuman Kemantren Mergangsan 081259571134 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	1	unit	10000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
930	[17.03] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	peningkatan informasi tanaman biofarmaka	KWT LOHJINAWI RW 06 MANGKUYUDAN , KELURAHAN MANTRIJERON, KEMANTREN MANTRIJERON 081225396550 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	30	orang	-	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

931	[02.28.MANTRIJERON] Peningkatan kapasitas anggota Forum Bank Sampah	kurangnya pengetahuan tentang bank sampah	PENDOPO KELURAHAN MANTRIJERON, KELURAHAN MANTRIJERON, KEMANTREN MANTRIJERON 081225396550 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	30	orang	4897000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
932	[02.11.KRATON] Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Posyandu	PENGADAAN APE PELAYANAN ANAK USIA DINI	PAUD HIBER KAMPUNG NGASEM KADIPATEN KMANTREN KRATON 081322289008 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	1	Paket	15025000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
933	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	RUMAH KURANG LAYAK HUNI	IBU SITI MAESAROH RT 49 RW 14 KELURAHAN KADIPATEN KEMANTREN KRATON 081322289008 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	rumah	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
934	[24.05] Pemeliharaan / Perbaikan Trotoar sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	TROTOAR RUSAK SALURAN MAMPET	KAMPUNG PANEMBAHAN KELURAHAN PANEMBAHAN KEMANTREN KRATON RW 11, 12, 13, 14 DAN 18 081329432468 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	350	meter	2500000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
935	[01.12.KRATON] Pelatihan Boga di wilayah	KURANGNYA LITERASI TENTANG PENGOLAHAN PANGAN	LANGENARJAN KIDUL NO 1 RT 01 RW 01 PANEMBAHAN KRATON 55131/081327525718/088215029046 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	30	orang	12541800	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
936	[01.12.TEGALREJO] Pelatihan Boga di wilayah	KURANGNYA LITERASI TENTANG PENGOLAHAN PANGAN	TEGALREJO RT 16 RW 05 TEGAL REJO YOGYAKARTA (08988265033/085772768511 7) , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Tegalrejo	Kemantren Tegalrejo	30	oarng	8075000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
937	[06.06] Pelatihan Menjahit Dasar tingkat kota	KURANGNYA SKILL MENJAHIT MASYARAKAT	GIWANGAN UH 7/8 RT 3 RW 1 GIWANGAN GIWANGAN YOGYAKARTA 085868483231 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	99000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
938	[01.12.MERGANGSAN] Pelatihan Boga di wilayah	KURANGNYA LITERASI TENTANG PENGOLAHAN PANGAN	RW 18 KARANGANYAR BRONTOKUSUMAN MERGANGSAN 081259571134 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	30	orang	20000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
939	[02.03.DANUREJAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	atap pos ronda dimana gentengnya sudah banyakyang bocor dan memerlukan perbaikan atap	Jalan Tegal Lempuyangan RW 02 Lempuyangan Danurejan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	4	m2	12000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
940	[02.08.GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan SAH di wilayah	Macetnya Salurah Air Hujan di wilayah	RW 14 Gendeng Cantel Baciro Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman	150	m	157974000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
941	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 01, RW 01, Kel. Prenggan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 01, RW 01, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	25	Orang	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
942	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 03, RW 01, Kel. Prenggan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 03, RW 01, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

943	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 04, RW 01, Kel. Prenggan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 04, RW 01, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
944	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 05, RW 01, Kel. Prenggan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 05, RW 01, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
945	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 29, RW 06, Kel. Prenggan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 29, RW 06, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
946	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 38, RW 08, Kel. Prenggan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 38, RW 08, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
947	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 47, RW 10, Kel. Prenggan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 47, RW 10, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
948	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 50, RW 11, Kel. Prenggan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 50, RW 11, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
949	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 52, RW 11, Kel. Prengganterdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 52, RW 11, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

950	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 55, RW 11, Kel. Prenggan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 55, RW 11, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
951	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 02, RW 01, Kel. Purbayan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 02, RW 01, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
952	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 03, RW 01, Kel. Purbayan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 03, RW 01, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
953	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 29, RW 07, Kel. Purbayan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 29, RW 07, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
954	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 08, RW 03, Kel. Purbayan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 08, RW 03, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
955	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 11, RW 04, Kel. Purbayan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 11, RW 04, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
956	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 13, RW 05, Kel. Purbayan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 13, RW 05, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

957	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 14, RW 04, Kel. Purbayan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 14, RW 04, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
958	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 21, RW 05, Kel. Purbayan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 21, RW 05, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
959	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 23, RW 06, Kel. Purbayan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 23, RW 06, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
960	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 27, RW 06, Kel. Purbayan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 27, RW 06, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
961	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 18, RW 05, Kel. Purbayan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 18, RW 05, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
962	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 41, RW 10, Kel. Purbayan terdapat Komunitas UMKM Jogja Membumi dikarenakan banyaknya pesanan kue yang bervariasi, maka membutuhkan pelatihan dan pendampingan boga untuk peningkatan pendapatan masyarakat.	RT 41, RW 10, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
963	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 04, RW 01, Kel. Rejowinangun terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 04, RW 01, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	50	Orang	10000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

964	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 11, RW 04, Kel. Rejowinangun terdapat Komunitas UMKM Jogja Membumi dikarenakan banyaknya pesanan kue yang bervariasi, maka membutuhkan pelatihan dan pendampingan boga untuk peningkatan pendapatan masyarakat.	RT 11, RW 04, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
965	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 17, RW 06, Kel. Rejowinangun terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 17, RW 06, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
966	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 20, RW 06, Kel. Rejowinangun terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 20, RW 06, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
967	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 25, RW 08, Kel. Rejowinangun terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 25, RW 08, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
968	[01.12.KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 10, RW 03, Kel. Rejowinangun terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 10, RW 03, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
969	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 02, RW 01, Kel. Sorosutan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 02, RW 01, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

970	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 03, RW 01, Kel. Sorosutan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 03, RW 01, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
971	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 09, RW 03, Kel. Sorosutan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 09, RW 03, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
972	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 15, RW 04, Kel. Sorosutan terdapat Komunitas UMKM Jogja Membumi dikarenakan banyaknya pesanan kue yang bervariasi, maka membutuhkan pelatihan dan pendampingan boga untuk peningkatan pendapatan masyarakat.	RT 15, RW 04, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
973	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 20, RW 06, Kel. Sorosutan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 20, RW 06, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
974	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 25, RW 07, Kel. Sorosutan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 25, RW 07, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
975	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 28, RW 08, Kel. Sorosutan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 28, RW 08, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
976	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 33, RW 09, Kel. Sorosutan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 33, RW 09, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

977	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 40, RW 10, Kel. Sorosutan terdapat Komunitas UMKM Jogja Membumi dikarenakan banyaknya pesanan kue yang bervariasi, maka membutuhkan pelatihan dan pendampingan boga untuk peningkatan pendapatan masyarakat.	RT 40, RW 10, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
978	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 41, RW 11, Kel. Sorosutan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 41, RW 11, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
979	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 44, RW 11, Kel. Sorosutan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 44, RW 11, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	25	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
980	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 47, RW 12, Kel. Sorosutan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 47, RW 12, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
981	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 47, RW 12, Kel. Sorosutan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 70, RW 18, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
982	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 55, RW 14, Kel. Sorosutan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 55, RW 14, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
983	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 61, RW 16, Kel. Sorosutan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 61, RW 16, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

984	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 03, RW 01, Kel. Tahunan terdapat Komunitas UMKM Jogja Membumi dikarenakan banyaknya pesanan kue yang bervariasi, maka membutuhkan pelatihan dan pendampingan boga untuk peningkatan pendapatan masyarakat.	RT 03, RW 01, Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	Orang	13000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
985	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 07, RW 02, Kel. Tahunan terdapat Komunitas terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 07, RW 02, Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	Orang	13000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
986	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 13, RW 03, Kel. Tahunan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 13, RW 03, Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	25	Orang	13000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
987	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 17, RW 04, Kel. Tahunan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 17, RW 04, Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	25	Orang	13000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
988	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 18, RW 04, Kel. Tahunan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 18, RW 04, Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	25	Orang	13000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
989	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 49, RW 05, Kel. Tahunan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 49, RW 05, Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	Orang	13000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
990	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 12, RW 03, Kel. Tahunan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 12, RW 03, Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	25	Orang	13000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

991	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 25, RW 06, Kel. Tahunan terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 25, RW 06, Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	Orang	13000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
992	[01.09.UMBULHARJO] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Di wilayah RT 05, RW 02, Kel. Giwangan, terdapat Kelompok Kebudayaan Ngudi Laras Ponggalan dengan adanya regenerasi anggota yang belum mampu terfasilitasi, maka membutuhkan pelatihan Seni Musik Tradisional Gamelan Untuk meningkatkan kemampuan ke tahap profesional.	RT 15, RW 05, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	25	orang	7920000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
993	[01.09.UMBULHARJO] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Di wilayah RT 41, RW 11, Kel. Sorosutan, terdapat Kelompok Kebudayaan Nadi Budaya dengan adanya regenerasi anggota yang belum mampu terfasilitasi, maka membutuhkan pelatihan Seni Musik Untuk meningkatkan kemampuan ke tahap profesional.	RT 41, RW 11, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	35	orang	32900000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
994	[01.12.UMBULHARJO] Pelatihan Boga di wilayah	Di wilayah RT 50, RW 05, Kel. Muja Muju terdapat banyak komunitas atau kelompok UMKM, salah satunya kelompok catering yang menerima pesanan snack atau nasi box, menu yang harus bervariasi dan pemasaran yang belum luas, merupakan kendala bagi kelompok atau komunitas tersebut, pelatihan dan pendampingan boga serta pemasaran produk merupakan solusi yang dibutuhkan	RT 50, RW 05, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	25	orang	12000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
995	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 44, RW 11, Kel. Sorosutan , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 44, RW 11, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
996	[01.20.UMBULHARJO] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event	Di wilayah RT 40, RW 10, Kel. Sorosutan terdapat Karang Taruna yang Banyak memiliki Sumber Daya Manusia Produktif (Pemuda), namun belum memiliki kemampuan untuk mengorganisir event sebagai bentuk aktualisasi diri, untuk menghindari terciptanya kegiatan negatif, maka diperlukan Pembinaan untuk menciptakan dan dapat mengelola kegiatan yang bermanfaat, seperti Kompetisi Olahraga dan Kegiatan Kesenian pada hari Sumpah Pemuda untuk meningkatkan jiwa nasionalisme. dengan jumlah 100 orang peserta	RT 40, RW 10, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	OS	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
997	[13.06] Pembinaan Ormas	Terdapat Ormas IKPMDI Kota Yogyakarta yang bergerak di bidang kepemudaan dan sosial, untuk memaksimalkan peran sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan pelayanan sosial khusunya pemuda, maka memerlukan Pembinaan agar tercipta langkah taktis dan strategis dalam melakukan perannya sesuai koridor ormas.	Sekretariat: Jl. Gondosuli GK, IV No. 15 Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, 55225 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Sesi	20000000	-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

998	[13.07] Pembinaan Kelurahan Bersinar	Di Kelurahan Giwangan telah ditetapkan sebagai kelurahan BERSINAR, untuk memaksimalkan kembali dan memaksimalkan peran elemen masyarakat, maka membutuhkan pembinaan yang intensif, dengan harapan dapat berdampak kepada kelurahan-kelurahan di sekitar kelurahan tersebut, sehingga kedepannya dapat ditetapkan sebagai Kelurahan Bersinar.	Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20	Orang	3385000	-	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
999	[06.03] Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Di Wilayah RT 15, RW 05, Kel. Giwangan terdapat 10 masyarakat dengan usia produktif yang memiliki minat dan bakat namun belum maksimal, untuk bergerak di bidang usaha Cake dan Pastry, agar kemampuan masyarakat dapat dikelola dan diwadahi maka membutuhkan Pelatuhan Cake dan Pastry. agar dapat membuka usaha dan menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa bersaing.	RT 15, RW 05, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	63200000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1000	[06.03] Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Di Wilayah RT 25, RW 06, Tahunan terdapat 10 masyarakat dengan usia produktif yang memiliki minat dan bakat namun belum maksimal, untuk bergerak di bidang usaha Cake dan Pastry, agar kemampuan masyarakat dapat dikelola dan diwadahi maka membutuhkan Pelatuhan Cake dan Pastry. agar dapat membuka usaha dan menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa bersaing.	RT 25, RW 06, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	orang	63200000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1001	[06.03] Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Di Wilayah RT 42, RW 11, Kel. Sorosutan terdapat 10 masyarakat dengan usia produktif yang memiliki minat dan bakat namun belum maksimal, untuk bergerak di bidang usaha Cake dan Pastry, agar kemampuan masyarakat dapat dikelola dan diwadahi maka membutuhkan Pelatuhan Cake dan Pastry. agar dapat membuka usaha dan menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa bersaing.	RT 42, RW 11, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	63200000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1002	[06.03] Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Di Wilayah RT 23, RW 06, Kel. Purbayan terdapat 10 masyarakat dengan usia produktif yang memiliki minat dan bakat namun belum maksimal, untuk bergerak di bidang usaha Cake dan Pastry, agar kemampuan masyarakat dapat dikelola dan diwadahi maka membutuhkan Pelatuhan Cake dan Pastry. agar dapat membuka usaha dan menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa bersaing.	RT 23, RW 06, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	63200000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1003	[06.03] Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Di Wilayah RT 01, RW 01, Kel. Prenggan terdapat 10 masyarakat dengan usia produktif yang memiliki minat dan bakat namun belum maksimal, untuk bergerak di bidang usaha Cake dan Pastry, agar kemampuan masyarakat dapat dikelola dan diwadahi maka membutuhkan Pelatuhan Cake dan Pastry. agar dapat membuka usaha dan menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa bersaing.	RT 01, RW 01, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	63200000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1004	[06.03] Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Di Wilayah RT 04, RW 01, Kel. Rejowinangun terdapat 10 masyarakat dengan usia produktif yang memiliki minat dan bakat namun belum maksimal, untuk bergerak di bidang usaha Cake dan Pastry, agar kemampuan masyarakat dapat dikelola dan diwadahi maka membutuhkan Pelatuhan Cake dan Pastry. agar dapat membuka usaha dan menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa bersaing.	RT 04, RW 01, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	63200000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

1005	[06.03] Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Di Wilayah RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju terdapat 10 masyarakat dengan usia produktif yang memiliki minat dan bakat namun belum maksimal, untuk bergerak di bidang usaha Cake dan Pastry, agar kemampuan masyarakat dapat dikelola dan diwadahi maka membutuhkan Pelatuhan Cake dan Pastry. agar dapat membuka usaha dan menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa bersaing.	RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	63200000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1006	[06.03] Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Di Wilayah RT 12, RW 04, Kel. Semaki terdapat 10 masyarakat dengan usia produktif yang memiliki minat dan bakat namun belum maksimal, untuk bergerak di bidang usaha Cake dan Pastry, agar kemampuan masyarakat dapat dikelola dan diwadahi maka membutuhkan Pelatuhan Cake dan Pastry. agar dapat membuka usaha dan menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa bersaing.	RT 12, RW 04, Kel. Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	63200000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1007	[06.03] Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Di Wilayah RT 05, RW 01, Kel. Warungboto terdapat 10 masyarakat dengan usia produktif yang memiliki minat dan bakat namun belum maksimal, untuk bergerak di bidang usaha Cake dan Pastry, agar kemampuan masyarakat dapat dikelola dan diwadahi maka membutuhkan Pelatuhan Cake dan Pastry. agar dapat membuka usaha dan menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa bersaing.	RT 05, RW 01, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	63200000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1008	[06.03] Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Di Wilayah RT 30, RW 08, Kel. Pandeyan terdapat 10 masyarakat dengan usia produktif yang memiliki minat dan bakat namun belum maksimal, untuk bergerak di bidang usaha Cake dan Pastry, agar kemampuan masyarakat dapat dikelola dan diwadahi maka membutuhkan Pelatuhan Cake dan Pastry. agar dapat membuka usaha dan menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa bersaing.	RT 30, RW 08, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	63200000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1009	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Di Wilayah RT 15, RW 05, Kel. Giwangan Terdapat masyarakat dengan usia produktif yang sedang membutuhkan pekerjaan, dengan banyaknya kebutuhan jasa pengemudi mobil, maka membutuhkan pelatihan Stir Mobil dan Memiliki Sim A, agar memiliki persiapan secara profesional dan memiliki legalitas dalam berkendara.	RT 15, RW 05, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1010	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Di Wilayah RT 25, RW 06, Tahunan Terdapat masyarakat dengan usia produktif yang sedang membutuhkan pekerjaan, dengan banyaknya kebutuhan jasa pengemudi mobil, maka membutuhkan pelatihan Stir Mobil dan Memiliki Sim A, agar memiliki persiapan secara profesional dan memiliki legalitas dalam berkendara.	RT 25, RW 06, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1011	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Di Wilayah RT 42, RW 11, Kel. Sorosutan Terdapat masyarakat dengan usia produktif yang sedang membutuhkan pekerjaan, dengan banyaknya kebutuhan jasa pengemudi mobil, maka membutuhkan pelatihan Stir Mobil dan Memiliki Sim A, agar memiliki persiapan secara profesional dan memiliki legalitas dalam berkendara.	RT 42, RW 11, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

1012	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Di Wilayah RT 23, RW 06, Kel. Purbayan Terdapat masyarakat dengan usia produktif yang sedang membutuhkan pekerjaan, dengan banyaknya kebutuhan jasa pengemudi mobil, maka membutuhkan pelatihan Stir Mobil dan Memiliki Sim A, agar memiliki persiapan secara profesional dan memiliki legalitas dalam berkendara.	RT 23, RW 06, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1013	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Di Wilayah RT 01, RW 01, Kel. Prenggan Terdapat masyarakat dengan usia produktif yang sedang membutuhkan pekerjaan, dengan banyaknya kebutuhan jasa pengemudi mobil, maka membutuhkan pelatihan Stir Mobil dan Memiliki Sim A, agar memiliki persiapan secara profesional dan memiliki legalitas dalam berkendara.	RT 01, RW 01, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1014	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Di Wilayah RT 04, RW 01, Kel. Rejowinangun Terdapat masyarakat dengan usia produktif yang sedang membutuhkan pekerjaan, dengan banyaknya kebutuhan jasa pengemudi mobil, maka membutuhkan pelatihan Stir Mobil dan Memiliki Sim A, agar memiliki persiapan secara profesional dan memiliki legalitas dalam berkendara.	RT 04, RW 01, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1015	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Di Wilayah RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju Terdapat masyarakat dengan usia produktif yang sedang membutuhkan pekerjaan, dengan banyaknya kebutuhan jasa pengemudi mobil, maka membutuhkan pelatihan Stir Mobil dan Memiliki Sim A, agar memiliki persiapan secara profesional dan memiliki legalitas dalam berkendara.	RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1016	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Di Wilayah RT 12, RW 04, Kel. Semaki Terdapat masyarakat dengan usia produktif yang sedang membutuhkan pekerjaan, dengan banyaknya kebutuhan jasa pengemudi mobil, maka membutuhkan pelatihan Stir Mobil dan Memiliki Sim A, agar memiliki persiapan secara profesional dan memiliki legalitas dalam berkendara.	RT 12, RW 04, Kel. Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1017	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Di Wilayah RT 05, RW 01, Kel. Warungboto Terdapat masyarakat dengan usia produktif yang sedang membutuhkan pekerjaan, dengan banyaknya kebutuhan jasa pengemudi mobil, maka membutuhkan pelatihan Stir Mobil dan Memiliki Sim A, agar memiliki persiapan secara profesional dan memiliki legalitas dalam berkendara.	RT 05, RW 01, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1018	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Di Wilayah RT 30, RW 08, Kel. Pandeyan Terdapat masyarakat dengan usia produktif yang sedang membutuhkan pekerjaan, dengan banyaknya kebutuhan jasa pengemudi mobil, maka membutuhkan pelatihan Stir Mobil dan Memiliki Sim A, agar memiliki persiapan secara profesional dan memiliki legalitas dalam berkendara.	RT 30, RW 08, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1019	[12.01] Kesamaptaan Petugas Linmas	Di Wilayah RW 05, Kel. Giwangan terdapat 10 anggota Sat. Linmas aktif yang telah terdaftar, dikarenakan banyaknya kebutuhan Sat. Linmas dan perlunya Sat. Linmas memiliki skill/Keahlian, Kecermatan Pelaksanaan Tugas, dan Kondisi Fisik yang memadai, maka membutuhkan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas selama 10 kali Kegiatan, agar hasil dapat tercapai secara maksimal.	RW 05, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	10	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas

1020	[12.01] Kesamaptaan Petugas Linmas	Di Wilayah RW 06, Tahunan terdapat 10 anggota Sat. Linmas aktif yang telah terdaftar, dikarenakan banyaknya kebutuhan Sat. Linmas dan perlunya Sat. Linmas memiliki skill/Keahlian, Kecermatan Pelaksanaan Tugas, dan Kondisi Fisik yang memadai, maka membutuhkan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas selama 10 kali Kegiatan, agar hasil dapat tercapai secara maksimal.	RW 06, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	10	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1021	[12.01] Kesamaptaan Petugas Linmas	Di Wilayah RW 11, Kel. Sorosutan terdapat 10 anggota Sat. Linmas aktif yang telah terdaftar, dikarenakan banyaknya kebutuhan Sat. Linmas dan perlunya Sat. Linmas memiliki skill/Keahlian, Kecermatan Pelaksanaan Tugas, dan Kondisi Fisik yang memadai, maka membutuhkan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas selama 10 kali Kegiatan, agar hasil dapat tercapai secara maksimal.	RW 11, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	10	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1022	[12.01] Kesamaptaan Petugas Linmas	Di Wilayah RW 06, Kel. Purbayan terdapat 10 anggota Sat. Linmas aktif yang telah terdaftar, dikarenakan banyaknya kebutuhan Sat. Linmas dan perlunya Sat. Linmas memiliki skill/Keahlian, Kecermatan Pelaksanaan Tugas, dan Kondisi Fisik yang memadai, maka membutuhkan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas selama 10 kali Kegiatan, agar hasil dapat tercapai secara maksimal.	RW 06, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	10	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1023	[12.01] Kesamaptaan Petugas Linmas	Di Wilayah RW 01, Kel. Prenggan terdapat 10 anggota Sat. Linmas aktif yang telah terdaftar, dikarenakan banyaknya kebutuhan Sat. Linmas dan perlunya Sat. Linmas memiliki skill/Keahlian, Kecermatan Pelaksanaan Tugas, dan Kondisi Fisik yang memadai, maka membutuhkan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas selama 10 kali Kegiatan, agar hasil dapat tercapai secara maksimal.	RW 01, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	10	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1024	[12.01] Kesamaptaan Petugas Linmas	Di Wilayah RW 01, Kel. Rejowinangun terdapat 10 anggota Sat. Linmas aktif yang telah terdaftar, dikarenakan banyaknya kebutuhan Sat. Linmas dan perlunya Sat. Linmas memiliki skill/Keahlian, Kecermatan Pelaksanaan Tugas, dan Kondisi Fisik yang memadai, maka membutuhkan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas selama 10 kali Kegiatan, agar hasil dapat tercapai secara maksimal.	RW 01, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	10	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1025	[12.01] Kesamaptaan Petugas Linmas	Di Wilayah RW 06, Kel. Muja Muju terdapat 10 anggota Sat. Linmas aktif yang telah terdaftar, dikarenakan banyaknya kebutuhan Sat. Linmas dan perlunya Sat. Linmas memiliki skill/Keahlian, Kecermatan Pelaksanaan Tugas, dan Kondisi Fisik yang memadai, maka membutuhkan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas selama 10 kali Kegiatan, agar hasil dapat tercapai secara maksimal.	RW 06, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	10	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1026	[02.10.PAKUALAMAN] Cermin Tikungan di wilayah	Seringnya terjadi kecelakaan di dalam gang antar pengguna jalan. CONTACT. 089652127177	Gang Gambuh, RT 18 RW 04 Kampung Purwokinanti, Kelurahan Pakualaman, Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	4	unit	10000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

1027	[12.01] Kesamaptaan Petugas Linmas	Di Wilayah RW 04, Kel. Semaki terdapat 10 anggota Sat. Linmas aktif yang telah terdaftar, dikarenakan banyaknya kebutuhan Sat. Linmas dan perlunya Sat. Linmas memiliki skill/Keahlian, Kecermatan Pelaksanaan Tugas, dan Kondisi Fisik yang memadai, maka membutuhkan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas selama 10 kali Kegiatan, agar hasil dapat tercapai secara maksimal.	RW 04, Kel. Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	10	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1028	[12.01] Kesamaptaan Petugas Linmas	Di Wilayah RW 01, Kel. Warungboto terdapat 10 anggota Sat. Linmas aktif yang telah terdaftar, dikarenakan banyaknya kebutuhan Sat. Linmas dan perlunya Sat. Linmas memiliki skill/Keahlian, Kecermatan Pelaksanaan Tugas, dan Kondisi Fisik yang memadai, maka membutuhkan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas selama 10 kali Kegiatan, agar hasil dapat tercapai secara maksimal.	RW 01, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	10	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1029	[12.01] Kesamaptaan Petugas Linmas	Di Wilayah RW 08, Kel. Pandeyan terdapat 10 anggota Sat. Linmas aktif yang telah terdaftar, dikarenakan banyaknya kebutuhan Sat. Linmas dan perlunya Sat. Linmas memiliki skill/Keahlian, Kecermatan Pelaksanaan Tugas, dan Kondisi Fisik yang memadai, maka membutuhkan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas selama 10 kali Kegiatan, agar hasil dapat tercapai secara maksimal.	RW 08, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	10	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1030	[12.02] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Di Wilayah RW 05, Kel. Giwangan terdapat 6 Anggota Sat. Linmas yang telah terdaftar dan memiliki keaktifan, dengan beragam tugas Sat. Linmas dan tuntutan kemampuan lebih yang harus dimiliki, maka membutuhkan Bimbingan dan Pengembangan Kapasitas SDM dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam pelaksanaan tugas, dengan harapan, Pengetahun yang dimilki dapat diaplikasikan dan dapat ditularkan kepada Sat. Linmas di wilayahnya. dilakukan 6 kali kegiatan agar hasil dapat tercapai secara	RW 05, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	6	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1031	[12.02] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Di Wilayah RW 06, Tahunan terdapat 6 Anggota Sat. Linmas yang telah terdaftar dan memiliki keaktifan, dengan beragam tugas Sat. Linmas dan tuntutan kemampuan lebih yang harus dimiliki, maka membutuhkan Bimbingan dan Pengembangan Kapasitas SDM dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam pelaksanaan tugas, dengan harapan, Pengetahun yang dimilki dapat diaplikasikan dan dapat ditularkan kepada Sat. Linmas di wilayahnya. dilakukan 6 kali kegiatan agar hasil dapat tercapai secara maksim	RW 06, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	6	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1032	[07.01] Soisalisasi JPD	Masih kurangnya informasi ke masyarakat umum, tentang jaminan pendidikan dan beasiswa. cp. 082136424245	RW 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 kelurahan Purwokinanti Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	10	kali	100000000	-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

1033	[12.02] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Di Wilayah RW 11, Kel. Sorosutan terdapat 6 Anggota Sat. Linmas yang telah terdaftar dan memiliki keaktifan, dengan beragam tugas Sat. Linmas dan tuntutan kemampuan lebih yang harus dimiliki, maka membutuhkan Bimbingan dan Pengembangan Kapasitas SDM dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam pelaksanaan tugas, dengan harapan, Pengetahun yang dimilki dapat diaplikasikan dan dapat ditularkan kepada Sat. Linmas di wilayahnya. dilakukan 6 kali kegiatan agar hasil dapat tercapai maksim	RW 11, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	6	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1034	[12.02] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Di Wilayah RW 06, Kel. Purbayan terdapat 6 Anggota Sat. Linmas yang telah terdaftar dan memiliki keaktifan, dengan beragam tugas Sat. Linmas dan tuntutan kemampuan lebih yang harus dimiliki, maka membutuhkan Bimbingan dan Pengembangan Kapasitas SDM dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam pelaksanaan tugas, dengan harapan, Pengetahun yang dimilki dapat diaplikasikan dan dapat ditularkan kepada Sat. Linmas di wilayahnya. dilakukan 6 kali kegiatan agar hasil dapat tercapai	RW 06, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	6	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1035	[01.19.PAKUALAMAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan	Masih kurangnya pengenalan produk UMKM maupun budaya di wilayah.	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	1	kali	40000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1036	[12.02] Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Di Wilayah RW 01, Kel. Prenggan terdapat 6 Anggota Sat. Linmas yang telah terdaftar dan memiliki keaktifan, dengan beragam tugas Sat. Linmas dan tuntutan kemampuan lebih yang harus dimiliki, maka membutuhkan Bimbingan dan Pengembangan Kapasitas SDM dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam pelaksanaan tugas, dengan harapan, Pengetahun yang dimilki dapat diaplikasikan dan dapat ditularkan kepada Sat. Linmas di wilayahnya. dilakukan 6 kali kegiatan agar hasil dapat tercapai	RW 01, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	6	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1037	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 02, RW 01, Kel. Sorosutan , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 02, RW 01, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1038	[12.03] Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana Satlinmas	Di Wilayah RW 01, Kel. Rejowinangun Terdapat 2 Anggota Sat. Linmas yang telah terdaftar dan memiliki keaktifan, untuk mengantisipasi dan berjaga-jaga ketika terjadi bencana sewaktu-waktu, maka membutuhkan SDM Sat. Linmas yang tanggap bencana dan memiliki pengetahuan yang cakap untuk menanggulangi situasi bencana dan kebakaran. dilakukan 2 kali kegiatan agar hasil dapat tercapai secara maksimal.	RW 01, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	2	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1039	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 03, RW 01, Kel. Sorosutan , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 03, RW 01, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

1040	[12.03] Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana Satlinmas	Di Wilayah RW 06, Kel. Muja Muju Terdapat 2 Anggota Sat. Linmas yang telah terdaftar dan memiliki keaktifan, untuk mengantisipasi dan berjaga-jaga ketika terjadi bencana sewaktu-waktu, maka membutuhkan SDM Sat. Linmas yang tanggap bencana dan memiliki pengetahuan yang cakap untuk menanggulangi situasi bencana dan kebakaran. dilakukan 2 kali kegiatan agar hasil dapat tercapai secara maksimal.	RW 06, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	2	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1041	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 09, RW 03, Kel. Sorosutan , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 09, RW 03, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1042	[12.03] Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana Satlinmas	Di Wilayah RW 04, Kel. Semaki Terdapat 2 Anggota Sat. Linmas yang telah terdaftar dan memiliki keaktifan, untuk mengantisipasi dan berjaga-jaga ketika terjadi bencana sewaktu-waktu, maka membutuhkan SDM Sat. Linmas yang tanggap bencana dan memiliki pengetahuan yang cakap untuk menanggulangi situasi bencana dan kebakaran. dilakukan 2 kali kegiatan agar hasil dapat tercapai secara maksimal.	RW 04, Kel. Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	2	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1043	[04.01] Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Masih Banyaknya warga lansia yang membutuhkan uluran tangan dalam kehidupan sehari hari	Kelurahan purwokinanti, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	bulan	300000	-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
1044	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 15, RW 04, Kel. Sorosutan , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 15, RW 04, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1045	[12.03] Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana Satlinmas	Di Wilayah RW 01, Kel. Warungboto Terdapat 2 Anggota Sat. Linmas yang telah terdaftar dan memiliki keaktifan, untuk mengantisipasi dan berjaga-jaga ketika terjadi bencana sewaktu-waktu, maka membutuhkan SDM Sat. Linmas yang tanggap bencana dan memiliki pengetahuan yang cakap untuk menanggulangi situasi bencana dan kebakaran. dilakukan 2 kali kegiatan agar hasil dapat tercapai secara maksimal.	RW 01, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	2	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1046	[12.03] Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana Satlinmas	Di Wilayah RW 08, Kel. Pandeyan, Terdapat 2 Anggota Sat. Linmas yang telah terdaftar dan memiliki keaktifan, untuk mengantisipasi dan berjaga-jaga ketika terjadi bencana sewaktu-waktu, maka membutuhkan SDM Sat. Linmas yang tanggap bencana dan memiliki pengetahuan yang cakap untuk menanggulangi situasi bencana dan kebakaran. dilakukan 2 kali kegiatan agar hasil dapat tercapai secara maksimal.	RW 08, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	2	orang	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas

1047	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 20, RW 06, Kel. Sorosutan , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 20, RW 06, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1048	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 25, RW 07, Kel. Sorosutan , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 25, RW 07, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1049	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 28, RW 08, Kel. Sorosutan , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 28, RW 08, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1050	[16.01] Pemasaran produk berbasis Kemitraan dengan Toko Modern	Di Wilayah Muja Muju Terdapat Komunitas UMKM Jogja Membumi yang banyak anggotanya dan tersebar di Kota Yogyakarta, banyak anggotanya memiliki usaha olahan makanan Ringan, dan kue kering, namun terkendala dalam jaringan pemasaran yang terbatas dalam skala kecil di lingkungan, maka membutuhkan kemitraan dengan Toko Modern, sehingga dapat menjadi pemasok dan meningkatkan pendapatan masyarakat. dengan total anggota 40 yang mengolah aneka makanan ringan, dan 10 orang dengan bermacam-macam kue kering	Sekretariat: Ledhok Timoho RT 50 RW 05 muja-muju Umbulharjo yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	50	Orang	-	-	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
1051	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 33, RW 09, Kel. Sorosutan , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 33, RW 09, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1052	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 40, RW 10, Kel. Sorosutan , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 40, RW 10, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1053	[16.03] Pengembangan usaha mikro kecil dan penguatan manajemen berusaha yang berlegalitas dan naik kelas	Di Wilayah Pandeyan , terdapat komunitas UMKM Dapur Ngebul, namun terkendala dalam pengelolaan kapasitas manajemen dan pengetahuan tentang legalitas produk, maka membutuhkan Peningkatan pengetahuan berusaha dan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha, dengan total 30 orang yang membutuhkan pelatihan, dengan 8 kali sesi yang memuat Desiminasi Legalitas selama 5 kali, Peningkatan Kapasitas Usaha 2 kali, dan Sosialisai Fasilitasi Perijinan.	"Jl. Tegal Watu, Pandeyan, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161" , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	30	Orang	40000000	-	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

1054	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 41, RW 11, Kel. Sorosutan , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 41, RW 11, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1055	[16.04] Fasilitasi Ijin Usaha bagi Industri Kecil Menengah (IKM)	Di Wilayah Pandeyan , terdapat komunitas UMKM Dapur Ngebul, namun masih mengalami kendala dalam melakukan perijinan usaha untuk meningkatkan daya saing dan akses usaha yang mudah, maka membutuhkan Fasilitasi Ijin Usaha bagi Industri Kecil Menengah.	"Jl. Tegal Watu, Pandeyan, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55162" , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	25	Orang	11974800	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
1056	[16.07] Kegiatan Home Business Camp (HBC)	Di Wilayah RT 25, RW 06, Tahunan Terdapat beberapa pengusaha Mikro kecil yang memiliki usia produktif, dan telah memiliki jenis usaha pembuatan kue basah, makanan kering, dan aneka jajanan Pasar yang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, namun masih terkendala dalam minimnya pengelolaan manajemen dagangan yang semakin banyak pesanan. maka membutuhkan peningkatan kapasitas manajemen berusaha. dengan total 50 orang yang membutuhkan.	RT 25, RW 06, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	50	ukm	50000000	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
1057	[07.01] Soisalisasi JPD	Di wilayah Giwangan, Kemantren Umbulharjo terdapat banyak masyarakat kurang mampu belum memahami adanya jaminan Pendidikan dan Beasiswa bagi masyarakat. Maka membutuhkan Sosialisasi JPD untuk meningkatkan pengetahuan Jaminan Pendidikan dan Beasiswa agar masyarakat dapat membuka kemudahan akses pendidikan yang layak. diharapkan sosialisasi dilaksanakan secara luring, agar informasi yang tersampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.	Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	10	kali	100000000	-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
1058	[07.01] Soisalisasi JPD	Di wilayah Prenggan, Kemantren Kotagede terdapat banyak masyarakat kurang mampu belum memahami adanya jaminan Pendidikan dan Beasiswa bagi masyarakat. Maka membutuhkan Sosialisasi JPD untuk meningkatkan pengetahuan Jaminan Pendidikan dan Beasiswa agar masyarakat dapat membuka kemudahan akses pendidikan yang layak. diharapkan sosialisasi dilaksanakan secara luring, agar informasi yang tersampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.	Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	10	kali	100000000	-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
1059	[12.04] Pencanangan Kampung Panca Tertib	"Di Wilayah Kelurahan Giwangan Umbulharjo, terdapat Kampung Ponggalan, yang dapat diusulkan menjadi Kampung Panca Tertib, dalam rangka membangun komitmen mewujudkan ketertiban di masyarakat umum dan Ketrentaman Masyarakat, sehingga dapat memberikan ruang partisipasi yang maksimal pada masyarakat."	Kp. Ponggalan, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	1	Kampung	3135000	-	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1060	[12.05] Perawatan Kampung Panca Tertib	Di Wilayah Kelurahan Semaki terdapat Kp. Semaki Gedhe yang telah memiliki Butir Komitmen yang menjadi skala prioritas yaitu Tertib Sosial, maka untuk mengimplementasikan hal tersebut dan dapat menjadi lebih baik, dibutuhkan perawatan Kampung Panca Tertib di Kp. Semaki Gedhe	Kp. Semaki Gedhe, Kel. Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	1	Kampung	3680000	-	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1061	[13.01] FGD Pluralisme	"Terdapat organisasi Pemuda IKPMDI Kota Yogyakarta, yang menaungi pemuda dari berbagai suku bangsa yang berdomisili di Kota Yogyakarta, maka untuk merekatkan kebhinekaan, perlunya diadakan FGD Pluralisme dengan peserta 50 Orang Perwakilan Pemuda masyarakat lintas etnis."	Sekretariat: Jl. Gondosuli GK, IV No. 15 Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, 55225 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	kali	11000000	-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
1062	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 50, RW 05, Kel. Muja Muju , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 50, RW 05, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	3750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1063	[13.03] Sinau Pancasila	"Di Kelurahan Sorosutan terdapat 18 RW dan 70 RT, dengan banyaknya penduduk di dalamnya maka perlunya diarahkan kepada penguatan ideologi oleh perwakilan tokoh dengan perwakilan masing-masing RT/RW 2-3 Orang, dengan total peserta 250 Orang, terbagi dalam 5 kali kegiatan"	Kel. Sorosutan, Kem. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	kali	7000000	-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
1064	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 52, RW 05, Kel. Muja Muju , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 52, RW 05, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	3750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1065	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	3750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1066	[13.05] Pembinaan FKUB	Di Kelurahan Tahunan Memiliki kondisi masyarakat yang majemuk tingkat kerukunan umat beragama dan sikap saling toleransi sesama umat beragama, khususnya kristen dan islam yang masing-masing memiliki tempat beribadah di wilayah tersebut, dalam rangka memper erat hubungan sesama umat beragama maka dibutuhkan pembinaan, agar hubungan yang telah terbangun dapat berjalan berkelanjutan dan saling bermanfaat. dilaksanakan dengan jumlah 50 orang perwakilan dari masing-masing penganut agama, 2 sesi	Kel. Tahunan Kem. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	kali	3500000	-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
1067	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 25, RW 08, Kel. Muja Muju , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 25, RW 08, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	3750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

1068	[13.05] Pembinaan FKUB	Di Kelurahan Prenggan Memiliki kondisi masyarakat yang majemuk tingkat kerukunan umat beragama dan sikap saling toleransi sesama umat beragama, khususnya kristen dan islam yang masing-masing memiliki tempat beribadah di wilayah tersebut, dalam rangka memper erat hubungan sesama umat beragama maka dibutuhkan pembinaan, agar hubungan yang telah terbangun dapat berjalan berkelanjutan dan saling bermanfaat. dilaksanakan dengan jumlah 50 orang perwakilan dari masing-masing penganut agama, 2 sesi	RT.07/RW.02, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	kali	-	-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
1069	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 36, RW 10, Kel. Muja Muju , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 36, RW 10, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	3750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1070	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 39, RW 11, Kel. Muja Muju , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 39, RW 11, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	3750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1071	[01.06.KOTAGEDE] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah	Di wilayah Prenggan memiliki resiko bencana yang tinggi karena kepadatan bangunan yang tinggi, sehingga menyulitkan evakuasi dan penyelamatan ketika sewaktu-waktu terjadi bencana , maka dibutuhkan pelatihan penanganan bencana untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan akibat bencana. dengan jumlah 50 peserta.	Kp. Prenggan, Kel. Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	50	OS	6175000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1072	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 12, RW 05, Kel. Muja Muju , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 12, RW 05, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	3750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1073	[01.06.KOTAGEDE] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah	Di wilayah Purbayan memiliki resiko bencana yang tinggi karena jalur evakuasi yang sempit, sehingga menyulitkan evakuasi ketika sewaktu-waktu terjadi bencana , maka dibutuhkan pelatihan penanganan bencana untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan akibat bencana. dengan jumlah 50 peseta	Kp. Basen, Kel. Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	50	OS	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1074	[17.04] Pendampingan Kelompok Tani	"Di Wilayah Sorosutan terdapat Kelompok Tani yang beranggotakan 20 Orang, namun masih mengalami kendala dalam memanajemen hasil pertanian, proses pengembangan pemasaran, dan kurangnya teknologi dan inovasi pertanian. Maka membutuhkan fasilitasi pembinaan sebanyak 3 kali"	RT 27, RW 07 Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1	Kelompok	-	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

1075	[17.06] Pendampingan Kelompok Perikanan	Di Wilayah RT 15, RW 05, Kel. Giwangan Terdapat kelompok perikanan konsumsi yang berjumlah sebanyak 15 orang namun mengalami kendala dalam manajemen hasil perikanan, proses pengembangan pemasaran, dan kurangnya tengnologi dan inovasi perikanan, maka membutuhkan fasilitasi pendampingan dan sosialisasi sebanyak 1 kali	RT 15, RW 05, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1	Kelompok	-	-	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
1076	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 02, RW 01, Kel. Muja Muju , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 02, RW 01, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	3750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1077	[17.06] Pendampingan Kelompok Perikanan	Di Wilayah RT 12, RW 04, Kel. Semaki Terdapat kelompok perikanan hias yang berjumlah sebanyak 15 orang namun mengalami kendala dalam manajemen hasil perikanan, proses pengembangan pemasaran, dan kurangnya tengnologi dan inovasi perikanan, maka membutuhkan fasilitasi pendampingan dan sosialisasi sebanyak 1 kali	RT 12, RW 04, Kel. Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1	Kelompok	-	-	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
1078	[02.21.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Di Wilayah RT 18, RW 06, Kel. Muja Muju , tumpukan sampah masyarakat masih tercampur antara organik, non-organik, residu dan B3 sehingga membuat warga tidak dapat mengolah sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi komposter atau demplot maggot, maka membutuhkan tempat sampah terpilah agar memudahkan masyarakat melakukan pengolahan sampah lanjutan.	RT 18, RW 06, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Paket	3750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1079	[17.06] Pendampingan Kelompok Perikanan	Di Wilayah RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju Terdapat kelompok perikanan hias yang berjumlah sebanyak 15 orang namun mengalami kendala dalam manajemen hasil perikanan, proses pengembangan pemasaran, dan kurangnya tengnologi dan inovasi perikanan, maka membutuhkan fasilitasi pendampingan dan sosialisasi sebanyak 1 kali	RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1	Kelompok	-	-	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
1080	[02.10.UMBULHARJO] Cermin Tikungan di wilayah	Di Wilayah RT 06, RW 02, Kel. Giwangan terdapat 3 titik tikungan yang sering membahayakan bagi pengemudi roda 2 dan roda 4 dikarenakan kurangnya visibilitas bagi pengendara. Hal ini sering menyebabkan kecelakaan atau situasi berbahaya karena pengemudi tidak dapat melihat kendaraan atau objek yang datang dari arah berlawanan.	RT 06, RW 02, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	3	UNIT	24750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1081	[02.10.KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah	Di Wilayah RT 23, RW 06, Kel. PURBAYAN terdapat 3 titik tikungan yang sering membahayakan bagi pengemudi roda 2 dan roda 4 dikarenakan kurangnya visibilitas bagi pengendara. Hal ini sering menyebabkan kecelakaan atau situasi berbahaya karena pengemudi tidak dapat melihat kendaraan atau objek yang datang dari arah berlawanan.	RT 23, RW 06, Kel. PURBAYAN, Kec. KOTAGEDE, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	59	titik	152832500	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

1082	[02.12.KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di wilayah	Di daerah RT 23, RW 06, Kel. PURBAYAN terdapat kelompok masyarakat yang siap melakukan pengelolaan sampah yang menumpuk dan mengurangi kuantitas sampah yang akan dibuang ke TPS dengan memilah sampah organik dan anorganik, namun terkendala dalam pengolahan sampah yang telah dipilah, maka membutuhkan 1 Set alat pembuatan komposter .	RT 23, RW 06, Kel. PURBAYAN, Kec. KOTAGEDE, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	1	Set	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1083	[02.14.UMBULHARJO] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah	Di wilayah RT 42, RW 11, Kel. Sorosutan Terdapat sampah limbah dapur yang menumpuk, namun terkendala dalam pengolahan sampah menjadi barang yang bermanfaat, maka membutuhkan Starter kit Ecoenzym, dengan total 10 paket dikarenakan banyaknya limbah dapur yang menumpuk.	RT 42, RW 11, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	10	PAKET	434000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1084	[02.14.KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah	Di wilayah RT 23, RW 06, Kel. Purbayan Terdapat sampah limbah dapur yang menumpuk, namun terkendala dalam pengolahan sampah menjadi barang yang bermanfaat, maka membutuhkan Starter kit Ecoenzym, dengan total 10 paket dikarenakan banyaknya limbah dapur yang menumpuk.	RT 23, RW 06, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	1	Paket	15000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1085	[02.15.KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Keranjang Takakura di wilayah	Di Wilayah RT 01, RW 01, Kel. Prenggan Dengan lingkungan yang padat mengalami kendala dalam pengolahan sampah organik yang menumpuk, untuk menghindari bau yang menyengat karena padatnya pemukiman, maka membutuhkan Keranjang takakura agar dapat diolah menjadi kompos sehingga menjadi barang yang bermanfaat, dibutuhkan 10 paket Keranjang takakura.	RT 01, RW 01, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	10	Paket	2500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1086	[02.15.KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Keranjang Takakura di wilayah	Di Wilayah RT 04, RW 01, Kel. Rejowinangun Dengan lingkungan yang padat mengalami kendala dalam pengolahan sampah organik yang menumpuk, untuk menghindari bau yang menyengat karena padatnya pemukiman, maka membutuhkan Keranjang takakura agar dapat diolah menjadi kompos sehingga menjadi barang yang bermanfaat, dibutuhkan 10 paket Keranjang takakura.	RT 04, RW 01, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	10	PAKET	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1087	[02.15.UMBULHARJO] Pengolahan Sampah Organik : Keranjang Takakura di wilayah	Di Wilayah RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju Dengan lingkungan yang padat mengalami kendala dalam pengolahan sampah organik yang menumpuk, untuk menghindari bau yang menyengat karena padatnya pemukiman, maka membutuhkan Keranjang takakura agar dapat diolah menjadi kompos sehingga menjadi barang yang bermanfaat, dibutuhkan 10 paket Keranjang takakura.	RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	10	PAKET	2500000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1088	[02.05.UMBULHARJO] Pembangunan sumur resapan air hujan di wilayah	Di Wilayah RT 06, RW 02, Kel. Giwangan Terdapat genangan air atau banjir ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, dikarenakan adanya banyaknya permukaan yang kedap air seperti aspal paving dan beton, maka diperlukan Pembangunan Sumur Resaapan Air Hujan, gar tidak terjadi lagi genangan yang membahayakan masyarakat.	RT 06, RW 02, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Titik	19152000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

1089	[02.18.UMBULHARJO] Pengolahan Sampah Organik : Vermikompos di wilayah	Di wilayah RT 05, RW 01, Kel. Warungboto Terdapat lahan yang cukup luas untuk membuat tempat pengolahan sampah organik Vermikompos, untuk membantu mengurangi sampah yang dibawa ke TPS maka diperlukan pembuatan Vermikompos. Dibutuhkan 2 buah vermikompos.	RT 05, RW 01, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	2	Buah	15000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1090	[08.01] Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan	Di Kota Yogyakarta terdapat organisasi IKPMDI Kota Yogyakarta yang memiliki banyak anggota dengan berbagai latar belakang, untuk membangun sistem administrasi yang baik dan meningkatkan efektifitas organisasi sebagai wadah aspirasi pemuda maka dibutuhkan pelatihan dan pengelolaan lembaga, dengan jumlah perwakilan 100 orang	Sekretariat: Jl. Gondosuli GK, IV No. 15 Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, 55225 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	45	kelurahan	59145000	-	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
1091	[02.27.UMBULHARJO] Pemeliharaan Balai RT/RW/Kampung	Di wilayah Muja Muju RT 53 RW 06, terdapat Balai / Pendopo RT yang membutuhkan pemeliharaan guna menunjang produktifitas masyarakat dalam melakukan kegiatan. Pemeliharaan balai yang dibutuhkan adalah (1.) Penerangan yang kurang memadai, maka membutuhkan lampu berjumlah 4 buah. (2). Banyak Lampu hias yang sudah tidak berfungsi maka membutuhkan 34 Lampu hias untuk menunjang estetika. (3). Banyak tiang lampu hias yang sudah keropos maka memerlukan perawatan dengan jumlah 10 tiang. (4) Mainan luar	RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	PAKET	23890000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1092	[01.14.UMBULHARJO] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Di Wilayah RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju, terdapat banyak masyarakat usia produktif, karena adanya budidaya terdapat banyak tanaman jarak kepyar, belimbing, ketapang, mangga, jambu, Daun sereh, sirih, maka sangat sesuai dan ketika masyarakat membutuhkan pelatihan kerajinan, khususnya ecoprint.	RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	Orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1093	[01.18.UMBULHARJO] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	Di Wilayah Kp. Giwangan Terdapat Kelompok Bergodo, namun karena terbatasan biaya untuk membuat Kostum, maka diperlukannya pengadaan Kostum Bergodo yang layak untuk melestarikan Budaya di Wilayah.	Kp. Giwangan, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	30	PCS	15000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1094	[02.13.UMBULHARJO] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Di Wilayah RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju Terdapat terdapat kelompok bank sampah, namun belum dapat melakukan pengolahan sampah organik dengan efektif, maka diperlukannya Demplot magot agar pengolahan sampah organik bisa efektif dan dapat bernilai ekonomis.	RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Unit	15000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1095	[02.13.KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Di Wilayah RT 23, RW 06, Kel. Purbayan Terdapat terdapat kelompok bank sampah, namun belum dapat melakukan pengolahan sampah organik dengan efektif, maka diperlukannya Demplot magot agar pengolahan sampah organik bisa efektif dan dapat bernilai ekonomis.	RT 23, RW 06, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	1	Unit	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1096	[02.13.KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Di Wilayah RT 38, RW 08, Kel. Prenggan Terdapat terdapat kelompok bank sampah, namun belum dapat melakukan pengolahan sampah organik dengan efektif, maka diperlukannya Demplot magot agar pengolahan sampah organik bisa efektif dan dapat bernilai ekonomis.	RT 38, RW 08, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	10	paket	2500000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

1097	[02.27.UMBULHARJO] Pemeliharaan Balai RT/RW/Kampung	Di wilayah Giwangan, terdapat Balai RK Giwangan yang membutuhkan pemeliharaan guna menunjang produktifitas masyarakat dalam melakukan kegiatan. Pemeliharaan balai yang dibutuhkan adalah Cat dinding dikarenakan sudah mengelupas atau kusam dengan luas kira2 100m2, Penerangan yang kurang memadai, maka membutuhkan lampu berjumlah 5 buah. Sirkulasi Udara tidak teratur, maka membutuhkan Kipas Angin berjumlah 4 Buah. Dibutuhkan untuk mobilitas massa dalam rapat dan perkumpulan warga, maka agar suara da	Jl. Karawitan, Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55163 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	PAKET	8838000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1098	[02.01.UMBULHARJO] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Di Wilayah Kp Ponggalan Terdapat jalan rusak di lingkungan yang dijadikan jalan umum dan sering dijadikan jalan alternatif, dengan panjang 160m dengan lebar 3m, maka membutuhkan perbaikan jalan menggunakan paving block.	Jl. Manunggal, RT 16 / RW 06, Kp Ponggalan, Kel, Giwangan, Umbulharjo , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	480	m2	177840000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1099	[02.01.UMBULHARJO] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Di Wilayah Gg. Sosial, Jl. Soga, Tahunan Terdapat jalan rusak di lingkungan yang dijadikan jalan umum dan sering dijadikan jalan alternatif, dengan panjang 100m dengan lebar 2,5m, maka membutuhkan perbaikan jalan menggunakan paving block.	Gg. Sosial, Jl. Soga, Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	250	m2	92625000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1100	[02.01.UMBULHARJO] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Di Wilayah Gg. Mufakat, Jl. Soga, Tahunan Terdapat jalan rusak di lingkungan yang dijadikan jalan umum dan sering dijadikan jalan alternatif, dengan panjang 100m dengan lebar 2m, maka membutuhkan perbaikan jalan menggunakan paving block.	Gg. Mufakat, Jl. Soga, Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	200	m2	74100000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1101	[02.01.UMBULHARJO] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Di Wilayah Gg. Buntu, Jl. Soga, Tahunan Terdapat jalan rusak di lingkungan yang dijadikan jalan umum dan sering dijadikan jalan alternatif, dengan panjang 80m dengan lebar 4m, maka membutuhkan perbaikan jalan menggunakan paving block.	Gg. Buntu, Jl. Soga, Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	320	m2	118560000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1102	[01.07.UMBULHARJO] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran Kognitif di wilayah	Di wilayah Tahunan terdapat banyak siswa-siswi yang membutuhkan jam pelajaran tambahan untuk meingkatkan kualitas pengetahuan siswa dan siswi agar lebih berprestasi, maka perlu diadakan Guru Les Mata Pelajaran tambahan di Kelurahan tahunan dengan Mengampu total siswa siswi 90 orang dan 10 orang di setiap RW. dalam 2 kali pertemuan per RW dengan membutuhkan fasilitas konsumsi per sesi. dan membutuhkan pelatih dalam 18 Kali Pertemuan, rincian 10 OH per sesi peserta dan 1 OH pelatih per sesi dengan	RT 25, RW 06, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	11	OH	3816000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1103	[01.08.UMBULHARJO] Pelaksanaan Les Non Kognitif di wilayah	Di wilayah Tahunan terdapat banyak siswa-siswi yang membutuhkan jam pelajaran tambahan untuk meingkatkan kualitas pengetahuan siswa dan siswi agar lebih berprestasi, maka perlu diadakan Guru Les Mata Pelajaran tambahan di Kelurahan tahunan dengan Mengampu total siswa siswi 90 orang dan 10 orang di setiap RW. dalam 2 kali pertemuan per RW dengan membutuhkan fasilitas konsumsi per sesi. dan membutuhkan pelatih dalam 18 Kali Pertemuan, rincian 10 OH per sesi peserta dan 1 OH pelatih per sesi dengan	RT 40, RW 10, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	11	OH	5400000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

1104	[02.13.UMBULHARJO] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Di Wilayah RT 25, RW 06, Kel. Tahunan Terdapat terdapat kelompok bank sampah, namun belum dapat melakukan pengolahan sampah organik dengan efektif, maka diperlukannya Demplot magot agar pengolahan sampah organik bisa efektif dan dapat bernilai ekonomis.	RT 25, RW 06, Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	1	Unit	15000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1105	[01.20.UMBULHARJO] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event	Di wilayah RT 40, RW 10, Kel. Sorosutan terdapat Karang Taruna yang Banyak memiliki Sumber Daya Manusia Produktif (Pemuda), namun belum memiliki kemampuan untuk mengorganisir event sebagai bentuk aktualisasi diri, untuk menghindari terciptanya kegiatan negatif, maka diperlukan Pembinaan untuk menciptakan dan dapat mengelola kegiatan yang bermanfaat, seperti Kompetisi Olahraga dan Kegiatan Kesenian pada hari Sumpah Pemuda untuk meningkatkan jiwa nasionalisme. dengan jumlah 100 orang peserta	RT 40, RW 10, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	100	OS	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1106	[01.07.UMBULHARJO] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran Kognitif di wilayah	Di wilayah Sorosutan terdapat banyak masyarakat usia produktif yang membutuhkan jam pelajaran tambahan untuk meingkatkan Soft skill di bidang Musik siswa dan siswi agar lebih berprestasi, maka perlu diadakan Guru Les Mata Pelajaran tambahan di Kelurahan tahunan dengan mengampu total siswa siswi 90 orang dan 10 orang di setiap RW. dalam 2 kali pertemuan per RW dengan membutuhkan fasilitas konsumsi per sesi. dengan rincian total 180 Orang Peserta semua sesi, dan 18 Pelatih dalam semua sesi,	RT 47, RW 12, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	11	OH	5400000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1107	[01.07.UMBULHARJO] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran Kognitif di wilayah	Di wilayah Sorosutan terdapat banyak siswa-siswi yang membutuhkan jam pelajaran tambahan untuk meingkatkan kualitas pengetahuan siswa dan siswi agar lebih berprestasi, maka perlu diadakan Guru Les Mata Pelajaran Tambahan di Kelurahan tahunan dengan mengampu total siswa siswi 90 orang dan 10 orang di setiap RW. dalam 2 kali pertemuan per RW dengan membutuhkan fasilitas konsumsi per sesi. dan membutuhkan pelatih dalam 18 Kali Pertemuan, rincian 10 OH per sesi peserta dan 1 OH pelatih per sesi	RT 43, RW 11, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	11	OH	5400000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1108	[01.02.UMBULHARJO] Senam Lansia di wilayah	Di wilayah RT 42, RW 11, Kel. Sorosutan terdapat 50 Lansia mengalami penurunan Kualitas Kesehatan dikarenakan kurangnya aktivitas, sehingga membutuhkan kegiatan Senam untuk menunjang kualitas kesehatan lansia.	RT 42, RW 11, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	OS	550000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1109	[01.02.KOTAGEDE] Senam Lansia di wilayah	Di wilayah RT 23, RW 06, Kel. Purbayan terdapat 50 Lansia mengalami penurunan Kualitas Kesehatan dikarenakan kurangnya aktivitas, sehingga membutuhkan kegiatan Senam untuk menunjang kualitas kesehatan lansia.	RT 23, RW 06, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	50	OS	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1110	[01.02.KOTAGEDE] Senam Lansia di wilayah	Di wilayah RT 01, RW 01, Kel. Prenggan terdapat 50 Lansia mengalami penurunan Kualitas Kesehatan dikarenakan kurangnya aktivitas, sehingga membutuhkan kegiatan Senam untuk menunjang kualitas kesehatan lansia.	RT 01, RW 01, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	50	OS	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

1111	[02.22.KOTAGEDE] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah: Pengadaan Tas Pilah	Di Wilayah RT 27, RW 06, Kel. Purbayan terdapat bank sampah yang banyak masyarakat datang untuk mengelumpukkan sampahnya, namun terkendala peralatan untuk membawa sampah tersebut, maka dengan banyaknya varian sampah sangat diperlukan tas Pilah untuk memudahkan masyarakat dalam mengelompokkan sampah dan menyerahkannya ke Bank Sampah	RT 27, RW 06, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	100	Set	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1112	[01.02.KOTAGEDE] Senam Lansia di wilayah	Di wilayah RT 04, RW 01, Kel. Rejowinangun terdapat 50 Lansia mengalami penurunan Kualitas Kesehatan dikarenakan kurangnya aktivitas, sehingga membutuhkan kegiatan Senam untuk menunjang kualitas kesehatan lansia.	RT 04, RW 01, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	50	OS	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1113	[01.02.UMBULHARJO] Senam Lansia di wilayah	Di wilayah RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju terdapat 50 Lansia mengalami penurunan Kualitas Kesehatan dikarenakan kurangnya aktivitas, sehingga membutuhkan kegiatan Senam untuk menunjang kualitas kesehatan lansia.	RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	OS	6370000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1114	[02.22.UMBULHARJO] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah: Pengadaan Tas Pilah	Di Wilayah RT 30, RW 08, Kel. Pandeyan terdapat bank sampah yang banyak masyarakat datang untuk mengelumpukkan sampahnya, namun terkendala peralatan untuk membawa sampah tersebut, maka dengan banyaknya varian sampah sangat diperlukan tas Pilah untuk memudahkan masyarakat dalam mengelompokkan sampah dan menyerahkannya ke Bank Sampah	RT 30, RW 08, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	100	Set	1750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1115	[01.02.UMBULHARJO] Senam Lansia di wilayah	Di wilayah RT 12, RW 04, Kel. Semaki terdapat 50 Lansia mengalami penurunan Kualitas Kesehatan dikarenakan kurangnya aktivitas, sehingga membutuhkan kegiatan Senam untuk menunjang kualitas kesehatan lansia.	RT 12, RW 04, Kel. Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	50	OS	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1116	[02.02.TEGALREJO] Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah		DEMAKAN RT 27 RW 07, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Tegalrejo	Kemantren Tegalrejo	2	UNIT	20000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1117	[03.19] Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB Kurang, dan ballita BB tidak naik	Pemenuhan Gizi Lansia	Singojayan RW 01 Kecamatan Wirobrajan Bp Santo 087738790197 , Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Kelompok	924000	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1118	[02.01.PAKUALAMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Jalan rusak berlubang berupa Corblok	Kampung Jagalan Beji = 239 m^2 (Sekitar Talud RT 09 RW 02 = 100 m^2, RW 03 = 139 m^2) Kelurahan Purwokainanti Kecamatan Pakualaman , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	239	Meter	78000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1119	[02.01.PAKUALAMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Jalan rusak berlubang berupa Corblok	Kampung Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	439	Meter	143000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1120	[02.01.PAKUALAMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Jalan rusak berlubang berupa Corblok	Kampung Kepatihan Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	443	Meter	145000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1121	[02.21.PAKUALAMAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah)	Terbatasnya tempat daur ulang botol sampah	10 RW di Kelurahan Purwokinanti Kecamatan Pakualaman Bp Ferrydian 087785672014, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	10	titik	10000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1122	[13.01] FGD Pluralisme	Untuk memantapkan kesadaran masyarakat sekitar terkait Pentingnya Pluralisme di Lingkungan Maksyarakat	Kampung Patangpuluhan dan Kampung Bugisan Kelurahan Patangpuluhan Bp Suparjiyono 081215174776, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	kali	11000000	-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

1123	[01.14.WIROBRAJAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Pelatihan kepada kelompok masyarakat terkait Daur ulang sampah khususnya Plastik	RW 09 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan Bp Indra 082334305192, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	25	orang	6880000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1124	[02.19.PAKUALAMAN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan.	Terbatasnya tempat daur ulang botol sampah	10 RW di Kelurahan Purwokinanti Kecamatan Pakualaman Bp Ferrydian 087785672014, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman	10	titik	15000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1125	[02.10.MERGANGSAN] Cermin Tikungan di wilayah	transportasi supaya aman	Surokarsan MG II RW 07 Wirogunan Mergangsan 08195573639 a.n. Nur Fauziah Ali , Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	3	Unit	2750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1126	[02.01.WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Perbaikan konblok...Ada 2 bagian,bagian pertama panjang=32m Lebar=4,5m luas=144m trus bagian yg ke 2 Panjang=27m Lebar=8m Luas=216m trus total keseluruhan 144m + 216m=360m	Depan polsek wirobrajan..mardiyanto +62 817-5451-058, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	360	meter	139230000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1127	[02.04.MERGANGSAN] Pemeliharaan CCTV di wilayah	rawan kejahatan	Surokarsan MG II RW 07 Wirogunan Mergangsan 08195573639 Nur Fauziah Ali , Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	7	Unit	21000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1128	[22.01] Pembangunan Talud Sungai	perlu talud	Rt 12 Rw 02 Suryowijayan , Gedongkiwo , Mantrijeron 08122726415 wibowo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	400	meter	4500000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
1129	[02.03.MERGANGSAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	pos ronda rusak	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	1	Unit	12750000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1130	[02.01.GONDOMANAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	pemasangan konblok	RT 17 RW 06 Sayidan...yuli +62 896-2268-8221, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondomanan	Kemantren Gondomanan	100	m2	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1131	[24.03] Peningkatan Jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	"Pagar Pengaman SAH RT.18 Jl Karangmiri (panjang 146 meter)"	Pagar Pengaman SAH RT.18 RW 06 Kelurahan Giwangan Kemantren Umbulharjo (Belakang pondok bebakaran - pintu air RT 18), Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	146	m2	1500000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
1132	[02.01.WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	perbaikan konblok	depan polsek wirobrajan...mardiyanto +62 817-5451-058, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	360	m	139230000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1133	[01.12.WIROBRAJAN] Pelatihan Boga di wilayah	pelatihan memasak	Bu Riyanto +62 815-7895-9400, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan	25	orang	9946500	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1134	[01.12.GONDOMANAN] Pelatihan Boga di wilayah	kelompok rumah bakery gondomanan 1.mengembangkan ketrampilan mengolah makanan 2.menambah pengetahuan manajemen usaha pangan 3.menambah pendapatan ekonomi keluarga	kelompok rumah bakery gondomanan prawirodirjan GM 2/843 rt 59 rw 18, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gondomanan	Kemantren Gondomanan	20	orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1135	[01.19.KOTAGEDE] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan	Fasilitasi Gelar Potensi	Rejowinangun RW , Kotagede, hendisy +62 813-2950-0813, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	100	orang	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1136	[01.18.KOTAGEDE] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	Fasilitasi Pengadaan kostum Adat Jawa	Rejowinangun RW 05 , Kotagede, Aan Isi +62 823-2341-0595, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	52	set	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1137	[01.18.KOTAGEDE] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	Fasilitasi Kostum Adat Jawa	Gedongan RW 03, Purbayan , KotaGede, hendisy +62 813-2950-0813, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	32	kostum	30000000	-	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan

1138	[01.18.KOTAGEDE] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	Fasilitasi Pengadaan Kostum Busana Adat Jawa	Prenggan RW 03, Kotagede, hendisy +62 813-2950-0813, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	30	stel	15000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1139	[01.17.KOTAGEDE] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah	Fasilitasi Upacara Adat	Prenggan RW 3 , Kotagede, hendisy +62 813-2950-0813, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede	150	orang	36905000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1140	[01.18.UMBULHARJO] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	Fasilitasi Pengadaan Kostum Busana Adat Jawa,	RKB Warungboto, Glagah Sari Rw 05, Warungboto Umbulharjo, Dodik Septian Putranto +62 895-4218-40549, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	30	orang	45000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1141	[21.01] Pembangunan gedung milik daerah	Pembangunan Balai RK Kampung mbasen Purbayan Kotagede	Balai RK Kampung mbasen Purbayan Kotagede CP . 081328884649 (Pak Jumianto), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Dokumen	60000000	Non Belanja Transfer	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1142	[10.03] Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	perlunya meningkatkan seluk beluk pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran penduduk	Jalan Kusuma, RW 17 kelurahan baciro Gondokusuman (Andy Rendra 0817468878), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30	orang	3150000	-	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
1143	[11.02] Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Pentingnya penyuluhan tentang penanganan kebakaran supaya masyarakat mempunyai gambaran penanggulangan terhadap bencana kebakaran yang bisa terjadi kapan saja	Jalan Bausasran RW 11 Kelurahan bausasran Danurejan (Andy Rendra 0817468878), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	30	kegiatan	7756000	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
1144	[02.06.GEDONGTENGEN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	Penambahan pot dan tanaman di pergola di 5 pergola baru	Kampung Jlagran RT 7 dan 9 Rw 02 PIC. Pak Panut (+62 877-3971-8088), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	50	unit	5400000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1145	[02.01.GEDONGTENGEN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Perbaikan jalan gang untuk diganti paving blok tiap jalan kampung gang Sosrowijayan di RT 7 dan RT 8 RW 02	Kampung Sosrowijayan RT 7 dan RT 8 RW 02 PIC. Pak Edi (62 815-6822-7692), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	250	m2	133227500	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1146	[02.25.DANUREJAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas ≤ 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda)	Pengadaan alat pencacah plastik.	RT 59 RW 16 Minggiran, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Titi Pratistiyani ; 082147139186., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Mantrijeron	3	unit	39000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1147	[06.04] Pelatihan Barista tingkat kota	Penanganan renmaja kecanduan dan kenakalan secara khusus	Kal. Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Raditya Gupala ; 085236144882, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	154000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1148	[02.10.MANTRIJERON] Cermin Tikungan di wilayah	Penyikapan rawan laka pada perempatan	Kampung Mantrijeron, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta. A.n. Yogo Hutomo ; 089673865757., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	8	unit	22000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1149	[01.18.MANTRIJERON] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	Revitalisasi bregada, kosstum dan perlengkapan	Mantrijeron, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta. A.n. Yogo Hutomo ; 089673865757., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	50	orang	125000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1150	[23.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi	Instalasi sambungan SAL ke rumah-rumah demi penurunan bakteri koli sumur ; Dan jadi prasarana penunjang perikanan, pertanian, peternakan kota ; mengurangi pekerjaan pelumpuran karena masukan air bertambah.	RT 74 RW 16 Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Bambang Erwanto ; 081775160381, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10	titik	163000000	-	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
1151	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Pelatihan stir mobil	RW 16 Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Yulius Widyartoro Dewa, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

1152	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Pelatihan stir mobil	Kampung Suryodiningratan, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Raditya Gupala ;, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1153	[06.02] Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Pelatihan stir mobil	Kampung Ngadinegaran, Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Rachmat Abadi ; 0895410557616, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1154	[06.07] Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Perlunya onlineshop untuk pemasaran produk usaha mikro dan kecil lokal.	Kemantren Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Raditya Gupala ; 085236144882., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Orang	44000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1155	[22.01] Pembangunan Talud Sungai	Pembangunan talud sungai di kawasan permukiman rawan longsor.	RW 09 Suryowijayan, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Bambang Lesmono ; 085643083378, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	meter	1500000000	-	Rehabilitasi Tanggul Sungai
1156	[24.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Pengaspalan jalan	Kampung Prawirotaman, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta. A.n. Risdianto ; 081226393383., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	meter	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
1157	[17.03] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pelatihan budidaya tanaman hias untuk supplay BAJ dan pasar online.	RW 18 Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. 085729239924, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	7	Orang	-	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
1158	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Perlunya kostum bregada kampung untuk menunjang kegiatan budaya kampung.	Kampung Keparakan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta. A.n. Combat ; 081389635758., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	Orang	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
1159	[01.18.UMBULHARJO] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	Fasilitasi Seragam Bergodo	Umbulharjo Tahunan Celeban RW 007 , Indhitambardi +62 896-8725-7701, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	30	orang	24000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1160	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	SAH rusak	Jalan Nagan Lor , Kalurahan Patehan , Kecamatan Kraton kontak Bp Taryoko Ketua LPMK Kalurahan Patehan HP 0817274553, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	500	meter	3000000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
1161	[01.02.UMBULHARJO] Senam Lansia di wilayah	Fasilitasi Senam , Snack dan Pelatihan Instruktur Senam	Umbulharjo Tahunan Celeban RW 007, Indhitambardi +62 896-8725-7701, Kota Yogyakarta", Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	30	orang	4950000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1162	[02.08.UMBULHARJO] Pemeliharaan SAH di wilayah	Fasilitasi Perbaikan Pembuangan saluran air limbah	Umbulharjo Tahunan Celeban RW 07, Om Niky +62 852-2588-9050, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	100	meter	57000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1163	[24.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018	Jalan rusak	Jalan Nagan Kulon - Jalan Nagan kidul - Jalan Patehan Kidul kontak Bp Taryoko Ketua LPMK Kalurahan Patehan HP 0817274553,, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1500	meter	-	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
1164	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembuatan SAH	RW 16, Kalurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Kontak Ketua RW 16 Bp Sarmidi, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	40	meter	200000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

1165	[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	menampilkan potensi	RW16 Kalurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Kontak Bu Yuli, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	kampung wisata	735000000	-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
1166	[01.17.UMBULHARJO] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah	Merti Kampung Celeban	Celeban, RW 07, Tahunan,Umbulharjo,Yogyakarta rfl +62 858-7604-6503, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Umbulharjo	Kemantren Umbulharjo	100	orang	14250000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1167	[01.18.TEGALREJO] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	BELUM ADA COSTUM	Kampung Demakan RT 25 RW 07 HP 081328055925, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Tegalrejo	Kemantren Tegalrejo	30	Pcs	15000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1168	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	RTLH Ibu Kasro	RT 48 RW 11 Gampingan Pakuncen Wirobrajan Pak Wasis No. Hp : 0857-1081-5881, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit Bangunan	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
1169	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah tidak layak huni an David Margono	Singojayan no 92 P Mardi 085710813881, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	unit rumah	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
1170	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah tidak layak Huni Roni Kiswanto	Singojayan no85 Pak Mardi 085710815881, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	unit rumah	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
1171	[01.09.KRATON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah	Untuk pemuda kampung ada agenda tentang budaya supaya tetap lestari dan selama ini menggunakan dana dari iuran warga mohon berkenan untuk bisa difasilitasi.	Kampung Mangunegaran RW 14,15,16,17,18 PIC. Pak Frans (+62 812-2037-0889), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	60	orang	3960000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1172	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembangunan saluran air hujan yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Mangkukusuman RT. 05, 06 RW. 02 Baciro Gondokusuman CP.Pak Heri 081336381557, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	titik	600000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
1173	[01.11.KRATON] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah	Di wilayah kami ada warung kopi dan grup musik dan pembuatan NIK Kesenian, mohon kami difasilitasi supaya kami berkembang.	Kampung Mergangsang RW 15, 16,17 PIC. Pak Frans (+62 812-2037-0889), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Kraton	Kemantren Kraton	40	orang	4790000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1174	[14.03] Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Perlu adanya pembinaan bagi kelompok, Sanggar maupun Oraganisasi Budaya agar tetap ada	Tegallempuyangan Dn 3/21 RT 007 RW 002, Bausasran Danurejan Cp. Eko TL 088226557880, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	kelompok	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
1175	[15.02] Kangen Jogja / menampilkan seluruh potensi wisata	Perlu mengangkat potensi yang ada di wilayah baik itu potensi seni atraksi, wisata, kuliner, kerajinan dari tingkat Kemantren yang akan diangkat dan dikemas dalam bentuk tampilan pementasan sehingga menjadi sajian yang bisa menarik wisatawan dalam dan luar negeri	Bausasran DN 3/821 RT.35 RW.009 , Bausasran , Danurejan Moh Ezperanza 08156851098 , Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	paket	735000000	-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
1176	[03.23] Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang ber KTP Yogyakarta melalui program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD)	Untuk yang belum pernah dapatKIS mohon diperhatikan.	Kampung Mangunegaran RW 14,15,16,17,18 PIC (+62 812-2037-0889) Pak Frans, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	25	orang/tahun	11340000	-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1177	[24.08] Pengadaan dan Pemeliharaan Marka Jalan Perkotaan	Pengadaan Rubber Speed Bump Pengadaan dan pemeliharaan marka jalan perkotaan	Kepuh RT 46 RW 12 Klitren Gondokusuman Cp. Sunaryo 081802743797, Kota Yogyakarta", Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	1	titik	5600000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1178	[24.08] Pengadaan dan Pemeliharaan Marka Jalan Perkotaan	Pengadaan Rubber Speed Bump Pengadaan dan pemeliharaan marka jalan perkotaan	Kepuh RT 47 Rw. 12 Klitren Gondokusuman Cp. Sunaryo 081802743797, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	1	titik	5600000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

1179	[25.02] Pemeliharaan Talud Permukiman	Renovasi Bak penampungan air	Iromejan RT 27 RW 07 Klitren Gondokusuman Cp. Aris Kusbiantoro 081285329325, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	18	m3	54000000	-	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
1180	[01.13.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Banyaknya warga yang membutuhkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan ketrampilan dan perekonomian kedepannya	MacananDN 3/ 417 RT.23/006 Heriyani Harry Moeryanto 085930245828 Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	50	orang	20000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1181	[13.05] Pembinaan FKUB	Di Kelurahan Muja Muju Memiliki kondisi masyarakat yang majemuk, selain itu tingkat kerukunan umat beragama dan sikap saling toleransi sesama umat beragama, khususnya kristen dan islam yang masing-masing memiliki tempat beribadah di wilayah tersebut, dalam rangka memper erat hubungan sesama umat beragama maka dibutuhkan pembinaan, agar hubungan yang telah terbangun dapat berjalan berkelanjutan dan saling bermanfaat. dilaksanakan dengan jumlah 50 orang perwakilan , dalam 2 sesi	Kel. Muja Muju, Kem. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	kali	-	-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
1182	[02.01.MERGANGSAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Banyak jalan paving block di kampung Pujokusuman y ang sudah rusak tidak beraturan, dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan	Utara masjid Darussalam Pujokusuman RT 21 RW 05 (barat ke timur melingkar ke sd. utara), Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Mergangsan	Kemantren Mergangsan	305	meter persegi	117327400	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1183	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Pentingnya keselamatan dan kesehatan bagi penghuni untuk diperbaiki rumahnya Aci, Keramik, dan Plester	(Rumah Bapak EKO ISHARYANTO) Jagalan Ledoksari PA I/79, RT 05 RW 01, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
1184	[14.01] Gelar Upacara Adat	Pentingnya mengadakan Gelar Upacara Adat Caos Dhahar Mbah Kyai Jogo di Kampung Jagalan Ledoksari yang diselenggarakan setiap tahunnya sebelum Bulan Puasa/Ramadhan	Kelurahan Purwokinanti (Jl. Harjowinatan No.19) Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	event	-	-	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
1185	[02.26.NGAMPILAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan dan signage lainnya)	pembangunan gapura 62 857-9933-4539	rt 8 rw 2 ngampilan AAN 62 857-9933-4539, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Ngampilan	Kemantren Ngampilan	1	unit	30000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1186	[25.03] Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Ibu Ari Asih atapnya sudah bocor dan dindingnya masih bambu,perlu perbaikan	Keparakan Lor MGI/559 Rt 27 Rw 07 Kelurahan Keparakan Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Unit	20000000	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
1187	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Air Hujan menggenang di sepanjang jalan dan masuk di pekarangan warga	Sapen Gang Andong Rt 23 Rw 07 Kelurahan Demangan Kemantren Gondokusuman CP 081578630617, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	55	M2	400000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
1188	[24.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Air menggenang di jalan dan sampai masuk ke pekarangan penduduk	Sentul Rejo Rt 31 Rw 09 Kelurahan Wirogunan Kemantren Mergangsan CP 082134204195, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	700	M2	4500000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

RM. SINARBIYATNUJANAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 9/KEP/DPRD/III/2025
TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TERHADAP RENCANA KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KOTA HLUBOKA NAD VLTAVOU, REPUBLIK CEKO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa rencana kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Hluboka Nad Vltavou, Republik Ceko sebagaimana tindak lanjut Pernyataan Kehendak Kerja Sama (*Letter of Intens/LoI*) antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Hluboka Nad Vltavou, Republik Ceko tentang Pembentukan Kerja Sama Kota Bersaudara yang telah ditandatangani pada 20 Mei 2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, maka perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta untuk terlaksananya kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Hluboka Nad Vltavou, Republik Ceko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rencana Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, Republik

Indonesia dan Pemerintah Kota Hluboka Nad Vltavou, Republik Ceko;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Daerah;

7. Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : 1. Pernyataan Kehendak Kerja Sama (*Letter of Intens/ LoI*) antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Hluboka Nad Vltavou, Republik Ceko;

2. Surat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 01/KOMISI B/III/2025 Perihal Persetujuan Kerjasama Kota Bersaudara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rencana Kerja Sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Hluboka Nad Vltavou, Republik Ceko.

KEDUA : Rencana Kerja Sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Hluboka Nad Vltavou, Republik Ceko dengan ruang lingkup promosi pariwisata, pertukaran dan pertunjukan budaya, pengembangan usaha kecil dan menengah dan Pendidikan dan kepemudaan.

KETIGA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai dasar untuk proses persetujuan lebih lanjut ke Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Maret 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

RM. SINARBIYATNUJANAT

2025

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta

8